PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2026



BAPPERIDA

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KAB. NATUNA



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan perubahan estimasi pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menyebabkan perubahan terhadap prioritas pembangunan program dan kegiatan Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026;

Menginggat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 438);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengmbilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 melalui proses sebagai berikut:
   a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
   b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (dua) tahun berkenaan;
   c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
   d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
   e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN;

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
f. BAB VI PENUTUP.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2026



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 492

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang selaras dengan sasaran RPJMD, prioritas pembangunan nasional, serta arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunannya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang terintegrasi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tema pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah **""Akselerasi Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah, Pemerataan Pembangunan Dan Konektivitas Antar Pulau, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya".** Selaras dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna senantiasa berupaya mewujudkan pengelolaan dan pengembangan potensi keunggulan ekonomi daerah secara berkelanjutan guna menopang pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yaitu: 1) Akselerasi pengelolan

potensi ekonomi berbasis maritim dan keunggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; 2) Akselerasi peningkatan konektivitas antarpulau dan pemerataan infrastruktur pembangunan; dan 3) Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dengan memperkuat nilai keagamaan dan pelestarian budaya daerah.

Pada prinsipnya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan masyarakat luas. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Natuna secara berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Besar harapan kami agar dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sekaligus menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya."**

Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan Kabupaten Natuna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ranai, Agustus 2026
BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-12
1.4. Maksud dan Tujuan I-14
1.5. Sistematika Perubahan RKPD I-16

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-1
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (Ikd) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-6
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ... II-31
2.3.1. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Periode 2025-2029 ..... II-31
2.3.2. Keselarasan Kegiatan Renja dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Renstra Periode 2025-2029) II-32
2.3.3. Keselarasan Sub Kegiatan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Renstra Periode 2025-2029) II-36
2.3.4. Keselarasan Program RKPD dan APBD Tahun 2026 ..... II-40
2.3.5. Keselarasan Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026 II-43
2.3.6. Keselarasan Sub Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... II-45
2.3.7. Evaluasi Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dan APBD Triwulan II Tahun 2026 ..... II-48

2.4. Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 Per 30 Juni 2026) II-54

BAB III KERANGKA EKONOMI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Global III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau III-19
3.1.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan: Klaster Natuna-Kepulauan Anambas III-24
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna III-27
3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi III-30
3.1.3.2. PDRB Per Kapita III-37
3.1.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka III-38
3.1.3.4. Penduduk Miskin III-39
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-47
3.2.1. Realisasi Keuangan Daerah III-51
3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah III-51
3.2.1.2. Realisasi Belanja Daerah III-54
3.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah III-56
3.3. Perubahan Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-59
3.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-59
3.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah III-62
3.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-68
3.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... III-69
3.4.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... III-69
3.4.2. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 III-71
3.4.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... III-74

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-1
4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Pada Perubahan RKPD 2026 ..... IV-7

4.2.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional Tahun 2026 IV-7
4.2.2. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Riau IV-43
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-72
4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Dan Spasial IV-105
4.3.1. Aspek Tematik IV-106
4.3.2. Aspek Holistik IV-107
4.3.3. Aspek Integratif IV-109
4.3.4. Aspek Spasial IV-110
4.4. Dukungan Program Rkpd Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (Spm) IV-110
4.5. Dukungan Program Rkpd Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb/Sdgs) IV-120

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Pemerintan Daerah V-2
5.2. Rencana Pendanaan Daerah V-5
5.3. Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-9

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pembangunan VI-2
6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan VI-4

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Capaian IKU Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-2
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-6
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Rendah dan Sangat Rendah Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-22
Tabel 2.4. Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... II-35
Tabel 2.5. Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... II-39
Tabel 2.6. Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... II-43
Tabel 2.7. Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... II-46
Tabel 2.8. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 Triwulan II (Semester I) Tahun 2026 ..... II-50
Tabel 2.9. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan II-55
Tabel 2.10. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Kesehatan II-60
Tabel 2.11. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-81
Tabel 2.12. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ... II-87
Tabel 2.13. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat II-92
Tabel 2.14. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II-95
Tabel 2.15. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah II-98
Tabel 2.16. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026

Dinas Sosial II-101
Tabel 2.17. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi II-105
Tabel 2.18. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-109
Tabel 2.19. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian II-115
Tabel 2.20. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup II-120
Tabel 2.21. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-126
Tabel 2.22. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-129
Tabel 2.23. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perhubungan II-133
Tabel 2.24. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika II-136
Tabel 2.25. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II-140
Tabel 2.26. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemuda dan Olahraga II-144
Tabel 2.27. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan II-148
Tabel 2.28. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perikanan II-151
Tabel 2.29. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pariwisata II-154
Tabel 2.30. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro II-158
Tabel 2.31. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Sekretariat Daerah II-163
Tabel 2.32. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Sekretariat DPRD II-166
Tabel 2.33. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah..... II-169
Tabel 2.34. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah II-173
Tabel 2.35. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia II-177
Tabel 2.36. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Pengelola Perbatasan Daerah II-180
Tabel 2.37. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Inspektorat Daerah..... II-182
Tabel 2.38. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Timur II-185
Tabel 2.39. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Barat II-189
Tabel 2.40. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Utara II-192
Tabel 2.41. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Laut II-195
Tabel 2.42. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Midai..... II-199
Tabel 2.43. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Serasan II-202
Tabel 2.44. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Subi II-206
Tabel 2.45. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Tiga..... II-209
Tabel 2.46. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Tengah II-213
Tabel 2.47. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Timur Laut II-216
Tabel 2.48. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Selatan II-219
Tabel 2.49. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Serasan Timur II-222
Tabel 2.50. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Suak Midai..... II-225

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Kecamatan Bunguran Batubi II-228
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Kecamatan Pulau Tiga Barat II-231
Tabel 2.53. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Kecamatan Pulau Panjang II-235
Tabel 2.54. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Kecamatan Pulau Seluan II-238
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II-241
Tabel 3.1. Sasaran Indikator Makro Provinsi Kepulauan Riau dalam RKP Tahun 2026 ..... III-19
Tabel 3.2. Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau III-21
Tabel 3.3. Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Natuna Tahun 2026 .... III-25
Tabel 3.4. Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2026 III-27
Tabel 3.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2022-Triwulan 1 2026 (Miliar Rupiah) III-31
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2022-Triwulan 1 2026 ... III-32
Tabel 3.7. Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna (persen), 2021–2025 ..... III-34
Tabel 3.8. Rata-Rata Kontribusi 5 Sektor Utama PDRB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2021-2025 (persen) III-36
Tabel 3.9. Tabel PDRB Per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2022 Triwulan I 2026 ..... III-37
Tabel 3.10. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna III-41
Tabel 3.11. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna III-45
Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah) III-53
Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah) III-55
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah) III-58
Tabel 3.15. Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat, dan Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... III-64

Tabel 3.16. Anggaran Belanja Daerah Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... III-67
Tabel 3.17. Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2026..... III-69
Tabel 3.18. Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2026..... III-71
Tabel 3.19. Proyeksi Perubahan Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2026..... III-74
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna..... IV-4
Tabel 4.2. Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita untuk Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.. IV-16
Tabel 4.3. Dukungan P-RKPD terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026..... IV-26
Tabel 4.4. Dukungan Program P-RKPD terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional Tahun 2026 ..... IV-34
Tabel 4.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029..... IV-47
Tabel 4.6. Dukungan Program P-RKPD terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026..... IV-52
Tabel 4.7. Dukungan Program Perubahan RKPD terhadap Prioritas Kabupaten Natuna 2026 ..... IV-73
Tabel 4.8. Target RKP, P-RKPD Provinsi Kepri dan P-RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026..... IV-90
Tabel 4.9. Program Prioritas Kepala Daerah dalam PRKPD Tahun 2026 ..... IV-91
Tabel 4.10. Fokus Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ..... IV-103
Tabel 4.11. Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... IV-111
Tabel 4.12. Dukungan Program P-RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) IV-120
Tabel 5.1. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... V-4
Tabel 5.2. Proyeksi Pagu Anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026..... V-6
Tabel 5.3. Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD

Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... V-8
Tabel 5.4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... V-11

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... I-6
Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-13
Gambar 2.1. Irisan Kesesuaian Program RPJMD (Target 2026) dan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Natuna II-31
Gambar 2.2. Irisan Kesesuaian Kegiatan Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026 ..... II-33
Gambar 2.3. Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026 ..... II-37
Gambar 2.4. Irisan Kesesuaian Program RKPD dan APBD Kabupaten Natuna 2026 ..... II-41
Gambar 2.5. Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... II-43
Gambar 2.6. Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... II-46
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi 2020-2025 (% yoy) III-1
Gambar 3.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (%,yoy) III-2
Gambar 3.3. Pertumbuhan Komponen Produksi, 2021-2025 (%,yoy) III-6
Gambar 3.4. Perkembangan Inflasi Indonesia, 2021-2024 (%,yoy) III-10
Gambar 3.5. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2024&Q1 2025 ..... III-14
Gambar 3.6. Perkembangan Kinerja Manufaktur dan Jasa III-14
Gambar 3.7. Perkembangan Kinerja Komoditas, 2024 dan 2025 ..... III-15
Gambar 3.8. Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023-2026 (*year on year*) III-17
Gambar 3.9. Inflasi Global, 2023-2026 (*year on year*) III-18
Gambar 3.10. Volume Perdagangan Global, 2023-2026 (*year on year*) III-19
Gambar 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Natuna (2021-2025) III-39
Gambar 3.12. Jumlah Penduduk Miskin 2021-2025 (dalam ribu jiwa) III-40
Gambar 3.13. Tingkat Kemiskinan Natuna 2021-2025 (dalam persen) III-40
Gambar 3.14. Tema RKP dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... III-48
Gambar 4.1. Delapan Prioritas Nasional IV-8

Gambar 4.2. Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 ..... IV-9
Gambar 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... IV-14
Gambar 4.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 . IV-51
Gambar 4.5. Keterkaitan Tematik Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ..... IV-107

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan. Penyusunan dokumen ini dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan RKPD, perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keadaan darurat atau keadaan luar biasa, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, target kinerja, maupun alokasi pendanaan. Perubahan RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pada sisa tahun anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Dokumen Perubahan RKPD diharapkan mampu menjaga konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Kabupaten Natuna, Tahun 2026 memiliki arti strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan pada tahun tersebut harus tetap berada pada koridor kebijakan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Melalui Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya menjaga

kesinambungan pelaksanaan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Natuna guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berjalan dapat menimbulkan perubahan terhadap asumsi dasar, kondisi ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, kebijakan pemerintah, maupun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi aktual dan kebutuhan pembangunan.

Ketentuan mengenai perubahan RKPD diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, maupun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan juga dapat dilakukan apabila terdapat penggunaan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mengakibatkan perlunya penambahan atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan dalam RKPD.

Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD tetap memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah serta hasil kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD mengenai penambahan maupun pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan pada dokumen KUA dan PPAS. Selanjutnya, setiap perubahan tersebut menjadi dasar penyesuaian Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2026 secara eksplisit juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada pasal 13 ayat (1), yaitu:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
2) Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
3) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi,

dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

4) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam implementasinya, pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, regulasi sektoral, kemampuan fiskal daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta munculnya isu-isu strategis yang memerlukan penanganan segera dapat memengaruhi asumsi dasar, target kinerja, prioritas pembangunan, arah kebijakan, maupun alokasi pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan agar tetap responsif terhadap perkembangan aktual serta mampu menjamin efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan tetap relevan, adaptif, terukur, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka ruang lingkup/batasan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (6), meliputi perubahan 1) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 2) Target sasaran pembangunan Daerah; 3) Prioritas pembangunan Daerah; 4) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan 5) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka arah kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026:

1) Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2026;
2) Penyesuaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan maupun belanja pembangunan tahun 2026;
3) Pergeseran, penghapusan, rasionalisasi dan realokasi anggaran serta perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari kegiatan;

4) Penyesuaian pendapatan baik dana transfer keuangan daerah dan desa yang bersumber dari pusat, provinsi, pendapatan asli daerah, penyesuaian terhadap pemanfaatan SiLPA berdasarkan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPJ) Tahun 2025;
5) Mengakomodir pergeseran penjabaran APBD Tahun 2026 akibat adanya penyesuaian-penyesuaian anggaran pada jenis belanja yang sama sebelum adanya perubahan APBD Tahun 2026; dan
6) Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026**, yang menegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Program Strategis Nasional, serta hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. Dengan demikian, P-RKPD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan internal daerah, tetapi juga sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2025.

Tema pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah **"Akselerasi Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah, Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas Antarpulau, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya".** Tema pembangunan tersebut tidak hanya mencerminkan arah dan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan. Sebagai implementasi dari tema pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan tiga

prioritas pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun 2026.

Dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun tiga prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Daerah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup;
2) Akselerasi Peningkatan Konektivitas Antarpulau dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan; dan
3) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Memperkuat Nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Daerah.

Ketiga prioritas pembangunan tersebut menjadi landasan strategis dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Oleh karena itu, setiap penyesuaian terhadap arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, maupun alokasi pendanaan dilakukan secara selektif dan terukur dengan tetap memperhatikan konsistensi terhadap tema pembangunan daerah, sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan semester pertama tahun berjalan, perkembangan indikator makro daerah, perubahan kondisi ekonomi dan fiskal daerah, dinamika regulasi, serta berbagai isu strategis yang berkembang. Berbagai perkembangan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan agar pelaksanaan pembangunan tetap responsif terhadap perubahan lingkungan strategis tanpa mengurangi konsistensi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui penguatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan, serta peningkatan sinergi antarsektor dan antarperangkat daerah. Melalui pendekatan tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan tetap berjalan secara adaptif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka mempercepat

pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Natuna.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan regulasi, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyesuaian tersebut tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah tetap terjaga. Seluruh tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

Secara lebih rinci, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Tahap awal penyusunan Perubahan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyesuaian dokumen perencanaan tetap selaras dengan arah pembangunan daerah, memperhatikan capaian kinerja pembangunan, serta responsif terhadap perkembangan kondisi aktual. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD meliputi beberapa kegiatan,

yaitu:

a. analisis terhadap perkembangan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar untuk mengidentifikasi capaian kinerja, kendala pelaksanaan, dan kebutuhan penyesuaian pembangunan;
c. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah;
d. penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah serta kebijakan keuangan daerah sebagai dasar penyelarasan arah pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah; dan
e. perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan pendanaan.

2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Tahap selanjutnya dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Pada tahapan ini, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Natuna melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, pagu indikatif, lokasi pelaksanaan, serta kelompok sasaran atau penerima manfaat yang tercantum dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan rumusan yang terdapat dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Proses ini juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, keterpaduan lintas perangkat daerah, serta kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Bapperida Kabupaten Natuna melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perubahan RKPD hingga menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Dokumen rancangan akhir tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam tahapan pembahasan dan penetapan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Penetapan Perubahan RKPD

Tahap akhir dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Natuna Tahun 2026 adalah penetapan Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang telah disempurnakan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah untuk dilakukan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, serta menjamin konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil fasilitasi, Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati beserta dokumen Perubahan RKPD sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Setelah seluruh proses penyempurnaan selesai dilaksanakan, Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Natuna dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 tidak hanya merupakan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui penyusunan Perubahan RKPD yang berkualitas, diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Kerangka regulatif ini menjadi dasar normatif yang memastikan bahwa proses

penyusunan dokumen perubahan RKPD dilaksanakan secara sah, sistematis, dan selaras dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

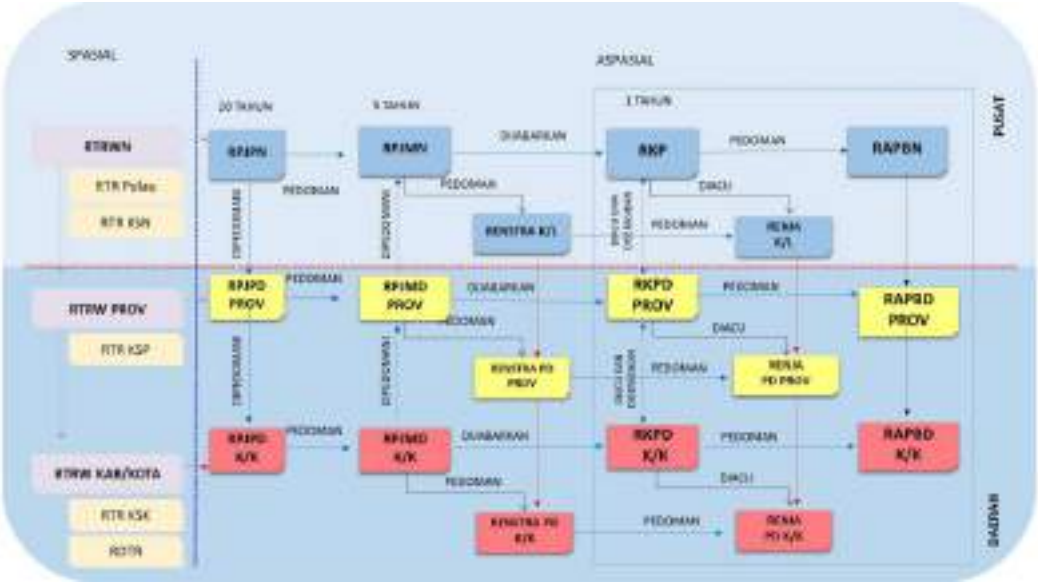
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Kepmendagri No. 050-5889/2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 435);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029; dan
30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tata cara perubahannya, maka penyusunan Perubahan RKPD Natuna Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Natuna Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Dokumen Perubahan RKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berjenjang. Oleh karena itu, P-RKPD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada berikut.



Gambar 1.2.
Hubungan antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RPJPD**
   Perubahan RKPD Natuna Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Natuna Tahun 2025-2045. Dalam hal ini, RKPD berfungsi sebagai dokumen operasional tahunan untuk mengarahkan program pembangunan menuju pencapaian visi dan misi jangka panjang daerah yang ditetapkan dalam RPJPD.
2) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RPJMD**
   Perubahan RKPD merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Natuna Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memuat target-target pembangunan yang harus dicapai pada tahun berjalan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD.
3) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RKP Tahun 2025**
   RKPD Natuna Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi dan sinergi antara arah kebijakan nasional dan daerah, khususnya dalam prioritas pembangunan nasional, penguatan daya saing wilayah, dan pembangunan manusia.
4) **Hubungan Perubahan RKPD dengan SPM**
   Perubahan RKPD juga disusun dengan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah mampu memenuhi

indikator SPM, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan urusan pelayanan dasar lainnya.

5) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**
   RKPD Tahun 2026 mengintegrasikan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Integrasi ini mencakup upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ketahanan lingkungan, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif.
6) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RTRW**
   Perubahan RKPD dirancang dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Natuna sebagai acuan spasial utama. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan zonasi, daya dukung lingkungan, serta arah pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW.
7) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026**
   RKPD Natuna juga memperhatikan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, khususnya dalam hal sinkronisasi prioritas pembangunan kewilayahan, keterpaduan program antarwilayah, serta integrasi pendanaan antara kabupaten dan provinsi.
8) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah**
   Perubahan RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penyesuaian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan Renja PD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD, sehingga menjamin keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
9) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUPA-PPAS dan APBD**
   RKPD merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini selanjuntya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan dan menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian dokumen perencanaan

pembangunan tahunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan dinamika pelaksanaan pembangunan yang terjadi sepanjang tahun berjalan, termasuk perubahan asumsi makro dan kapasitas fiskal daerah, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang bersifat aktual dan mendesak. Perubahan RKPD ini menjadi pijakan dalam proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta memastikan sinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2) Menyesuaikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga triwulan pertama tahun anggaran berjalan;
3) Menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan perubahan kondisi makro ekonomi, perkembangan fiskal daerah, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang;
4) Memberikan dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) yang sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah disesuaikan;
5) Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang konsisten dengan perencanaan yang telah diperbarui;
6) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyesuaian target kinerja, indikator, dan alokasi anggaran yang lebih realistis, adaptif, serta responsif terhadap kondisi faktual di Kabupaten Natuna.

Mengakomodir program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD 2026 dan pekerjaan pihak ketiga yang sudah selesai 100% pada tahun anggaran 2024 dan 2025, namun belum diselesaikan kewajibannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sehingga perlu dicantumkan di dalam P-RKPD 2026.

1.5. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Sistematika perubahan RKPD Natuna Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD s/d Triwulan II Tahun 2026

Berisi tentang hasil evaluasi terhadap kinerja RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2026.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi tentang saran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2026.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB 2

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026



BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KAB. NATUNA

Dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran strategis sebagai dasar dalam merumuskan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan capaian **Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029,** serta hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi juga memperhatikan perkembangan indikator makro pembangunan daerah, kondisi ekonomi dan fiskal daerah, dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta berbagai isu strategis yang berkembang selama tahun berjalan.

Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian target pembangunan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan serta hambatan yang dihadapi, sekaligus mengukur tingkat konsistensi antara target perencanaan dengan realisasi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta alokasi pendanaan sesuai dengan perkembangan kondisi aktual dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan berpedoman pada hasil evaluasi tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih adaptif, responsif, terukur, dan akuntabel. Selain menjaga konsistensi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD juga diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2.1. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui perkembangan kinerja pembangunan

daerah, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target kinerja pada tahun berjalan.

Hasil evaluasi capaian IKU menjadi dasar dalam mengidentifikasi indikator yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan upaya percepatan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan gambaran mengenai berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan II, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan, penyesuaian kebijakan, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada semester berikutnya. Berikut ini capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Capaian IKU Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026	Realisasi s.d. Triwulan II 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja s.d. TW II 2026
1	Kontribusi PDRB sub Sektor Perikanan	Persen	9,67	9,67	10,14	9,73	95,96	ST
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,18	-3,08	3,08	0	0,00	SR
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,30	2,00	2,58	2	77,52	ST
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	76,46	80,87	79,99	80,87	100,00	ST
5	Indeks Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	Persen	64,10	66,12	64,41	66,12	100,00	ST
6	Rasio Konektivitas	Persen	60,40	66,10	62,54	66,10	100,00	ST
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,38	74,77	74,71	74,77	100,08	ST
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,94	13,94	13,99	13,95	99,71	ST
9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,20	9,25	9,68	9,25	95,56	ST
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,21	72,80	65,73	72,8	100,00	ST

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026	Realisasi s.d. Triwulan II 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja s.d. TW II 2026
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,94	4,23	3,13	4,23	100,00	ST
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,479	61,39	73,479	61,39	83,55	ST
13	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	74,31	75,08	74,55	75,08	100,00	ST
14	Persentase Desa/Kelurahan Bebas Konflik	Persen	90,91	90,90	96,10	90,91	94,60	ST
15	Persentase warisan budaya daerah yang di lestarikan	Persen	10	31,91	14,40	12,67	87,99	ST

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 dan Olahan Bapperida Kabupaten Natuna 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dari 15 indikator kinerja utama, sebanyak 14 indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), sedangkan 1 indikator masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur pencapaian target tahunan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan pelaksanaan program pada semester II Tahun 2026 agar target akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Pada aspek penguatan ekonomi daerah, Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan telah mencapai 9,73 persen dari target 10,14 persen atau 95,96 persen, yang mengindikasikan bahwa sektor perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Natuna. Namun demikian, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Sampai Triwulan II Tahun 2026 realisasi masih 0 persen dari target 3,08 persen sehingga tingkat capaiannya 0,00 persen dengan status Sangat Rendah (SR). Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi sektor pertanian belum mengalami pertumbuhan pada semester pertama sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan program peningkatan produksi, penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta optimalisasi pendampingan kepada pelaku usaha tani pada semester berikutnya. Sementara itu, Rasio Kewirausahaan Daerah telah mencapai 2,00 persen atau 77,52 persen dari target 2,58 persen, yang menunjukkan

perkembangan positif meskipun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan jumlah wirausaha baru, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada aspek infrastruktur dan lingkungan hidup, kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai 80,87 atau 100 persen dari target 79,99. Demikian pula Indeks Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman mencapai 66,12 atau 100 persen dari target 64,41, serta Rasio Konektivitas mencapai 66,10 persen atau 100 persen dari target 62,54 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta konektivitas wilayah telah berjalan sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada dimensi pembangunan sumber daya manusia, seluruh indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 74,77 tahun atau 100,08 persen dari target, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,95 tahun atau 99,71 persen, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,25 tahun atau 95,56 persen dari target 9,68 tahun. Selain itu, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 72,80 atau 100 persen dari target 65,73. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran RPJMD, meskipun peningkatan rata-rata lama sekolah masih memerlukan intervensi yang lebih intensif untuk mencapai target akhir tahun.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, capaian indikator juga relatif baik. Indeks Pelayanan Publik telah mencapai 4,23 atau 100 persen dari target 3,13, sedangkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah mencapai 75,08 atau 100 persen dari target 74,55, yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baru mencapai 61,39 atau 83,55 persen dari target 73,479, sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah agar target akhir tahun dapat dicapai secara optimal.

Sementara itu, pada aspek ketenteraman masyarakat dan pelestarian budaya, Persentase Desa/Kelurahan Bebas Konflik telah mencapai 90,91 persen atau 94,60 persen dari target 96,10 persen, sedangkan Persentase Warisan Budaya Daerah yang Dilestarikan mencapai 12,67 persen atau 87,99 persen dari target 14,40 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas sosial dan pelestarian budaya daerah telah berjalan dengan baik, namun masih

memerlukan optimalisasi pelaksanaan program pada semester II agar target tahunan dapat dipenuhi.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah berada pada kondisi yang cukup baik, ditandai dengan dominasi indikator yang telah mencapai lebih dari 90 persen dari target tahunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan perhatian khusus, terutama Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Rasio Kewirausahaan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Persentase Desa/Kelurahan Bebas Konflik, dan Persentase Warisan Budaya Daerah yang Dilestarikan. Oleh karena itu, pada semester II Tahun 2026 diperlukan percepatan pelaksanaan program, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi realisasi anggaran, serta pengendalian dan monitoring secara berkala agar seluruh indikator kinerja utama dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

2.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Berada di bawah IKU dalam hierarki indikator kinerja, IKD dan IKK mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKD dan IKK mencerminkan kinerja sektor atau bidang tertentu yang menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, IKD dan IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berikut ini tabel rincian yang menerangkan capaian IKD dan IKK sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	61,1	62,54	61,1	97,70	ST
2	Indeks Risiko Bencana (IRBi)	Indeks	140,34	109,35	140,34	71,66	ST
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,87	79,99	80,87	100,00	ST
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	1,01	0,83	82,18	ST
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	92,92	93,39	92,92	99,50	ST
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	47,25	70,14	47,25	67,37	ST
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	10,02	13,42	10,02	74,66	ST
8	Persentase potensi konflik terselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	99,87	680,39	99,87	14,68	SR
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,43	0,42	0,42	100,00	ST
11	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	71,52	63,76	71,52	100,00	ST
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	(%)	19	14,86	19	72,14	ST
13	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	%	6,57	6,64	6,57	98,95	ST
14	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	NA	10,42	0	0,00	SR
15	Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)	%	28,3	71,14	28,3	39,78	T
16	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	67,31	79,79	0	0,00	SR
17	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	10,35	10,42	67,31	100,00	ST
18	Kapasitas air baku (m3/detik)	m3/detik	0,18	0,32	0,18	56,25	ST
19	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	179,76	179,76	0	0,00	SR
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,805	0,791	0,763	100,00	ST
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,25	9,68	9,25	95,56	ST
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,98	4,02	3,98	100,00	ST
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	18,5**	15,04	18,5**	100,00	ST
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	72,8	65,73	72,8	100,00	ST
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,94	13,99	13,95	99,71	ST
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72	64,5	74,41	100,00	ST
8	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	54,75	52,56	54,75	100,00	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
9	Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	0	2,7	0	0,00	SR
10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,25	0,98	0,25	25,51	R
11	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	60,11	57,56	49,36	85,75	ST
12	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	41,07	35	41,07	100,00	ST
13	PDRB Perkapita dengan Migas	%	281,43	304,21	281,43	92,51	ST
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	18,21	18,48	18,21	98,54	ST
15	PDRB Perkapita Tanpa Migas	%	88,77	91,24	88,77	97,29	ST
16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun	Angka	86,51	89,48	99,67	100,00	ST
17	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,51	74,71	74,77	100,00	ST
18	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,81	4,74	4,81	98,52	ST
19	Persentase Desa Mandiri	%	15,71	17,14	15,71	91,66	ST
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	112,7	100	11,7	11,70	SR
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	76,1	90	76,1	84,56	ST
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99,13	100	99,13	99,13	ST
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	82,21	86,01	82,21	95,58	ST
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0,06	0,06	0,06	100,00	ST
25	Angka Kematian Ibu (per kasus kelahiran hidup)	Angka	3	1	0	100,00	ST
26	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,94	79,99	78,94	98,69	ST
27	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota	%	87,54	62,38	87,54	100,00	ST
28	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	180	150	133	88,67	ST
29	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tanpa Migas	%	-1,61	3,27	0,63 (Tw.1)	-49,24	SR
30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,05	61,81	61,05	98,77	ST
31	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Migas	%	10,49	1,6	15,23 (Tw.1)	-100,63	SR
32	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-17	2,2	-17	-772,73	SR
33	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (*age specipic fertility rate* / ASFR 15-19)	Angka	18	24,4	18	100,00	ST
34	Kontribusi PDRB Kabupaten Natuna terhadap Provinsi	%	6,4	7,36	6,59	89,53	ST
35	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)	%	6,4	7,36	6,4	86,96	ST
36	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persentase	3,5	3,4	3,5	97,06	ST
37	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Indeks	1,94	1,6	1,94	100,00	ST
38	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses Internet	%	70	67,5	70	100,00	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
39	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	75,03	71,5	75,28	100,00	ST
40	Indeks Gini	Indeks	0,263	0,283	0,263	100,00	ST
41	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	66,93	62,83	59,96	95,43	ST
42	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota	%	6,12	26,1	6,12	23,45	SR
43	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	9,67	10,14	9,73	95,96	ST
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,82	0,9	0,82	91,11	ST
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,54	0,58	0,54	93,10	ST
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2	2,58	2	77,52	ST
4	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,14	0,25	100,00	ST
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,23	3,13	4,23	100,00	ST
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,68	3,67	3,68	100,00	ST
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	71,54	78,6	71,54	91,02	ST
4	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	86,01	86,01	86,01	100,00	ST
5	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,82	88,87	87,82	98,82	ST
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,23	3,35	3,23	96,42	ST
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**						
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun)	Angka	92,89	99,91	99,46	99,55	ST
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (13-15 Tahun)	Angka	98,44	98,67	98,20	99,52	ST
3	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	Angka	10,37	11,02	8,93	81,03	ST
4	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	Angka	86,51	89,48	99,67	100,00	ST
5	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	54	60,4	53,78	89,04	ST
6	Iklim Keamanan SD	Nilai	70,79	72,6	68,92	94,93	ST
7	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persentase	26,77	74,91	26,77	35,74	S
8	Iklim Keamanan SMP	Nilai	65,93	73,18	70,29	96,05	ST
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persentase	67,76	68,3	68,01	99,58	ST
10	Iklim Kebinekaan SD	%	66,2	70,64	62,1	87,91	ST
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	54	60,19	57,71	95,88	ST
12	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	55,35	72,57	65,2	89,84	ST
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
1	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Pulau Tiga	%	100	100	100	100,00	ST
2	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Midai	Angka	0	1	0	100,00	ST
3	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Suak Midai	Angka	1	0	0		
4	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Tanjung	%	100	100	100	100,00	ST
5	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Bunguran Selatan	%	59	82	20	24,39	SR
6	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Laut	%	7,69	2,95	0	100,00	ST
7	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Serasan	%	11,76	2,67	0	100,00	ST
8	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	%	88,23	88,23	88,23	100,00	ST
9	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Kelarik	%	100	82	0	0,00	SR
10	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Bunguran Tengah	%	40	82	25	30,49	R
11	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Batubi Jaya	%	100	92,5	36,4	39,35	T
12	Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit	%	69,23	69	69,23	100,00	ST
13	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Batubi Jaya	%	100	100	100	100,00	ST
14	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Pulau Tiga	Angka	2	1	1	100,00	ST
15	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Laut	%	0	100	0	0,00	SR
16	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Serasan Timur	%	100	92,5	43,8	47,35	ST
17	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Selatan	Angka	1	0	0		
18	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Bunguran Selatan	%	9,62	36	18,64	51,78	ST
19	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Tanjung	%	73	82	37,5	45,73	ST
20	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Midai	%	100	100	100	100,00	ST
21	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Serasan Timur	%	82	82	25	30,49	R
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Batubi Jaya	Indeks	3,57	3,45	3,57	103,48	ST
23	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Ranai	%	7,22	8,26	8,2	100,00	ST
24	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Subi	%	12,20	13,29	0	100,00	ST
25	Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam	%	100	80	100	100,00	ST
26	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Sedanau	%	100	92,5	35,2	38,05	S
27	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Kelarik	%	2,09	36	0,91	2,53	SR

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
28	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Suak Midai	%	100	92,5	20,8	22,49	SR
29	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80%	%	13,3	100	0	0,00	SR
30	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Serasan	%	88,89	100	88,89	88,89	ST
31	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Serasan	%	82	82	57,14	69,68	ST
32	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Tanjung	%	0	100	0	0,00	SR
33	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Pulau Tiga	%	82	82	0	0,00	SR
34	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Serasan	%	57,1	92,5	29,8	32,22	R
35	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Ranai	%	22,65	36	2,72	7,56	SR
36	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Sedanau	%	4,54	36	0,76	2,11	SR
37	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Suak Midai	%	29,41	14,5	28,57	2,97	SR
38	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik	%	3,33	2,95	40	-1155,93	SR
39	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Midai	%	0	100	0	0,00	SR
40	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Pulau Tiga Barat	%	100	92,5	22,6	24,43	SR
41	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Subi	%	64,29	100	64,29	64,29	ST
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Serasan	Indeks	3,37	3,45	3,37	97,68	ST
43	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Batubi Jaya	%	0	100	0	0,00	SR
44	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Tiga Barat	%	13,04	23,31	11,54	100,00	ST
45	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Ranai	%	100	90	56,8	63,11	ST
46	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Bunguran Tengah	%	14,41	36	3,23	8,97	SR
47	Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%	%	0	6,7	0	0,00	SR
48	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Bunguran Tengah	%	100	100	100	100,00	ST
49	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Serasan Timur	%	45	100	45	45,00	ST
50	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Tiga	%	0	100	0	0,00	SR
51	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Serasan Timur	%	6,59	36	1,7	4,72	SR
52	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Sedanau	%	17,69	100	17,69	17,69	SR
53	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	30,03	29,42	30,03	100,00	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
54	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Pulau Laut	%	100	92,5	36,4	39,35	T
55	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Pulau Tiga Barat	Indeks	3,69	3,45	3,53	100,00	ST
56	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Subi	%	82	82	0	0,00	SR
57	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Tiga Barat	%	0	100	0	0,00	SR
58	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Serasan	%	100	100	100	100,00	ST
59	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Batubi Jaya	%	14,71	12,32	0	100,00	ST
60	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Serasan Timur	%	17,14	11,62	0	100,00	ST
61	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Tanjung	%	11,84	13,25	8,7	100,00	ST
62	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Sedanau	Angka	1	1	1	100,00	ST
63	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Kelarik	%	100	92,5	22,7	24,54	SR
64	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah	%	8,97	5,8	5,43	100,00	ST
65	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Serasan Timur	%	0	100	0	0,00	SR
66	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Kelarik	Angka	0	3	1	100,00	ST
67	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Sedanau	%	82	82	15,38	18,76	SR
68	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Subi	%	0,76	36	0,38	1,06	SR
69	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	%	91,4	66,6	0	0,00	SR
70	Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas	%	50,6	50	60	100,00	ST
71	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Bunguran Selatan	%	7,84	4,05	11,76	-90,37	SR
72	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Sedanau	%	0	100	0	0,00	SR
73	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) di puskesmas Suak Midai	%	50	82	0	0,00	SR
74	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Pulau Tiga Barat	%	82	82	0	0,00	SR
75	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Batubi Jaya	%	2,13	36	1,1	3,06	SR
76	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Midai	%	100	100	100	100,00	ST
77	Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar	%	5,8	27	5,8	21,48	SR
78	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Tanjung	%	100	100	100	100,00	ST
79	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Midai	%	2,70	6,82	0	100,00	ST
80	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Bunguran Tengah	%	2,56	9,7	0	100,00	ST
81	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Tiga	%	8,70	8,88	11,54	70,05	ST
82	Angka Kematian Bayi	Angka	12,97	15	2	100,00	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
83	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Serasan	Angka	0	0	0		
84	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Serasan Timur	Angka	1	1	0	100,00	ST
85	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Laut	%	20,8	36	36,21	100,00	ST
86	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*)	%	76,10	82	15,18	18,51	SR
87	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Bunguran Tengah	%	100	92,5	47,1	50,92	ST
88	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Bunguran Tengah	%	100	100	100	100,00	ST
89	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Tiga	%	15,31	36	16,9	46,94	ST
90	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Tanjung	%	13,32	36	7,5	20,83	SR
91	Persentase sarana produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	%	30	100	0	0,00	SR
92	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Pulau Tiga	%	100	92,5	30,5	32,97	S
93	Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Ranai	%	100	100	100	100,00	ST
94	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Pulau Tiga Barat	Angka	1	0	0		
95	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Suak Midai	%	8,7	36	6,42	17,83	SR
96	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Pulau Laut	Angka	0	0	0		
97	Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	%	80	40	0	0,00	SR
98	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Bunguran Selatan	%	100	100	100	100,00	ST
99	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Kelarik	%	100	100	0	0,00	SR
100	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Pulau Laut	%	30	82	0	0,00	SR
101	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	28,8	34,61	0	0,00	SR
102	Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	0	0	0		
103	Persentase orang dengan HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV)	%	66,7	100	29,33	29,33	R
104	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Kelarik	%	70,67	100	70,67	70,67	ST
105	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Serasan	%	2,61	36	19,58	54,39	ST
106	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Ranai	%	0	100	0	0,00	SR
107	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Bunguran Tengah	%	0	100	0	0,00	SR

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
108	Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Serasan	%	0	100	0	0,00	SR
109	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Ranai	Angka	3	6	0	100,00	ST
110	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Subi	Angka	1	0	0		
111	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar	%	100	100	93,33	93,33	ST
112	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Suak Midai	%	100	100	100	100,00	ST
113	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*) Puskesmas Ranai	%	82	82	23,53	28,70	R
114	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Sedanau	%	8,64	9,14	21,88	-39,39	SR
115	Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Tiga Barat	%	10,2	36	8,56	23,78	SR
116	Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Batubi Jaya	%	53,33	100	53,33	53,33	ST
117	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Tanjung	%	100	92,5	35,7	38,59	T
118	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah	Angka	0	0	0		
119	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Subi	%	50	92,5	18,3	19,78	SR
120	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Serasan Timur	Indeks	3,38	3,45	3,38	97,97	ST
121	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	99,17	100	100	100,00	ST
122	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	58,58	100	83,31	83,31	ST
123	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,68	100	82,18	82,18	ST
124	Jumlah Kematian Ibu	Angka	3	2	0	100,00	ST
125	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	89,43	100	51,65	51,65	ST
126	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84,43	100	32,41	32,41	R
127	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,58	100	88,58	88,58	ST
128	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	84,09	100	49,16	49,16	ST
129	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	82,14	100	47,45	47,45	ST
130	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	44,48	100	34,44	34,44	S
131	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	80,96	100	65,86	65,86	ST
132	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	95,05	100	95,04	95,04	ST
133	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	76,82	100	48,28	48,28	ST
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
1	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan	%	23,25	23,26	0	0,00	SR
2	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan	%	67,31	68,57	0	0,00	SR
3	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Dokumen	0	1	0	0,00	SR
4	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	%	50	55,56	0	0,00	SR
5	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	%	9,84	9,97	0	0,00	SR
6	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	%	42,93	42,83	0	0,00	SR
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	87,66	85,25	0	0,00	SR
8	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	87,1	85,71	0	0,00	SR
9	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	69,5	43,35	0	0,00	SR
10	Persentase Kemantapan Jalan	Persentase	59,94	54,08	59,94	100,00	ST
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persentase	75,19	78	0	0,00	SR
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	10,1	68,41	0	0,00	SR
13	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	47,83	115	47,83	41,59	T
14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	59,94	54,08	59,94	100,00	ST
15	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persentase	72,26	65,9	0	0,00	SR
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	50	93	0	0,00	SR
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92,92	92	0	0,00	SR
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	23	65	0	0,00	SR
4	Rasio Pemukiman Layak Huni	Rasio	0,19	0,24	0	0,00	SR
AE	**1.04 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100,00	ST
2	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	65	16,66	25,63	R
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	142	100,00	ST
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	80	55,55	69,44	ST
5	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	70	75	0	0,00	SR
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	%	36,6	35,5	0	0,00	SR
7	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100,00	100,00	ST
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	68,56	71,09	64,79	91,14	ST
2	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100,00	ST
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	ST
4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	ST
5	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Keluarga	4.737	3.474	2.453	100,00	ST
6	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100,00	ST
7	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100,00	ST
8	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100,00	ST
9	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	ST
10	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	29,85	9,17	0	0,00	SR
11	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	ST
12	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	20	25	20	80,00	ST
13	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100,00	ST
14	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100,00	ST
AG	**2.07 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	2,47	2,5	0	0,00	SR
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,26	1,31	0	0,00	SR
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	44,83	33,4	0	0,00	SR
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0		
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	344.934.983,22	0	0		
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	8,7	9	0	0,00	SR
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	61,41	73,04	0	0,00	SR

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
3	Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	%	100	100	100	100,00	ST
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/Kapita/Hari	2.080	2.100	0	0,00	SR
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	26,79	30	0	0,00	SR
3	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	3,78	4,6	0	0,00	SR
4	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/Kapita/Hari	2.402	2.400	0	0,00	SR
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	28,21	14,7	0	100,00	ST
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
1	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	%	0	20	0	0,00	SR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	80	0	0,00	SR
3	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	%	5	19,97	0	0,00	SR
4	Persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	20	0	0,00	SR
5	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	80	80	0	0,00	SR
6	Persentase luas tanah bersertifikat	%	98	87	0	0,00	SR
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Persentase Penanganan Sampah	%	31,65	35,9	34,15	95,13	ST
2	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	35,25	50	50	100,00	ST
3	Luas Lahan Konservasi	Ha	3,1	3,1	0	0,00	SR
4	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	%	74,76	73,92	73,92	100,00	ST
5	Persentase Luas Area RTH	%	24,92	80	16	20,00	SR
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	0	0	0		
7	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	%	23,72	21,44	0	0,00	SR
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100,00	ST
9	Persentase Kasus Lingkungan yang tertangani	%	70,1	71,89	70,1	97,51	ST
AL	**2.12 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	8,6	30,05	8,60	28,62	R
2	Persentase akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	80,03	83	80,03	96,42	ST
3	Persentase penyajian Data Kependudukan	%	90	80	80	100,00	ST
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,45	100	99,45	99,45	ST
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	78,43	87	78,43	90,15	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
6	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	97,37	81	97,37	100,00	ST
7	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	85	100	100,00	ST
AM	**2.13 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	24,45	38,47	25,45	66,16	ST
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	2,86	7,14	2,86	40,06	T
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	42,87	50	0	0,00	SR
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	2	2	2	100,00	ST
AN	**2.14 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,40	2,33	0	100,00	ST
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (MCPR)	Angka	76,80	74,5	72	96,64	ST
AO	**2.15 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						
1	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik	%	84,85	87,88	84,85	96,55	ST
2	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	75,02	80,01	77,37	96,70	ST
AP	**2.16 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	60	60	77,77	100,00	ST
AQ	**2.17 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	38,58	29,51	0	0,00	SR
2	Persentase Usaha MIkro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	87,95	68,64	55,87	81,40	ST
3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	21,8	14,46	11,12	76,90	ST
4	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	11,29	11,75	11,11	94,55	ST
5	Persentase Koperasi yang di berikan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	20,16	25,73	0	0,00	SR
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
1	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persentase	110,58	72,15	128,96	100,00	ST
2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sessuai Ketentuan	Persentase	100	98,46	100	100,00	ST
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	143,64	10	6,41	64,10	ST
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	456,67	100	16,66	16,66	SR
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100,00	ST
AS	**2.19 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	13,49	15	13,86	92,40	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	68,91	10	0	0,00	SR
3	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	9,68	10	0	0,00	SR
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
1	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	%	100	90	25	27,78	R
AU	**2.21 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
1	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	%	85	5	20	100,00	ST
AV	**2.22 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	31,91	99,02	31,91	32,23	R
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
1	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	3	3,43	3	87,46	ST
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,91	85,6	58,91	68,82	ST
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	10,91	75	10,91	14,55	SR
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	%	32,61	50	53,125	100,00	ST
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	60	0	0,00	SR
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	47,73	32	47,73	100,00	ST
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	Persentase produksi perikanan budidaya	%	87,57	96,1	41,78	43,48	T
2	Persentase produksi perikanan tangkap	%	101,78	96,1	38,17	39,72	T
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
1	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang)	Persentase	71,18	-37,88	-0,26	0,69	SR
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	17,58	20	37,95	100,00	ST
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	9	10	0	0,00	SR
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	33,84	1,5	0	0,00	SR
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0,82	0,1	0	0,00	SR
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	72,73	62,71	72,73	100,00	ST
2	Persentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya	Persentase	28,57	36,32	28,57	78,66	ST
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	Persentase	12,48	17,69	0	0,00	SR
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	82,35	67,17	70,59	100,00	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
5	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persentase	33,33	34,83	0	0,00	SR
6	Nilai Ekspor Barang	Persentase	1,61	0,68	1,61	100,00	ST
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	Persentase	9,52	14,39	4,76	33,08	S
2	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Persentase	100	56,04	33,33	59,48	ST
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persentase	100	80	100	100,00	ST
BD	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	33,32	33,32	0	0,00	SR
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,54	3,46	3,44	99,42	ST
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	4,39	12	4,39	36,58	S
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		3,46	3,44	99,42	ST
4	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	%	81,44	50	87,1	100,00	ST
5	Nilai LAKIP	Nilai	74,31	75	71,65	95,53	ST
6	Nilai LPPD	Nilai	2,91	3,32	2,91	87,65	ST
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	22,31	25	18,32	73,28	ST
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	65,22	67,56	8,7	12,88	SR
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**						
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	60	80	0	0,00	SR
2	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD	%	49,23	60	69,56	100,00	ST
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	61,65	85	74	87,06	ST
BG	**5.01 - PERENCANAAN**						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	83,33	87,5	87,5	100,00	ST
BH	**5.02 - KEUANGAN**						
1	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD	%	38,3	33,5	0	0,00	SR
2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	11,57	6,98	0	0,00	SR
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	1,58	2,63	0	0,00	SR
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	80,23	90,15	0	0,00	SR
BI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**						
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	46,13	75	82,83	100,00	ST
BJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Capaian 2026 (TW II)	Persentase Capaian Kinerja 2026	Status Kinerja RKPD 2026
1	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio	90,61	3,12	1,13	36,22	S
BK	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	50	55	50	90,91	ST
2	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,76	0,71	0,76	100,00	ST
BL	**5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN**						
1	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan	%	16,27	75	66,67	88,89	ST
BM	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**						
1	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	2	66,67	ST
2	Maturitas penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	2	66,67	ST
BN	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentae	100	100	25	25,00	SR
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100,00	ST
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	47,29	49,35	47,29	95,83	ST
4	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	75,06	75,06	0	0,00	SR
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	0	0,00	SR

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan Evaluasi TW II Tahun 2026

**Mengacu hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.

Berdasarkan tabel 2.2, terdapat sejumlah capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berstatus Rendah (R) maupun Sangat Rendah (SR). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 tidak serta merta berjalan sesuai dengan ekspektasi yang direncanakan, yang dapat menghambat maupun berpotensi menyebabkan tidak tercapainya kinerja optimal di akhir tahun anggaran. Berikut ini diuraikan sejumlah indikator dengan status Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR) berdasarkan data mutakhir dan analisis evaluatif sebagai tinjauan pokok permasalahan, disertai konsekuensi terhadap capaian target akhir tahun dan tindakan korektif yang perlu diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Rendah dan Sangat Rendah Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
1	**Aspek Geografis dan Demografi**	Konsumsi listrik per kapita: target 680,39 KWh/kapita, realisasi 99,87 KWh/kapita, capaian 14,68% (SR). Penurunan emisi GRK tahunan: target 10,42%, realisasi 0%, capaian 0% (SR). Akses RT perkotaan terhadap air siap minum perpipaan: target 79,79%, realisasi 0%, capaian 0% (SR). Ketersediaan air baku: target 179,76 liter/detik, realisasi 0, capaian 0% (SR).	Capaian menunjukkan masih terdapat kesenjangan cukup besar pada pemenuhan layanan energi dan air dasar. Khusus indikator air siap minum, air baku, dan emisi tahunan, belum terdapat capaian yang tercatat sampai TW II. Indikasi permasalahan tidak hanya terkait pelaksanaan fisik, tetapi juga perlu memastikan kesiapan kegiatan, lokasi, sumber daya, serta mekanisme pengukuran dan pelaporan indikator.	Dengan capaian 0% pada semester I, seluruh target masih harus dikejar pada semester II. Apabila tidak segera dilakukan percepatan, terdapat risiko target tahunan tidak tercapai dan kesenjangan pelayanan dasar tetap tinggi.	Menetapkan indikator air baku, air minum, energi dan penurunan emisi sebagai sasaran pengendalian prioritas; melakukan review kesiapan kegiatan, mempercepat pelaksanaan fisik, memastikan dukungan lintas sektor dan memperbaiki mekanisme pengukuran capaian.
2	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat - Penyakit Menular**	Penemuan dan pengobatan TB: target 100%, realisasi 11,70%, capaian 11,70% (SR).	Cakupan penemuan dan pengobatan TB masih sangat rendah, sedangkan jumlah kematian ibu telah melampaui target maksimum. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini, penjangkauan sasaran, kesinambungan pengobatan dan penguatan pelayanan maternal masih perlu ditingkatkan.	Risiko tidak tercapainya target pengendalian TB dan meningkatnya beban kesehatan masyarakat masih tinggi.	Menempatkan TB sebagai prioritas korektif; memperkuat active case finding, pelacakan kontak, case holding. sistem rujukan kegawatdaruratan.
3	**Kesehatan – Keberhasilan Pengobatan TB**	Bunguran Selatan 20%/24,39% (SR); Kelarik 0%/0% (SR); Bunguran Tengah 25%/30,49% (R); Serasan Timur 25%/30,49% (R); Pulau Tiga 0%/0% (SR); Subi 0%/0% (SR); Sedanau 15,38%/18,76% (SR); Suak Midai 0%/0% (SR); Pulau Tiga	Permasalahan TB bersifat cukup luas karena terjadi pada banyak Puskesmas, bukan hanya satu lokasi. Capaian 0% pada beberapa Puskesmas menunjukkan perlunya verifikasi terhadap kesinambungan pasien dari penemuan kasus sampai selesai	Dengan posisi kabupaten baru 15,18% dibandingkan target 82%, diperlukan peningkatan yang sangat signifikan pada semester II. Tanpa intervensi khusus, target keberhasilan	Menetapkan TB sebagai indikator prioritas pengendalian bulanan; membuat daftar pasien, memperkuat pelacakan pasien mangkir, contact tracing, pengawasan minum obat, pendampingan

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
		Barat 0%/0% (SR); Pulau Laut 0%/0% (SR); Ranai 23,53%/28,70% (R). Tingkat kabupaten hanya 15,18% dari target 82% atau 18,51% (SR).	pengobatan. Indikasi penyebab dapat berkaitan dengan penemuan kasus, kepatuhan pengobatan, pelacakan pasien dan kualitas case management.	pengobatan TB berisiko tinggi tidak tercapai.	keluarga dan evaluasi kinerja TB per Puskesmas.
4	**Kesehatan – PONED**	Pemenuhan 10 sinyal fungsi PONED pada Ranai, Bunguran Tengah, Serasan, Tanjung, Midai, Batubi Jaya, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Serasan Timur, Sedanau, Kelarik dan Pulau Laut seluruhnya 0% dari target 100% (SR). Kecamatan dengan Puskesmas PONED sesuai standar baru 5,8% dari target 27%, capaian 21,48% (SR).	Capaian 0% pada hampir seluruh Puskesmas menunjukkan pemenuhan standar PONED belum menghasilkan output terukur. Pola tersebut mengindikasikan adanya gap pada sarana, alat, SDM, obat, kompetensi atau kesiapan sistem rujukan yang perlu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.	Bila tidak dipercepat, cakupan Puskesmas yang memenuhi standar PONED akan tetap rendah dan berdampak pada akses pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.	Dalam Perubahan RKPD perlu ditetapkan Puskesmas prioritas, kemudian diarahkan untuk menyelesaikan gap 10 sinyal PONED melalui pemenuhan sarana, alat, obat, SDM, pelatihan dan sistem rujukan.
5	**Kesehatan – Imunisasi**	IDL ≥80% pada Serasan 29,8% dari target 92,5%, capaian 32,22% (R); Pulau Tiga Barat 22,6%/24,43% (SR); Kelarik 22,7%/24,54% (SR); Subi 18,3%/19,78% (SR); Suak Midai 20,8%/22,49% (SR). Kecamatan dengan IDL bayi ≥80%: 0% dari target 66,6% (SR).	Rendahnya cakupan pada beberapa wilayah menunjukkan bahwa pelayanan imunisasi belum menjangkau sasaran secara merata. Indikasi penyebab perlu ditelusuri melalui pemutakhiran sasaran bayi, drop out, keterjangkauan pelayanan dan konsistensi pelayanan Posyandu/Puskesmas.	Dengan beberapa wilayah masih di bawah 25%, diperlukan percepatan cukup besar agar target tahunan dapat didekati. Jika tidak, cakupan imunisasi akan tetap menjadi titik lemah pelayanan kesehatan primer.	Melaksanakan microplanning imunisasi per desa, pemutakhiran sasaran, pelacakan bayi yang belum lengkap imunisasi, pelayanan jemput bola dan pengendalian capaian bulanan per Puskesmas.
6	**Kesehatan – Pelayanan Kesehatan Gratis dan HIV**	Kesehatan gratis: Kelarik 0,91% dari target 36% (2,53% SR); Ranai 2,72% (7,56% SR); Sedanau 0,76% (2,11% SR); Bunguran Tengah 3,23% (8,97% SR); Serasan Timur 1,70% (4,72% SR); Subi 0,38% (1,06% SR); Batubi Jaya 1,10% (3,06% SR); Tanjung 7,5% (20,83% SR);	Capaian pelayanan kesehatan gratis sangat rendah pada sebagian besar Puskesmas. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan jangkauan sasaran, pemanfaatan layanan, sosialisasi atau mekanisme pelayanan. Pada HIV, cakupan ARV baru 29,33%, sehingga kesinambungan	Rendahnya pemanfaatan layanan berpotensi menyebabkan manfaat program tidak diterima oleh kelompok sasaran secara optimal sampai akhir tahun.	Memutakhirkan data sasaran, melakukan pelayanan aktif/jemput bola, memperkuat sosialisasi, meningkatkan penjangkauan kelompok berisiko HIV dan memastikan kesinambungan ARV.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
		Suak Midai 6,42% (17,83% SR); Pulau Tiga Barat 8,56% (23,78% SR). Pemeriksaan kesehatan gratis >80%: 0% dari target 6,7% (SR). HIV/ARV: 29,33% dari target 100% (R); pelayanan orang berisiko HIV Sedanau 17,69% (SR).	pengobatan dan penjangkauan perlu diperkuat.		
7	**Kesehatan – BBLR dan Mutu Pelayanan**	BBLR Suak Midai 28,57%, target 14,5%, capaian 2,97% (SR); Kelarik 40%, target 2,95%, capaian -1.155,93% (SR); Bunguran Selatan 11,76%, target 4,05%, capaian -90,37% (SR); Sedanau 21,88%, target 9,14%, capaian -39,39% (SR). PKP >80%: 0% dari target 100% (SR). SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya: 0% dari target 34,61% (SR).	BBLR pada beberapa wilayah masih lebih tinggi daripada target, sementara peningkatan kompetensi SDM dan kinerja Puskesmas belum menunjukkan capaian. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pelayanan ibu dan anak, status gizi, pemeriksaan kehamilan dan kapasitas tenaga kesehatan.	Apabila tidak dikoreksi, masalah BBLR dan mutu pelayanan dapat memengaruhi kualitas outcome kesehatan ibu dan anak serta capaian indikator kesehatan lainnya.	Audit kasus BBLR, penguatan ANC, pemantauan status gizi ibu hamil, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pendampingan Puskesmas berkinerja rendah.
8	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Persampahan 0%/23,26% (SR); akses air minum perpipaan 0%/68,57% (SR); dokumen RTR 0/1 dokumen (SR); TKK terampil 0%/55,56% (SR); layanan air limbah domestik 0%/9,97% (SR); kualitas jalan 0%/42,83% (SR); penataan bangunan 0%/85,25% (SR); bangunan gedung baik 0%/85,71% (SR); drainase 0%/43,35% (SR); akses air minum SPAM 0%/78% (SR); pengolahan air limbah 0%/68,41% (SR); sanitasi layak 0%/65,9% (SR).	Konsentrasi capaian 0% pada banyak indikator menunjukkan adanya gap antara target pembangunan infrastruktur dengan output yang tercatat sampai TW II. Karena indikator meliputi berbagai jenis pekerjaan, perlu dibedakan apakah persoalan berada pada tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan fisik atau pelaporan.	Hampir seluruh target masih harus dicapai pada semester II. Tanpa percepatan, risiko tidak tercapainya target pelayanan dasar sangat tinggi.	Perubahan RKPD perlu memprioritaskan kegiatan dengan gap terbesar, mempercepat pengadaan dan pekerjaan fisik, melakukan milestone monitoring bulanan serta memastikan realisasi fisik langsung tercermin pada capaian indikator.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
9	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Rumah layak huni korban bencana 0%/93% (SR); ketersediaan rumah layak huni 0%/92% (SR); perumahan dilengkapi PSU 0%/65% (SR); rasio permukiman layak huni 0/0,24 (SR).	Seluruh indikator masih 0%. Kondisi ini menunjukkan belum adanya output yang tercatat sampai TW II. Indikasi penyebab perlu ditelusuri dari kesiapan data penerima, lokasi, lahan, desain, pengadaan dan pelaksanaan.	Jika pola tidak berubah, target akhir tahun sangat berisiko tidak tercapai, terutama pada penyediaan rumah layak huni dan PSU yang membutuhkan waktu pelaksanaan fisik.	Memutakhirkan data RTLH dan korban bencana, menetapkan lokasi prioritas, mempercepat pengadaan dan pembangunan, serta memastikan integrasi PSU dengan penanganan kawasan permukiman.
10	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Kompetensi PPNS 16,66% dari target 65%, capaian 25,63% (R); perlindungan masyarakat 0%/75% (SR); warga memperoleh layanan penanggulangan bencana 0%/35,5% (SR).	Peningkatan kapasitas PPNS masih rendah, sementara indikator perlindungan masyarakat dan layanan kebencanaan belum menunjukkan capaian. Indikasi penyebab terkait kapasitas SDM, cakupan pembinaan dan kesiapan pelayanan.	Rendahnya capaian dapat mengurangi kesiapan daerah dalam memberikan perlindungan dan respons terhadap masyarakat.	Mempercepat pelatihan/sertifikasi PPNS, penguatan Linmas, pemutakhiran cakupan masyarakat terlindungi dan penguatan sistem pelayanan kebencanaan.
11	**Sosial**	Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi: target 9,17%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Program pelayanan sosial telah menunjukkan capaian baik pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi outcome berupa peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat belum muncul. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi masih perlu diarahkan dari bantuan menuju pemberdayaan ekonomi.	Target peningkatan kemandirian ekonomi berisiko tidak tercapai apabila pendampingan usaha dan pemberdayaan tidak segera diperkuat.	Mengarahkan intervensi pada pelatihan keterampilan, bantuan produktif, pendampingan usaha, akses pembiayaan dan pemasaran bagi penerima manfaat.
12	**Ketenagakerjaan**	Tenaga kerja ditempatkan 0%/2,5% (SR); tenaga kerja bersertifikat 0%/1,31% (SR); perusahaan menerapkan tata kelola kerja layak 0%/33,4% (SR).	Belum terdapat capaian terukur pada penempatan, sertifikasi dan tata kelola kerja. Indikasi persoalan adalah belum optimalnya hubungan antara pelatihan, sertifikasi, kebutuhan pasar kerja dan pembinaan perusahaan.	Target akhir tahun berisiko tidak tercapai karena seluruh indikator masih 0% pada akhir semester I.	Mempercepat pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sertifikasi kompetensi, job matching, Bursa Kerja dan pembinaan perusahaan.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
13	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Anggaran Responsif Gender 0%/9% (SR); anak memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan komprehensif 0%/73,04% (SR).	Capaian 0% menunjukkan implementasi indikator belum tercatat. Permasalahan perlu ditelusuri dari integrasi ARG dalam perencanaan/penganggaran dan mekanisme layanan terpadu anak.	Risiko tidak tercapainya target pengarusutamaan gender dan perlindungan anak semakin besar apabila tidak ada akselerasi pada semester II.	Melakukan review ARG setiap OPD, memperjelas sasaran dan anggaran, memperkuat layanan terpadu, rujukan dan pendampingan anak.
14	**Pangan**	AKE konsumsi 0/2.100 Kkal (SR); cadangan pangan 0%/30% (SR); kerawanan pangan sedang/berat 0/4,6 (SR); AKE ketersediaan 0/2.400 Kkal (SR).	Empat indikator belum menunjukkan capaian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan data ketahanan pangan dan intervensi yang lebih terarah pada ketersediaan, cadangan dan kelompok rentan pangan.	Ketiadaan capaian pada semester I meningkatkan risiko tidak tercapainya target ketahanan pangan serta menyulitkan pengukuran efektivitas intervensi.	Memperkuat neraca pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, pemetaan wilayah rentan dan intervensi terhadap rumah tangga/kelompok rentan.
15	**Pertanahan**	Pengelolaan izin membuka tanah 0%/20%; tanah untuk fasilitas umum 0%/80%; inventarisasi tanah kosong 0%/19,97%; TOL siap redistribusi 0%/20%; penyelesaian sengketa 0%/80%; tanah bersertifikat 0%/87% — seluruhnya SR.	Seluruh indikator masih 0%, menunjukkan belum adanya capaian terukur dalam administrasi dan pengelolaan pertanahan. Indikasi hambatan dapat berasal dari inventarisasi, verifikasi, koordinasi dengan instansi pertanahan dan penyelesaian administrasi.	Target tahunan sangat berisiko tidak tercapai tanpa percepatan, terutama indikator yang membutuhkan proses lintas instansi.	Menyusun roadmap pertanahan, menetapkan bidang/lokasi prioritas, mempercepat inventarisasi dan verifikasi serta membangun koordinasi intensif dengan instansi pertanahan.
16	**Lingkungan Hidup**	Lahan konservasi 0/3,1 Ha (SR); luas RTH 16% dari target 80%, capaian 20% (SR); rehabilitasi/pemulihan SDA 0%/21,44% (SR).	Kinerja pengelolaan lingkungan secara umum memiliki beberapa indikator baik, tetapi penyediaan RTH, konservasi dan rehabilitasi SDA masih tertinggal. Hal ini mengindikasikan perlunya kepastian lokasi/lahan serta percepatan kegiatan rehabilitasi.	Dengan RTH baru 16% dari target 80%, terdapat kesenjangan 64 poin persentase yang harus dikejar; target akhir tahun berisiko tidak tercapai tanpa intervensi terarah.	Menetapkan lokasi RTH dan konservasi prioritas, mempercepat rehabilitasi, mengintegrasikan kebutuhan RTH dengan penataan ruang dan meningkatkan kemitraan pengelolaan lingkungan.
17	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Kepemilikan IKD: target 30,05%, realisasi 8,60%, capaian 28,62% (R).	Capaian baru sekitar 29% dari target, sementara indikator administrasi kependudukan lainnya relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa persoalan	Masih terdapat kesenjangan 21,45 poin persentase terhadap target.	Pelayanan jemput bola, aktivasi IKD pada pelayanan publik, desa/kecamatan dan kelompok sasaran, serta kampanye penggunaan IKD.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
			lebih spesifik berada pada adopsi/aktivasi IKD, bukan keseluruhan layanan adminduk.		
18	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Fasilitasi kerja sama desa: target 50%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Belum terdapat capaian kerja sama desa. Indikasi persoalan adalah belum teridentifikasinya bentuk kerja sama prioritas atau belum tuntasnya fasilitasi sampai menghasilkan dokumen kerja sama.	Target tahunan berisiko tidak tercapai jika fasilitasi tidak segera diarahkan pada kerja sama konkret.	Mengidentifikasi potensi kerja sama antardesa dan dengan pihak lain, menetapkan desa sasaran serta mendampingi sampai dokumen kerja sama ditetapkan.
19	**Koperasi dan UKM**	Koperasi aktif: target 29,51%, realisasi 0%, capaian 0% (SR). Koperasi yang memperoleh fasilitasi pelatihan: target 25,73%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Rendahnya indikator koperasi terjadi pada aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Sementara indikator transformasi usaha mikro dan pertumbuhan volume usaha koperasi justru relatif lebih baik. Ini menunjukkan perlunya fokus pada koperasi yang belum aktif dan peningkatan kapasitas pengelola.	Tanpa intervensi, target koperasi aktif dan fasilitasi pelatihan berisiko tidak tercapai, meskipun beberapa indikator usaha sudah menunjukkan perkembangan.	Melakukan klasifikasi koperasi aktif/tidak aktif, pembinaan tata kelola, pelatihan pengurus, pendampingan dan fasilitasi koperasi yang berpotensi berkembang.
20	**Penanaman Modal**	Penyelesaian permasalahan/hambatan pelaku usaha: target 100%, realisasi 16,66%, capaian 16,66% (SR).	Baru sekitar satu perenam permasalahan pelaku usaha yang terselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian hambatan investasi belum cukup responsif atau membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah.	Masih terdapat kesenjangan 83,34 poin persentase. Apabila tidak dilakukan case management, hambatan investasi dapat berlanjut sampai akhir tahun.	Membentuk daftar case per pelaku usaha, menetapkan OPD penanggung jawab, batas waktu penyelesaian dan melakukan rapat penyelesaian hambatan investasi secara berkala.
21	**Kepemudaan dan Olahraga**	Pemuda mengikuti pelatihan/kursus dan memperoleh sertifikat: 0%/10% (SR). Atlet kabupaten masuk Pelatda Provinsi: 0%/10% (SR).	Belum terdapat capaian pada dua indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan bersertifikat dan pembinaan atlet belum menghasilkan output terukur pada semester I.	Seluruh target masih harus dicapai pada semester II sehingga memerlukan jadwal dan sasaran yang jelas.	Menetapkan kalender pelatihan/sertifikasi pemuda, sasaran peserta, serta talent scouting, pembinaan dan fasilitasi atlet potensial.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
22	**Statistik**	OPD menyediakan data dan metadata statistik sektoral: target 90%, realisasi 25%, capaian 27,78% (R).	Baru 25% OPD yang memenuhi target, menunjukkan belum optimalnya tata kelola data sektoral. Dampaknya adalah kualitas dan ketersediaan data pembangunan belum merata.	Masih terdapat kesenjangan 65 poin persentase terhadap target 90%. Jika tidak diperbaiki, konsistensi evaluasi dan perencanaan berbasis data akan terganggu.	Menetapkan data owner setiap OPD, daftar data wajib, standar metadata, batas waktu pemutakhiran dan mekanisme quality assurance data.
23	**Kebudayaan**	Warisan budaya yang dilestarikan: target 99,02%, realisasi 31,91%, capaian 32,23% (R).	Capaian baru sekitar sepertiga target. Indikasi persoalan berada pada proses inventarisasi, dokumentasi, penetapan dan pelestarian objek budaya.	Terdapat kesenjangan 67,11 poin persentase, sehingga diperlukan percepatan substansial.	Menetapkan daftar warisan budaya prioritas, mempercepat inventarisasi dan dokumentasi serta mengalokasikan intervensi pelestarian yang terukur.
24	**Perpustakaan**	Indeks pembangunan literasi masyarakat: target 75, realisasi 10,91, capaian 14,55% (SR).	Meskipun indeks kepuasan pemustaka dan kegemaran membaca relatif lebih baik, indeks pembangunan literasi masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi outcome literasi masyarakat.	Terdapat kesenjangan 64,09 poin indeks terhadap target. Target akhir tahun sangat menantang tanpa perluasan intervensi literasi.	Memperluas layanan perpustakaan berbasis desa/sekolah/komunitas, meningkatkan kegiatan literasi dan mengarahkan program pada peningkatan outcome, bukan hanya jumlah kegiatan.
25	**Kearsipan**	Perlindungan dan penyelamatan arsip: target 60%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Meskipun pengelolaan arsip oleh OPD menunjukkan capaian baik, perlindungan dan penyelamatan arsip belum menghasilkan capaian. Ini menunjukkan adanya gap antara pengelolaan rutin dan penyelamatan arsip prioritas/vital.	Seluruh target masih harus dikejar pada semester II.	Inventarisasi arsip vital, pemetaan risiko kehilangan/kerusakan, digitalisasi dan penyelamatan arsip prioritas.
26	**Pariwisata**	Pertumbuhan tamu wisatawan asing: target -37,88%, realisasi -0,26%, capaian 0,69% (SR). Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual: target 10%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Pertumbuhan wisatawan asing belum bergerak sesuai target indikator, sedangkan pelaku ekonomi kreatif belum memiliki capaian kepemilikan KI. Indikasi persoalan perlu diarahkan pada promosi pasar sasaran, penguatan	Rendahnya capaian dapat menghambat kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Memperkuat promosi wisata sasaran, paket destinasi, kolaborasi pelaku usaha, serta fasilitasi pendaftaran KI bagi pelaku ekonomi kreatif.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
			produk dan fasilitasi legalitas/kekayaan intelektual.		
27	**Pertanian**	Peningkatan produksi tanaman pangan: target 1,5%, realisasi 0%, capaian 0% (SR). Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B: target 0,1 Ha, realisasi 0, capaian 0% (SR).	Belum terdapat capaian peningkatan produksi dan penetapan LP2B. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan produksi sekaligus kepastian perlindungan lahan pertanian.	Target produksi dan perlindungan lahan berisiko tidak tercapai dan dapat berdampak pada keberlanjutan sektor pangan daerah.	Menetapkan lokasi prioritas LP2B, mempercepat proses penetapan, meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan sarana produksi pada kawasan prioritas.
28	**Perdagangan**	Izin usaha perdagangan yang difasilitasi: 0%/17,69% (SR). Promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan: 0%/34,83% (SR).	Beberapa indikator perdagangan sudah baik, tetapi fasilitasi legalitas usaha dan promosi produk lokal belum menghasilkan capaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi belum merata pada aspek penguatan pelaku usaha dan pemasaran produk lokal.	Jika tidak dipercepat, peluang peningkatan formalitas usaha dan pemasaran produk lokal belum optimal pada akhir tahun.	Mempercepat fasilitasi izin usaha, menyusun agenda promosi produk lokal dan menghubungkannya dengan sektor pariwisata, perdagangan serta pengadaan pemerintah.
29	**Transmigrasi**	Program transmigrasi yang dilaksanakan: target 33,32%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Belum terdapat capaian program. Indikasi hambatan perlu ditelusuri dari kesiapan lokasi, calon penerima, dukungan lintas sektor dan tahapan pelaksanaan.	Target tahunan berisiko tidak tercapai apabila pelaksanaan tidak segera dimulai pada semester II.	Melakukan review kesiapan program, menetapkan milestone, lokasi dan sasaran serta menyelesaikan hambatan lintas sektor.
30	**Sekretariat Daerah/Pengadaan**	Pengadaan dengan metode kompetitif: target 67,56%, realisasi 8,7%, capaian 12,88% (SR).	Capaian baru 12,88% dari target, menunjukkan proses pengadaan kompetitif belum berjalan sesuai kebutuhan. Indikasi penyebab perlu ditelusuri dari kesiapan dokumen, paket pengadaan, jadwal dan proses pemilihan.	Masih terdapat kesenjangan 54,86 poin persentase terhadap target. Keterlambatan pengadaan berpotensi menimbulkan keterlambatan realisasi fisik kegiatan.	Melakukan review seluruh paket pengadaan, menetapkan paket kritis, mempercepat dokumen persiapan dan melakukan monitoring mingguan terhadap proses pengadaan.
31	**Sekretariat DPRD**	Penetapan Ranperda Tahun N: target 80%, realisasi 0%, capaian 0% (SR).	Belum terdapat capaian penetapan Ranperda. Indikasi hambatan dapat berada pada tahapan pembahasan, harmonisasi atau proses	Keterlambatan dapat memengaruhi penyelesaian agenda regulasi daerah tahun berjalan.	Menetapkan daftar Ranperda prioritas, timeline pembahasan, harmonisasi dan penyelesaian setiap tahapan secara terukur.

No.	Aspek/Urusan	Data Kuantitatif Capaian	Analisis Evaluatif dan Indikasi Penyebab	Konsekuensi terhadap Target Akhir 2026	Tindakan Korektif yang Perlu Diakomodasi dalam Perubahan RKPD
			persetujuan yang memerlukan koordinasi antarlembaga.		
32	**Keuangan Daerah**	Belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui TKD: 0%/33,5% (SR); PAD terhadap pendapatan 0%/6,98% (SR); penambahan nilai aset tetap 0%/2,63% (SR); realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar 0%/90,15% (SR).	Capaian 0% pada beberapa indikator keuangan memerlukan verifikasi khusus, karena dapat menunjukkan belum adanya realisasi maupun belum optimalnya pencatatan/pelaporan. Rendahnya realisasi belanja pelayanan dasar perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pencapaian pelayanan masyarakat.	Apabila 0% merupakan kondisi riil, maka target akhir tahun menghadapi risiko sangat tinggi. Apabila masalahnya pelaporan, keterlambatan pemutakhiran data akan mengganggu kualitas evaluasi.	Melakukan rekonsiliasi data fisik-keuangan, cash flow review, percepatan belanja pelayanan dasar, optimalisasi PAD dan memastikan pencatatan aset dilakukan tepat waktu.
33	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: target 100%, realisasi 25%, capaian 25% (SR). Pendidikan politik kader partai politik: 0%/75,06% (SR). Kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika/kerukunan umat beragama: 0%/100% (SR).	Capaian rendah terkonsentrasi pada kegiatan yang membutuhkan pelaksanaan program dan koordinasi dengan berbagai kelompok sasaran.	Kesenjangan pelaksanaan berpotensi menyebabkan target pembinaan kebangsaan, pendidikan politik dan ketahanan sosial tidak tercapai.	Menetapkan kalender kegiatan semester II, memperjelas sasaran dan lokasi, memperkuat koordinasi dengan stakeholder serta memastikan setiap kegiatan menghasilkan output yang terukur.

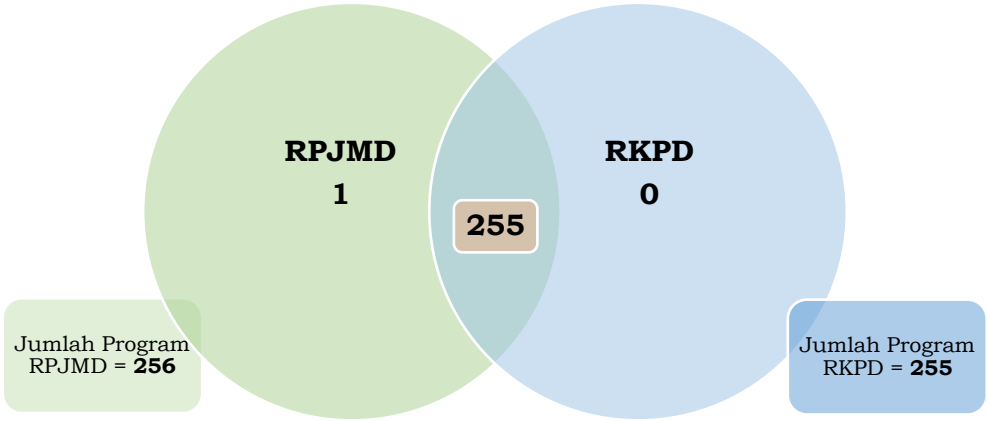
Sumber: Tim Penyusun, diolah (2026).

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.3.1. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Periode 2025-2029

Keselarasan antara program dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut menunjukkan keterkaitan antara program pembangunan tahunan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Melalui evaluasi terhadap keselarasan program tersebut, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan RKPD Tahun 2026 mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Berikut ini disajikan irisan keselarasan antara program RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.



Gambar 2.1.
Irisan Kesesuaian Program RPJMD (Target 2026) dan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Natuna
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

Berdasarkan hasil perbandingan program RPJMD Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, terdapat 256 program yang tercantum dalam RPJMD dengan 551 target indikator, sedangkan dalam RKPD Tahun 2026 diakomodasi sebanyak 255 program dengan 549 target indikator. Dari jumlah tersebut, seluruh 255 program RKPD telah selaras dengan program RPJMD, sehingga tidak terdapat program RKPD yang tidak

selaras. Sementara itu, terdapat 1 program RPJMD yang belum diakomodir dalam RKPD Tahun 2026 dan 2 indikator program RPJMD yang belum tercantum dalam RKPD, yaitu:

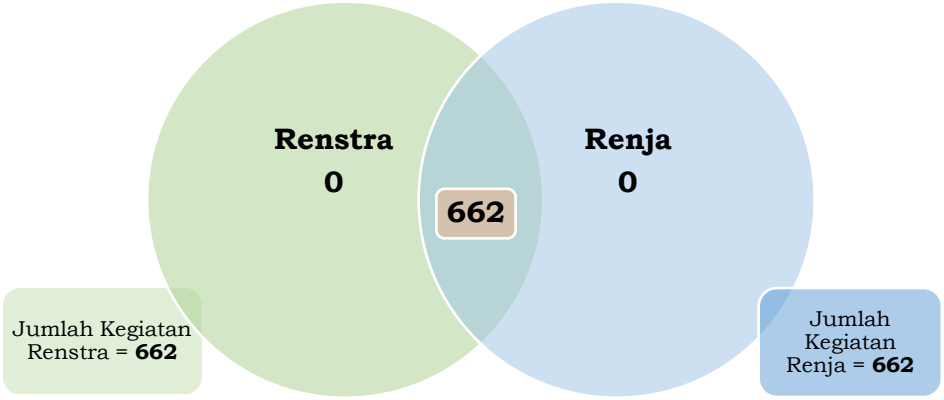
1. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
2. Indikator jumlah naskah kuno yang diakuisisi dan dilestarikan, pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
3. Indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keselarasan program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 telah sangat baik, karena seluruh program yang diakomodir dalam RKPD telah sesuai dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Demikian pula, seluruh 549 target indikator program RKPD telah selaras dengan indikator dalam RPJMD, sehingga secara umum tidak terdapat ketidaksesuaian antara target indikator program yang direncanakan. Namun, keberadaan 1 program dan 2 indikator RPJMD yang belum diakomodir perlu menjadi perhatian dalam evaluasi dan penyusunan perencanaan berikutnya agar seluruh arah kebijakan dan target pembangunan jangka menengah dapat terakomodasi secara optimal dan konsisten dalam dokumen perencanaan tahunan.

2.3.2. Keselarasan Kegiatan Renja dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Renstra Periode 2025-2029)

Berdasarkan hasil evaluasi keselarasan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diketahui bahwa terdapat 662 kegiatan dalam Renstra dan 662 kegiatan dalam Renja Tahun 2026. Seluruh kegiatan tersebut memiliki kesesuaian, ditunjukkan dengan adanya 726 kegiatan yang berada pada irisan antara Renstra dan Renja, sedangkan tidak terdapat kegiatan yang berdiri di luar irisan, baik pada Renstra maupun Renja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan antara Renstra dan Renja Tahun 2026 telah mencapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 telah mengacu dan selaras dengan arah perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029. Dengan demikian, secara perencanaan tidak terdapat kegiatan Renja yang berada di luar kerangka Renstra, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan telah terjaga dengan baik.



Gambar 2.2.
Irisan Kesesuaian Kegiatan Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa dari total 662 kegiatan yang tercantum dalam Renstra, seluruhnya telah terakomodasi ke dalam Renja Tahun 2026. Demikian pula, seluruh 662 kegiatan yang terdapat dalam Renja merupakan kegiatan yang bersumber dan selaras dengan Renstra. Dengan demikian, tingkat kesesuaian antara kedua dokumen perencanaan tersebut mencapai 100 persen, sebagaimana ditunjukkan oleh irisan sebanyak 662 kegiatan, tanpa terdapat kegiatan yang hanya terdapat pada Renstra maupun Renja (masing-masing sebesar 0 kegiatan).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan Renja Tahun 2026 telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode 2025-2029. Seluruh kegiatan tahunan yang direncanakan telah memiliki landasan yang jelas dalam dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip konsistensi, sinkronisasi, dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyusunan dokumen perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip *money follows* program *dan performance based planning*, dimana setiap kegiatan yang direncanakan merupakan instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Tidak ditemukannya kegiatan di luar Renstra menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan kegiatan yang bersifat insidental maupun tidak memiliki dasar dalam dokumen perencanaan strategis. Sebaliknya,

seluruh kegiatan prioritas yang telah direncanakan dalam Renstra telah diterjemahkan ke dalam Renja Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berjalan.

Tingkat konsistensi yang tinggi tersebut juga memberikan implikasi positif terhadap kualitas penganggaran daerah. Kesesuaian penuh antara Renstra dan Renja memperkuat keterkaitan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat diarahkan secara lebih efektif untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya duplikasi kegiatan dan inefisiensi penggunaan anggaran.

Meskipun demikian, kesesuaian dokumen perencanaan sebesar 100 persen belum sepenuhnya menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan. Konsistensi antara Renstra dan Renja merupakan indikator kualitas proses perencanaan, sedangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan kegiatan sesuai target fisik dan keuangan, mencapai indikator keluaran (output) dan hasil (*outcome*), serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Oleh karena itu, pada tahapan evaluasi selanjutnya perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta kontribusi masing-masing kegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya sehingga kesinambungan antara dokumen perencanaan tidak hanya tercermin pada aspek administratif, tetapi juga menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsistensi antara Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026 telah mencapai kategori sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen (662 dari 662 kegiatan). Capaian ini mencerminkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan yang telah memenuhi prinsip keterpaduan, konsistensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Natuna secara berkelanjutan.

Perincian jumlah dan irisan keselarasan kegiatan antara Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang menurut masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
		Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renja = Renstra	Renja ≠ Renstra
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	25	0	25	0
2	Dinas Kesehatan	23	23	0	23	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	22	0	22	0
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	14	14	0	14	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	11	11	0	11	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10	10	0	10	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	11	0	11	0
8	Dinas Sosial	14	14	0	14	0
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	12	0	12	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26	26	0	26	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	23	23	0	23	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	17	17	0	17	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	18	0	18	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	0	12	0
15	Dinas Perhubungan	15	15	0	15	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	0	12	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	0	13	0
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	12	12	0	12	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	12	0	12	0
20	Dinas Perikanan	12	12	0	12	0
21	Dinas Pariwisata	12	12	0	12	0
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	24	24	0	24	0
23	Sekretariat Daerah	19	19	0	19	0
24	Sekretariat DPRD	14	14	0	14	0
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	14	0	14	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13	13	0	13	0
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	0	12	0
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10	10	0	10	0
29	Inspektorat Daerah	12	12	0	12	0
30	Kecamatan Bunguran Timur	13	13	0	13	0
31	Kecamatan Bunguran Barat	12	12	0	12	0
32	Kecamatan Bunguran Utara	14	14	0	14	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
		Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renja = Renstra	Renja ≠ Renstra
33	Kecamatan Pulau Laut	12	12	0	12	0
34	Kecamatan Midai	12	12	0	12	0
35	Kecamatan Serasan	14	14	0	14	0
36	Kecamatan Subi	12	12	0	12	0
37	Kecamatan Pulau Tiga	10	10	0	10	0
38	Kecamatan Bunguran Tengah	11	11	0	11	0
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	13	13	0	13	0
40	Kecamatan Bunguran Selatan	12	12	0	12	0
41	Kecamatan Serasan Timur	12	12	0	12	0
42	Kecamatan Suak Midai	12	12	0	12	0
43	Kecamatan Bunguran Batubi	12	12	0	12	0
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	12	12	0	12	0
45	Kecamatan Pulau Panjang	10	10	0	10	0
46	Kecamatan Pulau Seluan	13	13	0	13	0
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	0	12	0
Jumlah		**662**	**662**	**0**	**662**	**0**

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

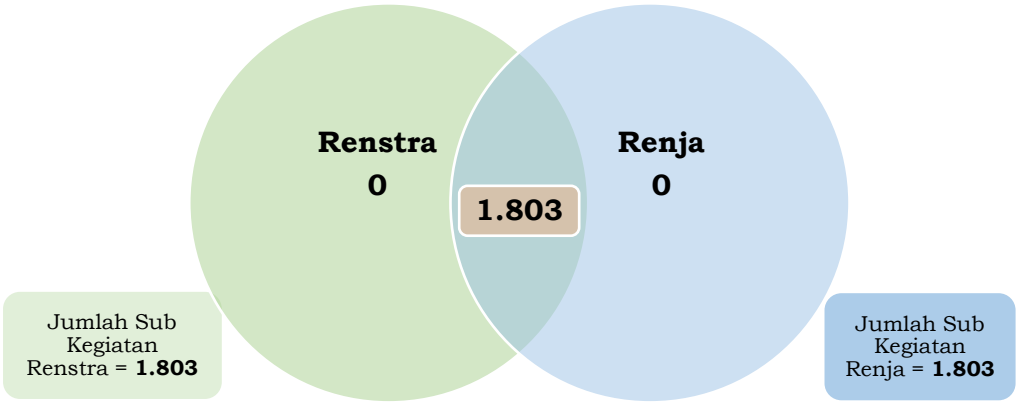
2.3.3. Keselarasan Sub Kegiatan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Renstra Periode 2025-2029)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diketahui bahwa terdapat 1.803 sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan jumlah yang sama, yaitu 1.803 sub kegiatan, yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026. Seluruh sub kegiatan tersebut berada pada irisan antara Renstra dan Renja, sementara tidak terdapat sub kegiatan yang berada di luar irisan pada masing-masing dokumen. Maka seluruh sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 telah memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian sub kegiatan antara Renstra Periode 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 telah mencapai 100 persen. Tingkat kesesuaian ini mencerminkan adanya konsistensi yang sangat baik antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penyusunan Renja Tahun 2026 telah mengacu pada arah, kebijakan, dan kerangka program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga tidak terdapat sub kegiatan baru yang berada di luar kerangka perencanaan jangka menengah.

Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, kesesuaian tersebut menjadi indikasi positif terhadap konsistensi dan kesinambungan perencanaan serta dapat mendukung keterpaduan pelaksanaan program

dan kegiatan Perangkat Daerah. Kesesuaian secara administratif tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kinerja dan capaian pelaksanaan sub kegiatan, sehingga keselarasan antara Renstra dan Renja tidak hanya tercermin dari kesamaan daftar sub kegiatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Maka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 1.803 sub kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh sub kegiatan yang telah selaras dapat dilaksanakan.



Gambar 2.3.
Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renstra Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian Sub Kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029 dengan Renja Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa dari total 1.803 sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra, seluruhnya telah terakomodasi dalam Renja Tahun 2026. Demikian pula, seluruh 1.803 sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja merupakan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100 persen, yang ditandai dengan irisan sebanyak 1.803 sub kegiatan, tanpa terdapat sub kegiatan yang hanya terdapat pada Renstra maupun Renja (masing-masing sebesar 0 sub kegiatan).

Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses penyusunan Renja Tahun 2026 telah dilaksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada dokumen Renstra Periode 2025-2029. Seluruh sub kegiatan yang menjadi instrumen operasional pelaksanaan program telah disusun sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dengan

demikian, terdapat keterpaduan yang kuat antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan memiliki arah yang jelas serta mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah secara berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola pembangunan daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan telah berjalan secara optimal. Tidak ditemukannya sub kegiatan di luar Renstra mengindikasikan bahwa penyusunan Renja tidak memuat aktivitas yang bersifat ad hoc maupun yang tidak memiliki dasar dalam dokumen perencanaan strategis. Sebaliknya, seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra berhasil diterjemahkan secara operasional ke dalam Renja Tahun 2026, sehingga mencerminkan penerapan prinsip konsistensi perencanaan, akuntabilitas, serta kesinambungan pembangunan daerah.

Kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen juga menunjukkan bahwa perangkat daerah telah menerapkan prinsip money follows program dan performance based planning, dimana setiap alokasi sumber daya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator program, sasaran perangkat daerah, serta sasaran pembangunan Kabupaten Natuna. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas penganggaran, meminimalkan potensi tumpang tindih kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh belanja daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, tingkat kesesuaian dokumen perencanaan yang mencapai 100 persen perlu diikuti dengan kualitas implementasi yang memadai. Konsistensi antara Renstra dan Renja merupakan indikator kualitas proses perencanaan, namun keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan sub kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, serta capaian indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Oleh karena itu, evaluasi pada tahap berikutnya perlu difokuskan pada pengukuran kontribusi masing-masing sub kegiatan terhadap pencapaian indikator kinerja program, indikator kinerja perangkat daerah, dan sasaran RKPD Tahun 2026.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesesuaian Sub Kegiatan Renstra Periode 2025–2029 dengan Renja Tahun 2026 berada pada kategori sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat kesesuaian sebesar 100 persen (1.803 dari 1.803 sub kegiatan). Capaian ini mencerminkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan yang telah memenuhi prinsip keterpaduan, konsistensi, sinkronisasi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, fokus pembangunan perlu diarahkan

pada peningkatan kualitas pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian kinerja pembangunan, sehingga konsistensi dokumen perencanaan dapat diwujudkan menjadi hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

Tabel 2.5.
Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan				
		Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renja = Renstra	Renja ≠ Renstra
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	166	166	0	166	0
2	Dinas Kesehatan	93	93	0	93	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66	66	0	66	0
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	31	31	0	31	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	48	48	0	48	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24	24	0	24	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48	48	0	48	0
8	Dinas Sosial	35	35	0	35	0
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24	24	0	24	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61	61	0	61	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	43	43	0	43	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	36	36	0	36	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	34	0	34	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55	55	0	55	0
15	Dinas Perhubungan	34	34	0	34	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	42	42	0	42	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39	39	0	39	0
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	36	36	0	36	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	27	0	27	0
20	Dinas Perikanan	30	30	0	30	0
21	Dinas Pariwisata	30	30	0	30	0
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	43	43	0	43	0
23	Sekretariat Daerah	54	54	0	54	0
24	Sekretariat DPRD	42	42	0	42	0
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30	30	0	30	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	48	48	0	48	0
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	28	0	28	0
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	24	24	0	24	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan				
		Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renja = Renstra	Renja ≠ Renstra
29	Inspektorat Daerah	36	36	0	36	0
30	Kecamatan Bunguran Timur	31	31	0	31	0
31	Kecamatan Bunguran Barat	28	28	0	28	0
32	Kecamatan Bunguran Utara	32	32	0	32	0
33	Kecamatan Pulau Laut	30	30	0	30	0
34	Kecamatan Midai	21	21	0	21	0
35	Kecamatan Serasan	31	31	0	31	0
36	Kecamatan Subi	28	28	0	28	0
37	Kecamatan Pulau Tiga	17	17	0	17	0
38	Kecamatan Bunguran Tengah	27	27	0	27	0
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	30	30	0	30	0
40	Kecamatan Bunguran Selatan	29	29	0	29	0
41	Kecamatan Serasan Timur	27	27	0	27	0
42	Kecamatan Suak Midai	26	26	0	26	0
43	Kecamatan Bunguran Batubi	29	29	0	29	0
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	23	23	0	23	0
45	Kecamatan Pulau Panjang	22	22	0	22	0
46	Kecamatan Pulau Seluan	29	29	0	29	0
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	36	0	36	0
Jumlah		**1.803**	**1.803**	**0**	**1.803**	**0**

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

2.3.4. Keselarasan Program RKPD dan APBD Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian Program RKPD Tahun 2026 dengan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, sebanyak 255 program RKPD telah diakomodir dalam APBD dan seluruhnya selaras, sehingga tidak terdapat program yang tidak selaras maupun program yang tidak diakomodir. Pada tingkat indikator, sebanyak 549 target indikator program telah selaras antara RKPD dan APBD, tanpa terdapat indikator yang tidak selaras.

Kondisi keselarasan tersebut menunjukkan bahwa keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan konsistensi yang baik antara program dan target kinerja yang direncanakan dalam RKPD dengan dukungan anggaran dalam APBD. Namun demikian, pengendalian selanjutnya perlu difokuskan pada realisasi anggaran dan capaian kinerja program, agar keselarasan perencanaan dan penganggaran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program yang efektif dan memberikan hasil sesuai target pembangunan daerah.



Gambar 2.4.
Irisan Kesesuaian Program RKPD dan APBD Kabupaten Natuna 2026
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara Program dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan Program yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, diperoleh hasil bahwa seluruh 255 program yang ditetapkan dalam RKPD telah terakomodasi secara penuh dalam APBD. Demikian pula, seluruh 255 program yang tercantum dalam APBD merupakan program yang telah direncanakan dalam RKPD. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh irisan sebanyak 255 program, sedangkan tidak terdapat program yang hanya terdapat pada RKPD maupun APBD (masing-masing sebesar 0 program). Dengan demikian, tingkat kesesuaian antara RKPD dan APBD mencapai 100 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran daerah telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada dokumen perencanaan tahunan. Seluruh program yang memperoleh alokasi anggaran dalam APBD merupakan penjabaran langsung dari prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan bahwa tahapan perencanaan dan penganggaran telah berjalan secara terpadu sesuai dengan prinsip planning and budgeting linkage, sehingga tidak terdapat program yang dianggarkan tanpa melalui proses perencanaan maupun program prioritas yang tidak memperoleh dukungan pendanaan.

Dari perspektif tata kelola pembangunan daerah, capaian kesesuaian sebesar 100 persen mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan prinsip konsistensi perencanaan dan penganggaran, dimana penyusunan APBD dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RKPD. Keterpaduan tersebut sekaligus mencerminkan implementasi prinsip money follows

program, yaitu pengalokasian sumber daya keuangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

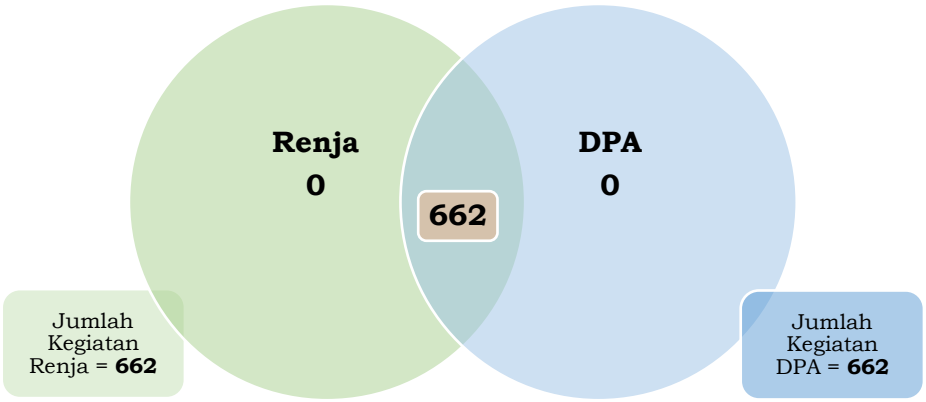
Selain memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, kesesuaian antara RKPD dan APBD juga memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan. Seluruh perangkat daerah memiliki dasar penganggaran yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Di sisi lain, tidak ditemukannya program di luar RKPD menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD telah menghindari praktik penganggaran yang tidak selaras dengan dokumen perencanaan, sehingga mampu meminimalkan risiko tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan anggaran, maupun penyimpangan terhadap prioritas pembangunan daerah.

Meskipun demikian, tingkat kesesuaian dokumen sebesar 100 persen belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Konsistensi antara RKPD dan APBD merupakan indikator kualitas proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan efektivitas pembangunan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan program, realisasi fisik dan keuangan, pencapaian indikator keluaran (output) dan hasil (outcome), serta kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, pada tahap evaluasi selanjutnya perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas implementasi program yang telah didanai melalui APBD, meliputi capaian indikator kinerja program, tingkat penyerapan anggaran, kualitas hasil pembangunan, serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar tidak hanya tercapai keselarasan administratif antara RKPD dan APBD, tetapi juga peningkatan kualitas kinerja pembangunan yang berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesesuaian Program RKPD dengan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berada pada kategori sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat kesesuaian sebesar 100 persen (255 dari 255 program). Capaian ini mencerminkan terwujudnya integrasi yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran daerah, serta menunjukkan bahwa APBD telah berfungsi sebagai instrumen pendanaan yang sepenuhnya mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.

2.3.5. Keselarasan Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, terdapat 662 kegiatan dalam Renja dan 662 kegiatan dalam DPA. Seluruh kegiatan tersebut berada pada irisan yang sama, sehingga seluruh kegiatan Renja telah diakomodir dalam DPA dan memiliki kesesuaian 100 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi yang sangat baik antara perencanaan dan penganggaran pada tingkat kegiatan. Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja telah mendapatkan dukungan penganggaran melalui DPA, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian perlu difokuskan pada realisasi pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan agar kesesuaian perencanaan dan penganggaran tersebut dapat menghasilkan output dan manfaat pembangunan secara optimal.



Gambar 2.5.
Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

Perincian jumlah dan irisan keselarasan kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 menurut masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
		Renja	DPA	Renja ≠ DPA	Renja = DPA	DPA ≠ Renja 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	25	0	25	0
2	Dinas Kesehatan	23	23	0	23	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
		Renja	DPA	Renja ≠ DPA	Renja = DPA	DPA ≠ Renja 3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	22	0	22	0
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	14	14	0	14	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	11	11	0	11	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10	10	0	10	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	11	0	11	0
8	Dinas Sosial	14	14	0	14	0
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	12	0	12	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26	26	0	26	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	23	23	0	23	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	17	17	0	17	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	18	0	18	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	0	12	0
15	Dinas Perhubungan	15	15	0	15	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	0	12	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	0	13	0
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	12	12	0	12	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	12	0	12	0
20	Dinas Perikanan	12	12	0	12	0
21	Dinas Pariwisata	12	12	0	12	0
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	24	24	0	24	0
23	Sekretariat Daerah	19	19	0	19	0
24	Sekretariat DPRD	14	14	0	14	0
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	14	0	14	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13	13	0	13	0
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	0	12	0
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10	10	0	10	0
29	Inspektorat Daerah	12	12	0	12	0
30	Kecamatan Bunguran Timur	13	13	0	13	0
31	Kecamatan Bunguran Barat	12	12	0	12	0
32	Kecamatan Bunguran Utara	14	14	0	14	0
33	Kecamatan Pulau Laut	12	12	0	12	0
34	Kecamatan Midai	12	12	0	12	0
35	Kecamatan Serasan	14	14	0	14	0
36	Kecamatan Subi	12	12	0	12	0
37	Kecamatan Pulau Tiga	10	10	0	10	0
38	Kecamatan Bunguran Tengah	11	11	0	11	0
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	13	13	0	13	0
40	Kecamatan Bunguran Selatan	12	12	0	12	0
41	Kecamatan Serasan Timur	12	12	0	12	0
42	Kecamatan Suak Midai	12	12	0	12	0
43	Kecamatan Bunguran Batubi	12	12	0	12	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
		Renja	DPA	Renja ≠ DPA	Renja = DPA	DPA ≠ Renja 3
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	12	12	0	12	0
45	Kecamatan Pulau Panjang	10	10	0	10	0
46	Kecamatan Pulau Seluan	13	13	0	13	0
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	0	12	0
Jumlah		**662**	**662**	**0**	**662**	**0**

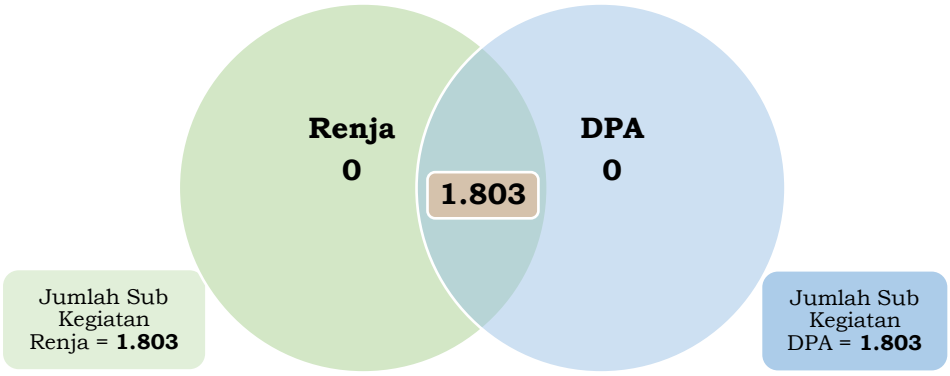
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

2.3.6. Keselarasan Sub Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil pemetaan keselarasan sub kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, jumlah sub kegiatan dalam Renja sebanyak 1.803 sub kegiatan dan jumlah sub kegiatan dalam DPA juga sebanyak 1.803 sub kegiatan. Seluruh sub kegiatan yang tercantum dalam Renja telah terakomodasi dalam DPA dengan jumlah yang sama, sehingga tidak terdapat sub kegiatan yang hanya terdapat pada salah satu dokumen.

Tingkat keselarasan sub kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja memperoleh dukungan penganggaran dalam DPA, tanpa adanya penambahan maupun pengurangan sub kegiatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses penganggaran daerah telah dilaksanakan secara konsisten dengan dokumen perencanaan tahunan. Keselarasan yang tinggi ini juga menunjukkan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan diagram irisan keselarasan antara sub kegiatan pada Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.



Gambar 2.6.
Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026
Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah).

Sedangkan rincian jumlah dan irisan keselarasan sub kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7.
Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja dan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan				
		Renja	DPA	Renja ≠ DPA	Renja = DPA	DPA ≠ Renja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	166	166	0	166	0
2	Dinas Kesehatan	93	93	0	93	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66	66	0	66	0
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	31	31	0	31	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	48	48	0	48	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24	24	0	24	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48	48	0	48	0
8	Dinas Sosial	35	35	0	35	0
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24	24	0	24	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61	61	0	61	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	43	43	0	43	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	36	36	0	36	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	34	0	34	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan				
		Renja	DPA	Renja ≠ DPA	Renja = DPA	DPA ≠ Renja
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55	55	0	55	0
15	Dinas Perhubungan	34	34	0	34	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	42	42	0	42	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39	39	0	39	0
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	36	36	0	36	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	27	0	27	0
20	Dinas Perikanan	30	30	0	30	0
21	Dinas Pariwisata	30	30	0	30	0
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	43	43	0	43	0
23	Sekretariat Daerah	54	54	0	54	0
24	Sekretariat DPRD	42	42	0	42	0
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30	30	0	30	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	48	48	0	48	0
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	28	0	28	0
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	24	24	0	24	0
29	Inspektorat Daerah	36	36	0	36	0
30	Kecamatan Bunguran Timur	31	31	0	31	0
31	Kecamatan Bunguran Barat	28	28	0	28	0
32	Kecamatan Bunguran Utara	32	32	0	32	0
33	Kecamatan Pulau Laut	30	30	0	30	0
34	Kecamatan Midai	21	21	0	21	0
35	Kecamatan Serasan	31	31	0	31	0
36	Kecamatan Subi	28	28	0	28	0
37	Kecamatan Pulau Tiga	17	17	0	17	0
38	Kecamatan Bunguran Tengah	27	27	0	27	0
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	30	30	0	30	0
40	Kecamatan Bunguran Selatan	29	29	0	29	0
41	Kecamatan Serasan Timur	27	27	0	27	0
42	Kecamatan Suak Midai	26	26	0	26	0
43	Kecamatan Bunguran Batubi	29	29	0	29	0
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	23	23	0	23	0
45	Kecamatan Pulau Panjang	22	22	0	22	0
46	Kecamatan Pulau Seluan	29	29	0	29	0
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	36	0	36	0
Jumlah		**1.803**	**1.803**	**0**	**1.803**	**0**

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RENJA-SKPD Kabupaten Natuna TW II Tahun 2026 (diolah)

2.3.7. Evaluasi Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dan APBD Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, diperoleh hasil bahwa seluruh 255 program yang ditetapkan dalam RKPD telah diakomodasi secara penuh dalam APBD. Sebaliknya, seluruh program yang dianggarkan dalam APBD juga merupakan program yang telah direncanakan dalam RKPD. Dengan demikian, tingkat kesesuaian antara kedua dokumen mencapai 100 persen, yang ditunjukkan oleh irisan sebanyak 255 program, tanpa terdapat program yang hanya terdapat dalam RKPD maupun APBD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Seluruh program yang memperoleh alokasi pendanaan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Hal ini mencerminkan terbangunnya hubungan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting linkage) sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kesesuaian sebesar 100 persen juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan prinsip money follows program, dimana alokasi anggaran difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Tidak ditemukannya program di luar RKPD menunjukkan bahwa proses penganggaran telah dilaksanakan secara disiplin dan sesuai dengan ketentuan perencanaan, sehingga mampu menjaga konsistensi kebijakan pembangunan, menghindari munculnya program yang tidak memiliki dasar perencanaan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah.

Dari aspek akuntabilitas pembangunan, keterpaduan antara RKPD dan APBD memberikan kepastian bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memiliki legitimasi perencanaan sekaligus dukungan pembiayaan. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan, karena ketercapaian target kinerja dapat diukur secara langsung melalui pelaksanaan program yang telah direncanakan dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

Meskipun demikian, konsistensi antara RKPD dan APBD tidak serta-merta menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Efektivitas pembangunan tetap ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan program, mencapai target indikator kinerja, meningkatkan penyerapan anggaran, serta menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Natuna Triwulan II Tahun 2026, rata-rata capaian kinerja indikator program baru mencapai 53,82% (Predikat Sangat Tinggi), sedangkan realisasi keuangan terhadap pagu RKPD sebesar 35,51% dan terhadap pagu APBD sebesar 35,49%, yang keduanya masih berada pada kategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek konsistensi perencanaan dan penganggaran telah terpenuhi secara optimal, percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran masih perlu terus ditingkatkan pada semester berikutnya agar target kinerja pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterkaitan antara RKPD dan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berada pada kategori sangat baik, yang ditandai dengan tingkat kesesuaian program sebesar 100 persen (255 dari 255 program). Capaian ini mencerminkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran yang telah memenuhi prinsip konsistensi, sinkronisasi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, fokus pengendalian pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas implementasi program, percepatan realisasi fisik dan keuangan, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat menghasilkan capaian pembangunan yang lebih optimal. Adapun rekap Capaian Kinerja menurut masing-masing Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026, sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026
Triwulan II (Semester I) Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator				Realisasi Keuangan				
				Program		Sub Kegiatan		Rp	Persentase Terhadap Pagu RKPD		Persentase Terhadap Pagu APBD	
				%	Predikat	%	Predikat		%	Predikat	%	Predikat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.774.086.243	247.881.454.102	73,43	ST	13,37	SR	91.332.605.328	33,98	S	36,85	S
2	Dinas Kesehatan	168.027.457.070	211.474.571.392	53,35	ST	22,44	SR	86.979.260.768	51,76	ST	41,13	T
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.069.970.178	74.551.989.815	0,00	SR	8,56	SR	7.540.900.104	9,42	SR	10,11	SR
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	37.598.610.437	24.155.107.557	0,22	SR	27,88	R	3.709.103.204	9,87	SR	15,36	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	15.507.430.866	15.929.111.941	85,16	ST	18,56	SR	7.078.557.729	45,65	ST	44,44	T
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.333.169.171	12.050.683.211	66,67	ST	26,82	R	5.984.961.123	36,64	S	49,66	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.323.754.530	15.929.111.941	99,23	ST	18,56	SR	7.078.557.729	111,94	ST	44,44	T
8	Dinas Sosial	7.370.303.437	7.427.626.337	94,03	ST	29,06	R	2.348.408.768	31,86	R	31,62	R
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.431.881.082	6.590.638.724	62,43	ST	29,26	R	3.277.755.554	60,34	ST	49,73	ST
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.213.884.202	7.413.239.706	73,54	ST	32,81	S	2.228.944.025	24,19	SR	30,07	R
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.925.107.134	14.525.296.875	15,83	SR	5,78	SR	4.225.949.277	26,54	R	29,09	R
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.913.424.316	11.008.676.955	54,57	ST	20,28	SR	6.706.072.048	61,45	ST	60,92	ST

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator				Realisasi Keuangan				
				Program		Sub Kegiatan		Rp	Persentase Terhadap Pagu RKPD		Persentase Terhadap Pagu APBD	
				%	Predikat	%	Predikat		%	Predikat	%	Predikat
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.830.338.839	3.898.714.531	89,34	ST	22,68	SR	1.534.484.466	40,06	T	39,36	T
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.860.086.326	7.363.257.612	88,39	ST	32,66	S	3.146.007.071	45,86	ST	42,73	T
15	Dinas Perhubungan	17.896.749.961	12.597.711.609	78,85	ST	27,29	R	4.782.718.072	26,72	R	37,96	S
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.823.579.970	10.996.038.848	75,58	ST	23,38	SR	4.505.819.608	57,59	ST	40,98	T
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.311.401.102	6.468.215.997	91,17	ST	27,21	R	2.594.944.163	41,12	T	40,12	T
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.847.999.124	7.923.298.233	77,03	ST	19,29	SR	2.668.970.487	34,01	S	33,69	S
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.679.180.622	5.192.544.233	68,43	ST	39,52	T	2.127.210.768	45,46	ST	40,97	T
20	Dinas Perikanan	9.088.031.360	7.572.015.516	70,86	ST	28,01	R	3.136.045.684	34,51	S	41,42	T
21	Dinas Pariwisata	7.416.356.653	6.594.910.169	44,17	T	27,12	R	1.462.066.111	19,71	SR	22,17	SR
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	10.767.841.941	10.964.834.087	48,47	ST	37,70	S	3.102.598.832	28,81	R	28,30	R
23	Sekretariat Daerah	63.759.438.513	59.472.482.165	60,68	ST	40,55	T	21.820.202.202	34,22	S	36,69	S
24	Sekretariat DPRD	28.513.294.234	36.849.068.879	73,14	ST	43,45	T	12.262.877.906	43,01	T	33,28	S
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.968.366.251	9.499.612.155	98,95	ST	31,28	R	3.433.368.285	38,28	S	36,14	S
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	141.082.776.644	132.219.225.035	70,71	ST	37,06	S	42.897.422.314	30,41	R	32,44	R
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.579.436.625	7.885.983.884	82,42	ST	26,90	R	2.872.201.146	37,89	S	36,42	S

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator				Realisasi Keuangan				
				Program		Sub Kegiatan		Rp	Persentase Terhadap Pagu RKPD		Persentase Terhadap Pagu APBD	
				%	Predikat	%	Predikat		%	Predikat	%	Predikat
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.813.407.000	4.759.737.215	96,30	ST	21,26	SR	1.917.804.251	32,99	S	40,29	T
29	Inspektorat Daerah	17.390.643.816	15.706.506.984	86,72	ST	38,94	T	7.476.702.443	42,99	T	47,60	ST
30	Kecamatan Bunguran Timur	7.164.635.570	9.537.224.718	6,67	SR	24,01	SR	4.042.916.476	56,43	ST	42,39	T
31	Kecamatan Bunguran Barat	4.127.622.823	4.819.312.236	47,18	ST	31,03	R	1.882.211.921	45,60	ST	39,06	T
32	Kecamatan Bunguran Utara	2.693.714.429	2.783.521.470	60,39	ST	20,49	SR	1.734.590.743	64,39	ST	62,32	ST
33	Kecamatan Pulau Laut	2.690.895.310	2.625.836.372	3,57	SR	21,42	SR	1.173.898.500	43,62	T	44,71	ST
34	Kecamatan Midai	3.478.353.404	3.930.981.643	8,33	SR	28,58	R	1.853.514.950	53,29	ST	47,15	ST
35	Kecamatan Serasan	4.095.018.727	4.390.665.833	3,17	SR	30,65	R	1.909.079.462	46,62	ST	43,48	T
36	Kecamatan Subi	3.443.658.259	3.384.140.142	41,98	T	23,93	SR	1.625.723.434	47,21	ST	48,04	ST
37	Kecamatan Pulau Tiga	2.091.433.352	2.077.594.393	85,71	ST	28,33	R	949.567.581	45,40	ST	45,71	ST
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2.509.223.440	2.362.413.068	24,39	SR	21,73	SR	1.032.159.132	41,13	T	43,69	T
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.708.512.530	2.726.675.008	14,29	SR	16,56	SR	1.216.530.884	44,92	ST	44,62	ST
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2.186.317.558	2.202.805.230	35,05	S	23,42	SR	988.745.523	45,22	ST	44,89	ST
41	Kecamatan Serasan Timur	2.211.153.616	2.117.029.074	14,29	SR	25,93	R	1.073.236.373	48,54	ST	50,70	ST
42	Kecamatan Suak Midai	2.066.039.097	2.128.480.754	34,26	S	16,34	SR	1.018.063.474	49,28	ST	47,83	ST
43	Kecamatan Bunguran Batubi	2.221.925.923	2.198.002.895	48,59	ST	50,92	ST	1.016.602.188	45,75	ST	46,25	ST
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.235.378.880	2.271.084.721	0,00	SR	NA	NA	0	0,00	SR	0,00	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD (Rp)	Pagu APBD (Rp)	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator				Realisasi Keuangan				
				Program		Sub Kegiatan		Rp	Persentase Terhadap Pagu RKPD		Persentase Terhadap Pagu APBD	
				%	Predikat	%	Predikat		%	Predikat	%	Predikat
45	Kecamatan Pulau Panjang	1.737.703.804	1.814.083.138	17,63	SR	16,03	SR	695.769.920	40,04	T	38,35	S
46	Kecamatan Pulau Seluan	1.700.825.664	1.813.220.733	47,43	ST	34,47	S	669.320.868	39,35	T	36,91	S
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.630.616.919	9.718.356.179	57,10	ST	27,68	R	2.258.424.190	21,24	SR	23,24	SR
TOTAL / RATA-RATA CAPAIAN		**1.057.111.036.952**	**1.057.803.093.315**	**53,82**	**ST**	**26,50**	**R**	**375.372.875.085**	**35,51**	**S**	**35,49**	**S**

Sumber: Perangkat Daerah terkait dan Analisis Bapperida Kabupaten Natuna Tahun 2026.

2.4. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 PER 30 JUNI 2026)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II (per 30 Juni 2026). Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta mengukur tingkat pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 mencakup penelaahan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan dari aspek kinerja dan keuangan pada seluruh perangkat daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan 31 Juni 2026, dengan memperhatikan tingkat kemajuan pelaksanaan, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.

Capaian kinerja program pembangunan daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2026 dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tingkat capaian dan permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2026, yang memuat target, realisasi, dan persentase capaian kinerja masing-masing program, disajikan sebagai berikut berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelestarian dan pengembangan

nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari penguatan jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Natuna.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan program tersebut dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas pencapaian indikator kinerja, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan, serta tingkat penyerapan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 menjadi instrumen evaluasi yang penting dalam menilai kemajuan pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja masing-masing program, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta mengidentifikasi program yang memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah pengendalian, penyempurnaan pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan guna memastikan pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,57	188.830.905.635	83,31	81.259.090.411	100,00	43,03	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	83,30	190.019.240	99,46	0	100,00	0	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (Angka)	89,48	7.517.851.203	99,67	1.553.539.462	100,00	20,66	ST	SR
		Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) (Angka)	11,02	780.767.488	8,93	290.022.169	81,03	37,15	ST	S
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (13-15 Tahun) (Angka)	98,67	19.239.743.477	98,20	2.350.393.479	99,52	12,22	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) (Angka)	99,91	28.354.657.179	99,46	5.626.329.054	99,55	19,84	ST	SR
2	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	59,20	154.228.180	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,92	371.964.280	0,80	0	86,96	0,00	ST	SR
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	92,52	365.205.720	81,51	18.790.305	88,10	5,15	ST	SR
4	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	41,07	192.680.840	26,78	57.884.145	65,21	30,04	ST	R
c. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	17	772.448.700	16,00	37.517.250	94,12	4,86	ST	SR
2	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	24,34	265.555.000	21,21	0	87,14	0,00	ST	SR
3	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	24,4	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	99,02	105.896.720	31,91	0	32,23	0,00	R	SR
5	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	24,40	739.530.440	16,50	139.039.053	67,62	18,80	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator, namun belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Mayoritas indikator program telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian kinerja di atas 80%, bahkan beberapa indikator telah mencapai 100% pada Semester I. Sebaliknya,

realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) hingga Sedang (S), yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan strategis masih berada pada tahap persiapan, pengadaan, atau pelaksanaan yang akan terealisasi pada Semester II. Kondisi ini mencerminkan bahwa capaian output tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penyerapan anggaran, terutama pada indikator yang bersifat administratif maupun indikator yang diperoleh melalui pengukuran kondisi eksisting.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100% dari target, sedangkan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga terealisasi 100%. Meskipun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 43,03% untuk indikator IKM, sedangkan anggaran pendukung indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah belum terealisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik telah dapat dipertahankan melalui optimalisasi tata kelola organisasi tanpa memerlukan realisasi anggaran secara proporsional pada Semester I.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, sebagian besar indikator memperlihatkan kinerja yang sangat tinggi. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD mencapai 100%, APS Pendidikan Dasar usia 7 - 12 tahun mencapai 99,55%, dan APS usia 13 - 15 tahun mencapai 99,52%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar tetap terjaga dengan baik dan mendukung peningkatan pemerataan layanan pendidikan. Namun demikian, APS Pendidikan Kesetaraan usia 7-18 tahun baru mencapai 81,03%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal, khususnya bagi kelompok usia sekolah yang belum terlayani melalui jalur pendidikan formal. Dari sisi anggaran, realisasi program ini masih berkisar 12,22% - 37,15%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja operasional maupun belanja kegiatan pendidikan masih akan direalisasikan pada Semester II.

Berbeda dengan program lainnya, Program Pengembangan Kurikulum menunjukkan capaian yang masih sangat rendah. Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal masih 0%, dengan realisasi anggaran juga 0%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum belum dimulai pada Semester I atau masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan administrasi. Mengingat kurikulum muatan lokal merupakan instrumen penting dalam penguatan karakter, budaya daerah, dan kearifan lokal, maka percepatan implementasi program ini menjadi prioritas pada Semester II agar target tahunan dapat dicapai.

Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, capaian indikator juga tergolong tinggi. Indeks Distribusi Guru mencapai 86,96%, sedangkan persentase guru bersertifikat pendidik mencapai 88,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan distribusi guru serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidik terus mengalami kemajuan. Namun demikian, realisasi anggaran masih sangat rendah, yaitu 0% pada indikator distribusi guru dan hanya 5,15% pada sertifikasi pendidik. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti pelatihan, peningkatan kompetensi, maupun fasilitasi sertifikasi, masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Sementara itu, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra menunjukkan capaian kinerja sebesar 65,21%, yang merupakan salah satu capaian terendah pada urusan pendidikan. Realisasi anggarannya juga baru mencapai 30,04%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pelestarian, pembinaan, maupun pengembangan bahasa dan sastra daerah masih memerlukan percepatan agar target akhir tahun dapat dicapai secara optimal.

Pada urusan kebudayaan, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat variasi antarprogram. Program Pengembangan Kebudayaan berhasil mencapai 94,12%, sedangkan Program Pengembangan Kesenian Tradisional mencapai 87,14%, yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan serta keberhasilan upaya pelestarian kesenian tradisional. Namun demikian, realisasi anggaran kedua program tersebut masih sangat rendah, masing-masing 4,86% dan 0%, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan budaya pada Semester II.

Program Pembinaan Sejarah belum menunjukkan capaian karena indikator maupun anggaran belum direalisasikan pada Semester I. Sementara itu, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya hanya mencapai 32,23%, sehingga menjadi program dengan capaian kinerja terendah pada urusan kebudayaan. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan perlunya percepatan kegiatan inventarisasi, pelindungan, pemanfaatan, maupun pelestarian warisan budaya agar target tahunan dapat tercapai. Adapun Program Pengelolaan Permuseuman telah mencapai 67,62%, dengan realisasi anggaran sebesar 18,80%, yang menunjukkan adanya peningkatan kunjungan museum meskipun masih memerlukan optimalisasi promosi, penyelenggaraan kegiatan edukatif, dan pengembangan daya tarik museum.

Secara keseluruhan, evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berada pada jalur yang positif, ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi. Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara

capaian kinerja dan realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan fisik, pengadaan barang dan jasa, fasilitasi pendidikan, serta program pelestarian budaya perlu menjadi fokus pada Semester II agar tingkat penyerapan anggaran meningkat seiring dengan terjaganya kualitas capaian kinerja. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap Program Pengembangan Kurikulum, Program Pembinaan Sejarah, dan Program Pelestarian serta Pengelolaan Cagar Budaya yang masih menunjukkan capaian rendah, sehingga diperlukan langkah percepatan implementasi, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengendalian pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan seluruh target RKPD Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan berkelanjutan, serta didukung oleh penguatan sistem kesehatan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, pengendalian penyakit, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan kesehatan. Pelaksanaan program tersebut dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pengendalian pembangunan daerah untuk memastikan kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan sekaligus menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya yang telah dialokasikan. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja,

perkembangan pelaksanaan program prioritas, efektivitas penyerapan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama Semester I. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program, penguatan pengendalian internal, optimalisasi realisasi anggaran, dan penyempurnaan strategi pelaksanaan kegiatan pada Semester II guna memastikan tercapainya target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (%)	88,56	218.717.434	54,4	50.673.292	61,43	23,17	ST	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan (Indeks)	3,54	101.995.860.187	3,11	45.125.587.232	87,85	44,24	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah - RSUD (Persentase)	88,56	83.664.420	0	6.030.200	0,00	7,21	SR	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD (Indeks)	3,70	30.115.484.366	3,98	18.249.977.806	100,00	60,60	ST	ST
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
1	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Batubi Jaya (Indeks)	3,45	678.068.998	3,57	248.029.854	100,00	36,58	ST	S
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Bunguran Selatan (Indeks)	3,45	850.067.000	3,41	290.396.640	98,84	34,16	ST	S
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Bunguran Tengah (Indeks)	3,45	913.446.100	3,6	464.186.319	100,00	50,82	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,45	958.613.000	3,6	473.113.138	100,00	49,35	ST	ST

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Puskesmas Kelarik (Indeks)								
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Midai (Indeks)	3,45	1.107.273.500	3,31	530.176.869	95,94	47,88	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Pulau Laut (Indeks)	3,45	1.145.850.500	3,31	728.803.228	95,94	63,60	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Pulau Tiga (Indeks)	3,45	1.071.980.052	3,69	491.781.499	100,00	45,88	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Pulau Tiga Barat (Indeks)	3,45	836.825.000	3,53	511.189.514	100,00	61,09	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Ranai (Indeks)	3,45	3.244.320.400	3,37	1.221.358.717	97,68	37,65	ST	S
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sedanau (Indeks)	3,45	1.423.051.500	3,46	373.685.915	100,00	26,26	ST	R
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Serasan (Indeks)	3,45	1.234.490.052	3,37	482.886.646	97,68	39,12	ST	T
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Serasan Timur (Indeks)	3,45	1.419.842.404	3,38	722.464.242	97,97	50,88	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Suak Midai (Indeks)	3,45	421.194.352	3,81	181.650.650	100,00	43,13	ST	T
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Subi (Indeks)	3,45	1.280.567.000	3,36	474.494.343	97,39	37,05	ST	S
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,45	1.263.387.356	3,84	515.344.262	100,00	40,79	ST	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Puskesmas Tanjung (Indeks)								
		Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% (%)	66,6	294.258.304	0	21.855.336	0,00	7,43	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Batubi Jaya (%)	92,5	56.325.000	0	11.550.000	0,00	20,51	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Bunguran Selatan (%)	92,5	13.349.000	0	1.425.000	0,00	10,67	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Bunguran Tengah (%)	92,5	13.949.000	47,1	1.350.000	50,92	9,68	ST	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Kelarik (%)	92,5	13.802.000	22,7	1.500.000	24,54	10,87	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Midai (%)	92,5	43.420.000	0	9.015.000	0,00	20,76	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Pulau Laut (%)	92,5	12.855.000	0	2.100.000	0,00	16,34	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Pulau Tiga (%)	92,5	16.800.000	0	1.800.000	0,00	10,71	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	92,5	50.548.800	0	8.400.000	0,00	16,62	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		pada Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)								
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Ranai (%)	90	33.075.000	0	7.561.000	0,00	22,86	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Sedanau (%)	92,5	27.925.000	0	3.825.000	0,00	13,70	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Serasan (%)	92,5	10.850.000	0	1.050.000	0,00	9,68	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Serasan Timur (%)	92,5	8.353.000	0	150.000	0,00	1,80	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Suak Midai (%)	92,5	4.500.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Subi (%)	92,5	15.765.000	0	1.125.000	0,00	7,14	SR	SR
		Persentase Desa/Kelurahan dengan IDL pada bayi mencapai 80% pada Puskesmas Tanjung (%)	92,5	17.550.000	35,70	2.100.000	38,59	11,97	T	SR
		Persentase orang dengan HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) (%)	100	192.670.649	76,6	0	76,60	0,00	ST	SR
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko	100	0	23	0	23,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Batubi Jaya (%)								
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Bunguran Selatan (%)	100	0	40,77	0	40,77	-	T	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Bunguran Tengah (%)	100	0	25,6	0	25,60	-	R	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Kelarik (%)	100	45.600.000	30	13.875.000	30,00	30,43	R	R
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Midai (%)	100	0	54,67	0	54,67	-	ST	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Pulau Laut (%)	100	0	50,67	0	50,67	-	ST	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Pulau Tiga (%)	100	0	70,53	0	70,53	-	ST	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	100	0	12,86	0	12,86	-	SR	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Ranai (%)	100	0	45,73	0	45,73	-	ST	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Sedanau (%)	100	0	34,29	0	34,29	-	S	
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Serasan (%)	100	0	75	0	75,00	-	ST	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Serasan Timur (%)	100	0	3,33	0	3,33	-	SR	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Suak Midai (%)	100	0	3,08	0	3,08	-	SR	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Subi (%)	100	0	27,37	0	27,37	-	R	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Puskesmas Tanjung (%)	100	0	66	0	66,00	-	ST	-
		Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%)	6,7	634.488.650	0	4.986.618	0,00	0,79	SR	SR
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Batubi Jaya (%)	36	0	1,1	0	3,06	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Bunguran Selatan (%)	36	0	18,64	0	51,78	-	ST	-
		Cakupan Penerima Kesehatan	36	41.445.000	3,23	9.600.000	8,97	23,16	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Gratis Puskesmas Bunguran Tengah (%)								
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Kelarik (%)	36	0	0,91	0	2,53	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Midai (%)	36	0	1,63	0	4,53	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Laut (%)	36	0	36,21	0	100,00	-	ST	
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Tiga (%)	36	40.800.000	16,9	10.200.000	46,94	25,00	ST	SR
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	36	0	8,56	0	23,78	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Ranai (%)	36	0	2,72	0	7,56	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Sedanau (%)	36	0	0,76	0	2,11	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Serasan (%)	36	0	19,58	0	54,39	-	ST	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Serasan Timur (%)	36	0	1,7	0	4,72	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Subi (%)	36	0	0,38	0	1,06	-	SR	-
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Tanjung (%)	36	0	7,5	0	20,83	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Cakupan Penerima Kesehatan Gratis Puskesmas Suak Midai (%)	36	0	6,42	0	17,83	-	SR	-
		Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam (%)	80	270.941.000	100	890.000	100,00	0,33	ST	SR
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Sedanau (%)	100	44.850.000	100	13.650.000	100,00	30,43	ST	R
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Serasan (%)	100	46.500.000	100	15.975.000	100,00	34,35	ST	S
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Serasan Timur (%)	100	28.200.000	100	8.100.000	100,00	28,72	ST	R
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Suak Midai (%)	100	27.000.000	100	5.850.000	100,00	21,67	ST	SR
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Batubi Jaya (%)	100	31.475.000	100	10.575.000	100,00	33,60	ST	S
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Bunguran Selatan (%)	100	91.800.000	100	23.400.000	100,00	25,49	ST	SR
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Bunguran Tengah (%)	100	30.750.000	100	8.925.000	100,00	29,02	ST	R
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Kelarik (%)	100	60.450.000	100	9.150.000	100,00	15,14	ST	SR
		Persentase ketepatan	100	31.125.000	100	11.850.000	100,00	38,07	ST	S

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Midai (%)								
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Pulau Laut (%)	100	22.350.000	100	7.650.000	100,00	34,23	ST	S
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Pulau Tiga (%)	100	31.536.000	100	11.175.000	100,00	35,44	ST	S
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	100	22.950.000	100	5.400.000	100,00	23,53	ST	SR
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Ranai (%)	100	126.284.000	100	40.350.000	100,00	31,95	ST	R
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Subi (%)	100	67.500.000	100	14.100.000	100,00	20,89	ST	SR
		Persentase ketepatan waktu respon sinyal SKDR <24 jam Puskesmas Tanjung (%)	100	47.171.000	100	9.750.000	100,00	20,67	ST	SR
		Angka Kematian Bayi (Angka)	15	1.015.547.800	5	105.211.240	100,00	10,36	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Selatan (Angka)	0	450.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah (Angka)	0	4.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Kelarik (Angka)	3	300.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Midai (Angka)	1	0	0	0	100,00	-	ST	-
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas	0	750.000	0	300.000	100,00	40,00	ST	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Pulau Laut (Angka)								
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Pulau Tiga (Angka)	1	454.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Pulau Tiga Barat (Angka)	0	0	0	0	100,00	-	ST	-
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Ranai (Angka)	6	2.352.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Sedanau (Angka)	1	1.350.000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Serasan (Angka)	0	1.050.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Serasan Timur (Angka)	1	36.525.000	0	10.575.000	100,00	28,95	ST	R
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Suak Midai (Angka)	0	0	1	0	0,00	-	SR	-
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Subi (Angka)	0	1.248.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Tanjung (Angka)	1	999.000	1	6.834.000	100,00	100,00	ST	ST
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (%)	5,8	3.156.598.784	9,06	670.015.698	43,79	21,23	T	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Batubi Jaya (%)	12,32	209.891.000	0	14.230.000	100,00	6,78	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Bunguran Selatan (%)	4,05	101.553.000	11,76	9.750.000	-90,37	9,60	SR	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Bunguran Tengah (%)	9,70	86.049.000	0	7.650.000	100,00	8,89	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik (%)	2,95	126.177.000	40	34.753.000	-100,00	27,54	SR	R
		Persentase Berat Bayi Lahir	6,82	62.966.000	0	10.848.000	100,00	17,23	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Rendah Puskesmas Midai (%)								
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Laut (%)	2,95	63.994.000	0	8.100.000	100,00	12,66	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Tiga (%)	8,88	76.428.000	11,54	18.111.000	70,05	23,70	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	23,31	96.066.200	0	6.150.000	100,00	6,40	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Ranai (%)	8,26	842.151.000	8,2	127.941.600	100,00	15,19	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Sedanau (%)	9,14	143.793.000	21,88	11.625.000	-39,39	8,08	SR	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Serasan (%)	2,67	172.906.000	0	15.409.000	100,00	8,91	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Serasan Timur (%)	11,62	70.494.000	0	1.650.000	100,00	2,34	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Suak Midai (%)	14,50	49.937.000	28,57	5.400.000	2,97	10,81	SR	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Subi (%)	13,29	162.916.000	0	4.950.000	100,00	3,04	ST	SR
		Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Tanjung (%)	13,25	173.558.000	8,7	22.350.000	100,00	12,88	ST	SR
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) (%)	82,00	222.815.460	22,52	0	27,46	0,00	R	SR
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Batubi Jaya (Angka)	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)	82,00	0	20	0	24,39	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Puskesmas Bunguran Selatan (%)								
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Bunguran Tengah (Angka)	82,00	0	25	0	30,49	-	R	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Kelarik (Angka)	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) di puskesmas Midai (%)	82,00	0	20	0	24,39	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Pulau Laut (Angka)	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Pulau Tiga (Angka)	82,00	0	0	3.750.000	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Pulau Tiga Barat (Angka)	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Ranai (Angka)	82,00	0	23,53	0	28,70	-	R	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Sedanau (Angka)	82,00	54.470.000	15,38	9.525.000	18,76	17,49	SR	SR
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Serasan (%)	82,00	47.775.000	57,14	14.925.000	69,68	31,24	ST	R
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Serasan Timur (%)	82,00	0	25	0	30,49	-	R	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		(Succes Rate) di puskesmas Suak Midai (%)								
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Subi (%)	82,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) Puskesmas Tanjung (Angka)	82,00	0	37,5	0	45,73	-	ST	-
		Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Batubi Jaya (Angka)	0	600.000	0	0	100,00	0,00	ST	SR
		Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar (%)	27	352.503.000	5,8	64.518.122	21,48	18,30	SR	SR
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Batubi Jaya (%)	100	33.750.000	100	10.125.000	100,00	30,00	ST	R
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Bunguran Selatan (%)	100	24.000.000	0	7.160.000	0,00	29,83	SR	R
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Bunguran Tengah (%)	100	28.800.000	0	9.600.000	0,00	33,33	SR	S
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Kelarik (%)	100	39.600.000	100	10.500.000	100,00	26,52	ST	R
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Midai (%)	100	14.400.000	0	3.600.000	0,00	25,00	SR	SR
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas	100	47.397.000	0	15.735.000	0,00	33,20	SR	S

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Laut (%)								
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Tiga (%)	100	48.600.000	0	16.200.000	0,00	33,33	SR	S
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	100	8.400.000	0	1.200.000	0,00	14,29	SR	SR
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Ranai (%)	100	74.088.000	0	22.276.800	0,00	30,07	SR	R
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Sedanau (%)	100	24.000.000	0	8.475.000	0,00	35,31	SR	S
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Serasan (%)	100	27.000.000	0	4.800.000	0,00	17,78	SR	SR
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Serasan Timur (%)	100	25.200.000	0	8.400.000	0,00	33,33	SR	S
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar pada Puskesmas Suak Midai (%)	100	37.854.000	0	13.230.000	0,00	34,95	SR	S
		Persentase pemenuhan 10 sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Subi (%)	100	28.800.000	0	7.125.000	0,00	24,74	SR	SR
		Persentase pemenuhan 10	100	45.360.000	0	9.654.000	0,00	21,28	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		sinyal fungsi Puskesmas Poned sesuai standar Pada Puskesmas Tanjung (%)								
		Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi (%)	88,23	25.675.255.315	88,23	5.450.745.797	100,00	21,23	ST	SR
		Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar (%)	40	855.719.087	0	194.039.091	0,00	22,68	SR	SR
		Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas (%)	50	402.265.900	60	29.372.056	100,00	7,30	ST	SR
		Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit (%)	69	19.980.135.600	69	8.088.062.727	100,00	40,48	ST	T
		Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80% (%)	100	74.110.200	13,3	3.785.296	13,30	5,11	SR	SR
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar (%)	100	189.260.452	100	3.154.340,00	100,00	1,67	ST	SR
2	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	34,61	2.157.162.500	55,7	134.401.210	100,00	6,23	ST	SR
		Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%) - RSUD	0	296.860.000	58	175.740.914	100,00	59,20	ST	ST
3	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan (%)	100	271.450.370	8,61	32.178.058	8,61	11,85	SR	SR
4	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	29,42	507.423.700	30,03	0	100,00	0,00	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Batubi Jaya (%)	29,42	12.600.000	55,51	0	100,00	0,00	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Bunguran Selatan (%)	29,42	6.500.000	32,48	0	100,00	0,00	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Bunguran Tengah (%)	29,42	42.142.000	48,34	13.128.000	100,00	31,15	ST	R
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Kelarik (%)	29,42	37.875.000	23,86	5.325.000	81,10	14,06	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Midai (%)	29,42	18.300.000	18,64	4.500.000	63,36	24,59	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Pulau Laut (%)	29,42	19.170.000	3,09	10.150.000	10,50	52,95	SR	ST
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Pulau Tiga (%)	29,42	17.100.000	12,6	6.300.000	42,83	36,84	T	S
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Pulau Tiga Barat (%)	29,42	13.890.000	14,48	3.285.000	49,22	23,65	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS puskesmas Ranai (%)	29,42	80.486.000	29,7	16.327.500	100,00	20,29	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Sedanau (%)	29,42	16.800.000	15,8	3.525.000	53,70	20,98	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS di Puskesmas Serasan (%)	29,42	17.325.000	57,11	4.200.000	100,00	24,24	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Serasan Timur (%)	29,42	8.522.000	18,17	0	61,76	0,00	ST	SR
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Suak Midai (%)	29,42	20.493.000	41,59	1.800.000	100,00	8,78	ST	SR
		Persentase rumah tangga	29,42	46.525.000	14,61	13.150.000	49,66	28,26	ST	R

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		yang ber PHBS Puskesmas Subi (%)								
		Persentase rumah tangga yang ber PHBS Puskesmas Tanjung (%)	29,42	33.365.000	36,73	1.350.000	100,00	4,05	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran Semester I Tahun 2026, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan secara umum menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator pembangunan, namun belum diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Kondisi tersebut tercermin dari dominannya indikator kinerja yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), sementara sebagian besar realisasi anggaran masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), hingga Sedang (S). Fenomena ini menunjukkan bahwa outcome pelayanan kesehatan telah mulai dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan, tetapi sebagian besar kegiatan yang memerlukan belanja operasional, pengadaan barang dan jasa, pembangunan fisik, maupun pengembangan kapasitas masih berada pada tahapan pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran diperkirakan akan meningkat pada Semester II. Dengan demikian, tantangan utama pelaksanaan RKPD Semester I bukan terletak pada pencapaian target pelayanan, melainkan pada efektivitas percepatan implementasi kegiatan dan optimalisasi serapan anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja penyelenggaraan organisasi menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan mencapai 87,85% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan IKM RSUD bahkan telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 60,60%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada sektor kesehatan tetap mampu dipertahankan meskipun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah baru mencapai 61,43%, sedangkan indikator serupa pada RSUD masih belum menunjukkan capaian kinerja (0%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, namun penyelesaian indikator-indikator administratif, pengelolaan organisasi, dan akuntabilitas kinerja masih memerlukan percepatan pada Semester II agar seluruh target kinerja perangkat daerah dapat tercapai secara seimbang.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, secara umum kualitas pelayanan kesehatan primer menunjukkan performa yang sangat baik. Hampir seluruh Puskesmas memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori Sangat Tinggi, bahkan sebagian besar telah mencapai target tahunan sebesar 100%, seperti Puskesmas Batubi Jaya, Bunguran Tengah, Kelarik, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Sedanau, Suak Midai, dan Tanjung. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diterima masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar telah berjalan efektif meskipun tingkat realisasi anggaran antar Puskesmas masih bervariasi antara 26,26% hingga 63,60%, yang berarti masih terdapat ruang percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

Meskipun demikian, beberapa indikator pelayanan dasar masih menunjukkan capaian yang perlu mendapatkan perhatian serius. Persentase kecamatan dan desa/kelurahan yang mencapai target IDL bayi sebesar 80% masih didominasi kategori Sangat Rendah, bahkan sebagian besar Puskesmas masih mencatat capaian 0%. Hanya Puskesmas Bunguran Tengah yang telah mencapai 50,92% dan Puskesmas Tanjung 38,59%, sedangkan wilayah lainnya masih jauh di bawah target. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa intervensi kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam peningkatan indikator kesehatan bayi, masih belum berjalan optimal. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan pada Semester I, rendahnya capaian tersebut juga menunjukkan perlunya penguatan kegiatan promotif, preventif, pendampingan keluarga berisiko, serta peningkatan koordinasi lintas program dalam menurunkan risiko kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan neonatal.

Pelayanan kesehatan bagi kelompok berisiko HIV memperlihatkan capaian yang relatif beragam antarwilayah. Secara agregat, 76,60% orang dengan HIV telah memperoleh pengobatan antiretroviral (ARV) sehingga termasuk kategori Sangat Tinggi, namun cakupan pelayanan kesehatan bagi kelompok berisiko di tingkat Puskesmas masih belum merata. Beberapa Puskesmas seperti Serasan, Pulau Tiga, Midai, Pulau Laut, Ranai, dan Tanjung telah menunjukkan capaian cukup baik, sedangkan Serasan Timur, Suak Midai, Pulau Tiga Barat, dan Batubi Jaya masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Variasi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan, cakupan skrining, maupun penemuan kasus di masing-masing wilayah kerja. Oleh karena itu diperlukan penguatan kegiatan deteksi dini, perluasan layanan VCT, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan jejaring layanan HIV di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Indikator cakupan pemeriksaan kesehatan gratis masih menunjukkan kinerja yang sangat rendah. Persentase Puskesmas yang mampu mencapai cakupan pelayanan di atas 80% masih 0% dengan realisasi anggaran hanya 0,79%. Meskipun terdapat beberapa Puskesmas seperti Pulau Laut dan Serasan yang menunjukkan perkembangan cukup baik, sebagian besar Puskesmas masih memiliki cakupan pemeriksaan yang rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program pemeriksaan kesehatan gratis masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga memerlukan percepatan sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan primer agar target pelayanan dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.

Berbeda dengan indikator sebelumnya, pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh Puskesmas telah mampu merespons sinyal kewaspadaan penyakit dalam waktu kurang dari 24 jam dengan tingkat capaian 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem surveilans epidemiologi di Kabupaten Natuna telah berjalan efektif dan mampu mendukung deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa penyakit menular. Walaupun demikian, realisasi anggaran pada indikator tersebut masih relatif rendah sehingga perlu dipastikan bahwa keterbatasan penyerapan anggaran tidak memengaruhi keberlanjutan kualitas sistem surveilans kesehatan pada Semester II.

Pada aspek kesehatan ibu dan anak, Angka Kematian Bayi menunjukkan capaian yang sangat baik karena telah memenuhi target Semester I dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru mencapai sekitar 10,36%. Sebaliknya, indikator Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) baru mencapai 43,79% sehingga masih berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, pemenuhan gizi ibu, pelayanan antenatal berkualitas, serta deteksi dini faktor risiko kehamilan masih perlu ditingkatkan. Variasi capaian antar Puskesmas juga menunjukkan adanya ketimpangan kondisi kesehatan maternal yang memerlukan pendekatan intervensi berbasis wilayah sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Sementara itu, indikator keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) masih menjadi salah satu indikator yang memerlukan perhatian khusus. Capaian agregat baru mencapai 27,46% dari target 82%, sehingga masih berada pada kategori rendah. Sebagian besar Puskesmas bahkan masih mencatat capaian di bawah 30%, sementara capaian tertinggi terdapat di Puskesmas Serasan sebesar 69,68%. Rendahnya keberhasilan pengobatan menunjukkan masih perlunya peningkatan penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat, penguatan peran

Pengawas Menelan Obat (PMO), serta peningkatan koordinasi lintas program dalam rangka mendukung target eliminasi Tuberkulosis sesuai kebijakan nasional.

Indikator pemenuhan standar Puskesmas PONED juga masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Secara agregat baru mencapai 21,48%, sedangkan sebagian besar Puskesmas masih belum memenuhi sepuluh sinyal fungsi PONED sesuai standar. Hanya beberapa Puskesmas seperti Batubi Jaya dan Kelarik yang telah mencapai pemenuhan 100% terhadap indikator tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, ketersediaan alat kesehatan, serta penguatan sistem rujukan obstetri dan neonatal di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

Pada indikator mutu pelayanan kesehatan, capaian menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh kecamatan telah memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang terakreditasi, pemenuhan standar ASPAK telah mencapai target, indikator nasional mutu pelayanan rumah sakit juga telah mencapai 100%, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan dan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Namun demikian, indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) di atas 80% masih baru mencapai 13,30%, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan, supervisi, dan monitoring terhadap implementasi manajemen Puskesmas agar mutu pelayanan dapat meningkat secara lebih merata.

Pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya maupun pemenuhan standar SDMK di RSUD telah mencapai 100%, meskipun realisasi anggaran masih relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah berjalan sesuai target, namun sebagian besar kegiatan pengembangan kompetensi masih akan dilaksanakan secara bertahap pada Semester II. Sebaliknya, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman masih menunjukkan capaian rendah, dimana pemeriksaan sarana produksi dan produk pangan industri rumah tangga baru mencapai 8,61%, sehingga memerlukan percepatan pengawasan keamanan pangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan rumah tangga.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, secara agregat indikator Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) telah mencapai target tahunan dengan kategori Sangat Tinggi. Namun apabila ditinjau pada tingkat Puskesmas masih terdapat disparitas capaian antarwilayah. Sebagian besar Puskesmas telah menunjukkan kinerja yang baik, sementara beberapa wilayah seperti Pulau Laut dan Pulau Tiga masih memerlukan penguatan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas promosi kesehatan, serta dukungan lintas sektor di masing-masing wilayah kerja. Oleh karena itu, penguatan edukasi kesehatan, pemberdayaan kader, serta kolaborasi dengan pemerintah desa perlu terus ditingkatkan agar implementasi PHBS dapat berlangsung secara lebih merata.

Secara keseluruhan, evaluasi Semester I Tahun 2026 memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian indikator pelayanan kesehatan, terutama pada aspek mutu pelayanan, kepuasan masyarakat, surveilans penyakit, akreditasi fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi kesehatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan percepatan, antara lain peningkatan indikator kesehatan ibu dan bayi, keberhasilan pengobatan Tuberkulosis, pemenuhan standar Puskesmas PONED, cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, pengawasan keamanan pangan, ketersediaan obat dan BMHP, serta penilaian kinerja Puskesmas. Selain itu, rendahnya realisasi anggaran pada sebagian besar program menunjukkan perlunya penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan efektivitas koordinasi lintas bidang, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pada Semester II target kinerja dan target penyerapan anggaran dapat dicapai secara lebih optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan konektivitas wilayah, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung dan lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan jasa konstruksi guna mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Mengingat karakteristik program pada perangkat daerah ini didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik dan penyusunan dokumen teknis, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan konstruksi, hingga penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola organisasi, dan pelayanan publik.

Capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, menilai efektivitas penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah. Mengingat sebagian besar pekerjaan fisik masih berada pada tahapan persiapan administrasi, penyelesaian dokumen teknis, proses pengadaan, dan awal pelaksanaan konstruksi, maka capaian kinerja Semester I belum sepenuhnya menggambarkan hasil akhir pembangunan yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan pengendalian pembangunan, optimalisasi realisasi fisik dan keuangan, serta mitigasi terhadap potensi hambatan pelaksanaan agar target pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,00	47.036.590	0	1.175.913	0,00	2,50	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	9.772.496.434	0	4.115.850.159	0,00	42,12	SR	T
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	179,76	568.449.626	0	7.772.436	0,00	1,37	SR	SR
2	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan (%)	68,57	1.885.355.050	0	26.580.053	0,00	1,41	SR	SR
3	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan (%)	23,26	394.890.000	0	7.897.800	0,00	2,00	SR	SR
4	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)	9,97	233.778.700	0	62.197.894	0,00	26,61	SR	R
5	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik (%)	43,35	10.320.501.765	0	193.271.200	0,00	1,87	SR	SR
6	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85,71	4.834.238.820	0	134.613.988	0,00	2,78	SR	SR
7	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	85,25	13.852.934.690	0	800.497.495	0,00	5,78	SR	SR
8	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	42,83	31.370.250.330	0	2.118.465.434	0,00	6,75	SR	SR
9	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi (%)	55,56	97.073.500	0	2.426.835	0,00	2,50	SR	SR
10	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia (Dokumen)	1	1.174.984.310	0	70.150.897	0,00	5,97	SR	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa seluruh indikator program masih

berada pada kategori Sangat Rendah (SR) dari sisi capaian kinerja, dengan tingkat pencapaian indikator sebesar 0% terhadap target tahunan. Kondisi tersebut sejalan dengan realisasi anggaran yang juga masih relatif rendah, dimana sebagian besar program baru menunjukkan tingkat penyerapan anggaran di bawah 10%, kecuali Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah mencapai realisasi anggaran 42,12% pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang mencapai 26,61%. Pola tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur masih berada pada tahapan persiapan administrasi, penyelesaian dokumen perencanaan teknis, proses pengadaan barang dan jasa, serta mobilisasi pelaksanaan pekerjaan fisik yang secara umum memang mulai berjalan pada Semester II. Dengan karakteristik program yang didominasi pembangunan fisik, capaian output infrastruktur umumnya baru dapat direalisasikan setelah pekerjaan konstruksi selesai, sehingga rendahnya capaian indikator pada Semester I belum sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelaksanaan, tetapi lebih menggambarkan karakteristik siklus pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja administrasi perangkat daerah masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah baru mencapai 0% dengan realisasi anggaran sebesar 2,50%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat juga belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 42,12% atau termasuk kategori Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran penunjang telah digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan, namun indikator kinerja baru akan diukur pada akhir periode evaluasi setelah seluruh pelayanan dan administrasi perangkat daerah dilaksanakan secara penuh. Oleh karena itu, capaian Semester I lebih menggambarkan proses penyelenggaraan organisasi dibandingkan hasil akhir pelayanan publik.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), indikator Ketersediaan Air Baku belum menunjukkan capaian terhadap target tahunan, sementara realisasi anggaran baru mencapai 1,37%. Rendahnya capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur sumber daya air masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan. Mengingat pembangunan sarana air baku merupakan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan proses perencanaan teknis, pengadaan, dan pelaksanaan fisik secara bertahap,

maka capaian indikator baru diperkirakan meningkat setelah penyelesaian pekerjaan konstruksi pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan juga belum menunjukkan capaian, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 1,41%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan maupun perluasan jaringan perpipaan masih berada pada tahapan awal pelaksanaan. Mengingat peningkatan akses air minum sangat bergantung pada penyelesaian pembangunan jaringan distribusi, reservoir, maupun instalasi pendukung lainnya, maka peningkatan indikator layanan diperkirakan baru akan terlihat setelah pembangunan fisik selesai dan jaringan mulai beroperasi.

Pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, indikator pembangunan sarana dan prasarana persampahan sesuai standar masih menunjukkan capaian 0% dengan realisasi anggaran hanya 2,00%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur persampahan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan sehingga belum memberikan output yang dapat diukur pada Semester I. Percepatan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi faktor penting agar target penyediaan sarana persampahan dapat direalisasikan pada Semester II.

Selanjutnya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memperlihatkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan program infrastruktur lainnya dari sisi penyerapan anggaran. Meskipun capaian indikator peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik masih 0%, realisasi anggaran telah mencapai 26,61% atau termasuk kategori Rendah, namun merupakan penyerapan tertinggi di antara program teknis Dinas PUPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan telah berjalan lebih progresif dibandingkan program lainnya, sehingga penyelesaian pembangunan sarana air limbah berpotensi memberikan peningkatan capaian indikator pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, seluruh indikator kinerja masih menunjukkan capaian 0%, sedangkan realisasi anggaran masing-masing baru mencapai 1,87%, 2,78%, dan 5,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur drainase, gedung pemerintah, serta kawasan permukiman masih berada pada tahapan pelaksanaan awal. Mengingat output program tersebut baru dapat dihitung setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka rendahnya capaian Semester I merupakan konsekuensi dari karakteristik pekerjaan konstruksi yang umumnya terealisasi pada paruh kedua tahun anggaran.

Demikian pula pada Program Penyelenggaraan Jalan, indikator Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan belum menunjukkan peningkatan pada Semester I dengan realisasi anggaran sebesar 6,75%. Sebagai salah satu program prioritas dengan alokasi anggaran terbesar, rendahnya capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan peningkatan, pembangunan, maupun rehabilitasi jalan masih berada pada tahapan persiapan pelaksanaan kontrak dan mobilisasi pekerjaan. Mengingat peningkatan kualitas jalan merupakan salah satu indikator strategis yang berpengaruh terhadap konektivitas wilayah, aksesibilitas pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi daerah, maka percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi prioritas utama pada Semester II agar target pembangunan infrastruktur jalan dapat tercapai sesuai RKPD Tahun 2026.

Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, indikator Persentase Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Terampil terhadap TKK Teridentifikasi juga masih menunjukkan capaian 0% dengan realisasi anggaran sebesar 2,50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan maupun sertifikasi masih belum dilaksanakan secara optimal pada Semester I. Padahal, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pembangunan infrastruktur daerah.

Sementara itu, pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, indikator jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang tersedia juga belum menunjukkan capaian dengan realisasi anggaran baru sebesar 5,97%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses penyusunan maupun revisi dokumen tata ruang masih berada pada tahapan pengumpulan data, penyusunan dokumen teknis, konsultasi publik, dan harmonisasi substansi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Mengingat dokumen tata ruang merupakan instrumen strategis dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan dasar penyelenggaraan pembangunan daerah, maka percepatan penyusunan dokumen RTR menjadi salah satu prioritas pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna belum menghasilkan capaian indikator kinerja yang terukur, meskipun sebagian kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan yang ditunjukkan oleh adanya realisasi anggaran pada seluruh program. Kondisi ini menggambarkan karakteristik pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang output-nya baru dapat diukur setelah pekerjaan fisik selesai. Oleh karena itu, fokus pelaksanaan pada Semester II perlu diarahkan pada percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi kontrak, percepatan mobilisasi pekerjaan konstruksi, penguatan pengawasan lapangan, optimalisasi

manajemen pelaksanaan proyek, serta pengendalian terhadap risiko keterlambatan pekerjaan.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, mewujudkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta mendukung kepastian hukum pemanfaatan tanah melalui penyelenggaraan urusan pertanahan yang tertib dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penyelenggaraan urusan pertanahan untuk mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan tanah. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, menilai efektivitas pencapaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Mengingat sebagian besar program pada perangkat daerah ini berupa pembangunan fisik perumahan, kawasan permukiman, penyediaan PSU, serta kegiatan yang memerlukan proses verifikasi teknis dan administrasi, maka capaian Semester I umumnya masih menggambarkan progres awal pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program, penguatan pengendalian pembangunan, dan optimalisasi realisasi fisik maupun

keuangan pada Semester II agar target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	5.125.444.136	0	3.451.838.176	0,00	67,35	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	74,55	27.048.000	2	13.430.796	2,68	49,66	SR	ST
b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (%)	93	259.169.100	0	136.372.684	0,00	52,62	SR	ST
2	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	0,24	1.408.289.360	0	36.950.316	0,00	2,62	SR	SR
3	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	92	0	0	23.092.696	0,00	-	SR	-
4	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	65	16.757.744.961	0	18.255.000	0,00	0,11	SR	SR
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
1	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah (%)	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
2	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (%)	20	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten (%)	19,97	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
5	2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	20	0	0	0	0,00	-	SR	-
6	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah bersertifikat (%)	87	577.412.000		29.163.536	0,00	5,05	SR	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal, ditandai dengan seluruh indikator program yang masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR) dari sisi pencapaian kinerja. Sebaliknya, dari aspek realisasi anggaran terdapat variasi capaian, dimana beberapa program telah menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengembangan Perumahan, sementara sebagian besar program teknis lainnya masih memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Semester I masih didominasi oleh proses persiapan administrasi, verifikasi calon penerima manfaat, penyusunan dokumen teknis, pengadaan barang dan jasa, serta tahapan awal pelaksanaan kegiatan fisik. Dengan karakteristik program yang sebagian besar menghasilkan output pada akhir pelaksanaan pekerjaan, maka capaian indikator kinerja belum sepenuhnya dapat menggambarkan progres pembangunan yang sesungguhnya dan diperkirakan akan meningkat pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja organisasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi pemanfaatan anggaran. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I, namun realisasi anggarannya telah mencapai 67,35% atau termasuk kategori Sangat Tinggi. Demikian pula Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah baru mencapai 2,68%, sedangkan realisasi anggarannya telah mencapai 49,66% dengan kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran penunjang telah digunakan untuk mendukung operasional organisasi dan penyelenggaraan pelayanan, sementara pengukuran indikator kinerja bersifat akumulatif sehingga baru dapat dinilai secara optimal pada akhir tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendukung organisasi telah berjalan sesuai

tahapan pelaksanaan meskipun hasil akhirnya belum dapat diukur pada Semester I.

Pada Program Pengembangan Perumahan, indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni masih menunjukkan capaian kinerja 0%, namun realisasi anggaran telah mencapai 52,62% atau termasuk kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai tahapan persiapan, seperti identifikasi calon penerima bantuan, verifikasi administrasi, penyusunan dokumen teknis, maupun proses pengadaan, sedangkan pembangunan atau penyerahan rumah layak huni yang menjadi indikator kinerja baru akan terealisasi setelah seluruh pekerjaan selesai. Oleh karena itu, rendahnya capaian indikator pada Semester I lebih dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan program dibandingkan rendahnya tingkat pelaksanaan kegiatan.

Pada Program Kawasan Permukiman, indikator Rasio Permukiman Layak Huni juga masih menunjukkan capaian 0% dengan realisasi anggaran sebesar 2,62%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman masih berada pada tahap awal pelaksanaan, baik berupa perencanaan teknis maupun persiapan pekerjaan fisik. Mengingat peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan hasil dari penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur secara terpadu, maka peningkatan indikator baru akan terlihat setelah kegiatan fisik selesai dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni juga belum menunjukkan capaian pada Semester I. Selain itu, pada tabel evaluasi tidak terdapat alokasi anggaran program (DPA sebesar nol), sementara realisasi anggaran tercatat sebesar Rp23.092.696 sehingga persentase penyerapan tidak dapat dihitung. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pelaksanaan aktivitas administratif atau dukungan operasional yang belum sepenuhnya tercermin dalam struktur anggaran program. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian administrasi penganggaran dan penguatan sinkronisasi antara perencanaan program dengan pelaksanaan kegiatan agar proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat pada periode berikutnya.

Selanjutnya, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) masih menunjukkan capaian yang sangat rendah. Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU belum menunjukkan peningkatan pada Semester I dengan realisasi anggaran baru mencapai 0,11%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan maupun peningkatan prasarana dasar perumahan masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga belum menghasilkan output yang dapat diukur. Mengingat

penyediaan PSU memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan pelayanan dasar masyarakat, maka percepatan proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan lapangan perlu menjadi prioritas pada Semester II.

Pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, sebagian besar program juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Redistribusi Tanah, Program Pengelolaan Tanah Kosong, serta Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah belum memiliki realisasi baik dari sisi fisik maupun keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada bidang pertanahan belum dimulai atau masih berada pada tahap persiapan administrasi dan koordinasi lintas instansi. Mengingat penyelenggaraan urusan pertanahan sangat bergantung pada proses inventarisasi, verifikasi legalitas, penyelesaian administrasi, serta koordinasi dengan instansi vertikal, maka percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting untuk memastikan target tahunan dapat dicapai.

Sementara itu, Program Penatagunaan Tanah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan program pertanahan lainnya dari sisi pelaksanaan anggaran. Meskipun indikator persentase luas tanah bersertifikat masih belum menunjukkan capaian pada Semester I, realisasi anggaran telah mencapai 5,05%, yang menunjukkan bahwa proses inventarisasi, pengumpulan data, maupun tahapan administrasi penatagunaan tanah telah mulai dilaksanakan. Percepatan koordinasi dengan instansi terkait, penyelesaian proses sertifikasi, dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan menjadi langkah penting agar target persentase tanah bersertifikat dapat direalisasikan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna masih didominasi oleh tahapan persiapan dan pelaksanaan awal kegiatan, sehingga capaian indikator kinerja belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, beberapa program telah memperlihatkan progres penyerapan anggaran yang cukup baik, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengembangan Perumahan, yang menjadi indikasi bahwa proses pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat

secara seimbang. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target penyediaan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penguatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penyelenggaraan urusan pertanahan sesuai sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif melalui penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas aparatur penegak perda, serta penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, menilai efektivitas pencapaian indikator kinerja serta pemanfaatan anggaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan program pada Semester II agar target pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,40	15.174.673.841	3,37	6.899.788.168	99,12	45,47	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	70,50	49.633.200	68,15	3.322.212	96,67	6,69	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	75	0	66,07	0	88,09	-	ST	-
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	576.555.900	100	165.938.261	100,00	28,78	ST	R
		Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan (%)	80	128.249.000	78,5	9.509.088	98,13	7,41	ST	SR
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	65	0	16,66	0	25,63	-	R	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi pencapaian indikator, meskipun realisasi anggaran masih belum sepenuhnya sejalan dengan capaian kinerja pada beberapa indikator. Mayoritas indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 88%, bahkan terdapat indikator yang telah mencapai target tahunan sebesar 100% pada Semester I. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan perlindungan masyarakat telah berjalan secara efektif. Di sisi lain, penyerapan anggaran masih bervariasi, mulai dari kategori Sangat Rendah (SR) hingga Tinggi (T), yang mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan operasional dan administrasi masih akan dilaksanakan secara bertahap pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 99,12% atau berkategori Sangat Tinggi, dengan realisasi anggaran sebesar 45,47% yang juga berada pada kategori Tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan

bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah mampu memenuhi harapan masyarakat serta didukung oleh pelaksanaan anggaran yang cukup baik pada Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 96,67% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 6,69% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja organisasi telah dapat dicapai melalui optimalisasi tata kelola, koordinasi internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas, sedangkan sebagian kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, secara umum seluruh indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase cakupan perlindungan masyarakat telah mencapai 88,09% atau berkategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan masyarakat telah menjangkau sebagian besar sasaran sesuai target Semester I. Meskipun belum terdapat realisasi anggaran pada indikator tersebut, capaian yang tinggi mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan lebih banyak didukung melalui optimalisasi sumber daya yang telah tersedia serta pelaksanaan kegiatan rutin yang tidak memerlukan belanja secara signifikan pada Semester I.

Indikator Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas menunjukkan capaian paling optimal dengan realisasi kinerja mencapai 100%, yang berarti seluruh target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada Semester I telah terlaksana sesuai rencana. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 28,78% atau masih berada pada kategori Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya penyerapan anggaran, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas instansi, kesiapsiagaan personel, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki perangkat daerah.

Selanjutnya, indikator Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan telah mencapai 98,13% atau termasuk kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru sebesar 7,41% dengan kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi penegakan peraturan daerah telah berjalan secara efektif melalui pelaksanaan operasi penegakan PERDA, kegiatan pembinaan, dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pendukung, seperti operasi lapangan yang lebih intensif, sosialisasi regulasi, maupun kegiatan pembinaan lanjutan masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Berbeda dengan indikator lainnya, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya baru mencapai 25,63% atau berada pada kategori Rendah, serta belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi kompetensi, belum dilaksanakan secara optimal pada Semester I. Mengingat PPNS memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah, maka percepatan pelaksanaan program peningkatan kompetensi perlu menjadi prioritas pada Semester II agar kualitas penegakan hukum daerah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh dominannya indikator yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi, terutama pada aspek kepuasan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah. Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada beberapa indikator, serta masih rendahnya capaian peningkatan kompetensi PPNS. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran, khususnya pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan intensitas pembinaan dan pengawasan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi anggaran secara lebih proporsional sekaligus mempertahankan kualitas capaian kinerja sehingga target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya pada suburusan kebakaran, sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara cepat, tepat, dan profesional melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penguatan sistem pencegahan

kebakaran, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran, penyelamatan, pencegahan kebakaran, penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, dan penguatan pengendalian program pada Semester II guna memastikan target pembangunan di bidang pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	11.384.830.373	0	5.719.042.939	0,00	50,23	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	78,10	22.677.000	65,45	1.000.000	74,54	4,41	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	565.459.838	100	264.918.184	100,00	46,85	ST	ST
		Cakupan Penyebaran	100	77.716.000	447	0	100,00	0,00	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)								

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang baik dari aspek pencapaian indikator pelayanan, namun masih terdapat ketidakseimbangan dengan tingkat realisasi anggaran pada beberapa indikator. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 74%, bahkan terdapat indikator yang telah mencapai 100% pada Semester I. Di sisi lain, realisasi anggaran masih bervariasi mulai dari kategori Sangat Rendah (SR) hingga Sangat Tinggi (ST), yang menunjukkan bahwa sebagian kegiatan operasional dan pendukung masih akan dilaksanakan secara bertahap pada Semester II. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan telah berjalan sesuai target, namun efektivitas penyerapan anggaran masih memerlukan optimalisasi agar sejalan dengan capaian kinerja yang telah dicapai.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup beragam. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 74,54% atau termasuk kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi administrasi, tata kelola organisasi, dan pelayanan internal perangkat daerah telah berjalan dengan baik. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 4,41% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah, sehingga mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan penunjang administrasi masih akan direalisasikan pada Semester II. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I, meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 50,23% atau termasuk kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran pelayanan publik telah dimanfaatkan untuk mendukung operasional organisasi, sedangkan pengukuran IKM merupakan indikator yang bersifat periodik sehingga hasilnya baru dapat diketahui setelah keseluruhan proses pelayanan pada tahun berjalan selesai dilaksanakan.

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, seluruh indikator utama

menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah mencapai 100% sesuai target Semester I dengan realisasi anggaran sebesar 46,85%, yang menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memberikan respons penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan secara optimal. Capaian tersebut mencerminkan kesiapsiagaan personel, ketersediaan sarana operasional, serta efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Meskipun realisasi anggaran masih berada pada kategori sedang, capaian kinerja yang telah mencapai target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan secara optimal.

Selanjutnya, indikator cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran juga telah mencapai 100% atau berkategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran telah terlaksana sesuai target Semester I. Namun demikian, pada indikator ini belum terdapat realisasi anggaran (0%), sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan edukasi masih memanfaatkan sumber daya internal perangkat daerah, sinergi dengan instansi terkait, maupun kegiatan nonanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian indikator tidak selalu bergantung pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi, komitmen organisasi, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, terutama pada aspek pelayanan penyelamatan, evakuasi korban kebakaran, serta penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada beberapa indikator, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah, optimalisasi pengelolaan anggaran operasional, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur agar realisasi fisik dan keuangan dapat berjalan lebih seimbang.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya pada suburusan penanggulangan bencana, sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, serta optimalisasi upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi guna meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat maupun pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, BPBD melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan penanggulangan bencana, penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terpadu. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	15.174.673.841	1,4	6.899.788.168	40,57	45,47	T	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	66,50	49.633.200	68,15	3.322.212	100,00	6,69	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan	35,5	756.823.420	18,6	139.674.728	52,39	18,45	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Penanggulangan Bencana (%)								

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang bervariasi antara aspek kinerja dan aspek keuangan. Dari sisi kinerja, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulangan Bencana telah menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target Semester I. Di sisi lain, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR), kecuali pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahapan pelaksanaan awal, sementara pencapaian indikator pelayanan telah mulai menunjukkan hasil melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum merata pada seluruh indikator. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa target kinerja organisasi pada Semester I telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, realisasi anggarannya baru mencapai 6,69% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penunjang administrasi dan operasional masih akan dilaksanakan pada Semester II. Kondisi ini menggambarkan bahwa pencapaian indikator organisasi lebih dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola, koordinasi internal, dan optimalisasi sumber daya aparatur dibandingkan dengan besarnya realisasi anggaran.

Berbeda dengan indikator tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru mencapai 40,57% atau berada pada kategori Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya telah mencapai 45,47% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk mendukung pelayanan publik telah berjalan relatif baik, namun tingkat kepuasan masyarakat masih memerlukan peningkatan melalui perbaikan kualitas pelayanan, percepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Semester II.

Pada Program Penanggulangan Bencana, indikator Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana mencapai 52,39% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 18,45% yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh target layanan penanggulangan bencana telah terpenuhi pada Semester I melalui pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, koordinasi penanganan bencana, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pendukung, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan, kegiatan mitigasi, simulasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi masih akan dilaksanakan pada Semester II. Dengan karakteristik penyelenggaraan urusan kebencanaan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan, capaian pelayanan juga sangat bergantung pada dinamika kejadian bencana sepanjang tahun berjalan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Natuna telah mampu menjaga pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana sesuai dengan target yang direncanakan pada Semester I, khususnya dalam pencapaian kinerja organisasi dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

8. Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan korban bencana, serta pengelolaan taman makam pahlawan. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Sosial melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, penguatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, penanganan korban bencana, serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan sosial. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Sosial

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,64	4.212.705.437	3,72	1.659.143.144	100,00	39,38	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	85,33	11.000.000	69	182.337	80,86	1,66	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
1	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	63,79	0	55	0	86,22	-	ST	-
2	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	100	144.315.291	100	18.569.239	100,00	12,87	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)								
3	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	71,09	2.959.605.000	64,79	647.468.088	91,14	21,88	ST	SR
4	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100.000.609	100	23.045.960	100,00	23,05	ST	SR
5	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	0	100	0	100,00	-	ST	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi pencapaian indikator, namun belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Sebagian besar indikator program telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 80%, bahkan beberapa indikator telah mencapai 100% pada Semester I. Sebaliknya, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) hingga Tinggi (T), yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional maupun kegiatan yang memerlukan dukungan belanja masih berlangsung secara bertahap dan diproyeksikan meningkat pada Semester II. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan sosial telah berjalan sesuai target, namun efektivitas penyerapan anggaran masih perlu terus dioptimalkan agar sejalan dengan capaian kinerja perangkat daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja penyelenggaraan organisasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, sementara realisasi anggaran mencapai 39,38% atau berkategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang diberikan Dinas Sosial telah memenuhi harapan masyarakat. Di sisi lain, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 80,86% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 1,66% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian indikator organisasi lebih banyak didukung oleh efektivitas tata kelola, koordinasi internal, dan optimalisasi sumber daya aparatur, sedangkan sebagian besar belanja pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Sosial, indikator Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial telah mencapai 86,22% atau berkategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, pada indikator tersebut belum terdapat realisasi anggaran sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi masih didukung melalui kegiatan yang tidak memerlukan pembiayaan langsung atau pelaksanaannya masih akan dioptimalkan pada Semester II.

Pada Program Rehabilitasi Sosial, indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 13,87% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan telah dilaksanakan secara optimal sesuai target Semester I. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pendukung maupun bantuan sosial masih akan direalisasikan pada Semester II sesuai tahapan pelaksanaan program.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, indikator Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar menunjukkan capaian 91,14% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 21,88% atau masih berkategori Sangat Rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan telah berjalan secara efektif, namun pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran, termasuk penyaluran bantuan dan fasilitasi perlindungan sosial, masih akan berlangsung pada Semester II. Kondisi ini mencerminkan bahwa outcome pelayanan telah mulai tercapai meskipun penyerapan anggaran masih relatif rendah.

Pada Program Penanggulangan Bencana, indikator Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana telah

mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran mencapai 23,05% yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan anggaran masih disiapkan untuk mengantisipasi potensi kejadian bencana pada Semester II, mengingat karakteristik program penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi dan intensitas kejadian di lapangan.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, indikator Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan taman makam pahlawan tetap dapat dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia atau kegiatan rutin yang belum memerlukan dukungan belanja secara signifikan pada periode evaluasi ini.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, yang ditandai dengan seluruh indikator program berada pada kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan korban bencana, serta pengelolaan taman makam pahlawan. Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sebagian besar program. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah, optimalisasi penyaluran bantuan sosial sesuai sasaran, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala agar realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat secara lebih proporsional.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, memperkuat hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta

mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kawasan transmigrasi. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,42	6.180.256.414	3,55	3.260.405.266	100,00	52,76	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	74,05	22.504.850	99,93	375.080	100,00	1,67	ST	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Latihan Kerja (Indeks)	3,80	61.569.760	3,78	4.500.000	99,47	7,31	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
1	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	0	0	0	-	-	-	-
2	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,31	243.680.100	1,31	3.655.200	100,00	1,50	ST	SR
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	0	0	0	0	-	-	-	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
3	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	2,50	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	33,40	82.627.600	33,40	8.820.008	100,00	10,67	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi										
1	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	33,32	0	0	0	0,00	-	SR	-
2	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigras yang Dikembangkan (Kawasan)	1	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator, khususnya pada program penunjang dan sebagian program urusan ketenagakerjaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran karena pelaksanaannya masih berada pada tahapan persiapan atau dijadwalkan pada Semester II. Di sisi lain, realisasi anggaran secara umum masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR), meskipun beberapa indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penyerapan anggaran sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh indikator menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 52,76% atau berkategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan perangkat daerah telah memenuhi target serta didukung oleh penyerapan anggaran yang relatif optimal. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga telah mencapai 100%, namun realisasi anggarannya baru 1,67% sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa pencapaian indikator organisasi lebih dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan pelaksanaan tugas rutin, sedangkan sebagian besar kegiatan administrasi pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II. Demikian pula Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Latihan Kerja (BLK) telah mencapai 99,47% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru mencapai 7,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pelatihan kerja tetap terjaga meskipun dukungan anggaran masih relatif rendah. Secara keseluruhan, Program Penunjang telah mampu mendukung penyelenggaraan organisasi dan pelayanan publik secara efektif.

Pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ketenagakerjaan atau kegiatan yang mendukung indikator tersebut masih berada pada tahap persiapan administrasi maupun pelaksanaan yang dijadwalkan pada Semester II. Mengingat dokumen perencanaan tenaga kerja merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah, percepatan penyelesaiannya menjadi penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program-program ketenagakerjaan berikutnya.

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 1,50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target peningkatan kompetensi tenaga kerja telah berhasil dicapai melalui pelaksanaan pelatihan maupun sertifikasi yang efektif, meskipun sebagian besar anggaran pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II. Sementara itu, indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja belum menunjukkan target maupun realisasi karena pada dokumen evaluasi belum terdapat alokasi maupun capaian yang dapat diukur pada Semester I. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran produktivitas tenaga kerja kemungkinan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh program peningkatan kompetensi selesai dilaksanakan.

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan masih menunjukkan capaian 0% dan belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja, baik melalui bursa kerja, kerja sama dengan dunia usaha, maupun pelayanan penempatan tenaga kerja lainnya, belum terlaksana pada Semester I atau masih berada pada tahap persiapan. Mengingat penempatan tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama dalam mengurangi tingkat pengangguran

terbuka, maka percepatan pelaksanaan program ini perlu menjadi perhatian pada Semester II.

Pada Program Hubungan Industrial, indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, sementara realisasi anggarannya baru mencapai 10,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hubungan industrial telah berjalan secara efektif sehingga sebagian besar perusahaan telah memenuhi ketentuan normatif ketenagakerjaan. Namun demikian, masih rendahnya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan lanjutan, pengawasan, serta sosialisasi kepada perusahaan masih akan dioptimalkan pada Semester II.

Pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi, baik Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi maupun Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan atau belum menjadi prioritas pelaksanaan pada Semester I. Mengingat pembangunan kawasan transmigrasi memerlukan sinkronisasi kebijakan, penyusunan dokumen teknis, dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, maka percepatan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar target pembangunan kawasan transmigrasi dapat mulai direalisasikan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan capaian kinerja yang baik pada sebagian besar indikator yang telah dilaksanakan, terutama pada aspek pelayanan publik, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Namun demikian, masih terdapat beberapa program strategis yang belum menunjukkan perkembangan, khususnya pada bidang perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan urusan transmigrasi. Selain itu, realisasi anggaran pada sebagian besar program masih relatif rendah sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, perangkat daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, pengelolaan data gender dan anak, pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor pada Semester II agar seluruh target pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,52	4.715.278.476	0	1.522.475.781	0,00	32,29	SR	R
		Persentase Capaian	76,64	0	69,55	0	90,75	-	ST	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Kinerja Perangkat Daerah (%)								
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,00	27.039.302	0	337.992	0,00	1,25	SR	SR
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan (%)	61,05	186.753.905	72,85	41.490.348	100,00	22,22	ST	SR
2	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	256.105.482	100	98.514.784	100,00	38,47	ST	S
		Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO (%)	100	111.423.125	100	1.279.082	100,00	1,15	ST	SR
3	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	68.561.174	100	49.497.919	100,00	72,20	ST	ST
4	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemamfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan (%)	70	0	0	0	0,00	-	SR	-
5	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,41	34.612.987	70,25	4.642.663	100,00	13,41	ST	SR
6	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,04	156.840.375	82	18.382.290	100,00	11,72	ST	SR
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	73,04	213.082.050	100	66.638.180	100,00	31,27	ST	R
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (age specipic	24,4	57.141.802	18	952.364	73,77	1,67	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		fertility rate / ASFR 15 -19) (Angka)								
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,33	19.300.955	2,34	4.598.000	100,00	23,82	ST	SR
2	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (Mcpr) (Angka)	74,50	1.230.607.950	74,9	292.534.280	100,00	23,77	ST	SR
		Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (Persentase)	3,4	72.968.677	0,41	40.384.265	12,06	55,34	SR	ST
3	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	80	263.523.446	80	87.216.077	100,00	33,10	ST	S

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator, namun belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Sebagian besar indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 90%, bahkan sejumlah indikator telah mencapai 100% pada Semester I. Di sisi lain, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) hingga Sedang (S), yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahapan pelaksanaan bertahap dan diproyeksikan mengalami peningkatan penyerapan pada Semester II. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian optimal, terutama pada aspek pengarusutamaan gender, pengelolaan data gender dan anak, serta pengendalian kebutuhan ber-KB yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya merata. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 90,75% dengan kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola organisasi telah berjalan secara efektif. Namun demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih belum

menunjukkan capaian pada Semester I dengan nilai 0%, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 32,29% atau berada pada kategori Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran IKM merupakan indikator yang bersifat periodik sehingga hasilnya belum tersedia pada Semester I, sementara anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung operasional pelayanan dan administrasi perangkat daerah.

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, capaian indikator menunjukkan kondisi yang bervariasi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan telah mencapai 100% dari target Semester I dengan realisasi anggaran sebesar 22,22%, yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi relatif terjaga dan sejalan dengan arah kebijakan peningkatan pemberdayaan perempuan. Sebaliknya, indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) belum menunjukkan capaian dengan realisasi kinerja 0% dan penyerapan anggaran hanya 1,25%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi penganggaran responsif gender pada perangkat daerah masih memerlukan penguatan, baik melalui peningkatan kapasitas perencanaan, pendampingan penyusunan program, maupun pengintegrasian perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Pada Program Perlindungan Perempuan, kedua indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran 38,47%, sedangkan Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO juga telah mencapai 100%, meskipun realisasi anggarannya baru 1,15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan telah berjalan secara efektif, sementara rendahnya penyerapan anggaran pada indikator penyelesaian kasus mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pendukung masih akan dilaksanakan pada Semester II atau penyelesaian kasus lebih banyak dilakukan melalui optimalisasi koordinasi lintas lembaga.

Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, indikator Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 72,20%, yang merupakan salah satu tingkat penyerapan anggaran tertinggi di antara seluruh program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pembelajaran keluarga berjalan efektif serta didukung oleh pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal. Program ini memberikan kontribusi penting terhadap

penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu sasaran pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna.

Sebaliknya, pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, indikator Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data gender serta data anak masih berada pada tahap persiapan atau belum dilaksanakan. Mengingat data gender dan anak merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender, percepatan pelaksanaan program ini menjadi penting agar kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin berbasis data.

Pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak, seluruh indikator utama telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) telah mencapai target dengan realisasi anggaran 13,41%, sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) juga mencapai target dengan realisasi anggaran 11,72%. Selain itu, Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran 31,27%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak telah berjalan sesuai target RKPD, meskipun pelaksanaan kegiatan pendukung masih akan dioptimalkan pada Semester II.

Pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagian besar indikator juga menunjukkan perkembangan yang baik. Angka Kelahiran Total (TFR) dan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) telah mencapai target Semester I dengan kategori Sangat Tinggi, sementara realisasi anggarannya masing-masing baru mencapai 23,82% dan 23,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana telah memberikan hasil yang positif terhadap pengendalian fertilitas dan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Sementara itu, Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19 Tahun) baru mencapai 73,77%, sehingga masih memerlukan penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan usia anak untuk mencapai target akhir tahun.

Perhatian khusus perlu diberikan pada indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) yang baru mencapai 12,06% dari target, meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 55,34% atau berkategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dukungan anggaran relatif tinggi, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan pelayanan keluarga berencana oleh pasangan usia subur. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), peningkatan akses pelayanan kontrasepsi, serta penguatan pendampingan kepada sasaran agar angka unmet need dapat ditekan sesuai target nasional maupun daerah.

Pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, indikator Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran 33,10%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan keluarga melalui kelompok-kelompok ketahanan keluarga telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagai salah satu sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Hal tersebut ditunjukkan oleh dominannya indikator yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi, terutama pada pelayanan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, serta program keluarga berencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang memerlukan percepatan, khususnya implementasi penganggaran responsif gender, pengelolaan sistem data gender dan anak, peningkatan capaian indikator unmet need, serta penyelesaian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, percepatan penyerapan anggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dicapai secara lebih optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan bidang pertanian sebagai urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan, mengurangi kerawanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan, memperkuat kesehatan hewan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian sebagai

bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada penguatan sistem ketahanan pangan, peningkatan produksi komoditas pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan, penanggulangan bencana pertanian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Mengingat sebagian besar program pada urusan pangan dan pertanian merupakan kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh musim tanam, siklus produksi, tahapan pengadaan sarana produksi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka sebagian indikator kinerja baru dapat dicapai secara optimal pada Semester II.

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	72,00	(	60,8	(	84,44	-	ST	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	10.560.295.086	3,47	4.028.075.022	100,58	38,14	ST	S
. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persentase)	30	(	0	(	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
2	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan (Kkal/Kapita/Hari)	2.400	61.085.300	0	17.330.852	0,00	28,37	SR	R
		Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)	2.100	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87,8	119.974.100	0	1.199.740	0,00	1,00	SR	SR
3	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	14,7	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Nilai)	4,60	409.995.600	0	41.852.381	0,00	10,21	SR	SR
4	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman (%	90	218.402.800	90	4.569.028	100,00	2,09	ST	SR
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
1	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1,5	797.467.800	0	20.374.646	0,00	2,55	SR	SR
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Persentase)	1,5	421.134.890	0	18.017.000	0,00	4,28	SR	SR
		Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan (%)	1,5		0		0,00		SR	SR
		Persentase kenaikan produksi ternak (%)	0,8	500.500.000	0	8.548.212	0,00	1,71	SR	SR
		Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)	60,76	0	0	0	0,00	-	SR	-
2	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0,10	979.959.399	0	31.734.978	0,00	3,24	SR	SR
3	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan (%)	91	220.000.000	0	11.200.000	0,00	5,09	SR	SR
4	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase)	6,5	0	0	0	0,00	-	SR	-
5	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani (%)	2,0	236.481.900	0	43.047.418	0,00	18,20	SR	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa capaian kinerja masih belum optimal, yang ditandai dengan masih

dominannya indikator berkategori Sangat Rendah (SR) baik pada urusan pangan maupun urusan pertanian. Kondisi tersebut diikuti dengan realisasi anggaran yang secara umum juga masih rendah, meskipun pada beberapa indikator telah menunjukkan progres penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan, pengadaan sarana dan prasarana, distribusi bantuan, pelaksanaan musim tanam, maupun proses pembinaan kepada kelompok tani, sehingga output program belum sepenuhnya dapat diukur pada Semester I. Karakteristik program yang sangat dipengaruhi oleh siklus produksi pertanian menyebabkan sebagian besar indikator diproyeksikan mengalami peningkatan capaian pada Semester II setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja penyelenggaraan organisasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 84,44% dengan kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola organisasi dan administrasi pemerintahan telah berjalan sesuai target Semester I. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100,58% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 38,14% yang berada pada kategori Sedang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik, meskipun sebagian besar kegiatan penunjang administrasi masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada urusan pemerintahan bidang pangan, sebagian besar program masih menunjukkan capaian kinerja yang rendah. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan belum menunjukkan capaian terhadap indikator Persentase Jumlah Cadangan Pangan, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pengadaan maupun penguatan cadangan pangan pemerintah daerah belum dilaksanakan pada Semester I atau masih berada pada tahap persiapan. Mengingat cadangan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan daerah, percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan ketahanan pangan pada Semester II.

Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, seluruh indikator utama masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan, AKE Konsumsi, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih berada pada kategori Sangat Rendah, dengan realisasi anggaran masing-masing baru mencapai 28,37%, 0%, dan 1,00%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta intervensi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat masih belum memberikan dampak yang signifikan pada Semester I. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengembangan pangan lokal, dan pemberdayaan masyarakat agar indikator ketahanan pangan dapat meningkat pada Semester II.

Selanjutnya, Program Penanganan Kerawanan Pangan juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan maupun Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat masih berada pada kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 10,21% pada indikator prevalensi kerawanan pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan identifikasi wilayah rentan pangan, intervensi penanganan kerawanan pangan, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan masih memerlukan percepatan agar target pengurangan kerawanan pangan dapat tercapai pada akhir tahun.

Berbeda dengan program lainnya, Program Pengawasan Keamanan Pangan menunjukkan capaian yang cukup baik. Persentase Pangan Segar yang Aman telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru sebesar 2,09%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan segar telah mampu memenuhi target Semester I melalui optimalisasi pengawasan dan pembinaan, sementara sebagian besar kegiatan pendukung masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada urusan pemerintahan bidang pertanian, hampir seluruh program masih menunjukkan capaian kinerja yang rendah. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum menunjukkan peningkatan pada indikator produksi tanaman pangan, produksi perkebunan, produksi ternak, maupun pemanfaatan sarana pertanian. Seluruh indikator tersebut masih berada pada kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran berkisar antara 1,71% hingga 4,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi sarana produksi, bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta dukungan kepada petani masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga dampaknya terhadap peningkatan produksi belum terlihat pada Semester I.

Demikian pula pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, indikator Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih menunjukkan capaian 0% dengan realisasi anggaran 3,24%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses penetapan LP2B masih berada pada tahapan inventarisasi, verifikasi, dan penyusunan dokumen pendukung

sehingga hasilnya belum dapat diukur pada Semester I. Mengingat LP2B merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, percepatan penyelesaiannya perlu menjadi perhatian pada Semester II.

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, indikator Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan juga masih berada pada kategori Sangat Rendah dengan realisasi anggaran sebesar 5,09%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian penyakit hewan, vaksinasi, surveilans, dan pelayanan kesehatan hewan masih berlangsung secara bertahap sehingga hasilnya belum terlihat secara optimal pada Semester I.

Sementara itu, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran, sedangkan Program Penyuluhan Pertanian masih berada pada kategori Sangat Rendah dengan realisasi anggaran 18,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas petani, penguatan kelembagaan petani, serta penyuluhan pertanian masih memerlukan percepatan pelaksanaan agar mampu memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna masih menghadapi tantangan dalam pencapaian indikator kinerja pada sebagian besar program teknis, baik pada urusan pangan maupun urusan pertanian. Meskipun kualitas pelayanan organisasi dan kepuasan masyarakat telah menunjukkan hasil yang baik, sebagian besar indikator pembangunan sektor pangan dan pertanian masih berada pada kategori Sangat Rendah karena kegiatan belum memasuki tahapan yang menghasilkan output maupun outcome yang dapat diukur. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan distribusi sarana dan prasarana pertanian, optimalisasi pelaksanaan musim tanam, penguatan penyuluhan dan pendampingan petani, percepatan program diversifikasi pangan, peningkatan pengawasan keamanan pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengendalian kerawanan pangan.

12. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, pembinaan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	75	4.584.608.567	69,15	2.922.974.682	92,20	63,76	ST	ST
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	3,13		1,7		54,31	64,19	ST	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,46		2,97		85,84		ST	ST
b. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
1	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindak lanjuti (%)	50	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
2	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi (Ha)	3,1	118.070.252	3,1	89.813.152	100,00	76,07	ST	ST
		Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA (%)	21,44	0	10	0	46,64	-	ST	-
		Persentase Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan (%)	73,92	0	55,44	0	75,00	-	ST	-
3	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH (%)	80	2.207.104.000	16	1.413.526.546	20,00	64,04	SR	ST
4	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	0	0	-	-	-	-
5	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum (%)	73,92	105.265.000	29,57	15.621.814	40,00	14,84	T	SR
6	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	60	85.613.300	0	4.001.047	0,00	4,67	SR	SR
7	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	60	68.104.500	0	939.388	0,00	1,38	SR	SR
8	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	50	42.355.000	50	584.216	100,00	1,38	ST	SR
9	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	35,90	3.797.556.336	32,85	2.258.611.203	91,50	59,48	ST	ST

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi (ST) pada aspek pelayanan publik, pengendalian pencemaran lingkungan,

pengelolaan persampahan, serta konservasi lingkungan. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang menunjukkan capaian kinerja Sangat Rendah (SR), terutama pada aspek perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari sisi realisasi anggaran, sebagian program telah menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi, sedangkan program lainnya masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga realisasi keuangannya relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program lingkungan hidup telah berjalan sesuai tahapan, namun masih diperlukan percepatan pada beberapa program strategis agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 92,20% dengan realisasi anggaran sebesar 63,76%, yang keduanya berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, pelaksanaan administrasi pemerintahan, serta dukungan pelayanan internal telah berjalan secara efektif dan didukung oleh penyerapan anggaran yang relatif optimal. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah mencapai 54,31%, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 64,19%, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik terus mengalami kemajuan seiring dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendukung pelayanan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 85,84% atau berkategori Sangat Tinggi, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup telah berada pada kondisi yang baik dan sesuai dengan target Semester I.

Pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup, indikator Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti masih menunjukkan capaian 0% dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses tindak lanjut terhadap dokumen kajian lingkungan hidup masih berada pada tahap persiapan atau belum dilaksanakan pada Semester I. Mengingat dokumen kajian lingkungan hidup merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan berbasis lingkungan, percepatan penyelesaian program ini perlu menjadi prioritas pada Semester II.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Luas Lahan Konservasi telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 76,07%, yang menunjukkan bahwa kegiatan konservasi kawasan

telah dilaksanakan secara optimal. Selain itu, Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam telah mencapai 46,64%, sedangkan Persentase Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan mencapai 75,00%, yang keduanya berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan telah berjalan sesuai tahapan, meskipun sebagian indikator belum memerlukan dukungan anggaran secara langsung pada Semester I.

Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), indikator Persentase Luas Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru mencapai 20,00% sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 64,04% atau berkategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, namun output fisik berupa peningkatan luas ruang terbuka hijau belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya jeda waktu antara pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator, mengingat pembangunan maupun penataan ruang terbuka hijau memerlukan waktu pelaksanaan yang relatif panjang hingga menghasilkan output yang dapat diukur.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), indikator Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum mencapai 40,00% atau berkategori Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 14,84% dan masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha telah mulai berjalan, namun masih memerlukan peningkatan intensitas pengawasan, pembinaan teknis, serta pendampingan agar tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dapat meningkat pada Semester II.

Selanjutnya, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat serta Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat masih menunjukkan capaian 0%, dengan realisasi anggaran masing-masing baru mencapai 4,67% dan 1,38%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup, edukasi masyarakat, serta pemberian penghargaan kepada kelompok masyarakat peduli lingkungan belum terlaksana secara optimal pada Semester I. Mengingat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, percepatan implementasi kedua program tersebut menjadi penting agar kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat terus meningkat.

Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, indikator Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru mencapai 1,38%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan masyarakat dan penanganan kasus lingkungan hidup telah berjalan secara efektif melalui optimalisasi koordinasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum tanpa memerlukan dukungan anggaran yang besar pada Semester I.

Sementara itu, Program Pengelolaan Persampahan menjadi salah satu program dengan kinerja terbaik pada Semester I. Persentase Penanganan Sampah telah mencapai 91,50% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 59,48% yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan persampahan berjalan secara efektif, baik dalam aspek pengumpulan, pengangkutan, maupun pengelolaan sampah. Tingginya capaian kinerja dan penyerapan anggaran mencerminkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup daerah, khususnya pada aspek pelayanan publik, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kawasan, penanganan pengaduan lingkungan hidup, dan pengelolaan persampahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang memerlukan perhatian lebih, terutama pada perencanaan lingkungan hidup, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, akurat, dan terintegrasi, sekaligus mewujudkan tertib administrasi kependudukan, penyediaan data kependudukan yang valid, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penguatan profil kependudukan, serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan administrasi kependudukan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan pemanfaatan data kependudukan guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang Tepat Waktu (%)	90	3.340.355.556	86	1.465.308.594	95,56	43,87	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	95	16.312.600	96,32	3.834.129	100,00	23,50	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	30,05	140.215.240	8,6	54.779.309	28,62	-	R	-
		Persentase Kepemilikan	87		78,43		90,15	-	ST	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Kartu Identitas Anak (Persentase)								
		Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	81		97,37		100,00	39,07	ST	T
2	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	148.845.310	99,45	2.232.672	99,45	1,50	ST	SR
		Persentase akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	83		80,03		96,42	-	ST	-
3	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	142.485.825	85	7.224.760	85,00	-	ST	-
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)	20		23		100,00	-	ST	-
		Persentase penyajian Data Kependudukan (%)	80		80		100,00	5,07	ST	SR
4	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	80	110.500.000	70	1.105.002	87,50	1,00	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi pencapaian indikator, meskipun realisasi anggaran pada sebagian besar program masih relatif rendah. Mayoritas indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 85%, bahkan beberapa indikator telah mencapai 100% pada Semester I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) hingga Tinggi (T), yang mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan pendukung pelayanan masih akan direalisasikan pada Semester II. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penyerapan anggaran, terutama pada

layanan yang telah terdigitalisasi dan didukung oleh sistem informasi administrasi kependudukan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang Tepat Waktu telah mencapai 95,56% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 43,87% atau berkategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi internal maupun pelayanan kepada masyarakat telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru mencapai 23,50% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi dan pencapaian target kinerja perangkat daerah telah berjalan secara efektif, sementara sebagian kegiatan penunjang masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, capaian indikator menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih terdapat variasi antarindikator. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) telah mencapai 90,15% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan Persentase Perekaman KTP Elektronik telah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 39,07% yang termasuk kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk, khususnya perekaman KTP elektronik, telah berjalan secara optimal sehingga mampu memenuhi target Semester I. Namun demikian, Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 28,62% dengan kategori Rendah, sehingga masih diperlukan percepatan implementasi digitalisasi administrasi kependudukan melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan masyarakat, serta perluasan aktivasi IKD agar target tahunan dapat tercapai.

Pada Program Pencatatan Sipil, kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi Anak mencapai 99,45%, sedangkan Persentase Akta Perkawinan dan Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Memerlukan mencapai 96,42%, yang keduanya berada pada kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian, realisasi anggaran program baru mencapai 1,50% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan sipil telah berjalan secara efektif melalui optimalisasi sistem pelayanan dan sumber daya yang tersedia, sementara sebagian besar kegiatan pendukung administrasi dan operasional masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, seluruh indikator juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase Kependudukan yang Memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital telah mencapai 85,00%, sedangkan Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama serta Persentase Penyajian Data Kependudukan masing-masing telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggaran untuk penyajian data kependudukan baru mencapai 5,07%, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung integrasi dan pemanfaatan data kependudukan pada Semester II. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik melalui penguatan sistem informasi administrasi kependudukan.

Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan, indikator Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan mencapai 87,50% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 1,00% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan dan pengelolaan profil kependudukan telah berjalan sesuai target Semester I, namun sebagian besar kegiatan pendukung, seperti pembaruan data, penyempurnaan basis data, maupun penyusunan publikasi profil kependudukan masih akan dioptimalkan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut ditandai dengan dominannya indikator yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi, khususnya pada pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta tata kelola organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan optimalisasi realisasi anggaran pada sebagian besar program. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan administrasi kependudukan, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan IKD, penguatan integrasi data kependudukan dengan perangkat daerah lainnya, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan kerja sama antardesa, serta mendorong terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penataan desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kerja sama desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa agar target pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
1	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	5.923.446.852	3,44	2.882.531.216	99,71	48,66	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	75,00	14.242.100	74,00	3.229.992	98,67	22,68	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	7,14	37.777.000	4,28	4.133.620	59,94	10,94	ST	SR
2	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	50,00	15.223.000	47,14	0	94,28	0,00	ST	SR
3	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	27,65	35.000.000	27,65	1.800.000	100,00	5,14	ST	SR
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	55,00	232.001.100	55,00	57.740.131	100,00	24,89	ST	SR
4	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	38,47	1.105.567.560	25,45	196.572.112	66,16	17,78	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator, namun belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian di atas 90%, bahkan beberapa indikator telah mencapai 100% pada Semester I. Di sisi lain, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) dengan tingkat penyerapan di bawah 25 persen pada sebagian besar program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kepada pemerintah desa telah berjalan sesuai target, sementara sebagian besar kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih berlangsung secara bertahap dan diproyeksikan meningkat pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 99,71% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 48,66% yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal serta didukung oleh pelaksanaan anggaran yang relatif baik pada Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 98,67% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 22,68% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh efektivitas tata kelola, koordinasi, dan pelaksanaan tugas rutin, sedangkan sebagian besar belanja operasional dan kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Penataan Desa, indikator Persentase Fasilitasi Penataan Desa mencapai 59,94% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru sebesar 10,94% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses fasilitasi penataan desa telah berjalan sesuai tahapan, meskipun sebagian besar kegiatan teknis, pendampingan, maupun penyelesaian administrasi masih akan dilaksanakan pada Semester II. Mengingat penataan desa merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pelaksanaan kegiatan perlu terus dilakukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Peningkatan Kerja Sama Desa, indikator Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa telah mencapai 94,28% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum didukung oleh realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi kerja sama antardesa telah dilaksanakan melalui koordinasi dan pendampingan yang memanfaatkan sumber daya internal perangkat daerah, sementara kegiatan yang memerlukan dukungan pembiayaan masih akan direalisasikan pada Semester II. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar desa telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa, seluruh indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya telah mencapai 100%, sedangkan Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa juga mencapai 100%, yang keduanya termasuk kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggaran masing-masing baru mencapai 5,14% dan 24,89%, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kapasitas aparatur desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa telah terlaksana secara efektif melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan

lanjutan, seperti bimbingan teknis, pelatihan, maupun fasilitasi lainnya masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, indikator Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mencapai 66,16% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 17,78% atau masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa telah berjalan sesuai target Semester I melalui pembinaan dan pendampingan kepada lembaga desa. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan secara lebih luas masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan aparatur desa, fasilitasi tata kelola pemerintahan desa, penguatan kerja sama desa, serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Meskipun demikian, realisasi anggaran pada hampir seluruh program masih relatif rendah sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

15. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan transportasi laut, peningkatan keselamatan transportasi, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, serta penguatan konektivitas wilayah guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan keselamatan lalu lintas, pengembangan pelayanan transportasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana

perhubungan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan transportasi. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Mengingat sebagian besar kegiatan pada urusan perhubungan berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi serta pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan secara bertahap, maka hasil evaluasi Semester I menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi realisasi anggaran, serta penguatan pengendalian program pada Semester II agar target pembangunan sektor perhubungan dapat tercapai.

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	6.655.232.820	3,12	3.362.000.889	90,43	50,73	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	80		95,93		100,00	1,73	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
1	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (%)	80,01	4.668.274.000	79,07	1.152.660.591	98,83	24,69	ST	SR
		Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	3,92		0,33		8,42		SR	-
2	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik (%)	87,88	1.274.204.789	84,85	268.056.592	96,55	21,04	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik dari sisi pencapaian indikator, namun belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi anggaran. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), khususnya pada aspek pelayanan publik, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengelolaan pelayaran. Di sisi lain, realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) pada program teknis dengan tingkat penyerapan berkisar antara 1,73% hingga 24,69%, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 50,73%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan, namun sebagian besar pekerjaan fisik, pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, serta kegiatan operasional masih akan direalisasikan secara lebih optimal pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,43% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 50,73% atau senilai Rp3.362.000.889 dari pagu anggaran sebesar Rp6.655.232.820. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal dan didukung oleh pemanfaatan anggaran yang cukup baik pada Semester I. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru sebesar 1,73% atau Rp500.168. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh efektivitas tata kelola, koordinasi internal, serta optimalisasi sumber daya aparatur, sedangkan sebagian besar kegiatan administrasi pendukung masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota telah mencapai 98,83% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar 24,69% atau senilai Rp1.152.660.591 dari pagu anggaran Rp4.668.274.000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan telah berjalan sesuai tahapan, meskipun sebagian besar pekerjaan fisik masih akan diselesaikan pada Semester II. Tingkat penyerapan anggaran yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa proses pengadaan maupun penyelesaian pekerjaan konstruksi masih berlangsung sehingga realisasi keuangan diperkirakan akan meningkat pada semester berikutnya.

Berbeda dengan indikator tersebut, Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas baru mencapai 8,42% dan berada pada kategori Sangat Rendah (SR). Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas belum memberikan hasil yang optimal pada Semester I. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan pengguna jalan, perilaku berlalu lintas masyarakat, kondisi prasarana keselamatan jalan, serta perlunya penguatan sinergi dengan Kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan program keselamatan jalan melalui penyediaan fasilitas keselamatan, edukasi masyarakat, pengawasan lalu lintas, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar target penurunan angka kecelakaan dapat tercapai pada akhir tahun.

Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Pelayaran, indikator Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik telah mencapai 96,55% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 21,04% atau sebesar Rp268.056.592 dari pagu anggaran Rp1.274.204.789. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelabuhan di Kabupaten Natuna telah berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau. Namun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa kegiatan pemeliharaan, peningkatan fasilitas pelabuhan, maupun pengembangan sarana pendukung transportasi laut masih akan dilaksanakan secara bertahap pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan transportasi daerah, khususnya pada aspek pelayanan publik, penyediaan perlengkapan jalan, dan pengelolaan pelabuhan. Meskipun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program teknis masih relatif rendah, yaitu 24,69% atau Rp1.152.660.591 pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 21,04% atau Rp268.056.592 pada Program Pengelolaan Pelayaran. Selain itu, indikator Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang baru mencapai 8,42% perlu menjadi perhatian khusus melalui penguatan program keselamatan jalan, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyediaan sarana keselamatan, serta edukasi kepada masyarakat.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, statistik, dan persandian sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan informasi publik, pengembangan infrastruktur dan aplikasi digital, penyediaan data statistik sektoral yang akurat, serta penguatan sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Seluruh urusan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, serta penguatan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	3.756.458.596	6,99	1.309.222.488	100,00	34,85	ST	S
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		100		100,00		ST	S
b. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
1	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	60	2.893.389.900	103,7	1.065.867.863	100,00	36,84	ST	S
2	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi (%)	48	4.143.751.200	15	2.106.577.024	31,25	50,84	R	ST
c. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral (%)	90	102.215.000	20	10.705.929	22,22	10,47	SR	SR
d. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	5	100.224.152	20	13.446.304	100,00	13,42	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator program telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, khususnya pada aspek pelayanan publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi daerah telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang belum mencapai target, terutama pada penyelenggaraan statistik sektoral dan integrasi aplikasi pemerintahan, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II. Dari sisi realisasi anggaran, tingkat penyerapan masih bervariasi dengan rentang 10,47% hingga 50,84%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahapan implementasi dan diproyeksikan meningkat pada semester berikutnya.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja penyelenggaraan organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 34,85% atau Rp1.309.222.488 dari pagu anggaran sebesar Rp3.756.458.596. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang diberikan perangkat

daerah telah memenuhi target Semester I. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan tata kelola organisasi, administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, tingkat penyerapan anggaran yang masih berada pada kategori Sedang mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai 103,70 atau 100,00% dari target Semester I dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi anggaran program mencapai 36,84% atau sebesar Rp1.065.867.863 dari pagu anggaran Rp2.893.389.900. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, layanan komunikasi publik, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur digital dan pelayanan informasi publik agar realisasi anggaran meningkat secara proporsional terhadap capaian kinerja pada Semester II.

Berbeda dengan program sebelumnya, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Indikator Persentase Layanan Aplikasi Pemerintahan Daerah yang Terintegrasi baru mencapai 31,25% dengan kategori Rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 50,84% atau sebesar Rp2.106.577.024 dari pagu anggaran Rp4.143.751.200, yang termasuk kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi, namun outcome berupa meningkatnya jumlah layanan pemerintahan yang terintegrasi belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses integrasi aplikasi pemerintahan memerlukan tahapan yang lebih panjang, meliputi pengembangan sistem, integrasi basis data, pengujian aplikasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, percepatan implementasi SPBE dan integrasi layanan digital perlu menjadi prioritas pada Semester II agar investasi anggaran yang telah direalisasikan dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, capaian indikator masih menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Persentase OPD yang Menyediakan Data dan Metadata Statistik Sektoral baru mencapai 22,22% dengan kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 10,47% atau sebesar Rp10.705.929 dari pagu anggaran Rp102.215.000. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan

bahwa implementasi penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya dalam penyediaan data dan metadata sesuai prinsip Satu Data Indonesia, belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kesiapan perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarprodusen data. Mengingat data statistik sektoral merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, maka percepatan pembinaan kepada perangkat daerah dan penguatan tata kelola statistik perlu menjadi prioritas pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, indikator Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 13,42% atau sebesar Rp13.446.304 dari pagu anggaran Rp100.224.152. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah telah berjalan sesuai target melalui penerapan tata kelola keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik, serta penguatan koordinasi dalam pengelolaan persandian. Rendahnya realisasi anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan peningkatan kapasitas, penguatan infrastruktur keamanan siber, serta pengembangan sistem keamanan informasi masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan keamanan informasi pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan dominannya indikator yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa program strategis yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang capaian kinerjanya masing-masing baru mencapai 31,25% dan 22,22%. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan integrasi aplikasi pemerintahan berbasis SPBE, penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui peningkatan kualitas data statistik sektoral, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar realisasi fisik dan keuangan meningkat secara lebih seimbang.

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan promosi potensi investasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan sistem informasi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, DPMPTSP melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan realisasi investasi, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko, pengendalian pelaksanaan investasi, serta pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,533	5.811.178.527	3,915	2.519.771.315	100,00	43,37	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	74,55		72,65		97,45			
b. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
1	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Realisasi Total Terhadap Target	72,15	237.388.810	126,3	22.067.562	100,00	9,30	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	IKLIM PENANAMAN MODAL	Investasi (Persentase)								
2	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	10	242.118.000	6,41	37.853.096	64,10	15,63	ST	SR
3	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sessuai Ketentuan (Persentase)	98,46	69.953.600	99,2	8.422.538	100,00	12,04	ST	SR
4	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	99.071.000	76,67	5.731.899	76,67	5,79	ST	SR
5	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	8.506.060	100	1.097.753	100,00	12,91	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik, ditandai dengan hampir seluruh indikator program telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengembangan iklim investasi, serta pengelolaan penanaman modal telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, realisasi anggaran pada seluruh program teknis masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR) dengan tingkat penyerapan antara 5,79% hingga 15,63%, sehingga masih diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar realisasi keuangan lebih seimbang dengan capaian kinerja.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 43,37% atau Rp2.519.771.315 dari pagu anggaran Rp5.811.178.527, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 97,45% dengan kategori Sangat Tinggi, yang mengindikasikan bahwa

pelaksanaan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan secara efektif serta mampu mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, indikator Persentase Realisasi Total Investasi terhadap Target Investasi telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, bahkan realisasi nilai investasi telah mencapai 126,3 dibandingkan target 72,15. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 9,30% atau sebesar Rp22.067.562 dari pagu anggaran Rp237.388.810. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi telah berlangsung secara baik meskipun dukungan belanja program masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian investasi lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas investasi yang telah berjalan, iklim usaha yang kondusif, serta efektivitas pelayanan investasi dibandingkan besarnya belanja program pada Semester I.

Pada Program Promosi Penanaman Modal, indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi mencapai 64,10% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 15,63% atau sebesar Rp37.853.096 dari pagu anggaran Rp242.118.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan promosi investasi telah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan minat investor, meskipun pelaksanaan promosi secara lebih intensif, baik melalui forum investasi, promosi langsung, maupun penyusunan materi promosi investasi, masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal, indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator mencapai 99,20% dari target 98,46%. Sementara itu, realisasi anggaran baru mencapai 12,04% atau sebesar Rp8.422.538 dari pagu anggaran Rp69.953.600. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko telah berjalan secara efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa pelayanan perizinan lebih banyak didukung oleh optimalisasi sistem pelayanan dan sumber daya aparatur, sedangkan sebagian kegiatan pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha mencapai 76,67% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 5,79% atau sebesar Rp5.731.899 dari pagu anggaran Rp99.071.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi penyelesaian berbagai kendala

investasi telah berjalan dengan baik melalui koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha. Namun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan monitoring lapangan, pembinaan, serta fasilitasi lanjutan masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 12,91% atau Rp1.097.753 dari pagu anggaran Rp8.506.060. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi penanaman modal telah berjalan sesuai target, sehingga mampu mendukung penyediaan informasi investasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada investor. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pengembangan sistem informasi investasi agar kualitas data investasi semakin akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang penanaman modal, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi, khususnya pada aspek realisasi investasi, pelayanan perizinan, pengelolaan data investasi, dan kepuasan masyarakat. Namun demikian, realisasi anggaran pada seluruh program teknis masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 5,79% hingga 15,63%, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar realisasi fisik dan keuangan meningkat secara lebih proporsional. Selain itu, penguatan promosi investasi, peningkatan fasilitasi kepada investor, percepatan monitoring pelaksanaan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penanaman modal perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan investasi dan memastikan target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai

18. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda yang berdaya saing, berkarakter, dan berwirausaha, sekaligus meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet, pengembangan organisasi kepemudaan dan keolahragaan, serta

peningkatan kapasitas kelembagaan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas pemuda, peningkatan prestasi olahraga, pembinaan organisasi kepemudaan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan pembinaan kepemudaan dan olahraga pada Semester II agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	5.385.114.622	3,2	2.127.419.106	92,75	39,51	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	62,50	16.283.300	69,80	3.334.361	100,00	20,48	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	15,00	111.111.850	13,86	59.187.194	92,40	53,27	ST	ST
2	2.19.03 - PROGRAM	Persentase Atlet yang Masuk	10	1.881.617.061	0	435.034.588	0,00	23,12	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pelatda Provinsi (%)								
3	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	75	529.171.400	134,5	43.995.238	100,00	8,31	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator program telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada beberapa program, serta terdapat satu indikator strategis yang belum menunjukkan capaian sesuai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga telah berjalan sesuai tahapan, namun pelaksanaan beberapa kegiatan strategis, khususnya pembinaan atlet berprestasi, masih memerlukan percepatan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 92,75% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 39,51% atau Rp2.127.419.106 dari pagu anggaran sebesar Rp5.385.114.622, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah berjalan secara efektif. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 20,48% atau sebesar Rp3.334.361 dari pagu anggaran Rp16.283.300, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh optimalisasi tata kelola dan sumber daya aparatur, sedangkan sebagian besar kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, indikator Rasio Wirausaha Pemuda telah mencapai 92,40% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi anggaran program mencapai 53,27% atau sebesar Rp59.187.194 dari pagu anggaran Rp111.111.850, yang juga

berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda berjalan relatif efektif, baik dari sisi pencapaian indikator maupun penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan pemuda telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Natuna.

Berbeda dengan program tersebut, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Indikator Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Provinsi baru mencapai 0,00% sehingga berada pada kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 23,12% atau sebesar Rp435.034.588 dari pagu anggaran Rp1.881.617.061, yang juga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembinaan atlet menuju Pelatda Provinsi belum menghasilkan capaian pada Semester I. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh jadwal seleksi atlet yang belum dilaksanakan, proses pembinaan yang masih berlangsung, maupun pelaksanaan kejuaraan yang menjadi dasar penetapan atlet Pelatda pada Semester II. Oleh karena itu, percepatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan intensitas latihan, serta penguatan koordinasi dengan organisasi olahraga dan pemerintah provinsi perlu menjadi perhatian agar target indikator dapat dicapai pada akhir tahun.

Sementara itu, pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, indikator Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai 134,5 dibandingkan target 75. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 8,31% atau sebesar Rp43.995.238 dari pagu anggaran Rp529.171.400, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan kegiatan kepramukaan telah berjalan secara efektif melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, sementara sebagian besar kegiatan pendukung yang memerlukan anggaran masih akan direalisasikan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, terutama pada aspek pelayanan publik, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pembinaan kepramukaan yang seluruh indikatornya telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan masih memerlukan perhatian khusus karena indikator

Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Provinsi belum menunjukkan capaian, sementara realisasi anggarannya baru mencapai 23,12%. Selain itu, realisasi anggaran pada sebagian besar program masih relatif rendah sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan pembinaan atlet secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan organisasi olahraga, optimalisasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat, memperkuat budaya gemar membaca, meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, andal, dan akuntabel, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis tata kelola arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan, penguatan budaya literasi masyarakat, peningkatan tata kelola kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah, serta penguatan kapasitas penyelenggara kearsipan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	4.554.688.428	3	2.045.771.733	86,96	44,92	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	83,30	7.793.105	56,4	406.536	67,71	5,22	ST	SR
b. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
1	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka (Indeks)	3,43	546.470.700	3	61.164.136	87,46	11,19	ST	SR
c. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
1	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip (%)	50	83.592.000	53,13	19.868.363	100,00	23,77	ST	SR
2	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	60	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang relatif baik, ditandai dengan sebagian besar indikator program berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan perpustakaan, pengelolaan arsip, serta tata kelola organisasi telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program masih relatif rendah, bahkan terdapat satu program yang belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan masih berada pada tahap persiapan maupun pelaksanaan bertahap, sehingga memerlukan percepatan implementasi pada Semester II agar target fisik dan keuangan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 86,96% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 44,92% atau Rp2.045.771.733 dari pagu anggaran Rp4.554.688.428, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah

memenuhi harapan masyarakat dan didukung oleh pelaksanaan anggaran yang cukup optimal pada Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 67,71% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 5,22% atau sebesar Rp406.536 dari pagu anggaran Rp7.793.105, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh efektivitas tata kelola dan pelaksanaan tugas rutin, sedangkan sebagian kegiatan administrasi penunjang masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pembinaan Perpustakaan, indikator Indeks Kepuasan Pemustaka mencapai 87,46% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi anggaran program baru mencapai 11,19% atau sebesar Rp61.164.136 dari pagu anggaran Rp546.470.700, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan telah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun demikian, rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pengembangan layanan perpustakaan, peningkatan koleksi, pembinaan perpustakaan, dan penguatan budaya literasi masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Arsip, indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator mencapai 53,13% dibandingkan target 50%. Realisasi anggaran program mencapai 23,77% atau sebesar Rp19.868.363 dari pagu anggaran Rp83.592.000, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan tata kelola arsip pada perangkat daerah telah berjalan dengan baik sehingga mampu melampaui target Semester I. Namun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan lanjutan, pengawasan kearsipan, digitalisasi arsip, serta peningkatan kapasitas pengelola arsip masih akan dioptimalkan pada Semester II.

Berbeda dengan program lainnya, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip belum menunjukkan perkembangan pada Semester I. Indikator Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip masih mencapai 0%, dengan realisasi anggaran juga 0% dari pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip belum dilaksanakan atau masih berada pada tahap persiapan administrasi dan perencanaan. Mengingat perlindungan arsip merupakan bagian penting dalam menjaga memori kolektif daerah serta menjamin keamanan arsip statis dan arsip vital pemerintah daerah, maka percepatan pelaksanaan program ini perlu

menjadi prioritas pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pengembangan layanan perpustakaan dan tata kelola kearsipan daerah, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi, terutama pada aspek kepuasan masyarakat, pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan arsip di perangkat daerah. Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program masih relatif rendah, yaitu 11,19% pada Program Pembinaan Perpustakaan dan 23,77% pada Program Pengelolaan Arsip, sedangkan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembinaan perpustakaan, pengembangan budaya literasi, digitalisasi dan pembinaan kearsipan, serta pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip.

20. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagai urusan pemerintahan pilihan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi kemaritiman. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budi daya, mendorong nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan pemasaran, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, serta memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Perikanan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap dan budi daya, peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan, serta penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program

dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha perikanan agar target pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026 Dinas Perikanan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,75	6.811.152.716	3,68	3.092.198.753	100,00	45,40	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	76,67		72,2		94,17		ST	ST
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
1	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap (%)	96,10	318.550.000	38,18	5.309.164	39,73	1,67	T	SR
2	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan budidaya (%)	96,10	213.551.200	41,78	10.226.188	43,48	4,79	T	SR
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya (%)	10,91	128.761.600	11,17	26.644.911	100,00	20,69	ST	SR
3	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	96,10	100.000.000	45,92	1.666.668	47,78	1,67	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang bervariasi antarprogram. Dari sisi tata kelola organisasi, indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, pada urusan teknis kelautan dan perikanan masih terdapat beberapa indikator yang berada pada kategori Tinggi (T), dengan realisasi anggaran yang secara umum masih Sangat Rendah (SR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan teknis masih

berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga realisasi fisik dan keuangan diperkirakan akan meningkat pada Semester II, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan musim produksi, pendampingan kepada pelaku usaha, serta pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 45,40% atau Rp3.092.198.753 dari pagu anggaran Rp6.811.152.716, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan dukungan administrasi pemerintahan telah berjalan secara optimal pada Semester I. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 94,17% dengan kategori Sangat Tinggi, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, indikator Persentase Produksi Perikanan Tangkap baru mencapai 39,73% dengan kategori Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 1,67% atau sebesar Rp5.309.164 dari pagu anggaran Rp318.550.000, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap masih berada di bawah target Semester I. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor musim penangkapan ikan, kondisi cuaca dan gelombang laut, ketersediaan armada penangkapan, serta aktivitas nelayan yang belum optimal pada awal tahun. Rendahnya realisasi anggaran juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan, fasilitasi sarana penangkapan, maupun dukungan operasional masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya, capaian kinerja menunjukkan variasi antarindikator. Persentase Produksi Perikanan Budi Daya mencapai 43,48% dengan kategori Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru sebesar 4,79% atau Rp10.226.188 dari pagu anggaran Rp213.551.200. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan budi daya masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan optimalisasi pendampingan kepada pembudi daya, penyediaan sarana produksi, serta penguatan teknologi budi daya.

Di sisi lain, indikator Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budi Daya telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi anggaran sebesar 20,69% atau Rp26.644.911 dari pagu anggaran Rp128.761.600. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan benih ikan telah berjalan sesuai target sehingga menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya pada semester

berikutnya. Namun demikian, masih rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan dan pengembangan unit pembenihan masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, indikator Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan baru mencapai 47,78% dengan kategori Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 1,67% atau sebesar Rp1.666.668 dari pagu anggaran Rp100.000.000, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran belum berjalan optimal pada Semester I. Rendahnya capaian kinerja dan penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, promosi produk, peningkatan mutu produk, serta fasilitasi pemasaran masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja organisasi dengan baik, namun pelaksanaan program teknis kelautan dan perikanan masih memerlukan percepatan, terutama pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budi daya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang capaian kinerjanya masih berada pada kisaran 39,73% hingga 47,78%. Di samping itu, realisasi anggaran seluruh program teknis masih sangat rendah, yaitu berkisar antara 1,67% hingga 20,69%, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan pembinaan kepada nelayan dan pembudi daya, peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi, serta pengembangan hilirisasi hasil perikanan.

21. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagai urusan pemerintahan pilihan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan destinasi wisata, peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan pelaku usaha pariwisata. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis potensi daerah, memperluas promosi wisata, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata sebagai upaya mewujudkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Pariwisata melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, penguatan promosi destinasi wisata, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif agar target pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	5.195.707.019	1,73	1.394.093.361	50,14	26,83	ST	R
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	79,50	4.300.000	70,55	4.024.890	88,74	93,60	ST	ST
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang) (Persentase)	-37,88	720.224.300	-0,26	38.170.776	0,69	5,30	SR	SR
	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	20,00	528.678.900	113,5	19.973.084	100,00	3,78	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Pariwisata (Persentase)								
	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	15,63	145.999.950	3,98	Rp5.804.000,00	25,46	3,98	SR	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna masih menunjukkan capaian yang bervariasi antarprogram. Dari sisi tata kelola organisasi, indikator kinerja perangkat daerah telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Namun demikian, pada urusan teknis pariwisata masih terdapat beberapa indikator strategis yang berada pada kategori Sangat Rendah (SR), khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan sumber daya manusia pariwisata. Di sisi lain, realisasi anggaran pada sebagian besar program teknis juga masih relatif rendah, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar target pembangunan sektor pariwisata dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 88,74% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 93,60% atau Rp4.024.890 dari pagu anggaran Rp4.300.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perencanaan, dan pengelolaan organisasi telah berjalan secara efektif serta didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru mencapai 50,14% dengan kategori Sedang, dengan realisasi anggaran sebesar 26,83% atau Rp1.394.093.361 dari pagu anggaran Rp5.195.707.019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih

memerlukan peningkatan, baik melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, maupun penguatan kapasitas aparatur agar tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat pada Semester II.

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, indikator Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang dan Non Berbintang) menunjukkan capaian yang sangat rendah, yaitu hanya 0,69% dari target Semester I, bahkan realisasi indikator masih berada pada nilai -0,26 dibandingkan target -37,88, dengan realisasi anggaran sebesar 5,30% atau Rp38.170.776 dari pagu anggaran Rp720.224.300. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara belum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih terbatasnya aksesibilitas menuju destinasi wisata Natuna, rendahnya intensitas promosi di pasar internasional, serta dinamika kondisi pariwisata yang memengaruhi mobilitas wisatawan. Rendahnya penyerapan anggaran juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengembangan destinasi dan promosi wisata masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pemasaran Pariwisata, indikator Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator mencapai 113,5 dibandingkan target 20,00. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 3,78% atau sebesar Rp19.973.084 dari pagu anggaran Rp528.678.900, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan media promosi pariwisata telah berjalan dengan sangat baik melalui optimalisasi media digital maupun media promosi lainnya, meskipun sebagian besar kegiatan promosi berskala besar dan pemasaran destinasi masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual masih mencapai 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual maupun pembinaan pelaku ekonomi kreatif belum dilaksanakan atau masih berada pada tahap persiapan administrasi. Mengingat perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif, maka percepatan implementasi program ini perlu menjadi prioritas pada Semester II.

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, indikator Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang

Aktif dan Tervalidasi baru mencapai 25,46% dengan kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 3,98% atau sebesar Rp5.804.000 dari pagu anggaran Rp145.999.950. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan, sertifikasi, dan validasi pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif masih belum berjalan optimal pada Semester I. Rendahnya capaian kinerja dan penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pelatihan, pendampingan, fasilitasi sertifikasi, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna masih menghadapi tantangan dalam mencapai target pembangunan sektor pariwisata, khususnya pada aspek peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata. Meskipun demikian, Program Pemasaran Pariwisata telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik melalui peningkatan media promosi yang melampaui target, sedangkan tata kelola organisasi juga telah berjalan secara efektif.

22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, serta perindustrian sebagai urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM, menjaga stabilitas perdagangan, serta mendukung pengembangan sektor industri daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan perdagangan, penguatan industri daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,00	5.727.041.812	0	2.378.874.738	0,00	41,53	SR	T
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45		3,73		100,00		ST	
b. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi (%)	13,57	0	0	0	0,00	-	SR	-
2	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	29,51	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang di berikan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	25,73	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	11,75	167.235.600	11,11	2.090.448	94,55	1,25	ST	SR
5	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	68,64	1.000.402.000	55,87	32.923.368	81,40	3,29	ST	SR
6	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	14,46	317.627.500	11,12	161.753.771	76,90	50,93	ST	ST
c. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
1	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi (Persentase)	17,69	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
2	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya (Persentase)	36,32	2.210.352.616	28,57	253.174.722	78,66	11,45	ST	SR
3	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persentase)	67,17	1.075.266.849	70,59	208.305.391	100,00	19,37	ST	SR
4	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang (Persentase)	0,68	115.145.450	1,61	1.644.936	100,00	1,43	ST	SR
5	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	62,71	102.500.000	0	45.885.186	0,00	44,77	SR	ST
6	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (Persentase)	34,83	0	0	0	0,00	0	SR	SR
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
1	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah (Persentase)	14,39	200.041.650	4,76	8.879.192	33,08	4,44	S	SR
2	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan (Persentase)	56,04	28.000.760	33,33	8.713.412	59,48	31,12	ST	R
3	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (Persentase)	80,00	21.219.850	100	353.668	100	1,67	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang cukup bervariasi. Sejumlah indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), khususnya pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan

koperasi, pengembangan UMKM, stabilisasi perdagangan, pengembangan ekspor, serta pengelolaan sistem informasi industri. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum menunjukkan capaian kinerja karena kegiatan belum dilaksanakan pada Semester I, serta beberapa indikator yang masih berada pada kategori Sedang (S) maupun Sangat Rendah (SR). Dari sisi realisasi anggaran, sebagian besar program teknis masih menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan nilai realisasi 3,73 dari target 3,45, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah belum menunjukkan capaian pada Semester I atau masih 0,00%, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 41,53% atau sebesar Rp2.378.874.738 dari pagu anggaran Rp5.727.041.812. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran penunjang telah direalisasikan untuk mendukung operasional perangkat daerah, namun indikator kinerja organisasi belum dilakukan pengukuran atau masih menunggu akumulasi capaian hingga akhir tahun.

Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masih terdapat tiga program yang belum menunjukkan capaian, yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dimana seluruh indikator masih 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran pada Semester I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan atau dijadwalkan dilaksanakan pada Semester II sehingga diperlukan percepatan implementasi agar target tahunan dapat tercapai.

Pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, indikator Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi telah mencapai 94,55% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 1,25% atau sebesar Rp2.090.448 dari pagu anggaran Rp167.235.600. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas usaha koperasi telah berjalan dengan baik meskipun dukungan anggaran yang direalisasikan masih sangat terbatas pada Semester I.

Selanjutnya, pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), indikator Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal mencapai 81,40% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 3,29% atau sebesar Rp32.923.368 dari pagu anggaran Rp1.000.402.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses formalisasi usaha mikro telah

berjalan cukup baik, namun masih diperlukan percepatan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Pengembangan UMKM, indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha mencapai 76,90% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 50,93% atau Rp161.753.771 dari pagu anggaran Rp317.627.500, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pengembangan kewirausahaan telah berjalan secara efektif dan menjadi salah satu program dengan tingkat penyerapan anggaran terbaik pada Semester I.

Pada urusan Perdagangan, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Sebaliknya, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menunjukkan capaian 78,66% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 11,45% atau sebesar Rp253.174.722 dari pagu anggaran Rp2.210.352.616. Sementara itu, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 19,37% atau Rp208.305.391 dari pagu anggaran Rp1.075.266.849, yang menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga telah berjalan sesuai target Semester I.

Pada Program Pengembangan Ekspor, indikator Nilai Ekspor Barang telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggaran baru sebesar 1,43% atau Rp1.644.936 dari pagu anggaran Rp115.145.450. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekspor lebih dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang telah berjalan daripada besarnya dukungan anggaran program. Di sisi lain, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen masih menunjukkan capaian kinerja 0,00%, namun realisasi anggarannya telah mencapai 44,77% atau sebesar Rp45.885.186 dari pagu anggaran Rp102.500.000. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran telah digunakan untuk mendukung persiapan kegiatan, sementara outcome program belum terealisasi pada Semester I. Adapun Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

Pada urusan Perindustrian, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri menunjukkan capaian 33,08% dengan kategori Sedang, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 4,44% atau sebesar Rp8.879.192 dari pagu anggaran Rp200.041.650. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembangunan industri daerah masih berada pada tahap awal dan memerlukan percepatan pada Semester II. Selanjutnya, Program Pengendalian Izin Usaha Industri mencapai 59,48%

dengan kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi anggaran sebesar 31,12% atau Rp8.713.412 dari pagu anggaran Rp28.000.760, yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri telah berjalan cukup baik. Sementara itu, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 1,67% atau sebesar Rp353.668 dari pagu anggaran Rp21.219.850, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada sebagian besar program strategis, khususnya dalam pengembangan UMKM, stabilisasi perdagangan, pengembangan ekspor, pemberdayaan koperasi, dan pengelolaan sistem informasi industri. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi, terutama pada aspek pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, perizinan perusahaan, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta perlindungan konsumen.

23. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna mempunyai peran strategis sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan perangkat daerah, serta penyelenggaraan pelayanan administratif. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi fondasi dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi.

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	44.753.496.314	3,43	16.738.650.181	99,42	37,40	ST	S
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	4,47	505.740.467	4,04	95.464.318	90,38	18,88	ST	SR
		Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah (Persentase)	70	532.999.805	25	188.094.766	35,71	35,29	S	S
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68	122.854.000	71,65	9.732.241	100,00	7,92	ST	SR
b. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah										
2	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan (%)	85	10.700.930.000	46,00	3.978.724.527	54,12	37,18	ST	S
		Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah (%)	50	500.000.000	40,54	182.194.968	81,08	36,44	ST	S
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Skor)	2,95	600.000.000	2,74	191.077.463	92,88	31,85	ST	R
		Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	83	150.000.000	70	20.446.708	84,34	13,63	ST	SR
3	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (Persentase)	70	451.500.000	20	272.914.648	28,57	60,45	R	ST
		Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan (Nilai)	2.592	820.000.000	26,41	120.123.738	1,02	14,65	SR	SR
		Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis prioritas daerah (%)	100	334.961.579	0	22.778.644	0,00	6,80	SR	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan

capaian yang relatif baik, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi (ST) pada aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, fasilitasi kesejahteraan rakyat, serta penyelenggaraan kerja sama daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator strategis yang menunjukkan capaian Sedang (S) hingga Rendah (R), khususnya pada pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah, pemanfaatan sistem pengadaan nasional, publikasi agenda pimpinan daerah, dan pelaksanaan kegiatan strategis prioritas. Dari sisi realisasi anggaran, tingkat penyerapan juga masih bervariasi, berkisar antara 6,80% hingga 60,45%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan strategis masih berada pada tahapan pelaksanaan dan diperkirakan akan mengalami peningkatan realisasi pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 99,42% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 37,40% atau Rp16.738.650.181 dari pagu anggaran Rp44.753.496.314. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Sekretariat Daerah telah mampu memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah mencapai 90,38% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 18,88% atau sebesar Rp95.464.318 dari pagu anggaran Rp505.740.467, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik meskipun sebagian kegiatan pendukung masih akan dilaksanakan pada Semester II. Sementara itu, Persentase Agenda Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan melalui Media Resmi Pemerintah baru mencapai 35,71% dengan kategori Sedang, disertai realisasi anggaran sebesar 35,29% atau Rp188.094.766 dari pagu anggaran Rp532.999.805. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik melalui publikasi kegiatan pimpinan daerah masih perlu dioptimalkan. Adapun Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggarannya baru sebesar 7,92% atau Rp9.732.241 dari pagu anggaran Rp122.854.000, yang menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah tercapai melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan tanpa memerlukan dukungan anggaran yang besar pada Semester I.

Pada Program Administrasi Kesejahteraan Rakyat, sebagian besar indikator juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Keagamaan, Pembinaan Mental, dan Sosial Kemasyarakatan mencapai 54,12% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 37,18% atau Rp3.978.724.527

dari pagu anggaran Rp10.700.930.000. Selanjutnya, Persentase Produk Hukum Daerah yang Telah Terdigitalisasi dan Dapat Diakses Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah mencapai 81,08% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 36,44% atau Rp182.194.968 dari pagu anggaran Rp500.000.000, yang menunjukkan bahwa digitalisasi produk hukum daerah telah berjalan sesuai target. Di samping itu, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Skor Efektivitas Kerja Sama Daerah) mencapai 92,88% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung realisasi anggaran sebesar 31,85% atau Rp191.077.463 dari pagu anggaran Rp600.000.000, sedangkan Indeks Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah mencapai 84,34% dengan kategori Sangat Tinggi dan realisasi anggaran sebesar 13,63% atau Rp20.446.708 dari pagu anggaran Rp150.000.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antardaerah maupun antarinstansi telah berjalan secara efektif meskipun sebagian kegiatan pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II.

Berbeda dengan program sebelumnya, Program Perekonomian dan Pembangunan masih menunjukkan capaian yang bervariasi. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah baru mencapai 28,57% dengan kategori Rendah, meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 60,45% atau sebesar Rp272.914.648 dari pagu anggaran Rp451.500.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan anggaran telah dimanfaatkan secara cukup optimal, namun outcome kebijakan perekonomian daerah belum sepenuhnya terealisasi pada Semester I. Selanjutnya, Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Nasional masih mencapai 1,02% dengan kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 14,65% atau sebesar Rp120.123.738 dari pagu anggaran Rp820.000.000. Sementara itu, Tingkat Keterlaksanaan Kegiatan Strategis Prioritas Daerah belum menunjukkan capaian atau masih 0,00%, dengan realisasi anggaran baru sebesar 6,80%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan strategis prioritas masih berada pada tahap persiapan maupun proses pelaksanaan sehingga memerlukan percepatan implementasi pada Semester II agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja organisasi secara baik, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, fasilitasi kesejahteraan rakyat, serta penguatan kerja sama daerah yang sebagian besar indikatornya telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, masih diperlukan perhatian terhadap beberapa indikator strategis yang menunjukkan

capaian rendah, terutama efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan nasional, publikasi agenda pimpinan daerah, serta pelaksanaan kegiatan strategis prioritas.

24. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna merupakan unsur pelayanan administrasi dan pendukung penyelenggaraan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dukungan administrasi persidangan, fasilitasi penyusunan kebijakan daerah, pelayanan kepada anggota DPRD, serta penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Sekretariat DPRD melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk fasilitasi pembentukan peraturan daerah, pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelembagaan DPRD. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,45	24.263.775.016	3,29	9.227.083.073	95,36	38,03	ST	S
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	85	147.478.200	70,77	22.482.581	83,26	15,24	ST	SR
b. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD										
1	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80	4.890.023.920	0	603.421.062	0,00	12,34	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD (%)	60	6.791.195.743	69,56	2.373.918.190	100,00	34,96	ST	S
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	85	756.596.000	74	35.973.000	87,06	4,75	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang relatif baik, yang ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian Sangat Rendah (SR) serta tingkat realisasi anggaran yang belum sepenuhnya sejalan dengan capaian kinerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi dukungan terhadap DPRD telah berjalan sesuai tahapan, namun sebagian kegiatan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah dan fungsi pengawasan DPRD, masih memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 95,36% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 38,03% atau Rp9.227.083.073 dari pagu anggaran Rp24.263.775.016, yang berada pada kategori Sedang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang diberikan Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi target Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 83,26% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 15,24% atau sebesar Rp22.482.581 dari pagu anggaran Rp147.478.200, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh optimalisasi tata kelola organisasi dan sumber daya aparatur, sedangkan sebagian besar kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, capaian indikator menunjukkan hasil yang bervariasi. Persentase Penetapan Peraturan Daerah Tahun N masih mencapai 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 12,34% atau sebesar Rp603.421.062 dari pagu anggaran

Rp4.890.023.920. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah belum menghasilkan produk hukum yang ditetapkan pada Semester I karena masih berada pada tahapan pembahasan, harmonisasi, fasilitasi, maupun penyempurnaan rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, percepatan proses legislasi bersama DPRD dan perangkat daerah pengusul perlu menjadi prioritas pada Semester II agar target pembentukan peraturan daerah dapat tercapai.

Di sisi lain, indikator Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator mencapai 69,56% dibandingkan target 60%. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar 34,96% atau Rp2.373.918.190 dari pagu anggaran Rp6.791.195.743, yang berada pada kategori Sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi representasi DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyusunan RKPD.

Selanjutnya, indikator Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan mencapai 87,06% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 4,75% atau sebesar Rp35.973.000 dari pagu anggaran Rp756.596.000, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik melalui pelaksanaan rapat kerja, kunjungan lapangan, maupun pembahasan bersama perangkat daerah. Akan tetapi, sebagian besar kegiatan pengawasan yang memerlukan dukungan anggaran masih akan dilaksanakan pada Semester II sehingga tingkat penyerapan anggaran masih relatif rendah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna telah mampu memberikan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, terutama penetapan peraturan daerah yang belum menunjukkan capaian pada Semester I serta rendahnya realisasi anggaran pada beberapa kegiatan strategis.

25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, koordinasi perencanaan lintas sektor, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, terukur, berbasis data dan inovasi, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sinkronisasi perencanaan antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	88,30	6.816.546.771	100	2.953.466.524	100,00	0,00	ST	T
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,46		3,51		100,00	43,40	ST	
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan										
1	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	87,5	854.542.880	87,5	234.742.316	100,00	27,47	ST	R
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi	64	316.725.000	100	125.978.490	100,00	39,78	ST	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Pembangunan Daerah yang diakomodir (%)								
2	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	93	308.676.784	94,29	98.062.540	100,00	31,77	ST	R
		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	93	282.870.000	98,68	4.891.292	100,00	1,73	ST	SR
		Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)	93	583.972.540	92,68	10.309.609	99,66	1,77	ST	SR
c. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan										
1	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	0,71	107.920.000	1	671.178	100,00	0,62	ST	SR
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah (%)	55	228.358.180	50	5.246.336	90,91	2,30	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang sangat baik dari sisi indikator kinerja, dimana hampir seluruh indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut mencerminkan bahwa fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, serta penelitian dan pengembangan telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program teknis masih relatif rendah, bahkan beberapa indikator hanya menunjukkan tingkat penyerapan di bawah 5 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun target kinerja telah tercapai, sebagian besar kegiatan yang

membutuhkan dukungan anggaran masih berada pada tahap pelaksanaan dan diperkirakan akan terealisasi secara lebih optimal pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,51 dari target 3,46. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai 43,40% atau sebesar Rp2.953.466.524 dari pagu anggaran Rp6.816.546.771, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup baik pada Semester I.

Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, seluruh indikator menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah telah mencapai 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 27,47% atau Rp234.742.316 dari pagu anggaran Rp854.542.880. Sementara itu, Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang Diakomodir juga mencapai 100,00%, dengan realisasi anggaran sebesar 39,78% atau Rp125.978.490 dari pagu anggaran Rp316.725.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyelarasan prioritas pembangunan nasional ke dalam program daerah serta tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan telah dilaksanakan secara optimal. Meskipun demikian, realisasi anggaran yang masih berada pada kategori Rendah hingga Tinggi mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, seluruh indikator juga telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 31,77% atau Rp98.062.540 dari pagu anggaran Rp308.676.784. Selanjutnya, Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mencapai 100,00%, namun realisasi anggarannya baru sebesar 1,73% atau Rp4.891.292 dari pagu anggaran Rp282.870.000. Demikian pula Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mencapai 99,66% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru sebesar 1,77% atau Rp10.309.609 dari pagu anggaran Rp583.972.540. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi dokumen perencanaan telah

berjalan secara efektif, namun sebagian besar kegiatan pendukung koordinasi lintas sektor masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, indikator Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah telah mencapai 100,00%, sedangkan realisasi anggaran baru sebesar 0,62% atau Rp671.178 dari pagu anggaran Rp107.920.000. Sementara itu, indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah mencapai 90,91% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 2,30% atau sebesar Rp5.246.336 dari pagu anggaran Rp228.358.180. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah telah mulai mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan, meskipun sebagian besar kegiatan penelitian, kajian strategis, dan pengembangan inovasi masih akan dilaksanakan secara lebih intensif pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, yang ditandai dengan hampir seluruh indikator mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program teknis masih relatif rendah, terutama pada kegiatan koordinasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang tingkat penyerapannya masih berada pada kisaran 0,62% hingga 2,30%. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil penelitian dan inovasi dalam perumusan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan program secara berkala agar capaian fisik dan keuangan dapat meningkat secara lebih seimbang dan seluruh target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), serta

mendukung terciptanya pengelolaan fiskal daerah yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,46	12.330.457.761	3,61	5.429.748.363	100,00	44,04	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	73,95	42.280.000	100	3.344.939	100,00	7,91	ST	SR
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan										
2	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD (%)	33,50	1.478.582.000	42,05	504.037.479	100,00	34,09	ST	S
		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	762.653.394	100	419.422.028	100,00	55,00	ST	ST
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90,15	115.515.337.808	30,39	35.545.099.723	33,71	30,77	S	R
3	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Penambahan Nilai	2,63	1.111.419.952	0,24	458.181.471	9,13	41,22	SR	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	BARANG MILIK DAERAH	Aset Tetap (Persentase)								
4	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	6,98	978.494.120	3,64	537.588.311	52,15	54,94	ST	ST

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang relatif baik, yang ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta tata kelola organisasi telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian Sedang (S) hingga Sangat Rendah (SR), terutama pada aspek realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar dan penambahan nilai aset tetap. Di sisi lain, realisasi anggaran pada sebagian besar program masih berada pada kategori Rendah hingga Sedang, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar capaian fisik dan keuangan dapat meningkat secara lebih seimbang.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,61 dari target 3,46, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 44,04% atau Rp5.429.748.363 dari pagu anggaran Rp12.330.457.761, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan pelayanan administrasi yang diberikan BPKPD telah berjalan secara optimal. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 7,91% atau sebesar Rp3.344.939 dari pagu anggaran Rp42.280.000. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh optimalisasi tata kelola dan sumber daya aparatur, sementara sebagian besar kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran

sebesar 34,09% atau Rp504.037.479 dari pagu anggaran Rp1.478.582.000. Demikian pula Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu telah mencapai 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 55,00% atau Rp419.422.028 dari pagu anggaran Rp762.653.394, yang menunjukkan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta didukung oleh penyerapan anggaran yang baik.

Namun demikian, indikator Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar baru mencapai 33,71% dengan kategori Sedang, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 30,77% atau sebesar Rp35.545.099.723 dari pagu anggaran Rp115.515.337.808, yang berada pada kategori Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja pada urusan pelayanan dasar masih berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa yang sebagian besar terealisasi pada Semester II. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian penyerapan anggaran agar target belanja daerah dapat dicapai sesuai perencanaan.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap baru mencapai 9,13% dengan kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggarannya telah mencapai 41,22% atau sebesar Rp458.181.471 dari pagu anggaran Rp1.111.419.952, yang berada pada kategori Tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan aset daerah, namun peningkatan nilai aset tetap belum terealisasi secara optimal pada Semester I. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pengadaan aset, penyelesaian pekerjaan fisik, maupun proses pencatatan aset yang umumnya baru dapat diselesaikan pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah telah mencapai 52,15% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 54,94% atau Rp537.588.311 dari pagu anggaran Rp978.494.120, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan asli daerah telah berjalan sesuai target Semester I melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah,

yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi, khususnya pada aspek pelayanan publik, ketepatan penyampaian laporan keuangan, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengalokasian belanja pegawai. Namun demikian, masih diperlukan perhatian terhadap realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar yang baru mencapai 33,71% serta penambahan nilai aset tetap yang masih mencapai 9,13%, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengadaan dan penatausahaan aset daerah, penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar realisasi fisik dan keuangan meningkat secara lebih proporsional dan seluruh target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur, memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, BKPSDM melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengembangan kompetensi ASN, penguatan sistem manajemen kepegawaian, serta peningkatan kualitas

pelayanan kepegawaian agar target pembangunan bidang aparatur dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,2	6.078.274.884	3,38	2.550.289.890	100,00	41,96	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	80,50	50.500.000	75,25	17.590.922	93,48	34,83	ST	S
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian										
1	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	25,06	1.575.780.000	28,45	130.812.720	100,00	8,30	ST	SR
c. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan										
1	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	3,12	181.429.000	1,13	173.507.614	36,22	95,63	S	ST

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang relatif baik, ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengelolaan manajemen aparatur telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur yang belum mencapai target kinerja, meskipun didukung oleh tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan peningkatan kompetensi ASN masih berada pada tahap pelaksanaan sehingga hasil akhirnya diperkirakan akan tercapai pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,38 dari target 3,20, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 41,96% atau Rp2.550.289.890 dari pagu anggaran

Rp6.078.274.884, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada masyarakat dan ASN telah berjalan secara optimal. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 93,48% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 34,83% atau sebesar Rp17.590.922 dari pagu anggaran Rp50.500.000, yang berada pada kategori Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola organisasi telah berjalan secara efektif dan didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik pada Semester I.

Pada Program Kepegawaian Daerah, indikator Rasio Pegawai Fungsional terhadap Pegawai ASN (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi indikator mencapai 28,45 dibandingkan target 25,06. Meskipun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 8,30% atau sebesar Rp130.812.720 dari pagu anggaran Rp1.575.780.000, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan formasi dan penataan jabatan fungsional telah berjalan dengan baik melalui optimalisasi manajemen ASN. Namun demikian, rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan pendukung, seperti pembinaan, pengembangan karier, dan penguatan sistem manajemen kepegawaian masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Berbeda dengan capaian tersebut, pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, indikator Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi terhadap Pegawai ASN (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) baru mencapai 36,22% dengan kategori Sedang, sedangkan realisasi anggarannya telah mencapai 95,63% atau sebesar Rp173.507.614 dari pagu anggaran Rp181.429.000, yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran program telah direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi ASN. Akan tetapi, outcome berupa peningkatan jumlah pejabat fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi belum sepenuhnya tercapai pada Semester I. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan diklat, sertifikasi, maupun penerbitan sertifikat kompetensi yang masih berlangsung dan diperkirakan selesai pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, khususnya pada aspek pelayanan publik, tata kelola organisasi, dan penataan jabatan

fungsional yang sebagian besar indikatornya telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, masih diperlukan perhatian terhadap Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana capaian indikator kompetensi aparatur baru mencapai 36,22% meskipun realisasi anggaran telah mencapai 95,63%. Kondisi tersebut memerlukan penguatan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, percepatan proses sertifikasi kompetensi, serta evaluasi efektivitas pelaksanaan program agar investasi anggaran yang telah direalisasikan mampu menghasilkan peningkatan kompetensi ASN secara optimal.

28. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai peran strategis dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan negara. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu, meningkatkan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan, memperkuat koordinasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, serta mendukung percepatan pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Badan Pengelola Perbatasan Daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pengelolaan kawasan perbatasan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, serta peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan. Selain melaksanakan program teknis, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama Semester I.

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	3,45	4.433.058.215	3,56	1.827.176.124	100,00	41,22	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	77,20	26.679.000	83,1	1.661.860	100,00	6,23	ST	SR
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perbatasan										
2	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan (%)	75	300.000.000	66,67	88.966.267	88,89	29,66	ST	R

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan capaian yang baik, ditandai dengan seluruh indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan maupun tata kelola organisasi telah berjalan sesuai dengan target Semester I. Meskipun demikian, dari sisi realisasi anggaran masih terdapat perbedaan tingkat penyerapan antarprogram, dimana sebagian kegiatan teknis belum terealisasi secara optimal sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar capaian fisik dan keuangan dapat berjalan secara lebih seimbang.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,56 dari target 3,45, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 41,22% atau Rp1.827.176.124 dari pagu anggaran Rp4.433.058.215, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang diberikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 6,23% atau sebesar Rp1.661.860 dari pagu anggaran Rp26.679.000, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target organisasi lebih banyak didukung oleh optimalisasi tata kelola kelembagaan dan koordinasi internal, sementara

sebagian kegiatan administrasi pendukung masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pengelolaan Perbatasan, indikator Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan mencapai 88,89% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 29,66% atau Rp88.966.267 dari pagu anggaran Rp300.000.000, yang berada pada kategori Rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan, sinkronisasi kebijakan, serta fasilitasi pengelolaan wilayah perbatasan telah berjalan sesuai target Semester I. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran yang masih relatif rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan lapangan, koordinasi lintas sektor, monitoring, dan fasilitasi pembangunan kawasan perbatasan masih akan dilaksanakan secara lebih intensif pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan, yang ditunjukkan oleh seluruh indikator kinerja yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggaran pada program teknis masih relatif rendah, terutama pada Program Pengelolaan Perbatasan yang baru mencapai 29,66%, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan.

29. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan integritas perangkat daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperkuat manajemen risiko, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Inspektorat Daerah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,

penguatan pembinaan perangkat daerah, peningkatan kualitas tata kelola manajemen risiko, serta pengembangan kapasitas APIP. Selain melaksanakan program teknis pengawasan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Inspektorat Daerah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,49	13.154.496.014	3,38	7.013.375.221	96,85	53,32	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	87,34	164.338.190	66,67	16.471.302	76,33	10,02	ST	SR
b. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat Daerah										
2	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah (%)	65,00	417.400.180	68,22	90.096.839	100,00	21,59	ST	SR
		Persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (Persentase)	90,394	960.082.000	74,68	232.864.165	82,62	24,25	ST	SR
3	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	3.000	298.987.600	2.037	51.770.300	67,90	17,32	ST	SR
		Nilai Manajemen Risiko (MR) (Nilai)	3.005	711.203.000	2.903	72.124.616	96,61	10,14	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan selama Semester I. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian intern guna memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna

menunjukkan capaian yang relatif baik, yang ditandai dengan seluruh indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan intern, pembinaan tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan target Semester I. Namun demikian, dari sisi realisasi anggaran masih didominasi kategori Sangat Rendah (SR), dengan tingkat penyerapan berkisar antara 10,02% hingga 24,25% pada program teknis pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan audit, reviu, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan masih akan dilaksanakan secara lebih intensif pada Semester II sehingga realisasi anggaran diperkirakan meningkat pada akhir tahun.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 96,85% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 53,32% atau Rp7.013.375.221 dari pagu anggaran Rp13.154.496.014, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik yang diberikan Inspektorat Daerah telah berjalan secara optimal. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 76,33% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 10,02% atau sebesar Rp16.471.302 dari pagu anggaran Rp164.338.190. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target organisasi telah berjalan dengan baik melalui optimalisasi tata kelola organisasi, meskipun sebagian besar kegiatan penunjang masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 21,59% atau Rp90.096.839 dari pagu anggaran Rp417.400.180. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut atas kerugian negara/daerah telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan APIP mencapai 82,62% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 24,25% atau sebesar Rp232.864.165 dari pagu anggaran Rp960.082.000. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan terus mengalami kemajuan, meskipun masih diperlukan percepatan koordinasi dengan perangkat daerah agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, capaian indikator menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih

memerlukan peningkatan. Nilai Kapabilitas APIP mencapai 67,90% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya baru mencapai 17,32% atau sebesar Rp51.770.300 dari pagu anggaran Rp298.987.600. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapabilitas APIP telah berjalan sesuai tahapan, namun masih diperlukan penguatan kapasitas auditor, peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, serta pengembangan kompetensi aparatur pengawasan untuk mencapai target yang ditetapkan pada akhir tahun. Selain itu, Nilai Manajemen Risiko (MR) mencapai 96,61% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru mencapai 10,14% atau sebesar Rp72.124.616 dari pagu anggaran Rp711.203.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada perangkat daerah telah berjalan dengan baik, meskipun sebagian besar kegiatan pendampingan, asistensi, dan pembinaan masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan intern, yang ditandai dengan seluruh indikator kinerja telah berada pada kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian besar program teknis masih relatif rendah, terutama pada kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan penguatan manajemen risiko, dengan tingkat penyerapan berkisar antara 10,02% hingga 24,25%. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, pendampingan, dan asistensi kepada perangkat daerah, peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penguatan implementasi manajemen risiko, serta optimalisasi penyerapan anggaran melalui pengendalian pelaksanaan program secara berkala.

30. Kecamatan Bunguran Timur

Kecamatan Bunguran Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan fungsi utama mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Timur melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi dan pelayanan administrasi pemerintahan.

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Timur

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,75	7.002.479.718	0	3.291.195.177	0,00	47,00	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	71,30	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan bandarsyah (%).	100	526.000.000	25	194.110.032	25,00	36,90	SR	S
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan batu hitam (%).	100	454.000.000	25	205.766.863	25,00	45,32	SR	ST
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan ranai darat (%).	100	374.200.000	25	140.431.246	25,00	37,53	SR	S
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	525.000.000	25	211.413.158	25,00	40,27	SR	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		kelurahan ranai kota (%).								
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan bandarsyah (%).	100	102.750.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan batu hitam (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan ranai darat (%).	100	102.750.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan ranai kota (%).	100	450.045.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Timur masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan realisasi anggaran bervariasi mulai dari 36,90% hingga 47,00% pada kegiatan yang telah dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program masih berada pada tahap awal pelaksanaan

sehingga capaian output belum sepenuhnya terealisasi pada Semester I. Dengan demikian, percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II menjadi faktor penting untuk memastikan target kinerja dan realisasi anggaran tahunan dapat dicapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I, sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 47,00% atau sebesar Rp3.291.195.177 dari pagu anggaran Rp7.002.479.718. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penunjang pelayanan administrasi dan operasional organisasi telah berjalan sesuai tahapan, namun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I atau masih menunggu hasil survei pada periode berikutnya. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga belum menunjukkan realisasi baik dari sisi indikator maupun anggaran sehingga capaian masih 0,00%, yang menunjukkan bahwa pengukuran indikator tersebut umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pada tingkat kelurahan mulai menunjukkan perkembangan. Kelurahan Bandarsyah mencapai capaian kinerja 25,00% dengan realisasi anggaran 36,90% atau sebesar Rp194.110.032 dari pagu Rp526.000.000. Kelurahan Batu Hitam juga mencapai capaian kinerja 25,00%, dengan realisasi anggaran 45,32% atau Rp205.766.863 dari pagu Rp454.000.000, yang merupakan tingkat penyerapan anggaran tertinggi di antara seluruh kelurahan. Selanjutnya, Kelurahan Ranai Darat mencapai capaian kinerja 25,00% dengan realisasi anggaran 37,53% atau sebesar Rp140.431.246 dari pagu Rp374.200.000, sedangkan Kelurahan Ranai Kota juga mencapai capaian kinerja 25,00% dengan realisasi anggaran 40,27% atau sebesar Rp211.413.158 dari pagu Rp525.000.000. Meskipun seluruh kelurahan baru mencapai seperempat dari target tahunan, kondisi tersebut masih mencerminkan pola pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara bertahap dan diperkirakan meningkat pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh indikator masih menunjukkan capaian 0,00%. Baik indikator koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan maupun di Kelurahan Bandarsyah, Batu Hitam, Ranai Darat, dan Ranai Kota belum menunjukkan realisasi kinerja. Demikian pula realisasi anggaran pada

kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan masih 0,00%, meskipun telah tersedia pagu anggaran pada beberapa kegiatan, seperti di Kelurahan Bandarsyah sebesar Rp102.750.000, Kelurahan Ranai Darat sebesar Rp102.750.000, dan Kelurahan Ranai Kota sebesar Rp450.045.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap persiapan administrasi maupun penjadwalan pelaksanaan sehingga memerlukan percepatan implementasi pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran pada Semester I. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan pada ketiga program tersebut masih belum dilaksanakan atau masih berada pada tahap persiapan administrasi, sehingga realisasi fisik maupun keuangan diharapkan dapat meningkat pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Bunguran Timur masih memerlukan percepatan, terutama pada program-program teknis kewilayahan yang sebagian besar belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kelurahan telah mulai berjalan, yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 25,00% pada seluruh kelurahan dengan tingkat penyerapan anggaran antara 36,90% hingga 45,32%.

31. Kecamatan Bunguran Barat

Kecamatan Bunguran Barat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Barat melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Barat

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	79,40	0	61,5	0	77,46	-	ST	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	4.189.284.867	3,71	1.869.433.921	100,00	44,62	ST	ST
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	20.950.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan sedanau (%).	100	583.703.369	100	0	100,00	0,00	ST	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	8.220.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	17.154.000	100	12.778.000	100,00	74,49	ST	ST
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan	100	0		0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	koordinasi dibidang keagamaan (%).								

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Barat menunjukkan capaian yang cukup bervariasi. Beberapa indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), terutama pada aspek pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian kegiatan strategis masih berada pada tahap persiapan atau dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Semester II, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 77,46% dengan kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan sesuai target Semester I. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,71 dari target 3,45, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 44,62% atau Rp1.869.433.921 dari pagu anggaran Rp4.189.284.867. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Bunguran Barat telah memenuhi target serta didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran, sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah. Sebaliknya, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Sedanau telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun realisasi anggaran masih 0,00% dari pagu sebesar Rp583.703.369. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja pelayanan publik di Kelurahan

Sedanau telah tercapai melalui optimalisasi koordinasi pemerintahan, sedangkan dukungan belanja kegiatan diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp8.220.000. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I atau masih berada pada tahap persiapan administrasi sehingga memerlukan percepatan implementasi pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada 0,00% sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dengan unsur keamanan, pemerintah desa, serta masyarakat untuk mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif pada Semester II.

Berbeda dengan beberapa program tersebut, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 74,49% atau Rp12.778.000 dari pagu anggaran Rp17.154.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan secara optimal serta menjadi program dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi pada Kecamatan Bunguran Barat selama Semester I.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang keagamaan masih belum dilaksanakan pada Semester I dan direncanakan untuk direalisasikan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Barat telah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada aspek pelayanan publik dan pembinaan pemerintahan desa, yang ditandai dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, pelayanan publik di Kelurahan Sedanau, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum

menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran, terutama pada aspek pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi kesejahteraan rakyat.

32. Kecamatan Bunguran Utara

Kecamatan Bunguran Utara merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Utara melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Utara

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	2.758.455.370	3,2	1.711.090.743	92,75	62,03	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	62,50	0	50	0	80,00	-	ST	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	100	25.066.100	50	23.500.000	50,00	93,75	ST	ST

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		dan pelayanan publik (%).								
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	50	0	50,00	-	ST	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	40	0	50,00	-	ST	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	50	0	50,00	-	ST	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	50	0	50,00	-	ST	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator telah berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Semester I. Di sisi lain, realisasi anggaran masih bervariasi antarprogram, dimana terdapat program yang telah menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sangat tinggi, namun terdapat pula beberapa program yang belum memiliki alokasi anggaran atau belum direalisasikan pada Semester I sehingga pelaksanaannya masih akan berlanjut pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 92,75% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 62,03% atau Rp1.711.090.743 dari pagu anggaran Rp2.758.455.370, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Bunguran Utara telah berjalan secara optimal serta didukung oleh tingkat penyerapan

anggaran yang cukup tinggi. Selanjutnya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 80,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun indikator tersebut tidak didukung oleh alokasi anggaran secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja organisasi telah dapat dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 93,75% atau Rp23.500.000 dari pagu anggaran Rp25.066.100. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai rencana pada Semester I, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Meskipun belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada Semester I, capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi pembinaan dan koordinasi yang menjadi kewenangan kecamatan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan dukungan anggaran masih perlu dioptimalkan pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan capaian 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi pada indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan Semester I, meskipun belum terdapat realisasi anggaran pada program tersebut.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai target Semester I melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi, walaupun belum didukung oleh realisasi anggaran pada periode evaluasi.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan

mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi kecamatan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi, terutama pada aspek pelayanan publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menjadi program dengan penyerapan anggaran tertinggi, yaitu mencapai 93,75%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Semester I.

33. Kecamatan Pulau Laut

Kecamatan Pulau Laut merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Pulau Laut melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Laut

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,47	2.575.628.372		1.154.898.500	0,00	44,84	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	65,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	50.208.000	25	19.000.000	25,00	37,84	SR	S
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Pulau Laut masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan realisasi anggaran hanya terjadi pada beberapa program yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi maupun penjadwalan pelaksanaan sehingga capaian fisik dan keuangan diperkirakan akan meningkat pada Semester II. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi penyerapan anggaran

menjadi faktor penting untuk memastikan target RKPD Tahun 2026 dapat tercapai.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi masih menunjukkan hasil yang rendah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian pada Semester I sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 44,84% atau sebesar Rp1.154.898.500 dari pagu anggaran Rp2.575.628.372, yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan operasional dan pelayanan administrasi telah berjalan sesuai tahapan, namun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I atau masih menunggu pelaksanaan survei pada periode berikutnya. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga belum menunjukkan realisasi kinerja maupun anggaran sehingga capaian masih 0,00%, yang mengindikasikan bahwa pengukuran indikator tersebut baru akan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik baru mencapai 25,00% dengan kategori Sangat Rendah, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 37,84% atau sebesar Rp19.000.000 dari pagu anggaran Rp50.208.000, yang berada pada kategori Sedang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah mulai dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan percepatan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I atau masih berada pada tahap persiapan administrasi sehingga memerlukan percepatan implementasi pada Semester II agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada 0,00%, yang menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal pada Semester I. Kondisi ini memerlukan perhatian agar stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat tetap terjaga melalui pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif pada Semester II.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga masih menunjukkan capaian 0,00% tanpa realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilaksanakan pada Semester I sehingga perlu dipercepat pada Semester II untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan masih belum dilaksanakan pada Semester I dan direncanakan untuk direalisasikan pada Semester II sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Laut masih memerlukan percepatan, terutama pada program-program teknis kewilayahan yang sebagian besar belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Meskipun demikian, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mulai menunjukkan perkembangan dengan capaian kinerja 25,00% dan realisasi anggaran 37,84%, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah merealisasikan anggaran sebesar 44,84% untuk mendukung operasional organisasi.

34. Kecamatan Midai

Kecamatan Midai merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Midai melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Midai

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	3.576.281.643		1.853.514.950	0,00	51,83	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	74,50	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	0	25	0	25,00	-	SR	-
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan sabang barat (%).	100	354.700.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	25	0	25,00	-	SR	-
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan sabang barat (%).	100	0	25	0	25,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Midai masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), sementara realisasi anggaran juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan pada sebagian besar program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, sehingga sebagian besar target kinerja maupun penyerapan anggaran diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II. Dengan demikian, percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengendalian program menjadi faktor penting untuk memastikan target RKPD Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 51,83% atau sebesar Rp1.855.514.950 dari pagu anggaran Rp3.578.261.643, yang berada pada kategori Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran operasional dan pelayanan administrasi telah direalisasikan sesuai kebutuhan organisasi, namun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga belum menunjukkan realisasi baik dari sisi indikator maupun anggaran, sehingga capaian masih 0,00% dan diperkirakan baru akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik baru mencapai 25,00% dengan kategori Sangat Rendah, namun belum terdapat realisasi anggaran pada

Semester I. Demikian pula, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Sabang Barat masih menunjukkan capaian 0,00% dengan realisasi anggaran 0,00%, meskipun telah tersedia pagu anggaran sebesar Rp354.700.000. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, khususnya di tingkat kelurahan, masih berada pada tahap persiapan sehingga diperlukan percepatan implementasi pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan mencapai 25,00%, sedangkan indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kelurahan Sabang Barat juga baru mencapai 25,00%. Meskipun demikian, kedua indikator tersebut belum didukung oleh realisasi anggaran pada Semester I. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi pemberdayaan masyarakat telah mulai dilaksanakan secara administratif, namun implementasi kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih belum berjalan sehingga perlu dipercepat pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada 0,00%, yang menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa masih belum terlaksana secara optimal pada Semester I.

Kondisi serupa juga terjadi pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan capaian 0,00% tanpa realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih berada pada tahap persiapan sehingga perlu menjadi perhatian pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I dan direncanakan untuk direalisasikan pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Midai masih memerlukan percepatan yang cukup signifikan, mengingat sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah dan realisasi anggaran pada program teknis masih sangat terbatas. Meskipun demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah menunjukkan

penyerapan anggaran yang cukup baik, yaitu mencapai 51,83%, sehingga mendukung keberlangsungan operasional pemerintahan kecamatan.

35. Kecamatan Serasan

Kecamatan Serasan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Serasan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Serasan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	3.808.656.429	0	1.866.424.358	0,00	49,00	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	76,50	7.840	0	7.840	0,00	100,00	SR	ST
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	104.410.000	0	42.268.700	0,00	40,48	SR	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
		Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan serasan (%).	100	475.858.270	28,54	0	28,54	0,00	R	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	41.412	0	41.412	0,00	100,00	SR	ST
		Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan di kelurahan serasan (%).	100	1.354.730	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	53.497	0	53.497	0,00	100,00	SR	ST
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	249.926	0	249.926	0,00	100,00	SR	ST
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	80	33.729	0	33.729	0,00	100	SR	ST

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Serasan masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), meskipun terdapat beberapa indikator yang telah menunjukkan kemajuan pada aspek pelayanan publik di tingkat kelurahan. Dari sisi realisasi anggaran, penyerapan masih relatif rendah dan belum merata antarprogram. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan maupun awal pelaksanaan, sehingga diperlukan percepatan implementasi pada Semester II agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian kinerja pada Semester I sehingga persentase capaian masih 0,00%

dengan kategori Sangat Rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 49,00% atau sebesar Rp1.866.424.358 dari pagu anggaran Rp3.808.666.429, yang berada pada kategori Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran operasional perangkat daerah telah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional organisasi, sementara pengukuran IKM belum dilaksanakan pada Semester I. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga belum menunjukkan capaian kinerja, namun realisasi anggarannya telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp7.840 dari pagu anggaran Rp7.840, yang mengindikasikan bahwa seluruh anggaran pada indikator tersebut telah direalisasikan meskipun pengukuran kinerja masih dilakukan pada akhir tahun.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan realisasi anggaran 40,48% atau sebesar Rp42.268.700 dari pagu anggaran Rp104.410.000. Sebaliknya, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Serasan telah mencapai 28,54%, meskipun belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pelayanan publik di tingkat kelurahan telah mulai dilaksanakan, namun dukungan kegiatan yang memerlukan pembiayaan diperkirakan baru akan terealisasi pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan di tingkat kecamatan masih belum menunjukkan capaian kinerja, namun realisasi anggaran telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp41.412 sesuai pagu anggaran yang tersedia. Sementara itu, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kelurahan Serasan masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp1.364.750. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih memerlukan percepatan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan capaian kinerja. Meskipun demikian, realisasi anggaran telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp53.497 dari pagu yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan administrasi kegiatan telah direalisasikan, namun pelaksanaan output kegiatan belum memberikan capaian yang terukur pada Semester I.

Selanjutnya, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga masih menunjukkan capaian kinerja 0,00%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp249.926 sesuai pagu anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dukungan administrasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah diselesaikan, namun pelaksanaan indikator kinerja masih memerlukan percepatan pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian kinerja, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 100,00% atau sebesar Rp35.729 dari pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan telah tersedia, namun pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output kinerja masih akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Serasan masih memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, mengingat sebagian besar indikator kinerja masih berada pada kategori Sangat Rendah, meskipun beberapa kegiatan telah menunjukkan realisasi anggaran yang cukup baik. Perhatian khusus perlu diberikan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, agar realisasi anggaran yang telah dilaksanakan dapat diikuti dengan peningkatan capaian output dan outcome program. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan implementasi kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pengendalian pelaksanaan program agar capaian kinerja dan realisasi anggaran meningkat secara selaras sehingga target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

36. Kecamatan Subi

Kecamatan Subi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Subi melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Subi

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,41	3.342.140.142	3,2	1.589.818.434	93,84	47,57	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	63,00	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	42.000.000	50	35.905.000	50,00	85,49	ST	ST
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	50	0	50,00	-	ST	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	40	0	50,00	-	ST	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	50	0	50,00	-	ST	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan koordinasi	90	0	0	0	0,00	-	SR	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	dibidang keagamaan (%).								

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Subi menunjukkan capaian yang relatif baik, ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja telah berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan realisasi kinerja maupun anggaran sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar seluruh target tahunan dapat dicapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93,84% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 47,57% atau Rp1.589.818.434 dari pagu anggaran Rp3.342.140.142. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Subi telah berjalan dengan baik serta didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup optimal untuk mendukung operasional perangkat daerah. Sebaliknya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah belum menunjukkan capaian pada Semester I sehingga persentase kinerjanya masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran indikator tersebut kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 85,49% atau Rp35.905.000 dari pagu anggaran Rp42.000.000. Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai rencana pada Semester I sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi pembinaan dan koordinasi kecamatan, sementara pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih akan dilaksanakan pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menunjukkan capaian yang baik, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan Semester I.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah mulai dilaksanakan melalui koordinasi rutin, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran akan dioptimalkan pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I dan memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Subi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama pada aspek pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa yang sebagian besar telah mencapai kategori Sangat Tinggi. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menjadi program dengan capaian anggaran tertinggi, yaitu 85,49%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Semester I. Namun demikian, masih diperlukan perhatian terhadap indikator Persentase Capaian Kinerja

Perangkat Daerah dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

37. Kecamatan Pulau Tiga

Kecamatan Pulau Tiga merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Pulau Tiga melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Tiga

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	64,90	0	64,90	0	100,00	-	ST	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,21	2.028.082.393	3,21	943.185.927	100,00	46,51	ST	ST
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	49.512.000	100	6.381.654	100,00	12,89	ST	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	100	0	100,00	-	ST	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	80	0	100,00	-	ST	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	100	0	100,00	-	ST	
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Pulau Tiga menunjukkan kinerja yang relatif baik, ditandai dengan sebagian besar indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan target Semester I. Namun demikian, dari sisi realisasi anggaran masih terdapat ketimpangan antarprogram, dimana sebagian besar indikator telah mencapai target kinerja, tetapi penyerapan anggaran pada program teknis masih relatif rendah atau bahkan belum terealisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan lebih banyak didukung oleh optimalisasi fungsi koordinasi, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan belanja diperkirakan akan lebih intensif pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun tidak didukung oleh alokasi maupun realisasi anggaran secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja organisasi telah tercapai melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah mencapai 100,00% dengan realisasi

nilai 3,21 sesuai target yang ditetapkan, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 46,51% atau Rp943.185.927 dari pagu anggaran Rp2.028.082.393, yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pulau Tiga telah mampu memenuhi harapan masyarakat dengan dukungan operasional organisasi yang memadai.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, realisasi anggarannya baru mencapai 12,89% atau sebesar Rp6.381.654 dari pagu anggaran Rp49.512.000, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target koordinasi penyelenggaraan pemerintahan telah dapat dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan koordinasi lintas sektor, sementara sebagian besar kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran masih akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada Semester I. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara optimal melalui pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah desa tanpa memerlukan dukungan belanja secara langsung pada periode evaluasi.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Meskipun belum terdapat realisasi anggaran, capaian tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah telah berjalan sesuai dengan target Semester I.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum didukung oleh realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah terlaksana melalui koordinasi dan pembinaan rutin yang dilaksanakan oleh kecamatan.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan

masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I sehingga perlu menjadi perhatian pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Tiga telah mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang ditandai dengan dominannya indikator berkategori Sangat Tinggi, khususnya pada aspek pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran pada sebagian besar program teknis masih relatif rendah, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baru mencapai 12,89%, sementara beberapa program lainnya belum memiliki realisasi anggaran sama sekali. Selain itu, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat masih menunjukkan capaian kinerja yang belum terealisasi.

38. Kecamatan Bunguran Tengah

Kecamatan Bunguran Tengah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Tengah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Tengah

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,49	2.323.730.088	3,45	1.032.159.132	98,85	44,42	ST	T
		Nilai Laporan LKjIP (Nilai).	71,90	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	38.682.980	50	0	50,00	0,00	ST	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	21,85	0	21,85	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Tengah masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Sebagian besar indikator program teknis masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR), sementara realisasi anggaran pada beberapa program juga belum terealisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi maupun penjadwalan pelaksanaan sehingga pelaksanaan program diperkirakan akan lebih intensif pada Semester II. Meskipun demikian, kualitas pelayanan publik yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat tetap menunjukkan hasil yang baik sehingga menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 98,85% dengan kategori Sangat Tinggi, didukung oleh realisasi anggaran sebesar 44,42% atau Rp1.032.159.132 dari pagu anggaran Rp2.323.730.088, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Bunguran Tengah telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi target pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, Nilai Laporan LKjIP belum menunjukkan capaian pada Semester I sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan dan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan indikator yang umumnya diukur pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum didukung oleh realisasi anggaran meskipun tersedia pagu sebesar Rp38.682.980. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan sesuai tahapan Semester I melalui optimalisasi fungsi koordinasi kecamatan, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah serta belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, yang menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa masih belum terlaksana secara optimal selama Semester I.

Kondisi serupa juga terlihat pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan

pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih berada pada tahap persiapan sehingga perlu dipercepat pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan baru mencapai 21,85% dengan kategori Sangat Rendah, namun belum terdapat realisasi anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi bidang keagamaan telah mulai dilaksanakan meskipun masih terbatas dan memerlukan penguatan pelaksanaan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Tengah telah mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik yang baik, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai 98,85%. Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih menunjukkan capaian yang rendah dan belum diikuti dengan realisasi anggaran. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

39. Kecamatan Bunguran Timur Laut

Kecamatan Bunguran Timur Laut merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Timur Laut melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga

didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Timur Laut

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	2.726.675.008	3,64	1.216.530.884	100,00	44,62	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	79,50	0	0	0	0,00	-	SR	-
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	20	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Timur Laut masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Meskipun kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan, sebagian besar program teknis kewilayahan belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan

kegiatan masih didominasi oleh tahapan persiapan administrasi dan perencanaan, sehingga percepatan implementasi program pada Semester II menjadi faktor penting untuk memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, dimana realisasi nilai mencapai 3,64 dibandingkan target 3,45. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar 44,62% atau Rp1.216.530.884 dari pagu anggaran Rp2.726.675.008, yang menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dan operasional organisasi telah berjalan dengan baik selama Semester I. Sebaliknya, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut belum dilakukan pengukuran pada Semester I dan umumnya akan dievaluasi pada akhir tahun anggaran.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum terlaksana pada Semester I atau masih berada pada tahap persiapan administrasi sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan juga masih berada pada 0,00% dengan kategori Sangat Rendah dan belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sehingga diperlukan langkah percepatan agar pemberdayaan masyarakat desa dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada 0,00%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa masih belum terlaksana pada Semester I sehingga perlu menjadi perhatian pada Semester II.

Kondisi serupa juga terjadi pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih

menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum dilaksanakan sehingga perlu dipercepat pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Timur Laut telah mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai 100,00% dengan realisasi anggaran 44,62%. Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih belum menunjukkan capaian kinerja maupun penyerapan anggaran, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II.

40. Kecamatan Bunguran Selatan

Kecamatan Bunguran Selatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Selatan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain melaksanakan program teknis kewilayahan, perangkat daerah juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai

instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Selatan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	2.176.905.230	3,46	976.880.523	100,00	44,87	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	76,40		72,85		95,35		ST	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	25.900.000	50	11.865.000	50,00	45,81	ST	ST
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	20	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Selatan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek pelayanan publik dan tata kelola organisasi. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah mencapai 100,00% serta Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 95,35%, yang seluruhnya berada pada kategori Sangat

Tinggi (ST). Meskipun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih belum menunjukkan perkembangan yang optimal, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat berjalan secara lebih seimbang.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 3,46 dari target 3,45 atau sebesar 100,00%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp976.880.523 atau 44,87% dari pagu anggaran Rp2.176.905.230. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Bunguran Selatan telah memenuhi target yang ditetapkan dan didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup baik untuk mendukung operasional perangkat daerah. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 72,85% dari target 76,40%, atau mencapai 95,35% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat realisasi anggaran pada indikator tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja organisasi telah dapat dicapai melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 50,00% dari target tahunan dan berada pada kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.865.000 atau 45,81% dari pagu anggaran Rp25.900.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan sesuai tahapan Semester I serta didukung oleh penyerapan anggaran yang relatif proporsional.

Sebaliknya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan belum terealisasi sehingga capaian kinerjanya masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah (SR), serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap persiapan dan perlu dipercepat pada Semester II.

Kondisi yang sama juga terlihat pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih menunjukkan capaian 0,00% tanpa realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum belum terlaksana pada Semester I sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada semester berikutnya.

Selanjutnya, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih berada pada capaian 0,00% dan belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa masih belum dilaksanakan dan perlu menjadi perhatian agar target tahunan dapat tercapai.

Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I dan direncanakan akan dioptimalkan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Selatan telah berhasil mempertahankan kinerja pelayanan publik dan tata kelola organisasi, sebagaimana tercermin dari tingginya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, capaian tersebut belum diikuti oleh optimalisasi pelaksanaan program-program teknis kewilayahan, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan pemerintahan desa, serta fasilitasi kesejahteraan rakyat yang hingga Semester I masih belum menunjukkan perkembangan kinerja maupun penyerapan anggaran.

41. Kecamatan Serasan Timur

Kecamatan Serasan Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Serasan Timur melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Serasan Timur

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,29	2.068.331.130	0	1.061.762.555	0,00	51,33	SR	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	72,00		36		50,00		ST	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	48.697.944	50	11.473.818	50,00	23,56	ST	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	20	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Serasan Timur menunjukkan bahwa capaian kinerja antarprogram masih bervariasi. Beberapa indikator telah

menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih belum menunjukkan capaian yang optimal dan belum diikuti oleh realisasi anggaran yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga diperlukan percepatan implementasi pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum menunjukkan capaian pada Semester I sehingga persentase capaian masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah (SR). Meskipun demikian, realisasi anggaran telah mencapai 51,33% atau sebesar Rp1.061.762.555 dari pagu anggaran Rp2.068.331.130, yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran operasional perangkat daerah telah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pemerintahan, sedangkan pengukuran IKM diperkirakan akan dilaksanakan pada periode evaluasi berikutnya. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah baru mencapai 50,00% atau terealisasi sebesar 36% dari target 72%, sehingga meskipun berada pada kategori Sangat Tinggi, masih diperlukan peningkatan kinerja organisasi pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai tahapan Semester I. Namun demikian, realisasi anggaran baru mencapai 23,56% atau sebesar Rp11.473.818 dari pagu anggaran Rp48.697.944, sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran diperkirakan baru akan dilaksanakan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator

Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum didukung oleh realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa masih belum terlaksana pada Semester I.

Kondisi yang sama juga terlihat pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah dan belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum berjalan sesuai dengan target Semester I sehingga perlu dipercepat pada periode berikutnya.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dilaksanakan pada Semester I dan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Serasan Timur telah mampu menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang ditunjukkan oleh realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 51,33% dan capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 50,00%. Namun demikian, sebagian besar program kewilayahan lainnya masih menunjukkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang rendah.

42. Kecamatan Suak Midai

Kecamatan Suak Midai merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Suak Midai melaksanakan berbagai

program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Suak Midai

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	2.125.430.754	3,49	1.018.063.474	100,00	47,90	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	70,40		63,25		89,84		ST	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	3.050.000	50	0	50,00	0,00	ST	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Suak Midai menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah berjalan dengan baik, terutama pada aspek pelayanan publik dan tata kelola organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah mencapai target serta Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih belum menunjukkan perkembangan yang optimal, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan masih terkonsentrasi pada program penunjang, sedangkan sebagian besar kegiatan teknis diperkirakan akan dilaksanakan secara lebih intensif pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,49 dari target 3,45. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp1.018.063.474 atau 47,90% dari pagu anggaran Rp2.125.430.754, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik mampu dipertahankan dengan dukungan operasional perangkat daerah yang memadai. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 63,25% dari target 70,40%, atau mencapai 89,84% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun tidak didukung oleh realisasi anggaran secara khusus. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja organisasi telah tercapai melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, hingga Semester I belum terdapat realisasi anggaran meskipun tersedia pagu anggaran sebesar Rp3.050.000, sehingga persentase penyerapan anggaran masih 0,00% atau berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan telah berjalan sesuai tahapan, sementara dukungan kegiatan yang memerlukan pembiayaan diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat alokasi maupun realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap persiapan sehingga perlu dipercepat pada

Semester II agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa belum terlaksana pada Semester I sehingga perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya.

Kondisi yang sama juga terlihat pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah dan belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum dilaksanakan sehingga perlu dipercepat agar target tahunan dapat tercapai.

Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dimulai pada Semester I sehingga memerlukan perhatian khusus pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Suak Midai telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,00% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 89,84%, yang seluruhnya berada pada kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, capaian tersebut belum diikuti oleh optimalisasi pelaksanaan program-program teknis kewilayahan, dimana sebagian besar indikator masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum didukung oleh realisasi anggaran. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan implementasi kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi penyerapan anggaran, khususnya pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sehingga keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat terwujud serta target RKPD

Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

43. Kecamatan Bunguran Batubi

Kecamatan Bunguran Batubi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Bunguran Batubi melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Batubi

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,45	2.158.180.385	1,65	1.001.263.962	47,83	46,39	ST	ST
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	70,90		30		42,31		T	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	39.822.510	50	15.338.226	50,00	38,52	ST	T

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	50	0	50,00		ST	
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	40	0	50,00		ST	
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	50	0	50,00		ST	
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	50	0	50,00		ST	

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Bunguran Batubi menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan pada Semester II. Sebagian besar indikator program teknis telah mencapai 50,00% atau sesuai dengan tahapan pelaksanaan Semester I dan berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, realisasi anggaran pada sebagian program masih relatif rendah sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar keseimbangan antara capaian fisik dan penyerapan anggaran dapat terjaga hingga akhir tahun.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru mencapai nilai 1,65 dari target 3,45, atau sebesar 47,83%, namun berdasarkan klasifikasi evaluasi masih berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Realisasi anggaran program ini mencapai Rp1.001.263.962 atau 46,39% dari pagu anggaran sebesar Rp2.158.180.385, yang juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah baru terealisasi sebesar 30% dari target 70,90%, atau mencapai 42,31%, sehingga berada pada kategori Tinggi (T). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun operasional organisasi telah berjalan dengan dukungan anggaran yang cukup baik, peningkatan kinerja organisasi masih perlu dioptimalkan pada Semester II.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 38,52% atau sebesar Rp15.338.226 dari pagu anggaran Rp39.822.510, yang berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan sesuai target Semester I, namun pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran masih akan dilanjutkan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat telah berjalan melalui optimalisasi fungsi pembinaan kecamatan, sedangkan kegiatan yang memerlukan dukungan pembiayaan diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa telah terlaksana sesuai tahapan Semester I melalui kegiatan koordinatif yang belum memerlukan dukungan belanja secara signifikan.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, namun belum didukung oleh realisasi anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan sesuai rencana, sementara pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran diproyeksikan pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan telah mencapai 50,00% dengan kategori Sangat Tinggi, meskipun belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi bidang keagamaan telah mulai dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan Semester I, namun kegiatan pendukung yang memerlukan pembiayaan masih belum direalisasikan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Bunguran Batubi telah mampu melaksanakan sebagian besar program sesuai tahapan yang direncanakan, terutama pada program-program kewilayahan yang telah mencapai 50,00% atau sesuai target Semester I. Namun demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih memerlukan peningkatan, khususnya pada Indeks Kepuasan Masyarakat yang baru mencapai 47,83% serta Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 42,31%.

44. Kecamatan Pulau Tiga Barat

Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Pulau Tiga Barat melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Tiga Barat

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,51	2.223.403.411	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	70,75		0		0,00		SR	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	47.681.310	0	0	0,00	0,00	SR	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Pulau Tiga Barat menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal, dimana seluruh indikator program yang dievaluasi belum menunjukkan capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi, perencanaan, maupun proses pelaksanaan awal, sehingga belum menghasilkan capaian output yang dapat diukur pada Semester I. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan program pada Semester II menjadi sangat penting agar target RKPD Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah belum menunjukkan realisasi pada Semester I. Indeks Kepuasan Masyarakat masih berada pada capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah (SR), meskipun telah

dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp2.223.403.411. Demikian pula, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah juga masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, tanpa realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran indikator pelayanan publik dan kinerja organisasi belum dilaksanakan pada Semester I sehingga memerlukan percepatan pada semester berikutnya.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, sementara realisasi anggaran juga belum terlaksana meskipun tersedia pagu anggaran sebesar Rp47.681.310. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik masih berada pada tahap persiapan sehingga pelaksanaan kegiatan perlu dipercepat pada Semester II.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih berada pada capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah dan belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sehingga memerlukan percepatan implementasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa.

Kondisi serupa juga terjadi pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi bersama unsur keamanan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya belum dilaksanakan secara optimal pada Semester I.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga masih menunjukkan capaian 0,00% tanpa realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilaksanakan sehingga memerlukan perhatian khusus pada Semester II.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dimulai pada Semester I dan perlu menjadi salah satu prioritas pelaksanaan pada semester berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Pulau Tiga Barat masih memerlukan percepatan yang cukup signifikan, mengingat seluruh indikator kinerja dan realisasi anggaran masih berada pada 0,00% atau kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan langkah-langkah percepatan melalui penyelesaian proses administrasi, percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat meningkat secara proporsional sehingga seluruh target pembangunan Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tercapai.

45. Kecamatan Pulau Panjang

Kecamatan Pulau Panjang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Pulau Panjang melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan yang diperlukan pada Semester II.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Panjang

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	65,00	1.731.900.398	0	686.019.920	0,00	39,61	SR	T
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,46		3,46		100,00		ST	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	82.182.740	23,4	9.750.000	23,40	11,86	SR	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	0	0	0,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Pulau Panjang menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih memerlukan peningkatan, meskipun pada aspek

pelayanan publik telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah memenuhi target, namun sebagian besar program teknis kewilayahan masih berada pada kategori Sangat Rendah (SR) baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga percepatan implementasi program pada Semester II menjadi sangat penting untuk mencapai target tahunan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah belum menunjukkan realisasi pada Semester I sehingga capaian kinerjanya masih 0,00% dengan kategori Sangat Rendah. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 100,00% dengan realisasi nilai 3,46 sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp686.019.920 atau 39,61% dari pagu anggaran Rp1.731.900.398, yang berada pada kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dengan baik meskipun penyerapan anggaran masih berada di bawah 50 persen dan pengukuran capaian kinerja perangkat daerah belum dilakukan pada Semester I.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik baru mencapai 23,40% dari target tahunan dan berada pada kategori Sangat Rendah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.750.000 atau 11,86% dari pagu anggaran Rp82.182.740. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik telah mulai berjalan, namun progres pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran masih relatif rendah sehingga memerlukan percepatan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan pada Semester I sehingga perlu dipercepat agar mampu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi bersama unsur keamanan dan pemerintah desa

masih belum terlaksana pada Semester I sehingga perlu menjadi perhatian pada Semester II.

Kondisi serupa juga terjadi pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan capaian 0,00% dan belum didukung oleh realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih berada pada tahap persiapan sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan juga belum menunjukkan capaian maupun realisasi anggaran sehingga masih berada pada kategori Sangat Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan belum dimulai pada Semester I dan perlu dioptimalkan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Panjang telah mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah mencapai 100,00%. Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih menunjukkan capaian yang rendah dan belum diikuti dengan penyerapan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Semester II diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

46. Kecamatan Pulau Seluan

Kecamatan Pulau Seluan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kecamatan Pulau Seluan melaksanakan berbagai

program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian pelaksanaan RKPD yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja, menilai tingkat penyerapan anggaran, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama Semester I, serta merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pada Semester II.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Kecamatan Pulau Seluan

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).	3,40	1.789.720.733	3,43	669.320.868	100,00	37,40	ST	S
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%).	61,00		58,55		95,98		ST	
b. Unsur Kewilayahan										
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%).	100	23.500.000	56	0	56,00	0,00	ST	SR
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%).	100	0	0	0	0,00	-	SR	-
3	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%).	80	0	20	0	25,00	-	SR	-
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan	100	0	30	0	30,00	-	R	-

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	PEMERINTAHAN DESA	pengawasan pemerintahan desa (%).								
c. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)										
1	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%).	100	0	25	0	25,00	-	SR	-

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Kecamatan Pulau Seluan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek pelayanan publik dan tata kelola organisasi. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang telah berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, sebagian besar program teknis kewilayahan masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dan belum diikuti oleh realisasi anggaran, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai nilai 3,43 dari target 3,40, atau sebesar 100,00%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp669.320.868 atau 37,40% dari pagu anggaran Rp1.789.720.733. Meskipun penyerapan anggaran masih berada pada kategori Sedang (S), capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan secara optimal. Selain itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 95,98%, dengan realisasi sebesar 58,55% dari target 61,00%, dan berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan sesuai dengan target Semester I.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai 56,00% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, hingga Semester I belum terdapat realisasi anggaran meskipun tersedia pagu sebesar Rp23.500.000, sehingga tingkat penyerapan anggaran masih 0,00% atau berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan telah terlaksana sesuai tahapan,

sedangkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran diperkirakan akan direalisasikan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan masih menunjukkan capaian 0,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum dilaksanakan pada Semester I sehingga memerlukan percepatan implementasi agar dapat mendukung peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa.

Selanjutnya, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum baru mencapai 25,00% dari target tahunan dan masih berada pada kategori Sangat Rendah, tanpa didukung oleh realisasi anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah mulai berjalan, namun progres pelaksanaan masih relatif terbatas sehingga perlu ditingkatkan pada Semester II.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah mencapai 30,00% dan berada pada kategori Rendah (R), namun belum terdapat realisasi anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa telah mulai dilaksanakan, meskipun masih memerlukan percepatan agar target tahunan dapat tercapai.

Sementara itu, pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Persentase Pemenuhan Koordinasi Bidang Keagamaan baru mencapai 25,00% dengan kategori Sangat Rendah, serta belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan telah mulai dilaksanakan namun masih memerlukan peningkatan intensitas pelaksanaan pada Semester II.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Seluan telah mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,00% dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 95,98%, yang keduanya berada pada kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemajuan pada program-program teknis kewilayahan, dimana sebagian besar indikator masih berada pada kisaran 25,00%–30,00% atau bahkan belum terealisasi sama sekali, serta belum didukung oleh penyerapan anggaran.

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna melaksanakan urusan pemerintahan umum yang berfokus pada pembinaan ideologi Pancasila, penguatan karakter kebangsaan, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pelaksanaan seluruh program tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, dan keamanan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Program dan Anggaran Semester I Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
a. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Non Urusan)										
1	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,35	4.440.397.397	3,48	1.772.688.660	100,00	39,92	ST	T
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	6.349.600	78,88	2.005.824	78,88	31,59	ST	R
b. Unsur Pemerintahan Umum										
1	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	1.836.015.000	25	241.486.658	25,00	13,15	SR	SR
2	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	75,06	782.554.881	0	13.206.042	0,00	1,69	SR	SR

No	Program	Indikator	Target RKPD (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Semester I 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian	
			K (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/5*100	10	11
	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
3	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	49,35	191.640.400	47,29	2.874.609	95,83	1,50	ST	SR
4	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	608.938.369	0	15.708.460	0,00	2,58	SR	SR
5	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	1.852.460.532	100	210.453.937	100,00	11,36	ST	SR

Sumber: Report SIPD Dalev TW II 2026 Perangkat Daerah Terkait (diolah).

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bahwa capaian kinerja antarprogram masih bervariasi. Sebagian indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), terutama pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, dan penyelesaian konflik sosial. Namun demikian, sebagian besar program substantif masih memiliki tingkat penyerapan anggaran yang rendah dan terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian kinerja secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan strategis masih berada pada tahap awal pelaksanaan dan diproyeksikan akan meningkat pada Semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja organisasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 3,48 dari target 3,35 atau 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp1.772.688.660 atau 39,92% dari pagu sebesar Rp4.440.397.397 dan berada pada kategori Tinggi. Sementara itu, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai 78,88% dari target

100% dengan kategori Sangat Tinggi, namun realisasi anggarannya baru sebesar 31,59% atau Rp2.005.824 dari pagu Rp6.349.600, yang masih berada pada kategori Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola organisasi dan pelayanan publik telah berjalan dengan baik meskipun penyerapan anggaran belum optimal.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, indikator Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan baru mencapai 25,00% dari target 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp241.486.658 atau 13,15% dari pagu Rp1.836.015.000. Baik capaian kinerja maupun realisasi anggaran masih berada pada kategori Sangat Rendah, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga memerlukan percepatan pada Semester II.

Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, indikator Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik belum menunjukkan capaian kinerja atau masih 0,00%, sementara realisasi anggaran baru mencapai Rp13.206.042 atau 1,69% dari pagu Rp782.554.881. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik belum terlaksana secara optimal pada Semester I sehingga perlu menjadi salah satu fokus percepatan pelaksanaan pada Semester II.

Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif telah mencapai 95,83% atau realisasi sebesar 47,29% dari target 49,35%, sehingga berada pada kategori Sangat Tinggi. Akan tetapi, realisasi anggaran baru mencapai Rp2.874.609 atau 1,50% dari pagu Rp191.640.400, yang masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan organisasi kemasyarakatan lebih banyak didukung oleh optimalisasi fungsi koordinasi dan pembinaan dibandingkan dengan penggunaan anggaran pada Semester I.

Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, indikator Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan masih menunjukkan capaian 0,00%, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai Rp15.708.460 atau 2,58% dari pagu Rp608.938.369. Baik capaian kinerja maupun penyerapan anggaran masih berada pada kategori Sangat Rendah, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih berada pada tahap persiapan dan memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II.

Sementara itu, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan kinerja yang paling baik di antara seluruh program substantif. Indikator Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan telah mencapai 100,00% sesuai target tahunan dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp210.453.937 atau 11,36% dari pagu Rp1.852.460.532 dan masih berada pada kategori Sangat Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sosial telah berjalan secara efektif meskipun dukungan anggaran yang terealisasi pada Semester I masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik serta menjaga efektivitas pelaksanaan beberapa program strategis, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang telah menunjukkan capaian kinerja tinggi. Namun demikian, sebagian besar program substantif masih dihadapkan pada rendahnya realisasi anggaran dan belum optimalnya capaian indikator, terutama pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik, serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)



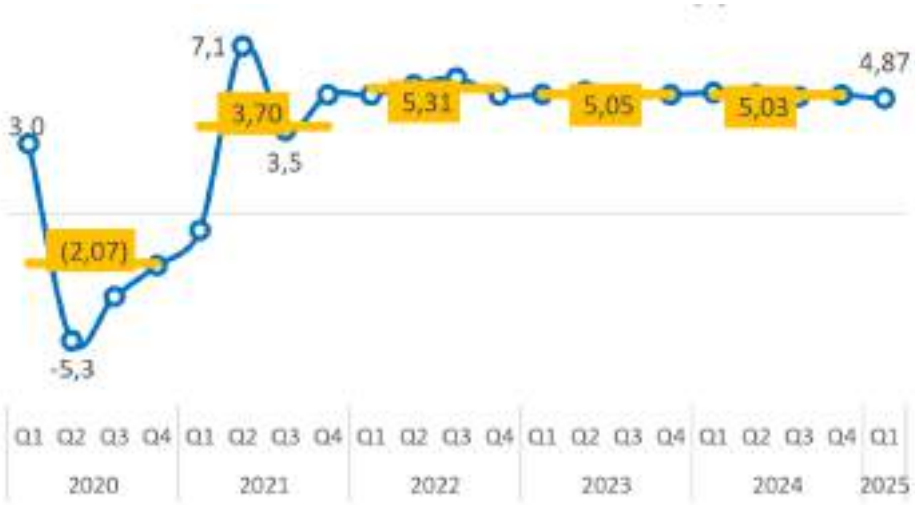
BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KAB. NATUNA

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Global

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

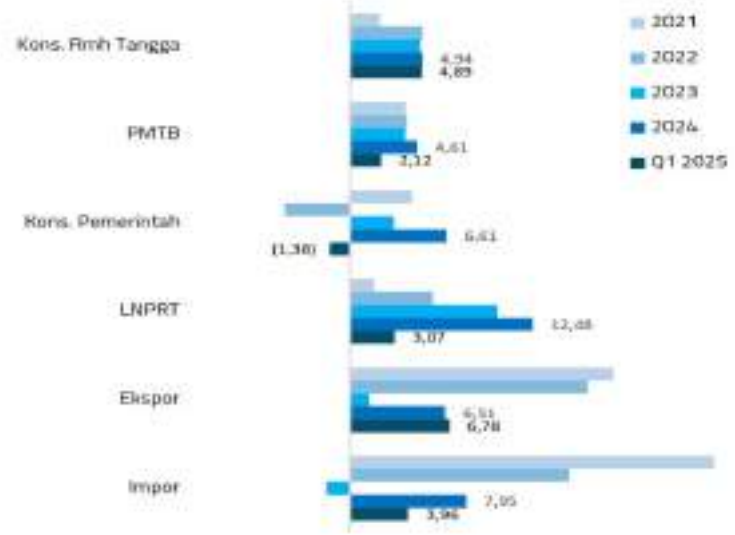


Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi 2020-2025 (% yoy)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat high base effect pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total

ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48 persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian.



Gambar 3.2.
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (%,yoy)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh stabil dan terjaga pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy). Kinerja positif ini diharapkan terus menguat dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah. Program-

program prioritas, antara lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor perumahan dan insentif kendaraan listrik serta hybrid, diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan investasi pada proyek-proyek strategis yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dengan mengalokasikan anggaran pada subsidi, program perlindungan sosial, dan insentif fiskal. Bauran kebijakan ini juga diperkuat dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh 6,6 persen, tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi P-KP terhadap PDB mencapai 7,4 persen. Program-program Pemerintah untuk pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan yang diarahkan ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan P-KP. Struktur belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program-program Pemerintah tersebut. Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan realisasi belanja pegawai mencapai 12,6 persen, menguat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,6 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh mencapai 17,9 persen dan belanja bantuan sosial tumbuh 11,8 persen terutama belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial.

Kinerja P-KP pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif. Kebijakan tersebut seiring berbagai kebijakan perekonomian yang didukung Belanja Pemerintah, diantaranya pembentukan K/L baru, prioritas penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti program MBG. Di samping itu, keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. RKP ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar

1,38 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh high-base effect belanja di triwulan I 2024.

Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61 persen sepanjang tahun 2024. Tren pertumbuhan investasi ini konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, serta kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Dilihat dari komponennya, investasi masih ditopang oleh bangunan dengan andil 74,48 persen. Ke depan komponen investasi dengan daya ungkit yang lebih tinggi seperti mesin dan kendaraan diharapkan akan terus meningkat seiring kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan berbagai sektor prioritas lainnya. Dari sisi sektor swasta, geliat investasi yang menguat tecermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 20,82 persen dengan total nilai Rp1.714 triliun, melebihi target capaian investasi langsung yang ditetapkan.

Kinerja investasi yang terus tumbuh menguat diproyeksikan akan berlanjut pada 2025. Pemerintah terus memelihara iklim investasi yang kondusif melalui berbagai reformasi kebijakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan berdaya saing. Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah memberikan insentif yang mendorong investasi di sektor dan kawasan tertentu, serta insentif untuk pengembangan SDM dan riset. Optimalisasi potensi Sovereign Wealth Funds (SWF) juga dilakukan dengan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh entitas milik negara guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat daya saing global. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional diharapkan secara langsung mendukung investasi dan melalui efek multiplier mengakselerasi aktivitas penanaman modal sektor swasta. Pada triwulan I 2025, investasi tumbuh 2,12 persen (yoy) seiring dengan langkah observatif investor menghadapi gejolak global di awal tahun.

Di tengah tantangan perdagangan global, ekspor barang dan jasa riil Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, ekspor riil tumbuh sebesar 6,51 persen, jauh melampaui capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor barang sebesar 5,81 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari ekspor barang non minyak dan gas (migas) yang tumbuh 6,13 persen. Di sisi jasa, pertumbuhan mencapai 14,20 persen sejalan dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Indonesia yang meningkat 19,05 persen. Peningkatan ekspor barang dan jasa ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di pasar global relatif masih baik dan dengan peningkatan tersebut sekaligus menguatkan peran sektor ekspor dalam menopang perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan internasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan positif. Impor barang dan jasa tahun 2024 tumbuh sebesar 7,95 persen, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 1,60 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh impor barang yang tumbuh sebesar 8,15 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari impor barang nonmigas yang tumbuh sebesar 9,01 persen, dimana tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 4,50 persen. Peningkatan impor barang nonmigas terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor industri. Sementara itu, impor jasa tumbuh sebesar 6,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 11,99 persen.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada triwulan I 2025, ekspor dan impor secara riil masing-masing tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy) dan 3,96 persen (yoy).

Dari sisi produksi, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh positif di seluruh sektor. Sektor-sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian. Pencapaian ini tidak hanya menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun juga menguatkan fundamental perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kebijakan reformasi struktural, peningkatan investasi, serta sinergi yang erat antara Pemerintah dan pelaku ekonomi terus dioptimalkan untuk mendorong potensi masing-masing sektor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Kinerja sisi produksi didorong oleh Sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar 4,43 persen pada tahun 2024. Kinerja tersebut ditopang oleh Industri berbasis hilirisasi seperti industri logam dasar yang mampu tumbuh sebesar 13,34 persen, utamanya berasal dari peningkatan permintaan ekspor untuk produk turunan komoditas nikel. Di sisi lain, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 5,90 persen, disebabkan meningkatnya permintaan produk turunan sawit.



Gambar 3.3.
Pertumbuhan Komponen Produksi, 2021-2025 (%,yoy)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Sektor Manufaktur akan tetap menjadi penopang utama pada tahun 2025. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh stabil dan berperan besar dalam struktur PDB nasional. Prospek positif datang dari hilirisasi, insentif ekspor, dan transformasi industri 4.0. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong industri kendaraan listrik, logistik, dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) ditopang oleh hilirisasi dan aktivitas produksi domestik lainnya.

Sektor Pertanian kembali mengalami moderasi pada tahun 2024, dengan tumbuh sebesar 0,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,31 persen. Perlambatan tersebut terutama dikarenakan penurunan kinerja Subsektor Tanaman Pangan yang terkontraksi sebesar 0,21 persen. Selain itu, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Perikanan juga mengalami moderasi dengan tumbuh masing-masing sebesar 2,78 persen dan 0,68 persen. Faktor musim dan cuaca menjadi pendorong utama pergerakan Sektor Pertanian. Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi Sektor Pertanian masih di atas 11 persen terhadap PDB.

Sektor Pertanian diproyeksikan menguat di tahun 2025. Penguatan ini mulai tecermin pada triwulan I 2025, di mana sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 dan tumbuh kuat sebesar 10,52 persen (yoy). Langkah nyata Pemerintah melalui penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas

lebih dari 145 regulasi berhasil menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Kebijakan yang sejalan dengan perkembangan cuaca, berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas pertanian khususnya beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras nasional periode Januari – Maret 2025 meningkat 51 persen secara yoy. Penguatan kinerja sektor pertanian pada tahun 2025 juga sejalan dengan laporan United States Department of Agriculture (USDA) outlook pada April 2025, yang memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Produksi beras tersebut diperkirakan mencapai 34,6 juta ton (beras giling), tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,03 juta ton.

Sektor Pertambangan masih menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 4,90 persen, terutama didorong oleh Subsektor Pertambangan Bijih Logam yang tumbuh 8,30 persen seiring dengan peningkatan produksi tembaga dan nikel. Sementara, Subsektor Pertambangan Batubara dan Pertambangan Lainnya masing-masing tumbuh 6,82 persen dan 6,27 persen sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor atas komoditas tambang. Di sisi lain, Subsektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi mengalami kontraksi sebesar 0,78 persen dikarenakan gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, tertundanya kegiatan eksplorasi, serta keterlambatan proyek-proyek strategis.

Sektor Pertambangan diperkirakan masih menghadapi dinamika yang beragam. Pemerintah mendorong eksplorasi, hilirisasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi untuk memperkuat sektor ini. Pada triwulan I 2025, Sektor Pertambangan terkontraksi sebesar 1,23 persen (yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas pertambangan global. Selain itu, penurunan output pada sektor ini merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya aktivitas hilirisasi, sehingga secara sektoral, output yang telah mengalami proses produksi lanjutan dicatat sebagai aktivitas pada sektor industri pengolahan yang lebih hilir, tidak lagi dicatatkan sebatas pada output dari aktivitas pertambangan yang masih ada di sisi hulu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sektor Konstruksi telah memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kinerja sektor ini terus menunjukkan peningkatan sejak 2021 hingga mencapai pertumbuhan 7,02 persen di tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang didanai Pemerintah maupun investasi swasta. Pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, serta kawasan pariwisata menjadi faktor utama yang menopang lonjakan kinerja sektor ini. Selain itu, peningkatan

impor bahan baku konstruksi yang tumbuh 5 persen dan impor besi baja sebesar 1,4 persen pada 2024 juga mengkonfirmasi tingginya aktivitas konstruksi dalam negeri. Tren ini mengindikasikan adanya potensi investasi yang kuat serta kepercayaan pasar terhadap prospek Sektor Konstruksi dalam jangka menengah.

Sektor Konstruksi tetap berada dalam jalur ekspansi. Meski ada sedikit moderasi dari puncak pertumbuhan 2024, pada triwulan I 2025 sektor ini tumbuh 2,18 persen (yoy). Kinerja ditopang oleh belanja modal pemerintah dan keberlanjutan proyek strategis.

Sektor Perdagangan menunjukkan kinerja yang cukup terjaga dalam perekonomian nasional. Dengan kontribusi sebesar 13,07 persen terhadap PDB pada tahun 2024, sektor ini merupakan sektor terbesar kedua setelah Sektor Manufaktur. Pada tahun 2024, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan ini didorong Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,95 persen, didorong pertumbuhan produksi domestik dan aktivitas impor. Sementara itu, Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 0,05 persen akibat tekanan dari sisi permintaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan baru maupun bekas.

Sektor Perdagangan diperkirakan terus tumbuh. Pertumbuhan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy), didorong oleh permintaan selama Ramadan, peningkatan suplai domestik, dan impor barang konsumsi.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi 2,6 persen pada 2024. Pada 2024, sektor ini tumbuh sebesar 8,7 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Kedua subsektor, yaitu Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum tumbuh positif, masing-masing 8,7 persen dan 8,5 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Maraknya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di berbagai daerah juga berdampak pada peningkatan tingkat okupansi hotel, restoran, serta bisnis kuliner. Selain itu, pemulihan ekonomi turut meningkatkan daya beli dan minat masyarakat untuk berwisata serta mengakses layanan perhotelan dan makanan-minuman, sehingga semakin memperkuat ekspansi sektor ini.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh solid. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada triwulan I 2025,

sektor ini tumbuh sebesar 5,75 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dukungan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

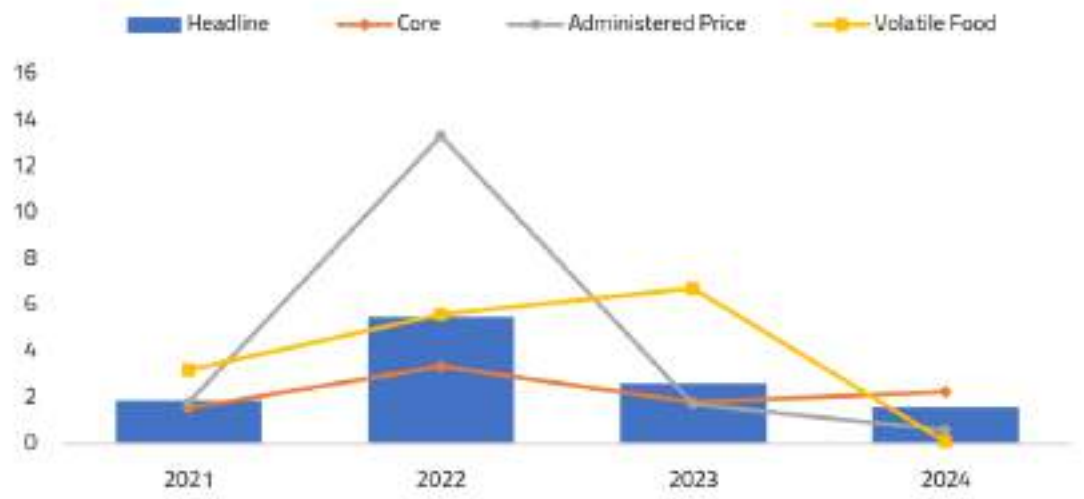
Kebijakan hilirisasi mendorong konvergensi pertumbuhan antarwilayah di Indonesia pada tahun 2024. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kawasan timur Indonesia yang tumbuh di atas pertumbuhan agregat. Wilayah Sulawesi dan Maluku Papua berhasil tumbuh masing-masing sebesar sebesar 7,12 persen dan 7,81 persen, didorong oleh kinerja industri berbasis hilirisasi komoditas. Sementara itu, wilayah Jawa dan Sumatera yang masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,92 persen dan 4,45 persen. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Bali Nusra tumbuh masing-masing sebesar 5,52 persen dan 4,92 persen.

Pada triwulan I 2025, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40 persen (yoy) yang didorong oleh sektor-sektor berbasis hilirisasi. Wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh masing-masing sebesar 4,99 persen dan 4,85 persen, terutama karena meningkatnya aktivitas domestik selama bulan Ramadan. Kalimantan tumbuh 4,32 persen didorong oleh Sektor Manufaktur dan Perdagangan. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 3,12 persen didorong oleh Sektor Pertanian. Adapun wilayah Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,69 persen, seiring moderasi aktivitas pertambangan. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang merata di berbagai wilayah, meskipun dengan dorongan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat

dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah.



Gambar 3.4.
Perkembangan Inflasi Indonesia, 2021-2024 (%,yoy)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Harga komoditas pangan terjaga mendukung tren penurunan inflasi. Harga pangan mengalami normalisasi pasca mengalami tekanan akibat El Nino di tahun 2023 yang memengaruhi produksi pertanian. Harga pangan mengalami tren naik pada tahun 2023 hingga awal 2024. Komoditas yang terganggu terutama beras, yang harganya mengalami peningkatan rata-rata hingga 12,2 persen pada tahun 2023 dan rata-rata 11,7 persen pada tahun 2024. Seiring dampak El Nino yang telah termoderasi, peningkatan harga pangan mulai melambat, mendekati harga acuannya. Kegiatan stabilisasi pasokan yang intensif di berbagai daerah, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, juga menjadi kunci dalam stabilitas harga pangan di 2024.

Komponen administered price (AP) dalam tren penurunan sementara komponen inti menunjukkan penguatan. Inflasi AP dalam tren turun sejak akhir 2023, setelah dampak dari penyesuaian kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) mereda. Sementara di tahun 2024, inflasi AP tercatat cukup rendah didukung oleh harga komoditas energi yang tetap stabil sepanjang tahun. Di sisi lain, inflasi inti mengalami penguatan sejak tahun 2023. Penguatan ini lebih didominasi oleh transmisi dari kondisi global, yang ditunjukkan dengan tingginya andil komoditas emas perhiasan yang

mencapai 0,34 persen terhadap inflasi utama. Pergerakan kelompok utama cukup stabil kecuali kelompok perawatan pribadi yang dalam tren meningkat.

Pada tahun 2025 inflasi diperkirakan mencapai 2,5 persen didukung oleh tingkat permintaan yang terjaga. Pada triwulan I 2025, inflasi sempat berada di luar rentang sasaran karena adanya stimulus diskon listrik untuk mendukung daya beli. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut bersifat sementara. Hingga April 2025, inflasi sudah kembali dalam rentang sasaran, mencapai 2,0 persen (yoy), didukung oleh harga pangan dan energi yang terkendali. Inflasi inti di level 2,5 persen, mengindikasikan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi kelompok volatile food terjaga rendah di 0,64 persen dan administered price pada level 1,25 persen, didukung koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Bank Indonesia. Meskipun demikian, risiko transmisi dari ketidakpastian global pada inflasi domestik perlu tetap diwaspadai. Kebijakan yang antisipatif jelang hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Tahun Baru juga perlu tetap dilaksanakan untuk menjaga tingkat harga yang stabil.

Harga pangan di tahun 2025 juga diharapkan tetap stabil di didorong oleh cuaca yang lebih kondusif dan fokus Pemerintah dalam penguatan pasokan pangan dalam negeri. Namun demikian, disrupsi jangka pendek dari beberapa program nasional seperti program MBG terhadap pasokan nasional tetap perlu dikelola secara hati-hati. Penguatan cadangan pangan diharapkan dapat menjadi buffer dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga. Koordinasi TPIP-TPID yang kuat dalam upaya pengendalian inflasi di pusat dan daerah terus didorong untuk mengurangi disparitas harga antarwaktu antardaerah.

Situasi ekonomi global 2024 – 2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Sepanjang tahun 2024, negara-negara Asia, seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia tumbuh solid di tengah situasi ekonomi global yang volatil. Pertumbuhan India didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, meski menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi sektor informal untuk mendukung kinerja manufaktur dan infrastruktur. Ekonomi Tiongkok tumbuh sesuai target Pemerintah Pusat sebesar 5 persen, dengan penguatan ekspor dan permintaan domestik sebagai dampak dari stimulus ekonomi pada triwulan akhir 2024. Di sisi lain, perekonomian negara-negara Eropa mulai membaik, sejalan dengan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat inflasi yang mendekati target European Central Bank (ECB). Meski demikian, Jerman yang merupakan perekonomian terbesar di Eropa terus mengalami

pelemahan sepanjang tahun 2024, terutama akibat pelemahan permintaan domestik, tingginya harga energi, berkurangnya permintaan luar negeri terutama dari Tiongkok, serta kondisi politik domestik yang mempengaruhi investasi. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid yang didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga,
meski di tengah inflasi yang tinggi dan suku bunga yang masih relatif tinggi.

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di AS, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan AS pada mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan internasional. Hanya sepekan setelah diumumkan, tepatnya pada 9 April 2025 AS mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari dan memberlakukan tarif sementara 10 persen untuk negara-negara selain Tiongkok. Sementara itu, Meksiko dan Kanada juga tetap dikenai tarif 25 persen. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 12 Mei 2025, terjadi perubahan arah kebijakan kembali, di mana AS dan Tiongkok sepakat menunda penerapan sanksi tarif baru dan memangkas beban tarif timbal balik secara signifikan, yaitu dari 145 persen menjadi 30 persen untuk impor AS dari Tiongkok, serta dari 125 persen menjadi 10 persen untuk impor Tiongkok dari AS. Meski kesepakatan ini di satu sisi menjadi sinyal positif bagi de-eskalasi perang dagang, perubahan kebijakan yang cepat dan drastis ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan kemungkinan tensi dagang kembali menjadi eskalatif masih perlu diwaspadai.

Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025. Beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini, Korea Selatan, misalnya mengalami kontraksi 0,1 persen yoy, pertama kali sejak akhir tahun 2020. Malaysia, yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9 persen yoy di triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4 persen yoy. Demikian pula Singapura yang menjadi hub bagi perdagangan dan investasi global, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan hingga 5 persen yoy menjadi hanya 3,8 persen yoy. Perekonomian AS, hanya tumbuh 2 persen yoy, sementara triwulan

sebelumnya tumbuh 2,5 persen yoy bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3 persen yoy di triwulan kedua tahun lalu.

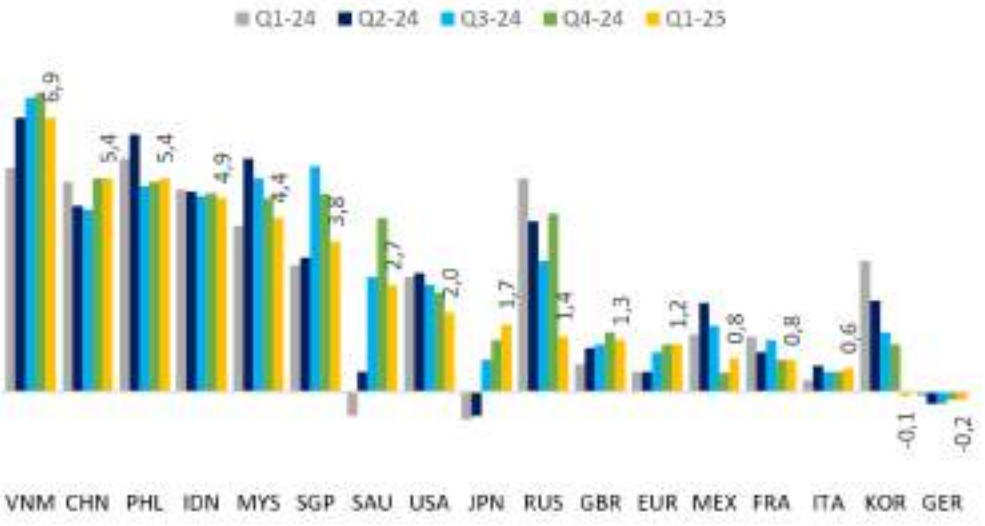
Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal. Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang.

Selain itu, gangguan permintaan global dapat menyebabkan kelebihan pasokan barang, terutama dari Tiongkok, yang mencari pasar alternatif AS. Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan impor barang konsumsi, sehingga perlu kewaspadaan melalui instrumen kebijakan yang mengamankan industri dalam negeri. Namun demikian, kelebihan pasokan bahan baku juga dapat menciptakan peluang dari penurunan biaya produksi yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, apabila keran impor dibuka secara selektif dan strategis.

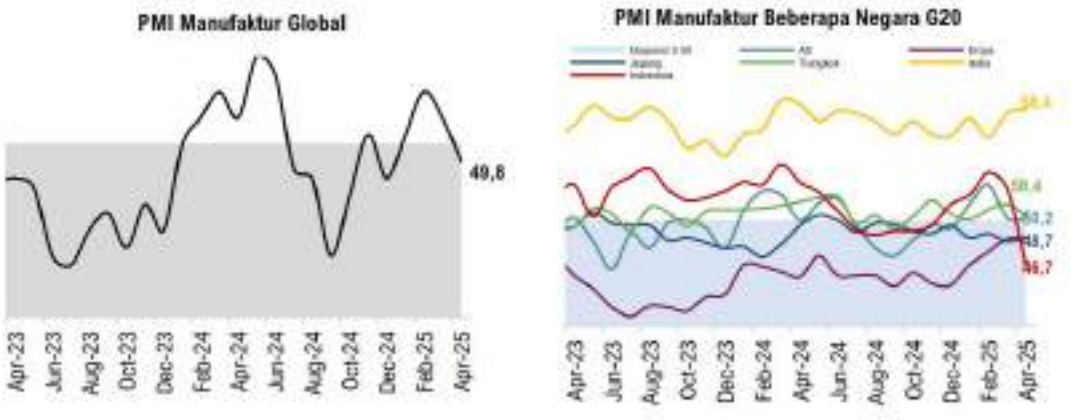
Dari jalur arus modal, ketidakpastian global meningkatkan volatilitas sektor keuangan. Sentimen negatif di pasar keuangan telah memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang ke aset safe haven seperti emas dan obligasi Eropa dan Jepang. Tekanan arus modal keluar ini menyebabkan depresiasi rupiah, yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya impor dan berisiko mendorong inflasi domestik.

Kinerja sektor manufaktur dan jasa juga relatif fluktuatif sepanjang tahun 2024 dan kontraktif pasca pengumuman tarif AS. Performa sektor manufaktur masih lemah terutama pada negara-negara Eropa. Para pengamat memperkirakan bahwa perbaikan performa sektor manufaktur di Eropa tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Negara-negara Eropa masih harus bertumpu dengan performa yang masih positif dari sektor jasa. Amerika Serikat juga didominasi pelemahan sektor manufaktur sepanjang tahun 2024. Tiongkok mengalami perbaikan performa sektor manufaktur selama tahun 2024. Peningkatan performa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan penggunaan peralatan berskala besar dan teknologi tinggi, serta proyeksi peningkatan konsumsi dan investasi dalam negeri yang didukung oleh berbagai stimulus kebijakan dari pemerintah terutama sejak semester kedua 2024. Di antara negara-negara The Group of Twenty (G20), India masih mencatatkan ekspansi yang konsisten kuat sepanjang tahun 2024 dengan capaian tertinggi yaitu dengan level Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur sebesar 59,1. Berbeda dengan sektor manufaktur global,

sektor jasa secara umum menunjukkan performa yang lebih baik. Namun demikian, Jepang cenderung mengalami pelemahan sektor jasa di mana angka PMI Jasa terendah di 2024 sebesar 49,4. Pelemahan permintaan domestik dan global menjadi penyebab utama, dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang tidak memberikan dampak signifikan. Aktivitas manufaktur global mengalami kontraksi pada April 2025, terutama dipicu oleh peningkatan tensi dagang yang mengganggu permintaan ekspor. Di antara negara G20 dan ASEAN-6 hanya sekitar 30,4 persen negara mengalami ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan sisanya berada di zona kontraksi.



Gambar 3.5.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2024&Q1 2025
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)



Gambar 3.6.
Perkembangan Kinerja Manufaktur dan Jasa
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Harga komoditas secara bertahap turun ke level yang lebih rendah dibandingkan periode 2022-2023, dan semakin tertekan pasca eskalasi perang dagang. Harga minyak cenderung bertahan di level rendah bahkan ketika Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus (OPEC+) melakukan pemangkasan produksi. Sejalan dengan minyak, harga batu bara dan gas alam juga mengalami tren koreksi, terutama dipicu oleh penurunan permintaan energi global akibat prospek pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas. Berlanjutnya penurunan harga komoditas energi global dibayangi oleh risiko eskalasi perang dagang yang dapat memicu gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga. Selain itu, pergerakan harga komoditas energi juga dipengaruhi oleh tren transisi menuju energi terbarukan dan dekarbonisasi. Pada komoditas pangan, tren pergerakan harga lebih bervariasi, meski dengan kecenderungan harga di level rendah. Crude Palm Oil (CPO) mengalami tren peningkatan akibat kekhawatiran atas berkurangnya pasokan akibat fenomena El-Nino yang terjadi pada 2024, meski peningkatan tersebut kemudian tertahan di tahun 2025 akibat proyeksi penurunan permintaan global. Sementara itu, harga beras yang sempat mengalami kenaikan drastis sebagai dampak berkurangnya panen akibat El-Nino di awal 2024, juga telah mengalami moderasi harga seiring dengan pasokan yang mulai ternormalisasi. Pada komoditas logam mineral, tren pergerakan harga juga lebih bervariasi, terutama dipicu oleh dinamika permintaan-penawaran industri konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan, serta faktor geopolitik dan regulasi. Selain itu, spekulasi pasar, perubahan biaya produksi, dan fluktuasi nilai tukar juga turut memengaruhi pergerakan harga.



Gambar 3.7.
Perkembangan Kinerja Komoditas, 2024 dan 2025
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Tren penurunan inflasi berlanjut sepanjang tahun 2024, namun beberapa negara kembali mengalami kenaikan inflasi di penghujung 2024 hingga awal 2025. Di AS, inflasi sempat mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir pada Agustus 2024, sebelum kemudian naik ke level 3,0 persen pada Januari 2025 dan kini bertahan di level 2,4 persen pada Maret 2025. Di zona Eropa, inflasi menunjukkan tren penurunan hingga mencapai titik terendahnya pada September 2024, di level 1,7 persen, kemudian kembali naik ke level 2,5 persen pada Januari 2025 dan turun ke level 2,2 persen pada April 2025. Inflasi di Inggris juga turun signifikan dari rata-rata 7,4 persen pada 2023 menjadi 2,5 persen sepanjang 2024 dan kini berada di level 2,6 persen pada Maret 2025. Di Tiongkok, inflasi sepanjang 2024 stabil di level yang sangat rendah (mendekati 0 persen) bahkan beberapa kali sempat mengalami deflasi dan berada di level 0,1 persen pada Maret 2025, mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Sementara itu, di India inflasi menurun dari rata-rata 5,7 persen pada 2023 menjadi 5,0 persen di 2024, dan per Maret 2025 telah berada di level 3,3 persen. Meski secara umum berada dalam tren menurun, eskalasi tensi dagang yang ditunjukkan melalui perang tarif sejak awal 2025 berpotensi mendorong kenaikan inflasi, tidak hanya di negara-negara yang terlibat perang tarif secara langsung, melainkan juga negara-negara mitra dagang yang terhubung melalui rantai pasok global.

Melandainya inflasi global memberi ruang bagi bank sentral di berbagai negara untuk melonggarkan kebijakan moneter, namun eskalasi tensi dagang dapat meningkatkan kompleksitas kebijakan moneter di berbagai negara. Sejak triwulan III 2024, The Fed menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin dari 5,50 persen yang bertahan sejak 2023 hingga berada di level 4,50 persen hingga April 2025. Meski pasar memperkirakan the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga hingga 100 bps pada tahun 2025 (naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya total 50 bps), kebijakan tarif agresif AS memicu dilema kebijakan the Fed, antara memangkas suku bunga untuk stimulus ekonomi atau mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, European Central Bank (ECB) juga memangkas suku bunga dari 4,5 persen menjadi 2,4 persen pada April 2025. Bank of England (BoE) mengikuti langkah serupa dengan tiga kali pemotongan suku bunga, dari 5,25 persen menjadi 4,5 persen hingga April 2025. Di negara berkembang, Tiongkok menurunkan suku bunganya dua kali pada 2024, dari 3,45 persen menjadi 3,35 persen, dan akhirnya bertahan di 3,10 persen hingga April 2025. Sementara itu, India telah menurunkan suku bunga dari level 6,50 persen sejak April

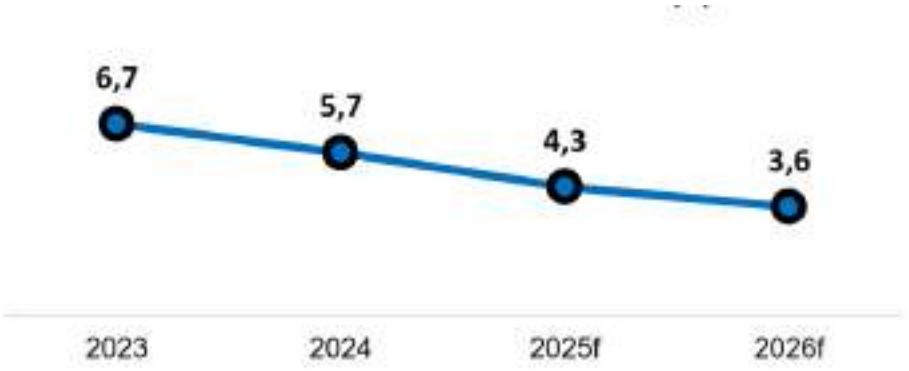
2023 ke 6,0 persen di 2025 seiring dengan inflasi yang telah kembali ke target 4 persen dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan masih akan lemah. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Angka ini turun cukup jauh dari proyeksi sebelumnya, masing-masing sebesar 0,5 poin persentase dan 0,3 poin persentase. Angka proyeksi pertumbuhan ini tetap di bawah rata-rata pertumbuhan global tahunan pada periode 2000–2019 sebesar 3,7 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.



Gambar 3.8.
Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023-2026 (*year on year*)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Moderasi inflasi diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2025-2026 meski dengan laju yang lebih lambat, terutama akibat faktor geopolitik serta eskalasi tensi dagang. Dalam WEO April 2025, inflasi global diperkirakan oleh International Monetary Fund (IMF) akan turun menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Laju penurunan inflasi global pada proyeksi IMF di bulan April lebih tinggi masing-masing sebesar 0,1 bps dibanding proyeksi Januari. Di AS, inflasi diperkirakan mendekati target 2 persen namun tetap sedikit lebih tinggi, sementara di zona Eropa penurunan inflasi diperkirakan akan lebih on-track, sedangkan di Tiongkok inflasi rendah masih diperkirakan berlanjut.



Gambar 3.9.
Inflasi Global, 2023-2026 (*year on year*)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Pelonggaran moneter global yang dimulai sejak paruh kedua 2024 diperkirakan masih berlanjut meski suku bunga diperkirakan masih tetap lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2010-an. Pemangkasan suku bunga di AS diperkirakan akan turun dengan laju yang lebih lambat dibanding perkiraan sebelumnya, sehingga kembali memicu sentimen high for longer, sejalan dengan kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan mendorong inflasi. Hal ini selanjutnya memicu apresiasi dolar AS serta kenaikan imbal hasil obligasi AS yang juga dapat membatasi pelonggaran moneter di negara berkembang. Di sisi lain, negara maju di zona Eropa diperkirakan akan memangkas suku bunga dengan laju yang lebih cepat dibanding AS akibat progres pengendalian inflasi yang relatif lebih on-track dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah. Perbedaan dinamika inflasi antara AS dengan negara-negara lainnya dapat memicu divergensi kebijakan moneter di berbagai negara, yang selanjutnya memperlebar kesenjangan suku bunga kebijakan antara AS dan negara-negara lainnya. Perbedaan kebijakan moneter antarnegara juga dapat memicu pergerakan signifikan pada nilai tukar dan arus modal, terutama di negara berkembang.

Perdagangan global diproyeksikan tumbuh melambat sepanjang 2025-2026. Sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 3.6, IMF memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan akan turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 1,7 persen pada 2025 dan 2,5 persen pada 2026. Penurunan volume perdagangan ini diakibatkan oleh meningkatnya restriksi perdagangan dan lemahnya pertumbuhan output serta investasi. Eskalasi perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif perdagangan yang agresif oleh AS sejak awal tahun 2024 juga berisiko memicu instabilitas perdagangan internasional.



Gambar 3.10.
Volume Perdagangan Global, 2023-2026 (*year on year*)
Sumber: KEM-PPKF 2026 (Pemutakhiran)

Tabel 3.1.
Sasaran Indikator Makro Provinsi Kepulauan Riau dalam RKP Tahun 2026

No	Sasaran Indikator	Target
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 - 6,4
2.	PDRB per Kapita (juta)	181,7 - 187,2
3.	Kontribusi PDRB Provinsi	1,6
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,00 - 4,00
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92 - 6,35
6.	Rasio Gini	0,296 - 0,319
7.	Indeks Modal Manusia	0,63
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,20

Sumber: RKP Tahun 2026, (diolah)

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau No. 12/02/21/Th. XXI, 5 Februari 2026, kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid, akselerasi yang konsisten, ditopang oleh ekspansi sektor industri pengolahan, peningkatan investasi, serta penguatan kinerja perdagangan luar negeri. Struktur ekonomi yang relatif terkonsentrasi pada sektor industri dan konstruksi memberikan daya dorong yang kuat, namun sekaligus menuntut penguatan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,89%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,54% (yoy). Adapun secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,94% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada periode ini juga tercatat sebagai yang tertinggi se-Sumatera. Dari sisi nominal, PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan IV-2025 mencapai Rp102.137,24 miliar, dengan PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp172,46 juta. Dalam lingkup regional, kontribusi PDRB Kepulauan Riau terhadap PDRB Pulau Sumatera mencapai 7,57 persen.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada keseluruhan tahun 2025 didorong oleh kinerja 4 lapangan usaha (LU) utama yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yakni:

a. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh 7,52% (ctc), dengan andil 3,14%.
b. Lapangan Usaha Pertambangan tumbuh 16,01% (ctc), dengan andil 1,57%.
c. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh 5,30% (ctc), dengan andil 1,03%.
d. Lapangan Usaha Perdagangan tumbuh 7,55% (ctc), dengan andil 0,62%.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponen pengeluaran. Tiga komponen utama yang memberikan andil pertumbuhan sebagai berikut:

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi tumbuh 6,81% (ctc), dengan andil 2,81%.
b. Net Ekspor tumbuh 20,52% (ctc), dengan andil 2,93%.
c. Konsumsi RT tumbuh 3,84% (ctc), dengan andil 1,51%.

Memasuki tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akan tumbuh di kisaran 6,38% - 7,18% (yoy). Prospek perekonomian yang positif di Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh:

a. Kepastian iklim investasi dengan diterbitkannya PP No. 25 dan 28 Tahun 2025 yang menyederhanakan regulasi perizinan di Kepulauan Riau.
b. Berlanjutnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun investasi sektor prioritas BP Batam tahun 2026 yang mencakup industri data center, semikonduktor, energi transisi, serta keberlanjutan Pengembangan Kawasan Industri (KI) mendorong pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, serta meningkatkan serapan tenaga kerja.

c. Pengembangan energi hijau mendorong meningkatnya permintaan sel fotovoltaik sebagai komponen utama industri panel surya, sekaligus menarik investasi pada sektor tersebut untuk mendukung ekspor listrik bersih.

Beberapa risiko pertumbuhan ekonomi yang juga perlu menjadi perhatian pada tahun 2026, antara lain:

a. Normalisasi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan sejalan dengan high-base effect pada tahun 2025.
b. Ketidakpastian global yang masih terus berlanjut akibat adanya sejumlah konflik geopolitik.
c. Persaingan daya tarik investasi regional, khususnya dengan Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ).

Stabilitas inflasi Provinsi Kepulauan Riau diprakirakan masih tetap terjaga di rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026. Sejumlah risiko yang dapat memengaruhi inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 antara lain kondisi cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah produsen yang dapat memengaruhi pasokan pangan di Provinsi Kepulauan Riau dan berlanjutnya ketidakpastian global yang berpengaruh pada komoditas inflasi inti. Di sisi lain, sinergi dan kolaborasi dalam TPID dengan pengendalian inflasi dalam *framework* 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang diwujudkan melalui upaya GNPIP diprakirakan dapat menahan inflasi yang akan terjaga stabil pada rentang sasaran.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 TW I	Target P-RKPD 2026
1	Rasio Gini	Indeks	0,385	0,359-0,371	Belum Rilis	0,359-0,371
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,94	5,46-7,38	7,04	5,46-7,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,26	4,17-3,77	Belum Rilis	4,17-3,77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,35	6,29-6,22	6,87	6,29-6,22
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	-	0,61-0,63	Belum Rilis	0,61-0,63
6	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	172,46	180,77-191,90	Belum Rilis	180,77-191,90

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat meliputi:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: (a) Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system *One Single Submission-Risk Based Approach, (OSS RBA);* (b) Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik; dan (c) Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a) Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*, b) Mendukung implementasi kebijakan *short term* visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri, c) Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS *cross border*.
6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses pasar,

maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang berorientasi ekspor.

8. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (a) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (b) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (c) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (d) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (e) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (f) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (g) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
9. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
10. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
11. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
12. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor. 6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

13. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

3.1.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan: Klaster Natuna-Kepulauan Anambas

Arah kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah kepulauan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan dan dominasi wilayah laut yang luas, Kepulauan Riau memiliki keunggulan komparatif yang kuat pada sektor-sektor berbasis maritim. Keunggulan tersebut semakin strategis karena posisi geografis Kepulauan Riau berada pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional, sekaligus berperan sebagai kawasan perbatasan dan beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi tersebut menempatkan Kepulauan Riau tidak hanya sebagai wilayah administrasi kepulauan, tetapi juga sebagai simpul strategis perdagangan, logistik, mobilitas barang dan manusia, serta interaksi ekonomi regional dan global. Arah pembangunan kewilayahan difokuskan pada optimalisasi keunggulan geografis, sumber daya maritim, serta konektivitas antarpulau sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor-sektor unggulan, meliputi perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan yang dikelola secara berkelanjutan, kawasan industri, serta sektor jasa bernilai tambah tinggi, terutama pariwisata bahari dan pariwisata berbasis budaya menjadi perhatian utama dimana Klaster Wilayah Natuna-Kepulauan Anambas dapat berperan lebih jauh untuk mewujudkannya.

Klaster Wilayah Natuna-Kepulauan Anambas memiliki posisi strategis sebagai kawasan kepulauan, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Secara geografis, klaster ini berhadapan langsung dengan kawasan regional seperti Malaysia bagian timur, Vietnam, dan perairan Laut Tiongkok Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Natuna-Kepulauan Anambas memiliki arti penting tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek geopolitik, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah negara.

Arah pembangunan **Klaster Natuna**-Kepulauan Anambas **difokuskan** pada penguatan fondasi dasar pembangunan sebagai prasyarat percepatan pertumbuhan kawasan perbatasan dan kepulauan terluar. **Prioritas utama** diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, serta pelayanan publik lainnya. Pemenuhan layanan dasar menjadi penting karena kualitas pembangunan

ekonomi di wilayah kepulauan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan minimum.

Dari sisi infrastruktur, percepatan penyediaan infrastruktur strategis menjadi agenda utama yang perlu terus didorong. Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan serta bandara menjadi kunci untuk memperkuat konektivitas antarpulau, membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya logistik, dan memperluas akses terhadap barang serta jasa. Dalam konteks wilayah kepulauan, konektivitas laut dan udara tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen utama peningkatan daya saing ekonomi wilayah.

Selain infrastruktur fisik, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menjadi kebutuhan strategis. Infrastruktur digital diperlukan untuk mendukung transformasi pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi, serta membuka peluang pengembangan ekonomi digital di wilayah kepulauan. Dengan demikian, konektivitas di Klaster Natuna-Kepulauan Anambas perlu dipahami secara menyeluruh, mencakup konektivitas fisik, konektivitas logistik, dan konektivitas digital.

Dari sisi ekonomi wilayah, Klaster Natuna–Kepulauan Anambas diarahkan pada penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya kelautan, keindahan alam, dan karakter sosial budaya lokal. Pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi dua penggerak utama yang perlu dikembangkan secara terintegrasi. Pada sektor pariwisata, potensi kepulauan, kekayaan ekosistem laut, lanskap alam, serta keunikan budaya lokal merupakan modal penting untuk membangun destinasi wisata yang berdaya saing.

Kabupaten Natuna memiliki potensi Geopark Tanjung Datuk yang dapat dikembangkan sebagai destinasi unggulan berkelas internasional. Sementara itu, Kepulauan Anambas memiliki kekuatan pada keindahan alam bawah laut, gugusan pulau eksotis, dan potensi wisata bahari premium. Pengembangan destinasi tersebut perlu didukung oleh peningkatan akses transportasi, penyediaan sarana dan prasarana wisata yang berwawasan lingkungan, akomodasi ramah lingkungan, pusat layanan informasi wisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata lokal.

Pengembangan pariwisata di klaster ini perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kompetensi pemandu wisata, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat sekitar destinasi perlu

terus ditingkatkan agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Selain pariwisata, ekonomi biru menjadi pilar strategis pembangunan Klaster Natuna–Kepulauan Anambas. Pengembangan ekonomi biru perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada sisi hulu, peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya harus didukung oleh teknologi modern, tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap ekosistem laut. Pada saat yang sama, pengelolaan sumber daya pertambangan, termasuk minyak dan gas bumi serta mineral lainnya, perlu diarahkan agar tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pada sisi hilir, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, galangan kapal, serta industri pendukung kemaritiman menjadi agenda strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Tantangan utama wilayah berbasis sumber daya sering kali terletak pada rendahnya nilai tambah karena komoditas masih cenderung keluar dalam bentuk bahan mentah. Oleh karena itu, penguatan industri hilir menjadi penting agar struktur ekonomi wilayah tidak hanya bertumpu pada ekstraksi sumber daya, tetapi juga pada pengolahan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Dalam konteks Kabupaten Natuna, arah kebijakan tersebut menjadi sangat relevan apabila dilihat dari capaian indikator makro pembangunan tahun 2025 dan target tahun 2026.

Tabel 3.3.
Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Natuna Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Tahun 2026	Realisasi TW II 2026
1	PDRB Perkapita	(Rp. Juta)	88,77	91,24	88,77
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,81	4,74	4,81
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%)	10,49	1,6	15,37
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,23	3,35	3,23
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	80,87	79,99	80,87
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,98	4,02	3,98
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,94	79,99	78,94

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2026

Sebagian besar indikator utama, terutama pada PDRB per kapita tanpa migas, pertumbuhan ekonomi nonmigas, daya saing daerah, penurunan kemiskinan, dan peningkatan IPM menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif agar target yang lebih baik di tahun 2027 mampu

dicapai. Namun demikian, terdapat realisasi kinerja pada dua indikator, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah melampaui target pada tahun 2027. Dengan kata lain, koreksi terhadap target dua indikator tersebut menjadi logis untuk dilakukan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan beberapa asumsi dan kondisi. Asumsi dasar ekonomi global dan nasional menjadi salah satu pertimbangan. Perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau juga turut diperhitungkan. Selain itu, kondisi riil perekonomian di Kabupaten Natuna sendiri menjadi bahan pertimbangan utama. Kebijakan ini bertujuan mengimplementasikan program-program pembangunan. Visi dan misi Kepala Daerah juga menjadi sasaran yang ingin diwujudkan. Permasalahan daerah yang dihadapi menjadi dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Prioritas tersebut diselaraskan dengan tahun rencana yang telah ditetapkan. Tabel berikut ini menerangkan kinerja dan proyeksi ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2026.

Tabel 3.4.
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 TW 1	Target P-RKPD 2026
1.	PDRB Perkapita (Migas)	(Rp. Juta)	281,43	304,21	39,71	304,21
2.	PDRB Perkapita (Nonmigas)	(Rp. Juta)	88,77	91,24	11,02	91,24
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,81	4,74	belum rilis	4,74
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Migas)	(%)	10,49	1,60	15,37	10,49*
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Non Migas)	%	-1,61	3,27	0,63	3,27
6.	Indeks Gini	Indeks	0,263	0,284	belum rilis	0,284*
7.	Tingka Pengangguran Terbuka	(%)	3,98	4,02	belum rilis	3,98*
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,94	79,99	belum rilis	79,99

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029
Keterangan: *mengikuti realisasi tahun 2025.

Kinerja makro ekonomi Kabupaten Natuna pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang perlu menjadi dasar dalam melakukan penajaman target pembangunan tahun 2026. Evaluasi terhadap realisasi tahun 2025 memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator yang telah

mencapai, bahkan melampaui, target yang ditetapkan dalam RKPD. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penetapan target P-RKPD Tahun 2026 perlu dilakukan secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan realisasi kinerja aktual sebagai baseline, perkembangan ekonomi terkini, serta kapasitas pencapaian daerah.

Pada indikator laju pertumbuhan ekonomi sektor migas, realisasi tahun 2025 mencapai 10,49 persen, sedangkan target yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 1,60 persen. Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, realisasi Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 15,37 persen, yang semakin memperkuat indikasi bahwa kinerja sektor migas berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan asumsi awal perencanaan. Oleh karena itu, penetapan Target P-RKPD Tahun 2026 sebesar 10,49 persen dapat dipandang lebih relevan dan memiliki landasan empiris yang lebih kuat dibandingkan mempertahankan target awal sebesar 1,60 persen.

Penyesuaian tersebut bukan semata-mata merupakan peningkatan angka target, tetapi merupakan bentuk recalibration target berdasarkan capaian aktual (evidence-based target adjustment). Realisasi 10,49 persen pada tahun 2025 merupakan kinerja yang telah terbukti dapat dicapai, sehingga secara akademis dapat digunakan sebagai benchmark dalam menentukan target tahun berjalan. Dengan demikian, target P-RKPD 2026 sebesar 10,49 persen mencerminkan pendekatan perencanaan yang berbasis pada kinerja aktual dan menghindari penetapan target yang terlalu rendah dibandingkan dengan kapasitas pencapaian daerah.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi nonmigas menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada tahun 2025, sektor nonmigas mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen, sedangkan target tahun 2026 ditetapkan sebesar 3,27 persen. Dengan demikian, target 2026 tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pemulihan sebesar 4,88 poin persentase dibandingkan realisasi tahun 2025. Meskipun demikian, realisasi Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 0,63 persen, yang memberikan indikasi awal adanya perbaikan kinerja sektor nonmigas.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, target pertumbuhan ekonomi nonmigas sebesar 3,27 persen dapat dipertahankan sebagai target pemulihan dan akselerasi ekonomi, dengan mempertimbangkan bahwa target tersebut secara substansial lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Capaian Triwulan I 2026 sebesar 0,63 persen juga menunjukkan bahwa arah perkembangan ekonomi mulai bergerak menuju kondisi yang lebih positif. Oleh karena itu, pencapaian target 3,27 persen perlu didukung oleh kebijakan yang diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi nonmigas, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan pendekatan penetapan target antara sektor migas dan nonmigas. Pada sektor migas, realisasi 2025 yang telah mencapai 10,49 persen dan capaian Triwulan I 2026 sebesar 15,37 persen menunjukkan bahwa target awal 1,60 persen relatif terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan aktual. Oleh sebab itu, target P-RKPD sebesar 10,49 persen merupakan bentuk penyesuaian yang lebih mencerminkan kinerja aktual. Sebaliknya, pada sektor nonmigas, realisasi 2025 yang masih negatif mengharuskan target 3,27 persen diposisikan sebagai target pemulihan yang bersifat akseleratif, bukan sebagai target yang mengikuti kecenderungan historis secara mekanis.

Pada indikator PDRB per kapita sektor migas, realisasi tahun 2025 sebesar Rp281,43 juta diarahkan meningkat menjadi Rp304,21 juta pada tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya ekspektasi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan sektor migas. Sementara itu, PDRB per kapita nonmigas meningkat dari Rp88,77 juta menjadi Rp91,24 juta. Meskipun peningkatannya relatif moderat, indikator tersebut tetap perlu ditempatkan dalam konteks pemulihan sektor nonmigas yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

Pada aspek distribusi pendapatan, Indeks Gini tahun 2025 tercatat sebesar 0,263, sedangkan target tahun 2026 sebesar 0,284. Kenaikan target tersebut perlu memperoleh perhatian dalam proses penajaman P-RKPD karena peningkatan Indeks Gini secara umum menunjukkan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat terdistribusi secara lebih merata kepada masyarakat.

Hal serupa perlu diperhatikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Realisasi tahun 2025 sebesar 3,98 persen, sementara target tahun 2026 sebesar 4,02 persen. Secara substantif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa target 2026 memberikan ruang terhadap peningkatan tingkat pengangguran dibandingkan capaian aktual tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, target TPT perlu ditinjau dengan mempertimbangkan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja, terutama melalui penguatan sektor nonmigas.

Berdasarkan keseluruhan perkembangan tersebut, penetapan Target P-RKPD Tahun 2026 perlu didasarkan pada prinsip konsistensi antara evaluasi kinerja, kondisi aktual, dan proyeksi pembangunan. Realisasi

tahun 2025 yang telah melampaui target tidak seharusnya diperlakukan sebagai alasan untuk mempertahankan target lama, melainkan sebagai informasi empiris untuk melakukan penajaman target. Dengan pendekatan tersebut, target pembangunan menjadi lebih realistis, terukur, sekaligus memiliki tingkat tantangan yang sesuai dengan kapasitas dan perkembangan ekonomi daerah.

Secara khusus, realisasi pertumbuhan ekonomi sektor migas sebesar 10,49 persen pada tahun 2025 menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan Target P-RKPD 2026 sebesar 10,49 persen, menggantikan target RKPD sebelumnya sebesar 1,60 persen yang sudah tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi aktual. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi nonmigas sebesar 3,27 persen tetap relevan sebagai target pemulihan, mengingat realisasi tahun 2025 masih sebesar -1,61 persen dan realisasi Triwulan I 2026 baru mencapai 0,63 persen.

Dengan demikian, penajaman target P-RKPD 2026 Kabupaten Natuna tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi perlu dikaitkan dengan peningkatan PDRB per kapita, pengendalian ketimpangan pendapatan, serta penciptaan kesempatan kerja. Pendekatan ini penting agar keberhasilan sektor ekonomi, khususnya sektor migas, dapat memberikan spillover effect yang lebih besar terhadap sektor nonmigas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara keseluruhan.

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha tahun 2022 hingga Triwulan I 2026, terlihat bahwa struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan nilai mencapai 10.385,84 pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 10.362,92 dan 9.728,94, sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 11.297,79. Pada Triwulan I 2026, sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebesar 2.873,91, menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Selain pertambangan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Nilai sektor ini meningkat dari 1.768,01 pada tahun 2022 menjadi 1.860,38 pada tahun 2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 1.803,10. Pada Triwulan I 2026, sektor ini mencatat nilai sebesar 447,92. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki peran strategis,

meskipun mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi produksi dan faktor eksternal lainnya.

Sektor Konstruksi menjadi salah satu sektor pendukung utama dengan nilai yang relatif stabil, yaitu meningkat dari 1.070,33 pada tahun 2022 menjadi 1.122,33 pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 1.061,63 pada tahun 2025. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, meningkat dari 478,21 pada tahun 2022 menjadi 559,30 pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan perdagangan di daerah.

Beberapa sektor jasa juga menunjukkan perkembangan positif, terutama Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat dari 296,07 pada tahun 2022 menjadi 348,57 pada tahun 2025, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami peningkatan dari 50,37 menjadi 57,34 pada periode yang sama. Peningkatan sektor-sektor jasa tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel 3.5.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2022-Triwulan 1 2026 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025	TW-1 2026
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.768,01	1.838,69	1.860,38	1.803,1	447.92
Pertambangan dan Penggalian	10.385,84	10.362,92	9.728,94	11.297,79	2873.91
Industri Pengolahan	117,37	117,4	120,96	120,7	30.38
Pengadaan Listrik dan Gas	11,91	12,65	13,45	14	3.61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,1	1,13	1,13	1,14	0.23
Konstruksi	1.070,33	1.113,38	1.122,33	1.061,63	262.36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	478,21	496,47	525,96	559,3	144.11
Transportasi dan Pergudangan	88,67	92,86	90,78	92,91	18.71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,78	77,37	79,69	81,27	18.55
Informasi dan Komunikasi	146,32	146,44	146,46	126,78	32.47
Jasa Keuangan dan Asuransi	21,43	22,04	22,55	23,1	5.86
Real Estate	114,41	118,1	126,17	126,1	32.69
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296,07	298,23	327,07	348,57	75.38
Jasa Pendidikan	26,73	26,89	28,07	29,67	7.24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,37	50,89	53,64	57,34	14.98
Jasa lainnya	10,17	10,63	11,04	11,36	2.94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**14.661,76**	**14.786,1**	**14.258,64**	**15.754,76**	**3971.33**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)	**4.294,8**	**4.442,9**	**4.550,4**	**4.477,2**	**1.102,1**

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

Secara keseluruhan, nilai PDRB total mengalami peningkatan dari 14.661,76 pada tahun 2022 menjadi 14.786,10 pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14.258,64, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 15.754,76. Pada Triwulan I 2026, nilai PDRB tercatat sebesar 3.971,33. Sementara itu, PDRB tanpa migas menunjukkan tren yang relatif stabil, meningkat dari 4.294,80 pada tahun 2022 menjadi 4.550,40 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 4.477,20 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan, sehingga diperlukan penguatan sektor nonmigas seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor produktif lainnya untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3.6.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2022-Triwulan 1 2026

Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025	TW-1 2026
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,28	4	1,18	-3,08	0.53
Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-0,22	-6,12	16,13	-8.64
Industri Pengolahan	1,2	0,02	3,04	-0,22	0.22
Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	6,16	6,34	4,10	0.45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	3,43	0,05	0,14	-32.19
Konstruksi	0,51	4,02	0,8	-5,41	-0.46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,71	3,82	5,94	6,34	4.54
Transportasi dan Pergudangan	11,74	4,72	-2,24	2,35	-31.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,75	3,46	3,01	1,98	3.35
Informasi dan Komunikasi	4,23	0,08	0,01	-13,44	5.4
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	2,82	2,33	2,41	-0.79
Real Estate	3,52	3,22	6,83	-0,05	1.1
Jasa Perusahaan	8,23	1,99	-1,13	0,28	0.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,45	0,73	9,67	6,57	-15.26
Jasa Pendidikan	3,11	0,61	4,38	5,69	-2.2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,61	1,02	5,4	6,91	2.88
Jasa lainnya	3,6	4,46	3,86	2,93	1.9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)	**0,11**	**0,85**	**-3,57**	**-1,61**	**0,63**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)	**2,8**	**3,45**	**2,42**	**10,49**	**15,37**

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2022–Triwulan I 2026, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami dinamika yang cukup berfluktuasi selama periode tersebut. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB total tercatat sebesar 0,11 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 0,85 persen pada tahun 2023, kemudian mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2024 sebesar -3,57 persen dan kembali terkontraksi pada tahun 2025 sebesar -1,61 persen. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan PDRB tercatat sebesar -6,67 persen, yang menunjukkan adanya perlambatan ekonomi pada awal tahun 2026. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor dominan, khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah.

Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan pertumbuhan yang sangat berfluktuasi. Pada tahun 2022 dan 2023 sektor ini mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,96 persen dan -0,22 persen, kemudian kembali mengalami penurunan yang lebih dalam pada tahun 2024 sebesar -6,12 persen. Namun, pada tahun 2025 sektor ini tumbuh signifikan sebesar 16,13 persen, yang menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, pada Triwulan I 2026 sektor ini kembali mengalami kontraksi sebesar -8,64 persen, sehingga memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai salah satu sektor utama nonmigas menunjukkan perkembangan yang relatif positif hingga tahun 2024. Pertumbuhan sektor ini meningkat dari 3,28 persen pada tahun 2022 menjadi 4 persen pada tahun 2023, kemudian melambat menjadi 1,18 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -3,08 persen, namun mulai menunjukkan perbaikan pada Triwulan I 2026 dengan pertumbuhan sebesar 0,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, meskipun menghadapi tantangan terkait produksi dan kondisi pasar.

Sektor-sektor yang berbasis konsumsi dan aktivitas masyarakat menunjukkan kinerja yang lebih stabil. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan positif secara konsisten, yaitu dari 4,71 persen pada tahun 2022 hingga mencapai 6,34 persen pada tahun 2025, serta tumbuh 4,54 persen pada Triwulan I 2026. Hal serupa terlihat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terus tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan, dari 3,75 persen pada tahun 2022 menjadi 1,98 persen pada tahun 2025, dan kembali tumbuh 3,35 persen pada Triwulan I 2026. Perkembangan ini

menunjukkan adanya pemulihan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan jasa pendukung ekonomi masyarakat.

Beberapa sektor jasa juga mencatat pertumbuhan yang cukup baik sepanjang periode pengamatan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 9,67 persen dan tetap tumbuh 6,57 persen pada tahun 2025, meskipun mengalami kontraksi pada Triwulan I 2026 sebesar -15,26 persen. Sementara itu, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 6,91 persen pada tahun 2025 dan masih tumbuh 2,88 persen pada Triwulan I 2026. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar.

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami perlambatan, seperti Informasi dan Komunikasi yang tumbuh negatif sebesar -13,44 persen pada tahun 2025 setelah sebelumnya tumbuh positif, serta Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi cukup besar pada Triwulan I 2026 sebesar -31,63 persen. Penurunan pada sektor transportasi dapat berkaitan dengan perubahan aktivitas mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi antarwilayah.

Selain faktor pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh ukuran dari tiap-tiap sektor dalam pembentukan PDRB. Maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna secara struktural tidak dapat terlepas dari pengaruh ukuran setiap sektor dalam PDRB. Berikut ini distribusi persentase PDRB Kabupaten Natuna menurut lapangan usaha dalam kurun 2021-2025.

Tabel 3.7.
Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna (persen), 2021–2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**12,32**	**11,49**	**12,82**	**13,64**	**12,92**
Pertambangan dan Penggalian	**70,02**	**72,44**	**69,56**	**67,13**	**68,60**
Industri Pengolahan	0,82	0,74	0,78	0,86	0,82
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	**7,78**	**6,95**	**7,76**	**8,15**	**7,72**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**3,58**	**3,35**	**3,79**	**4,37**	**4,41**
Transportasi dan Pergudangan	0,61	0,64	0,71	0,71	0,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,51	0,46	0,5	0,57	0,54
Informasi dan Komunikasi	0,76	0,68	0,72	0,75	0,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15
Real Estate	0,7	0,64	0,71	0,8	0,77
Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**2,02**	**1,82**	**1,8**	**2,09**	**1,99**
Jasa Pendidikan	0,22	0,2	0,21	0,23	0,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,31	0,33	0,37	0,38
Jasa lainnya	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (TANPA MIGAS)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (DENGAN MIGAS)	**30,12**	**27,68**	**30,57**	**33,02**	**31,54**

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

Distribusi lapangan usaha memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna karena struktur PDRB daerah masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Berdasarkan rata-rata periode 2021–2025, Pertambangan dan Penggalian menyumbang sekitar 69,55 persen terhadap PDRB, jauh lebih besar dibandingkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,64 persen, Konstruksi 7,67 persen, Perdagangan 3,90 persen, dan Administrasi Pemerintahan 1,94 persen. Konsentrasi tersebut menyebabkan perubahan kinerja sektor pertambangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna secara keseluruhan.

Besarnya distribusi sektor pertambangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Natuna sangat sensitif terhadap naik-turunnya aktivitas sektor ekstraktif. Ketika produksi, ekspor, atau nilai tambah pertambangan meningkat, dampaknya terhadap pertumbuhan PDRB secara agregat relatif besar karena sektor ini memiliki bobot yang dominan. Sebaliknya, apabila terjadi perlambatan pada sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi daerah juga berpotensi mengalami tekanan meskipun sektor-sektor lain masih tumbuh positif. Dengan kata lain, struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi dapat menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tetapi sekaligus lebih rentan terhadap guncangan pada sektor dominan.

Di sisi lain, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki peran penting sebagai sumber pertumbuhan di luar pertambangan. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,64 persen, perubahan kinerja sektor ini cukup berarti terhadap perekonomian daerah. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap PDRB, sektor tersebut mempunyai potensi menciptakan keterkaitan ekonomi dengan perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

Konstruksi juga memiliki pengaruh penting karena rata-rata menyumbang 7,67 persen. Pertumbuhan konstruksi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sektor itu sendiri, tetapi juga mendukung kapasitas ekonomi sektor lain melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas produksi, konektivitas, dan sarana pelayanan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan investasi pembangunan dapat menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian Kabupaten Natuna.

Sementara itu, Perdagangan yang memiliki rata-rata kontribusi 3,90 persen menunjukkan kecenderungan meningkat dari 3,35 persen pada 2022 menjadi 4,41 persen pada 2025. Perkembangan ini mengindikasikan semakin besarnya peran aktivitas distribusi dan transaksi ekonomi masyarakat. Meskipun bobotnya lebih kecil dibandingkan pertambangan, pertumbuhan perdagangan dapat menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi domestik dan menjadi penghubung antara produksi dengan konsumsi.

Dengan demikian, distribusi sektor menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Sektor dengan kontribusi besar memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan agregat, tetapi ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor juga meningkatkan risiko ekonomi. Dalam kasus Natuna, dominasi pertambangan membuat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor tersebut. Karena itu, strategi pembangunan tidak hanya perlu mempertahankan kinerja sektor unggulan, tetapi juga memperbesar peran sektor pertanian dan perikanan, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, serta jasa agar sumber pertumbuhan menjadi lebih terdiversifikasi.

Tabel 3.8.
Rata-Rata Kontribusi 5 Sektor Utama PDRB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2021-2025 (persen)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata 2021-2025
Pertambangan dan Penggalian	70,02	72,44	69,56	67,13	68,6	69,55
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,32	11,49	12,82	13,64	12,92	12,64
Konstruksi	7,78	6,95	7,76	8,15	7,72	7,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,58	3,35	3,79	4,37	4,41	3,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	1,82	1,8	2,09	1,99	1,94

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2026 (diolah).

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan tahunan yang lebih baik di tahun 2025. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi meningkat di angka 10,48%, tertinggi

sepanjang berdirinya Kabupaten Natuna. Sedangkan berdasarkan perolehan PDRB non migas, pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 mampu membaik di angka minus 1,61 %, dimana pada tahun sebelumnya (2024) sebesar minus 3,57%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I 2026 tercatat masih mempertahankan momentum yang positif di angka 0,63% (non migas) dan 15,37% (dengan migas).

3.1.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator lain yang dapat menunjukkan penciptaan nilai ekonomi rata-rata dalam output PDRB Kabupaten Natuna. Indikator ini dihitung dengan membagi nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah penduduk serta potensi sumber daya alam dan faktor produksi setempat. Meskipun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, indikator ini tetap relevan untuk mengamati tren peningkatan pendapatan agregat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan migas menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, PDRB per kapita dengan migas tercatat sebesar Rp 20,87 juta dan mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 24,27 juta pada tahun 2022. Namun, pertumbuhan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan bertahap menjadi Rp 23,51 juta dan Rp 22,69 juta. Memasuki tahun 2025, terjadi pemulihan dengan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 24,42 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa PDRB dengan migas sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas migas di pasar global. Berikut ini tabel PDRB Perkapita Kabupaten Natuna Tahun 2022-2025 dan Triwulan 1 2026.

Tabel 3.9.
Tabel PDRB Per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2022
Triwulan I 2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Tw 1 2026
1	PDRB dengan Migas (juta rupiah)	24.265.430	23.507.240	22.692.670	24.416.560	3.971,33
	PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	6.716,38	7.187,08	7.494,09	7.701,60	1.102,1
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	83.430	84.556	85.660	86.757	86.757
3	PDRB Per Kapita dengan Migas (juta rupiah)	290,85	278,01	268,37	281,44	45,775

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Tw 1 2026
	PDRB Per Kapita Tanpa Migas (juta rupiah)	80,5	85	87,48	88,77	12,703

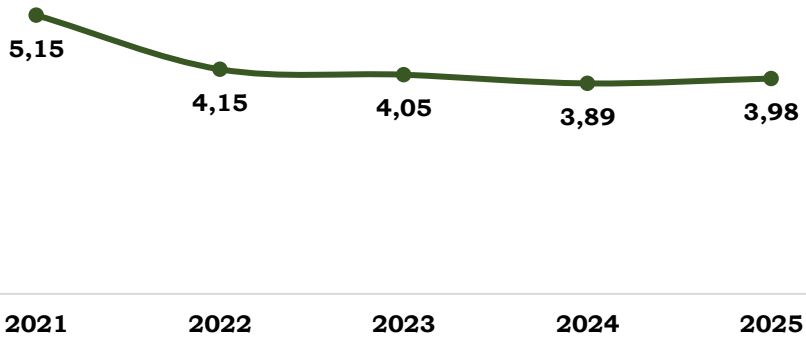
Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

PDRB per kapita dengan migas di Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Angkanya menurun pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh dominasi komoditas minyak dan gas dalam perekonomian kabupaten. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara PDRB per kapita non-migas dan PDRB per kapita dengan migas. Dari segi analisis kesejahteraan masyarakat, PDRB non-migas dianggap lebih relevan untuk dijadikan acuan. Nilai PDRB per kapita non-migas Natuna dalam kurun 2021-2025 terus mengalami peningkatan.Dari sebesar Rp. 76,39 juta di tahun 2021 menjadi Rp. 88,77 juta di tahun 2025. Kenaikan PDRB Per Kapita non migas ini ditentukan dari perhitungan total nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.

3.1.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kinerja ekonomi Kabupaten Natuna juga dapat dilihat dari perkembangan tingkat penganggurannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting. Indikator ini berfungsi untuk mengukur besarnya jumlah pengangguran di kabupaten tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Besar kecilnya angka TPT tersebut mengindikasikan persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran.

Angka pengangguran di Kabupaten Natuna bergerak secara fluktuatif. Angka tersebut mencapai kondisi tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,15 persen. Selanjutnya, tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, angka pengangguran turun menjadi 4,05 persen dan kembali menurun menjadi 3,89 persen pada tahun 2024. Namun di tahun 2025, TPT Natuna meningkat menjadi 3,98%. Fluktuasi ini menunjukkan aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna memerlukan perhatian dan respon kebijakan yang memadai, khususnya terkait dengan pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh iklim perekonomian secara umum.



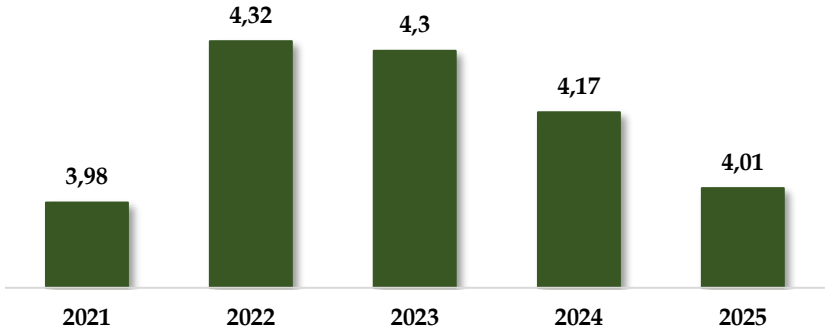
Gambar 3.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka Natuna (2021-2025)
Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

3.1.3.4. Penduduk Miskin

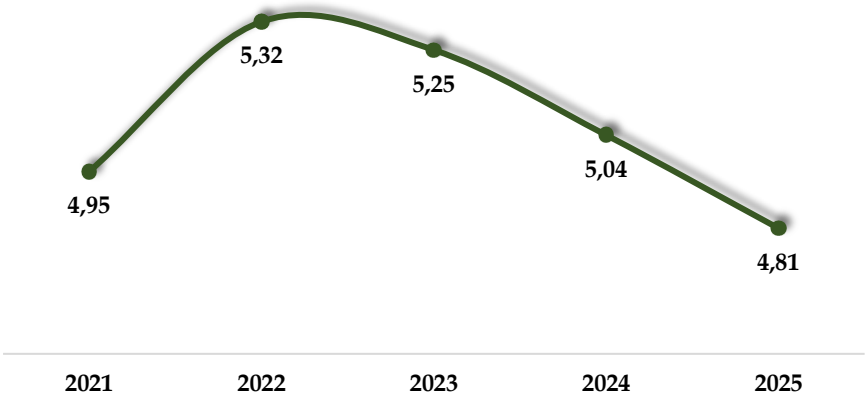
Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan.

Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp501.927. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Di samping itu, pada tahun 2024, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 41.700 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sebanyak 4,01 ribu jiwa. Berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,25 persen menjadi 5,04 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2025 berdampak terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan 4,81%.



Gambar 3.12.
Jumlah Penduduk Miskin 2021-2025 (dalam ribu jiwa)
Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026



Gambar 3.13.
Tingkat Kemiskinan Natuna 2021-2025 (dalam persen)
Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka 2026

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, serta memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten Natuna sebagai kawasan terdepan yang memiliki posisi strategis di perbatasan negara dan berdekatan langsung dengan jalur perdagangan internasional serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN, maka Kabupaten Natuna memiliki potensi strategis untuk mengoptimalkan peran dalam merespons dinamika perekonomian regional dan global secara adaptif dan berkelanjutan.

Pembangunan daerah Kabupaten Natuna selaras dengan mandat yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2030. Upaya pencapaian menitikberatkan pada aspek-aspek utama dan strategis dalam kemajuan daerah dan masyarakat baik ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup maupun budaya. Berikut ditampilkan upaya

ketercapaian pembangunan Kabupaten Natuna melalui Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan RPJMD.

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2026	Target Akhir RPJMD 2030	Keterangan
1	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	9,67	10,14	11,03	Nilai PDRB ADHK sub Sektor Perikanan tahun n dikurang Nilai PDRB ADHK sub Sektor Perikanan Tahun n - 1 dibagi Nilai PDRB ADHK sub Sektor Perikanan tahun n - 1 x 100%
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,18	3,08	4,01	Hasil Perhitungan oleh BPS
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,30	2,58	3,14	Berusaha dibantu Buruh Tetap Daerah / Total Angkatan Kerja daerah x 100%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,46	79,99	81,81	Data Kementerian Lingkungan Hidup
5	Indeks Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Permukiman	Persen	64,10	64,16	69,94	(Bobot x Persentase Akses Air Minum Aman) + (Bobot x Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman) + (Bobot x Presentasi Jalan Kondoisi Mantap) + (Bobot x Peresentase tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk) + (Bobot x Akses Hunian Layak)) / Total Bobot.
6	Rasio Konektivitas	Persen	60,40	60,40	72,33	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,38	74,71	75,31	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur (sumber data dari BPS Natuna)
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,94	13,99	14,14	Data BPS
9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,20	9,68	10,25	Data BPS
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,21	67,20	66,51	Data Rilis BKKBN
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,94	4,47	3,53	Nilai Indeks dikeluarkan oleh KEMENPANRB
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,479	71,979	78,979	Pengukuran berdasarkan 6 (enam) dimensi (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2026	Target Akhir RPJMD 2030	Keterangan
						penganggaran (2) kualitas anggaran belanja dalam APBD (3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (4) Penyerapan Anggaran (5) Kondisi Keuangan Daerah (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
13	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	74,31	75,00	76,00	Nilai Indeks dikeluarkan oleh KEMENPANRB
14	Persentase Desa/Kelurahan Bebas Konflik	Persen	90,91	100	98,70	= (Jumlah Desa dan Kelurahan bebas konflik / Jumlah Desa dan Kelurahan) x 100
15	Persentase warisan budaya daerah yang di lestarikan	Persen	10,00	15,00	22,30	(jumlah pelestarian warisan budaya kebendaan / target warisan kebendaan yang dilestarikan x 50%) + (jumlah pelestarian warisan budaya tak benda / target warisan tak benda yang dilestarikan x 50%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna, hampir keseluruhan indikator memperlihatkan target peningkatan dari kondisi awal tahun 2024 menuju target tahun 2026 dan target akhir RPJMD 2030. Penetapan dan capaian IKU mencerminkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Natuna menjadikan pembangunan ekonomi, infrastruktur dasar, kualitas lingkungan hidup, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ketenteraman sosial, serta pelestarian budaya sebagai fokus utama dari pembangunan daerah.

Dari sisi perekonomian daerah, kontribusi PDRB sub sektor perikanan ditargetkan meningkat dari kondisi awal sebesar 9,67 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen di tahun 2026 dan 11,03 persen pada 2030. Kenaikan ini mencerminkan upaya memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu basis ekonomi strategis Natuna. Target tersebut cukup relevan mengingat karakter Natuna sebagai wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun, peningkatan kontribusi sektor ini tidak hanya bergantung pada produksi tangkap, tetapi juga pada penguatan rantai nilai, hilirisasi hasil perikanan, akses pasar, infrastruktur pelabuhan, cold storage, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.

Indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian/perikanan juga menunjukkan target akseleratif, dari 1,18 persen pada 2024 menjadi 3,08

persen di tahun 2026 dan 4,01 persen pada 2030. Peningkatan ini menandakan adanya harapan terhadap pemulihan dan penguatan sektor produktif daerah. Sementara itu, rasio kewirausahaan daerah meningkat dari 2,30 persen menjadi 2,58 persen di tahun 2026 dan 3,14 persen di tahun 2030, yang menunjukkan dorongan terhadap penciptaan pelaku usaha baru. Secara analitis, pertumbuhan ekonomi Natuna tidak cukup hanya bertumpu pada sektor primer, tetapi perlu diperkuat melalui kewirausahaan, UMKM, pengolahan hasil perikanan, jasa pendukung, dan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Pada bidang infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman, indeks ditargetkan naik dari 64,10 persen menjadi 64,16 persen di tahun 2026 dan 69,94 persen di tahun akhir RPJMD (2030). Peningkatan ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki akses layanan dasar seperti air minum, sanitasi, jalan mantap, serta hunian layak. Di sisi lain, rasio konektivitas meningkat cukup signifikan dari 60,40 persen menjadi 60,40 persen di tahun 2026 dan 72,33 persen di tahun 2030. Ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi Natuna karena kondisi geografis kepulauan membutuhkan konektivitas darat, laut, dan antarkawasan yang memadai. Kenaikan konektivitas akan berdampak langsung pada distribusi barang, akses layanan publik, mobilitas masyarakat, pariwisata, dan efisiensi ekonomi daerah.

Dari aspek lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan meningkat dari 76,46 menjadi 79,99 di tahun 2026 dan 81,81 di tahun 2030. Target ini menunjukkan bahwa pembangunan Natuna diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan. Hal ini penting karena Natuna memiliki ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan ekonomi perikanan, infrastruktur, dan permukiman perlu tetap dikendalikan melalui tata ruang, pengelolaan limbah, perlindungan kawasan pesisir, serta pengawasan kualitas air dan tutupan lahan.

Pada bidang pembangunan manusia, indikator kesehatan dan pendidikan menunjukkan peningkatan bertahap. Usia Harapan Hidup naik dari 74,38 tahun menjadi 74,71 (2026) dan 75,31 tahun (2030), yang mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, meskipun peningkatannya relatif moderat karena indikator ini memang bergerak lambat. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,94 tahun menjadi 13,99 tahun (2026) dan 14,14 tahun (2030), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,20 tahun menjadi 9,68 tahun (2026) dan 10,25 tahun (2030). Secara analitis, peningkatan RLS lebih substantif dibanding HLS, karena menunjukkan adanya dorongan agar penduduk benar-benar

menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tantangannya terletak pada pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, ketersediaan guru, serta hambatan geografis antarpulau.

Indikator Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga meningkat dari 65,21 menjadi 67,20 (2026) dan 66,51 (2030). Kenaikan ini relatif kecil, tetapi tetap penting karena berkaitan dengan kualitas keluarga, ketahanan sosial, dan kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan indeks ini perlu didukung oleh program lintas sektor, seperti penguatan ekonomi keluarga, kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, pencegahan stunting, dan perlindungan sosial.

Pada bidang tata kelola pemerintahan, beberapa indikator menunjukkan arah perbaikan kelembagaan. Indeks Pelayanan Publik ditargetkan meningkat dari 2,94 menjadi 4,47 (2026) dan 3,53 (2030), yang berarti pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat dari 70,479 menjadi 71,979 (2026) dan 78,979 (2030), menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan APBD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Nilai SAKIP Pemerintah Daerah meningkat dari 74,31 menjadi 75,00 (2026) dan 76,00 (2030). Kenaikan ini relatif moderat, sehingga diperlukan penguatan perencanaan kinerja, cascading indikator, konsistensi antara program dan anggaran, serta evaluasi hasil pembangunan secara lebih tajam.

Dari sisi ketenteraman, ketertiban, dan sosial kemasyarakatan, persentase desa/kelurahan bebas konflik ditargetkan meningkat dari 90,91 persen menjadi 100 persen (2026) dan 98,70 persen (2030). Target ini cukup tinggi dan menunjukkan pentingnya stabilitas sosial sebagai prasyarat pembangunan. Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan membutuhkan kohesi sosial yang kuat, terutama dalam menjaga harmoni masyarakat, mencegah konflik horizontal, dan memperkuat peran pemerintah desa/kelurahan dalam deteksi dini potensi konflik.

Pada aspek kebudayaan, persentase warisan budaya daerah yang dilestarikan meningkat dari 10,00 persen menjadi 15,00 persen (2026) dan 22,30 persen (2030). Secara persentase, indikator ini menunjukkan kenaikan yang cukup besar, tetapi titik awalnya masih rendah. Artinya, pelestarian budaya perlu menjadi perhatian lebih serius melalui inventarisasi warisan budaya, dokumentasi, perlindungan hukum, regenerasi pelaku budaya, serta integrasi kebudayaan dengan pendidikan dan pariwisata daerah.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Natuna sampai tahun 2030 bersifat inkremental namun komprehensif. Beberapa indikator bergerak cepat, seperti

konektivitas, desa/kelurahan bebas konflik, pengelolaan keuangan daerah, dan pelestarian budaya. Sementara indikator lain bergerak lebih lambat, seperti usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan SAKIP, karena karakter indikator tersebut membutuhkan perubahan struktural dan kelembagaan yang lebih panjang.

Keberhasilan pencapaian IKU Kabupaten Natuna sangat bergantung pada konsistensi perencanaan tahunan, sinkronisasi antarperangkat daerah, kecukupan pembiayaan, kualitas data, serta evaluasi berkala terhadap capaian indikator. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa target-target tersebut tidak hanya menjadi angka administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi, kualitas layanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan strategis.

Tabel 3.11.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	• Mengoptimalkan sektor sektor perikanan, sektor pertanian dan pariwisata. • Pengembangan akses pasar produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor • Memperkuat kualitas kelembagaan dan tata kelola UMKM, Koperasi dan BUMD. • Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha. • Mengakselerasi pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah • Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. • Peningkatan layanan sosial dan Perlindungan PPKS serta meningkatkan koloborasi multi pihak dalam pengurangan angka kemiskinan. • Peningkatan pelatihan, memfasiltasi akses modal dan pemasaran produk kewira usahaan. • Memperkuat pengawasan, penegakan terhadap pencemaran dan kerusakaan lingkungan • Meningkatkan koordinasi dan koloborasi dalam mitigasi bencana serta penguatan kelembagaan, regulasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau	• Peningkatan jalan, jembatan dan pelabuhan antar desa dan antar kecamatan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses baik

No	Misi	Arah Kebijakan
		• Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan. • Mempercepat pemerataan layanan kelistrikan. • Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi pulau • Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi dan Air Minum • Peningkatan layanan infrastruktur pengeloaan persampahan • Peningkatan penataan kawasan kumuh
3	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan • Menyediakan dan memfasilitasi bantuan pendidikan • Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan, Anak dan Lansia • Peningkatan gizi anak • Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	• Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN • Peningkatan pemanfataan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik • Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Penguatan sikronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
5	Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	• Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar suku dan umat beragama • Pengembangan Kesenian Tradisional, Pelestarian Cagar Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah • Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029

3.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
2. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
3. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
4. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
5. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi objektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** diwujudkan melalui prioritas pembangunan yang meliputi:



Gambar 3.14.
Tema RKP dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026
Sumber: Arah Kebijakan RKP 2026

Kinerja perekonomian Kabupaten Natuna menunjukkan pertumbuhan yang tinggi secara agregat, namun belum sepenuhnya mencerminkan penguatan ekonomi riil masyarakat. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 10,49 persen (dengan migas),

sementara tanpa migas justru mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian (migas), dengan kontribusi sektor non-migas yang relatif lemah. Bahkan secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 11,33 persen (y-on-y), namun ekonomi non-migas masih terkontraksi hingga sekitar -3,09 persen (y-on-y). Disparitas ini menunjukkan adanya dualisme struktur ekonomi, di mana pertumbuhan tinggi tidak diikuti oleh penguatan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, indikator PDRB per kapita menunjukkan nilai yang relatif tinggi sebagai implikasi dari dominasi sektor migas. Namun demikian, tingginya PDRB per kapita tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan riil masyarakat, mengingat distribusi manfaat ekonomi dari sektor migas bersifat terbatas (*enclave economy*) dan tidak tersebar secara merata. Apabila ditinjau dari perspektif non-migas, kapasitas ekonomi masyarakat masih relatif terbatas, yang tercermin dari rendahnya diversifikasi ekonomi dan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Dari sisi distribusi pendapatan, rasio gini Kabupaten Natuna berada pada kategori rendah hingga sedang, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan relatif terkendali. Namun demikian, kondisi ini perlu dicermati lebih lanjut karena berpotensi mencerminkan pemerataan dalam tingkat pendapatan yang masih terbatas (*low income equilibrium*), bukan pemerataan dalam kesejahteraan yang tinggi. Selain itu, adanya dominasi sektor migas berpotensi menciptakan ketimpangan struktural yang tidak sepenuhnya tercermin dalam indikator agregat.

Sementara itu, indikator ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan yang cukup positif namun masih menyimpan tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,15 persen pada tahun 2021 menjadi 3,89 persen pada tahun 2024, sebelum sedikit meningkat menjadi 3,98 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja, namun peningkatan kembali pada tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan di pasar kerja. Lebih lanjut, rendahnya TPT belum sepenuhnya mencerminkan kualitas ketenagakerjaan, mengingat masih tingginya proporsi pekerjaan informal, setengah pengangguran, serta mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor unggulan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan indikator tersebut, tantangan utama pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketergantungan tinggi terhadap sektor migas, yang menyebabkan

pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil dan kurang inklusif;
2. Lemahnya kinerja sektor non-migas, yang tercermin dari kontraksi pertumbuhan serta rendahnya kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja;
3. Distorsi indikator kesejahteraan, di mana tingginya PDRB per kapita belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata;
4. Keterbatasan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meskipun tingkat pengangguran relatif rendah;
5. Risiko ketimpangan struktural, yang tidak sepenuhnya tercermin dalam rasio gini;
6. Tingginya biaya logistik dan keterbatasan konektivitas, yang menurunkan daya saing ekonomi lokal.

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut adalah belum optimalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu difokuskan pada transformasi struktural ekonomi melalui penguatan sektor non-migas, peningkatan nilai tambah berbasis potensi kelautan dan perikanan, pengembangan ekonomi lokal dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan konektivitas wilayah dan perbaikan iklim investasi menjadi prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan

melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Natuna adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); telah dinyatkan bahwa kwajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: (i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

3.2.1. Realisasi Keuangan Daerah

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional daerah. Sumber pendapatan ini dapat berasal dari potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Natuna, maupun melalui alokasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pendapatan daerah sendiri terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna mencapai 391.857,60 dari anggaran sebesar 1.043.202,60 atau 37,56%. Capaian tersebut masih berada di bawah patokan perkembangan waktu semester pertama sebesar 50%, sehingga masih terdapat sisa pendapatan sebesar 651.345,00 yang harus direalisasikan pada semester kedua. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu meningkatkan laju penerimaan karena sisa target tersebut setara dengan 62,44% dari anggaran tahunan. Nilai rata-rata realisasi sebesar 62,43% menggambarkan rata-rata antara realisasi Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026, sehingga untuk menilai kinerja tahun berjalan, indikator yang lebih relevan tetap realisasi kumulatif Tahun 2026 sebesar 37,56%.

Dari sisi struktur pendapatan, realisasi masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer yang mencapai 360.945,87 atau 39,55% dari anggarannya dan menyumbang lebih dari 92% terhadap total realisasi

pendapatan. Dana Alokasi Umum menjadi penopang utama dengan realisasi 56,04%, sedangkan beberapa komponen transfer lain masih rendah, seperti DAK sebesar 29,24%, Dana Desa sebesar 18,37%, DBH Bukan Pajak/SDA sebesar 8,45%, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 14,01%. Sementara itu, PAD baru terealisasi 27.831,31 atau 22,55%. Rendahnya PAD terutama dipengaruhi oleh Pajak Daerah yang baru mencapai 7,12%, meskipun Retribusi Daerah telah mencapai 50,48% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 96,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal mandiri daerah masih terbatas dan sangat dipengaruhi oleh jadwal serta kepastian penyaluran transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Realisasi pendapatan yang belum optimal berimplikasi pada risiko tekanan kas dan keterlambatan pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Penerapan belanja dengan ketersediaan kas, memprioritaskan belanja wajib, pelayanan dasar, dan kewajiban kontraktual, serta menunda kegiatan yang belum mendesak jika realisasi pendanaan belum memungkinkan. Target pendapatan yang sulit tercapai, khususnya Pajak Daerah, Insentif Fiskal, Dana Desa, dan beberapa komponen transfer, perlu dievaluasi melalui proyeksi ulang dan perubahan APBD agar tidak menimbulkan belanja tanpa dukungan pendapatan daerah yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan rekonsiliasi atas beberapa ketidaksesuaian data, seperti realisasi DBH Pajak yang muncul ketika anggarannya tercatat nol serta kemungkinan ketidaktepatan klasifikasi Pendapatan Bagi Hasil. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu mempercepat intensifikasi dan penagihan pajak, memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer, memperbaiki akurasi penganggaran, serta menyusun proyeksi arus kas bulanan sampai akhir tahun agar pelaksanaan APBD tetap terkendali dan target pembangunan tidak terganggu. Secara lebih rinci Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna hingga Triwulan II 2026 tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah)

Uraian	2025			2026			Rata-Rata % Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Semester 1	%	
PENDAPATAN DAERAH	**1.087.894,04**	**949.796,90**	**87,31**	**1.043.202,60**	**391.857,60**	**11,80**	**62,43**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**123.341,23**	**109.812,49**	**89,03**	**123.395,56**	**27.831,31**	**2,17**	**55,79**
Pajak Daerah	67.135,49	59.975,03	89,33	85.132,06	6.061,01	2,13	**48,23**
Retribusi Daerah	34.438,76	34.641,59	100,59	27.750,29	14.007,88	2,53	**75,53**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.601,37	6.601,37	100,00	6.400,00	6.178,61	0,00	**98,27**
Lain-Lain PAD yang Sah	15.165,62	8.594,50	56,67	4.113,20	1.583,81	3,99	**47,59**
PENDAPATAN TRANSFER	**957.121,70**	**833.157,74**	**87,05**	**912.723,92**	**360.945,87**	**13,13**	**63,30**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	837.520,45	711.138,94	84,91	814.073,21	338.900,68	14,72	**63,27**
DBH Pajak	191.349,12	116.953,75	61,12	0,00	16.783,42	0,00	**30,56**
DBH Bukan Pajak (SDA)	141.204,02	98.745,38	69,93	234.760,96	19.846,62	3,91	**39,19**
DAU	408.285,02	406.043,73	99,45	495.880,18	277.871,97	22,01	**77,74**
DAK	96.682,28	89.396,08	92,46	83.432,07	24.398,68	1,76	**60,85**
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	66.179,48	65.469,68	98,93	58.609,40	8.208,92	0,00	**56,47**
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dana Desa	52.257,71	51.559,79	98,66	44.687,63	8.208,92	0,00	**58,52**
Insentif Fiskal	13.921,77	13.909,89	99,91	13.921,77	0,00	0,00	**49,96**
Transfer Pemerintah Provinsi	53.421,78	56.549,11	105,85	40.041,31	13.836,27	0,00	**70,20**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.059,78	56.211,11	105,94	40.041,31	13.836,27	0,00	**70,25**
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.041,31	0,00	0,00	**0,00**
Bantuan Keuangan	362,00	338,00	93,37	0,04	0,00	0,00	**46,69**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**7.431,11**	**6.826,67**	**91,87**	**7.083,13**	**3.080,42**	**8,52**	**67,68**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan Lainnya/Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Per-UU	7.431,11	6.826,67	91,87	7.083,13	3.080,42	8,52	**67,68**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

3.2.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Sampai dengan Triwulan II 2026, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna mencapai 361.017,33 atau 34,41% dari anggaran sebesar 1.049.112,46. Capaian tersebut masih sekitar 15,59 poin persentase di bawah patokan perkembangan waktu semester pertama sebesar 50%, sehingga tersisa anggaran sebesar 688.095,13 yang harus dikelola pada semester kedua. Untuk mencapai penyerapan 100%, belanja semester kedua harus mencapai sekitar 1,91 kali realisasi semester pertama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan, pengadaan, pencairan, dan pembayaran menjelang akhir tahun apabila tidak segera dilakukan percepatan.

Realisasi belanja didominasi Belanja Operasi sebesar 312.957,38 atau sekitar 86,69% dari keseluruhan realisasi. Belanja Pegawai telah terealisasi 44,91%, sedangkan Belanja Barang baru mencapai 31,04%. Sebaliknya, Belanja Modal baru mencapai 10,86%, terutama karena realisasi jalan, irigasi dan jaringan hanya 6,02%, gedung dan bangunan 13,70%, peralatan dan mesin 24,56%, serta belanja tanah dan aset modal lainnya belum terealisasi. Rendahnya penyerapan belanja modal dapat menunjukkan keterlambatan pengadaan, penyelesaian dokumen teknis, kontrak, atau pelaksanaan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat menunda manfaat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Belanja Transfer telah terealisasi 30,29%, dengan transfer bantuan keuangan kepada desa sebesar 32,77%, sedangkan transfer bagi hasil pajak dan retribusi belum terealisasi. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu segera memastikan kesiapan administrasi, jadwal penyaluran, dan kewajiban transfer kepada desa. Realisasi Belanja Tidak Terduga yang hanya 0,94% tidak secara langsung menunjukkan kinerja yang buruk karena sifatnya sebagai dana kontinjensi, tetapi alokasinya tetap perlu dijaga untuk menghadapi keadaan darurat.

Implikasinya terhadap anggaran yang telah dirancang adalah perlunya penyusunan kembali jadwal pelaksanaan dan arus kas, percepatan paket pengadaan yang telah siap, serta evaluasi terhadap kegiatan yang berisiko tidak selesai sampai akhir tahun. Kegiatan prioritas dan pelayanan dasar perlu didahulukan, sedangkan kegiatan yang belum siap atau tidak lagi realistis dapat dijadwalkan ulang atau disesuaikan melalui perubahan APBD. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah lonjakan belanja pada akhir tahun, menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan anggaran memberikan manfaat yang optimal. Secara lebih rinci Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna hingga Triwulan II 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah)

Uraian	2025			Tahun 2026			Rata-Rata % Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Semester 1	%	
BELANJA DAERAH	**1.091.928,30**	**948.160,00**	**86,83%**	**1.049.112,46**	**361.017,33**	**34,41%**	**60,62%**
Belanja Operasi	**786.569,36**	**707.156,74**	**89,90%**	**808.185,62**	**312.957,38**	**38,72%**	**64,31%**
Belanja Pegawai	457.175,17	449.927,82	98,41%	481.192,59	216.114,36	44,91%	71,66%
Belanja Barang	305.666,78	243.169,87	79,55%	307.272,19	95.387,66	31,04%	55,30%
Belanja Subsidi	600,00	29,38	4,90%	600,00	16,25	2,71%	3,80%
Belanja Hibah	21.307,91	12.699,81	59,60%	15.979,14	864,31	5,41%	32,51%
Belanja Bantuan Sosial	1.819,50	1.359,24	74,70%	3.141,70	574,80	18,30%	46,50%
Belanja Modal	**187.056,53**	**125.945,57**	**67,33%**	**120.641,95**	**13.097,62**	**10,86%**	**39,09%**
Belanja Tanah	2.448,37	1.574,52	64,31%	416,00	0,00	0,00%	32,15%
Belanja Peralatan dan Mesin	41.556,09	30.201,28	72,68%	15.076,33	3.702,30	24,56%	48,62%
Belanja Gedung dan Bangunan	59.336,00	39.599,77	66,74%	40.174,41	5.502,24	13,70%	40,22%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.873,27	51.438,79	62,83%	64.552,12	3.886,68	6,02%	34,42%
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.428,32	2.717,36	190,25%	406,39	6,40	1,58%	95,91%
Belanja Modal Aset Lainnya	414,48	413,87	99,85%	16,32	0,00	0,00%	49,93%
Belanja Tidak Terduga	**1.466,01**	**854,21**	**58,27%**	**5.000,00**	**46,82**	**0,94%**	**29,60%**
Belanja Tidak Terduga	1.466,01	854,21	58,27%	5.000,00	46,82	0,94%	29,60%
Belanja Transfer	**116.836,41**	**114.203,47**	**97,75%**	**115.284,89**	**34.915,50**	**30,29%**	**64,02%**
Transfer Bagi Hasil Pajak	4.707,77	4.317,83	91,72%	8.513,21	0,00	0,00%	45,86%
Transfer Bagi Hasil Retribusi	375,14	144,72	38,58%	225,61	0,00	0,00%	19,29%
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	111.753,51	109.740,92	98,20%	106.546,07	34.915,50	32,77%	65,48%

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah)

3.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebagai acuan utama, Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 dianggarkan sebesar 5.714,11 dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 5.714,41. Dengan demikian, tingkat realisasinya mencapai 100,01% atau melampaui anggaran sekitar 0,30. Seluruh penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sehingga Pembiayaan Netto juga tercatat sebesar 5.714,41 karena tidak terdapat pengeluaran pembiayaan dalam data yang disajikan. Penggunaan angka anggaran LRA ini menghasilkan gambaran yang berbeda dari tabel sebelumnya yang menggunakan anggaran sebesar 5.000,00 dan menghasilkan persentase 114,29%.

Dengan formula yang sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu rata-rata aritmetika antara persentase realisasi Tahun 2025 dan persentase realisasi Triwulan II 2026, tingkat realisasi Tahun 2025 sebesar 101,80% diperoleh dari realisasi 4.106,89 terhadap anggaran 4.034,26. Persentase Triwulan II 2026 sebesar 100,01% diperoleh dari realisasi 5.714,41 terhadap anggaran LRA sebesar 5.714,11. Dengan demikian, nilai rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan adalah sekitar 100,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan pada kedua periode secara umum terealisasi sesuai atau sedikit melampaui anggaran. Namun, rata-rata ini menggabungkan realisasi satu tahun penuh 2025 dengan realisasi sampai pertengahan 2026, sehingga lebih tepat digunakan untuk melihat konsistensi ketersediaan sumber pembiayaan daripada untuk menilai kemajuan pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.

Sampai dengan Triwulan II 2026, LRA juga menunjukkan surplus anggaran berjalan sebesar 30.840,27, meskipun dalam anggaran direncanakan terjadi defisit sebesar 5.714,11. Setelah ditambah Pembiayaan Netto sebesar 5.714,41, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berjalan mencapai 36.554,68. Perubahan dari defisit yang direncanakan menjadi surplus pada pertengahan tahun menunjukkan bahwa penerimaan yang telah direalisasikan masih lebih besar daripada belanja yang telah dibayarkan. Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja sebelumnya, surplus tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai keberhasilan penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan realisasi belanja yang masih lebih lambat daripada realisasi pendapatan, terutama pada belanja modal dan sejumlah kegiatan transfer.

Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Triwulan II belum dapat dianggap sebagai SILPA final ataupun seluruhnya tersedia untuk membiayai kegiatan baru. Sebagian saldo tersebut mungkin berasal dari dana yang telah ditentukan penggunaannya, kewajiban yang belum dibayar, kegiatan yang masih dalam proses kontrak, atau belanja yang

pencairannya dijadwalkan pada semester kedua. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan hasil akhir perhitungan antara surplus atau defisit dan Pembiayaan Netto, bukan jenis penerimaan yang mempunyai target anggaran dan realisasi yang dapat dibandingkan secara biasa. Oleh karena itu, persentase dan rata-rata realisasi untuk pos tersebut sebaiknya tidak dihitung apabila anggarannya dalam LRA bernilai nol.

Implikasinya terhadap anggaran yang telah dirancang adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memperbarui proyeksi kas dan struktur pembiayaan dalam perubahan APBD. Karena penerimaan pembiayaan telah terealisasi penuh sejak semester pertama dan untuk sementara belum diperlukan untuk menutup defisit, pemerintah daerah memiliki likuiditas yang relatif memadai. Namun, kondisi ini tidak seharusnya langsung menjadi dasar penambahan belanja baru sebelum dilakukan rekonsiliasi terhadap kas, kewajiban, serta status dana yang terikat dan tidak terikat. Pemerintah daerah perlu mempercepat kegiatan prioritas yang telah siap, khususnya kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan, tetapi tetap menghindari penumpukan belanja dan penurunan kualitas pekerjaan pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, kinerja pembiayaan Triwulan II 2026 tergolong terkendali karena Penerimaan Pembiayaan telah terealisasi sekitar 100,01% dan rata-rata realisasinya bersama Tahun 2025 mencapai 100,90%. Meskipun demikian, tingginya saldo pembiayaan pada pertengahan tahun lebih tepat dibaca sebagai indikator kuatnya posisi kas sementara dan lambatnya penyerapan anggaran, bukan sebagai tambahan kemampuan fiskal yang seluruhnya bebas digunakan. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memastikan bahwa perubahan APBD mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang sebenarnya, menggunakan sumber pembiayaan tidak berulang terutama untuk kegiatan yang bersifat produktif atau satu kali, serta tidak menggunakannya untuk membiayai belanja rutin yang dapat menimbulkan kewajiban berkelanjutan. Secara lebih rinci Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna hingga Triwulan II 2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d. Semester 1 Tahun 2026 (juta Rupiah)

Uraian	2025			2026			Rata-Rata % Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Semester 1	%	
PEMBIAYAAN DAERAH							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**4.034,26**	**4.106,89**	**101,80%**	**5.714,11**	**5.714,41**	**100,01**	**100,90%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.034,26	4.106,89	101,80%	5.714,11	5.714,41	100,01	100,90%
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**4.034,26**	**4.106,89**	**101,80%**	**5.714,11**	**5.714,41**	**100,01**	**100,90%**
PEMBIAYAAN NETTO	**4.034,26**	**4.106,89**	**101,80%**	**5.714,11**	**5.714,41**	**100,01**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**5.714,41**		**5.714,11**	**5.714,41**	**100,00**	**100,90%**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah)

3.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain, Pendapatan Daerah Yang Sah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah dan Retribusi masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD

Kabupaten Natuna di samping dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya usaha dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah. Adapun kebijakan yang dilaksanakan adalah melanjutkan kebijakan lama dengan mengintensifkan kebijakan baru sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan intensifikasi:
   a. Penagihan aktif tunggakan pajak daerah maupun pajak bulan berjalan;
   b. Meningkatkan akurasi data dan verifikasi Pajak Daerah; serta pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. Melakukan pendekatan, himbauan dan sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
   d. Relaksasi pengurangan tarif pajak daerah khususnya untuk PBB P2.
   e. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
   f. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
   g. Mengoptimalkan sumber daya manusia melalui bimbingan dan penyuluhan kepada petugas pungut/pengelola Retribusi Daerah serta meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan;
   h. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem digiltalisasi pajak;
   i. Meningkatkan evaluasi, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
   j. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
   k. Meningkatkan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan ekstensifikasi:
   a. Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Natuna;
   b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah.
   c. Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
   d. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
   e. Mempertimbangkan kebijakan pemberlakuan pemutihan dan/atau keringanan pajak.
3. Melakukan updating data dan rekonsiliasi sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.
4. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi terutama pendapatan bagi hasil pajak.

Perubahan strategi dan prioritas pendapatan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan secara optimal untuk menemukan potensi potensi sumber keuangan daerah, baik melalui intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif dengan cara sebagai berikut: a. meningkatkan produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak daerah; b. meningkatkan pengawasan secara langsung kelapangan terhadap pungutan pajak daerah; c. meningkatkan Optimalisasi potensi sumber-sumber baru pajak daerah dan retribusi daerah; d. melaksanakan penetapan Objek Pajak sesuai dengan landasan hukum yang berlaku; e. meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait pajak daerah dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media masa; f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyempurnaan sistem pelayanan pendapatan daerah; dan g. Meningkatkan kerja sama dengan unit-unit yang terkait langsung dengan objek pajak.

Kebijakan penetapan pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara

nasional; kebijakan fiskal nasional yang berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, termasuk proyeksi potensial yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah pada periode sebelumnya berikut strategi penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

3.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Arah kebijakan belanja Kabupaten Natuna pada tahun 2026 digunakan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik efektif dan efisien.

Peruntukannya fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
2. Program unggulan kepala daerah antara lain: 1) peningkatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah, 2) percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, 3) pemerataan konektivitas, 4) tenaga kerja, 5) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak, 6) pinjaman bunga 0% bagi UMKM, 7) meningkatkan tipe/pelayanan RSUD Natuna, 8) Pelatihan Penyelenggara Fardhu Kifayah, 9) Gerakan Maghrib Mengaji, 10) Bantuan untuk Lansia 65 Tahun ke Atas, 11) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan untuk Buruh, Supir, Pekerja Lepas), dan 12) Beasiswa putra putri pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi
3. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Kepulauan Riau;
4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
6. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;
7. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan Musrenbang;
8. Pelaksanaan program pembangunan daerah diarahkan melalui penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional (ProSN), serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah; dan
9. Prioritas sumber-sumber belanja operasional diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara optimal, merata, dan berkelanjutan. Belanja operasional tersebut difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya yang diatur dalam perencanaan tahunan beserta perubahannya;
c. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Penentuan pendapatan daerah Kabupaten Natuna tidak terlepas dari perkiraan kapasitas riil di Tahun 2026. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang dihitung dari total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat. Kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat, dan Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Uraian	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (RKPD 2026 - PRKPD 2026) (Rp)
1.	**Jumlah Pendapatan**	**1.116.466.375.795**	**1.043.202.600.000**	**1.050.857.190.414**	**-65.609.185.381**
	Dikurangi:				
2.	**Jumlah Belanja**	**1.116.466.375.795**	**1.048.202.600.000**	**1.056.571.600.000**	**-59.894.775.795**
	Belanja Mengikat:				
	Gaji PNS + TPP	460.797.631.108	471.819.986.681	473.209.044.198	12.411.413.090
	Gaji Kepala Daerah dan BOP	6.550.000.000	6.995.877.550	6.995.877.550	445.877.550
	Gaji DPRD	6.930.000.000	8.292.908.623	8.292.908.623	1.362.908.623
	Belanja *Mandatory Spending*:				
	ADD	110.549.726.501	104.462.946.283	82.462.946.283	-28.086.780.218
	Bagi Hasil Pajak	10.943.235.700	13.836.266.558	8.513.212.100	-2.430.023.600
	Bagi Hasil Retribusi	430.000.000	920.012.194	225.610.000	-204.390.000
	Belanja Infrastruktur/PEN	119.352.999.000	98.129.685.372	98.129.685.372	-21.223.313.628
	Belanja Fungsi Pendidikan	268.774.086.243	246.179.452.242	206.179.452.242	-62.594.634.001
	Belanja Fungsi Kesehatan	129.638.697.243	211.474.571.392	166.848.454.046	37.209.756.803
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan		**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**5.000.000.000**	**5.714.409.586**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

Berdasarkan **hasil perubahan proyeksi anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 (P-RKPD 2026)**, terjadi penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Natuna dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Pada sisi pendapatan daerah, proyeksi dalam P-RKPD 2026 mengalami penurunan dari semula sebesar Rp1.116.466.375.795 pada RKPD 2026 menjadi Rp1.050.857.190.414, atau berkurang sebesar Rp65.609.185.381. Penurunan pendapatan tersebut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan.

Pada sisi belanja daerah, terjadi penyesuaian dari rencana awal RKPD 2026 sebesar Rp1.116.466.375.795 menjadi Rp1.056.571.600.000 dalam P-RKPD 2026, atau mengalami pengurangan sebesar Rp59.894.775.795. Penyesuaian belanja tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kondisi riil kemampuan pendapatan daerah.

Jika dibandingkan antara RKPD 2026 dan P-RKPD 2026, beberapa komponen belanja mengalami perubahan yang cukup signifikan. Belanja Gaji PNS dan TPP mengalami peningkatan dari Rp460.797.631.108 menjadi Rp473.209.044.198, atau bertambah sebesar Rp12.411.413.090. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat. Selain itu, belanja Gaji DPRD juga mengalami peningkatan dari Rp6.930.000.000 menjadi Rp8.292.908.623, dengan kenaikan sebesar Rp1.362.908.623.

Namun demikian, beberapa komponen belanja mengalami pengurangan dalam P-RKPD 2026. Belanja ADD mengalami penurunan dari Rp110.549.726.501 menjadi Rp82.462.946.283, atau berkurang sebesar Rp28.086.780.218. Belanja Infrastruktur/PEN juga mengalami penurunan dari Rp119.352.999.000 menjadi Rp98.129.685.372, atau berkurang sebesar Rp21.223.313.628. Selanjutnya, belanja fungsi pendidikan mengalami penurunan paling besar, yaitu dari Rp268.774.086.243 pada RKPD 2026 menjadi Rp206.179.452.242 pada P-RKPD 2026, atau turun sebesar Rp62.594.634.001. Kondisi serupa terjadi pada belanja fungsi kesehatan, yang justru mengalami peningkatan dari Rp129.638.697.243 menjadi Rp166.848.454.046, atau bertambah sebesar Rp37.209.756.803, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.

Dari sisi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, terdapat peningkatan proyeksi dari Rp2.500.000.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp5.000.000.000 pada P-RKPD 2026, atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.714.409.586. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan

pada sisi pendapatan dan beberapa komponen belanja, pemerintah daerah masih memiliki ruang kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan program prioritas melalui penyesuaian struktur belanja.

Secara keseluruhan, perubahan dari RKPD 2026 menuju P-RKPD 2026 mencerminkan proses penyesuaian kebijakan anggaran berdasarkan kondisi keuangan daerah yang lebih aktual, dengan tetap mempertahankan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, terutama belanja pegawai, serta melakukan rasionalisasi terhadap beberapa belanja pembangunan dan pelayanan publik agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal Kabupaten Natuna.

Secara umum, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 digunakan untuk membiayai tiga kelompok prioritas, di antaranya:

1. ***Prioritas pertama*** adalah membiayai belanja wajib dan belanja mengikat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja wajib mencakup beberapa komponen penting: a) Belanja Fungsi Pendidikan, di mana anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b) Belanja Fungsi Kesehatan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c) Belanja Infrastruktur, menggunakan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH, diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI; d) Belanja Pengawasan, dengan anggaran minimal 0,9 persen sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024; dan e) Belanja SPM, bahwa anggaran penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; f. Belanja Pendidikan; g. Belanja Kesehatan; h. Belanja Infrastruktur; i. Belanja Gaji dan Tunjangan; j. Belanja bagi Hasil Pajak; k. Belanja Batuan Kepada Masyarakat; dan l. Belanja Tidak Terduga. Kemudian terdapat alokasi Belanja mengikat yang sasarannya digunakan untuk belanja, di antaranya sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai; 2)Belanja JKN; 3) Belanja DAK/BOS; dan 4) Belanja Operasional Kantor. Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
2. Belanja DAK BOS;
3. Belanja Operasional Kantor; dan
4. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

2. ***Prioritas Kedua*** **:** Belanja prioritas kedua digunakan untu memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2026.
3. ***Prioritas Ketiga*** **:** Belanja Prioritas ketiga digunakan Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.16.
Anggaran Belanja Daerah Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM	PAGU P-RKPD 2026 (Rp)
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**5,663,018,934,700.00**
10102	Program Pengelolaan Pendidikan	5,589,301,934,700.00
10104	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73,717,000,000.00
2	**Dinas Kesehatan**	**75,436,855,415.00**
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75,436,855,415.00
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**2,119,133,750.00**
10303	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,885,355,050.00
10305	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	233,778,700.00
4	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**	**259,169,100.00**
10402	Program Pengembangan Perumahan	259,169,100.00
5	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**	**704,804,900.00**
10502	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	704,804,900.00
6	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**643,175,838.00**
10504	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	643,175,838.00
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**754,096,600.00**
10503	Program Penanggulangan Bencana	754,096,600.00
8	**Dinas Sosial**	**244,315,900.00**

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM	PAGU P-RKPD 2026 (Rp)
10604	Program Rehabilitasi Sosial	144,315,291.00
10606	Program Penanganan Bencana	100,000,609.00
	TOTAL	**5,743,180,486,203.00**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

Untuk memperoleh gambaran mengenai ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, perlu dilakukan proyeksi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan fiskal yang tersedia setelah memperhitungkan berbagai komponen belanja yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi terlebih dahulu (*mandatory expenditure*), sehingga mencerminkan besaran anggaran yang benar-benar dapat dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah. Proyeksi ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, menjaga kesinambungan fiskal, serta memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap berada dalam koridor kemampuan keuangan daerah. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

3.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna telah menjadi mekanisme penyeimbang dalam pelaksanaan kebijakan anggaran daerah, khususnya dalam rangka mengatasi selisih pendanaan yang bersifat minus atau defisit. Kebijakan pembiayaan daerah mencatat bahwa sumber penerimaan daerah secara dominan masih berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sedangkan komponen sumber penerimaan pembiayaan lainnya yang memungkinkan relatif tidak memberi andil selama ini. Di lain sisi, Pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, secara komposisi lebih sering tidak berbeda dengan jumlah penerimaan pembiayaan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah menahan diri dari mengucurkan alokasi pengeluaran pembiayaan di tengah kondisi fiskal atau kemampuan pendapatan daerah yang terbatas.

3.4 PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

3.4.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

Proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17.
Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (RKPD 2026 - PRKPD 2026) (Rp)
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**123.395.557.000**	**123.395.557.000**	**136.735.548.016**	**13.339.991.016**
1.1	Pajak Daerah	85.132.064.666	85.132.064.000	85.132.064.000	0
1.2	Retribusi Daerah	27.750.293.000	27.750.293.000	41.090.284.016	13.339.991.016
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.400.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000	0
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.113.200.000	4.113.200.000	4.113.200.000	0
2	**Pendapatan Transfer**	**784.618.838.000**	**912.723.918.000**	**905.669.517.398**	**121.050.679.398**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	744.577.528.000	814.073.209.000	865.307.207.398	120.729.679.398
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		58.609.399.000		0
2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.041.310.000	40.041.310.000	40.362.310.000	321.000.000
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**14.815.550.000**	**7.083.125.000**	**8.452.125.000**	**-6.363.425.000**
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.815.550.000	7.083.125.000	8.452.125.000	-6.363.425.000
Jumlah Pendapatan		**915.097.520.000**	**1.043.202.600.000**	**1.050.857.190.414**	**135.759.670.414**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

Berdasarkan hasil proyeksi perubahan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 (P-RKPD 2026), terdapat peningkatan kemampuan pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Total pendapatan daerah

yang semula diproyeksikan sebesar Rp915.097.520.000 dalam RKPD 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp1.050.857.190.414 pada P-RKPD 2026, atau bertambah sebesar Rp135.759.670.414. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap potensi penerimaan daerah berdasarkan kondisi dan perkembangan realisasi pendapatan terbaru.

Ditinjau berdasarkan komponen pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari Rp123.395.557.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp136.735.548.016 pada P-RKPD 2026, atau meningkat sebesar Rp13.339.991.016. Peningkatan PAD tersebut terutama berasal dari komponen Retribusi Daerah, yang mengalami kenaikan dari Rp27.750.293.000 menjadi Rp41.090.284.016, atau bertambah sebesar Rp13.339.991.016. Sementara itu, komponen Pajak Daerah tetap berada pada nilai yang sama, yaitu sebesar Rp85.132.064.000, demikian pula dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.400.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.113.200.000, yang tidak mengalami perubahan antara RKPD 2026 dan P-RKPD 2026.

Pada kelompok Pendapatan Transfer, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari proyeksi RKPD 2026 sebesar Rp784.618.838.000 menjadi Rp905.659.517.398 pada P-RKPD 2026, atau mengalami kenaikan sebesar Rp121.040.679.398. Peningkatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang meningkat dari Rp744.577.528.000 menjadi Rp865.307.207.398, atau bertambah sebesar Rp120.729.679.398. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami peningkatan dari Rp40.041.310.000 menjadi Rp40.362.310.000, atau bertambah sebesar Rp321.000.000. Sementara itu, komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tidak mengalami perubahan dalam proyeksi P-RKPD 2026.

Berbeda dengan dua kelompok pendapatan sebelumnya, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada P-RKPD 2026. Nilainya berkurang dari Rp14.815.550.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp8.452.125.000 pada P-RKPD 2026, atau mengalami penurunan sebesar Rp6.363.425.000. Penurunan tersebut berasal dari komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang mengalami koreksi dengan nilai yang sama.

Secara keseluruhan, perubahan proyeksi pendapatan pada P-RKPD 2026 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendapatan daerah sebesar Rp135,76 miliar dibandingkan RKPD 2026. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan peningkatan penerimaan retribusi daerah. Meskipun terdapat penurunan

pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, peningkatan pada komponen PAD dan pendapatan transfer mampu mengompensasi penurunan tersebut sehingga total pendapatan daerah dalam P-RKPD 2026 menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan rencana awal RKPD 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 mencerminkan adanya penyesuaian proyeksi pendapatan berdasarkan perkembangan fiskal terbaru, sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun 2026.

3.4.2. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

Proyeksi perubahan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun melalui pembahasan bersama perangkat daerah pengelola anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rincian lengkap mengenai Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Jenis Belanja Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (RKPD 2026 – PRKPD 2026) (Rp)
1	**Belanja Operasi**	**474.026.998.920**	**809.739.086.541**	**828.852.653.205**	**354.825.654.285**
	1.Belanja Pegawai	416.338.847.840	481.191.781.304	473.209.044.198	**56.870.196.358**
	2.Belanja Barang dan Jasa	40.188.151.080	308.767.046.425	330.982.485.688	290.794.334.608
	3.Belanja Subsidi	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	4.Belanja Hibah	12.000.000.000	16.038.558.812	21.519.423.319	9.519.423.319
	5.Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	3.141.700.000	2.541.700.000	-2.958.300.000
2	**Belanja Modal**	**319.352.999.280**	**117.375.663.559**	**139.732.142.585**	**-179.620.856.695**
	1.Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	416.000.000	519.850.100	-480.149.900
	2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.701.000.000	13.047.424.340	22.390.875.585	-8.310.124.415
	3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.000.000.000	35.802.616.179	48.029.526.637	-23.970.473.363
	4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	215.001.999.280	67.693.314.967	66.376.260.990	-148.625.738.290
	5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	650.000.000	399.993.000	2.399.314.200	1.749.314.200
	6.Belanja Modal Aset Lainnya	0	16.315.073	16.315.073	16.315.073

No	Jenis Belanja Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (RKPD 2026 – PRKPD 2026) (Rp)
3	**Belanja Tak Terduga**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**1.622.180.110**	**-3.377.819.890**
	1. Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	1.622.180.110	-3.377.819.890
4	**Belanja Transfer**	**121.717.521.800**	**116.087.849.900**	**86.364.624.100**	**-35.352.897.700**
	1.Belanja Bagi Hasil	2.775.029.300	8.738.822.100	8.738.822.100	**5.963.792.800**
	2.Belanja Bantuan Keuangan	118.942.492.500	107.349.027.800	77.625.802.000	-41.316.690.500
Jumlah Belanja		**920.097.520.000**	**1.048.202.600.000**	**1.056.571.600.000**	**136.474.080.000**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

Berdasarkan hasil proyeksi perubahan anggaran belanja daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 (P-RKPD 2026), terdapat peningkatan total belanja daerah dibandingkan dengan rencana awal dalam RKPD Tahun 2026. Total belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp920.097.520.000 pada RKPD 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp1.056.571.600.000 pada P-RKPD 2026, atau bertambah sebesar Rp136.474.080.000. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan perkembangan kemampuan pendanaan daerah.

Jika dibandingkan antara RKPD 2026 dan P-RKPD 2026, perubahan terbesar terjadi pada kelompok Belanja Operasi. Belanja Operasi meningkat dari Rp474.026.998.920 pada RKPD 2026 menjadi Rp828.552.653.205 pada P-RKPD 2026, atau mengalami kenaikan sebesar Rp354.825.654.285. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan Belanja Pegawai, yang meningkat dari Rp416.338.847.840 menjadi Rp473.209.044.198, atau bertambah sebesar Rp56.870.196.358. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp40.188.151.080 menjadi Rp330.982.485.688, atau bertambah sebesar Rp290.794.334.608. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan program pembangunan.

Pada komponen Belanja Hibah, juga terjadi peningkatan dari Rp12.000.000.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp21.519.423.319 pada P-RKPD 2026, atau bertambah sebesar Rp9.519.423.319. Sementara itu, Belanja Subsidi yang sebelumnya belum dialokasikan dalam RKPD 2026 mengalami penambahan menjadi Rp600.000.000 pada P-RKPD 2026. Sebaliknya, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan dari Rp5.500.000.000 menjadi Rp2.541.700.000, atau berkurang sebesar Rp2.958.300.000.

Berbeda dengan Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal mengalami penurunan pada P-RKPD 2026. Belanja Modal yang semula direncanakan sebesar Rp319.352.999.280 pada RKPD 2026 turun menjadi Rp139.732.142.585 pada P-RKPD 2026, atau berkurang sebesar Rp179.620.856.695. Penurunan tersebut terutama terjadi pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, yang mengalami pengurangan dari Rp215.001.999.280 menjadi Rp66.376.260.990, atau turun sebesar Rp148.625.738.290. Selain itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp23.970.473.363, sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp8.310.124.415. Penyesuaian belanja modal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran dari pembangunan aset fisik menuju kebutuhan operasional dan pelayanan pemerintahan.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga, terjadi penurunan dari Rp5.000.000.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp1.622.180.110 pada P-RKPD 2026, atau berkurang sebesar Rp3.377.819.890. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian alokasi dana cadangan untuk kebutuhan yang bersifat tidak terduga.

Selanjutnya, kelompok Belanja Transfer juga mengalami penurunan dari Rp121.517.521.800 pada RKPD 2026 menjadi Rp86.364.624.100 pada P-RKPD 2026, atau berkurang sebesar Rp35.352.897.700. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pada komponen Belanja Bantuan Keuangan, yang turun dari Rp118.942.492.500 menjadi Rp77.625.802.000, atau berkurang sebesar Rp41.316.690.500. Namun demikian, terdapat peningkatan pada Belanja Bagi Hasil, yaitu dari Rp2.775.029.300 menjadi Rp8.738.822.100, atau bertambah sebesar Rp5.963.792.800.

Secara keseluruhan, perubahan struktur belanja pada P-RKPD 2026 dibandingkan RKPD 2026 menunjukkan adanya peningkatan total belanja sebesar Rp136,47 miliar dengan arah kebijakan yang lebih menitikberatkan pada peningkatan Belanja Operasi, khususnya belanja pegawai serta barang dan jasa. Di sisi lain, pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah.

Dengan demikian, perubahan anggaran belanja pada P-RKPD 2026 mencerminkan strategi pemerintah Kabupaten Natuna dalam menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan prioritas daerah, dengan melakukan penyesuaian komposisi belanja agar

lebih sesuai dengan kondisi pendapatan dan kebutuhan aktual tahun anggaran 2026.

3.4.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

Perincian Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Proyeksi Perubahan Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Jenis Belanja Daerah	RKPD 2026 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/Berkurang (RKPD 2026 -PRKPD 2026) (Rp)
1	**Pendapatan Daerah**	**915.097.520.000**	**1.043.202.600.000**	**1.050.857.190.414**	**135.759.670.414**
2	**Belanja Daerah**	**920.097.520.000**	**1.048.202.600.000**	**1.056.571.600.000**	**136.474.080.000**
	Surplus/(Defisit)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.714.409.586	714.409.586
3	**Pembiayaan**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.714.409.586**	**714.409.586**
	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.714.409.586	714.409.586
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	5.000.000.000	5.714.409.586	714.409.586
4	**Pembiayaan Neto**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.714.409.586**	**714.409.586**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0		0

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

Berdasarkan proyeksi perubahan anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 (P-RKPD 2026), terdapat peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dibandingkan dengan perencanaan awal dalam RKPD Tahun 2026. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian antara proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan daerah.

Pada sisi pendapatan daerah, proyeksi dalam P-RKPD 2026 mengalami peningkatan dibandingkan RKPD 2026, yaitu dari Rp915.097.520.000 menjadi Rp1.050.857.190.414, atau bertambah sebesar Rp135.759.670.414. Peningkatan pendapatan tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar

bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2026.

Selanjutnya, pada komponen belanja daerah, terjadi peningkatan dari Rp920.097.520.000 dalam RKPD 2026 menjadi Rp1.056.571.600.000 pada P-RKPD 2026, atau mengalami kenaikan sebesar Rp136.474.080.000. Kenaikan belanja daerah tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah, sehingga kebutuhan pembiayaan tetap dapat dikendalikan melalui penyesuaian struktur anggaran.

Berdasarkan perbandingan antara RKPD 2026 dan P-RKPD 2026, kondisi surplus/(defisit) mengalami perubahan. Pada RKPD 2026 diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp5.000.000.000, sedangkan pada P-RKPD 2026 nilai surplus/(defisit) meningkat menjadi Rp5.714.409.586. Dengan demikian, terdapat perubahan positif sebesar Rp714.409.586, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan fiskal daerah setelah dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah.

Perubahan tersebut terutama didukung oleh peningkatan komponen pembiayaan daerah. Pada RKPD 2026, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000, kemudian meningkat menjadi Rp5.714.409.586 pada P-RKPD 2026, atau mengalami kenaikan sebesar Rp714.409.586. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan, khususnya komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang mengalami peningkatan dari Rp5.000.000.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp5.714.409.586 pada P-RKPD 2026.

Sementara itu, pada komponen Pembiayaan Neto, terjadi perubahan yang sama, yaitu meningkat dari Rp5.000.000.000 pada RKPD 2026 menjadi Rp5.714.409.586 pada P-RKPD 2026, atau bertambah sebesar Rp714.409.586. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan mampu memperkuat keseimbangan struktur APBD setelah dilakukan perubahan RKPD.

Adapun komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) tetap berada pada nilai Rp0 baik dalam RKPD 2026 maupun P-RKPD 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh penerimaan pembiayaan yang tersedia telah diperhitungkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, perubahan pembiayaan dalam P-RKPD Tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal dibandingkan dengan RKPD 2026. Kenaikan pembiayaan netto sebesar Rp714,41 juta melalui penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA memberikan dukungan terhadap keseimbangan anggaran daerah. Dengan demikian,

struktur pembiayaan Kabupaten Natuna pada P-RKPD 2026 menjadi lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas daerah dengan tetap menjaga prinsip keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah membutuhkan arah yang jelas dan fokus yang tepat. Karena itu, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 menetapkan sasaran dan prioritas sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dan prioritas tersebut disusun untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sekaligus merespons berbagai dinamika dan kebutuhan aktual masyarakat di tahun 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang disajikan pada Subbab 4.1 merupakan hasil penjabaran logis dari visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sementara itu, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang disajikan pada Subbab 4.2 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis daerah, dan proyeksi kondisi sosial ekonomi. Penetapan ini juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga seluruh program dan kegiatan daerah yang direncanakan memiliki keselarasan vertikal dan relevansi tematik terhadap capaian pembangunan jangka menengah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan unsur strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai landasan penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam kerangka perencanaan tahunan. Tujuan dirumuskan sebagai kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun masa perencanaan, sedangkan sasaran menggambarkan capaian terukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, baik secara sektoral maupun lintas sektor. Keduanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang bersifat operasional.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mengacu pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan cerminan arah pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selama masa jabatan lima tahun. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi tersebut mengandung tiga unsur utama yang menjadi arah strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yaitu:

1) Makmur

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi; peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

2) Berdaya Saing

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

3) Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan lima misi pembangunan sebagai bentuk rumusan umum mengenai upaya strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029. Masing-masing misi mencerminkan arah kebijakan sektoral maupun lintas sektor, yang disusun untuk menjawab tantangan pembangunan aktual dan mendukung capaian tujuan jangka menengah daerah secara terarah dan terukur.

1) Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kabupaten Natuna. Karena Kabupaten Natuna secara geografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pariwisata, pertanian, perindustrian dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Natuna.

2) Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau, perbatasan, membangun beberapa sentra ekonomi antar kawasan dalam satu/inter Kabupaten Natuna guna mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir, karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat dan tidak merata. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, Pelabuhan, mendorong dan menfasilitasi untuk pengadaan Kapal/Ferry Ro Ro yang mengangkut orang dan barang-barang hasil produk masyarakat secara reguler yang menghubungkan akses transportasi antar pulau atau antar beberapa kawasan centra ekonomi menuju akses dan pembangunan air bersih, listrik, peningkatan kualitas dan akselerasi akses telekomunikasi yang memadai, ketersediaan jaringan/signal yang standar dan mencukupi, yang dapat menjangkau desa terpencil seluruh Wilayah Kabupaten Natuna.

3) Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan era-Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa beradaptasi, melakukan perbandingan dan bersaing dalam hal peningkatan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini yang tidak kalah pentingnya adalah agar SDM di Kabupaten Natuna memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter serta mampu bersaing.

4) Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai

maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas pegawai, penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi. Pemanfataan teknologi informasi ini dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat karena secara geografis Kabupaten Natuna adalah daerah kepulauan.

5) Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai kegamaan, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Nilai keagamaan dan budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Natuna tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Natuna menjadi modal tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada pencapaian setiap misi di atas, diuraikan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	1.1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sektor Unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	**1,60**	2,00
				Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	**3,35**	3,49
				Pendapatan Perkapita • Dengan Migas • Tanpa Migas	Juta Rupiah	**304,21** **91,24**	321,37 99,28
				Tingkat Kemiskinan	Persen	**4,74**	4,10
				Gini Rasio	Indeks	**0,283**	0,279

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD Tahun 2030
			1.1.1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	Persen	**10,14**	11,03
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	**3,08**	4,01
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	**0,58**	0,70
			1.1.2. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	**0,90**	1,10
				Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	**2,58**	3,14
			1.1.3. Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Persen	**5,56**	9,72
			1.1.4. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran Riil	Indeks	**15,99**	16,84
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	**4,02**	3,98
		1.2. Meningkatnya Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim		Penurunan Intesitas Emisi GRK	Persen	**10,42**	10,69
			1.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Mitigasi Becana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	**79.99**	81,81
				Indeks Risiko Bencana (IRBi) [Nilai]	Indeks	**109,35**	105,27
2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau	1. Terwujudnya Layanan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkualitas		Indeks Infrastruktur	Indeks	**74,74**	77,80
			2.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas	Indeks Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	Indeks	**64,41**	69,94
				Rasio Konektivitas	Rasio	**62,54**	72,33
3	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	3.1. Terciptanya Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Berlandaskan Kesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	**79,99**	81,81
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	**91,92**	92,12
			1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	**74,71**	75,31
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persen	**15,04**	13,62

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Target Akhir RPJMD Tahun 2030
			1.1.2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	**9,68**	10,25
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	**13,99**	14,14
			1.1.3. Meningkatnya Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	**65,73**	66,51
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	**0,791**	0,547
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	**64,50**	65,19
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	4.1. Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	**82,55**	83,84
			4.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	**3,13**	3,53
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE)	Indeks	**3,67**	3,77
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	**3**	3
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	**73,479**	78,979
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Level	**74,55**	76,00
5	Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	5.1. Terciptanya Pelestarian Kebudayaan		Indeks Pelestarian kebudayaan	Persen	**17,80**	18,80
			1.1.1. Meningkatnya Aktualisasi Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang Dilestarikan	Persen	**14,40**	22,30
		5.2. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila dan Demokrasi		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	**86,01**	86,02
			1.1.2. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	Persentase Desa / Kelurahan Bebas Konflik	Persen	**96,10**	98,70
				Indeks Wawasan Kebangsaaan	Indeks	**66,20**	74,72

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PADA PERUBAHAN RKPD 2026

4.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional Tahun 2026

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Keselarasan perencanaan daerah dengan pembangunan nasional menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan konsistensi, sinergi, dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara nasional, arah pembangunan lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan visi pembangunan nasional

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan arah pembangunan tahunan, pemerintah menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema pembangunan

"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"

Tema ini dioperasionalisasikan ke dalam delapan prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2026, sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan.
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 4.1.
Delapan Prioritas Nasional
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Tema RKP juga berfungsi sebagai arah pembangunan jangka pendek yang fokus pada dua klaster strategis, yaitu:

1. Klaster I: Pangan dan Energi;
2. Klaster II: Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.



Keterangan: *) Lima Direktif Presiden

Gambar 4.2.
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026
Sumber: Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2025

Selanjutnya, dalam upaya mengoperasionalkan delapan Prioritas Nasional tersebut, dirumuskan Strategi Trisula Pembangunan dengan 3 pilar di antaranya:

- **Pilar I: Penurunan Kemiskinan** Menyelaraskan Prioritas Nasional 6 dan amanat pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah memfokuskan program pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat rentan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga miskin melalui penguatan kapasitas UMKM, optimalisasi Dana Desa, dan perluasan program padat karya produktif.
- **Pilar II: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** Menyelaraskan Prioritas Nasional 4, Natuna berkomitmen memperkuat kapasitas modal manusia melalui jaminan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan pencegahan serta penurunan stunting pada sektor kesehatan dasar, guna menciptakan generasi yang andal, sehat, dan berdaya saing di beranda terdepan NKRI.

- **Pilar III: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan** Menyelaraskan Prioritas Nasional 2 dan 3, akselerasi ekonomi kepulauan bertumpu pada optimalisasi sektor unggulan daerah *(new engine of growth)* melalui pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang lestari (ekonomi biru), hilirisasi komoditas lokal, serta penyediaan infrastruktur konektivitas antarpulau yang ramah lingkungan.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan **swasembada pangan, energi, dan air.** Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi,dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Pengelolaan sampah nasional menghadapi kondisi darurat akibat proyeksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai melampaui batas. Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan pelibatan multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta mendukung penurunan emisi GRK. Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi pilar utama, meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, perizinan, dan regulasi. Program ini disinergikan

dengan agenda nasional seperti MBG, ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui peran sektor informal.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk **menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif.** Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Di **sektor pendidikan**, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Afirmasi pada akses pendidikan yang berkualitas dilakukan di antaranya melalui percepatan renovasi sekolah, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Setiap sekolah dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan tujuan mengangkat anak-anak dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah unggul sebagai ekosistem bagi talenta-talenta unggul bangsa untuk dapat mengasah dan mengembangkan bakatnya pada lingkungan belajar yang optimal dalam mendukung potensi peserta didik.

Selanjutnya, **digitalisasi pendidikan** merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan nasional, sekaligus membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era ekonomi berbasis teknologi. Program ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat sistem manajemen mutu pendidikan secara nasional.

Di tengah perubahan ini, penguasaan teknologi menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi kehidupan serta memperkuat daya saing dan kemajuan bangsa. Untuk merespons perkembangan tersebut, pembangunan sektor pendidikan perlu diperkuat melalui (i) peningkatan kompetensi dan kreativitas guru; (ii) pembelajaran yang inovatif; dan (iii) materi ajar yang adaptif dan kontekstual. Ketiga hal ini perlu didukung oleh penyediaan sarana digital guna mempercepat proses digitalisasi pendidikan.

Pada **sektor kesehatan**, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem MBG, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan mempercepat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di

kabupaten/kota, diiringi dengan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperkuat untuk mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.

Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui transformasi digital pemerintah yang difokuskan pada (i) pengembangan arsitektur pemerintah digital; (ii) penguatan keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan publik terintegrasi sesuai proses bisnis tematik; dan (iii) implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital.

Selanjutnya, investasi merupakan salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Investasi didorong tidak hanya dengan peningkatan nilai realisasi investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi baik PMA maupun PMDN. Investasi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong produktivitas ekonomi.

Transformasi digital menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya saing nasional di tingkat global, membangun kegiatan sosial yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta perkembangan teknologi digital, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan peningkatan produktivitas.

Riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi diarahkan melalui pendekatan ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi serta mudah dimengerti oleh berbagai stakeholder. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, peningkatan kapasitas iptekin akan dilakukan melalui peningkatan peran lembaga intermediasi yang ada di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), *Science Techno Park* (STP), pusat diseminasi, *Transfer Technology Office* (TTO), dan inkubator, sehingga

riset dan inovasi dapat lebih terarah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, **pertahanan semesta** diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional.

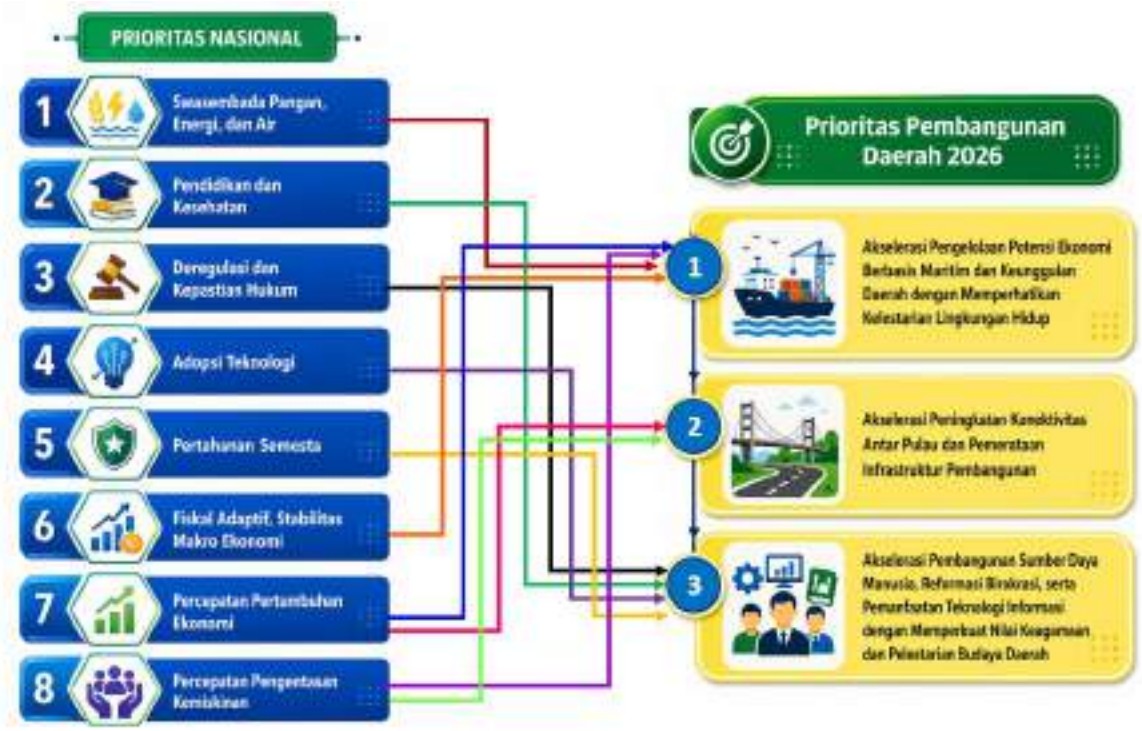
Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan **kebijakan fiskal yang adaptif**. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Melalui kebijakan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi yang tecermin dari terkendalinya inflasi dan nilai tukar rupiah, serta ketahanan sektor eksternal.

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, percepatan hilirisasi utamanya dilakukan melalui konstruksi dan operasionalisasi smelter yang mendukung penambahan kapasitas produksi industri olahan nikel.

Dalam rangka mendukung **percepatan pengentasan kemiskinan**, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** dengan peran sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa antara lain melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa. Program ini sejalan dengan (i) Prioritas Nasional 2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan; (ii) Prioritas Nasional 3, yaitu melakukan pengembangan industri agro-maritim yang melibatkan koperasi secara aktif; serta (iii) Prioritas Nasional 6, yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional.

Keterkaitan antara prioritas nasional Tahun 2026 dan prioritas Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat diidentifikasi pada gambar berikut.



Gambar 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Penyelarasan tersebut merupakan implementasi prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial dalam perencanaan pembangunan, sehingga setiap program dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak hanya menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Natuna, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Natuna menghadapi berbagai tantangan pembangunan, antara lain pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, percepatan transformasi digital, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, arah pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 difokuskan pada upaya memperkuat daya

saing daerah melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi berbasis sumber daya unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah, setiap urusan pemerintahan telah dipetakan ke dalam outcome prioritas, program, dan subkegiatan yang mendukung implementasi Asta Cita sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Outcome prioritas merupakan hasil pembangunan yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan subkegiatan yang terukur, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, pengalokasian anggaran, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Pemetaan *outcome* prioritas, program, dan subkegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna dengan Prioritas Nasional, RPJMN Tahun 2025-2029, serta kebijakan sektoral kementerian dan lembaga. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian target pembangunan nasional sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya, *outcome* prioritas tersebut dijabarkan ke dalam program dan subkegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna. Penyusunan program dan subkegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip *money follows* program, berorientasi pada hasil (*result oriented*), serta memperhatikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kesinambungan pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Keterkaitan antara Asta Cita, outcome prioritas, program, dan subkegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2.
Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita untuk Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
								1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga. kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
					1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang	Terpenuhinya rumah yang layak,	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskin.		Perumahan dan Kawasan Permukiman	terjangkau, dan berkelanjutan		dan Utilitas Umum (PSU)			
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z), dan penyandang disabilitas.							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,				2.07.05	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah					
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)					
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi								
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Terakselerasinya transformasi pemerintahan digital di daerah	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi
					2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
								2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Pencapaian Target Realisasi Penanaman Modal	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Kepemudaan dan Olahraga	inklusif, dan prestasi olahraga			Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
20	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan								
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta				2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.								
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital)
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			Ekonomi Nasional					
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-		-	-
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan

No	Asta Cita	Kode Bidang	Bidang Urusan	*Outcome* Prioritas	Kode Program	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
							Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Mewujudkan Transformasi Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Lokal Transmigrasi	3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			
					3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.								
	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional (ProSN) merupakan program yang ditetapkan oleh Presiden sebagai program yang memiliki nilai strategis dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. ProSN mencakup berbagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yang meliputi Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, serta Proyek Strategis Nasional. Keseluruhan program tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ProSN menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Natuna tidak hanya mampu menjawab berbagai isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengintegrasikan target pembangunan nasional ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagai kabupaten kepulauan dan kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Natuna memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program Strategis Nasional, terutama yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan wilayah perbatasan. Sinergi antara kebijakan nasional dan pembangunan daerah tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi daerah sekaligus memperkuat fungsi strategis Natuna sebagai kawasan perbatasan dan beranda terdepan Indonesia.

Pelaksanaan Program Strategis Nasional juga diarahkan untuk memperkuat keterpaduan pembangunan pusat dan daerah melalui peningkatan efektivitas investasi pembangunan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks

Kabupaten Natuna, dukungan terhadap ProSN diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, implementasi ProSN di Kabupaten Natuna juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang tangguh terhadap berbagai tantangan global maupun regional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

Dengan demikian, integrasi Program Strategis Nasional ke dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang selaras, terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyelarasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkelanjutan.

Dukungan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 terhadap Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Dukungan P-RKPD terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
1	**Pengentasan Kemiskinan/** Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	144.315.291,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.034.604.000,00	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	Program Penanganan Bencana	100.000.609,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	512.154.426,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penambahan akses air minum perpipaan	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.247.005.764,00	
		Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	Program Kawasan Permukiman	1.405.910.360,00	
		Meningkatnya Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	754.096.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	144.315.291,00	Dinas Sosial
	Sekolah Rakyat	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.034.604.000,00	
	Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	Program Kawasan Permukiman	1.405.910.360,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	**Ketahanan Pangan/** Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	385.162.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Nilai)			
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan (Kkal/Kapita/Hari)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	181.059.400,00	
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)			
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			
	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	162.481.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	385.162.600,00	
		Meningkatnya Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Nilai)			
	Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)					
3	**Kesehatan untuk Semua/** Stunting Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jaminan Kesehatan Nasional Penuntasan TBC	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.959.069.605,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% (%)			
		Meningkatnya pengobatan ARV pada orang yang di diagnosis HIV (Dinas Kesehatan)	Persentase orang dengan HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) (%)			
		Meningkatnya puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% (Dinkes)	Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%)			
		Meningkatnya puskesmas yang merespon sinyal SKDR dibawah 24 jam	Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam (%)			
		Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas Bunguran Tengah	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah (Angka)			
		Menurunnya Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Puskesmas Kelarik	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik			

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			(%)			
		Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes rate) (Dinas Kesehatan)	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) (%)			
		Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas Batubi Jaya	Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Batubi Jaya (Angka)			
		Meningkatnya Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar ((Dinas Kesehatan)	Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar (%)			
		Meningkatnya Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi (%)			
		Meningkatnya ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar (%)			
		Meningkatnya pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas	Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas (%)			
		Meningkatnya Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit (%)			
		Meningkatnya Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Lebih Besar Dari 80%	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80% (%)			
		Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar (%)			

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota					
4	Perluasan Akses Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD (5-6 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (Angka)	Program Pengelolaan Pendidikan	56.285.675.632,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah kesetaraan (7-18 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan dasar (7-12 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) (Angka)			
5	Pertumbuhan Ekonomi	Meingkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persentase)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.087.306.659,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
		Meningkatnya efektivitas kebijakan perekonomian daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (Persentase)	Program Perekonomian dan Pembangunan	451.500.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan (Nilai)	Program Perekonomian dan Pembangunan	820.000.000,00	
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah secara berkala dan terukur.	Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis prioritas daerah (%)	Program Perekonomian dan Pembangunan	321.474.029,00	
		Meningkatnya Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	91.686.882.104,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			
		Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja			

No	Program Prioritas Nasional (ProSN)/ Proyek/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah (Persentase)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	200.041.650,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
		Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan	3.902.024.336,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Natuna menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyelarasan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip *money follows* program dan *result oriented development*, yang menitikberatkan pada pengalokasian sumber daya pembangunan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.

Kegiatan Prioritas Utama Nasional merupakan penjabaran operasional dari Program Prioritas Nasional yang difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektor, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah di Kabupaten Natuna diarahkan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya agar selaras dengan Kegiatan Prioritas Utama Nasional, sehingga tercipta keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Penyelarasan program RKPD dengan Kegiatan Prioritas Utama Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui optimalisasi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah, tetapi juga mendukung pencapaian target Prioritas Nasional, Asta Cita, Program Strategis Nasional, serta sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Melalui dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional, Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk mempercepat pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan, memperkuat ketahanan wilayah perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkelanjutan.

Keterkaitan antara Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan Kegiatan Prioritas Utama Nasional beserta perangkat daerah pelaksananya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.4.
Dukungan Program P-RKPD terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional Tahun 2026

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
1.	**Prioritas Nasional 1**					
	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.886.346.500,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)			
2.	**Prioritas Nasional 2**					
	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*			-		
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah			-		
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) /lumbung pangan Sumatra Selatan			-		
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	385.162.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Meningkatnya Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Nilai)			
	Pengembangan kawasan sentra produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya					
	Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.912.827.690,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Persentase)			

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan (%)			
		Meningkatnya produksi ternak	Persentase kenaikan produksi ternak (%)			
		Meningkatnya sarana pertanian yang digunakan	Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)			
	Pembangunan pangan hewani			-		
	Pembangunan pangan lokal dan nabati					
	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan					
	Peningkatan penyediaan energi			-		
	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi			-		
	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	512.154.426,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Konservasi sumberdaya air	Penambahan akses air minum perpipaan	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.247.005.764,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Penambahan akses air limbah domestik	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	233.778.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS					
	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa					
	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Program Pengembangan UMKM	328.791.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya					
	Pengelolaan susut dan sisa pangan			-		

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik					
	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	512.154.426,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas kosistem gambut					
	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan	3.902.024.336,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Meningkatnya sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan (%)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	394.890.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000,00	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Program Pengembangan Umkm	328.791.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
3	**Prioritas Nasional 3**					
	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	-	-	-	-	-
	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta Prambanan	-	-	-	-	-
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	-	-	-	-	-
	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	-	-	-	-	-

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo	-	-	-	-	-
	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	Menigkatnya perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persentase layanan aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.407.452.528,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Pengembangan koperasi sektor produksi			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	161.072.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
4.	**Prioritas Nasional 4**					
	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (Angka)	Program Pengelolaan Pendidikan	56.285.675.632,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) (Angka)			
	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	-	-	-	-	-
	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	-	-	-	-	-
	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	-	-	-	-	-
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	737.170.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	-		
	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Produk	Rasio Produk Inovasi	Program Penelitian	439.475.180,00	Badan Perencanaan,

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah	Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah (Rasio)	Dan Pengembangan Daerah		Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)			
	Penurunan kematian ibu dan anak	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Meningkatnya Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% Meningkatnya pengobatan ARV pada orang yang di diagnosis HIV (Dinas Kesehatan) Meningkatnya puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% (Dinkes) Meningkatnya puskesmas yang merespon sinyal SKDR dibawah 24 jam Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas Bunguran Tengah Menurunnya Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Puskesmas Kelarik Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes rate) (Dinas Kesehatan) Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas Meningkatnya Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar ((Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% (%) Persentase orang dengan HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) (%) Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%) Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam (%) Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah (Angka) Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik (%) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) (%) Jumlah Kematian Bayi Puskesmas (Angka) Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar (%) Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.959.069.605,00	Dinas Kesehatan

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Kesehatan) Meningkatnya Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi Meningkatnya ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar Meningkatnya pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas Meningkatnya Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit Meningkatnya Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Lebih Besar Dari 80% Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar	yang tersertifikasi akreditasi (%) Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar (%) Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas (%) Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit (%) Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80% (%) Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar (%)			
	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	-	-	-	-	-
	Penuntasan TBC	-	-	-	-	-
	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	-	-	-	-	-
	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	-	-	-	-	-
	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	-	-	-	-	-
	Investasi pelayanan kesehatan primer	-	-	-	-	-
	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	-	-	-	-	-
	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.157.162.500,00	Dinas Kesehatan

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			kompetensinya (%)	Kesehatan		
		Meningkatnya SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)			
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	Menigkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	Program Pengembangan Kebudayaan	772.448.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Meningkatnya Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	Program Kepegawaian Daerah	1.635.516.800,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	Meningkatnya Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah (Rasio)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	439.475.180,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)			
5.	**Prioritas Nasional 5**					
	Pengembangan hilirisasi Nikel					
	Pengembangan hilirisasi Tembaga					
	Pengembangan hilirisasi Bauksit					
	Pengembangan hilirisasi Timah					
	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit					
	Pengembangan hilirisasi Kelapa					
	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut					
	Pengembangan hilirisasi Kimia					
	Pengembangan industri semikonduktor					

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil					
	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja					
	Pengembangan industri dirgantara					
	Pengembangan KEK Sei Mangkei					
	Pengembangan KIT Batang					
	Pengembangan KI Weda Bay					
6.	**Prioritas Nasional 6**					
	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.034.604.000,00	Dinas Sosial
	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif					
	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif			-		
	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara			-		
	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya Perumahan Yang Memiliki Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dalam Kondisi Baik	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	18.337.937.310,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	Program Kawasan Permukiman	1.405.910.360,00	
		Meningkatnya saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	10.592.398.315,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	15.027.932.246,00	
		Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	33.214.649.310,00	
7.	**Prioritas Nasional 7**					

		Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Pencegahan tindak pidana korupsi	Meningkatnya Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.768.424.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Meningkatnya Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	181.429.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Transformasi digital layanan publik prioritas	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.886.346.500,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	978.479.319,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak					
8.	**Prioritas Nasional 8**					
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Meningkatnya Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.768.424.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Menigkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	Program Pengembangan Kebudayaan	772.448.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	318.550.000,00	Dinas Perikanan

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

4.2.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Riau

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah tingkat provinsi. Sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, **Kabupaten Natuna** memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan arah dan fokus pembangunan daerahnya agar sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Natuna dalam RKPD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi krusial untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan, konsistensi antar level perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional dan lintas wilayah.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah: **"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata".** Makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) MAJU

Artinya Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya aras pembangunan human capital mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan/energi terbarukan, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas. Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah

lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

2) MAKMUR

Artinya Makmur dimaknai sebagai banyak hasil, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Masyarakat makmur merupakan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam negara tanpa kesulitan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Ini dikarenakan apabila kualitas pendidikan enggak baik maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Disamping itu juga bisa diwujudkan dengan kestabilan ekonomi dan juga palayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat adil dan makmur adalah sebuah konsep ideal yang mencakup tatanan sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh keadilan serta mendapatkan kemakmuran yang merata. Konsep ini melibatkan pemerataan pendapatan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan, serta keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat adil dan makmur merupakan konsep yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat adil berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Selain itu, masyarakat adil juga mengutamakan prinsip keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sementara itu, masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak

individu. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

3) MERATA

Artinya Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil Pemerataan pembanguan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
   Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.
2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
   Membangun infrastruktur dan transportasi publik dalam menguatkan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; air baku; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, serta peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.
3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan; Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya melayu dan nasional. Dalam kaitan ini juga dilakukan penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup yang pada akhirnya meningkatkan resilensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 menjadi landasan strategis dalam penetapan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Berpedoman pada visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan secara terukur dan terarah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan dan sasaran ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional, kondisi faktual daerah, serta kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Natuna.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota dalam menjaga keselarasan arah pembangunan lintas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut adalah tujuan dan sasaran berdasarkan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Tabel 4.5.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
VISI: "KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA"			
Misi 1:	**Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**		
1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,46 – 7,38
		Rasio Gini (Indeks)	0,359 – 0,371
		PDRB per Kapita (Rp juta rupiah)	180,77 – 191,90
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,11
1.1.2	Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB(%)	0,556
1.1.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,71 - 42,19
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	72,46
1.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,29 - 6,22
1.1.5	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan,	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	39,12
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	67,29

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
	kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		
1.1.6	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	44,66
1.1.7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,17 – 3,77
Misi 2:	**Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**		
2.1	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Indeks Infrastruktur	65,25
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	52,65
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	3.065
2.1.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (%)	0,72
Misi 3:	**Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan Berkarakter**		
3.1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Modal Manusia	0,61 – 0,63
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,58
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,35
3.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,05
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,327- 0,322
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,78
3.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	71,85
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,355
Misi 4:	**Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**		
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi	A-
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,33
4.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	68,46
4.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan	Predikat SAKIP	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,43
		Level Maturitas SPIP	Level 3

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun 2026
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,48
4.1.4	Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,74
4.1.5	Meningkatnya transformasi digital daerah	Indeks Teknologi Digital Nasional (ITDN)	51,23
4.1.6	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,68
Misi 5:	**Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**		
5.1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Harmoni	Bagus
5.1.1	Meningkatnya penguatan pemajuan kebudayaan melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,68
5.1.2	Meningkatnya toleransi kerukunan umat Bergama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,37 - 84,51
5.2	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	49,87
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,67
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	108

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan menengah. Penetapan arah dan prioritas pembangunan tahun berjalan dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan daerah yang berkembang, kondisi aktual capaian pembangunan, serta kebutuhan prioritas masyarakat kepulauan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu strategis dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, terdapat tujuh isu strategis yang menjadi fokus penanganan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1) Kualitas pembangunan manusia yang belum optimal, terutama terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2) Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis maritim yang belum optimal, termasuk pengelolaan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
3) Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih perlu diturunkan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, nelayan, petani, dan pekerja informal.
4) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, khususnya infrastruktur dasar antar pulau, transportasi, kelistrikan, air bersih, serta akses digital.
5) Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, melalui akselerasi reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
6) Pelestarian budaya Melayu sebagai identitas daerah yang belum optimal terkelola, serta masih lemahnya integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah.
7) Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat, sehingga diperlukan penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan kepulauan.

Untuk menjawab tantangan dan isu strategis tersebut, tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

"Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel"

Tema pembangunan tersebut dioperasionalisasikan melalui tiga prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yaitu:

1) Akselerasi pengelolaan potensi ekonomi maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
2) Akselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
3) Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya Melayu.

Penetapan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan, pembangunan

wilayah perbatasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa intervensi kebijakan yang menjadi penekanan antara lain:

1) Penguatan program bantuan nelayan, UMKM, dan pelaku usaha kecil,
2) Akselerasi pengembangan SDM melalui beasiswa dan pelatihan kerja,
3) Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan air bersih di daerah 3T,
4) Penguatan layanan kesehatan termasuk pengadaan ambulans laut,
5) Pengembangan pariwisata berbasis budaya Melayu.

Selaras dengan tema pembangunan dan tiga prioritas utama pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang secara substansial mendukung pencapaian prioritas pembangunan provinsi. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memperkuat kesinambungan perencanaan pembangunan antar level pemerintahan, memastikan efektivitas intervensi pembangunan, serta mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Adapun keterkaitan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 4.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Tabel 4.6.
Dukungan Program P-RKPD terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
1.	**Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah**	Meningkatnya Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	243.680.100,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)			
		Meningkatnya Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Program Hubungan Industrial	82.627.600,00	
		• Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan • Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi • Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	• Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan (Kkal/Kapita/Hari) • Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari) • Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	181.059.400,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	385.162.600,00	
		Meningkatnya Prevalence Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat	Prevalence Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat (Nilai)			
		Meningkatnya Pangan Segar Yang Aman	Persentase Pangan Segar Yang Aman (%)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	181.142.800,00	
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.912.827.690,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Persentase)			
			Persentase Kenaikan Produksi Tanaman Perkebunan (%)			
		Meningkatnya Produksi Ternak	Persentase Kenaikan Produksi Ternak (%)			
		Meningkatnya Sarana Pertanian Yang Digunakan	Persentase Sarana Pertanian Yang Digunakan (%)			
		Menurunnya Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.000.000,00	
		Meningkatnya Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan (%)			
		Meningkatnya Kemampuan SDM Dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Dan Kelembagaan Petani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	162.481.900,00	
		• Meningkatnya Luas Lahan Konservasi • Meningkatnya Rehabilitasi Dan Pemulihan SDA • Meningkatnya Jumlah Media Dan/Atau Laporan Kualitas Lingkungan	• Luas Lahan Konservasi (Ha) • Persentase Peningkatan Rehabilitasi Dan Pemulihan SDA (%) • Persentase Media Dan/Atau Laporan Kualitas Lingkungan (%)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	118.070.252,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Luas Area RTH	Persentase Luas Area RTH (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.824.079.000,00	
		Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Taat	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap	105.265.000,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Hukum	Taat Hukum (%)	Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		
		Meningkatnya Aparatur/Kelompok Berbudaya Dan Peduli Lingkungan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.613.300,00	
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	68.104.500,00	
		Meningkatnya Kasus Lingkungan Yang Tertangani	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	42.355.000,00	
		Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan	3.902.024.336,00	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	161.072.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
		Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal (Persentase)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.000.402.000,00	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Program Pengembangan Umkm	328.791.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisein, Merata Dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Di Tingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.326.624.246,00	
		Meingkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilitas	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	1.087.306.659,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Barang Penting (Persentase)	Barang Penting		
		Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Persentase)	Program Pengembangan Ekspor	115.145.450,00	
		Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah (Persentase)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	200.041.650,00	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal "Baik" Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Sudah Dilakukan Pembinaan (Persentase)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	33.444.760,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat Dan Terkini (Persentase)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.219.850,00	
		Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	102.500.000,00	UPTD Metrologi Legal
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	74.432.760,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Persentase)	Program Promosi Penanaman Modal	242.118.000,00	
		Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sessuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	67.953.600,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			(Persentase)			
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (Persentase)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	99.117.000,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.606.060,00	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	318.550.000,00	Dinas Perikanan
		• Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya • Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya	• Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%) • Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya (%)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	92.270.200,00	
		Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000,00	
		Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang) (Persentase)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	886.940.300,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	Program Pemasaran Pariwisata	520.714.900,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif Dan Tervalidasi (Persentase)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	113.999.950,00	
2.	**Pengembangan Wilayah**	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	512.154.426,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Infrastruktur	Penambahan Akses Air Minum Perpipaan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.247.005.764,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar Yang Ditetapkan	Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar Yang Ditetapkan (%)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	394.890.000,00	
		Penambahan Akses Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	233.778.700,00	
		Meningkatnya Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik	Persentase Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	10.592.398.315,00	
		Meningkatnya Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (Persentase)	Program Penataan Bangunan Gedung	8.269.361.135,00	
		Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Persentase)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	15.027.932.246,00	
		Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	33.214.649.310,00	
		Meningkatnya TKK Terampil Terhadap TKK Teridentifikasi	Persentase TKK Terampil Terhadap TKK Teridentifikasi (%)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	97.073.500,00	
		Meningkatnya Jumlah Dokumen RTR Yang Tersedia	Jumlah Dokumen RTR Yang Tersedia (Dokumen)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.174.984.310,00	
		Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	Program Pengembangan Perumahan	271.269.100,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
		Meningkatnya Pemukiman	Rasio Pemukiman Layak	Program Kawasan	1.405.910.360,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Layak Huni	Huni (Rasio)	Permukiman		
		Meningkatnya Perumahan Yang Memiliki Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dalam Kondisi Baik	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum) (%)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	18.337.937.310,00	
		Meningkatnya Luas Tanah Bersertifikat	Persentase Luas Tanah Bersertifikat (%)	Program Penatagunaan Tanah	659.892.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	508.839.919,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)			
		Meningkatnya Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	754.096.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Menigkatnya Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	5.281.874.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Dan Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)			
		Menigkatnya Pelabuhan Berfungsi Dengan Baik	Persentase Pelabuhan Berfungsi Dengan Baik (%)	Program Pengelolaan Pelayaran	3.292.308.458,00	
		• Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.886.346.500,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		• Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	• Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)			
		Menigkatnya Perangkat Daerah Yang Mengelola Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.407.452.528,00	
		Menigkatnya OPD Yang Menyediakan Data Dan Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Dan Metadata Statistik Sektoral (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.339.700,00	
		Meningkatnya Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76.397.652,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan (%)	Program Pengelolaan Perbatasan	4.759.737.215,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.	**Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya**	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (Angka)	Program Pengelolaan Pendidikan	56.285.675.632,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Program Pengembangan Kurikulum	113.728.180,00	
		• Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru • Meningkatnya Guru Yang Memiliki Sertifikat	• Indeks Pemerataan Guru (Indeks) • Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	737.170.000,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Pendidik	Pendidik (Persentase)			
		Meningkatnya Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa Dan Sastra (Persentase)	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	192.680.840,00	
		Menigkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	Program Pengembangan Kebudayaan	772.448.700,00	
		Menigkatnya Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan Dan Dikembangkan	Prosentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan Dan Dikembangkan (Persentase)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	265.555.000,00	
		Menigkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (Persentase)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	105.896.720,00	
		Menigkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum (Persentase)	Program Pengelolaan Permuseuman	739.530.440,00	
		• Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) • Meningkatnya Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% • Meningkatnya pengobatan ARV pada orang yang di diagnosis HIV (Dinas Kesehatan) • Meningkatnya puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% (Dinkes) • Meningkatnya puskesmas yang merespon sinyal SKDR dibawah 24 jam • Menurunnya Angka	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% (%) • Persentase orang dengan HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) (%) • Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%) • Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.959.069.605,00	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Kematian Bayi di Puskesmas Bunguran Tengah • Menurunnya Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Puskesmas Kelarik • Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes rate) (Dinas Kesehatan) • Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas • Meningkatnya Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar ((Dinas Kesehatan) • Meningkatnya Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi • Meningkatnya ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar • Meningkatnya pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas • Meningkatnya Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit • Meningkatnya Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Lebih Besar Dari 80% • Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar	• Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah (Angka) • Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik (%) • Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) (%) • Jumlah Kematian Bayi Puskesmas (Angka) • Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar (%) • Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi (%) • Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar (%) • Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas (%) • Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit (%) • Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80% (%) • Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi			

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			kesehatan sesuai standar (%)			
		• Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya • Meningkatnya SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	• Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) • Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.157.162.500,00	
		Meningkatnya sarana produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang diperiksa	Persentase sarana produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan (%)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	271.450.370,00	
		Meningkatnya rumah tangga yang ber PHBS	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	507.423.700,00	
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	704.804.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)			
		Meningkatnya Perda Dan Perkada Yang Di Tegakkan	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan (%)			
		Meningkatnya PPNS Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase PPNS Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan	Program Rehabilitasi Sosial	144.315.291,00	Dinas Sosial

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (%)			
		Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.034.604.000,00	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	Program Penanganan Bencana	100.000.609,00	
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	250.183.207,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)			
		Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan /Tppo Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan	428.108.607,00	
		Meningkatnya Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO	Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO (%)			
		Meningkatnya Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	73.811.174,00	
		Meningkatnya Indeks	Indeks Pemenuhan Hak	Program Pemenuhan Hak	39.412.987,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Anak (IPHA) (Indeks)	Anak (Pha)		
		Meningkatnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Program Perlindungan Khusus Anak	369.922.425,00	
		Meningkatnya Layanan Komprehensif Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)			
		Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specipic Fertility Rate / ASFR 15 -19)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specipic Fertility Rate / ASFR 15 -19) (Angka)	Program Pengendalian Penduduk	76.442.757,00	
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)			
		Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (Mcpr)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (Mcpr) (Angka)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.303.576.627,00	
		Meningkatnya Persentase Kebutuhan Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmedneed)	Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Persentase)			
		Meningkatnya Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	263.523.446,00	
		Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	Program Pendaftaran Penduduk	200.200.410,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)			

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Perekaman KTP Elektronik	Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)			
		Meningkatnya Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)	Program Pencatatan Sipil	143.845.310,00	
		Meningkatnya Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (Persentase)			
		Meningkatnya Akta Perkawinan Dan Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Persentase Akte Perkawinan Dan Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)			
		Meningkatnya Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan (Persentase)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.929.000,00	
		Meningkatnya Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)			
		Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan (%)			
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	110.500.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	Program Penataan Desa	38.127.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	14.873.000,00	
		Meningkatnya Kualitas	Persentase Aparatur	Program Administrasi	267.001.100,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa Dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Pemerintahan Desa		
		Meningkatnya Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)			
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyayarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.105.567.560,00	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	111.111.850,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Meningkatnya Pembudayaan Dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Yang Masuk Pelatda Provinsi (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.696.607.061,00	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	529.171.400,00	
		Menigkatnya Indeks Kepuasan Pemustaka	Indeks Kepuasan Pemustaka (Indeks)	Program Pembinaan Perpustakaan	546.470.700,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip (%)	Program Pengelolaan Arsip	83.592.000,00	
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (Persentase)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)	451.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan (Nilai)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	820.000.000,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pembangunan Strategis Daerah Secara Berkala Dan Terukur.	Tingkat Keterlaksanaan Kegiatan Strategis Prioritas Daerah (%)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)	321.474.029,00	
		Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kegamaan, Pembinaan Mental Dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kegamaan, Pembinaan Mental Dan Sosial Kemasyarakatan (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	10.700.930.000,00	
		Meningkatnya Persentase Produk Hukum Daerah Yang Telah Terdigitalisasi Dan Dapat Diakses Publik Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Telah Terdigitalisasi Dan Dapat Diakses Publik Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Hukum)	567.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Skor)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Tata Pemerintahan))	600.000.000,00	
		Meningkatnya Kerjasama Guna Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Kerjasama)	149.999.990,00	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.016.004.314,00	
		Meningkatnya Persentase Layanan Publik Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)			
		Meningkatnya Persentase Agenda Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan Secara Terbuka Melalui Media Resmi Pemerintah	Persentase Agenda Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan Secara Terbuka Melalui Media Resmi Pemerintah (Persentase)			

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)			
		Meningkatnya Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	12.102.464.833,00	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Usulan Masyarakat Yang Di Akomodir Dalam RKPD	Persentase Usulan Masyarakat Yang Di Akomodir Dalam RKPD (%)			
		Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			
		Meningkatnya Program Prioritas Nasional Yang Didukung Program Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional Yang Didukung Program Daerah (%)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.084.139.540,00	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Diakomodir	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Diakomodir (%)			
		Meningkatnya Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (%)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	823.619.614,00	
		Meningkatnya Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)			
		Meningkatnya Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RPJMD Yang Diakomodir Dalam RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)			

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah (Rasio)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	439.475.180,00	
		Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)			
		Meningkatnya Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melelalui TKD	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melelalui TKD (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	91.686.882.104,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persentase)			
		Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Aset	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.111.419.952,00	
		Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	978.479.319,00	
		Meningkatnya Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	Program Kepegawaian Daerah	1.635.516.800,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	181.429.000,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)			
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/ Daerah	Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.382.037.680,00	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya Penyelesaian TLHP BPK Dan APIP	Persentase Penyelesaian TLHP BPK Dan APIP (Persentase)			
		Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.010.190.300,00	
		Meningkatnya Nilai Manajemen Risiko (MR)	Nilai Manajemen Risiko (MR) (Nilai)			
		Meningkatnya Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.768.424.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Meningkatnya Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (Persentase)	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	782.554.881,00	
		Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (Persentase)	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.640.400,00	
		Meningkatnya Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	634.558.369,00	

No.	Prioritas Provinsi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan (Persentase)			
		Meningkatnya Konflik Sosial Yang Di Selesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (Persentase)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.803.090.532,00	

Sumber: Olahan Bapperida Kabupaten Natuna, 2026

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Natuna dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas ini merupakan langkah strategis untuk menjabarkan misi pembangunan jangka menengah ke dalam agenda tahunan yang lebih operasional, fokus, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, perumusan prioritas tahun 2026 juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis daerah, kebutuhan riil masyarakat, serta dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Tema pembangunan pada tahun 2026 adalah:

"Akselerasi Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah, Pemerataan Pembangunan Dan Konektivitas Antar Pulau, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya"

Tema pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2026 tersebut dirumuskan sebagai landasan konseptual dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi. Tema tersebut tidak hanya merefleksikan prioritas makro yang ingin dicapai, tetapi juga menjadi titik tolak dalam penyusunan strategi dan penjabaran kebijakan sektoral secara lebih operasional. Sebagai bentuk konkret dari penerjemahan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan tiga prioritas utama pembangunan yang akan menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan, program, kegiatan, hingga sub kegiatan dalam pembangunan daerah pada tahun perencanaan. Ketiga prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, dinamika isu strategis, serta sinergi lintas sektor yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ketiga prioritas pembangunan tahun 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1) Akselerasi pengelolan potensi ekonomi berbasis maritim dan keunggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
2) Akselerasi peningkatan konektivitas antarpulau dan pemerataan infrastruktur pembangunan.
3) Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dengan memperkuat nilai keagamaan dan pelestarian budaya daerah.

Tabel 4.7.
Dukungan Program Perubahan RKPD terhadap Prioritas Kabupaten Natuna 2026

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
1	**Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan**	Meningkatnya Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	243.680.100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)			
		Meningkatnya Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak pekerja dan dialog Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Program Hubungan Industrial	82.627.600,00	
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan (Kkal/Kapita/Hari)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	181.059.400,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)			
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	385.162.600,00	
		Meningkatnya Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Nilai)			
		Meningkatnya Pangan Segar yang Aman	Persentase Pangan Segar yang Aman (%)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	181.142.800,00	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.912.827.690,00	
		Meningkatnya produksi	Peningkatan produksi			

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		tanaman perkebunan	tanaman perkebunan (Persentase)			
			Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan (%)			
		Meningkatnya produksi ternak	Persentase kenaikan produksi ternak (%)			
		Meningkatnya sarana pertanian yang digunakan	Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)			
		Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.000.000,00	
		Meningkatnya tingkat keberhasilan penanganan kasus penyakit hewan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan (%)			
		Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	162.481.900,00	
		Meningkatnya Luas Lahan Konservasi	Luas Lahan Konservasi (Ha)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	118.070.252,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA (%)			
		Meningkatnya Jumlah Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan	Persentase Media dan/atau Laporan Kualitas Lingkungan (%)			
		Meningkatnya Luas Area RTH	Persentase Luas Area RTH (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.824.079.000,00	
		Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum (%)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	105.265.000,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
				Hidup (Pplh)		
		Meningkatnya Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.613.300,00	
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	68.104.500,00	
		Meningkatnya Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	42.355.000,00	
		Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan	3.902.024.336,00	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	161.072.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.000.402.000,00	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Program Pengembangan Umkm	328.791.000,00	
		Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi (Persentase)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisein, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang di Tingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.326.624.246,00	
		Meingkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Program Stabilisasi Harga Barang	1.087.306.659,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pokok dan Barang Penting (Persentase)	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Persentase)	Program Pengembangan Ekspor	115.145.450,00	
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah (Persentase)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	200.041.650,00	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan (Persentase)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	33.444.760,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (Persentase)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.219.850,00	
		Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	102.500.000,00	UPTD Metrologi Legal
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	74.432.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	Program Promosi Penanaman Modal	242.118.000,00	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sessuai Ketentuan (Persentase)	Program Pelayanan Penanaman Modal	67.953.600,00	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	99.117.000,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	Modal		
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.606.060,00	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap (%)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	318.550.000,00	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (%)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	92.270.200,00	
		Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya (%)			
		Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000,00	
		Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang) (Persentase)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	886.940.300,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	Program Pemasaran Pariwisata	520.714.900,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	113.999.950,00	
2	**Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta**	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Ketersediaan Air Baku (Liter/Detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	512.154.426,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penambahan akses air minum perpipaan	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.247.005.764,00	
		Meningkatnya sarana	Persentase terbangunnya	Program Pengembangan	394.890.000,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Ketahanan terhadap Bencana	prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan	sarana prasarana persampahan sesuai standar yang ditetapkan (%)	Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		Penambahan akses air limbah domestik	Persentase Peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	233.778.700,00	
		Meningkatnya saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	10.592.398.315,00	
		Meningkatnya Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	Program Penataan Bangunan Gedung	8.269.361.135,00	
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	15.027.932.246,00	
		Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	33.214.649.310,00	
		Meningkatnya TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi (%)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	97.073.500,00	
		Meningkatnya Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia (Dokumen)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.174.984.310,00	
		Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (%)	Program Pengembangan Perumahan	271.269.100,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	Program Kawasan Permukiman	1.405.910.360,00	
		Meningkatnya Perumahan Yang Memiliki Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	18.337.937.310,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		(PSU) Dalam Kondisi Baik	dan Utilitas Umum) (%)			
		Meningkatnya luas tanah bersertifikat	Persentase luas tanah bersertifikat (%)	Program Penatagunaan Tanah	659.892.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	508.839.919,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)			
		Meningkatnya Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	754.096.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Menigkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.281.874.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya keselamatan transportasi dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)			
		Menigkatnya Pelabuhan Berfungsi dengan Baik	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik (%)	Program Pengelolaan Pelayaran	3.292.308.458,00	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.886.346.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)			
		Menigkatnya perangkat daerah yang mengelola	Persentase layanan aplikasi pemerintah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.407.452.528,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		aplikasi informatika	daerah yang terintegrasi (%)			
		Menigkatnya OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.339.700,00	
		Meningkatnya Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76.397.652,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan (%)	Program Pengelolaan Perbatasan	4.759.737.215,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3	**Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.**	Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD (5-6 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (Angka)	Program Pengelolaan Pendidikan	56.285.675.632,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah kesetaraan (7-18 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan dasar (7-12 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) (Angka)			
		Meningkatnya Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Program Pengembangan Kurikulum	113.728.180,00	
		Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	737.170.000,00	
		Meningkatnya Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)			
		Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	192.680.840,00	
		Menigkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Program Pengembangan Kebudayaan	772.448.700,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan (Persentase)			
		Menigkatnya Kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	265.555.000,00	
		Menigkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	105.896.720,00	
		Menigkatnya Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	Program Pengelolaan Permuseuman	739.530.440,00	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.959.069.605,00	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.157.162.500,00	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	271.450.370,00	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	507.423.700,00	
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	704.804.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)			
		Meningkatnya Perda dan Perkada yang di Tegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			
		Meningkatnya PPNS yang	Persentase PPNS yang			

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Ditingkatkan Kompetensinya	Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	144.315.291,00	Dinas Sosial
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.034.604.000,00	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	Program Penanganan Bencana	100.000.609,00	
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	250.183.207,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan (%)			
		Meningkatnya perempuan korban kekerasan /tppo yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan	428.108.607,00	
		Meningkatnya Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Persentase Penyelesaian Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO (%)			

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	73.811.174,00	
		Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	39.412.987,00	
		Meningkatnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Program Perlindungan Khusus Anak	369.922.425,00	
		Meningkatnya layanan komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)			
		Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (age specipic fertility rate / ASFR 15 -19)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (age specipic fertility rate / ASFR 15 -19) (Angka)	Program Pengendalian Penduduk	76.442.757,00	
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (total fertility rate / TFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)			
		Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (Mcpr)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (Mcpr) (Angka)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.303.576.627,00	
		Meningkatnya Persentase Kebutuhan Ber KB tidak terpenuhi (Unmedneed)	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (Persentase)			
		Meningkatnya Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	263.523.446,00	
		Meningkatnya Kepemilikan	Persentase kepemilikan	Program Pendaftaran	200.200.410,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Identitas Kependudukan Digital	Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	Penduduk		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)			
		Meningkatnya Perekaman KTP Elektronik	Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)			
		Meningkatnya Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Program Pencatatan Sipil	143.845.310,00	
		Meningkatnya Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			
		Meningkatnya akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			
		Meningkatnya Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.929.000,00	
		Meningkatnya Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)			
		Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan	Persentase penyajian Data Kependudukan (%)			
		meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	110.500.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	38.127.000,00	Dinas Pemberdayaan

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
			(Persentase)			Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Efektivitas kerja sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	14.873.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	267.001.100,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)			
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.105.567.560,00	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	111.111.850,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Provinsi (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.696.607.061,00	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	529.171.400,00	
		Menigkatnya Indeks Kepuasan Pemustaka	Indeks Kepuasan Pemustaka (Indeks)	Program Pembinaan Perpustakaan	546.470.700,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip (%)	Program Pengelolaan Arsip	83.592.000,00	
		Meningkatnya efektivitas kebijakan perekonomian daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (Persentase)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	451.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan (Nilai)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	820.000.000,00	
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah secara berkala dan terukur.	Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis prioritas daerah (%)	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)	321.474.029,00	
		Meningkatnya Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	10.700.930.000,00	
		Meningkatnya Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Hukum)	567.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Skor)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Tata Pemerintahan)	600.000.000,00	
		Meningkatnya Kerjasama guna mendorong peningkatan daya saing daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan (Bagian Kerjasama)	149.999.990,00	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.016.004.314,00	
		Meningkatnya Persentase Layanan Publik yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)			
		Meningkatnya Persentase	Persentase agenda			

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah	pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah (Persentase)			
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)			
		Meningkatnya Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	12.102.464.833,00	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD (%)			
		Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			
		Meningkatnya Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.084.139.540,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir (%)			
		Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	823.619.614,00	
		Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)			

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Meningkatnya Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)			
		Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	439.475.180,00	
		Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah (%)			
		Meningkatnya Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	91.686.882.104,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			
		Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Aset	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.111.419.952,00	
		Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	978.479.319,00	
		Meningkatnya Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	Program Kepegawaian Daerah	1.635.516.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Rasio	Rasio Jabatan Fungsional	Program Pengembangan	181.429.000,00	

No	Prioritas Kabupaten	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	Sumber Daya Manusia		
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/ Daerah	Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.382.037.680,00	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	Persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (Persentase)			
		Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Nilai)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.010.190.300,00	
		Meningkatnya Nilai Manajemen Risiko (MR)	Nilai Manajemen Risiko (MR) (Nilai)			
		Meningkatnya Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.768.424.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	782.554.881,00	
		Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.640.400,00	

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Tabel 4.8.
Target RKP, P-RKPD Provinsi Kepri dan P-RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RKP 2026	TARGET P- RKPD PROVINSI KEPRI 2026		TARGET P-RKPD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026
			PROVINSI	KLASTER NATUNA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80 - 6,34	5.46-7.38	1,60	1,60
2.	PDRB Per Kapita (juta)	181,7 – 187,2	180,77 - 191,90	91,24	91,24
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	1,6	-	-	7,36
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,00 – 4,00	4,17-3,77	4,74	4,74
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92 – 6,35	6,29-6,22	4,02	4,02
6.	Rasio Gini	0,296 – 0,319	0,359-0,371	-	0,283
7.	Indeks Modal Manusia	0,63	0,61-0,63	-	-
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	5,03	-	6,64/10,42
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,20	75,67	79,99	79,99

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Dalam rangka memperkuat pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna selain menetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang mencerminkan arah strategis pembangunan daerah, juga menetapkan program prioritas kepala daerah yang bersifat lebih teknis dan operasional. Program-program ini disusun untuk menjawab kebutuhan spesifik di berbagai sektor pelayanan publik, serta sebagai instrumen percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program prioritas kepala daerah berfungsi sebagai katalis implementatif dari kebijakan pembangunan, dan diarahkan untuk menghasilkan output yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penjabaran lebih lanjut mengenai program prioritas kepala daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 disampaikan pada bagian berikut.

Tabel 4.9.
Program Prioritas Kepala Daerah dalam PRKPD Tahun 2026

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
1	Peningkatan Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Daerah ▪ Pemberian bantuan Bibit Kelapa Unggulan 5000/pertahun ▪ Bibit Cengkeh Unggulan 5000/pertahun	• Meningkatnya produksi tanaman pangan • Meningkatnya produksi tanaman perkebunan • Meningkatnya produksi ternak • Meningkatnya sarana pertanian yang digunakan	• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) • Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Persentase) • Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan (%) • Persentase kenaikan produksi ternak (%) • Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ▪ Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota ▪ Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.912.827.690,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Peningkatan Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Daerah ▪ Pengadaan Pupuk untuk petani 75 ton pertahun	Meningkatnya Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ▪ Pengembangan Prasarana Pertanian ▪ Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	618.747.579,00	
	Peningkatan Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Daerah ▪ Memfasilitasi Pupuk Murah dari Nasional	• Meningkatnya produksi tanaman pangan • Meningkatnya	• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) • Peningkatan produksi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN* ▪ Pengelolaan Sumber	1.912.827.690,00*	

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		produksi tanaman perkebunan • Meningkatnya produksi ternak Meningkatnya sarana pertanian yang digunakan	tanaman perkebunan (Persentase) • Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan (%) • Persentase kenaikan produksi ternak (%) Persentase sarana pertanian yang digunakan (%)	Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota ▪ Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
		Meningkatnya Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN* ▪ Pengembangan Prasarana Pertanian ▪ Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	618.747.579,00*	
		Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ▪ Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian ▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	162.481.900,00	
	Peningkatan Sektor Pertanian	• Meningkatnya	• Persentase produksi	PROGRAM PENGELOLAAN	92.270.200,00	Dinas Perikanan

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	Berbasis Komoditas Daerah Pengadaan Bibit Ikan Kerapu 10000/pertahun	Produksi Usaha Perikanan Budidaya • Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya	perikanan budidaya (%) • Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya (%)	PERIKANAN BUDIDAYA ▪ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan ▪ Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pengembangan Prasarana Pertanian ▪ Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota		
2	Percepatan Pembangunan Infrastrukur Desa/ Kelurahan ▪ Jalan, Seminisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ▪ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ▪ Pembangunan Jalan ▪ Rekonstruksi Jalan ▪ Penggantian Jembatan ▪ Pemeliharaan Berkala Jalan ▪ Pemeliharaan Rutin JembatanRehabilitasi Jalan ▪ Pemeliharaan Rutin Jalan	33.214.649.310,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya	Persentase Penataan	PROGRAM PENATAAN	15.027.932.246,00	

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA ▪ Penyelenggaraan Penataan ▪ Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategi Lainnya		
		Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ▪ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ▪ Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.405.910.360,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Drainase	Meningkatnya saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan ▪ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	10.592.398.315,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		
		Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN* ▪ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ▪ Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.405.910.360,00*	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3	Pemerataan Konektivitas ▪ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Pelabuhan Antar Desa dan Antar Kecamatan pada Wilayah-Wilayah yang Belum Memiliki Akses Baik	Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN* ▪ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ▪ Pembangunan Jalan ▪ Rekonstruksi Jalan ▪ Penggantian Jembatan ▪ Pemeliharaan Berkala Jalan ▪ Pemeliharaan Rutin Jembatan ▪ Rehabilitasi Jalan ▪ Pemeliharaan Rutin Jalan	33.214.649.310,00*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Rasio Pemukiman Layak Huni (Rasio)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN* ▪ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ▪ Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.405.910.360,00*	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		Menigkatnya Pelabuhan Berfungsi dengan Baik	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ▪ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal ▪ Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal ▪ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal ▪ Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.292.308.458,00	Dinas Perhubungan
4	**Tenaga Kerja** ▪ Pelatihan dan Sertifikasi untuk Tenaga Kerja	▪ Meningkatnya Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi ▪ Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	▪ Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%) ▪ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ▪ Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi ▪ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	243.680.100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Pelatihan, Peningkatan Keterampilan dan Bantuan Peralatan Usaha untuk Ibu	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) Meningkatnya Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ▪ Pemberdayaan	250.183.207,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	dan Makan Bergizi untuk Anak	Perempuan		Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota ▪ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Pinjaman Bunga 0% bagi UMKM ▪ 600 juta pertahun	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) ▪ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan ▪ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.000.402.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
7	Meningkatkan Tipe/ Pelayanan RSUD Natuna ▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana	▪ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) ▪ Meningkatnya Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% ▪ Meningkatnya	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ▪ Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80% (%) ▪ Persentase orang dengan HIV mendapatkan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ▪ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.959.069.605,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		pengobatan ARV pada orang yang di diagnosis HIV (Dinas Kesehatan) ▪ Meningkatnya puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% (Dinkes) ▪ Meningkatnya puskesmas yang merespon sinyal SKDR dibawah 24 jam ▪ Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas Bunguran Tengah ▪ Menurunnya Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Puskesmas Kelarik ▪ Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes rate) (Dinas Kesehatan) ▪ Menurunnya Angka Kematian Bayi di Puskesmas ▪ Meningkatnya Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar ((Dinas Kesehatan)	pengobatan antiretroviral (ARV) (%) ▪ Persentase Puskesmas Dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%) ▪ Persentase Puskesmas yang merespon sinyal SKDR < 24 Jam (%) ▪ Jumlah Kematian Bayi Puskesmas Bunguran Tengah (Angka) ▪ Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Puskesmas Kelarik (%) ▪ Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) (%) ▪ Jumlah Kematian Bayi Puskesmas (Angka) ▪ Persentase Kecamatan dengan Puskesmas Poned Sesuai Standar (%) ▪ Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi (%) ▪ Persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
		▪ Meningkatnya Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi ▪ Meningkatnya ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar ▪ Meningkatnya pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas ▪ Meningkatnya Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit ▪ Meningkatnya Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Lebih Besar Dari 80% ▪ Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar	standar (%) ▪ Persentase pemenuhan standar ASPAK di Puskesmas (%) ▪ Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit (%) ▪ Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) > 80% (%) ▪ Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan sesuai standar (%)			
8	Qur'an Center ▪ Boarding School untuk Santri dari Setiap Kecamatan	Meningkatnya Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ▪ Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ▪ Fasilitasi Pengelolaan	11.083.070.000,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
9	Pelatihan Penyelenggara Fardhu Kifayah					

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
	▪ 80 Orang pertahun	kemasyarakatan		Bina Mental Spiritual		
10	Gerakan Maghrib Mengaji ▪ 500 orang pertahun					
11	Bantuan untuk Lansia 65 Tahun ke Atas ▪ 1 milyar/pertahun	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ▪ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.034.604.000,00*	Dinas Sosial
12	Jaminan Kesehatan 200 orang per tahun mncakup Buruh, Supir, Pekerja Harian Lepas	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)			
	Buruh (Pelabuhan)	Menigkatnya Pelabuhan Berfungsi dengan Baik	Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN* ▪ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau ▪ Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.292.308.458,00*	Dinas Perhubungan
	Pekerja Lepas (Petani)	Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN* ▪ Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian ▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	162.481.900,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pekerja Lepas (Buruh)	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL* ▪ Pengelolaan Data Fakir	3.034.604.000,00*	Dinas Sosial

No	Prioritas Unggulan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	OPD
				Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
	Pelaku UMKM	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)* ▪ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan ▪ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.000.402.000,00*	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
13	Beasiswa putra putri pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Meningkatnya Kerjasama guna mendorong peningkatan daya saing daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ▪ Fasilitasi Kerja Sama Daerah ▪ Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	149.999.800,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)

Sumber: Olahan Bapperida Kabupaten Natuna, 2026

Keterangan:
*sudah tercantum di baris sebelumnya.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Akselerasi pembangunan tahun 2026 akan didorong melalui penguatan koordinasi dan kemitraan strategis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor kemaritiman, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau, peningkatan investasi, serta penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, jaringan internet, dan bantuan alat tangkap bagi nelayan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan mendorong intervensi strategis guna menurunkan biaya transportasi udara ke Natuna, sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi dan pengembangan pariwisata daerah.

Sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah mengidentifikasi fokus pengembangan masing-masing kecamatan berdasarkan potensi unggulan dan arah program prioritas. Penetapan fokus wilayah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan tidak bersifat seragam, tetapi mempertimbangkan karakteristik dan kekuatan lokal setiap wilayah.

Sesuai dengan urusan dan program pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka fokus pengembangan kewilayahan berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Fokus Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Perikanan			Pariwisata	Pertanian			Transmigrasi	Perbatasan
		Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan		Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan		
1	Midai				V			V		
2	Suak Midai	V		V	V			V		
3	Bunguran Barat		V	V	V			V		V
4	Bunguran Utara	V	V	V	V	V		V		V
5	Pulau Laut	V		V	V		V	V		V
6	Pulau Tiga	V		V	V			V		V
7	Bunguran Batubi					V		V	V	
8	Pulau Tiga Barat	V		V	V			V		V
9	Pulau Seluan				V			V		
10	Bunguran Timur	V	V	V	V	V	V	V		V
11	Bunguran Timur Laut				V	V	V	V		V
12	Bunguran Tengah		V	V		V		V	V	
13	Bunguran Selatan	V	V	V	V			V		V
14	Serasan	V		V	V			V		V
15	Subi	V		V	V	V		V		V
16	Serasan Timur				V	V		V		V
17	Pulau Panjang				V			V		

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna memperlihatkan pendekatan yang berorientasi spasial, dengan mempertimbangkan karakteristik sektoral unggulan dari masing-masing kecamatan. Fokus program mencakup urusan perikanan, pariwisata, pertanian (termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), transmigrasi, serta wilayah perbatasan. Analisis ini menunjukkan adanya klasterisasi pembangunan wilayah yang selaras dengan arah kebijakan prioritas daerah.

1) Kecamatan dengan Fokus Pengembangan Multisektor (klaster strategis utama):
   Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Utara, dan Subi menonjol sebagai wilayah dengan cakupan pengembangan paling luas. Ketiga kecamatan ini tercatat memiliki fokus pada hampir seluruh sektor yang dipetakan, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pengembangan pertanian, transmigrasi, hingga wilayah perbatasan.
   a) Bunguran Timur sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, menjadi episentrum integrasi pembangunan multisektor. Wilayah ini berfungsi sebagai tulang punggung dalam hal konektivitas, layanan dasar, dan distribusi logistik.
   b) Bunguran Utara memiliki potensi besar sebagai wilayah perbatasan yang kaya akan potensi perikanan dan budidaya, serta cocok dikembangkan sebagai simpul pertahanan ekonomi dan kedaulatan wilayah.
   c) Subi, yang juga berada di gugusan luar, menjadi titik penting untuk pengembangan perikanan dan penguatan konektivitas pulau, sekaligus menampung program transmigrasi dan kemandirian pangan.
2) Kecamatan dengan Potensi Spesifik Unggulan (klaster tematik):
   Beberapa kecamatan menunjukkan fokus pengembangan sektoral yang lebih spesifik, dan berpotensi sebagai sentra tematik unggulan:
   a) Midai dan Pulau Seluan terfokus pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, serta pengolahan hasil.
   b) Pulau Tiga Barat dan Pulau Laut cocok dikembangkan sebagai basis perikanan dan perkebunan terpadu, dengan dukungan pengolahan dan akses antarwilayah.
   c) Serasan dan Serasan Timur menunjukkan arah ke pengembangan terpadu berbasis masyarakat pesisir, terutama dalam budidaya ikan dan penguatan ekonomi keluarga.

3) Wilayah Penyangga Pembangunan dan Pemerataan Layanan: Kecamatan seperti Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, dan Bunguran Timur Laut memiliki fokus pada pertanian, perkebunan, dan kawasan transmigrasi. Wilayah ini dapat diarahkan sebagai zona penyangga pertumbuhan untuk mendukung pusat-pusat ekonomi di Bunguran Timur dan wilayah perbatasan lainnya.
4) Sinergi dengan Program Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan: Delapan kecamatan teridentifikasi sebagai wilayah sasaran transmigrasi, menunjukkan bahwa strategi pembangunan Kabupaten Natuna tidak hanya mengandalkan kekuatan lokal eksisting, tetapi juga mendorong redistribusi penduduk dan produktivitas lahan di wilayah-wilayah potensial. Keterkaitan dengan status sebagai wilayah perbatasan semakin menguatkan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, sebagaimana amanat Nawacita dan arah RPJMN.

Pola pengembangan wilayah yang tercermin dalam Tabel 4.6 mendukung penerapan prinsip keterpaduan sektoral dan kewilayahan, yang sangat penting dalam penyusunan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. Strategi pengelompokan program per kecamatan ini akan menjadi pijakan dalam:

1) Penyusunan program dan kegiatan berbasis kawasan, bukan sekadar sektoral.
2) Distribusi anggaran yang lebih berkeadilan, dengan melihat beban dan potensi wilayah.
3) Integrasi program antarsektor dan antarperangkat daerah, terutama yang memiliki iris sektor dan wilayah yang sama (misalnya: perikanan dengan koperasi-UMKM, pertanian dengan infrastruktur dasar, pariwisata dengan budaya).

4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 MELALUI PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL

Sebagai bagian dari penguatan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).** Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus terhadap tema pembangunan daerah (Tematik), menyeluruh mencakup seluruh aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Holistik), terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah (Integratif), serta memperhatikan karakteristik kewilayahan Kabupaten Natuna sebagai

daerah kepulauan dan perbatasan negara (Spasial). Melalui penerapan pendekatan THIS, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk menghadirkan perencanaan yang lebih tajam, solutif, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.3.1 Aspek Tematik

Aspek Tematik dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk mempertegas fokus prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan tematik memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tidak bersifat sektoral semata, melainkan diarahkan untuk menjawab isu-isu prioritas yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan wilayah kepulauan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, aspek tematik tidak disusun secara terpisah, namun dirancang agar memiliki keselarasan vertikal dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Keselarasan tematik ini menjadi landasan bagi Kabupaten Natuna dalam memastikan adanya sinergi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Natuna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan regional secara efektif dan berkelanjutan.

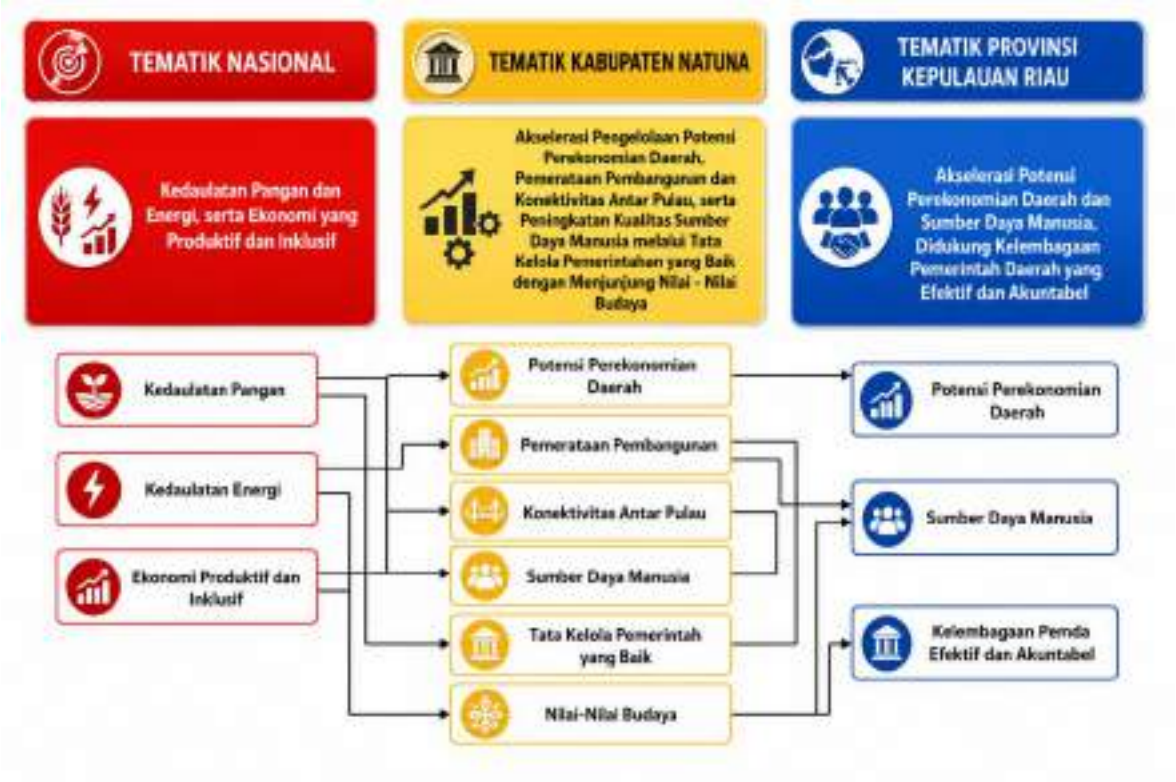
Adapun keterkaitan tematik pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

1) Tematik Nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2026, difokuskan pada:
   "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".
2) Tematik Provinsi Kepulauan Riau, diarahkan untuk:
   "Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel".
3) Tematik Kabupaten Natuna, ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai: ***"Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya".***

Ketiga tema tersebut secara substansi memiliki benang merah yang sama, yaitu penguatan sektor ekonomi yang produktif, pembangunan

sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, penguatan tata kelola, serta pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui keselarasan tematik ini, Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk mengambil bagian aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi dengan menyesuaikan kebijakan pada karakteristik daerah kepulauan.

Gambar berikut menggambarkan keterkaitan tematik pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026.



Gambar 4.5.
Keterkaitan Tematik Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Dengan penguatan aspek tematik tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan mampu lebih terfokus pada penyelesaian isu strategis daerah, mempercepat pembangunan wilayah kepulauan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur.

4.3.2 Aspek Holistik

Pendekatan Holistik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian permasalahan pembangunan tidak

dilakukan secara sektoral atau terpisah-pisah, melainkan dilakukan secara lintas sektor, melibatkan kolaborasi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Penanganan masalah yang bersifat kompleks dilakukan secara terintegrasi sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, pendekatan holistik diarahkan untuk menyinergikan seluruh prioritas pembangunan daerah dengan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi. Kebijakan lintas sektor (cross-cutting) dalam RKPD Tahun 2026 difokuskan untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai isu pembangunan yang bersifat prioritas, serta mengoptimalkan keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor dalam satu kerangka pembangunan yang utuh.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang menjadi fokus dalam pendekatan holistik meliputi:

1) Optimalisasi Potensi Ekonomi Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah, melalui integrasi pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, pertanian, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif;
2) Akselerasi Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Pembangunan serta Peningkatan Konektivitas, melalui integrasi program pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antar pulau, serta penguatan layanan transportasi dan logistik;
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya, melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan kelompok rentan;
4) Optimalisasi Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Peningkatan Investasi, melalui sinergi sektor kelautan, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata, serta penguatan iklim investasi daerah;
5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik yang adaptif, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6) Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, melalui kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana wilayah kepulauan.

Melalui pendekatan holistik ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang menyeluruh dan saling terhubung antar sektor. Perencanaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator sektoral, tetapi diarahkan untuk

menghasilkan dampak kolektif bagi percepatan pembangunan daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkeadilan.

4.3.3 Aspek Integratif

Pendekatan Integratif dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dengan peran para pemangku kepentingan serta integrasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor atau satu pihak, melainkan merupakan kolaborasi lintas perangkat daerah, lintas level pemerintahan, dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyadari pentingnya integrasi perencanaan dalam upaya menjawab tantangan pembangunan daerah kepulauan yang kompleks, sehingga seluruh program pembangunan Tahun 2026 dirancang dengan pola kerja lintas sektor (multi-sectoral), lintas wilayah (multi-spatial), serta lintas sumber pembiayaan. Program-program pembangunan di Kabupaten Natuna Tahun 2026 diarahkan untuk saling mendukung antar perangkat daerah, memperkuat integrasi perencanaan sektoral, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Dukungan pembiayaan pembangunan Kabupaten Natuna bersumber dari berbagai pendanaan, baik dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2026;
2) Anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3) Dana Transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa;
4) Potensi pendanaan lainnya melalui kolaborasi sektor swasta, BUMD, CSR, dan optimalisasi investasi daerah.

Penerapan aspek integratif ini diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan dan meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Natuna tidak berjalan secara parsial, namun menjadi sebuah kesatuan kebijakan yang terpadu, terarah, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan negara.

4.3.4 Aspek Spasial

Pendekatan **Spasial** dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan penganggaran pembangunan memperhatikan karakteristik geografis, kondisi kewilayahan, serta potensi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kecamatan. Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan memiliki tantangan spasial tersendiri, terutama terkait dengan keterjangkauan layanan dasar, pemerataan pembangunan antar pulau, serta penguatan ketahanan wilayah di kawasan terluar.

Melalui pendekatan spasial, perencanaan pembangunan diarahkan untuk menjawab kesenjangan pembangunan antar wilayah, mempercepat konektivitas antar pulau, serta mengoptimalkan potensi sektor unggulan secara merata di seluruh kecamatan. Fokus spasial juga memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan menyasar wilayah-wilayah yang memiliki kebutuhan prioritas, baik dari aspek layanan publik, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, maupun penguatan pelayanan sosial dasar.

Penerapan aspek spasial dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 secara khusus mempertimbangkan:

1) Pemetaan wilayah berbasis potensi unggulan seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata bahari, dan energi;
2) Pemetaan wilayah dengan ketimpangan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau;
3) Penguatan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Akselerasi pembangunan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta wilayah-wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
5) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong pemerataan pembangunan antar kecamatan.

Seluruh prioritas dan program pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 diformulasikan dengan memperhatikan pola spasial tersebut, sehingga dapat meningkatkan keadilan wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan wilayah Kabupaten Natuna sebagai bagian penting dari wilayah perbatasan negara.

4.4. DUKUNGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2026 TERHADAP PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk memastikan bahwa arah dan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa berpedoman pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM

merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang layak dan berkualitas.

RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan urgensi percepatan pencapaian target SPM pada berbagai urusan wajib pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat capaian indikator SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pada bagian ini disajikan tabel yang menunjukkan dukungan program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 terhadap target capaian SPM, yang menjadi dasar evaluasi terhadap konsistensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.

Tabel 4.11.
Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
2	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru
3	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
4	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
6	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
7	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
9	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kebudayaan			dan Utilitas PAUD
10	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
11	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
12	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
13	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
14	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
17	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru
18	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
23	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru
24	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
26	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
27	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
29	SPM	Angka	Dinas	PROGRAM	Pengelolaan	Rehabilitasi

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Bidang Pendidikan	Partisipasi Sekolah	Pendidikan dan Kebudayaan	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
30	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
31	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
32	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
33	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
34	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
35	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
37	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
38	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
39	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
40	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
42	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Sekolah Dasar
43	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
44	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
45	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
46	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
47	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
48	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
49	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		KESEHATAN MASYARAKAT		
68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
84	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
85	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
101	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
102	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
103	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
104	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
10	SPM	Pelayanan	Dinas	PROGRAM PEMENUHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5	Bidang Kesehatan	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kesehatan	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
106	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
107	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Puskesmas Ranai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
121	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
127	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pulau Laut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
130	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Serasan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
131	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Serasan Timur	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
132	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Subi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	SPM	Pelayanan		PROGRAM PEMENUHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
133	Bidang Kesehatan	Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Midai	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
136	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Suak Midai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
141	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
143	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat
145	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
149	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
150	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
152	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	SPM	Pelayanan	Badan	PROGRAM	Pelayanan Informasi	Penyusunan Kajian

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
153	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	PENANGGULANGAN BENCANA	Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Risiko Bencana Kabupaten/Kota
154	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
155	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
156	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
157	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
158	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
160	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
161	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
163	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
16	SPM Bidang Ketentrama	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Pemadaman dan Pengendalian

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	n dan Ketertiban Umum	Korban Kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan	N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
167	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
169	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
170	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
180	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
183	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
184	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
185	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu

4.5. DUKUNGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2026 TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS)

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bersifat universal, integratif, dan inklusif, dengan tujuan utama mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Melalui RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, Pemerintah Daerah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs ke dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam perumusan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target TPB/SDGs. Pendekatan ini menunjukkan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan agenda global, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Subbab ini menyajikan tabel yang menggambarkan keterkaitan antara program prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan tujuan-tujuan spesifik dalam TPB/SDGs yang menjadi fokus intervensi pembangunan daerah.

Tabel 4.12.
Dukungan Program P-RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial
		PROGRAM		

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
		REHABILITASI SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		PROGRAM	URUSAN	Dinas Kesehatan

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
3	Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
6	Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			UMUM DAN PENATAAN RUANG	
7	Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	-	-	-
8	Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
10	Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negaranegara.	PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pemakaian Yang Bertanggungjawab: mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk ramah lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
13	Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
14	Kehidupan di Bawah Air: perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, juga menjadi salah satu fokus SDGs. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas ada pada pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya maritim, sampai pada pengurangan limbah plastik, serta pengendalian praktik perikanan yang merugikan.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
15	Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
16	Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah

No	TUJUAN SDG'S	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
	semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata	DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KAB.NATUNA

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 pada Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi aktual, baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun fiskal daerah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi dan relevansi perencanaan pembangunan agar tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan pembangunan.

Perubahan program dan kegiatan Tahun 2026 difokuskan pada penajaman, penyelarasan, dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Proses ini dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun berjalan, identifikasi capaian kinerja, serta penyesuaian terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkembang.

Penetapan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 tetap berpedoman pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, perumusan perubahan program dan kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat upaya penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara lebih fokus dan terukur.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, perubahan program dan kegiatan difokuskan pada upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan perencanaan yang digunakan juga menekankan pada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui penerapan prinsip *money follows* program, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara optimal pada program-program prioritas.

Pendanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dioptimalkan melalui pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun sumber pendanaan lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta sumber pembiayaan sah lainnya. Optimalisasi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan rencana program, kegiatan, dan pendanaan daerah Tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang efektif serta pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, perubahan RKPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyesuaian kebijakan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dalam Perubahan RKPD tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal, serta selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Keseluruhan penyesuaian perencanaan tersebut tetap mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2026, yaitu "Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya", sebagai fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5.1. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, strategi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika perkembangan yang terjadi. Penyusunan Perubahan RKPD ini tetap berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun melalui proses penelaahan kembali terhadap arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai triwulan II guna mengidentifikasi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta berbagai pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Penyesuaian ini mencakup penajaman target kinerja,

pergeseran, penambahan, maupun pengurangan program dan kegiatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, Perubahan RKPD berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tetap relevan, responsif, dan mampu menjawab permasalahan serta isu strategis yang berkembang.

Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, alokasi anggaran disusun secara cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan, efisiensi belanja daerah, serta prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan *money follows program*.

Struktur program, kegiatan, dan subkegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program-program pembangunan yang direncanakan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang lebih spesifik, dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Setiap subkegiatan dirancang untuk mendukung capaian program secara optimal, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Selain itu, pendekatan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) tetap menjadi landasan dalam implementasi pembangunan daerah, guna memastikan bahwa intervensi pembangunan dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan berbasis kewilayahan.

Dengan perencanaan yang adaptif dan terstruktur, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun rincian program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	OPD / Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	20	82
2	Dinas Kesehatan	8	27	103
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	19	41
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	10	32
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2	8	31
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	10	24
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	16
8	Dinas Sosial	4	10	19
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	10	17
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	9	23	21
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	16	26
12	Dinas Lingkungan Hidup	8	12	23
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	15
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	20
15	Dinas Perhubungan	3	9	27
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	8	26
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	16
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	12	21
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	9	16
20	Dinas Perikanan	5	10	22
21	Dinas Pariwisata	4	10	17
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11	17	25
23	Sekretariat Daerah	13	20	80
24	Sekretariat DPRD	2	13	36
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	15	22
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	13	45
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	9	21
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2	9	16
29	Inspektorat Daerah	3	11	27
30	Kecamatan Bunguran Timur	8	12	30
31	Kecamatan Bunguran Barat	5	8	18
32	Kecamatan Bunguran Utara	2	5	15

No	OPD / Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
33	Kecamatan Pulau Laut	2	5	15
34	Kecamatan Midai	2	5	16
35	Kecamatan Serasan	8	13	17
36	Kecamatan Subi	2	5	15
37	Kecamatan Pulau Tiga	2	6	14
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2	5	14
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1	6	15
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2	7	14
41	Kecamatan Serasan Timur	2	5	14
42	Kecamatan Suak Midai	2	5	14
43	Kecamatan Bunguran Batubi	6	11	14
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2	5	14
45	Kecamatan Pulau Panjang	2	5	13
46	Kecamatan Pulau Seluan	2	6	12
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	11	23
	Jumlah	**212**	**496**	**1.174**

Sumber: Bapperida Kabupaten Natuna, 2026.

5.2. RENCANA PENDANAAN DAERAH

Pendanaan daerah merupakan salah satu komponen strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna. Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendanaan daerah diarahkan untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai, efektif, dan efisien, guna menjawab dinamika kebutuhan pembangunan serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas daerah.

Perubahan rencana pendanaan daerah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan fiskal daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan, proyeksi kemampuan keuangan daerah, dan kondisi makro ekonomi terkini. Penyesuaian pendanaan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan realisasi pendapatan daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta kebijakan nasional dan daerah yang mempengaruhi struktur APBD.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp.1.050.857.190.414**,- yang bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 136.735.548.016**,- ;
2) Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 905.669.517.398,-** ; dan
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp. 8.452.125.000,-**

Sementara itu, kebutuhan belanja daerah pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.056.571.600.000,-** yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta pencapaian prioritas pembangunan. Struktur belanja daerah terdiri atas:

1) **Belanja Operasi**, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta komponen belanja lainnya yang bersifat rutin dan mendukung operasional pemerintahan;
2) **Belanja Modal**, yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
3) **Belanja Tidak Terduga**, yang dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, kondisi keuangan daerah pada Tahun 2026 menunjukkan adanya defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp5.714.409.586,-** yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan alokasi belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, khususnya dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, rencana pendanaan daerah Tahun 2026 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Proyeksi Pagu Anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Uraian	RKPD 2026	Pagu Perubahan RKPD 2026 (Rp)
1	**Pendapatan Daerah**	**915.097.520.000**	**1.050.857.190.414**

No	Uraian	RKPD 2026	Pagu Perubahan RKPD 2026 (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	123.395.557.000	136.735.548.016
1.2	Pendapatan Transfer	784.618.838.000	905.669.517.398
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.815.550.000	8.452.125.000
2	**Belanja daerah**	**920.097.520.000**	**1.056.571.600.000**
2.1	Belanja Operasi	474.026.998.920	828.852.653.205
2.2	Belanja Modal	319.352.999.280	139.732.142.585
2.3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	1.622.180.110
2.4	Belanja Transfer	121.717.521.800	86.364.624.100
	Surplus/Defisit	**(5.000.000.000,00)**	**(5.714.409.586)**
3	**Pembiayaan daerah**		
3.1	**Penerimaan pembiayaan**	**5.000.000.000**	**5.714.409.586**

Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2026

Sejalan dengan kerangka pendanaan daerah sebagaimana diuraikan, maka alokasi belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam pagu indikatif belanja perangkat daerah. Pagu indikatif ini merupakan batasan alokasi anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai dasar dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penetapan pagu indikatif belanja perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, prioritas dan sasaran daerah, hasil evaluasi kinerja perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, alokasi tersebut juga memperhatikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan prinsip *money follows program*.

Melalui penetapan pagu indikatif ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun perencanaan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2026.

Adapun rincian pagu indikatif belanja perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.
Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	OPD / Perangkat Daerah	Pagu Perubahan RKPD 2026 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	238,592,281,611
2	Dinas Kesehatan	237,263,756,758
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81,606,605,930
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	25,828,373,806
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat	15,929,111,941
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12,050,682,794
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,722,734,828
8	Dinas Sosial	7,511,426,337
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6,590,638,724
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	7,534,174,706
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	14,758,385,055
12	Dinas Lingkungan Hidup	10,751,619,955
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,958,714,531
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7,531,897,956
15	Dinas Perhubungan	15,568,765,751
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12,261,038,848
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,468,215,997
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	8,738,288,233
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,430,305,833
20	Dinas Perikanan	7,541,253,916
21	Dinas Pariwisata	6,794,910,169
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	11,098,589,527
23	Sekretariat Daerah	61,024,581,832
24	Sekretariat DPRD	36,849,068,879
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9,474,611,535
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	105,665,559,258
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,945,983,884
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4,759,737,215
29	Inspektorat Daerah	15,706,506,984
30	Kecamatan Bunguran Timur	9,835,101,338
31	Kecamatan Bunguran Barat	4,880,119,326
32	Kecamatan Bunguran Utara	2,831,516,670
33	Kecamatan Pulau Laut	2,669,086,372
34	Kecamatan Midai	3,930,981,643
35	Kecamatan Serasan	4,435,654,923

No	OPD / Perangkat Daerah	Pagu Perubahan RKPD 2026 (Rp)
36	Kecamatan Subi	3,434,138,742
37	Kecamatan Pulau Tiga	2,094,521,393
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2,362,413,068
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2,726,675,008
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2,253,305,230
41	Kecamatan Serasan Timur	2,117,035,074
42	Kecamatan Suak Midai	2,148,480,754
43	Kecamatan Bunguran Batubi	2,208,002,895
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2,291,084,721
45	Kecamatan Pulau Panjang	1,814,083,138
46	Kecamatan Pulau Seluan	1,813,220,733
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10,768,356,179
	Jumlah	**1,056,571,600,000**

Sumber: BPKPD Natuna, 2026 (diolah).

5.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, telah dirumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, dan terintegrasi dalam kerangka Perubahan RKPD. Perumusan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi daerah, penyesuaian kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.

Dalam konteks Perubahan RKPD, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang meliputi penajaman target kinerja, penyelarasan antarprogram, serta optimalisasi alokasi sumber daya. Penyesuaian ini juga mencakup kemungkinan adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan kegiatan, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program yang direncanakan diarahkan untuk menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna, termasuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada pencapaian outcome yang terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarperangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta menghindari terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan.

Selanjutnya, seluruh program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang lebih operasional, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Setiap subkegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran program secara optimal, sekaligus memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Adapun rincian program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.01.2.22.0. 00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**268.774.086.243,00**	**238.428.056.708,00**	**238.592.281.611,00**	**-30.181.804.632,00**	**188.516.088.077,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**265.744.865.943,00**	**236.544.625.848,00**	**236.708.850.751,00**	**-29.036.015.192,00**	**188.516.088.077,00**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**265.744.865.943,00**	**236.544.625.848,00**	**236.708.850.751,00**	**-29.036.015.192,00**	**188.516.088.077,00**
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**190.981.756.789,00**	**188.353.605.721,00**	**179.379.596.099,00**	**-11.602.160.690,00**	**188.516.088.077,00**
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	189.328.000,00	190.019.240,00	190.019.240,00	691.240,00	200.000.000,00
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	168.342.135.099,00	174.049.072.989,00	164.617.512.063,00	-3.724.623.036,00	188.101.088.077,00
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	124.885.000,00	974.786.940,00	938.680.000,00	813.795.000,00	125.000.000,00
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.854.852.990,00	1.503.960.868,00	1.393.809.686,00	-461.043.304,00	90.000.000,00
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	9.311.370.100,00	9.409.287.584,00	10.035.563.080,00	724.192.980,00	0,00
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	10.720.088.600,00	1.804.039.000,00	1.782.685.000,00	-8.937.403.600,00	0,00
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	439.097.000,00	422.439.100,00	421.327.030,00	-17.769.970,00	0,00
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**-**	**98.89 Persen 99,92 Persen**	**73.663.094.154,00**	**47.106.941.107,00**	**56.285.675.632,00**	**-17.377.418.522,00**	**0,00**
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	-	57,90 Persen 70,60 Persen 71,70 Persen 77.91 PersenPersen	39.953.234.059,00	24.588.950.822,00	29.077.758.519,00	-10.875.475.540,00	0,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	-	57,79 Persen 71,57 Persen 71.88 Persen 98.89 Persen	15.052.548.264,00	14.876.027.025,00	19.192.743.477,00	4.140.195.213,00	0,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	16.574.467.391,00	7.104.025.860,00	7.234.406.148,00	-9.340.061.243,00	0,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	2.082.844.440,00	537.937.400,00	780.767.488,00	-1.302.076.952,00	0,00
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**	**-**	**250.015.000,00**	**154.228.180,00**	**113.728.180,00**	**-136.286.820,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	200.029.600,00	102.564.090,00	62.064.090,00	-137.965.510,00	0,00
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	49.985.400,00	51.664.090,00	51.664.090,00	1.678.690,00	0,00
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000,00**	**737.170.000,00**	**737.170.000,00**	**-12.830.000,00**	**0,00**
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	750.000.000,00	737.170.000,00	737.170.000,00	-12.830.000,00	0,00
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**192.680.840,00**	**192.680.840,00**	**92.680.840,00**	**0,00**
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000,00	192.680.840,00	192.680.840,00	92.680.840,00	0,00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.029.220.300,00**	**1.883.430.860,00**	**1.883.430.860,00**	**-1.145.789.440,00**	**0,00**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**3.029.220.300,00**	**1.883.430.860,00**	**1.883.430.860,00**	**-1.145.789.440,00**	**0,00**
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**800.323.000,00**	**772.448.700,00**	**772.448.700,00**	**-27.874.300,00**	**0,00**
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	200.420.000,00	629.067.700,00	629.067.700,00	428.647.700,00	0,00
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	249.976.000,00	0,00	0,00	-249.976.000,00	0,00
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**	**-**	**313.950.000,00**	**265.555.000,00**	**265.555.000,00**	**-48.395.000,00**	**0,00**
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	313.950.000,00	265.555.000,00	265.555.000,00	-48.395.000,00	0,00
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**	**-**	**142.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.100.000,00**	**0,00**
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	142.100.000,00	0,00	0,00	-142.100.000,00	0,00
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000,00**	**105.896.720,00**	**105.896.720,00**	**-144.103.280,00**	**0,00**
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000,00	105.896.720,00	105.896.720,00	5.896.720,00	0,00
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	-	-	-	**1.522.847.300,00**	**739.530.440,00**	**739.530.440,00**	**-783.316.860,00**	**0,00**
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	1.522.847.300,00	739.530.440,00	739.530.440,00	-783.316.860,00	0,00
	1.02.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Kesehatan**				**168.027.457.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**-26.833.489.824,00**	**171.448.490.359,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**134.376.929.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**6.817.038.176,00**	**171.448.490.359,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**33.650.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.650.528.000,00**	**0,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**134.376.929.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**6.817.038.176,00**	**171.448.490.359,00**
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS KESEHATAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**	-	**3,54 indeks 88,56 persen**	**128.859.218.906,00**	**101.544.630.194,00**	**102.298.861.071,00**	**-26.560.357.835,00**	**104.236.408.938,00**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	65 persen	125.000.000,00	218.717.434,00	218.717.434,00	93.717.434,00	308.671.302,00
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen	94.852.150.906,00	100.141.071.060,00	100.839.855.859,00	5.987.704.953,00	103.064.737.636,00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	70 persen	226.540.000,00	424.839.700,00	340.207.610,00	113.667.610,00	10.000.000,00
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-	60 persen	0,00	0,00	207.786.000,00	207.786.000,00	273.000.000,00
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-	75 persen	33.485.528.000,00	460.952.000,00	463.244.168,00	-33.022.283.832,00	580.000.000,00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-	60 persen	170.000.000,00	299.050.000,00	229.050.000,00	59.050.000,00	0,00
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN SESUAI STANDAR PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN**	-	**100 100 100 27 5,8 6,7 83 90 9,87 9.92 PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN persen**	**38.558.761.764,00**	**32.851.113.344,00**	**35.959.069.605,00**	**-2.599.692.159,00**	**66.389.194.421,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR ASPAK DI PUSKESMAS PERSENTASE PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP) DENGAN KATEGORI BAIK PERSENTASE ORANG DENGAN HIV MENDAPATKAN PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL (ARV) PERSENTASE PUSKESMAS YANG MERESPON SINYAL SKDR < 24 JAM PERSENTASE KECAMATAN DENGAN PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PREVALENSI BBLR DINAS KESEHATAN PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS >80% ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PERSENTASE IBU HAMIL KEK JUMLAH KEMATIAN BAYI		**PERSEN persen angka 100 50 persen PERSEN 88,23 persen 95 persen**				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan Persentase Puskesmas Yang sudah terpenuhi SPA minimal 60%	-	100 persen 13,3 PERSEN 65 persen	21.981.811.364,00	11.760.712.151,00	14.868.668.412,00	-7.113.142.952,00	48.171.772.111,00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar LengkapPersentase Berat Bayi Lahir	-	100 persen100 PERSEN15 Persen16,87 PERSEN36,36 persen6,7 persen87,57 persen88,3 PERSEN	16.168.002.700,00	20.567.198.447,00	20.567.198.447,00	4.399.195.747,00	17.513.474.250,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RendahPersentase Desa/Kelurahan ODFPersentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasiPersentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil KEK Dinas Kesehatanpersentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 JamPersentase ODGJ yang dilayani sesuai standarPersentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Pasien rujukan di layani sesuai StandarPersentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standarpersentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standarPersentase pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya sesuai standarPersentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Penduduk Natuna Yang Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan NasionalPersentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Remaja Putri AnemiaPersentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai StandarPersentase spesimen yang terhubung							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan kasus KLB yang terkonfirmasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	-	1 dokumen	75.000.000,00	189.260.452,00	189.260.452,00	114.260.452,00	370.000.000,00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Sertifikat izin Operasional	-	1 dokumen	333.947.700,00	333.942.294,00	333.942.294,00	-5.406,00	333.948.060,00
13.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA**	**-**	**34,61 persen**	**178.288.200,00**	**2.157.162.500,00**	**2.157.162.500,00**	**1.978.874.300,00**	**302.887.000,00**
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang wajib memiliki izin praktek	-	100 persen	30.882.000,00	70.751.600,00	70.751.600,00	39.869.600,00	0,00
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di puskesmas sesuai standar	-	6,7 persen	86.603.400,00	799.044.800,00	799.044.800,00	712.441.400,00	302.887.000,00
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	-	55 persen	60.802.800,00	1.287.366.100,00	1.287.366.100,00	1.226.563.300,00	0,00
14.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE SARANA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN**	**-**	**28 persen**	**210.398.700,00**	**271.450.370,00**	**271.450.370,00**	**61.051.670,00**	**520.000.000,00**
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase TPM yang memiliki risiko menengah tinggi telah memenuhi syarat kesehatan	-	6,11 persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	145.000.000,00
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan Memiliki Stiker Pembinaan	-	18,75 persen	43.835.200,00	77.010.240,00	77.010.240,00	33.175.040,00	0,00
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan post market	-	28 persen	91.563.500,00	194.440.130,00	194.440.130,00	102.876.630,00	375.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan tindak lanjut hasil pemeriksaan							
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS**	**-**	**29,42 persen**	**220.789.500,00**	**507.423.700,00**	**507.423.700,00**	**286.634.200,00**	**0,00**
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan kampanye/gerakan kesehatan (pembudayaan germas)	-	7 kecamatan	104.129.500,00	260.059.500,00	260.059.500,00	155.930.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 persen	116.660.000,00	247.364.200,00	247.364.200,00	130.704.200,00	0,00
	1.02.0.00.0.00.02.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah Natuna**				**40.163.020.520,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**30.650.196.500,00**	**54.742.019.206,00**
	1	**NON URUSAN**				**508.373.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-508.373.200,00**	**0,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**39.654.647.320,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**31.158.569.700,00**	**54.742.019.206,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**39.654.647.320,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**31.158.569.700,00**	**54.742.019.206,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**508.373.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-508.373.200,00**	**0,00**
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**26.902.569.192,00**	**27.347.922.204,00**	**41.500.159.940,00**	**14.597.590.748,00**	**10.737.825.300,00**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	63.570.000,00	83.664.420,00	83.664.420,00	20.094.420,00	75.000.000,00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	85 Persen	85 Persen	865.964.000,00	916.510.000,00	1.166.130.000,00	300.166.000,00	1.902.530.000,00
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	60 Persen	60 Persen	631.567.000,00	719.342.000,00	882.698.000,00	251.131.000,00	6.727.179.300,00
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	85 Persen	85 Persen	401.023.200,00	204.804.000,00	266.844.716,00	-134.178.484,00	388.956.000,00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	80 Persen	80 Persen	1.271.510.000,00	1.763.592.800,00	2.068.150.200,00	796.640.200,00	1.644.160.000,00
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM	undefined undefined	undefined undefined	23.668.934.992,00	23.660.008.984,00	37.032.672.604,00	13.363.737.612,00	0,00
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit**	**69 Persen**	**69 Persen**	**13.105.611.328,00**	**19.974.136.316,00**	**29.016.197.080,00**	**15.910.585.752,00**	**43.659.193.906,00**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA	70 Persen	70 Persen	9.017.473.328,00	6.659.832.664,00	15.119.374.048,00	6.101.900.720,00	23.313.393.906,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	85 Nilai	3.690.648.000,00	12.916.903.652,00	13.452.563.032,00	9.761.915.032,00	20.072.000.000,00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	397.490.000,00	397.400.000,00	444.260.000,00	46.770.000,00	273.800.000,00
18.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**59 Persen**	**59 Persen**	**154.840.000,00**	**296.860.000,00**	**296.860.000,00**	**142.020.000,00**	**345.000.000,00**
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62 Persen	62 Persen	154.840.000,00	296.860.000,00	296.860.000,00	142.020.000,00	345.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0002	**Puskesmas Ranai**				**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**	**985.500.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**	**985.500.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**	**985.500.000,00**
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS RANAI PERSENTASE PUSKESMAS YANG MERESPON SINYAL SKDR < 24 JAM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PKM RANAI PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS JUMLAH KEMATIAN BAYI DI PUSKESMAS RANAI PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PREVALENSI BBLR PKM RANAI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)**	**-**	**100 100 3.45 36 6 80 8.26 82 PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN PERSEN PERSEN**	**3.140.292.000,00**	**4.322.270.400,00**	**4.291.459.581,00**	**1.151.167.581,00**	**965.500.000,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	-	100 Persen 15 Persen 1.6 Angka	3.140.292.000,00	4.322.270.400,00	4.291.459.581,00	1.151.167.581,00	965.500.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Ibu hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum sesuai standar		Kontak 29.58 Persen 87.92 Persen 87 Nilai 92.5 Persen					
20.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS PKM RANAI**	**-**	**29.42 PERSEN**	**0,00**	**80.486.000,00**	**80.486.000,00**	**80.486.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan upaya peningkatan literasi kesehatan	-	100 Persen	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 Persen	0,00	53.186.000,00	53.186.000,00	53.186.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0003	**Puskesmas Bunguran Tengah**				**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**	**635.649.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**	**635.649.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**	**635.649.000,00**
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE KETEPATAN WAKTU**	**-**	**0 100 100 100 3,45 36 82 92,5 9,7 angka persen persen**	**745.649.000,00**	**1.114.443.100,00**	**1.158.478.149,00**	**412.829.149,00**	**615.649.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH		**persen INDEKS persen angka PERSEN PERSEN**					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah Persentase Ibu Hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah	-	0,8 Angka 100 persen 15 persen 16,67 persen 60 nilai 87,57 persen 92,5 persen	745.649.000,00	1.114.443.100,00	1.158.478.149,00	412.829.149,00	615.649.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bunguran Tengah persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas bunguran tengah Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
22.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH**	**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**42.142.000,00**	**42.142.000,00**	**42.142.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 persen	0,00	25.905.000,00	25.905.000,00	25.905.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 persen	0,00	16.237.000,00	16.237.000,00	16.237.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0004	**Puskesmas Tanjung**				**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**	**731.095.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**	**731.095.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**	**731.095.000,00**
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE**	**-**	**0 100 100 13,25 3,45 36 82**	**1.016.502.000,00**	**1.548.025.356,00**	**1.617.226.055,00**	**600.724.055,00**	**711.095.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS TANJUNG **PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS TANJUNG** **PREVALENSI BBLR PUSKESMAS TANJUNG** **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS TANJUNG** **CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS TANJUNG** **ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS TANJUNG** **PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS TANJUNG**		**92,5 angka** **persen** **persen** **persen** **persen** **indeks** **persen** **angka** **persen**					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai kinerja Puskesmas di puskesmas tanjung Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap di puskesmas tanjung Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,8 angka 100 persen 15 persen 16,3 persen 60 nilai 87,57 persen 92,5 persen	1.016.502.000,00	1.548.025.356,00	1.617.226.055,00	600.724.055,00	711.095.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			di puskesmas tanjung Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di Puskesmas Tanjung Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
24.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS TANJUNG**	**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**33.365.000,00**	**33.365.000,00**	**33.365.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas tanjung	-	100 persen	0,00	12.950.000,00	11.102.000,00	11.102.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas tanjung	-	100 persen	0,00	20.415.000,00	22.263.000,00	22.263.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0005	**Puskesmas Kelarik**				**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**	**640.000.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**	**640.000.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**	**640.000.000,00**
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS KELARIKPERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS KELARIKPERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS KELARIKPREVALENSI BBLR PUSKESMAS KELARIKPREVALENSI**	**-**	**1001001002, 952,953,4536 382,0092.5 persenpersen persenpersen persenpersen persenpersen persenpersen**	**952.724.000,00**	**1.244.542.000,00**	**1.338.653.200,00**	**385.929.200,00**	**620.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			BBLR PUSKESMAS KELARIKINDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS KELARIKCAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS KELARIKJUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS KELARIKANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS KELARIKPERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS KELARIK							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Kelarik Persentase Ibu Hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kelarik Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas kelarik Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kelarik persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di Puskesmas	-	0.8 persen 100 persen 15,52 persen 15 persen 60 persen 87,57 persen 92.5 persen	952.724.000,00	1.244.542.000,00	1.338.653.200,00	385.929.200,00	620.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kelarik Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
26.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS KELARIK**	**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**37.875.000,00**	**37.875.000,00**	**37.875.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas kelarik	-	100 persen	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	37.875.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0006	**Puskesmas Batubi Jaya**				**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**	**622.591.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**	**622.591.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**	**622.591.000,00**
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BATUBI JAYA PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BATUBI JAYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BATUBI JAYA**	**-**	**0 100 100 100 12,32 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS ANGKA ANGKA PERSEN**	**753.790.900,00**	**1.010.109.998,00**	**1.021.604.550,00**	**267.813.650,00**	**602.591.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BATUBI JAYA **ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BATUBI JAYA** **PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BATUBI JAYA**							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Batubi Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara	-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 15 PERSEN 17,59 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 93,3 PERSEN	753.790.900,00	1.010.109.998,00	1.021.604.550,00	267.813.650,00	602.591.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
28.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BATUBI JAYA**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 PERSEN	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0007	**Puskesmas Pulau Laut**				**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**	**584.635.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**	**584.635.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**	**584.635.000,00**
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU LAUT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU LAUT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU LAUT CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU LAUT ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU LAUT**	**-**	**0 100 100 100 2.95 3.45 36 82.00 90.00 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**550.635.000,00**	**1.293.196.500,00**	**1.499.275.200,00**	**948.640.200,00**	**564.635.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	550.635.000,00	1.293.196.500,00	1.499.275.200,00	948.640.200,00	564.635.000,00
30.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU LAUT**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**19.170.000,00**	**19.170.000,00**	**19.170.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 PERSEN	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0008	**Puskesmas Pulau Tiga**				**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**	**670.259.200,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**	**670.259.200,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**	**670.259.200,00**
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU TIGA JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU TIGA PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU TIGA CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU TIGA ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU TIGA PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU TIGA**	**-**	**100 1 29.42 3.45 36 82 8.88 92.5 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**913.517.000,00**	**1.286.598.052,00**	**1.355.752.864,00**	**442.235.864,00**	**650.259.200,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11	-	0.8 Persen 100 Persen 15 Persen	913.517.000,00	1.286.598.052,00	1.355.752.864,00	442.235.864,00	650.259.200,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Pulau Tiga Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		19.5 Persen 92.5 Persen					
32.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA**	**-**	**100 Persen 29.42 Persen**	**0,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 Persen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	20.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.02.0.00.0.00.02.0009	**Puskesmas Pulau Tiga Barat**				**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**	**197.000.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**	**197.000.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**	**197.000.000,00**
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT**	**-**	**0 100 100 100 23,31 23,31 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN**	**464.098.000,00**	**1.014.790.000,00**	**1.169.854.204,00**	**705.756.204,00**	**177.000.000,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas	-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 16,48 PERSEN 18,25 PERSEN	464.098.000,00	1.014.790.000,00	1.169.854.204,00	705.756.204,00	177.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Pulau Tiga Barat Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		60 NILAI 87,57 PERSEN 92,5 PERSEN					
34.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 PERSEN	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0010	**Puskesmas Serasan**				**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**	**971.133.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**	**971.133.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**	**971.133.000,00**
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**1.097.449.900,00**	**1.540.571.052,00**	**1.777.996.199,00**	**680.546.299,00**	**951.133.000,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.097.449.900,00	1.540.571.052,00	1.777.996.199,00	680.546.299,00	951.133.000,00
36.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**0,00**	**17.325.000,00**	**17.325.000,00**	**17.325.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0011	**Puskesmas Serasan Timur**				**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**	**1.018.162.300,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**	**1.018.162.300,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**	**1.018.162.300,00**
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SERASAN TIMURPERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SERASAN TIMURPERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SERASAN TIMURPERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SERASAN TIMURPREVALENSI BBLR PUSKESMAS SERASAN TIMURINDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SERASAN TIMURCAKUPAN PENERIMA KESEHATAN**	-	**01001001001 1,623,453682 92,5 JUMLAHPERS ENPERSENPE RSENPERSEN INDEKSPERS ENANGKAPE RSEN**	**779.791.000,00**	**1.588.614.404,00**	**2.022.157.828,00**	**1.242.366.828,00**	**998.162.300,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GRATIS PUSKESMAS SERASAN TIMURANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SERASAN TIMURPERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SERASAN TIMUR							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Serasan Timur Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 14,81 PERSEN 18,25 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 92,5 PERSEN	779.791.000,00	1.588.614.404,00	2.022.157.828,00	1.242.366.828,00	998.162.300,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
38.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SERASAN TIMUR**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**8.522.000,00**	**8.522.000,00**	**8.522.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 PERSEN	0,00	6.122.000,00	6.122.000,00	6.122.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0012	**Puskesmas Subi**				**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**	**1.350.911.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**	**1.350.911.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**	**1.350.911.000,00**
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SUBI PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SUBI PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SUBI PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SUBI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SUBI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SUBI CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS SUBI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SUBI PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI**	**-**	**0 100 100 100 13,29 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN**	**764.718.000,00**	**1.556.796.000,00**	**1.654.030.044,00**	**889.312.044,00**	**1.310.911.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SUBI							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Subi Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 18,25 PERSEN 19,2 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 93,3 PERSEN	764.718.000,00	1.556.796.000,00	1.654.030.044,00	889.312.044,00	1.310.911.000,00
40.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SUBI**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**46.525.000,00**	**46.525.000,00**	**46.525.000,00**	**40.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00	20.000.000,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Persentase Kecamatan dengan minimal 75%	-	100 PERSEN	0,00	14.285.000,00	14.285.000,00	14.285.000,00	20.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	posyandu siklus hidup yang aktif							
	1.02.0.00.0.00.02.0013	**Puskesmas Midai**				**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**	**747.212.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**	**747.212.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**	**747.212.000,00**
41.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS MIDAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS MIDAI CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS MIDAI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS MIDAI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS MIDAI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) DI PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS MIDAI**	**-**	**0 100 100 100 3,45 36 6,82 6,82 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN PERSEN PERSEN ANGKA PERSEN**	**875.444.000,00**	**1.259.184.500,00**	**1.502.482.939,00**	**627.038.939,00**	**727.212.000,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap PuskesmasNilai Kinerja PuskesmasPersentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar LengkapPersentase ibu bersalin yang	-	0,8 ANGKA100 PERSEN17,54 PERSEN18,25 PERSEN60 NILAI87,57 PERSEN93,3 PERSEN	875.444.000,00	1.259.184.500,00	1.502.482.939,00	627.038.939,00	727.212.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarpersentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 JamPersentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas MidaiPersentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarpersentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standarPersentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standarPersentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Remaja Putri AnemiaPersentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai StandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
42.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS MIDAI**	**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 PERSEN	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0014	**Puskesmas Sedanau**				**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**	**430.000.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**	**430.000.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**	**430.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SEDANAU JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SEDANAU INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SEDANAU CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS SEDANAU ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SEDANAU PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SEDANAU PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SEDANAU**	**-**	**100 100 100 1 3,45 36 82,00 90 9,14 9,14 % % % Laporan % % % % % %**	**1.311.499.000,00**	**1.719.439.500,00**	**1.925.733.143,00**	**614.234.143,00**	**410.000.000,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai kinerja puskesmas di puskesmas sedanau Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas sedanau Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal	-	0.8 % 100 % 15 % 17,71 % 60.0 % 87.57 % 93,3 %	1.311.499.000,00	1.719.439.500,00	1.925.733.143,00	614.234.143,00	410.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Sedanau Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas sedanau persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas sedanau Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
44.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SEDANAU**	**-**	**29,42 %**	**0,00**	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 %	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	-	100 %	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	11.775.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0015	**Puskesmas Bunguran Selatan**				**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**	**947.763.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**	**947.763.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**	**947.763.000,00**
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS**	**-**	**0 100 100 100 3,45 36**	**767.763.000,00**	**1.081.219.000,00**	**1.105.459.246,00**	**337.696.246,00**	**927.763.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN		**4,05 82 92,5 Jumlah persen persen persen INDEKS persen PERSEN angka PERSEN**				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap PuskesmasNilai kinerja Puskesmas di Puskesmas Bunguran SelatanPersentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di puskesmas Bunguran SelatanPersentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran SelatanPersentase Ibu Hamil KEKPersentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran SelatanPersentase Kasus	-	0,8 angka100 persen15 persen16,67 persen60 nilai87,57 persen92,5 persen	767.763.000,00	1.081.219.000,00	1.105.459.246,00	337.696.246,00	927.763.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 JamPersentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas Bunguran SelatanPersentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bunguran SelatanPersentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar di puskesmas bunguran selatanPersentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas Bunguran SelatanPersentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase Remaja Putri AnemiaPersentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai StandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
46.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN**	**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**20.000.000,00**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di Puskesmas Bunguran Selatan	-	100 persen	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	20.000.000,00
	1.02.0.00.0.00.02.0016	**Instalasi Farmasi**				**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**	**0,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**	**0,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**	**0,00**
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	471.243.920,00	558.031.087,00	558.031.087,00	86.787.167,00	0,00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	196.000.000,00	297.688.000,00	297.688.000,00	101.688.000,00	0,00
	1.02.0.00.0. 00.02.0017	**Puskesmas Suak Midai**				**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**	**524.692.300,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**	**524.692.300,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**	**524.692.300,00**
48.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**313.323.900,00**	**540.485.352,00**	**569.597.203,00**	**256.273.303,00**	**524.692.300,00**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	313.323.900,00	540.485.352,00	569.597.203,00	256.273.303,00	524.692.300,00
49.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**20.493.000,00**	**20.493.000,00**	**20.493.000,00**	**0,00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	11.232.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00	0,00
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	9.261.000,00	9.261.000,00	9.261.000,00	0,00
	1.03.0.00.0. 00.03.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**	**530.523.636.353,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**	**530.523.636.353,00**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**	**530.523.636.353,00**
50.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**3.45 Nilai 77 %**	**9.077.200.064,00**	**9.773.738.973,00**	**9.842.378.224,00**	**765.178.160,00**	**9.743.000.000,00**
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	30.000.000,00	47.036.590,00	47.036.590,00	17.036.590,00	255.000.000,00
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	8.040.159.664,00	8.394.050.083,00	8.465.012.134,00	424.852.470,00	7.310.000.000,00
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	372.010.700,00	425.294.600,00	407.789.742,00	35.779.042,00	998.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	448.201.500,00	766.299.500,00	744.634.558,00	296.433.058,00	980.500.000,00
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	186.828.200,00	141.058.200,00	177.905.200,00	-8.923.000,00	199.500.000,00
51.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Ketersediaan Air Baku**	**-**	**179.76 Liter/Detik**	**620.191.800,00**	**818.449.626,00**	**512.154.426,00**	**-108.037.374,00**	**1.284.609.800,00**
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	248.500.000,00	424.103.626,00	108.913.426,00	-139.586.574,00	284.609.800,00
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	371.691.800,00	394.346.000,00	403.241.000,00	31.549.200,00	1.000.000.000,00
52.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Perpipaan**	**-**	**68.57 %**	**1.402.623.000,00**	**1.462.350.000,00**	**2.247.005.764,00**	**844.382.764,00**	**3.620.000.000,00**
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.402.623.000,00	1.462.350.000,00	2.247.005.764,00	844.382.764,00	3.620.000.000,00
53.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar yang Ditetapkan**	**-**	**23.26 %**	**383.457.400,00**	**394.890.000,00**	**394.890.000,00**	**11.432.600,00**	**1.030.000.000,00**
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	383.457.400,00	394.890.000,00	394.890.000,00	11.432.600,00	1.030.000.000,00
54.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik**	**-**	**9.97 %**	**909.422.200,00**	**502.198.700,00**	**233.778.700,00**	**-675.643.500,00**	**3.400.000.000,00**
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	909.422.200,00	502.198.700,00	233.778.700,00	-675.643.500,00	3.400.000.000,00
55.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi Dengan Baik**	**-**	**42.67 %**	**10.957.825.550,00**	**11.066.679.895,00**	**10.592.398.315,00**	**-365.427.235,00**	**6.000.000.000,00**
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.957.825.550,00	11.066.679.895,00	10.592.398.315,00	-365.427.235,00	6.000.000.000,00
56.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**-**	**85.71 %**	**7.432.640.000,00**	**6.884.663.330,00**	**8.269.361.135,00**	**836.721.135,00**	**77.938.386.743,00**
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	-	-	-	7.432.640.000,00	6.884.663.330,00	8.269.361.135,00	836.721.135,00	77.938.386.743,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
57.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**-**	**82.25 %**	**15.479.678.562,00**	**13.759.260.221,00**	**15.027.932.246,00**	**-451.746.316,00**	**57.419.364.100,00**
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	15.479.678.562,00	13.759.260.221,00	15.027.932.246,00	-451.746.316,00	57.419.364.100,00
58.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan**	**-**	**42.83 %**	**32.721.931.602,00**	**30.366.967.393,00**	**33.214.649.310,00**	**492.717.708,00**	**368.518.760.328,00**
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	32.721.931.602,00	30.366.967.393,00	33.214.649.310,00	492.717.708,00	368.518.760.328,00
59.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase TKK Terampil Terhadap TKK Teridentifikasi**	**-**	**55.56 %**	**85.000.000,00**	**97.073.500,00**	**97.073.500,00**	**12.073.500,00**	**267.900.000,00**
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	85.000.000,00	97.073.500,00	97.073.500,00	12.073.500,00	267.900.000,00
60.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Dokumen RTR yang Tersedia**	**-**	**50 %**	**1.000.000.000,00**	**1.174.984.310,00**	**1.174.984.310,00**	**174.984.310,00**	**1.301.615.382,00**
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	-	259.415.000,00	91.664.000,00	91.664.000,00	-167.751.000,00	259.615.384,00
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	200.004.200,00	624.907.810,00	624.907.810,00	424.903.610,00	317.307.692,00
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	420.580.800,00	356.021.000,00	356.021.000,00	-64.559.800,00	653.846.153,00
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	120.000.000,00	102.391.500,00	102.391.500,00	-17.608.500,00	70.846.153,00
	1.04.2.10.0. 00.04.0000	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**				**37.598.610.437,00**	**25.955.975.254,00**	**25.828.373.806,00**	**-11.770.236.631,00**	**115.050.536.610,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**36.596.960.437,00**	**25.378.563.254,00**	**25.168.481.806,00**	**-11.428.478.631,00**	**111.673.668.610,00**
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**36.596.960.437,00**	**25.378.563.254,00**	**25.168.481.806,00**	**-11.428.478.631,00**	**111.673.668.610,00**
61.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**4.992.314.065,00**	**5.120.501.446,00**	**5.153.365.036,00**	**161.050.971,00**	**8.670.644.104,00**
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	22.701.000,00	27.048.000,00	27.048.000,00	4.347.000,00	59.417.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.934.407.765,00	3.081.219.940,00	3.118.583.530,00	184.175.765,00	5.811.166.104,00
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	104.038.200,00	157.864.506,00	157.864.506,00	53.826.306,00	469.750.000,00
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.831.936.000,00	1.731.877.000,00	1.727.377.000,00	-104.559.000,00	1.969.054.000,00
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	99.231.100,00	122.492.000,00	122.492.000,00	23.260.900,00	361.257.000,00
62.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**	**-**	**200.019.400,00**	**259.169.100,00**	**271.269.100,00**	**71.249.700,00**	**390.500.000,00**
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	200.019.400,00	259.169.100,00	271.269.100,00	71.249.700,00	390.500.000,00
63.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**	**-**	**4.689.532.600,00**	**2.055.766.680,00**	**1.405.910.360,00**	**-3.283.622.240,00**	**7.757.533.799,00**
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	250.184.200,00	867.115.240,00	85.003.240,00	-165.180.960,00	250.000.000,00
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	4.439.348.400,00	1.188.651.440,00	1.320.907.120,00	-3.118.441.280,00	7.507.533.799,00
64.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**	**-**	**26.715.094.372,00**	**17.943.126.028,00**	**18.337.937.310,00**	**-8.377.157.062,00**	**94.854.990.707,00**
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	26.715.094.372,00	17.943.126.028,00	18.337.937.310,00	-8.377.157.062,00	94.854.990.707,00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**	**3.376.868.000,00**
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**	**3.376.868.000,00**
65.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**	**-**	**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**	**3.376.868.000,00**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.001.650.000,00	577.412.000,00	659.892.000,00	-341.758.000,00	3.376.868.000,00
	1.05.0.00.0.00.05.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**				**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**	**21.437.437.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**	**21.437.437.000,00**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**	**21.437.437.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**78 Nilai 90 Persen**	**78 Nilai 90 Persen**	**14.921.727.966,00**	**15.286.210.000,00**	**15.224.307.041,00**	**302.579.075,00**	**20.980.437.000,00**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Persen	85 Persen	58.700.200,00	49.633.200,00	49.633.200,00	-9.067.000,00	134.900.000,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	10.265.894.966,00	10.707.550.000,00	10.759.358.041,00	493.463.075,00	11.563.152.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	128.380.800,00	117.318.800,00	117.318.800,00	-11.062.000,00	437.000.000,00
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	150.854.000,00	150.854.000,00	37.143.000,00	-113.711.000,00	2.171.000.000,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	85 Persen	4.116.403.000,00	4.064.709.000,00	4.064.709.000,00	-51.694.000,00	6.298.385.000,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90 Persen	90 Persen	201.495.000,00	196.145.000,00	196.145.000,00	-5.350.000,00	376.000.000,00
67.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**80 Persen**	**80 Persen**	**585.702.900,00**	**704.804.900,00**	**704.804.900,00**	**119.102.000,00**	**457.000.000,00**
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80 Persen	80 Persen	341.943.200,00	576.555.900,00	576.555.900,00	234.612.700,00	300.000.000,00
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80 Persen	80 Persen	243.759.700,00	128.249.000,00	128.249.000,00	-115.510.700,00	157.000.000,00
	1.05.0.00.0.00.06.0000	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**				**16.333.169.171,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.282.486.377,00**	**8.467.926.352,00**
	1	**NON URUSAN**				**114.178.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.178.810,00**	**0,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**16.218.990.361,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.168.307.567,00**	**8.467.926.352,00**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**16.218.990.361,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.168.307.567,00**	**8.467.926.352,00**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**114.178.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.178.810,00**	**0,00**
68.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**78.30 Persen**	**13.647.739.471,00**	**10.442.975.998,00**	**11.541.842.875,00**	**-2.105.896.596,00**	**7.987.726.352,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	77 Persen	22.677.000,00	22.677.000,00	26.847.000,00	4.170.000,00	22.679.420,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.766.530.061,00	5.881.211.881,00	5.974.015.256,00	207.485.195,00	5.766.530.061,00
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	38.000.000,00	67.091.379,00	39.091.379,00	1.091.379,00	38.000.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	175.436.000,00	273.958.238,00	287.769.811,00	112.333.811,00	146.120.580,00
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.047.941.000,00	2.482.308.000,00	3.432.895.401,00	-2.615.045.599,00	425.000.000,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.511.501.810,00	1.556.551.900,00	1.564.637.399,00	53.135.589,00	1.512.896.291,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	85.653.600,00	159.177.600,00	216.586.629,00	130.933.029,00	76.500.000,00
69.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**	**-**	**2.685.429.700,00**	**548.031.838,00**	**508.839.919,00**	**-2.176.589.781,00**	**480.200.000,00**
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.543.216.000,00	368.246.919,00	377.980.000,00	-2.165.236.000,00	350.000.000,00
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	98.213.500,00	84.568.919,00	95.443.919,00	-2.769.581,00	98.200.000,00
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	44.000.200,00	95.216.000,00	35.416.000,00	-8.584.200,00	32.000.000,00
	1.05.0.00.0.00.07.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**	**8.584.415.300,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**	**8.584.415.300,00**
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**	**8.584.415.300,00**
70.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**67,30 90 Persen Persen 90 67,30 Persen Persen**	**67,30 90 Persen Persen**	**5.601.666.530,00**	**5.942.377.100,00**	**5.968.638.228,00**	**366.971.698,00**	**7.436.132.300,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	64 Persen	64 Persen	43.530.000,00	106.046.650,00	106.046.650,00	62.516.650,00	111.797.500,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.450.411.830,00	4.413.895.842,00	4.437.430.150,00	-12.981.680,00	5.010.198.000,00
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	95 Persen	43.365.200,00	115.786.208,00	133.534.208,00	90.169.008,00	176.220.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	174.702.500,00	271.988.300,00	241.682.600,00	66.980.100,00	517.336.800,00
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	52.331.000,00	60.287.900,00	60.287.900,00	7.956.900,00	195.000.000,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	691.031.000,00	792.221.600,00	802.981.120,00	111.950.120,00	1.172.887.500,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	146.295.000,00	182.150.600,00	186.675.600,00	40.380.600,00	252.692.500,00
71.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara yg memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana**	**50 Persen undefined undefined**	**50 Persen undefined undefined**	**722.088.000,00**	**756.823.420,00**	**754.096.600,00**	**32.008.600,00**	**1.148.283.000,00**
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	100 Persen	100 Persen	216.929.000,00	456.441.150,00	440.078.150,00	223.149.150,00	252.762.500,00
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	100 Persen	248.854.000,00	108.661.820,00	122.298.000,00	-126.556.000,00	127.695.500,00
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	190.916.000,00	161.100.000,00	161.100.000,00	-29.816.000,00	685.827.500,00
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	65.389.000,00	30.620.450,00	30.620.450,00	-34.768.550,00	81.997.500,00
	1.06.0.00.0.00.08.0000	**Dinas Sosial**				**7.370.303.437,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**141.122.900,00**	**7.353.259.300,00**
	1	**NON URUSAN**				**3.607.242.126,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.607.242.126,00**	**0,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.763.061.311,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**3.748.365.026,00**	**7.353.259.300,00**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**3.607.242.126,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.607.242.126,00**	**0,00**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**3.763.061.311,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**3.748.365.026,00**	**7.353.259.300,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**3,64 Nilai 3,64 Persen 85,33 Persen**	**3.933.773.337,00**	**4.206.216.100,00**	**4.232.506.437,00**	**298.733.100,00**	**4.700.352.000,00**
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen	10.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	21.000.000,00
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	3.196.246.026,00	3.247.094.600,00	3.264.592.937,00	68.346.911,00	3.498.887.000,00
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	-	76 Persen	85.155.100,00	85.640.000,00	85.396.528,00	241.428,00	391.265.000,00
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	-	64 Persen	0,00	0,00	495.472,00	495.472,00	130.000.000,00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	-	100 Persen	195.322.211,00	401.654.000,00	401.654.000,00	206.331.789,00	229.000.000,00
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	76 Persen	447.050.000,00	460.827.500,00	478.367.500,00	31.317.500,00	430.200.000,00
73.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**-**	**100 Persen**	**146.289.600,00**	**144.315.291,00**	**144.315.291,00**	**-1.974.309,00**	**1.049.564.300,00**
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dilaur Panti	-	100 Persen	146.289.600,00	144.315.291,00	144.315.291,00	-1.974.309,00	1.049.564.300,00
74.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**-**	**70,90 Persen**	**3.170.241.300,00**	**3.559.605.000,00**	**3.034.604.000,00**	**-135.637.300,00**	**870.343.000,00**
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Layanan Pemeliharaan	-	9,32 Persen	121.331.000,00	130.075.000,00	46.500.000,00	-74.831.000,00	100.000.000,00
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	70,76 Persen	3.048.910.300,00	3.429.530.000,00	2.988.104.000,00	-60.806.300,00	770.343.000,00
75.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dab**	**-**	**100 Persen**	**100.001.000,00**	**100.000.609,00**	**100.000.609,00**	**-391,00**	**283.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			setelah tanggap darurat bencana							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	-	100 Persen	100.001.000,00	100.000.609,00	100.000.609,00	-391,00	283.000.000,00
76.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**-**	**100 Persen**	**19.998.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.998.200,00**	**450.000.000,00**
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	-	100 Persen	19.998.200,00	0,00	0,00	-19.998.200,00	450.000.000,00
	2.07.3.32.0. 00.09.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**	**7.083.900.020,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**	**7.083.900.020,00**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**	**7.083.900.020,00**
77.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran**	**-**	**1 Tahun 2 Laporan 3.41 Nilai**	**5.089.214.882,00**	**6.169.286.196,00**	**6.202.761.264,00**	**1.113.546.382,00**	**5.908.130.020,00**
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 Laporan	20.496.600,00	22.504.850,00	22.504.850,00	2.008.250,00	37.800.000,00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	4.329.610.982,00	5.025.621.346,00	5.063.596.414,00	733.985.432,00	4.641.030.000,00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	98.288.100,00	277.204.000,00	277.204.000,00	178.915.900,00	402.030.020,00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang MilikDaerah	-	1 Tahun	7.539.000,00	8.139.000,00	8.139.000,00	600.000,00	98.000.000,00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Tahun	320.008.200,00	319.657.000,00	315.157.000,00	-4.851.200,00	313.900.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1 Tahun	313.272.000,00	516.160.000,00	516.160.000,00	202.888.000,00	415.370.000,00
78.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**1,29 Persen**	**-**	**262.711.200,00**	**243.680.100,00**	**243.680.100,00**	**-19.031.100,00**	**810.000.000,00**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	80,33 Persen	-	262.711.200,00	243.680.100,00	243.680.100,00	-19.031.100,00	810.000.000,00
79.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis**	**-**	**1 Perkara**	**79.955.000,00**	**82.627.600,00**	**82.627.600,00**	**2.672.600,00**	**365.770.000,00**
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	-	100 Persen	79.955.000,00	82.627.600,00	82.627.600,00	2.672.600,00	365.770.000,00
	2.07.3.32.0. 00.09.0001	**UPTD Balai Latihan Kerja**				**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**	**89.170.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**	**89.170.000,00**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**	**89.170.000,00**
80.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**	**89.170.000,00**
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	35.168.500,00	34.229.000,00	34.229.000,00	-939.500,00	31.670.000,00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	21.901.500,00	22.840.760,00	27.340.760,00	5.439.260,00	57.500.000,00
	2.08.2.14.0. 00.10.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**9.213.884.202,00**	**7.371.294.498,00**	**7.534.174.706,00**	**-1.679.709.496,00**	**9.366.620.428,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.213.884.202,00**	**7.371.294.498,00**	**7.534.174.706,00**	**-1.679.709.496,00**	**9.366.620.428,00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.588.842.902,00**	**5.745.751.668,00**	**5.890.631.876,00**	**301.788.974,00**	**7.304.870.428,00**
81.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**80 Persen 90 Persen**	**80 Persen 90 Persen**	**3.933.552.102,00**	**4.704.338.268,00**	**4.729.193.476,00**	**795.641.374,00**	**5.470.270.428,00**
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketetapan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.242.225.402,00	3.436.648.419,00	3.478.593.627,00	236.368.225,00	4.121.486.000,00
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80 Persen	80 Persen	104.681.100,00	236.323.034,00	236.323.034,00	131.641.934,00	229.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik daerah perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	53.830.000,00	55.175.750,00	60.765.750,00	6.935.750,00	254.600.000,00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	398.306.000,00	839.714.225,00	805.604.225,00	407.298.225,00	800.184.428,00
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	134.509.600,00	136.476.840,00	147.906.840,00	13.397.240,00	65.000.000,00
82.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya ARG (anggaran responsif gender) pada APBD Kabupaten Natuna Persentase ARG (anggaran responsif gender) pada APBD kabupaten natuna**	**10 persen 10 Persen**	**10 persen 10 Persen**	**460.476.600,00**	**215.788.207,00**	**250.183.207,00**	**-210.293.393,00**	**624.100.000,00**
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelembagaan PUG di daerah	7 Lembaga	7 Lembaga	100.479.900,00	27.039.302,00	27.039.302,00	-73.440.598,00	113.000.000,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran Dinas P3AP2KB yang di alokasikan ke pemberdayaan perempuan	15 Persen	15 Persen	359.996.700,00	188.748.905,00	223.143.905,00	-136.852.795,00	511.100.000,00
83.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**ersentase perempuan korban kekerasan /tppo yang mendapatkan layanan komprehensif Persentase perempuan korban kekerasan /tppo yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100 Persen 100 Persen**	**100 Persen 100 Persen**	**905.644.500,00**	**352.528.607,00**	**428.108.607,00**	**-477.535.893,00**	**509.600.000,00**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	100 Persen	554.842.900,00	61.423.125,00	61.423.125,00	-493.419.775,00	76.100.000,00
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	100 Persen	100 Persen	300.801.600,00	241.105.482,00	316.685.482,00	15.883.882,00	333.500.000,00
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
84.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**42.700.000,00**	**68.561.174,00**	**73.811.174,00**	**31.111.174,00**	**100.000.000,00**
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga	0,5 Kegiatan	0,5 Kegiatan	42.700.000,00	68.561.174,00	73.811.174,00	31.111.174,00	100.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak							
85.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pelembagaan (PHA) yang sudah terpenuhi pada KLA**	**80 Persen**	**80 Persen**	**109.816.900,00**	**34.612.987,00**	**39.412.987,00**	**-70.403.913,00**	**0,00**
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase yang memilki forum anak aktif	60 Persen	60 Persen	109.816.900,00	34.612.987,00	39.412.987,00	-70.403.913,00	0,00
86.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHESNSIF**	**100 Persen**	**100 Persen**	**136.652.800,00**	**369.922.425,00**	**369.922.425,00**	**233.269.625,00**	**600.900.000,00**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Persen	5 Persen	47.974.800,00	68.495.625,00	68.495.625,00	20.520.825,00	400.900.000,00
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	100 Persen	100 Persen	48.200.000,00	213.082.050,00	213.082.050,00	164.882.050,00	150.000.000,00
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	80n Persen	80n Persen	40.478.000,00	88.344.750,00	88.344.750,00	47.866.750,00	50.000.000,00
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.625.041.300,00**	**1.625.542.830,00**	**1.643.542.830,00**	**-1.981.498.470,00**	**2.061.750.000,00**
87.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Totat(Total Fertility Rate/TFR) PUS per WUS usia 15-49 tahun**	**2,31 Skala Nilai 0 - 100 2,31 Skala Nilai 0- 100**	**2,31 Skala Nilai 0 -100 2,31 Skala Nilai 0- 100**	**85.051.600,00**	**76.442.757,00**	**76.442.757,00**	**-8.608.843,00**	**493.250.000,00**
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai acuan perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.963.200,00	57.141.802,00	57.141.802,00	27.178.602,00	84.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	3 OPD/kelurahan desa	3 OPD/kelurahan desa	55.088.400,00	19.300.955,00	19.300.955,00	-35.787.445,00	409.250.000,00
88.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) Angka Kelahiran Totat(Total Fertility Rate/TFR) PUS per WUS usia 15-49 tahun**	**18,0 Angka 18,0 Angka 2,31 Persen**	**18,0 Angka 18,0 Angka 2,31 Persen**	**3.148.811.100,00**	**1.285.576.627,00**	**1.303.576.627,00**	**-1.845.234.473,00**	**1.521.000.000,00**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kelahiran yang tidak di inginkan	24,4 Persen	24,4 Persen	110.047.900,00	25.732.112,00	25.732.112,00	-84.315.788,00	391.500.000,00
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pelayanan KB pasca salin	70 Persen	70 Persen	85.200.000,00	0,00	7.748.850,00	-77.451.150,00	478.000.000,00
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontasepsi modern	79 Persen	79 Persen	2.909.152.000,00	1.220.356.800,00	1.230.607.950,00	-1.678.544.050,00	651.500.000,00
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	44.411.200,00	39.487.715,00	39.487.715,00	-4.923.485,00	0,00
89.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)**	**21 Persen**	**21 Persen**	**391.178.600,00**	**263.523.446,00**	**263.523.446,00**	**-127.655.154,00**	**47.500.000,00**
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	90 Persen	90 Persen	336.128.600,00	199.753.446,00	199.753.446,00	-136.375.154,00	47.500.000,00
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	55.050.000,00	63.770.000,00	63.770.000,00	8.720.000,00	0,00
	2.09.3.27.0.00.11.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**				**15.925.107.134,00**	**16.240.809.195,00**	**14.758.385.055,00**	**-1.166.722.079,00**	**75.972.327.754,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.090.377.134,00**	**11.317.590.902,00**	**11.904.327.886,00**	**813.950.752,00**	**16.237.381.434,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**11.090.377.134,00**	**11.317.590.902,00**	**11.904.327.886,00**	**813.950.752,00**	**16.237.381.434,00**
90.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)**	**-**	**3,45 Nilai**	**10.600.127.134,00**	**10.508.133.102,00**	**11.156.963.086,00**	**556.835.952,00**	**15.433.181.434,00**
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	83 (Orang/bulan)	9.272.796.634,00	9.527.351.460,00	9.591.015.294,00	318.218.660,00	11.500.000.000,00
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	151.023.000,00	171.301.642,00	173.743.442,00	22.720.442,00	289.378.484,00
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	2.520.000.000,00
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan	533.251.000,00	450.670.000,00	450.670.000,00	-82.581.000,00	815.542.950,00
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	-	1 Unit 5 Unit 7 Unit	643.056.500,00	358.810.000,00	761.534.350,00	118.477.850,00	308.260.000,00
91.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan**	**-**	**2400 Kkal/Kapita/ Hari 87,8 Nilai**	**180.250.000,00**	**181.059.400,00**	**181.059.400,00**	**809.400,00**	**334.500.000,00**
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	61.250.000,00	61.085.300,00	61.085.300,00	-164.700,00	61.200.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	-	1 Laporan	119.000.000,00	119.974.100,00	119.974.100,00	974.100,00	273.300.000,00
92.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat**	**-**	**4,6 Nilai**	**210.000.000,00**	**409.995.600,00**	**385.162.600,00**	**175.162.600,00**	**442.200.000,00**
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	210.000.000,00	409.995.600,00	385.162.600,00	175.162.600,00	442.200.000,00
93.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Aman (%)**	**-**	**90 Persen**	**100.000.000,00**	**218.402.800,00**	**181.142.800,00**	**81.142.800,00**	**27.500.000,00**
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-	1 Dokumen	100.000.000,00	218.402.800,00	181.142.800,00	81.142.800,00	27.500.000,00
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**4.834.730.000,00**	**4.923.218.293,00**	**2.854.057.169,00**	**-1.980.672.831,00**	**59.734.946.320,00**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**4.834.730.000,00**	**4.923.218.293,00**	**2.854.057.169,00**	**-1.980.672.831,00**	**59.734.946.320,00**
94.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan produksi tanaman perkebunan Persentase kenaikan produksi ternak**	**-**	**0,8 Persen 1,5 Persen**	**3.153.500.000,00**	**3.247.194.690,00**	**1.912.827.690,00**	**-1.240.672.310,00**	**51.909.155.566,00**
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	1 Laporan	1.470.000.000,00	1.325.539.800,00	991.167.800,00	-478.832.200,00	17.272.955.566,00
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	1 Dokumen	539.000.000,00	1.421.154.890,00	421.159.890,00	-117.840.110,00	15.959.200.000,00
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	90 Ekor	1.144.500.000,00	500.500.000,00	500.500.000,00	-644.000.000,00	18.677.000.000,00
95.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**-**	**0,10 Persen**	**1.329.680.000,00**	**1.219.541.703,00**	**618.747.579,00**	**-710.932.421,00**	**6.665.220.754,00**
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	-	1 Dokumen	129.500.000,00	182.014.800,00	182.014.800,00	52.514.800,00	1.621.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola							
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-	1 Dokumen	1.200.180.000,00	1.037.526.903,00	436.732.779,00	-763.447.221,00	5.044.220.754,00
96.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan**	**-**	**91 Persen**	**80.500.000,00**	**220.000.000,00**	**160.000.000,00**	**79.500.000,00**	**928.000.000,00**
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-	1 Wilayah	80.500.000,00	220.000.000,00	160.000.000,00	79.500.000,00	928.000.000,00
97.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani**	**-**	**1 Persen**	**271.050.000,00**	**236.481.900,00**	**162.481.900,00**	**-108.568.100,00**	**232.570.000,00**
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1 Unit	271.050.000,00	236.481.900,00	162.481.900,00	-108.568.100,00	232.570.000,00
	2.11.0.00.0.00.12.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**				**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**	**19.509.605.784,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**	**19.509.605.784,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**	**19.509.605.784,00**
98.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**7.207.854.132,00**	**4.560.458.756,00**	**4.606.108.567,00**	**-2.601.745.565,00**	**3.974.802.892,00**
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000,00	50.085.000,00	50.085.000,00	40.085.000,00	50.000.000,00
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.054.920.532,00	3.220.300.006,00	3.250.049.817,00	195.129.285,00	3.124.802.892,00
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	147.147.200,00	220.245.950,00	220.245.950,00	73.098.750,00	185.000.000,00
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.894.386.400,00	848.637.800,00	854.537.800,00	-3.039.848.600,00	530.000.000,00
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	101.400.000,00	221.190.000,00	231.190.000,00	129.790.000,00	85.000.000,00
99.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**-**	**129.397.000,00**	**112.470.252,00**	**118.070.252,00**	**-11.326.748,00**	**200.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-	-	-	**1.223.139.800,00**	**2.641.904.000,00**	**1.824.079.000,00**	**600.939.200,00**	**5.279.802.892,00**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	1.223.139.800,00	2.641.904.000,00	1.824.079.000,00	600.939.200,00	5.279.802.892,00
101.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	-	-	-	**104.347.000,00**	**105.265.000,00**	**105.265.000,00**	**918.000,00**	**300.000.000,00**
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	104.347.000,00	105.265.000,00	105.265.000,00	918.000,00	300.000.000,00
102.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-	-	-	**149.170.000,00**	**85.613.300,00**	**85.613.300,00**	**-63.556.700,00**	**225.000.000,00**
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	149.170.000,00	85.613.300,00	85.613.300,00	-63.556.700,00	225.000.000,00
103.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-	-	-	**98.200.000,00**	**68.104.500,00**	**68.104.500,00**	**-30.095.500,00**	**300.000.000,00**
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	98.200.000,00	68.104.500,00	68.104.500,00	-30.095.500,00	300.000.000,00
104.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-	**42.261.000,00**	**42.355.000,00**	**42.355.000,00**	**94.000,00**	**50.000.000,00**
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	42.261.000,00	42.355.000,00	42.355.000,00	94.000,00	50.000.000,00
105.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-	**1.959.055.384,00**	**3.094.599.200,00**	**3.902.024.336,00**	**1.942.968.952,00**	**9.180.000.000,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-	-	1.959.055.384,00	3.094.599.200,00	3.902.024.336,00	1.942.968.952,00	9.180.000.000,00
	2.12.0.00.0.00.13.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**	**6.017.662.427,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**	**6.017.662.427,00**
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**	**6.017.662.427,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**3.288.534.839,00**	**3.331.073.275,00**	**3.359.239.811,00**	**70.704.972,00**	**5.767.662.427,00**
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	14.998.700,00	16.312.600,00	16.312.600,00	1.313.900,00	160.750.000,00
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.561.304.539,00	2.680.347.675,00	2.734.937.073,00	173.632.534,00	4.418.912.427,00
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	150.432.400,00	138.260.000,00	124.813.110,00	-25.619.290,00	558.000.000,00
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	493.729.200,00	428.083.000,00	417.867.028,00	-75.862.172,00	530.000.000,00
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	68.070.000,00	68.070.000,00	65.310.000,00	-2.760.000,00	100.000.000,00
107.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP di bagi jumlah penduduk 17 tahun keatas x 100**	**-**	**81 PERSEN**	**139.860.000,00**	**140.215.240,00**	**200.200.410,00**	**60.340.410,00**	**180.000.000,00**
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan di bagi jumlah penduduk di kali 100%	-	95 PERSEN	139.860.000,00	140.215.240,00	200.200.410,00	60.340.410,00	180.000.000,00
108.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**	**-**	**148.920.000,00**	**148.845.310,00**	**143.845.310,00**	**-5.074.690,00**	**20.000.000,00**
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	148.920.000,00	148.845.310,00	143.845.310,00	-5.074.690,00	20.000.000,00
109.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**	**-**	**142.485.000,00**	**142.485.825,00**	**144.929.000,00**	**2.444.000,00**	**35.000.000,00**
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	142.485.000,00	142.485.825,00	144.929.000,00	2.444.000,00	35.000.000,00
110.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**	**-**	**110.539.000,00**	**110.500.000,00**	**110.500.000,00**	**-39.000,00**	**15.000.000,00**
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	110.539.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00	-39.000,00	15.000.000,00
	2.13.0.00.0.00.14.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**	**9.895.180.223,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**	**9.895.180.223,00**
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**	**9.895.180.223,00**
111.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**80 Nilai 90 Persen**	**80 Nilai 90 Persen**	**5.933.661.226,00**	**5.858.773.100,00**	**6.106.329.296,00**	**172.668.070,00**	**6.649.340.223,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	10.003.600,00	14.242.100,00	7.226.100,00	-2.777.500,00	56.000.000,00
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Waktu	1 Waktu	3.476.919.026,00	3.556.429.000,00	3.619.021.196,00	142.102.170,00	4.406.780.000,00
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	230.724.600,00	170.672.000,00	165.571.500,00	-65.153.100,00	416.500.000,00
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50 Persen	50 Persen	40.114.000,00	27.605.000,00	47.605.000,00	7.491.000,00	200.000.000,00
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70 Persen	70 Persen	1.731.930.000,00	1.641.457.000,00	1.794.177.500,00	62.247.500,00	1.470.060.223,00
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	443.970.000,00	448.368.000,00	472.728.000,00	28.758.000,00	100.000.000,00
112.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA**	**10 Persen**	**10 Persen**	**36.277.000,00**	**37.777.000,00**	**38.127.000,00**	**1.850.000,00**	**122.250.000,00**
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	70 Desa	70 Desa	36.277.000,00	37.777.000,00	38.127.000,00	1.850.000,00	122.250.000,00
113.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA**	**57.14 Persen**	**57.14 Persen**	**13.867.900,00**	**15.223.000,00**	**14.873.000,00**	**1.005.100,00**	**343.790.000,00**
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	40 Desa	40 Desa	13.867.900,00	15.223.000,00	14.873.000,00	1.005.100,00	343.790.000,00
114.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**39,83 60 Persen Persen**	**39,83 60 Persen Persen**	**222.571.100,00**	**290.301.100,00**	**267.001.100,00**	**44.430.000,00**	**1.575.400.000,00**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa	70 Desa	70 Desa	222.571.100,00	290.301.100,00	267.001.100,00	44.430.000,00	1.575.400.000,00
115.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**43.41 Persen**	**43.41 Persen**	**653.709.100,00**	**1.105.567.560,00**	**1.105.567.560,00**	**451.858.460,00**	**1.204.400.000,00**
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang di fasilitasi dalam peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	5 Lembaga	5 Lembaga	653.709.100,00	1.105.567.560,00	1.105.567.560,00	451.858.460,00	1.204.400.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	2.15.0.00.0.00.15.0000	**Dinas Perhubungan**				**17.896.749.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**-2.327.984.210,00**	**56.709.531.534,00**
	2	**NON URUSAN**				**2.630.064.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.630.064.000,00**	**0,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.266.685.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**302.079.790,00**	**56.709.531.534,00**
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.630.064.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.630.064.000,00**	**0,00**
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**15.266.685.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**302.079.790,00**	**56.709.531.534,00**
116.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**65 Nilai 80 Persen**	**80 Nilai 80 Persen**	**6.519.222.651,00**	**6.616.040.839,00**	**6.994.583.293,00**	**475.360.642,00**	**8.373.225.000,00**
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100 Persen	19.926.000,00	28.925.000,00	29.150.000,00	9.224.000,00	39.200.000,00
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.478.003.551,00	3.569.731.239,00	3.434.810.645,00	-43.192.906,00	4.956.025.000,00
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55 Persen	55 Persen	196.740.100,00	280.287.000,00	449.566.388,00	252.826.288,00	490.000.000,00
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55 Persen	55 Persen	59.931.000,00	88.250.000,00	147.473.000,00	87.542.000,00	634.000.000,00
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70 Persen	70 Persen	2.648.044.000,00	2.530.890.000,00	2.746.575.275,00	98.531.275,00	2.075.000.000,00
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	116.578.000,00	117.957.600,00	187.007.985,00	70.429.985,00	179.000.000,00
117.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan**	**68 Persen**	**80,01 Persen**	**4.901.047.700,00**	**5.749.724.000,00**	**5.281.874.000,00**	**380.826.300,00**	**7.359.981.900,00**
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	68 Persen	81,76 Persen	4.901.047.700,00	5.749.724.000,00	5.281.874.000,00	380.826.300,00	7.359.981.900,00
118.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik**	**72 Persen**	**87,88 Persen**	**6.476.479.610,00**	**647.714.000,00**	**3.292.308.458,00**	**-3.184.171.152,00**	**40.976.324.634,00**
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan yang dibangun dan beroperasi	88 Persen	85,71 Persen	506.479.610,00	647.714.000,00	3.290.842.458,00	2.784.362.848,00	35.006.324.634,00
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	5.970.000.000,00	0,00	1.466.000,00	-5.968.534.000,00	5.970.000.000,00
	2.16.2.20.2.21.16.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**7.823.579.970,00**	**8.896.370.861,00**	**12.261.038.848,00**	**4.437.458.878,00**	**6.196.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.823.579.970,00**	**8.896.370.861,00**	**12.261.038.848,00**	**4.437.458.878,00**	**6.196.000.000,00**
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**7.621.140.970,00**	**8.693.931.709,00**	**12.097.301.496,00**	**4.476.160.526,00**	**5.996.000.000,00**
119.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP** **Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**80 Persen** **90 Persen**	**80 Persen** **90 Persen**	**3.694.476.570,00**	**3.727.940.609,00**	**3.803.502.468,00**	**109.025.898,00**	**3.571.000.000,00**
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.067.686.009,00	3.159.180.171,00	3.215.964.544,00	148.278.535,00	2.697.600.000,00
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terselesaikan	7 Paket	7 Paket	122.051.800,00	119.040.805,00	119.676.250,00	-2.375.550,00	234.500.000,00
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	85 Persen	456.595.011,00	358.656.883,00	362.064.577,00	-94.530.434,00	609.900.000,00
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat barang milik perangkat daerah	90 Persen	90 Persen	48.143.750,00	91.062.750,00	105.797.097,00	57.653.347,00	29.000.000,00
120.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah**	**86,56 Persen**	**86,56 Persen**	**1.876.665.400,00**	**1.954.239.900,00**	**2.886.346.500,00**	**1.009.681.100,00**	**200.000.000,00**
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah	49481 Orang	49481 Orang	1.876.665.400,00	1.954.239.900,00	2.886.346.500,00	1.009.681.100,00	200.000.000,00
121.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**undefined** **undefined**	**undefined** **undefined**	**2.049.999.000,00**	**3.011.751.200,00**	**5.407.452.528,00**	**3.357.453.528,00**	**2.225.000.000,00**
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	72 Persen	72 Persen	2.049.999.000,00	3.011.751.200,00	5.407.452.528,00	3.357.453.528,00	2.225.000.000,00
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**87.339.700,00**	**-14.875.500,00**	**100.000.000,00**
122.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral**	**84 Persen**	**84 Persen**	**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**87.339.700,00**	**-14.875.500,00**	**100.000.000,00**
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	315 Data	315 Data	102.215.200,00	102.215.000,00	87.339.700,00	-14.875.500,00	100.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**76.397.652,00**	**-23.826.148,00**	**100.000.000,00**
123.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**76.397.652,00**	**-23.826.148,00**	**100.000.000,00**
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengaman informasi dan persandian	46 OPD	46 OPD	100.223.800,00	100.224.152,00	76.397.652,00	-23.826.148,00	100.000.000,00
	2.17.3.30.3. 31.17.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**				**10.767.841.941,00**	**10.817.604.634,00**	**10.996.089.527,00**	**228.247.586,00**	**14.157.501.950,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.364.968.000,00**	**1.473.452.600,00**	**1.490.265.000,00**	**125.297.000,00**	**2.985.790.000,00**
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.364.968.000,00**	**1.473.452.600,00**	**1.490.265.000,00**	**125.297.000,00**	**2.985.790.000,00**
124.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	-	-	-	**45.135.600,00**	**167.235.600,00**	**161.072.000,00**	**115.936.400,00**	**200.000.000,00**
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	45.135.600,00	167.235.600,00	161.072.000,00	115.936.400,00	200.000.000,00
125.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-	-	**1.060.902.000,00**	**1.000.402.000,00**	**1.000.402.000,00**	**-60.500.000,00**	**2.355.790.000,00**
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	1.060.902.000,00	1.000.402.000,00	1.000.402.000,00	-60.500.000,00	2.355.790.000,00
126.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	-	-	-	**258.930.400,00**	**305.815.000,00**	**328.791.000,00**	**69.860.600,00**	**430.000.000,00**
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	258.930.400,00	305.815.000,00	328.791.000,00	69.860.600,00	430.000.000,00
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**9.402.873.941,00**	**9.344.152.034,00**	**9.505.824.527,00**	**102.950.586,00**	**11.171.711.950,00**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**3.464.924.596,00**	**3.425.182.415,00**	**3.529.076.355,00**	**64.151.759,00**	**4.962.000.000,00**
127.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-	-	**2.225.017.596,00**	**2.234.770.116,00**	**2.326.624.246,00**	**101.606.650,00**	**3.057.000.000,00**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	2.225.017.596,00	2.234.770.116,00	2.326.624.246,00	101.606.650,00	3.057.000.000,00
128.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG**	-	-	-	**1.109.998.000,00**	**1.075.266.849,00**	**1.087.306.659,00**	**-22.691.341,00**	**855.000.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	50.000.000,00	40.400.000,00	49.889.810,00	-110.190,00	250.000.000,00
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	1.059.998.000,00	1.034.866.849,00	1.037.416.849,00	-22.581.151,00	605.000.000,00
129.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**	**-**	**-**	**129.909.000,00**	**115.145.450,00**	**115.145.450,00**	**-14.763.550,00**	**1.050.000.000,00**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	129.909.000,00	115.145.450,00	115.145.450,00	-14.763.550,00	1.050.000.000,00
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**5.937.949.345,00**	**5.918.969.619,00**	**5.976.748.172,00**	**38.798.827,00**	**6.209.711.950,00**
130.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**5.714.704.145,00**	**5.682.312.359,00**	**5.722.041.912,00**	**7.337.767,00**	**5.014.711.950,00**
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.002.000,00	16.147.854,00	17.997.854,00	15.995.854,00	20.000.000,00
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.731.374.745,00	4.952.039.880,00	4.935.518.933,00	204.144.188,00	4.210.111.950,00
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	176.816.900,00	146.233.000,00	157.740.500,00	-19.076.400,00	342.600.000,00
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	36.893.000,00	36.893.000,00	190.000.000,00
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	488.542.500,00	372.211.625,00	372.211.625,00	-116.330.875,00	12.000.000,00
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	315.968.000,00	195.680.000,00	201.680.000,00	-114.288.000,00	240.000.000,00
131.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**	**-**	**182.933.000,00**	**195.311.650,00**	**200.041.650,00**	**17.108.650,00**	**545.000.000,00**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	182.933.000,00	195.311.650,00	200.041.650,00	17.108.650,00	545.000.000,00
132.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**	**-**	**-**	**20.215.200,00**	**20.125.760,00**	**33.444.760,00**	**13.229.560,00**	**600.000.000,00**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	20.215.200,00	20.125.760,00	33.444.760,00	13.229.560,00	600.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**	**-**	**20.097.000,00**	**21.219.850,00**	**21.219.850,00**	**1.122.850,00**	**50.000.000,00**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	20.097.000,00	21.219.850,00	21.219.850,00	1.122.850,00	50.000.000,00
	2.17.3.30.3. 31.17.0001	**UPTD Metrologi Legal**				**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**	**250.000.000,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**	**250.000.000,00**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**	**250.000.000,00**
134.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**	**-**	**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**	**250.000.000,00**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	-	102.499.800,00	102.500.000,00	102.500.000,00	200,00	250.000.000,00
	2.18.0.00.0. 00.18.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**	**9.226.980.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**	**9.226.980.000,00**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**	**9.226.980.000,00**
135.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**5.671.355.602,00**	**5.765.227.570,00**	**5.968.988.577,00**	**297.632.975,00**	**7.671.980.000,00**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.862.400,00	2.862.400,00	2.719.400,00	-143.000,00	20.000.000,00
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.871.297.602,00	4.997.289.340,00	5.053.084.772,00	181.787.170,00	5.348.780.000,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	81.684.700,00	76.317.280,00	88.840.880,00	7.156.180,00	318.000.000,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	53.846.000,00	53.846.000,00	477.000.000,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	585.160.900,00	418.033.900,00	397.700.625,00	-187.460.275,00	668.200.000,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	130.350.000,00	270.724.650,00	372.796.900,00	242.446.900,00	840.000.000,00
136.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi**	**5,42 Persen**	**5,42 Persen**	**187.808.400,00**	**237.388.810,00**	**74.432.760,00**	**-113.375.640,00**	**805.000.000,00**
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Kawasan Investasi yang dipetakan	50 Persen	50 Persen	187.808.400,00	237.388.810,00	74.432.760,00	-113.375.640,00	805.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Calon investor Baru**	**20 Persen**	**20 Persen**	**291.691.300,00**	**242.118.000,00**	**242.118.000,00**	**-49.573.300,00**	**200.000.000,00**
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	291.691.300,00	242.118.000,00	242.118.000,00	-49.573.300,00	200.000.000,00
138.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**3,533 Indeks**	**3,533 Indeks**	**100.000.000,00**	**69.953.600,00**	**67.953.600,00**	**-32.046.400,00**	**250.000.000,00**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu Proses Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	1,9 Hari	1,9 Hari	100.000.000,00	69.953.600,00	67.953.600,00	-32.046.400,00	250.000.000,00
139.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha Yang dilakukan Pengendalian**	**18,18 Persen**	**18,18 Persen**	**50.019.700,00**	**99.071.000,00**	**99.117.000,00**	**49.097.300,00**	**200.000.000,00**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Laporan	12 Laporan	50.019.700,00	99.071.000,00	99.117.000,00	49.097.300,00	200.000.000,00
140.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Sektor Perizinan yang Dikelola**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.526.100,00**	**8.506.060,00**	**15.606.060,00**	**5.079.960,00**	**100.000.000,00**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.526.100,00	8.506.060,00	15.606.060,00	5.079.960,00	100.000.000,00
	2.19.0.00.0.00.19.0000	**Dinas Pemuda dan Olahraga**				**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**	**9.542.540.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**	**9.542.540.000,00**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**	**9.542.540.000,00**
141.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**2.15 Indeks 3.45 Indeks 60.50 Persen**	**5.766.668.024,00**	**5.384.543.950,00**	**5.401.397.922,00**	**-365.270.102,00**	**6.479.340.000,00**
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	70 Persen	24.286.300,00	16.283.300,00	16.283.300,00	-8.003.000,00	155.200.000,00
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	4.158.214.224,00	3.967.104.850,00	3.983.212.022,00	-175.002.202,00	4.719.540.000,00
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	62 Persen	418.515.900,00	368.698.200,00	356.573.000,00	-61.942.900,00	475.600.000,00
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-	80 Persen	755.167.000,00	657.698.000,00	652.820.000,00	-102.347.000,00	975.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-	75 Persen	410.484.600,00	374.759.600,00	392.509.600,00	-17.975.000,00	154.000.000,00
142.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**-**	**15.00 persen 15 persen**	**105.911.100,00**	**130.283.250,00**	**111.111.850,00**	**5.200.750,00**	**261.000.000,00**
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	-	10 Persen	47.500.000,00	0,00	2.700.000,00	-44.800.000,00	181.000.000,00
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	-	55.77 Persen	58.411.100,00	130.283.250,00	108.411.850,00	50.000.750,00	80.000.000,00
143.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Provinsi**	**-**	**10 Persen**	**1.765.420.000,00**	**1.881.617.061,00**	**2.696.607.061,00**	**931.187.061,00**	**2.802.200.000,00**
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	-	70 Persen	871.644.300,00	557.314.661,00	571.275.161,00	-300.369.139,00	0,00
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	-	10 Event	591.754.800,00	1.324.302.400,00	2.092.881.150,00	1.501.126.350,00	2.802.200.000,00
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	-	4 Cabor	283.338.200,00	0,00	0,00	-283.338.200,00	0,00
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	75 Persen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	75 Prsen	18.682.700,00	0,00	31.850.750,00	13.168.050,00	0,00
144.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**-**	**75 Persen**	**210.000.000,00**	**510.000.000,00**	**529.171.400,00**	**319.171.400,00**	**0,00**
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	-	18 Organisasi	210.000.000,00	510.000.000,00	529.171.400,00	319.171.400,00	0,00
	2.23.2.24.0.00.20.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**4.679.180.622,00**	**5.160.127.300,00**	**5.301.544.233,00**	**622.363.611,00**	**101.804.000,00**
	2	**NON URUSAN**				**79.546.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.546.600,00**	**0,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.599.634.022,00**	**5.160.127.300,00**	**5.301.544.233,00**	**701.910.211,00**	**101.804.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.465.795.122,00**	**5.081.535.300,00**	**5.217.952.233,00**	**752.157.111,00**	**101.804.000,00**
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**79.546.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.546.600,00**	**0,00**
145.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**4.345.341.722,00**	**4.550.155.600,00**	**4.671.481.533,00**	**326.139.811,00**	**0,00**
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	26.629.500,00	26.370.000,00	7.793.105,00	-18.836.395,00	0,00
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.405.913.722,00	3.386.783.300,00	3.419.733.983,00	13.820.261,00	0,00
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	93.219.900,00	110.849.110,00	140.849.110,00	47.629.210,00	0,00
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	37.717.000,00	109.831.250,00	164.323.145,00	126.606.145,00	0,00
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	670.742.000,00	699.158.000,00	704.158.000,00	33.416.000,00	0,00
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	111.119.600,00	217.163.940,00	234.624.190,00	123.504.590,00	0,00
146.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	**531.379.700,00**	**546.470.700,00**	**346.470.700,00**	**101.804.000,00**
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	200.000.000,00	234.638.700,00	249.729.700,00	49.729.700,00	101.804.000,00
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	296.741.000,00	296.741.000,00	296.741.000,00	0,00
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**133.838.900,00**	**78.592.000,00**	**83.592.000,00**	**-50.246.900,00**	**0,00**
147.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**	**-**	**133.838.900,00**	**78.592.000,00**	**83.592.000,00**	**-50.246.900,00**	**0,00**
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	133.838.900,00	78.592.000,00	83.592.000,00	-50.246.900,00	0,00
	3.25.0.00.0.00.21.0000	**Dinas Perikanan**				**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**	**11.711.939.617,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**	**11.711.939.617,00**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**	**11.711.939.617,00**
148.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyakat (IKM)**	**-**	**3,75 Indeks 3,75 Persen**	**6.712.976.660,00**	**6.762.487.900,00**	**7.030.433.716,00**	**317.457.056,00**	**7.480.189.617,00**
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	100 Persen	5.608.460.560,00	5.735.008.000,00	5.788.012.478,00	179.551.918,00	5.544.924.317,00
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Indeks Profesionalitas (IP) ASN	-	69.00 Indeks	0,00	0,00	4.482.000,00	4.482.000,00	100.000.000,00
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-	100 Persen	227.668.900,00	221.529.000,00	388.718.338,00	161.049.438,00	662.893.100,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	-	76 Persen	16.428.000,00	0,00	0,00	-16.428.000,00	181.500.000,00
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-	100 Persen	740.603.300,00	672.210.900,00	673.220.900,00	-67.382.400,00	737.872.200,00
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kondisi Barang Milik Perangkat Daerah	-	76 Persen	119.815.900,00	133.740.000,00	176.000.000,00	56.184.100,00	253.000.000,00
149.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Produksi Perikanan Tangkap**	**58.811,00 Ton**	**96,10 Persen**	**1.210.992.700,00**	**318.550.000,00**	**318.550.000,00**	**-892.442.700,00**	**3.077.950.000,00**
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	2 kegitan	16.61 Persen	1.210.992.700,00	318.550.000,00	318.550.000,00	-892.442.700,00	3.077.950.000,00
150.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Produksi Perikanan Budidaya**	**-**	**96,10 Persen**	**1.063.838.000,00**	**613.571.200,00**	**92.270.200,00**	**-971.567.800,00**	**845.800.000,00**
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang telah dibina	-	75,18 Persen	113.824.500,00	113.571.200,00	83.770.200,00	-30.054.300,00	197.000.000,00
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	-	96,12 Persen	950.013.500,00	500.000.000,00	8.500.000,00	-941.513.500,00	648.800.000,00
151.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan**	**-**	**96,10 Persen**	**100.224.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-224.000,00**	**308.000.000,00**
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Bahan Baku Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	-	96,10 Persen	100.224.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-224.000,00	308.000.000,00
	3.25.0.00.0.00.21.0001	**UPTD Balai Benih Ikan**				**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**	**178.770.000,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**	**178.770.000,00**
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**	**178.770.000,00**
152.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**-**	**96,10 Persen**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**	**178.770.000,00**
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih ikan air tawar	-	69,23 Persen	128.761.600,00	128.761.600,00	128.761.600,00	0,00	178.770.000,00
	3.26.0.00.0.00.22.0000	**Dinas Pariwisata**				**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**	**21.503.631.000,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**	**21.503.631.000,00**
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**	**21.503.631.000,00**
153.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI**	**74,55 Persen 90 Persen**	**74,55 Persen 90 Persen**	**5.300.473.415,00**	**5.185.528.804,00**	**5.273.255.019,00**	**-27.218.396,00**	**9.278.231.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP							
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	81 Persen	81 Persen	49.782.800,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-45.482.800,00	56.700.000,00
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	4.181.278.115,00	4.471.480.304,00	4.493.559.019,00	312.280.904,00	6.858.531.000,00
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	447.989.500,00	165.708.500,00	184.692.000,00	-263.297.500,00	1.269.000.000,00
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75 Persen	75 Persen	64.514.000,00	0,00	49.676.000,00	-14.838.000,00	240.000.000,00
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	429.493.000,00	494.014.000,00	446.472.000,00	16.979.000,00	645.000.000,00
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	127.416.000,00	50.026.000,00	94.556.000,00	-32.860.000,00	209.000.000,00
154.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN**	**-37,03 Persen**	**-37,03 Persen**	**1.593.814.188,00**	**1.830.984.930,00**	**886.940.300,00**	**-706.873.888,00**	**10.634.400.000,00**
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5 Daya Tarik	5 Daya Tarik	883.366.080,00	870.108.700,00	590.889.300,00	-292.476.780,00	2.876.000.000,00
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	2 Destinasi	2 Destinasi	710.448.108,00	960.876.230,00	296.051.000,00	-414.397.108,00	7.758.400.000,00
155.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA**	**20 Persen**	**20 Persen**	**419.618.400,00**	**528.678.900,00**	**520.714.900,00**	**101.096.500,00**	**1.491.000.000,00**
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	1 Event	1 Event	419.618.400,00	528.678.900,00	520.714.900,00	101.096.500,00	1.491.000.000,00
156.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI**	**15,63 Persen**	**15,63 Persen**	**102.450.650,00**	**335.652.830,00**	**113.999.950,00**	**11.549.300,00**	**100.000.000,00**
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	102.450.650,00	335.652.830,00	113.999.950,00	11.549.300,00	100.000.000,00
	4.01.0.00.0.00.23.0001	**Bagian Administrasi Pembangunan**				**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**	**770.383.065,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**	**770.383.065,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**	**770.383.065,00**
157.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perangkat daerah dengan nilai predikat BB**	**90 Persen**	**90 Persen**	**122.854.100,00**	**122.854.000,00**	**136.340.610,00**	**13.486.510,00**	**196.383.065,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Darah (LKJIP)	Nilai 70	Nilai 70	122.854.100,00	122.854.000,00	136.340.610,00	13.486.510,00	196.383.065,00
158.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase kepatuhan OPD melaporkan pelaksanaan pembangunan**	**90 persen**	**90 persen**	**334.961.400,00**	**334.961.579,00**	**321.474.029,00**	**-13.487.371,00**	**574.000.000,00**
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	334.961.400,00	334.961.579,00	321.474.029,00	-13.487.371,00	574.000.000,00
	4.01.0.00.0.00.23.0002	**Bagian Tata Pemerintahan**				**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**	**512.120.773,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**	**512.120.773,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**	**512.120.773,00**
159.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**	**-**	**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**	**512.120.773,00**
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	599.999.600,00	600.000.000,00	600.000.000,00	400,00	512.120.773,00
	4.01.0.00.0.00.23.0003	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**				**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**	**6.136.169.560,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**	**6.136.169.560,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**	**6.136.169.560,00**
160.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**	**-**	**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**	**6.136.169.560,00**
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	11.083.070.000,00	10.700.930.000,00	10.700.930.000,00	-382.140.000,00	6.136.169.560,00
	4.01.0.00.0.00.23.0004	**Bagian Hukum**				**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**	**500.377.527,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**	**500.377.527,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**	**500.377.527,00**
161.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG TELAH TERDIGITALISASI DAN DAPAT DIAKSES PUBLIK MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH**	**-**	**50 Persen**	**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**	**500.377.527,00**
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	690 Dokumen	450.000.000,00	500.000.000,00	567.000.000,00	117.000.000,00	500.377.527,00
	4.01.0.00.0.00.23.0005	**Bagian Kerja Sama**				**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**	**0,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**	**0,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**	**0,00**
162.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektifitas Kerjasama Daerah (%)**	**-**	**83 PERSEN**	**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**	**0,00**
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti dengan	-	83 PERSEN	149.999.800,00	150.000.000,00	149.999.990,00	190,00	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			perjanjian resmi (MoU/PKS)							
	4.01.0.00.0. 00.23.0006	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**				**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**	**487.096.586,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**	**487.096.586,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**	**487.096.586,00**
163.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan pereknomian yang di implementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh semua pihak terkait Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh semua pihak terkait.**	**100 Persen**	**100 Persen**	**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**	**487.096.586,00**
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD Jumlah rapat koordinasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	3 Notulen rapat	3 Notulen rapat 4 Dokumen	237.234.200,00	296.059.100,00	378.514.548,00	141.280.348,00	381.500.000,00
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pemantauan SDA yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	114.757.500,00	155.440.900,00	72.985.452,00	-41.772.048,00	105.596.586,00
	4.01.0.00.0. 00.23.0007	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**				**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**	**900.125.800,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**	**900.125.800,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**	**900.125.800,00**
164.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan**	**-**	**25,92 Nilai**	**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**	**900.125.800,00**
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase nilai pengadaan melalui e-purchasing terhadap total nilai pengadaan	-	50 Persen	819.997.900,00	820.000.000,00	820.000.000,00	2.100,00	900.125.800,00
	4.01.0.00.0. 00.23.0008	**Bagian Organisasi**				**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**	**0,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**	**0,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**	**0,00**
165.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**	**0,00**
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	505.740.400,00	505.740.467,00	525.740.467,00	20.000.067,00	0,00
	4.01.0.00.0. 00.23.0009	**Bagian Umum**				**48.367.446.186,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**-2.351.441.872,00**	**41.075.378.673,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**30.734.743.071,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**15.281.261.243,00**	**41.075.378.673,00**
	4	**NON URUSAN**				**17.632.703.115,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.632.703.115,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**17.632.703.115,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.632.703.115,00**	**0,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**30.734.743.071,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**15.281.261.243,00**	**41.075.378.673,00**
166.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**48.367.446.186,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**-2.351.441.872,00**	**41.075.378.673,00**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	15.604.179.915,00	19.684.009.133,00	19.806.461.692,00	4.202.281.777,00	14.823.174.000,00
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	251.449.872,00	41.449.872,00	41.449.872,00	-210.000.000,00	19.014.000,00
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	7.276.877.400,00	6.044.095.050,00	6.702.710.590,00	-574.166.810,00	4.375.992.400,00
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.393.999.299,00	1.616.813.000,00	1.690.407.000,00	-4.703.592.299,00	3.123.532.750,00
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.041.684.100,00	4.506.513.600,00	4.467.513.600,00	1.425.829.500,00	3.059.050.286,00
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	7.230.886.600,00	5.502.125.550,00	6.217.077.624,00	-1.013.808.976,00	6.216.604.287,00
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	7.619.009.000,00	6.952.877.550,00	6.402.302.884,00	-1.216.706.116,00	8.508.010.950,00
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	949.360.000,00	583.160.000,00	688.081.052,00	-261.278.948,00	950.000.000,00
	4.01.0.00.0.00.23.0010	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**	**904.576.530,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**	**904.576.530,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**	**904.576.530,00**
167.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**	**904.576.530,00**
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	472.999.900,00	532.999.805,00	735.592.422,00	262.592.522,00	904.576.530,00
	4.02.0.00.0.00.24.0000	**Sekretariat DPRD**				**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**	**40.700.454.796,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**	**40.700.454.796,00**
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**	**40.700.454.796,00**
168.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**80 Nilai 85 Persen**	**3.45 Indeks 85 Persen**	**21.275.984.234,00**	**23.356.506.824,00**	**24.746.604.046,00**	**3.470.619.812,00**	**21.877.095.368,00**
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	88 Persen	88 Persen	182.822.200,00	147.478.200,00	147.478.200,00	-35.344.000,00	206.880.000,00
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.903.430.642,00	6.547.600.175,00	6.586.480.667,00	-1.316.949.975,00	7.854.823.136,00
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	95 Persen	34.360.000,00	200.512.388,00	200.512.388,00	166.152.388,00	131.568.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	65 Persen	60 Persen	1.085.227.800,00	1.456.098.289,00	1.648.123.326,00	562.895.526,00	1.970.040.000,00
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70 Persen	70 Persen	411.530.000,00	438.401.125,00	1.399.592.125,00	988.062.125,00	616.500.000,00
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	85 Persen	2.188.638.600,00	2.696.700.775,00	2.677.405.725,00	488.767.125,00	3.032.140.000,00
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	802.108.000,00	1.486.301.518,00	1.634.360.376,00	832.252.376,00	1.082.500.000,00
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.687.602.992,00	9.030.004.854,00	8.953.457.489,00	1.265.854.497,00	5.782.644.232,00
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	100 Persen	980.264.000,00	1.353.409.500,00	1.499.193.750,00	518.929.750,00	1.200.000.000,00
169.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**80 Persen**	**60 75 Persen Persen 60 Persen 80 Persen**	**7.237.310.000,00**	**13.450.229.393,00**	**12.102.464.833,00**	**4.865.154.833,00**	**18.823.359.428,00**
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	80 Persen	80 Persen	1.479.699.000,00	2.503.349.106,00	2.503.349.106,00	1.023.650.106,00	2.742.759.900,00
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	85 Persen	85 Persen	1.073.385.000,00	2.088.713.150,00	2.386.674.814,00	1.313.289.814,00	1.580.920.000,00
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kabupaten	40 Persen	80 Persen	1.872.970.000,00	4.301.346.375,00	4.256.852.375,00	2.383.882.375,00	4.507.940.000,00
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	85 Persen	85 Persen	2.811.256.000,00	4.556.820.762,00	2.955.588.538,00	144.332.538,00	9.991.739.528,00
	5.01.5.05.0.00.25.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				**8.968.366.251,00**	**9.477.774.804,00**	**9.474.611.535,00**	**506.245.284,00**	**10.584.108.283,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.968.366.251,00**	**9.477.774.804,00**	**9.474.611.535,00**	**506.245.284,00**	**10.584.108.283,00**
	5.01	**PERENCANAAN**				**8.733.310.251,00**	**9.141.496.624,00**	**9.035.136.355,00**	**301.826.104,00**	**9.840.372.889,00**
170.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**3.47 Indeks 3.50 88.50 INDEKS % 3.50 INDEKS 3.50**	**3.46 Indeks 88.30 % 90 Persen**	**6.686.576.251,00**	**6.757.865.840,00**	**7.127.377.201,00**	**440.800.950,00**	**6.645.992.051,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				INDEKS 90 Persen						
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85 %	80 %	13.956.000,00	11.300.000,00	2.300.000,00	-11.656.000,00	16.609.000,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.614.687.451,00	5.656.653.780,00	5.743.608.111,00	128.920.660,00	5.614.687.451,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	85 %	81 %	289.449.600,00	332.253.420,00	338.972.790,00	49.523.190,00	347.795.600,00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	85 Persen	85 Persen	0,00	0,00	212.143.000,00	212.143.000,00	0,00
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	100 %	100 %	302.750.100,00	276.454.300,00	279.954.300,00	-22.795.800,00	373.900.000,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	85 %	81 %	465.733.100,00	481.204.340,00	550.399.000,00	84.665.900,00	293.000.000,00
171.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase program prioritas nasional yang didukung program prioritas daerah Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir**	**68 % 68 92 % %**	**64 % 87,5 %**	**1.131.812.500,00**	**1.208.111.460,00**	**1.084.139.540,00**	**-47.672.960,00**	**1.590.848.568,00**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	74 %	88 %	1.023.687.500,00	891.386.460,00	696.744.540,00	-326.942.960,00	1.192.768.460,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	95 %	90 %	59.547.000,00	59.547.000,00	45.547.000,00	-14.000.000,00	125.814.308,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	75 %	55 %	48.578.000,00	257.178.000,00	341.848.000,00	293.270.000,00	272.265.800,00
172.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**94 %**	**93 %**	**914.921.500,00**	**1.175.519.324,00**	**823.619.614,00**	**-91.301.886,00**	**1.603.532.270,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	93 %	92 %	210.499.000,00	308.676.784,00	226.247.784,00	15.748.784,00	395.807.610,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD	93 %	92 %	488.892.500,00	583.972.540,00	407.901.830,00	-80.990.670,00	894.876.660,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	93 %	92 %	215.530.000,00	282.870.000,00	189.470.000,00	-26.060.000,00	312.848.000,00
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**235.056.000,00**	**336.278.180,00**	**439.475.180,00**	**204.419.180,00**	**743.735.394,00**
173.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah**	**40 % 40 80 % % 80 %**	**0,71 Rasio 55 %**	**235.056.000,00**	**336.278.180,00**	**439.475.180,00**	**204.419.180,00**	**743.735.394,00**
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	78.850.000,00	150.728.180,00	253.925.180,00	175.075.180,00	293.468.270,00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	100 %	100 %	78.354.000,00	107.920.000,00	107.920.000,00	29.566.000,00	294.208.130,00
	5.02.0.00.0. 00.26.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**				**141.082.776.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.417.217.386,00**	**196.775.295.500,00**
	5	**NON URUSAN**				**7.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.205.000,00**	**0,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**141.075.571.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.410.012.386,00**	**196.775.295.500,00**
	5.02	**KEUANGAN**				**141.075.571.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.410.012.386,00**	**196.775.295.500,00**
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**7.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.205.000,00**	**0,00**
174.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**3,46 Indeks 3,46 Indeks 73,95 Persen**	**11.560.315.243,00**	**12.298.681.074,00**	**11.888.777.883,00**	**328.462.640,00**	**17.669.500.000,00**
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	60 Persen	46.374.200,00	42.280.000,00	42.280.000,00	-4.094.200,00	70.000.000,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 Orang	100 Persen	8.664.033.843,00	9.417.572.899,00	8.824.151.337,00	160.117.494,00	14.196.700.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	93 Persen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	45.000.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	55 Persen	472.713.700,00	503.853.000,00	507.331.906,00	34.618.206,00	966.000.000,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-	60 Persen	117.531.000,00	105.974.150,00	250.801.866,00	133.270.866,00	998.500.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	12 Bulan	80 Persen	2.152.100.000,00	1.992.145.000,00	1.994.045.000,00	-158.055.000,00	1.169.800.000,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	1 Tahun	75 Persen	107.562.500,00	236.856.025,00	249.167.774,00	141.605.274,00	223.500.000,00
175.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD (% Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**undefined undefined**	**100 Persen 33,50 Persen 90.05 Persen 90,15 Persen**	**128.783.524.101,00**	**124.614.427.794,00**	**91.686.882.104,00**	**-37.096.641.997,00**	**177.554.885.500,00**
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen RKA dan Rancangan APBD kepada DPRD sesuai jadwal Permendagri	2 Dokumen	100 Persen	1.225.000.000,00	1.478.582.000,00	1.646.082.000,00	421.082.000,00	1.337.950.000,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	12 ddDokumen	100 Persen	309.978.800,00	787.962.500,00	793.962.500,00	483.983.700,00	732.001.000,00
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	1 Dokumen	90 Persen	380.422.100,00	762.653.394,00	762.653.394,00	382.231.294,00	589.700.000,00
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurnya Belanja transfer, BKK dan BTT	-	100 Persen	126.868.123.201,00	121.585.229.900,00	88.484.184.210,00	-38.383.938.991,00	174.895.234.500,00
176.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**-**	**2,63 Persen**	**310.010.700,00**	**1.111.419.952,00**	**1.111.419.952,00**	**801.409.252,00**	**777.910.000,00**
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tertatausahakan dan teradministrasi dengan baik	2 Dokumen	80 Persen	310.010.700,00	1.111.419.952,00	1.111.419.952,00	801.409.252,00	777.910.000,00
177.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**	**-**	**6,98 Persen**	**428.926.600,00**	**978.494.120,00**	**978.479.319,00**	**549.552.719,00**	**773.000.000,00**
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	12 Laporan	0,26 Persen	428.926.600,00	978.494.120,00	978.479.319,00	549.552.719,00	773.000.000,00
	5.03.5.04.0.00.27.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**7.579.436.625,00**	**7.843.514.159,00**	**7.945.983.884,00**	**366.547.259,00**	**9.520.071.000,00**
	5	**NON URUSAN**				**168.980.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.980.900,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**7.410.455.725,00**	**7.843.514.159,00**	**7.945.983.884,00**	**535.528.159,00**	**9.520.071.000,00**
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**168.980.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.980.900,00**	**0,00**
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**7.232.571.125,00**	**7.662.085.159,00**	**7.764.554.884,00**	**531.983.759,00**	**8.560.000.000,00**
178.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**-**	**3.45 indek 3,45 Indeks**	**5.528.562.325,00**	**6.086.305.159,00**	**6.129.038.084,00**	**600.475.759,00**	**6.718.000.000,00**
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.00 persen	38.976.900,00	50.500.000,00	55.900.000,00	16.923.100,00	82.000.000,00
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 pesen	5.176.078.425,00	5.529.283.334,00	5.571.797.659,00	395.719.234,00	5.930.000.000,00
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	75 persen	167.267.000,00	280.530.600,00	268.349.200,00	101.082.200,00	361.000.000,00
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-	80 persen	106.930.000,00	158.228.225,00	158.228.225,00	51.298.225,00	265.000.000,00
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-	9 unit	39.310.000,00	67.763.000,00	74.763.000,00	35.453.000,00	80.000.000,00
179.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**-**	**25,06 rasio 25,06 Rasio**	**1.872.989.700,00**	**1.575.780.000,00**	**1.635.516.800,00**	**-237.472.900,00**	**1.842.000.000,00**
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	-	100 persen	394.870.200,00	400.802.000,00	400.802.000,00	5.931.800,00	1.120.000.000,00
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	-	67 persen	1.092.233.500,00	1.089.285.500,00	1.089.285.500,00	-2.948.000,00	292.000.000,00
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	-	100 Persen	385.886.000,00	85.692.500,00	145.429.300,00	-240.456.700,00	430.000.000,00
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**177.884.600,00**	**181.429.000,00**	**181.429.000,00**	**3.544.400,00**	**960.071.000,00**
180.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**-**	**3,12 rasio**	**177.884.600,00**	**181.429.000,00**	**181.429.000,00**	**3.544.400,00**	**960.071.000,00**
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	100 peraen	177.884.600,00	181.429.000,00	181.429.000,00	3.544.400,00	960.071.000,00
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.813.407.000,00**	**4.720.993.881,00**	**4.759.737.215,00**	**-1.053.669.785,00**	**7.065.984.000,00**
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**				**5.813.407.000,00**	**4.720.993.881,00**	**4.759.737.215,00**	**-1.053.669.785,00**	**7.065.984.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**85 Persen**	**3,45 Nilai 77,20 Persen**	**5.089.665.000,00**	**4.420.993.881,00**	**4.459.737.215,00**	**-629.927.785,00**	**6.164.684.000,00**
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Persen	75 Persen	34.770.000,00	26.679.000,00	5.512.977,00	-29.257.023,00	35.692.000,00
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	100 Persen	3.330.850.960,00	3.432.612.441,00	3.510.325.842,00	179.474.882,00	4.725.312.000,00
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	90 Persen	-	49.098.000,00	0,00	0,00	-49.098.000,00	103.000.000,00
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	169.521.500,00	152.896.840,00	127.417.488,00	-42.104.012,00	438.500.000,00
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	35 Persen	30 Persen	863.297.540,00	19.972.000,00	19.972.000,00	-843.325.540,00	199.000.000,00
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	548.369.000,00	328.937.600,00	327.618.100,00	-220.750.900,00	559.300.000,00
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	93.758.000,00	459.896.000,00	468.890.808,00	375.132.808,00	103.880.000,00
182.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan**	**75 Persen undefined undefined**	**75 Persen**	**723.742.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-423.742.000,00**	**901.300.000,00**
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	30 Persen	30 Persen	190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-90.000.000,00	154.900.000,00
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	75 Persen	75 Persen	391.742.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-291.742.000,00	558.400.000,00
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi	80 Persen	80 Persen	142.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-42.000.000,00	188.000.000,00
	6.01.0.00.0. 00.29.0000	**Inspektorat Daerah**				**17.390.643.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.684.136.832,00**	**12.216.154.304,00**
	6	**NON URUSAN**				**40.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.277.000,00**	**0,00**
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.350.366.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.643.859.832,00**	**12.216.154.304,00**
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**17.350.366.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.643.859.832,00**	**12.216.154.304,00**
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**40.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.277.000,00**	**0,00**
183.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**89,07 NILAI NILAI 89,07**	**87,78 NILAI NILAI 87,78**	**15.107.833.216,00**	**15.048.713.804,00**	**13.314.279.004,00**	**-1.793.554.212,00**	**9.666.723.136,00**
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	118.017.700,00	164.338.190,00	159.651.590,00	41.633.890,00	100.111.052,00
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.377.933.088,00	9.596.831.079,00	9.704.723.284,00	326.790.196,00	6.939.598.874,00
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang memenuhi jam	100 Persen	4,00 Persen	2.511.533.800,00	1.737.507.540,00	1.511.098.350,00	-1.000.435.450,00	860.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun							
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	641.125.500,00	667.869.830,00	737.435.930,00	96.310.430,00	521.285.210,00
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	1.765.126.528,00	2.225.400.165,00	470.924.500,00	-1.294.202.028,00	669.500.000,00
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	251.953.900,00	232.366.200,00	254.983.150,00	3.029.250,00	218.500.000,00
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	442.142.700,00	424.400.800,00	475.462.200,00	33.319.500,00	357.728.000,00
184.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP**	**66,50 PERSEN 84,30 PERSEN**	**66,50 Persen 90,450 Persen**	**1.346.776.600,00**	**1.377.482.180,00**	**1.382.037.680,00**	**35.261.080,00**	**1.346.169.570,00**
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Kabupaten	100 Persen	100 Persen	931.745.500,00	960.082.000,00	964.637.500,00	32.892.000,00	910.137.070,00
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	100 Persen	415.031.100,00	417.400.180,00	417.400.180,00	2.369.080,00	436.032.500,00
185.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Kapabilitas APIP PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DIUSULKAN DAN LOLOS SELEKSI TPN Nilai Manajemen Risiko (MR)**	**8,51 PERSEN**	**3000 8,51 Nilai PERSEN 3018 Nilai**	**936.034.000,00**	**1.010.190.600,00**	**1.010.190.300,00**	**74.156.300,00**	**1.203.261.598,00**
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	100 Persen	15.595.000,00	0,00	2.750.000,00	-12.845.000,00	100.000.000,00
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 Persen	100 Persen	920.439.000,00	1.010.190.600,00	1.007.440.300,00	87.001.300,00	1.103.261.598,00
	7.01.4.01.0.00.31.0000	**Kecamatan Bunguran Timur**				**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**	**8.663.534.900,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**	**8.663.534.900,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**	**8.663.534.900,00**
186.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**85 Persen 85 PERSEN**	**85 Persen 85 PERSEN**	**7.142.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**57.382.768,00**	**8.603.534.900,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined	100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	5.833.065.970,00	5.949.777.032,00	6.057.336.118,00	224.270.148,00	6.346.020.012,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	433.008.600,00	208.377.180,00	174.115.800,00	-258.892.800,00	614.364.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75 Persen	75 Persen	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	400.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	758.126.000,00	726.419.600,00	726.419.600,00	-31.706.400,00	944.715.888,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	118.435.000,00	51.646.820,00	184.146.820,00	65.711.820,00	298.435.000,00
187.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000.000,00**	**60.000.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55 Laporan	55 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	60.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.31.0001	**Kelurahan Ranai Kota**				**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**	**465.889.500,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**	**465.889.500,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**	**465.889.500,00**
188.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**390.000.000,00**	**476.000.000,00**	**525.000.000,00**	**135.000.000,00**	**265.889.500,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55 Koordinasi	55 Koordinasi	390.000.000,00	476.000.000,00	525.000.000,00	135.000.000,00	265.889.500,00
189.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**450.045.000,00**	**450.045.000,00**	**450.045.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4 Koordinasi	4 Koordinasi	450.045.000,00	450.045.000,00	450.045.000,00	0,00	200.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.31.0002	**Kelurahan Bandarsyah**				**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**	**465.889.500,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**	**465.889.500,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**	**465.889.500,00**
190.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**396.000.000,00**	**480.000.000,00**	**625.918.000,00**	**229.918.000,00**	**265.889.500,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang	55 Koordinasi	55 Koordinasi	396.000.000,00	480.000.000,00	625.918.000,00	229.918.000,00	265.889.500,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dilaksanakan di kecamatan							
191.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4 Koordinasi	4 Koordinasi	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	200.000.000,00
	7.01.4.01.0. 00.31.0003	**Kelurahan Ranai Darat**				**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**	**465.889.500,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**	**465.889.500,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**	**465.889.500,00**
192.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**265.200.000,00**	**336.200.000,00**	**374.620.000,00**	**109.420.000,00**	**265.889.500,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55 Koordinasi	55 Koordinasi	265.200.000,00	336.200.000,00	374.620.000,00	109.420.000,00	265.889.500,00
193.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4 Koordinasi	4 Koordinasi	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	200.000.000,00
	7.01.4.01.0. 00.31.0004	**Kelurahan Batu Hitam**				**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**	**268.889.500,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**	**268.889.500,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**	**268.889.500,00**
194.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**	**268.889.500,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55 Koordinasi	55 Koordinasi	282.000.000,00	413.000.000,00	454.000.000,00	172.000.000,00	268.889.500,00
	7.01.4.01.0. 00.32.0000	**Kecamatan Bunguran Barat**				**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**	**50.000.000,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**	**50.000.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**	**50.000.000,00**
195.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**4.057.936.723,00**	**4.149.897.600,00**	**4.239.194.957,00**	**181.258.234,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.342.714.723,00	3.458.409.000,00	3.512.161.636,00	169.446.913,00	0,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	218.386.500,00	128.909.400,00	155.557.490,00	-62.829.010,00	0,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	401.540.000,00	473.014.000,00	481.910.631,00	80.370.631,00	0,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	95.295.500,00	89.565.200,00	89.565.200,00	-5.730.300,00	0,00
196.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**21.356.100,00**	**20.950.000,00**	**20.950.000,00**	**-406.100,00**	**0,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	21.356.100,00	20.950.000,00	20.950.000,00	-406.100,00	0,00
197.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**6.000.000,00**	**8.220.000,00**	**8.220.000,00**	**2.220.000,00**	**0,00**
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	6.000.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	2.220.000,00	0,00
198.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**42.330.000,00**	**17.308.000,00**	**17.154.000,00**	**-25.176.000,00**	**50.000.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	42.330.000,00	17.308.000,00	17.154.000,00	-25.176.000,00	50.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.32.0001	**Kelurahan Sedanau**				**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**	**0,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**	**0,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**	**0,00**
199.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**	**0,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	533.600.000,00	533.600.000,00	594.600.369,00	61.000.369,00	0,00
	7.01.4.01.0.00.33.0000	**Kecamatan Bunguran Utara**				**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**	**3.894.080.346,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**	**3.894.080.346,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**	**3.894.080.346,00**
200.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**80 Persen**	**80 Persen**	**2.673.038.029,00**	**2.737.540.300,00**	**2.806.450.570,00**	**133.412.541,00**	**3.602.310.346,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran	100 Persen	100 Persen	2.139.044.029,00	2.222.698.000,00	2.243.613.070,00	104.569.041,00	2.645.500.346,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60 Persen	60 Persen	87.096.500,00	108.729.000,00	149.674.200,00	62.577.700,00	416.310.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	355.237.500,00	371.613.300,00	371.613.300,00	16.375.800,00	440.500.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	91.660.000,00	34.500.000,00	41.550.000,00	-50.110.000,00	100.000.000,00
201.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.676.400,00**	**25.066.100,00**	**25.066.100,00**	**4.389.700,00**	**291.770.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	50 Koordinasi	50 Koordinasi	20.676.400,00	25.066.100,00	25.066.100,00	4.389.700,00	291.770.000,00
	7.01.4.01.0.00.34.0000	**Kecamatan Pulau Laut**				**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**	**3.894.601.899,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**	**3.894.601.899,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**	**3.894.601.899,00**
202.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**2.640.687.310,00**	**2.559.956.875,00**	**2.610.260.372,00**	**-30.426.938,00**	**3.327.431.899,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.002.399.510,00	2.057.748.075,00	2.098.471.982,00	96.072.472,00	2.142.140.899,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	140.910.400,00	153.553.400,00	172.632.990,00	31.722.590,00	443.291.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	454.926.200,00	318.847.200,00	309.347.200,00	-145.579.000,00	352.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	42.451.200,00	29.808.200,00	29.808.200,00	-12.643.000,00	390.000.000,00
203.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 persen**	**100 persen**	**50.208.000,00**	**50.208.000,00**	**58.826.000,00**	**8.618.000,00**	**567.170.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	70 Koordinasi	70 Koordinasi	50.208.000,00	50.208.000,00	58.826.000,00	8.618.000,00	567.170.000,00
	7.01.4.01.0.00.35.0000	**Kecamatan Midai**				**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**	**4.092.235.000,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**	**4.092.235.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**	**4.092.235.000,00**
204.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase layanan dukungan administrasi**	**85 %**	**85 %**	**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**	**4.092.235.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	**kesekretariatan yang sesuai SOP**							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.724.043.504,00	2.826.646.720,00	2.848.718.743,00	124.675.239,00	3.132.924.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55 %	55 %	185.628.400,00	215.446.200,00	215.446.200,00	29.817.800,00	281.311.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 %	100 %	483.341.500,00	442.776.700,00	442.776.700,00	-40.564.800,00	543.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	85.340.000,00	69.340.000,00	69.340.000,00	-16.000.000,00	135.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.35.0001	**Kelurahan Sabang Barat**				**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**	**533.630.000,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**	**533.630.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**	**533.630.000,00**
205.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**	**533.630.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	316.700.000,00	316.700.000,00	354.700.000,00	38.000.000,00	533.630.000,00
	7.01.4.01.0.00.36.0000	**Kecamatan Serasan**				**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.441.923,00**	**-136.576.804,00**	**5.337.130.714,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**	**175.000.000,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**	**175.000.000,00**
206.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN**	**20 Persen**	**20 Persen**	**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**	**175.000.000,00**
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	33.729,00	33.729,00	175.000.000,00
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.408.194,00**	**-136.610.533,00**	**5.162.130.714,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.408.194,00**	**-136.610.533,00**	**5.162.130.714,00**
207.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**77.30 Nilai 90 Persen**	**77.30 Nilai 90 Persen**	**3.971.868.727,00**	**3.783.868.000,00**	**3.853.653.359,00**	**-118.215.368,00**	**4.350.780.714,00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	64.00 Persen	64.00 Persen	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	20.000.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.021.705.038,00	3.113.250.000,00	3.137.082.279,00	115.377.241,00	3.233.420.714,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	95 Persen	0,00	0,00	17.064.090,00	17.064.090,00	15.000.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80 Persen	80 Persen	91.360.000,00	81.700.000,00	109.625.000,00	18.265.000,00	351.360.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	40.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	593.803.689,00	525.918.000,00	525.531.596,00	-68.272.093,00	526.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	65.000.000,00	63.000.000,00	64.342.554,00	-657.446,00	165.000.000,00
208.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 Persen**	**100 Persen**	**123.150.000,00**	**104.410.000,00**	**104.410.000,00**	**-18.740.000,00**	**583.150.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	12 Koordinasi	12 Koordinasi	123.150.000,00	104.410.000,00	104.410.000,00	-18.740.000,00	583.150.000,00
209.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**41.412,00**	**41.412,00**	**103.200.000,00**
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	41.412,00	41.412,00	103.200.000,00
210.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10 Persen**	**10 Persen**	**0,00**	**0,00**	**53.497,00**	**53.497,00**	**50.000.000,00**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	53.497,00	53.497,00	50.000.000,00
211.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**249.926,00**	**249.926,00**	**75.000.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	249.926,00	249.926,00	75.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.36.0001	**Kelurahan Serasan**				**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**	**1.256.213.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**	**1.256.213.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**	**1.256.213.000,00**
212.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**425.858.270,00**	**425.858.270,00**	**475.858.270,00**	**50.000.000,00**	**426.213.000,00**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	undefined undefined	undefined undefined	425.858.270,00	425.858.270,00	475.858.270,00	50.000.000,00	426.213.000,00
213.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**782.000,00**	**1.354.730,00**	**1.354.730,00**	**572.730,00**	**830.000.000,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	undefined undefined	undefined undefined	782.000,00	1.354.730,00	1.354.730,00	572.730,00	830.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.37.0000	**Kecamatan Subi**				**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**	**3.724.586.947,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**	**3.724.586.947,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**	**3.724.586.947,00**
214.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.411.666.259,00**	**3.327.907.400,00**	**3.392.138.742,00**	**-19.527.517,00**	**3.383.586.947,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.486.224.859,00	2.549.163.000,00	2.563.395.742,00	77.170.883,00	1.815.387.314,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	100 Persen	100 Persen	127.970.500,00	149.028.200,00	183.012.200,00	55.041.700,00	564.213.633,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	643.300.900,00	524.331.000,00	530.345.600,00	-112.955.300,00	501.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80 Persen	80 Persen	154.170.000,00	105.385.200,00	115.385.200,00	-38.784.800,00	502.986.000,00
215.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 Persen**	**100 Persen**	**31.992.000,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**10.008.000,00**	**341.000.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	70 Koordinasi	70 Koordinasi	31.992.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	10.008.000,00	341.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.4.01.0.00.38.0000	**Kecamatan Pulau Tiga**				**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**	**2.733.009.000,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**	**2.733.009.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**	**2.733.009.000,00**
216.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**MENINGKATNYA KINERJAPEGAWAI Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**90 Persen**	**1 laporan 1 90 Persen**	**2.041.609.352,00**	**2.014.274.034,00**	**2.045.009.393,00**	**3.400.041,00**	**2.614.377.000,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	1.598.119.252,00	1.657.968.234,00	1.689.474.993,00	91.355.741,00	1.993.137.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	-	1 laporan 1	0,00	0,00	16.954.000,00	16.954.000,00	0,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana administrasi umum kantor yang disediakan dibagi jumlah sarana administrasi umum kantor yang dibutuhkan dikali seratus	70 Persen	70 Persen	117.246.300,00	117.224.400,00	105.224.400,00	-12.021.900,00	181.140.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa sarana penunjang urusan kantor yang tersedia dibagi jumlah sarana penunjang urusan kantor yang dibutuhkan dikali seratus	100 Persen	100 Persen	281.048.000,00	204.981.400,00	204.981.400,00	-76.066.600,00	375.100.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana kantor dikali seratus	70 Persen	70 Persen	45.195.800,00	34.100.000,00	28.374.600,00	-16.821.200,00	65.000.000,00
217.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**49.824.000,00**	**49.512.000,00**	**49.512.000,00**	**-312.000,00**	**118.632.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	70 Koordinasi	70 Koordinasi	49.824.000,00	49.512.000,00	49.512.000,00	-312.000,00	118.632.000,00
	7.01.4.01.0.00.39.0000	**Kecamatan Bunguran Tengah**				**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**	**3.178.565.000,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**	**3.178.565.000,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**	**3.178.565.000,00**
218.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran Persentase peningkatan**	**100 Persen 70 Persen 80 Persen**	**100 Persen 70 Persen 80 Persen**	**2.468.234.680,00**	**2.499.039.480,00**	**2.323.730.088,00**	**-144.504.592,00**	**3.128.565.000,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			barang milik perangkat daerah **Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran** **Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.931.146.680,00	1.971.537.698,00	1.997.730.448,00	66.583.768,00	2.429.965.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	91.634.000,00	105.471.300,00	96.548.300,00	4.914.300,00	185.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	193.590.000,00	192.579.142,00	0,00	-193.590.000,00	200.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	219.458.600,00	207.345.940,00	207.345.940,00	-12.112.660,00	280.600.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	32.405.400,00	22.105.400,00	22.105.400,00	-10.300.000,00	33.000.000,00
219.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**	**70 Laporan**	**70 Laporan**	**40.988.760,00**	**38.682.980,00**	**38.682.980,00**	**-2.305.780,00**	**50.000.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	40.988.760,00	38.682.980,00	38.682.980,00	-2.305.780,00	50.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.40.0000	**Kecamatan Bunguran Timur Laut**				**2.708.512.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**18.162.478,00**	**2.196.000.000,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**	**2.196.000.000,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**	**2.196.000.000,00**
220.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**	**2.196.000.000,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.856.823.330,00	1.896.361.330,00	1.920.503.128,00	63.679.798,00	1.438.588.956,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	84.870.800,00	132.483.280,00	132.483.280,00	47.612.480,00	83.100.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	143.340.000,00	153.861.000,00	153.861.000,00	10.521.000,00	83.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	539.426.000,00	474.360.000,00	474.360.000,00	-65.066.000,00	539.311.044,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.360.400,00	45.467.600,00	45.467.600,00	-6.892.800,00	52.000.000,00
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**	**0,00**
	7	**NON URUSAN**				**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**	**0,00**
221.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
222.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**	**0,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	21.692.000,00	0,00	0,00	-21.692.000,00	0,00
	7.01.4.01.0.00.41.0000	**Kecamatan Bunguran Selatan**				**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**	**3.314.093.606,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**	**3.314.093.606,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**	**3.314.093.606,00**
223.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah .Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**76,40 persen 76,40 Persen 77,20 Persen**	**2.184.093.064,00**	**2.160.417.558,00**	**2.227.405.230,00**	**43.312.166,00**	**3.174.623.606,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.672.630.220,00-893.098.810,00 J	-	10 orang/bulan	1.632.762.064,00	1.685.000.598,00	1.722.083.028,00	89.320.964,00	1.949.033.416,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	100 persen	102.280.500,00	85.698.960,00	87.915.800,00	-14.364.700,00	351.720.190,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	104.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-	100 persen	397.611.000,00	328.541.000,00	325.541.000,00	-72.070.000,00	475.302.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 unit	51.439.500,00	61.177.000,00	63.365.402,00	11.925.902,00	249.568.000,00
224.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerint**	**-**	**100 Persen**	**25.708.000,00**	**25.900.000,00**	**25.900.000,00**	**192.000,00**	**139.470.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	-	12 Laporan	25.708.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	192.000,00	139.470.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	7.01.4.01.0.00.42.0000	**Kecamatan Serasan Timur**				**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**	**3.702.255.688,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**	**3.702.255.688,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**	**3.702.255.688,00**
225.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**90 PERSEN**	**90 PERSEN**	**2.148.657.616,00**	**2.040.899.957,00**	**2.068.337.130,00**	**-80.320.486,00**	**3.438.455.688,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	1.590.372.416,00	1.643.359.157,00	1.670.796.330,00	80.423.914,00	2.353.815.688,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	84 Persen	84 Persen	72.585.200,00	107.290.000,00	107.290.000,00	34.704.800,00	488.040.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	449.800.000,00	264.866.800,00	264.866.800,00	-184.933.200,00	489.600.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	84 Persen	84 Persen	35.900.000,00	25.384.000,00	25.384.000,00	-10.516.000,00	107.000.000,00
226.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**62.496.000,00**	**48.697.944,00**	**48.697.944,00**	**-13.798.056,00**	**263.800.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	70 Koordinasi	70 Koordinasi	62.496.000,00	48.697.944,00	48.697.944,00	-13.798.056,00	263.800.000,00
	7.01.4.01.0.00.43.0000	**Kecamatan Suak Midai**				**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**	**2.981.703.576,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**	**2.981.703.576,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**	**2.981.703.576,00**
227.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**-**	**15 Orang/bulan**	**2.015.589.997,00**	**2.110.652.700,00**	**2.145.430.754,00**	**129.840.757,00**	**2.590.151.576,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Orang/bulan 15	1.630.634.397,00	1.664.994.000,00	1.679.772.054,00	49.137.657,00	1.539.200.576,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	102.196.600,00	162.946.576,00	184.663.776,00	82.467.176,00	579.951.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	254.579.000,00	263.459.724,00	260.652.324,00	6.073.324,00	421.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	28.180.000,00	19.252.400,00	20.342.600,00	-7.837.400,00	50.000.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	**50.449.100,00**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**-47.399.100,00**	**391.552.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	50.449.100,00	3.050.000,00	3.050.000,00	-47.399.100,00	391.552.000,00
	7.01.4.01.0. 00.44.0000	**Kecamatan Bunguran Batubi**				**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.208.002.895,00**	**-13.923.028,00**	**3.210.979.124,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**411.922.424,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**411.922.424,00**
229.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan Keagamaan yang dibina**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**411.922.424,00**
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-	100 Persen	0,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00	411.922.424,00
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.204.180.895,00**	**-17.745.028,00**	**2.799.056.700,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.204.180.895,00**	**-17.745.028,00**	**2.799.056.700,00**
230.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**3,53 Indeks**	**3,53 Indeks 71.10 Persen**	**2.189.083.623,00**	**2.142.610.917,00**	**2.151.221.953,00**	**-37.861.670,00**	**2.260.088.000,00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja PerangkatDaerah	-	74.50 Persen	0,00	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00	27.100.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.728.594.623,00	1.749.598.777,00	1.769.307.813,00	40.713.190,00	1.521.588.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	96.133.500,00	126.057.140,00	103.877.140,00	7.743.640,00	290.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	85 Persen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	100 Persen	298.499.900,00	239.455.000,00	237.755.000,00	-60.744.900,00	340.400.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	85 Persen	65.855.600,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-38.355.600,00	71.000.000,00
231.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 Persen**	**100 Persen**	**32.842.300,00**	**39.822.510,00**	**42.936.010,00**	**10.093.710,00**	**323.100.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang	70 Kali	70 Kali	32.842.300,00	39.822.510,00	42.936.010,00	10.093.710,00	323.100.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dilaksanakan di kecamatan							
232.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**121.800.000,00**
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatanyang aktif	-	100 Persen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	121.800.000,00
233.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**-**	**80 Persen**	**0,00**	**0,00**	**2.423.600,00**	**2.423.600,00**	**26.568.700,00**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaanpenerapan dan penegakan perda danperkada	-	80 Persen	0,00	0,00	2.423.600,00	2.423.600,00	26.568.700,00
234.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum**	**-**	**80 Persen**	**0,00**	**0,00**	**5.499.332,00**	**5.499.332,00**	**67.500.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi pelaksanaanpenerapan dan penegakan perda danperkada	-	80 Persen	0,00	0,00	5.499.332,00	5.499.332,00	67.500.000,00
	7.01.4.01.0.00.45.0000	**Kecamatan Pulau Tiga Barat**				**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**	**2.733.707.600,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**	**2.733.707.600,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**	**2.733.707.600,00**
235.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**2.206.203.680,00**	**2.223.159.300,00**	**2.243.403.411,00**	**37.199.731,00**	**2.714.707.600,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.774.018.180,00	1.789.838.600,00	1.790.098.361,00	16.080.181,00	2.055.131.280,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	102.965.200,00	105.155.400,00	132.944.750,00	29.979.550,00	129.602.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	301.959.900,00	315.634.900,00	312.659.900,00	10.700.000,00	490.974.320,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	27.260.400,00	12.530.400,00	7.700.400,00	-19.560.000,00	39.000.000,00
236.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**29.175.200,00**	**47.681.310,00**	**47.681.310,00**	**18.506.110,00**	**19.000.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	29.175.200,00	47.681.310,00	47.681.310,00	18.506.110,00	19.000.000,00
	7.01.4.01.0.00.46.0000	**Kecamatan Pulau Seluan**				**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**	**2.191.555.503,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**	**2.191.555.503,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**	**2.191.555.503,00**
237.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN**	**-**	**69.70 Nilai 85 persen 85 Persen**	**1.650.831.664,00**	**1.775.701.700,00**	**1.789.720.733,00**	**138.889.069,00**	**1.988.031.503,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	**ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	1.380.463.964,00	1.474.354.200,00	1.488.373.233,00	107.909.269,00	1.562.031.503,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-	55 Persen	110.427.000,00	117.190.500,00	117.190.500,00	6.763.500,00	210.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-	100 persen	114.516.700,00	136.513.000,00	136.513.000,00	21.996.300,00	140.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-	65 persen	45.424.000,00	46.944.000,00	46.944.000,00	1.520.000,00	56.000.000,00
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 Laporan	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	20.000.000,00
238.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**49.994.000,00**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**-26.494.000,00**	**203.524.000,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-	100 PERSEN	49.994.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-26.494.000,00	203.524.000,00
	7.01.4.01.0.00.47.0000	**Kecamatan Pulau Panjang**				**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**	**0,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**	**0,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**	**0,00**
239.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1 tempat waktu 1 Tepat waktu 1 Tepat Waktu**	**undefined undefined**	**undefined undefined undefinrd undefinrd**	**1.655.521.064,00**	**1.718.152.000,00**	**1.731.900.398,00**	**76.379.334,00**	**0,00**
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	undefined undefined	undefined undefined	1.455.358.064,00	1.495.014.000,00	1.508.762.398,00	53.404.334,00	0,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		undefined undefined	undefined undefined	143.223.000,00	143.223.000,00	143.223.000,00	0,00	0,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tepat waktu	-	undefined undefined	50.140.000,00	73.115.000,00	73.115.000,00	22.975.000,00	0,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tepat waktu	-	undefinrd undefinrd	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
240.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**70 Koordinasi**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**82.182.740,00**	**82.182.740,00**	**82.182.740,00**	**0,00**	**0,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	70 Koordinasi	undefined undefined	undefined undefined	82.182.740,00	82.182.740,00	82.182.740,00	0,00	0,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
	8.01.0.00.0.00.30.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**	**8.697.408.099,00**
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**	**8.697.408.099,00**
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**	**8.697.408.099,00**
241.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**100 Persen 83,55 85 Nilai Persen 83,55 Nilai 85 83,55 Persen Nilai**	**100 Persen 83,55 Nilai**	**4.358.429.638,00**	**4.442.525.751,00**	**4.588.087.997,00**	**229.658.359,00**	**2.876.116.718,00**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	91,25 Persen	91,25 Persen	6.225.600,00	6.349.600,00	6.349.600,00	124.000,00	42.235.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	3.436.097.807,00	3.476.859.001,00	3.497.614.199,00	61.516.392,00	2.165.956.118,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	94 Persen	100 Persen	129.840.000,00	172.383.900,00	140.153.400,00	10.313.400,00	141.025.600,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang milik Perangkat Daerah	70 Persen	100 Persen	43.771.619,00	39.501.250,00	128.221.250,00	84.449.631,00	50.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa dan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	297.494.612,00	288.452.000,00	302.933.548,00	5.438.936,00	345.900.000,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	-	72 Persen	445.000.000,00	458.980.000,00	512.816.000,00	67.816.000,00	131.000.000,00
242.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**100 Persen**	**1.556.000.000,00**	**1.806.765.000,00**	**2.768.424.000,00**	**1.212.424.000,00**	**3.513.825.000,00**
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	100 Persen	1.556.000.000,00	1.806.765.000,00	2.768.424.000,00	1.212.424.000,00	3.513.825.000,00
243.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK**	**75,06 Persen**	**75,06 Persen**	**794.337.881,00**	**794.337.881,00**	**782.554.881,00**	**-11.783.000,00**	**745.711.381,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	100 Persen	100 Persen	794.337.881,00	794.337.881,00	782.554.881,00	-11.783.000,00	745.711.381,00
244.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF**	**48,72 Persen**	**49,35 Persen**	**191.640.400,00**	**191.640.400,00**	**191.640.400,00**	**0,00**	**165.000.000,00**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	191.640.400,00	191.640.400,00	191.640.400,00	0,00	165.000.000,00
245.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN**	**100 Persen**	**100 Persen**	**697.880.000,00**	**628.338.369,00**	**634.558.369,00**	**-63.321.631,00**	**284.710.000,00**
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	100 Persen	697.880.000,00	628.338.369,00	634.558.369,00	-63.321.631,00	284.710.000,00
246.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.032.329.000,00**	**1.824.293.580,00**	**1.803.090.532,00**	**-1.229.238.468,00**	**1.112.045.000,00**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Laporan	12 Laporan	3.032.329.000,00	1.824.293.580,00	1.803.090.532,00	-1.229.238.468,00	1.112.045.000,00
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**	**0,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**	**0,00**
247.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**	**0,00**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah							
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat kepuasan OPD terhadap layanan failitasi dan koordinasi hukum	85.5 Persen	85.5 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL				**1.116.466.375.795,00**	**1.048.202.600.000,00**	**1.056.571.600.000,00**	**-59.894.775.795,00**	**1.770.893.720.493,00**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**							**268.774.086.243,00**	**238.428.056.708,00**	**238.592.281.611,00**	**-30.181.804.632,00**							**188.516.088.077,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**265.744.865.943,00**	**236.544.625.848,00**	**236.708.850.751,00**	**-29.036.015.192,00**							**188.516.088.077,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**265.744.865.943,00**	**236.544.625.848,00**	**236.708.850.751,00**	**-29.036.015.192,00**							**188.516.088.077,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**190.981.756.789,00**	**188.353.605.721,00**	**179.379.596.099,00**	**-11.602.160.690,00**					**-**		**188.516.088.077,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	189.328.000,00	190.019.240,00	190.019.240,00	691.240,00							200.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	200 Dokumen	44.770.000,00	72.857.240,00	72.857.240,00	28.087.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	32.058.000,00	31.922.000,00	31.922.000,00	-136.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Laporan	3 Laporan	112.500.000,00	85.240.000,00	85.240.000,00	-27.260.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	168.342.135.099,00	174.049.072.989,00	164.617.512.063,00	-3.724.623.036,00							188.101.088.077,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1081 Orang /bulan	1081 Orang /bulan	168.342.135.099,00	174.049.072.989,00	164.617.512.063,00	-3.724.623.036,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	-			188.101.088.077,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	124.885.000,00	974.786.940,00	938.680.000,00	813.795.000,00							125.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				7 Orang	7 Orang	49.901.000,00	58.606.940,00	22.500.000,00	-27.401.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	74.984.000,00	916.180.000,00	916.180.000,00	841.196.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.854.852.990,00	1.503.960.868,00	1.393.809.686,00	-461.043.304,00							90.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.995.900,00	14.995.900,00	14.995.900,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	17 Paket	725.000.000,00	710.076.300,00	710.076.300,00	-14.923.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	18.901.090,00	23.901.090,00	23.784.218,00	4.883.128,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	5 Paket	10.000.000,00	67.950.000,00	42.500.000,00	32.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	40.513.000,00	40.513.000,00	40.513.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				250 Laporan	200 Laporan	546.058.000,00	490.578.928,00	405.978.518,00	-140.079.482,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				40 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	-70.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	439.385.000,00	146.015.650,00	146.031.750,00	-293.353.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.311.370.100,00	9.409.287.584,00	10.035.563.080,00	724.192.980,00							0,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	553.679.100,00	0,00	0,00	-553.679.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				4 Unit	290 Unit	277.298.000,00	587.491.000,00	0,00	-277.298.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	31 Unit	144.673.000,00	141.135.250,00	651.218.110,00	506.545.110,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	51.646.000,00	0,00	0,00	-51.646.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	10 Unit	7.912.014.000,00	8.185.302.014,00	8.888.985.650,00	976.971.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	372.060.000,00	495.359.320,00	495.359.320,00	123.299.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.720.088.600,00	1.804.039.000,00	1.782.685.000,00	-8.937.403.600,00							0,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				10 Laporan	6 Laporan	212.450.000,00	149.250.000,00	149.250.000,00	-63.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	67.928.600,00	45.000.000,00	62.000.000,00	-5.928.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				135 Laporan	533 Laporan	10.439.710.000,00	1.609.789.000,00	1.571.435.000,00	-8.868.275.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	439.097.000,00	422.439.100,00	421.327.030,00	-17.769.970,00							0,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	7 Unit	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	112.075.000,00	0,00	0,00	-112.075.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	25 Unit	38.260.000,00	84.092.000,00	97.523.000,00	59.263.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				1 Unit	2 Unit	49.896.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.104.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	2 Unit	238.866.000,00	238.347.100,00	133.804.030,00	-105.061.970,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-12 Tahun) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**-**	**98.89 Persen 99,92 Persen**	**73.663.094.154,00**	**47.106.941.107,00**	**56.285.675.632,00**	**-17.377.418.522,00**							**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B				-	57,90 Persen 70,60 Persen 71,70 Persen 77.91 PersenPersen	39.953.234.059,00	24.588.950.822,00	29.077.758.519,00	-10.875.475.540,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				5 Ruang	5 Ruang	2.040.149.300,00	0,00	438.094.000,00	-1.602.055.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	416.620.000,00	0,00	149.537.111,00	-267.082.889,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				4 Ruang	4 Ruang	770.600.000,00	0,00	0,00	-770.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				10 Unit	34 Unit	3.951.361.759,00	6.703.336.010,00	6.492.971.705,00	2.541.609.946,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun*				0 0	0 0	933.470.000,00	0,00	0,00	-933.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	0 Ruang	333.759.000,00	0,00	7.958.700,00	-325.800.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	193.494.000,00	222.940.000,00	222.940.000,00	29.446.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				10 Ruang	0 Ruang	633.954.000,00	0,00	238.172.422,00	-395.781.578,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat*				5 Unit	0 Unit	197.682.000,00	0,00	0,00	-197.682.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				1 Paket	2 Paket	362.074.000,00	561.417.000,00	1.853.408.900,00	1.491.334.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				5 Peserta Didik	0 Peserta Didik	257.092.000,00	0,00	0,00	-257.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*				220 Orang	220 Orang	8.440.660.000,00	4.852.557.000,00	4.852.557.000,00	-3.588.103.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				1 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	149.900.000,00	0,00	0,00	-149.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	16.504.840.000,00	10.597.047.003,00	10.597.047.003,00	-5.907.792.997,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*				1 Ruang	0 Ruang	1.779.960.000,00	0,00	0,00	-1.779.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	0 Kegiatan	49.979.000,00	0,00	0,00	-49.979.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				1000 Buku	100 Buku	49.938.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.062.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				1 Ruang	0 Ruang	1.430.870.000,00	0,00	588.835.809,00	-842.034.191,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	4 Ruang	1.368.054.000,00	1.551.653.809,00	3.536.235.869,00	2.168.181.869,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	0 Paket	76.377.000,00	0,00	0,00	-76.377.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B				-	57,79 Persen 71,57 Persen 71.88 Persen 98.89 Persen	15.052.548.264,00	14.876.027.025,00	19.192.743.477,00	4.140.195.213,00						0,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	2.007.050.000,00	1.966.890.000,00	3.935.347.381,00	1.928.297.381,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				1 Ruang	0 Ruang	104.860.000,00	0,00	0,00	-104.860.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	0 Ruang	273.450.000,00	0,00	206.375.642,00	-67.074.358,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	0 Ruang	493.350.000,00	0,00	0,00	-493.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*				1 Ruang	0 Ruang	383.359.000,00	0,00	0,00	-383.359.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*				2 Ruang	0 Ruang	181.890.000,00	0,00	12.604.494,00	-169.285.506,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	211.837.000,00	425.800.000,00	871.010.816,00	659.173.816,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	0 Unit	131.940.000,00	0,00	0,00	-131.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	7 Unit	3.127.254.964,00	2.493.630.625,00	2.654.155.103,00	-473.099.861,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	0,00	463.150.000,00	1.694.548.357,00	1.694.548.357,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	0 Ruang	248.976.000,00	0,00	10.629.244,00	-238.346.756,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	0 Ruang	250.091.100,00	0,00	0,00	-250.091.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	602.098.200,00	106.080.000,00	115.186.440,00	-486.911.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	567.520.000,00	0,00	1.047.608.000,00	480.088.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				2 Paket	2 Paket	49.862.000,00	0,00	0,00	-49.862.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	871.150.000,00	821.350.000,00	821.350.000,00	-49.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				15 Peserta Didik	20 Peserta Didik	73.800.000,00	125.800.000,00	15.800.000,00	-58.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				185 Orang	185 Orang	3.571.996.000,00	2.383.236.000,00	2.383.236.000,00	-1.188.760.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*				1 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	49.020.000,00	12.020.000,00	-87.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	5.031.320.000,00	5.031.320.000,00	4.531.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.844.000,00	49.184.000,00	49.184.000,00	-660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	49.868.000,00	0,00	0,00	-49.868.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				1 Ruang	1 Ruang	496.300.000,00	0,00	0,00	-496.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				200 Buku	200 Buku	99.876.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	-17.376.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	91 Paket	49.868.000,00	49.868.000,00	49.868.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	490.536.000,00	428.198.400,00	0,00	-490.536.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	2 Paket	65.772.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	134.228.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	16.574.467.391,00	7.104.025.860,00	7.234.406.148,00	-9.340.061.243,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				16 Unit	8 Unit	3.213.309.081,00	1.966.997.025,00	2.734.740.807,00	-478.568.274,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*				19 Paket	1 Paket	294.145.000,00	100.450.000,00	100.450.000,00	-193.695.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				330 Peserta Didik	900 Peserta Didik	350.199.750,00	122.052.735,00	125.802.735,00	-224.397.015,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*				78 Orang	67 Orang	1.111.006.000,00	1.192.449.000,00	1.185.749.000,00	74.743.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				1 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	230.969.500,00	99.973.700,00	76.073.700,00	-154.895.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				116 Satuan Pendidikan	107 Satuan Pendidikan	2.216.328.000,00	2.265.020.000,00	1.789.783.055,00	-426.544.945,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	55.496.000,00	55.496.000,00	45.374.000,00	-10.122.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				4 Ruang	1 Ruang	1.108.230.000,00	338.990.000,00	338.990.000,00	-769.240.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				1 Ruang	1 Ruang	4.786.553.060,00	415.726.400,00	745.051.851,00	-4.041.501.209,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	2.020.480.000,00	0,00	0,00	-2.020.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1 Paket	6 Paket	396.975.000,00	496.975.000,00	42.495.000,00	-354.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				3 Unit	3 Unit	149.520.000,00	0,00	0,00	-149.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*				0 Paket	1 Paket	49.896.000,00	49.896.000,00	49.896.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*				1 Ruang	1 Ruang	591.360.000,00	0,00	0,00	-591.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.082.844.440,00	537.937.400,00	780.767.488,00	-1.302.076.952,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				11 Orang	5 Orang	183.997.000,00	89.377.000,00	96.077.000,00	-87.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				3 Orang	3 Orang	160.984.000,00	0,00	0,00	-160.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.995.400,00	39.905.400,00	23.055.400,00	-126.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	299.780.000,00	356.850.000,00	356.850.000,00	57.070.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				1 Ruang	1 Ruang	383.600.000,00	0,00	0,00	-383.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				3 Orang	3 Orang	117.349.500,00	51.805.000,00	51.805.000,00	-65.544.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	52.472.000,00	0,00	0,00	-52.472.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				1 Unit	1 Unit	92.071.000,00	0,00	8.462.640,00	-83.608.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun*				1 unit	1 unit	642.595.540,00	0,00	0,00	-642.595.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				-	1 Ruang	0,00	0,00	244.517.448,00	244.517.448,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**250.015.000,00**	**154.228.180,00**	**113.728.180,00**	**-136.286.820,00**					**-**		**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	200.029.600,00	102.564.090,00	62.064.090,00	-137.965.510,00							0,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	55.100.000,00	14.600.000,00	-35.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah*				0 Buku	20 Buku	150.029.600,00	47.464.090,00	47.464.090,00	-102.565.510,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	49.985.400,00	51.664.090,00	51.664.090,00	1.678.690,00							0,00	
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia*				100 Buku	100 Buku	49.985.400,00	51.664.090,00	51.664.090,00	1.678.690,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**750.000.000,00**	**737.170.000,00**	**737.170.000,00**	**-12.830.000,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	750.000.000,00	737.170.000,00	737.170.000,00	-12.830.000,00							0,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	365.205.720,00	365.205.720,00	-84.794.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	371.964.280,00	371.964.280,00	71.964.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**192.680.840,00**	**192.680.840,00**	**92.680.840,00**					**-**		**0,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	192.680.840,00	192.680.840,00	92.680.840,00							0,00	
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi*				25 Bahasa	1 Bahasa	100.000.000,00	192.680.840,00	192.680.840,00	92.680.840,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.029.220.300,00**	**1.883.430.860,00**	**1.883.430.860,00**	**-1.145.789.440,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.029.220.300,00**	**1.883.430.860,00**	**1.883.430.860,00**	**-1.145.789.440,00**							**0,00**	
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**800.323.000,00**	**772.448.700,00**	**772.448.700,00**	**-27.874.300,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	349.927.000,00	143.381.000,00	143.381.000,00	-206.546.000,00							0,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				1 Objek	1 Objek	349.927.000,00	143.381.000,00	143.381.000,00	-206.546.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.420.000,00	629.067.700,00	629.067.700,00	428.647.700,00							0,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				44 Objek	30 Objek	100.420.000,00	629.067.700,00	629.067.700,00	528.647.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	249.976.000,00	0,00	0,00	-249.976.000,00							0,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	*Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				6 Objek	6 Objek	100.408.000,00	0,00	0,00	-100.408.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*				0 Unit	0 Unit	49.568.000,00	0,00	0,00	-49.568.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**313.950.000,00**	**265.555.000,00**	**265.555.000,00**	**-48.395.000,00**							**0,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	313.950.000,00	265.555.000,00	265.555.000,00	-48.395.000,00							0,00	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				0 0	1 0	313.950.000,00	265.555.000,00	265.555.000,00	-48.395.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**142.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.100.000,00**					**-**		**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	142.100.000,00	0,00	0,00	-142.100.000,00							0,00	
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*				1 Unit	1 Unit	142.100.000,00	0,00	0,00	-142.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**105.896.720,00**	**105.896.720,00**	**-144.103.280,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	105.896.720,00	105.896.720,00	5.896.720,00							0,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				55 Objek	1 Objek	100.000.000,00	105.896.720,00	105.896.720,00	5.896.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				832 Objek	832 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**1.522.847.300,00**	**739.530.440,00**	**739.530.440,00**	**-783.316.860,00**							**0,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	1.522.847.300,00	739.530.440,00	739.530.440,00	-783.316.860,00							0,00	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*				1078 Unit	578 Unit	541.847.000,00	0,00	0,00	-541.847.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	*Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya*				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*				1 Unit	1 Unit	137.000.000,00	0,00	0,00	-137.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*				1078 Unit	144 Unit	744.000.300,00	739.530.440,00	739.530.440,00	-4.469.860,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.02.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Kesehatan**							**168.027.457.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**-26.833.489.824,00**							**171.448.490.359,00**	
	1	**NON URUSAN**							**33.650.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.650.528.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**134.376.929.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**6.817.038.176,00**							**171.448.490.359,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.650.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.650.528.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**134.376.929.070,00**	**137.331.780.108,00**	**141.193.967.246,00**	**6.817.038.176,00**							**171.448.490.359,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS KESEHATAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN**				**-**	**3,54 indeks 88,56 persen**	**128.859.218.906,00**	**101.544.630.194,00**	**102.298.861.071,00**	**-26.560.357.835,00**							**104.236.408.938,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	65 persen	125.000.000,00	218.717.434,00	218.717.434,00	93.717.434,00							308.671.302,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	29.980.000,00	29.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	218.717.434,00	188.737.434,00	63.737.434,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			208.671.302,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	94.852.150.906,00	100.141.071.060,00	100.839.855.859,00	5.987.704.953,00							103.064.737.636,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				762 Orang/ bulan	1021 Orang /bulan	94.852.150.906,00	100.141.071.060,00	100.839.855.859,00	5.987.704.953,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.064.737.636,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	70 persen	226.540.000,00	424.839.700,00	340.207.610,00	113.667.610,00							10.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	69.660.000,00	45.660.000,00	15.660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11.540.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.460.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00	14.940.000,00	-10.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	75.000.000,00	62.732.000,00	12.732.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	203.179.700,00	174.875.610,00	74.875.610,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	60 persen	0,00	0,00	207.786.000,00	207.786.000,00							273.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				26 Unit	13 Unit	0,00	0,00	38.286.000,00	38.286.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	169.500.000,00	169.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	75 persen	33.485.528.000,00	460.952.000,00	463.244.168,00	-33.022.283.832,00							580.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	3 Laporan	0,00	45.303.000,00	45.303.000,00	45.303.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	3 Laporan	23.460.000,00	0,00	0,00	-23.460.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	1 Laporan	33.457.068.000,00	0,00	0,00	-33.457.068.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	1 Laporan	0,00	410.649.000,00	412.941.168,00	412.941.168,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	60 persen	170.000.000,00	299.050.000,00	229.050.000,00	59.050.000,00							0,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	13 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	13 Unit	0,00	269.050.000,00	219.050.000,00	219.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN SESUAI STANDAR PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR ASPAK DI PUSKESMAS PERSENTASE PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP) DENGAN KATEGORI BAIK PERSENTASE ORANG DENGAN HIV MENDAPATKAN PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL (ARV) PERSENTASE PUSKESMAS YANG MERESPON SINYAL SKDR < 24 JAM PERSENTASE KECAMATAN DENGAN PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PREVALENSI BBLR DINAS KESEHATAN PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS >80% ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PERSENTASE IBU HAMIL KEK JUMLAH KEMATIAN BAYI**				**-**	**100 100 100 27 5,8 6,7 83 90 9,87 9.92 PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN persen PERSEN persen angka 100 50 persen PERSEN 88,23 persen 95 persen**	**38.558.761.764,00**	**32.851.113.344,00**	**35.959.069.605,00**	**-2.599.692.159,00**							**66.389.194.421,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan Persentase Puskesmas Yang sudah terpenuhi SPA minimal 60%				-	100 persen 13,3 PERSEN 65 persen	21.981.811.364,00	11.760.712.151,00	14.868.668.412,00	-7.113.142.952,00							48.171.772.111,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*				15 Unit	0 Unit	7.089.998.100,00	0,00	643.989.290,00	-6.446.008.810,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.867.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun*				5 Unit	0 Unit	812.570.000,00	1.045.088.000,00	13.488.000,00	-799.082.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.803.172.122,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.084.981.589,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*				1 Unit	4 Unit	1.570.833.400,00	1.923.090.250,00	1.940.303.130,00	369.469.730,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			594.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*				3 Unit	4 Unit	414.082.500,00	1.044.120.500,00	1.044.120.500,00	630.038.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.450.972.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan*				11 Unit	1 Unit	100.000.000,00	138.400.000,00	138.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				7399 Unit	2 Unit	50.160.000,00	0,00	199.810.000,00	149.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.348.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				510 Unit	185 Unit	6.964.218.000,00	307.665.900,00	307.665.900,00	-6.656.552.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			53.380.900,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				1 Paket	2 Paket	4.874.937.864,00	7.207.747.501,00	10.486.291.592,00	5.611.353.728,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan*				-	1 Layanan	0,00	94.600.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			94.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				1 Paket	1 Paket	5.011.500,00	0,00	0,00	-5.011.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Persentase Desa/Kelurahan ODF Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu hamil KEK Dinas Kesehatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Pasien rujukan di layani sesuai Standar Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya sesuai standar Persentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penduduk Natuna Yang Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase spesimen yang terhubung dengan kasus KLB yang terkonfirmasi Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 persen 100 PERSEN 15 Persen 16,87 PERSEN 36,36 persen 6,7 persen 87,57 persen 88,3 PERSEN	16.168.002.700,00	20.567.198.447,00	20.567.198.447,00	4.399.195.747,00							17.513.474.250,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1866 Orang	1020 Orang	147.439.000,00	147.439.000,00	147.439.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1434 Orang	973 Orang	106.022.000,00	205.064.000,00	205.064.000,00	99.042.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1469 Orang	926 Orang	204.180.000,00	480.498.800,00	480.498.800,00	276.318.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				6383 Orang	5360 Orang	76.934.000,00	76.934.000,00	76.934.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				16459 Orang	15556 Orang	49.992.000,00	110.851.450,00	110.851.450,00	60.859.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				68208 Orang	55993 Orang	40.303.400,00	124.788.400,00	124.788.400,00	84.485.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			124.453.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				6816 Orang	8183 Orang	54.873.000,00	127.303.050,00	127.303.050,00	72.430.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				18428 Orang	8850 Orang	42.500.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	25.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2010 Orang	1443 Orang	8.600.000,00	92.196.000,00	92.196.000,00	83.596.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.807.450,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				153 Orang	156 Orang	58.600.000,00	130.842.000,00	130.842.000,00	72.242.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			127.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				1157 Orang	1803 Orang	113.447.000,00	222.815.460,00	222.815.460,00	109.368.460,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			226.189.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				2086 Orang	2350 Orang	45.962.000,00	192.670.649,00	192.670.649,00	146.708.649,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			160.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*				1 Dokumen	1 Dokumen	723.000,00	0,00	0,00	-723.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	89.952.500,00	192.810.000,00	192.810.000,00	102.857.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*				1 Dokumen	1 Dokumen	62.997.800,00	62.999.176,00	62.999.176,00	1.376,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	171.138.500,00	2.764.108.914,00	2.764.108.914,00	2.592.970.414,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	106.600.000,00	106.600.000,00	106.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			106.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.205.000,00	217.324.304,00	217.324.304,00	157.119.304,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			205.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.590.900,00	112.291.000,00	112.291.000,00	31.700.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.291.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.335.864.700,00	14.353.264.600,00	14.353.264.600,00	17.399.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				1 Paket	1 Paket	89.795.000,00	158.650.000,00	158.650.000,00	68.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			61.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.923.300,00	88.828.420,00	88.828.420,00	41.905.120,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.107.600,00	0,00	0,00	-1.107.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	74.138.000,00	74.110.200,00	74.110.200,00	-27.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			74.138.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*				1 Laporan	1 Laporan	75.600.000,00	0,00	0,00	-75.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				1 Unit	1 Unit	14.880.000,00	0,00	0,00	-14.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				10 Orang	10 Orang	7.128.000,00	0,00	0,00	-7.128.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*				1 Orang	1 Orang	54.000.000,00	28.760.024,00	28.760.024,00	-25.239.976,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	428.449.000,00	428.449.000,00	428.449.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			590.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan				-	1 dokumen	75.000.000,00	189.260.452,00	189.260.452,00	114.260.452,00							370.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	189.260.452,00	189.260.452,00	114.260.452,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Sertifikat izin Operasional				-	1 dokumen	333.947.700,00	333.942.294,00	333.942.294,00	-5.406,00							333.948.060,00	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	333.947.700,00	333.942.294,00	333.942.294,00	-5.406,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			333.948.060,00	DINAS KESEHATAN
13.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA**				**-**	**34,61 persen**	**178.288.200,00**	**2.157.162.500,00**	**2.157.162.500,00**	**1.978.874.300,00**							**302.887.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang wajib memiliki izin praktek				-	100 persen	30.882.000,00	70.751.600,00	70.751.600,00	39.869.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.882.000,00	70.751.600,00	70.751.600,00	39.869.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di puskesmas sesuai standar				-	6,7 persen	86.603.400,00	799.044.800,00	799.044.800,00	712.441.400,00							302.887.000,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*				780 Orang	780 Orang	86.603.400,00	496.157.800,00	496.157.800,00	409.554.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	302.887.000,00	302.887.000,00	302.887.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			302.887.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus				-	55 persen	60.802.800,00	1.287.366.100,00	1.287.366.100,00	1.226.563.300,00							0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				923 Orang	110 Orang	60.802.800,00	1.287.366.100,00	1.287.366.100,00	1.226.563.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
14.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE SARANA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN**				**-**	**28 persen**	**210.398.700,00**	**271.450.370,00**	**271.450.370,00**	**61.051.670,00**							**520.000.000,00**	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase TPM yang memiliki risiko menengah tinggi telah memenuhi syarat kesehatan				-	6,11 persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							145.000.000,00	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan Memiliki Stiker Pembinaan				-	18,75 persen	43.835.200,00	77.010.240,00	77.010.240,00	33.175.040,00							0,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	43.835.200,00	77.010.240,00	77.010.240,00	33.175.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan post market dan tindak lanjut hasil pemeriksaan				-	28 persen	91.563.500,00	194.440.130,00	194.440.130,00	102.876.630,00							375.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*				463 Unit	60 Unit	91.563.500,00	194.440.130,00	194.440.130,00	102.876.630,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			375.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS**				**-**	**29,42 persen**	**220.789.500,00**	**507.423.700,00**	**507.423.700,00**	**286.634.200,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan kampanye/gerakan kesehatan (pembudayaan germas)				-	7 kecamatan	104.129.500,00	260.059.500,00	260.059.500,00	155.930.000,00							0,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.129.500,00	260.059.500,00	260.059.500,00	155.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 persen	116.660.000,00	247.364.200,00	247.364.200,00	130.704.200,00							0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	116.660.000,00	247.364.200,00	247.364.200,00	130.704.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah Natuna**							**40.163.020.520,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**30.650.196.500,00**							**54.742.019.206,00**	
	1	**NON URUSAN**							**508.373.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-508.373.200,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**39.654.647.320,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**31.158.569.700,00**							**54.742.019.206,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**39.654.647.320,00**	**47.618.918.520,00**	**70.813.217.020,00**	**31.158.569.700,00**							**54.742.019.206,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**508.373.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-508.373.200,00**							**0,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**26.902.569.192,00**	**27.347.922.204,00**	**41.500.159.940,00**	**14.597.590.748,00**							**10.737.825.300,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.570.000,00	83.664.420,00	83.664.420,00	20.094.420,00							75.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	63.570.000,00	83.664.420,00	83.664.420,00	20.094.420,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				85 Persen	85 Persen	865.964.000,00	916.510.000,00	1.166.130.000,00	300.166.000,00							1.902.530.000,00	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	163.350.000,00	0,00	0,00	-163.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	163.350.000,00	203.250.000,00	203.250.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				42 Paket	2 Paket	349.989.000,00	308.440.000,00	418.560.000,00	68.571.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			662.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	1 Paket	249.960.000,00	250.000.000,00	349.600.000,00	99.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	40 Laporan	102.665.000,00	194.720.000,00	194.720.000,00	92.055.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah				60 Persen	60 Persen	631.567.000,00	719.342.000,00	882.698.000,00	251.131.000,00							6.727.179.300,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				4 Unit	8 Unit	0,00	0,00	150.616.000,00	150.616.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			341.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	311.067.000,00	398.842.000,00	411.582.000,00	100.515.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.365.679.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	1 Unit	320.500.000,00	320.500.000,00	320.500.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.020.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				85 Persen	85 Persen	401.023.200,00	204.804.000,00	266.844.716,00	-134.178.484,00							388.956.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	50.000.000,00	103.740.000,00	83.740.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.992.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	12.000.000,00	20.065.620,00	-15.934.380,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.964.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				15 Laporan	1 Laporan	345.023.200,00	0,00	0,00	-345.023.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				15 Laporan	1 Laporan	0,00	142.804.000,00	143.039.096,00	143.039.096,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			241.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran				80 Persen	80 Persen	1.271.510.000,00	1.763.592.800,00	2.068.150.200,00	796.640.200,00							1.644.160.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				23 Unit	23 Unit	434.930.000,00	597.530.000,00	693.143.000,00	258.213.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			554.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	360 Unit	252.300.000,00	515.800.000,00	653.500.000,00	401.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				20 Unit	1 Unit	584.280.000,00	650.262.800,00	721.507.200,00	137.227.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			740.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian SPM				undefined undefined	undefined undefined	23.668.934.992,00	23.660.008.984,00	37.032.672.604,00	13.363.737.612,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	23.668.934.992,00	23.660.008.984,00	37.032.672.604,00	13.363.737.612,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit**				**69 Persen**	**69 Persen**	**13.105.611.328,00**	**19.974.136.316,00**	**29.016.197.080,00**	**15.910.585.752,00**							**43.659.193.906,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Persentase Kelengkapan Kumulatif SPA				70 Persen	70 Persen	9.017.473.328,00	6.659.832.664,00	15.119.374.048,00	6.101.900.720,00							23.313.393.906,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*				1 Unit	1 Unit	2.725.272.000,00	2.472.280.000,00	2.472.280.000,00	-252.992.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.110.543.678,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun*				1 Unit	0 Unit	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00	-342.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				1 Unit	0 Unit	96.600.000,00	0,00	1.189.295.872,00	1.092.695.872,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.502.850.228,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				18 Unit	2000 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	1.180.008.946,00	480.008.946,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				2 Paket	1 Paket	5.153.101.328,00	3.145.052.664,00	10.277.789.230,00	5.124.687.902,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat				85 Nilai	85 Nilai	3.690.648.000,00	12.916.903.652,00	13.452.563.032,00	9.761.915.032,00							20.072.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				6 Dokumen	1 Dokumen	3.690.648.000,00	12.916.903.652,00	13.452.563.032,00	9.761.915.032,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.072.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	397.490.000,00	397.400.000,00	444.260.000,00	46.770.000,00							273.800.000,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*				1 Unit	1 Unit	397.490.000,00	397.400.000,00	444.260.000,00	46.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			273.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**				**59 Persen**	**59 Persen**	**154.840.000,00**	**296.860.000,00**	**296.860.000,00**	**142.020.000,00**							**345.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				62 Persen	62 Persen	154.840.000,00	296.860.000,00	296.860.000,00	142.020.000,00							345.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				3 Orang	43 Orang	154.840.000,00	296.860.000,00	296.860.000,00	142.020.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0002	**Puskesmas Ranai**							**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**							**985.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**							**985.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.140.292.000,00**	**4.402.756.400,00**	**4.371.945.581,00**	**1.231.653.581,00**							**985.500.000,00**	
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS RANAI PERSENTASE PUSKESMAS YANG MERESPON SINYAL SKDR < 24 JAM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PKM RANAI PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS JUMLAH KEMATIAN BAYI DI PUSKESMAS RANAI PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PREVALENSI BBLR PKM RANAI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)**				**-**	**100 100 3.45 36 6 80 8.26 82 PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN PERSEN PERSEN**	**3.140.292.000,00**	**4.322.270.400,00**	**4.291.459.581,00**	**1.151.167.581,00**						**965.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Ibu hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum sesuai standar				-	100 Persen 15 Persen 1.6 Angka Kontak 29.58 Persen 87.92 Persen 87 Nilai 92.5 Persen	3.140.292.000,00	4.322.270.400,00	4.291.459.581,00	1.151.167.581,00						965.500.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				475 Orang	353 Orang	0,00	74.088.000,00	74.088.000,00	74.088.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				12000 Orang	5910 Orang	0,00	160.650.000,00	160.650.000,00	160.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				1 Orang	25 Orang	75.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.425.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				484 Orang	484 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	472.038.000,00	472.038.000,00	472.038.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.675.000,00	18.675.000,00	18.675.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	33.075.000,00	33.075.000,00	33.075.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	14.238.000,00	14.238.000,00	14.238.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	126.284.000,00	126.284.000,00	126.284.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.515.145.000,00	2.108.520.400,00	2.077.709.581,00	562.564.581,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			770.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.624.747.000,00	1.135.800.000,00	1.135.800.000,00	-488.947.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				0 Orang	0 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				0 Orang	0 Orang	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	121.050.000,00	121.050.000,00	121.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
20.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS PKM RANAI**				**-**	**29.42 PERSEN**	**0,00**	**80.486.000,00**	**80.486.000,00**	**80.486.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan upaya peningkatan literasi kesehatan				-	100 Persen	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 Persen	0,00	53.186.000,00	53.186.000,00	53.186.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	53.186.000,00	53.186.000,00	53.186.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0003	**Puskesmas Bunguran Tengah**							**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**							**635.649.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**							**635.649.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**745.649.000,00**	**1.156.585.100,00**	**1.200.620.149,00**	**454.971.149,00**							**635.649.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH**				**-**	**0 100 100 100 3,45 36 82 92,5 9,7 angka persen persen persen INDEKS persen angka PERSEN PERSEN**	**745.649.000,00**	**1.114.443.100,00**	**1.158.478.149,00**	**412.829.149,00**						**615.649.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah Persentase Ibu Hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas Bunguran Tengah Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bunguran Tengah persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas bunguran tengah Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 Angka 100 persen 15 persen 16,67 persen 60 nilai 87,57 persen 92,5 persen	745.649.000,00	1.114.443.100,00	1.158.478.149,00	412.829.149,00						615.649.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				70 Orang	70 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1573 Orang	1573 Orang	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				85 Orang	85 Orang	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	65.949.000,00	65.949.000,00	65.949.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.949.000,00	13.949.000,00	13.949.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	354.600.000,00	352.369.100,00	396.404.149,00	41.804.149,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			335.614.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	391.049.000,00	561.077.000,00	561.077.000,00	170.028.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			90.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
22.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH**				**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**42.142.000,00**	**42.142.000,00**	**42.142.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 persen	0,00	25.905.000,00	25.905.000,00	25.905.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	25.905.000,00	25.905.000,00	25.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 persen	0,00	16.237.000,00	16.237.000,00	16.237.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.237.000,00	16.237.000,00	16.237.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0004	**Puskesmas Tanjung**							**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**							**731.095.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**							**731.095.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.016.502.000,00**	**1.581.390.356,00**	**1.650.591.055,00**	**634.089.055,00**							**731.095.000,00**	
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS TANJUNG PREVALENSI BBLR PUSKESMAS TANJUNG INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS TANJUNG CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS TANJUNG ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS TANJUNG PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS TANJUNG**				**-**	**0 100 100 100 13,25 3,45 36 82 92,5 angka persen persen persen persen indeks persen angka persen**	**1.016.502.000,00**	**1.548.025.356,00**	**1.617.226.055,00**	**600.724.055,00**						**711.095.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai kinerja Puskesmas di puskesmas tanjung Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap di puskesmas tanjung Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas tanjung Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di Puskesmas Tanjung Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 angka 100 persen 15 persen 16,3 persen 60 nilai 87,57 persen 92,5 persen	1.016.502.000,00	1.548.025.356,00	1.617.226.055,00	600.724.055,00						711.095.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				95 Orang	95 Orang	0,00	45.360.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2250 Orang	2250 Orang	0,00	16.125.000,00	16.125.000,00	16.125.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				100 Orang	100 Orang	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	11.775.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	91.208.000,00	91.208.000,00	91.208.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	47.171.000,00	47.171.000,00	47.171.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	328.859.000,00	395.010.200,00	464.210.899,00	135.351.899,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			456.095.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	687.643.000,00	868.377.156,00	868.377.156,00	180.734.156,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
24.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS TANJUNG**				**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**33.365.000,00**	**33.365.000,00**	**33.365.000,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas tanjung				-	100 persen	0,00	12.950.000,00	11.102.000,00	11.102.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	12.950.000,00	11.102.000,00	11.102.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas tanjung				-	100 persen	0,00	20.415.000,00	22.263.000,00	22.263.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 0	1 0	0,00	20.415.000,00	22.263.000,00	22.263.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0005	**Puskesmas Kelarik**							**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**							**640.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**							**640.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**952.724.000,00**	**1.282.417.000,00**	**1.376.528.200,00**	**423.804.200,00**							**640.000.000,00**	
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS KELARIK** **PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS KELARIK** **PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS KELARIK** **PREVALENSI BBLR PUSKESMAS KELARIK** **PREVALENSI BBLR PUSKESMAS KELARIK** **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS KELARIK** **CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS KELARIK** **JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS KELARIK** **ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS KELARIK** **PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS KELARIK**				**-**	**100** **100** **100** **2,95** **2,95** **3,45** **36** **3** **82,00** **92.5** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen**	**952.724.000,00**	**1.244.542.000,00**	**1.338.653.200,00**	**385.929.200,00**							**620.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Kelarik Persentase Ibu Hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kelarik Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas kelarik Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kelarik persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di Puskesmas Kelarik Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0.8 persen 100 persen 15,52 persen 15 persen 60 persen 87,57 persen 92.5 persen	952.724.000,00	1.244.542.000,00	1.338.653.200,00	385.929.200,00							620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				90 Orang	90 Orang	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2068 Orang	2068 Orang	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				120 Orang	120 Orang	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.552.000,00	99.552.000,00	99.552.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.975.000,00	15.975.000,00	15.975.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.802.000,00	13.802.000,00	13.802.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	60.450.000,00	60.450.000,00	60.450.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	334.728.000,00	410.846.000,00	504.957.200,00	170.229.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	617.996.000,00	547.767.000,00	547.767.000,00	-70.229.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
26.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS KELARIK**				**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**37.875.000,00**	**37.875.000,00**	**37.875.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di puskesmas kelarik				-	100 persen	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	37.875.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	37.875.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0006	**Puskesmas Batubi Jaya**							**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**							**622.591.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**							**622.591.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**753.790.900,00**	**1.022.709.998,00**	**1.034.204.550,00**	**280.413.650,00**							**622.591.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BATUBI JAYA PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BATUBI JAYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BATUBI JAYA CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BATUBI JAYA ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BATUBI JAYA PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BATUBI JAYA**				**-**	**0 100 100 100 12,32 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS ANGKA ANGKA PERSEN**	**753.790.900,00**	**1.010.109.998,00**	**1.021.604.550,00**	**267.813.650,00**						**602.591.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Batubi Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 15 PERSEN 17,59 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 93,3 PERSEN	753.790.900,00	1.010.109.998,00	1.021.604.550,00	267.813.650,00						602.591.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				74 Orang	74 Orang	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1590 Orang	1590 Orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				85 Orang	85 Orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	192.791.000,00	197.291.000,00	197.291.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.475.000,00	31.475.000,00	31.475.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	331.200.000,00	280.304.998,00	287.299.550,00	-43.900.450,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	422.590.900,00	397.764.000,00	397.764.000,00	-24.826.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			422.591.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
28.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BATUBI JAYA**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0007	**Puskesmas Pulau Laut**							**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**							**584.635.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**							**584.635.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**550.635.000,00**	**1.312.366.500,00**	**1.518.445.200,00**	**967.810.200,00**							**584.635.000,00**	
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU LAUT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU LAUT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU LAUT CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU LAUT ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU LAUT PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU LAUT**				**-**	**0 100 100 100 2.95 3.45 36 82.00 90.00 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**550.635.000,00**	**1.293.196.500,00**	**1.499.275.200,00**	**948.640.200,00**					**-**		**564.635.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	550.635.000,00	1.293.196.500,00	1.499.275.200,00	948.640.200,00							564.635.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				44 Orang	44 Orang	81.070.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-66.070.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			81.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				935 Orang	935 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				48 Orang	48 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	48.094.000,00	48.094.000,00	48.094.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.855.000,00	12.855.000,00	12.855.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	255.854.500,00	380.058.200,00	120.058.200,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	209.565.000,00	889.996.000,00	971.871.000,00	762.306.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			209.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
30.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU LAUT**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**19.170.000,00**	**19.170.000,00**	**19.170.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0008	**Puskesmas Pulau Tiga**							**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**							**670.259.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**							**670.259.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**913.517.000,00**	**1.303.698.052,00**	**1.372.852.864,00**	**459.335.864,00**							**670.259.200,00**	
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU TIGA JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU TIGA PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU TIGA CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU TIGA ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU TIGA PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU TIGA**				**-**	**100 1 29.42 3.45 36 82 8.88 92.5 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen**	**913.517.000,00**	**1.286.598.052,00**	**1.355.752.864,00**	**442.235.864,00**					**Masyarakat**		**650.259.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Pulau Tiga Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0.8 Persen 100 Persen 15 Persen 19.5 Persen 92.5 Persen	913.517.000,00	1.286.598.052,00	1.355.752.864,00	442.235.864,00						650.259.200,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				73 Orang	73 Orang	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1619 Orang	1619 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				85 Orang	85 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	68.328.000,00	68.328.000,00	68.328.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.536.000,00	31.536.000,00	31.536.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	496.785.000,00	403.871.000,00	473.025.812,00	-23.759.188,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			73.527.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	416.732.000,00	668.109.052,00	668.109.052,00	251.377.052,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			416.732.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	18.450.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
32.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA**				**-**	**100 Persen 29.42 Persen**	**0,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**					**Masyarakat**		**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 Persen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0009	**Puskesmas Pulau Tiga Barat**							**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**							**197.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**							**197.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**464.098.000,00**	**1.028.680.000,00**	**1.183.744.204,00**	**719.646.204,00**							**197.000.000,00**	
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PREVALENSI BBLR PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT**				**-**	**0 100 100 100 23,31 23,31 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN**	**464.098.000,00**	**1.014.790.000,00**	**1.169.854.204,00**	**705.756.204,00**							**177.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Pulau Tiga Barat Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 16,48 PERSEN 18,25 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 92,5 PERSEN	464.098.000,00	1.014.790.000,00	1.169.854.204,00	705.756.204,00							177.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				44 Orang	44 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1039 Orang	1039 Orang	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				60 Orang	60 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	69.366.200,00	69.366.200,00	69.366.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	4.498.800,00	4.498.800,00	4.498.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	161.977.200,00	144.200.000,00	299.264.204,00	137.287.004,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	302.120.800,00	692.625.000,00	692.625.000,00	390.504.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
34.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**	**13.890.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0010	**Puskesmas Serasan**							**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**							**971.133.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**							**971.133.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.097.449.900,00**	**1.557.896.052,00**	**1.795.321.199,00**	**697.871.299,00**							**971.133.000,00**	
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.097.449.900,00**	**1.540.571.052,00**	**1.777.996.199,00**	**680.546.299,00**					**-**		**951.133.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.097.449.900,00	1.540.571.052,00	1.777.996.199,00	680.546.299,00							951.133.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				88 Orang	88 Orang	116.074.000,00	0,00	0,00	-116.074.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	0 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1924 Orang	1924 Orang	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	0 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				100 Orang	100 Orang	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	154.306.000,00	154.306.000,00	154.306.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	594.500.000,00	590.133.000,00	827.558.147,00	233.058.147,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			590.133.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	386.875.900,00	644.357.052,00	644.357.052,00	257.481.152,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			221.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	0 Dokumen	0,00	29.925.000,00	29.925.000,00	29.925.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
36.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**17.325.000,00**	**17.325.000,00**	**17.325.000,00**					**-**		**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0011	**Puskesmas Serasan Timur**							**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**							**1.018.162.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**							**1.018.162.300,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**779.791.000,00**	**1.597.136.404,00**	**2.030.679.828,00**	**1.250.888.828,00**							**1.018.162.300,00**	
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SERASAN TIMUR PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SERASAN TIMUR PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SERASAN TIMUR PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SERASAN TIMUR PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SERASAN TIMUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SERASAN TIMUR CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS SERASAN TIMUR ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SERASAN TIMUR PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SERASAN TIMUR**				**-**	**0 100 100 100 11,62 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN**	**779.791.000,00**	**1.588.614.404,00**	**2.022.157.828,00**	**1.242.366.828,00**							**998.162.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Serasan Timur Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 14,81 PERSEN 18,25 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 92,5 PERSEN	779.791.000,00	1.588.614.404,00	2.022.157.828,00	1.242.366.828,00						998.162.300,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				59 Orang	59 Orang	91.538.000,00	0,00	0,00	-91.538.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				-	0 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1344 Orang	1344 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	0 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				60 Orang	60 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	61.794.000,00	61.794.000,00	61.794.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.353.000,00	8.353.000,00	8.353.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			38.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	414.475.000,00	335.618.300,00	540.831.724,00	126.356.724,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			335.618.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	273.778.000,00	1.084.224.104,00	1.312.554.104,00	1.038.776.104,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			503.624.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	0 Dokumen	0,00	24.525.000,00	24.525.000,00	24.525.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
38.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SERASAN TIMUR**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**8.522.000,00**	**8.522.000,00**	**8.522.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	0 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	6.122.000,00	6.122.000,00	6.122.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.122.000,00	6.122.000,00	6.122.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0012	**Puskesmas Subi**							**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**							**1.350.911.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**							**1.350.911.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**764.718.000,00**	**1.603.321.000,00**	**1.700.555.044,00**	**935.837.044,00**							**1.350.911.000,00**	
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SUBI PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SUBI PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SUBI PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SUBI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SUBI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SUBI CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS SUBI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SUBI PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SUBI**				**-**	**0 100 100 100 13,29 3,45 36 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN ANGKA PERSEN**	**764.718.000,00**	**1.556.796.000,00**	**1.654.030.044,00**	**889.312.044,00**						**1.310.911.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Subi Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 18,25 PERSEN 19,2 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 93,3 PERSEN	764.718.000,00	1.556.796.000,00	1.654.030.044,00	889.312.044,00						1.310.911.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				58 Orang	58 Orang	101.613.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-72.813.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			399.407.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1320 Orang	1320 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				96 Orang	96 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	141.466.000,00	141.466.000,00	141.466.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.765.000,00	15.765.000,00	15.765.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	357.340.000,00	292.404.000,00	389.638.044,00	32.298.044,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			292.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	305.765.000,00	988.163.000,00	988.163.000,00	682.398.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			419.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
40.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SUBI**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**46.525.000,00**	**46.525.000,00**	**46.525.000,00**							**40.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	14.285.000,00	14.285.000,00	14.285.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.285.000,00	14.285.000,00	14.285.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0013	**Puskesmas Midai**							**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**							**747.212.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**							**747.212.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**875.444.000,00**	**1.277.484.500,00**	**1.520.782.939,00**	**645.338.939,00**							**747.212.000,00**	
41.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS MIDAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS MIDAI CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS MIDAI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS MIDAI PREVALENSI BBLR PUSKESMAS MIDAI ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) DI PUSKESMAS MIDAI PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS MIDAI**				**-**	**0 100 100 100 3,45 36 6,82 6,82 82 92,5 JUMLAH PERSEN PERSEN PERSEN INDEKS PERSEN PERSEN PERSEN ANGKA PERSEN**	**875.444.000,00**	**1.259.184.500,00**	**1.502.482.939,00**	**627.038.939,00**							**727.212.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai Kinerja Puskesmas Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Midai Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 ANGKA 100 PERSEN 17,54 PERSEN 18,25 PERSEN 60 NILAI 87,57 PERSEN 93,3 PERSEN	875.444.000,00	1.259.184.500,00	1.502.482.939,00	627.038.939,00						727.212.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				64 Orang	64 Orang	81.472.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-67.072.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1269 Orang	1269 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				72 Orang	72 Orang	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.116.000,00	45.116.000,00	45.116.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	4.695.000,00	4.695.000,00	4.695.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.125.000,00	31.125.000,00	31.125.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	458.574.000,00	449.276.500,00	587.814.939,00	129.240.939,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	335.398.000,00	657.997.000,00	762.757.000,00	427.359.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			552.212.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
42.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS MIDAI**				**-**	**29,42 PERSEN**	**0,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 PERSEN	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0014	**Puskesmas Sedanau**							**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**							**430.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**							**430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.311.499.000,00**	**1.736.239.500,00**	**1.942.533.143,00**	**631.034.143,00**							**430.000.000,00**	
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS SEDANAU JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS SEDANAU INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS SEDANAU CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS SEDANAU ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS SEDANAU PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS SEDANAU PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SEDANAU PREVALENSI BBLR PUSKESMAS SEDANAU**				**-**	**100 100 100 1 3,45 36 82,00 90 9,14 9,14 % % % Laporan % % % % % %**	**1.311.499.000,00**	**1.719.439.500,00**	**1.925.733.143,00**	**614.234.143,00**						**410.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai kinerja puskesmas di puskesmas sedanau Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas sedanau Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar pada Puskesmas Sedanau Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas sedanau persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas sedanau Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0.8 % 100 % 15 % 17,71 % 60.0 % 87.57 % 93,3 %	1.311.499.000,00	1.719.439.500,00	1.925.733.143,00	614.234.143,00						410.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				148 Orang	148 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2749 Orang	2749 Orang	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	31.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				157 Orang	157 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	98.493.000,00	98.493.000,00	98.493.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.925.000,00	27.925.000,00	27.925.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	8.570.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	44.850.000,00	44.850.000,00	44.850.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	575.465.000,00	659.293.500,00	865.587.143,00	290.122.143,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	736.034.000,00	763.758.000,00	763.758.000,00	27.724.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
44.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS SEDANAU**				**-**	**29,42 %**	**0,00**	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 %	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif				-	100 %	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	11.775.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	11.775.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0015	**Puskesmas Bunguran Selatan**							**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**							**947.763.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**							**947.763.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**767.763.000,00**	**1.087.719.000,00**	**1.111.959.246,00**	**344.196.246,00**							**947.763.000,00**	
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**JUMLAH KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE PEMENUHAN 10 SINYAL FUNGSI PUSKESMAS PONED SESUAI STANDAR PADA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE KETEPATAN WAKTU RESPON SINYAL SKDR <24 JAM PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV SESUAI STANDAR PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN CAKUPAN PENERIMA KESEHATAN GRATIS PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PREVALENSI BBLR PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB (SUCCES RATE) PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80% PADA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN**				**-**	**0 100 100 100 3,45 36 4,05 82 92,5 Jumlah persen persen persen INDEKS persen PERSEN angka PERSEN**	**767.763.000,00**	**1.081.219.000,00**	**1.105.459.246,00**	**337.696.246,00**						**927.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas Nilai kinerja Puskesmas di Puskesmas Bunguran Selatan Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di puskesmas Bunguran Selatan Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Selatan Persentase Ibu Hamil KEK Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas Bunguran Selatan Persentase Kasus Penyakit Menular Berpotensi KLB Dilaporkan Melalui Sinyal SKDR <24 Jam Persentase kasus positif TB diobati sesuai standar di puskesmas Bunguran Selatan Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bunguran Selatan Persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar di puskesmas bunguran selatan Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar di puskesmas Bunguran Selatan Persentase penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Remaja Putri Anemia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Sesuai Standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0,8 angka 100 persen 15 persen 16,67 persen 60 nilai 87,57 persen 92,5 persen	767.763.000,00	1.081.219.000,00	1.105.459.246,00	337.696.246,00						927.763.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				63 Orang	63 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1509 Orang	1509 Orang	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				73 Orang	73 Orang	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	76.803.000,00	76.803.000,00	76.803.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				-	1 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.349.000,00	13.349.000,00	13.349.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.050.000,00	43.050.000,00	43.050.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	352.440.000,00	284.340.000,00	308.580.246,00	-43.859.754,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			352.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	415.323.000,00	565.727.000,00	565.727.000,00	150.404.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			415.323.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
46.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN**				**-**	**29,42 persen**	**0,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif di Puskesmas Bunguran Selatan				-	100 persen	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00							20.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0016	**Instalasi Farmasi**							**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**							**0,00**	
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**667.243.920,00**	**855.719.087,00**	**855.719.087,00**	**188.475.167,00**					**-**		**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	471.243.920,00	558.031.087,00	558.031.087,00	86.787.167,00							0,00	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				1 Paket	1 Paket	471.243.920,00	558.031.087,00	558.031.087,00	86.787.167,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	196.000.000,00	297.688.000,00	297.688.000,00	101.688.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	196.000.000,00	297.688.000,00	297.688.000,00	101.688.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.02.0017	**Puskesmas Suak Midai**							**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**							**524.692.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**							**524.692.300,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**313.323.900,00**	**560.978.352,00**	**590.090.203,00**	**276.766.303,00**							**524.692.300,00**	
48.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**313.323.900,00**	**540.485.352,00**	**569.597.203,00**	**256.273.303,00**					**-**		**524.692.300,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	313.323.900,00	540.485.352,00	569.597.203,00	256.273.303,00							524.692.300,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				64 Orang	64 Orang	58.278.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	-46.938.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			160.034.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				1269 Orang	1269 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				-	1 Orang	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				58 Orang	58 Orang	0,00	3.339.000,00	3.339.000,00	3.339.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	39.437.000,00	39.437.000,00	39.437.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				-	1 Orang	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	78.372.000,00	103.658.300,00	130.165.200,00	51.793.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			103.658.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	176.673.900,00	317.536.052,00	320.141.003,00	143.467.103,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			161.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
49.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**20.493.000,00**	**20.493.000,00**	**20.493.000,00**					**-**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.232.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				-	1 Dokumen	0,00	11.232.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.261.000,00	9.261.000,00	9.261.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				-	1 Dokumen	0,00	9.261.000,00	9.261.000,00	9.261.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.03.0.00.0.00.03.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**							**530.523.636.353,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**							**530.523.636.353,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**80.069.970.178,00**	**76.301.255.948,00**	**81.606.605.930,00**	**1.536.635.752,00**							**530.523.636.353,00**	
50.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**3.45 Nilai 77 %**	**9.077.200.064,00**	**9.773.738.973,00**	**9.842.378.224,00**	**765.178.160,00**							**9.743.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	47.036.590,00	47.036.590,00	17.036.590,00							255.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	11.002.000,00	47.036.590,00	47.036.590,00	36.034.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	18.998.000,00	0,00	0,00	-18.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.040.159.664,00	8.394.050.083,00	8.465.012.134,00	424.852.470,00							7.310.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	8.040.159.664,00	8.394.050.083,00	8.465.012.134,00	424.852.470,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	372.010.700,00	425.294.600,00	407.789.742,00	35.779.042,00							998.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	139.080.800,00	155.481.600,00	158.480.800,00	19.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	11.999.900,00	12.017.000,00	12.017.000,00	17.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	220.930.000,00	257.796.000,00	237.291.942,00	16.361.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			595.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	448.201.500,00	766.299.500,00	744.634.558,00	296.433.058,00							980.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	15.753.500,00	3.503.500,00	4.238.558,00	-11.514.942,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	19.775.000,00	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	412.673.000,00	743.021.000,00	720.621.000,00	307.948.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186.828.200,00	141.058.200,00	177.905.200,00	-8.923.000,00							199.500.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	186.828.200,00	141.058.200,00	177.905.200,00	-8.923.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			199.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Ketersediaan Air Baku**				**-**	**179.76 Liter/Detik**	**620.191.800,00**	**818.449.626,00**	**512.154.426,00**	**-108.037.374,00**							**1.284.609.800,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	248.500.000,00	424.103.626,00	108.913.426,00	-139.586.574,00							284.609.800,00	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*				-	1 KM	0,00	0,00	34.609.800,00	34.609.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			34.609.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	248.500.000,00	424.103.626,00	74.303.626,00	-174.196.374,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	371.691.800,00	394.346.000,00	403.241.000,00	31.549.200,00							1.000.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*				0,4 KM	0,4 KM	135.585.200,00	134.411.200,00	143.306.200,00	7.721.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*				3 KM	3 KM	236.106.600,00	259.934.800,00	259.934.800,00	23.828.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Perpipaan**				**-**	**68.57 %**	**1.402.623.000,00**	**1.462.350.000,00**	**2.247.005.764,00**	**844.382.764,00**							**3.620.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.402.623.000,00	1.462.350.000,00	2.247.005.764,00	844.382.764,00							3.620.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	99.275.000,00	568.890.000,00	838.140.100,00	738.865.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*				2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.004.618.000,00	493.500.000,00	706.247.904,00	-298.370.096,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	298.730.000,00	399.960.000,00	702.617.760,00	403.887.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar yang Ditetapkan**				**-**	**23.26 %**	**383.457.400,00**	**394.890.000,00**	**394.890.000,00**	**11.432.600,00**							**1.030.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	383.457.400,00	394.890.000,00	394.890.000,00	11.432.600,00							1.030.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun*				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	329.569.600,00	394.890.000,00	394.890.000,00	65.320.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	53.887.800,00	0,00	0,00	-53.887.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik**				**-**	**9.97 %**	**909.422.200,00**	**502.198.700,00**	**233.778.700,00**	**-675.643.500,00**							**3.400.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	909.422.200,00	502.198.700,00	233.778.700,00	-675.643.500,00							3.400.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja*				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	313.429.200,00	194.028.700,00	194.028.700,00	-119.400.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.*				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	595.993.000,00	308.170.000,00	39.750.000,00	-556.243.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi Dengan Baik**				**-**	**42.67 %**	**10.957.825.550,00**	**11.066.679.895,00**	**10.592.398.315,00**	**-365.427.235,00**							**6.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.957.825.550,00	11.066.679.895,00	10.592.398.315,00	-365.427.235,00							6.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*				600 M	600 M	5.753.545.750,00	5.923.783.695,00	6.508.305.615,00	754.759.865,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*				11 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	361.836.000,00	26.150.000,00	44.350.000,00	-317.486.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	4.842.443.800,00	5.116.746.200,00	4.039.742.700,00	-802.701.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
56.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**				**-**	**85.71 %**	**7.432.640.000,00**	**6.884.663.330,00**	**8.269.361.135,00**	**836.721.135,00**							**77.938.386.743,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	7.432.640.000,00	6.884.663.330,00	8.269.361.135,00	836.721.135,00							77.938.386.743,00	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.331.440.000,00	6.783.464.130,00	8.168.161.935,00	836.721.935,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			76.637.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*				10 Dokumen	10 Dokumen	101.200.000,00	101.199.200,00	101.199.200,00	-800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.300.936.743,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**				**-**	**82.25 %**	**15.479.678.562,00**	**13.759.260.221,00**	**15.027.932.246,00**	**-451.746.316,00**							**57.419.364.100,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.479.678.562,00	13.759.260.221,00	15.027.932.246,00	-451.746.316,00							57.419.364.100,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan*				2 Kawasan	2 Kawasan	15.479.678.562,00	13.759.260.221,00	15.027.932.246,00	-451.746.316,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			57.419.364.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan**				**-**	**42.83 %**	**32.721.931.602,00**	**30.366.967.393,00**	**33.214.649.310,00**	**492.717.708,00**							**368.518.760.328,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	32.721.931.602,00	30.366.967.393,00	33.214.649.310,00	492.717.708,00							368.518.760.328,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.200.000.000,00	1.839.935.558,00	1.839.935.558,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*				1 KM	1 KM	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.368.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				2.9 KM	2.9 KM	598.778.529,00	1.166.170.297,00	1.150.370.297,00	551.591.768,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.849.929.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				1.80 KM	1.80 KM	19.473.501.143,00	18.311.180.633,00	19.023.647.800,00	-449.853.343,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			222.043.172.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				1 KM	1 KM	2.458.667.668,00	3.469.968.110,00	3.591.717.665,00	1.133.049.997,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			18.237.797.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*				0.50 KM	0.50 KM	0,00	0,00	434.236.967,00	434.236.967,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.782.431.729,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	*Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian*				1 Meter	1 Meter	196.941.737,00	199.998.068,00	199.998.068,00	3.056.331,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.668.535.939,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				1.90 KM	1.90 KM	7.928.921.627,00	5.040.433.743,00	5.006.016.648,00	-2.922.904.979,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			105.409.110.185,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				1 Jembatan	1 Jembatan	199.021.898,00	206.495.022,00	206.495.022,00	7.473.124,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				0 Meter	0 Meter	666.099.000,00	772.721.520,00	1.762.231.285,00	1.096.132.285,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			8.534.782.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase TKK Terampil Terhadap TKK Teridentifikasi**				**-**	**55.56 %**	**85.000.000,00**	**97.073.500,00**	**97.073.500,00**	**12.073.500,00**							**267.900.000,00**	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	85.000.000,00	97.073.500,00	97.073.500,00	12.073.500,00							267.900.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	97.073.500,00	97.073.500,00	12.073.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			267.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Dokumen RTR yang Tersedia**				**-**	**50 %**	**1.000.000.000,00**	**1.174.984.310,00**	**1.174.984.310,00**	**174.984.310,00**							**1.301.615.382,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	259.415.000,00	91.664.000,00	91.664.000,00	-167.751.000,00							259.615.384,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	259.415.000,00	91.664.000,00	91.664.000,00	-167.751.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			259.615.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.004.200,00	624.907.810,00	624.907.810,00	424.903.610,00							317.307.692,00	
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.004.200,00	624.907.810,00	624.907.810,00	424.903.610,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			317.307.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.580.800,00	356.021.000,00	356.021.000,00	-64.559.800,00							653.846.153,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*				1 Layanan	1 Layanan	200.584.800,00	262.314.000,00	262.314.000,00	61.729.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			288.461.538,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	*Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	219.996.000,00	93.707.000,00	93.707.000,00	-126.289.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			365.384.615,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	102.391.500,00	102.391.500,00	-17.608.500,00							70.846.153,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	102.391.500,00	102.391.500,00	-17.608.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			70.846.153,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.04.2.10.0.00.04.0000	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**							**37.598.610.437,00**	**25.955.975.254,00**	**25.828.373.806,00**	**-11.770.236.631,00**							**115.050.536.610,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.596.960.437,00**	**25.378.563.254,00**	**25.168.481.806,00**	**-11.428.478.631,00**							**111.673.668.610,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**36.596.960.437,00**	**25.378.563.254,00**	**25.168.481.806,00**	**-11.428.478.631,00**							**111.673.668.610,00**	
61.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.992.314.065,00**	**5.120.501.446,00**	**5.153.365.036,00**	**161.050.971,00**					**-**		**8.670.644.104,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.701.000,00	27.048.000,00	27.048.000,00	4.347.000,00							59.417.000,00	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	22.701.000,00	27.048.000,00	27.048.000,00	4.347.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.417.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.934.407.765,00	3.081.219.940,00	3.118.583.530,00	184.175.765,00							5.811.166.104,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.934.407.765,00	3.081.219.940,00	3.118.583.530,00	184.175.765,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.811.166.104,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	104.038.200,00	157.864.506,00	157.864.506,00	53.826.306,00							469.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	19.963.200,00	20.267.506,00	20.267.506,00	304.306,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				66 Laporan	66 Laporan	81.075.000,00	134.597.000,00	134.597.000,00	53.522.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			424.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.831.936.000,00	1.731.877.000,00	1.727.377.000,00	-104.559.000,00							1.969.054.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	1.012.795.000,00	1.013.000.000,00	1.013.000.000,00	205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				25 Laporan	25 Laporan	816.141.000,00	715.877.000,00	711.377.000,00	-104.764.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			953.054.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.231.100,00	122.492.000,00	122.492.000,00	23.260.900,00							361.257.000,00	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	54.291.100,00	92.492.000,00	92.492.000,00	38.200.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			116.257.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	9.940.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	60.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			235.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
62.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.019.400,00**	**259.169.100,00**	**271.269.100,00**	**71.249.700,00**							**390.500.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	200.019.400,00	259.169.100,00	271.269.100,00	71.249.700,00							390.500.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	200.019.400,00	259.169.100,00	271.269.100,00	71.249.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			390.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**4.689.532.600,00**	**2.055.766.680,00**	**1.405.910.360,00**	**-3.283.622.240,00**							**7.757.533.799,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	250.184.200,00	867.115.240,00	85.003.240,00	-165.180.960,00							250.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.184.200,00	867.115.240,00	85.003.240,00	-165.180.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	4.439.348.400,00	1.188.651.440,00	1.320.907.120,00	-3.118.441.280,00							7.507.533.799,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	302.085.000,00	306.920.000,00	324.653.000,00	22.568.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			750.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar*				40 Ha	40 Ha	4.137.263.400,00	881.731.440,00	996.254.120,00	-3.141.009.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.757.333.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
64.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**26.715.094.372,00**	**17.943.126.028,00**	**18.337.937.310,00**	**-8.377.157.062,00**							**94.854.990.707,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	26.715.094.372,00	17.943.126.028,00	18.337.937.310,00	-8.377.157.062,00							94.854.990.707,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				65 Lokasi	65 Lokasi	26.715.094.372,00	17.943.126.028,00	18.337.937.310,00	-8.377.157.062,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			94.854.990.707,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**							**3.376.868.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**							**3.376.868.000,00**	
65.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**1.001.650.000,00**	**577.412.000,00**	**659.892.000,00**	**-341.758.000,00**							**3.376.868.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.001.650.000,00	577.412.000,00	659.892.000,00	-341.758.000,00							3.376.868.000,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	824.000.000,00	400.000.000,00	482.480.000,00	-341.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	177.650.000,00	177.412.000,00	177.412.000,00	-238.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			826.868.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.05.0.00.0.00.05.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**							**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**							**21.437.437.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**							**21.437.437.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**15.507.430.866,00**	**15.991.014.900,00**	**15.929.111.941,00**	**421.681.075,00**							**21.437.437.000,00**	
66.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**78 Nilai 90 Persen**	**78 Nilai 90 Persen**	**14.921.727.966,00**	**15.286.210.000,00**	**15.224.307.041,00**	**302.579.075,00**							**20.980.437.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				85 Persen	85 Persen	58.700.200,00	49.633.200,00	49.633.200,00	-9.067.000,00							134.900.000,00	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	58.700.200,00	49.633.200,00	49.633.200,00	-9.067.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	10.265.894.966,00	10.707.550.000,00	10.759.358.041,00	493.463.075,00							11.563.152.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				130 Orang/ bulan	130 Orang/ bulan	10.265.894.966,00	10.707.550.000,00	10.759.358.041,00	493.463.075,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.563.152.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	128.380.800,00	117.318.800,00	117.318.800,00	-11.062.000,00							437.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.901.300,00	14.901.300,00	14.901.300,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.943.500,00	4.943.500,00	4.943.500,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	102.506.000,00	91.444.000,00	91.444.000,00	-11.062.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			222.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.854.000,00	150.854.000,00	37.143.000,00	-113.711.000,00							2.171.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	150.854.000,00	150.854.000,00	10.854.000,00	-140.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	26.289.000,00	26.289.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			171.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	4.116.403.000,00	4.064.709.000,00	4.064.709.000,00	-51.694.000,00							6.298.385.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	69.280.000,00	60.950.000,00	60.950.000,00	-8.330.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	4.037.123.000,00	3.988.759.000,00	3.988.759.000,00	-48.364.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.195.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				90 Persen	90 Persen	201.495.000,00	196.145.000,00	196.145.000,00	-5.350.000,00							376.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				13 Unit	13 Unit	181.175.000,00	166.085.000,00	166.085.000,00	-15.090.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			276.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	8.540.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	2.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	11.780.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	7.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
67.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**80 Persen**	**80 Persen**	**585.702.900,00**	**704.804.900,00**	**704.804.900,00**	**119.102.000,00**							**457.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani				80 Persen	80 Persen	341.943.200,00	576.555.900,00	576.555.900,00	234.612.700,00							300.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				4 laporan	4 laporan	341.943.200,00	576.555.900,00	576.555.900,00	234.612.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada				80 Persen	80 Persen	243.759.700,00	128.249.000,00	128.249.000,00	-115.510.700,00							157.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				4 Laporan	4 Laporan	149.699.700,00	0,00	0,00	-149.699.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	94.060.000,00	128.249.000,00	128.249.000,00	34.189.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0.00.0.00.06.0000	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**							**16.333.169.171,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.282.486.377,00**							**8.467.926.352,00**	
	1	**NON URUSAN**							**114.178.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.178.810,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.218.990.361,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.168.307.567,00**							**8.467.926.352,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**16.218.990.361,00**	**10.991.007.836,00**	**12.050.682.794,00**	**-4.168.307.567,00**							**8.467.926.352,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**114.178.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.178.810,00**							**0,00**	
68.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**78.30 Persen**	**13.647.739.471,00**	**10.442.975.998,00**	**11.541.842.875,00**	**-2.105.896.596,00**							**7.987.726.352,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	77 Persen	22.677.000,00	22.677.000,00	26.847.000,00	4.170.000,00							22.679.420,00	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	22.677.000,00	0,00	0,00	-22.677.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	22.677.000,00	26.847.000,00	26.847.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.679.420,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.766.530.061,00	5.881.211.881,00	5.974.015.256,00	207.485.195,00							5.766.530.061,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.766.530.061,00	5.881.211.881,00	5.974.015.256,00	207.485.195,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.766.530.061,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	38.000.000,00	67.091.379,00	39.091.379,00	1.091.379,00							38.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				30 Orang	30 Orang	38.000.000,00	67.091.379,00	39.091.379,00	1.091.379,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	175.436.000,00	273.958.238,00	287.769.811,00	112.333.811,00							146.120.580,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	34.056.000,00	39.554.052,00	76.337.625,00	42.281.625,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.996.000,00	5.997.500,00	5.831.500,00	-164.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				47 Laporan	47 Laporan	135.384.000,00	228.406.686,00	205.600.686,00	70.216.686,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			137.120.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.047.941.000,00	2.482.308.000,00	3.432.895.401,00	-2.615.045.599,00							425.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				0 Unit	4 Unit	5.969.526.000,00	2.428.000.000,00	2.078.000.000,00	-3.891.526.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	14.266.000,00	16.068.000,00	16.068.000,00	1.802.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	63.702.000,00	33.590.000,00	945.884.000,00	882.182.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	447.000,00	4.650.000,00	392.943.401,00	392.496.401,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.511.501.810,00	1.556.551.900,00	1.564.637.399,00	53.135.589,00							1.512.896.291,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	202.150.900,00	210.236.399,00	210.236.399,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			91.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	91.501.810,00	0,00	0,00	-91.501.810,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.417.000.000,00	1.351.401.000,00	1.351.401.000,00	-65.599.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.418.396.291,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.653.600,00	159.177.600,00	216.586.629,00	130.933.029,00							76.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	64.648.600,00	115.217.600,00	168.624.642,00	103.976.042,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			52.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	7.245.000,00	0,00	0,00	-7.245.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	9.760.000,00	39.960.000,00	37.961.987,00	28.201.987,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
69.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**2.685.429.700,00**	**548.031.838,00**	**508.839.919,00**	**-2.176.589.781,00**						**480.200.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.543.216.000,00	368.246.919,00	377.980.000,00	-2.165.236.000,00							350.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				48 Laporan	48 Laporan	44.845.000,00	76.386.919,00	78.818.000,00	33.973.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-76.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*				2 Unit	2 Unit	2.398.371.000,00	267.860.000,00	275.162.000,00	-2.123.209.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	98.213.500,00	84.568.919,00	95.443.919,00	-2.769.581,00							98.200.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*				200 Orang	200 Orang	98.213.500,00	84.568.919,00	95.443.919,00	-2.769.581,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			98.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	44.000.200,00	95.216.000,00	35.416.000,00	-8.584.200,00							32.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis*				1 Unit	1 Unit	44.000.200,00	95.216.000,00	35.416.000,00	-8.584.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.0.00.0.00.07.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**							**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**							**8.584.415.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**							**8.584.415.300,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.323.754.530,00**	**6.699.200.520,00**	**6.722.734.828,00**	**398.980.298,00**							**8.584.415.300,00**	
70.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**67,30 90 Persen Persen 90 67,30 Persen Persen**	**67,30 90 Persen Persen**	**5.601.666.530,00**	**5.942.377.100,00**	**5.968.638.228,00**	**366.971.698,00**							**7.436.132.300,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				64 Persen	64 Persen	43.530.000,00	106.046.650,00	106.046.650,00	62.516.650,00							111.797.500,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	30.880.000,00	40.596.650,00	40.596.650,00	9.716.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.197.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	12.650.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00	52.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	4.450.411.830,00	4.413.895.842,00	4.437.430.150,00	-12.981.680,00							5.010.198.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.450.411.830,00	4.413.895.842,00	4.437.430.150,00	-12.981.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.010.198.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				95 Persen	95 Persen	43.365.200,00	115.786.208,00	133.534.208,00	90.169.008,00							176.220.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				70 Paket	70 Paket	22.365.200,00	50.786.208,00	68.534.208,00	46.169.008,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.220.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	174.702.500,00	271.988.300,00	241.682.600,00	66.980.100,00							517.336.800,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	66.480.000,00	49.780.900,00	67.480.900,00	1.000.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.300.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	5.008.000,00	73.437.400,00	19.703.700,00	14.695.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.004.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				80000 Paket	80000 Paket	14.214.500,00	16.000.000,00	19.990.000,00	5.775.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	89.000.000,00	132.770.000,00	134.508.000,00	45.508.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			366.532.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				80 Persen	80 Persen	52.331.000,00	60.287.900,00	60.287.900,00	7.956.900,00							195.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	5.319.000,00	17.943.900,00	17.943.900,00	12.624.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	28.932.000,00	24.264.000,00	24.264.000,00	-4.668.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	18.080.000,00	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	691.031.000,00	792.221.600,00	802.981.120,00	111.950.120,00							1.172.887.500,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	36.323.000,00	38.267.000,00	38.267.000,00	1.944.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.927.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	9.348.000,00	16.598.000,00	19.536.700,00	10.188.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	645.360.000,00	737.356.600,00	745.177.420,00	99.817.420,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.116.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	146.295.000,00	182.150.600,00	186.675.600,00	40.380.600,00							252.692.500,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				12 Unit	12 Unit	92.615.000,00	155.440.600,00	155.440.600,00	62.825.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.692.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				67 Unit	67 Unit	24.400.000,00	26.710.000,00	31.235.000,00	6.835.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				0 Unit	0 Unit	29.280.000,00	0,00	0,00	-29.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
71.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA** **Persentase Warga Negara yg memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana**				**50 Persen undefined undefined**	**50 Persen undefined undefined**	**722.088.000,00**	**756.823.420,00**	**754.096.600,00**	**32.008.600,00**							**1.148.283.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana				100 Persen	100 Persen	216.929.000,00	456.441.150,00	440.078.150,00	223.149.150,00							252.762.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				50 Orang	50 Orang	87.842.000,00	111.195.150,00	101.208.150,00	13.366.150,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			93.547.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	129.087.000,00	345.246.000,00	338.870.000,00	209.783.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			159.215.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100 Persen	100 Persen	248.854.000,00	108.661.820,00	122.298.000,00	-126.556.000,00							127.695.500,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*				30 Unit	30 Unit	2.475.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*				600 Orang	600 Orang	24.596.000,00	0,00	0,00	-24.596.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				1 Kawasan	1 Kawasan	36.212.000,00	30.317.000,00	30.940.000,00	-5.272.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			32.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*				50 Orang	50 Orang	96.250.000,00	0,00	0,00	-96.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*				1 laporan	1 laporan	87.416.000,00	78.344.820,00	91.358.000,00	3.942.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			93.145.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*				50 Kawasan	50 Kawasan	1.905.000,00	0,00	0,00	-1.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Persen	100 Persen	190.916.000,00	161.100.000,00	161.100.000,00	-29.816.000,00							685.827.500,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*				1 Dokumen	1 Dokumen	103.696.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	-67.596.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			377.247.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				1400 Orang	1400 Orang	87.220.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	37.780.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			308.580.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	65.389.000,00	30.620.450,00	30.620.450,00	-34.768.550,00							81.997.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.389.000,00	30.620.450,00	30.620.450,00	-34.768.550,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Ekonomi Daerah			81.997.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.0.00.0.00.08.0000	**Dinas Sosial**							**7.370.303.437,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**141.122.900,00**							**7.353.259.300,00**	
	1	**NON URUSAN**							**3.607.242.126,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.607.242.126,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.763.061.311,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**3.748.365.026,00**							**7.353.259.300,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.607.242.126,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.607.242.126,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3.763.061.311,00**	**8.010.137.000,00**	**7.511.426.337,00**	**3.748.365.026,00**							**7.353.259.300,00**	
72.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**3,64 Nilai 3,64 Persen 85,33 Persen**	**3.933.773.337,00**	**4.206.216.100,00**	**4.232.506.437,00**	**298.733.100,00**					**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pemenuhan barang milik perangkat daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya realisasi kinerja Perangkat Daerah**		**4.700.352.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	10.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00							21.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	3.196.246.026,00	3.247.094.600,00	3.264.592.937,00	68.346.911,00							3.498.887.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.196.246.026,00	0,00	0,00	-3.196.246.026,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	27 Orang/bulan	0,00	3.247.094.600,00	3.264.592.937,00	3.264.592.937,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.498.887.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran				-	76 Persen	85.155.100,00	85.640.000,00	85.396.528,00	241.428,00							391.265.000,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	3 Paket	0,00	10.647.000,00	10.151.528,00	10.151.528,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	3 Paket	9.999.600,00	0,00	0,00	-9.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	9.532.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-532.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				28 Laporan	28 Laporan	64.221.000,00	64.230.000,00	64.482.000,00	261.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			307.265.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				6 Dokumen	6 Dokumen	402.500,00	763.000,00	763.000,00	360.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah				-	64 Persen	0,00	0,00	495.472,00	495.472,00							130.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	495.472,00	495.472,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran				-	100 Persen	195.322.211,00	401.654.000,00	401.654.000,00	206.331.789,00							229.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	10.727.910,00	10.727.910,00	127.910,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	5.129.211,00	4.502.090,00	4.502.090,00	-627.121,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	179.593.000,00	386.424.000,00	386.424.000,00	206.831.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			221.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				-	76 Persen	447.050.000,00	460.827.500,00	478.367.500,00	31.317.500,00							430.200.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	43.053.500,00	57.000.000,00	72.040.000,00	28.986.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			24.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	399.827.500,00	399.827.500,00	399.827.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	399.996.500,00	0,00	0,00	-399.996.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
73.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**				**-**	**100 Persen**	**146.289.600,00**	**144.315.291,00**	**144.315.291,00**	**-1.974.309,00**							**1.049.564.300,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dilaur Panti				-	100 Persen	146.289.600,00	144.315.291,00	144.315.291,00	-1.974.309,00							1.049.564.300,00	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				150 Orang	17 Orang	49.979.100,00	87.875.291,00	87.875.291,00	37.896.191,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			611.830.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	49.975.000,00	29.580.000,00	29.580.000,00	-20.395.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			159.534.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	46.335.500,00	26.860.000,00	26.860.000,00	-19.475.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			278.200.000,00	DINAS SOSIAL
74.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**				**-**	**70,90 Persen**	**3.170.241.300,00**	**3.559.605.000,00**	**3.034.604.000,00**	**-135.637.300,00**					**Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan bagi anak-anak terlantar agar tumbuh dan berkembang secara layak**		**870.343.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Layanan Pemeliharaan				-	9,32 Persen	121.331.000,00	130.075.000,00	46.500.000,00	-74.831.000,00							100.000.000,00	
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota*				200 Orang	180 Orang	121.331.000,00	130.075.000,00	46.500.000,00	-74.831.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				-	70,76 Persen	3.048.910.300,00	3.429.530.000,00	2.988.104.000,00	-60.806.300,00							770.343.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	90 Orang	275.990.300,00	243.750.000,00	224.460.000,00	-51.530.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			318.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				3268 Orang	958 Orang	2.772.920.000,00	3.185.780.000,00	2.592.145.000,00	-180.775.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			304.548.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				3268 Usulan	4 Usulan	0,00	0,00	171.499.000,00	171.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			147.295.000,00	DINAS SOSIAL
75.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dab setelah tanggap darurat bencana**				**-**	**100 Persen**	**100.001.000,00**	**100.000.609,00**	**100.000.609,00**	**-391,00**					**Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**		**283.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial				-	100 Persen	100.001.000,00	100.000.609,00	100.000.609,00	-391,00							283.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	100.001.000,00	100.000.609,00	100.000.609,00	-391,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			283.000.000,00	DINAS SOSIAL
76.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**				**-**	**100 Persen**	**19.998.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.998.200,00**					**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**450.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara				-	100 Persen	19.998.200,00	0,00	0,00	-19.998.200,00							450.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	0 Dokumen	19.998.200,00	0,00	0,00	-19.998.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2.07.3.32.0.00.09.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**							**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**							**7.083.900.020,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**							**7.083.900.020,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.431.881.082,00**	**6.495.593.896,00**	**6.529.068.964,00**	**1.097.187.882,00**							**7.083.900.020,00**	
77.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran**				**-**	**1 Tahun 2 Laporan 3.41 Nilai**	**5.089.214.882,00**	**6.169.286.196,00**	**6.202.761.264,00**	**1.113.546.382,00**					**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah**		**5.908.130.020,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	2 Laporan	20.496.600,00	22.504.850,00	22.504.850,00	2.008.250,00							37.800.000,00	
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	20.496.600,00	22.504.850,00	22.504.850,00	2.008.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	4.329.610.982,00	5.025.621.346,00	5.063.596.414,00	733.985.432,00							4.641.030.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.329.610.982,00	5.025.621.346,00	5.063.596.414,00	733.985.432,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.641.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				-	1 Tahun	98.288.100,00	277.204.000,00	277.204.000,00	178.915.900,00							402.030.020,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	17.106.100,00	43.000.000,00	43.000.000,00	25.893.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	14.079.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	-1.159.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	67.103.000,00	221.284.000,00	221.284.000,00	154.181.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			336.030.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang MilikDaerah				-	1 Tahun	7.539.000,00	8.139.000,00	8.139.000,00	600.000,00							98.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	7.539.000,00	8.139.000,00	8.139.000,00	600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 Tahun	320.008.200,00	319.657.000,00	315.157.000,00	-4.851.200,00							313.900.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	4.904.900,00	18.094.000,00	18.094.000,00	13.189.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	97.987.300,00	84.400.000,00	84.400.000,00	-13.587.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	217.116.000,00	217.163.000,00	212.663.000,00	-4.453.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			192.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	1 Tahun	313.272.000,00	516.160.000,00	516.160.000,00	202.888.000,00							415.370.000,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				11 Unit	11 Unit	88.630.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	6.010.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			80.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	25.050.000,00	21.520.000,00	21.520.000,00	-3.530.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	199.592.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.408.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			300.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
78.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**1,29 Persen**	**-**	**262.711.200,00**	**243.680.100,00**	**243.680.100,00**	**-19.031.100,00**							**810.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				80,33 Persen	-	262.711.200,00	243.680.100,00	243.680.100,00	-19.031.100,00							810.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				16 Orang	0 Orang	262.711.200,00	243.680.100,00	243.680.100,00	-19.031.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			810.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
79.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis**				**-**	**1 Perkara**	**79.955.000,00**	**82.627.600,00**	**82.627.600,00**	**2.672.600,00**					**ercapainya ketenangan kerja dan kelangsungan usaha, meningkatnya produktivitas, serta terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya secara berkeadilan**		**365.770.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan				-	100 Persen	79.955.000,00	82.627.600,00	82.627.600,00	2.672.600,00							365.770.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*				1 Perkara	1 Perkara	52.943.500,00	56.198.800,00	56.198.800,00	3.255.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			206.770.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				3840 Orang	3840 Orang	27.011.500,00	26.428.800,00	26.428.800,00	-582.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			159.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.3.32.0.00.09.0001	**UPTD Balai Latihan Kerja**							**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**							**89.170.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**							**89.170.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**							**89.170.000,00**	
80.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**57.070.000,00**	**57.069.760,00**	**61.569.760,00**	**4.499.760,00**					**-**		**89.170.000,00**	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	35.168.500,00	34.229.000,00	34.229.000,00	-939.500,00							31.670.000,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.977.500,00	4.139.000,00	4.139.000,00	161.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	3.107.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-1.897.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	28.084.000,00	28.880.000,00	28.880.000,00	796.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.670.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.901.500,00	22.840.760,00	27.340.760,00	5.439.260,00							57.500.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.501.500,00	2.440.760,00	2.440.760,00	939.260,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	24.900.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.08.2.14.0.00.10.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							**9.213.884.202,00**	**7.371.294.498,00**	**7.534.174.706,00**	**-1.679.709.496,00**							**9.366.620.428,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.213.884.202,00**	**7.371.294.498,00**	**7.534.174.706,00**	**-1.679.709.496,00**							**9.366.620.428,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.588.842.902,00**	**5.745.751.668,00**	**5.890.631.876,00**	**301.788.974,00**							**7.304.870.428,00**	
81.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**80 Persen 90 Persen**	**80 Persen 90 Persen**	**3.933.552.102,00**	**4.704.338.268,00**	**4.729.193.476,00**	**795.641.374,00**							**5.470.270.428,00**	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketetapan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.242.225.402,00	3.436.648.419,00	3.478.593.627,00	236.368.225,00							4.121.486.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.242.225.402,00	3.436.648.419,00	3.478.593.627,00	236.368.225,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.121.486.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				80 Persen	80 Persen	104.681.100,00	236.323.034,00	236.323.034,00	131.641.934,00							229.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	30.427.700,00	34.012.109,00	34.012.109,00	3.584.409,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	4.118.800,00	0,00	0,00	-4.118.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.360.600,00	12.781.600,00	12.781.600,00	1.421.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				75 Laporan	75 Laporan	58.774.000,00	189.529.325,00	189.529.325,00	130.755.325,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik daerah perangkat daerah				80 Persen	80 Persen	53.830.000,00	55.175.750,00	60.765.750,00	6.935.750,00							254.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	7.040.000,00	7.040.000,00	6.285.000,00	-755.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				16 Unit	16 Unit	46.790.000,00	48.135.750,00	47.440.750,00	650.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	398.306.000,00	839.714.225,00	805.604.225,00	407.298.225,00							800.184.428,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.457.895,00	457.895,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				13 Laporan	13 Laporan	42.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	393.264.000,00	833.472.225,00	798.904.330,00	405.640.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			790.184.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	134.509.600,00	136.476.840,00	147.906.840,00	13.397.240,00							65.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				35 Unit	35 Unit	91.229.600,00	85.652.100,00	97.082.100,00	5.852.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	43.280.000,00	50.824.740,00	50.824.740,00	7.544.740,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
82.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya ARG (anggaran responsif gender) pada APBD Kabupaten Natuna Persentase ARG (anggaran responsif gender) pada APBD kabupaten natuna**				**10 persen 10 Persen**	**10 persen 10 Persen**	**460.476.600,00**	**215.788.207,00**	**250.183.207,00**	**-210.293.393,00**							**624.100.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelembagaan PUG di daerah				7 Lembaga	7 Lembaga	100.479.900,00	27.039.302,00	27.039.302,00	-73.440.598,00							113.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.479.900,00	27.039.302,00	27.039.302,00	-73.440.598,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			113.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran Dinas P3AP2KB yang di alokasikan ke pemberdayaan perempuan				15 Persen	15 Persen	359.996.700,00	188.748.905,00	223.143.905,00	-136.852.795,00							511.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*				24 Lembaga	24 Lembaga	199.997.600,00	153.390.200,00	153.390.200,00	-46.607.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			179.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*				8 orang	8 orang	159.999.100,00	35.358.705,00	69.753.705,00	-90.245.395,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			331.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
83.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**ersentase perempuan korban kekerasan /tppo yang mendapatkan layanan komprehensif Persentase perempuan korban kekerasan /tppo yang mendapatkan layanan komprehensif**				**100 Persen 100 Persen**	**100 Persen 100 Persen**	**905.644.500,00**	**352.528.607,00**	**428.108.607,00**	**-477.535.893,00**							**509.600.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan				100 Persen	100 Persen	554.842.900,00	61.423.125,00	61.423.125,00	-493.419.775,00							76.100.000,00	
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	503.997.900,00	0,00	0,00	-503.997.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			76.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota*				-	0 0	50.845.000,00	61.423.125,00	61.423.125,00	10.578.125,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan				100 Persen	100 Persen	300.801.600,00	241.105.482,00	316.685.482,00	15.883.882,00							333.500.000,00	
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota*				-	0 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				50 orang	50 orang	100.800.000,00	15.801.158,00	15.801.158,00	-84.998.842,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				50 orang	50 orang	200.001.600,00	174.574.324,00	250.154.324,00	50.152.724,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			329.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 orang	0,00	34.710.000,00	26.710.000,00	26.710.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek*				20 orang	20 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**42.700.000,00**	**68.561.174,00**	**73.811.174,00**	**31.111.174,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak				0,5 Kegiatan	0,5 Kegiatan	42.700.000,00	68.561.174,00	73.811.174,00	31.111.174,00							100.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan*				2 Lembaga	2 Lembaga	42.700.000,00	68.561.174,00	73.811.174,00	31.111.174,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
85.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pelembagaan (PHA) yang sudah terpenuhi pada KLA**				**80 Persen**	**80 Persen**	**109.816.900,00**	**34.612.987,00**	**39.412.987,00**	**-70.403.913,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase yang memilki forum anak aktif				60 Persen	60 Persen	109.816.900,00	34.612.987,00	39.412.987,00	-70.403.913,00							0,00	
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan*				30 Lembaga	30 Lembaga	109.816.900,00	34.612.987,00	39.412.987,00	-70.403.913,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
86.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHESNSIF**				**100 Persen**	**100 Persen**	**136.652.800,00**	**369.922.425,00**	**369.922.425,00**	**233.269.625,00**							**600.900.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran pencegahan kekerasan terhadap anak				5 Persen	5 Persen	47.974.800,00	68.495.625,00	68.495.625,00	20.520.825,00							400.900.000,00	
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*				10 Kegiatan	10 Kegiatan	47.974.800,00	68.495.625,00	68.495.625,00	20.520.825,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan				100 Persen	100 Persen	48.200.000,00	213.082.050,00	213.082.050,00	164.882.050,00							150.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				23 Orang	23 Orang	48.200.000,00	78.500.000,00	70.500.000,00	22.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	16.542.050,00	16.542.050,00	16.542.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	48.700.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	64.320.000,00	46.820.000,00	46.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				80n Persen	80n Persen	40.478.000,00	88.344.750,00	88.344.750,00	47.866.750,00							50.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*				31 Orang	31 Orang	40.478.000,00	88.344.750,00	88.344.750,00	47.866.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.625.041.300,00**	**1.625.542.830,00**	**1.643.542.830,00**	**-1.981.498.470,00**							**2.061.750.000,00**	
87.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Totat(Total Fertility Rate/TFR) PUS per WUS usia 15-49 tahun**				**2,31 Skala Nilai 0 -100 2,31 Skala Nilai 0- 100**	**2,31 Skala Nilai 0 -100 2,31 Skala Nilai 0- 100**	**85.051.600,00**	**76.442.757,00**	**76.442.757,00**	**-8.608.843,00**							**493.250.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai acuan perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.963.200,00	57.141.802,00	57.141.802,00	27.178.602,00							84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.963.200,00	57.141.802,00	57.141.802,00	27.178.602,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk				3 OPD/kelurahan desa	3 OPD/kelurahan desa	55.088.400,00	19.300.955,00	19.300.955,00	-35.787.445,00							409.250.000,00	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana*				2 Laporan	2 Laporan	55.088.400,00	19.300.955,00	19.300.955,00	-35.787.445,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			409.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) Angka Kelahiran Totat(Total Fertility Rate/TFR) PUS per WUS usia 15-49 tahun**				**18,0 Angka 18,0 Angka 2,31 Persen**	**18,0 Angka 18,0 Angka 2,31 Persen**	**3.148.811.100,00**	**1.285.576.627,00**	**1.303.576.627,00**	**-1.845.234.473,00**							**1.521.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kelahiran yang tidak di inginkan				24,4 Persen	24,4 Persen	110.047.900,00	25.732.112,00	25.732.112,00	-84.315.788,00							391.500.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				15 Laporan	15 Laporan	110.047.900,00	25.732.112,00	25.732.112,00	-84.315.788,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			391.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pelayanan KB pasca salin				70 Persen	70 Persen	85.200.000,00	0,00	7.748.850,00	-77.451.150,00							478.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*				77 Organisasi	77 Organisasi	85.200.000,00	0,00	7.748.850,00	-77.451.150,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			478.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontasepsi modern				79 Persen	79 Persen	2.909.152.000,00	1.220.356.800,00	1.230.607.950,00	-1.678.544.050,00							651.500.000,00	
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*				40 Orang	40 Orang	2.909.152.000,00	1.220.356.800,00	1.230.607.950,00	-1.678.544.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			651.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	44.411.200,00	39.487.715,00	39.487.715,00	-4.923.485,00							0,00	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				0 Kampung	0 Kampung	44.411.200,00	39.487.715,00	39.487.715,00	-4.923.485,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)**				**21 Persen**	**21 Persen**	**391.178.600,00**	**263.523.446,00**	**263.523.446,00**	**-127.655.154,00**							**47.500.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS .PIK_R dan PPKS)				90 Persen	90 Persen	336.128.600,00	199.753.446,00	199.753.446,00	-136.375.154,00							47.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*				-	-	104.997.200,00	97.884.349,00	98.336.311,00	-6.660.889,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*				20 Orang	20 Orang	175.420.200,00	0,00	0,00	-175.420.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*				77 Orang	77 Orang	55.711.200,00	101.869.097,00	101.417.135,00	45.705.935,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	55.050.000,00	63.770.000,00	63.770.000,00	8.720.000,00							0,00	
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	*Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	55.050.000,00	63.770.000,00	63.770.000,00	8.720.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.09.3.27.0.00.11.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**							**15.925.107.134,00**	**16.240.809.195,00**	**14.758.385.055,00**	**-1.166.722.079,00**							**75.972.327.754,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.090.377.134,00**	**11.317.590.902,00**	**11.904.327.886,00**	**813.950.752,00**							**16.237.381.434,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**11.090.377.134,00**	**11.317.590.902,00**	**11.904.327.886,00**	**813.950.752,00**							**16.237.381.434,00**	
90.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)**				**-**	**3,45 Nilai**	**10.600.127.134,00**	**10.508.133.102,00**	**11.156.963.086,00**	**556.835.952,00**					**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pns Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**15.433.181.434,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	83 (Orang/ bulan)	9.272.796.634,00	9.527.351.460,00	9.591.015.294,00	318.218.660,00							11.500.000.000,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	9.272.796.634,00	9.527.351.460,00	9.591.015.294,00	318.218.660,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			11.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	151.023.000,00	171.301.642,00	173.743.442,00	22.720.442,00							289.378.484,00	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	16.611.500,00	16.618.800,00	17.058.800,00	447.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.324.500,00	26.707.392,00	25.580.192,00	5.255.692,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			39.378.484,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	114.087.000,00	127.975.450,00	131.104.450,00	17.017.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00							2.520.000.000,00	
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			2.520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1 Laporan	533.251.000,00	450.670.000,00	450.670.000,00	-82.581.000,00							815.542.950,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	34.627.000,00	34.627.000,00	34.627.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			34.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	494.624.000,00	412.043.000,00	412.043.000,00	-82.581.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			770.912.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				-	1 Unit 5 Unit 7 Unit	643.056.500,00	358.810.000,00	761.534.350,00	118.477.850,00							308.260.000,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	229.616.500,00	343.930.000,00	346.084.750,00	116.468.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			172.260.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	13.440.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	1.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	400.569.600,00	569.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
91.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan**				**-**	**2400 Kkal/ Kapita/Hari 87,8 Nilai**	**180.250.000,00**	**181.059.400,00**	**181.059.400,00**	**809.400,00**					**Angka Kecukupan Protein (AKP) Tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya**		**334.500.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	61.250.000,00	61.085.300,00	61.085.300,00	-164.700,00							61.200.000,00	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	61.250.000,00	61.085.300,00	61.085.300,00	-164.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			61.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka				-	1 Laporan	119.000.000,00	119.974.100,00	119.974.100,00	974.100,00							273.300.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*				1 Laporan	1 Laporan	119.000.000,00	119.974.100,00	119.974.100,00	974.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			273.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
92.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat**				**-**	**4,6 Nilai**	**210.000.000,00**	**409.995.600,00**	**385.162.600,00**	**175.162.600,00**					**Tertanganinya kerawanan pangan**		**442.200.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	210.000.000,00	409.995.600,00	385.162.600,00	175.162.600,00							442.200.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	409.995.600,00	385.162.600,00	175.162.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			442.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
93.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Aman (%)**				**-**	**90 Persen**	**100.000.000,00**	**218.402.800,00**	**181.142.800,00**	**81.142.800,00**					**Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar (jumlah sampel)**		**27.500.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				-	1 Dokumen	100.000.000,00	218.402.800,00	181.142.800,00	81.142.800,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	218.402.800,00	181.142.800,00	81.142.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.834.730.000,00**	**4.923.218.293,00**	**2.854.057.169,00**	**-1.980.672.831,00**							**59.734.946.320,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**4.834.730.000,00**	**4.923.218.293,00**	**2.854.057.169,00**	**-1.980.672.831,00**							**59.734.946.320,00**	
94.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan produksi tanaman perkebunan Persentase kenaikan produksi ternak**				**-**	**0,8 Persen 1,5 Persen**	**3.153.500.000,00**	**3.247.194.690,00**	**1.912.827.690,00**	**-1.240.672.310,00**					**Jumlah kelompok penerima Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan Peningkatan produksi tanaman perkebunan**		**51.909.155.566,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				-	1 Laporan	1.470.000.000,00	1.325.539.800,00	991.167.800,00	-478.832.200,00							17.272.955.566,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				1 Laporan	1 Laporan	1.470.000.000,00	1.325.539.800,00	991.167.800,00	-478.832.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			17.272.955.566,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				-	1 Dokumen	539.000.000,00	1.421.154.890,00	421.159.890,00	-117.840.110,00							15.959.200.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*				1 Dokumen	1 Dokumen	539.000.000,00	1.421.154.890,00	421.159.890,00	-117.840.110,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			15.959.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				-	90 Ekor	1.144.500.000,00	500.500.000,00	500.500.000,00	-644.000.000,00							18.677.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*				90 Ekor	90 Ekor	1.144.500.000,00	500.500.000,00	500.500.000,00	-644.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			18.677.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
95.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				**-**	**0,10 Persen**	**1.329.680.000,00**	**1.219.541.703,00**	**618.747.579,00**	**-710.932.421,00**					**Luas Lahan LP2B/KP2B/LCP2B yang dikelola**		**6.665.220.754,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				-	1 Dokumen	129.500.000,00	182.014.800,00	182.014.800,00	52.514.800,00							1.621.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*				5 Ha	5 Ha	49.000.000,00	100.000.000,00	105.457.000,00	56.457.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			49.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.500.000,00	82.014.800,00	76.557.800,00	-3.942.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			1.572.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				-	1 Dokumen	1.200.180.000,00	1.037.526.903,00	436.732.779,00	-763.447.221,00							5.044.220.754,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	993.700.000,00	1.037.526.903,00	436.732.779,00	-556.967.221,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			4.685.220.754,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	206.480.000,00	0,00	0,00	-206.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			359.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
96.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Hewan**				**-**	**91 Persen**	**80.500.000,00**	**220.000.000,00**	**160.000.000,00**	**79.500.000,00**					**Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan**		**928.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				-	1 Wilayah	80.500.000,00	220.000.000,00	160.000.000,00	79.500.000,00							928.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*				1 Wilayah	1 Wilayah	80.500.000,00	220.000.000,00	160.000.000,00	79.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			928.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
97.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani**				**-**	**1 Persen**	**271.050.000,00**	**236.481.900,00**	**162.481.900,00**	**-108.568.100,00**					**Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya**		**232.570.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	1 Unit	271.050.000,00	236.481.900,00	162.481.900,00	-108.568.100,00							232.570.000,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Unit	1 Unit	271.050.000,00	236.481.900,00	162.481.900,00	-108.568.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			232.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.11.0.00.0.00.12.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**							**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**							**19.509.605.784,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**							**19.509.605.784,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**10.913.424.316,00**	**10.710.770.008,00**	**10.751.619.955,00**	**-161.804.361,00**							**19.509.605.784,00**	
98.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.207.854.132,00**	**4.560.458.756,00**	**4.606.108.567,00**	**-2.601.745.565,00**					**-**		**3.974.802.892,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	50.085.000,00	50.085.000,00	40.085.000,00							50.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	50.085.000,00	50.085.000,00	40.085.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.054.920.532,00	3.220.300.006,00	3.250.049.817,00	195.129.285,00							3.124.802.892,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.054.920.532,00	3.220.300.006,00	3.250.049.817,00	195.129.285,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.124.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	147.147.200,00	220.245.950,00	220.245.950,00	73.098.750,00							185.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	10.002.200,00	20.200.000,00	20.200.000,00	10.197.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.002.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-902.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	120.143.000,00	174.445.950,00	174.445.950,00	54.302.950,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.894.386.400,00	848.637.800,00	854.537.800,00	-3.039.848.600,00							530.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 0	12 0	2.000.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	5.150.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	84.631.400,00	135.726.800,00	147.226.800,00	62.595.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	3.807.755.000,00	705.761.000,00	700.161.000,00	-3.107.594.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			498.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.400.000,00	221.190.000,00	231.190.000,00	129.790.000,00							85.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	54.700.000,00	153.490.000,00	163.490.000,00	108.790.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				7 Unit	7 Unit	46.700.000,00	67.700.000,00	67.700.000,00	21.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
99.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**129.397.000,00**	**112.470.252,00**	**118.070.252,00**	**-11.326.748,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	129.397.000,00	112.470.252,00	118.070.252,00	-11.326.748,00							200.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*				2 Laporan	2 Laporan	129.397.000,00	112.470.252,00	118.070.252,00	-11.326.748,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
100.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**1.223.139.800,00**	**2.641.904.000,00**	**1.824.079.000,00**	**600.939.200,00**					**-**		**5.279.802.892,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	1.223.139.800,00	2.641.904.000,00	1.824.079.000,00	600.939.200,00							5.279.802.892,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				3,5 Ha	3,5 Ha	1.223.139.800,00	2.641.904.000,00	1.824.079.000,00	600.939.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.279.802.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
101.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**104.347.000,00**	**105.265.000,00**	**105.265.000,00**	**918.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	104.347.000,00	105.265.000,00	105.265.000,00	918.000,00							300.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*				5 Dokumen	5 Dokumen	76.347.000,00	77.265.000,00	77.265.000,00	918.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	*Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD*				2 Orang	2 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**149.170.000,00**	**85.613.300,00**	**85.613.300,00**	**-63.556.700,00**							**225.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	149.170.000,00	85.613.300,00	85.613.300,00	-63.556.700,00							225.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*				50 Orang	50 Orang	149.170.000,00	85.613.300,00	85.613.300,00	-63.556.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
103.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**98.200.000,00**	**68.104.500,00**	**68.104.500,00**	**-30.095.500,00**							**300.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	98.200.000,00	68.104.500,00	68.104.500,00	-30.095.500,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*				1 Entitas	1 Entitas	98.200.000,00	68.104.500,00	68.104.500,00	-30.095.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
104.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**42.261.000,00**	**42.355.000,00**	**42.355.000,00**	**94.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	42.261.000,00	42.355.000,00	42.355.000,00	94.000,00							50.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola*				1 Pengaduan	1 Pengaduan	42.261.000,00	42.355.000,00	42.355.000,00	94.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
105.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.959.055.384,00**	**3.094.599.200,00**	**3.902.024.336,00**	**1.942.968.952,00**							**9.180.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	1.959.055.384,00	3.094.599.200,00	3.902.024.336,00	1.942.968.952,00							9.180.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*				1 Kelompok	1 Kelompok	121.675.000,00	82.717.500,00	82.717.500,00	-38.957.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				5 Unit	5 Unit	592.708.000,00	1.986.356.000,00	2.789.313.136,00	2.196.605.136,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.960.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*				6290 Ton	6290 Ton	1.244.672.384,00	1.025.525.700,00	1.029.993.700,00	-214.678.684,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.12.0.00.0.00.13.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**							**6.017.662.427,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**							**6.017.662.427,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.830.338.839,00**	**3.873.119.650,00**	**3.958.714.531,00**	**128.375.692,00**							**6.017.662.427,00**	
106.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.288.534.839,00**	**3.331.073.275,00**	**3.359.239.811,00**	**70.704.972,00**					**-**		**5.767.662.427,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.998.700,00	16.312.600,00	16.312.600,00	1.313.900,00							160.750.000,00	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	14.998.700,00	16.312.600,00	16.312.600,00	1.313.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.561.304.539,00	2.680.347.675,00	2.734.937.073,00	173.632.534,00							4.418.912.427,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.561.304.539,00	2.680.347.675,00	2.734.937.073,00	173.632.534,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.418.912.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	150.432.400,00	138.260.000,00	124.813.110,00	-25.619.290,00							558.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.901.400,00	10.630.000,00	13.027.800,00	-1.873.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	7.000.000,00	5.324.600,00	324.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	59.631.000,00	40.630.000,00	24.049.110,00	-35.581.890,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	3.611.600,00	3.611.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	70.900.000,00	80.000.000,00	78.800.000,00	7.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	493.729.200,00	428.083.000,00	417.867.028,00	-75.862.172,00							530.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	20.792.200,00	11.295.000,00	14.161.028,00	-6.631.172,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	88.997.000,00	88.997.000,00	75.915.000,00	-13.082.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	383.940.000,00	327.791.000,00	327.791.000,00	-56.149.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			435.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.070.000,00	68.070.000,00	65.310.000,00	-2.760.000,00							100.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	50.240.000,00	-2.760.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				15 Unit	15 Unit	15.070.000,00	15.070.000,00	15.070.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
107.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP di bagi jumlah penduduk 17 tahun keatas x 100**				**-**	**81 PERSEN**	**139.860.000,00**	**140.215.240,00**	**200.200.410,00**	**60.340.410,00**							**180.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan di bagi jumlah penduduk di kali 100%				-	95 PERSEN	139.860.000,00	140.215.240,00	200.200.410,00	60.340.410,00							180.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*				5 Laporan	5 Laporan	139.860.000,00	140.215.240,00	200.200.410,00	60.340.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
108.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**148.920.000,00**	**148.845.310,00**	**143.845.310,00**	**-5.074.690,00**					**-**		**20.000.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	148.920.000,00	148.845.310,00	143.845.310,00	-5.074.690,00							20.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*				1 Laporan	1 Laporan	148.920.000,00	148.845.310,00	143.845.310,00	-5.074.690,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
109.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**142.485.000,00**	**142.485.825,00**	**144.929.000,00**	**2.444.000,00**					**-**		**35.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	142.485.000,00	142.485.825,00	144.929.000,00	2.444.000,00							35.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	142.485.000,00	142.485.825,00	144.929.000,00	2.444.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
110.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**110.539.000,00**	**110.500.000,00**	**110.500.000,00**	**-39.000,00**							**15.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	110.539.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00	-39.000,00							15.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	110.539.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00	-39.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.0.00.0.00.14.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**							**9.895.180.223,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**							**9.895.180.223,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.860.086.326,00**	**7.307.641.760,00**	**7.531.897.956,00**	**671.811.630,00**							**9.895.180.223,00**	
111.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**80 Nilai 90 Persen**	**80 Nilai 90 Persen**	**5.933.661.226,00**	**5.858.773.100,00**	**6.106.329.296,00**	**172.668.070,00**							**6.649.340.223,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				98 Persen	98 Persen	10.003.600,00	14.242.100,00	7.226.100,00	-2.777.500,00							56.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	10.003.600,00	14.242.100,00	7.226.100,00	-2.777.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Waktu	1 Waktu	3.476.919.026,00	3.556.429.000,00	3.619.021.196,00	142.102.170,00							4.406.780.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.476.919.026,00	3.556.429.000,00	3.619.021.196,00	142.102.170,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	230.724.600,00	170.672.000,00	165.571.500,00	-65.153.100,00							416.500.000,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	95.203.600,00	16.440.000,00	18.718.700,00	-76.484.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	7.300.000,00	9.802.000,00	12.392.800,00	5.092.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	128.221.000,00	144.430.000,00	133.015.000,00	4.794.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			366.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				50 Persen	50 Persen	40.114.000,00	27.605.000,00	47.605.000,00	7.491.000,00							200.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				6 Unit	1 Unit	6.019.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	-2.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	2 Unit	34.095.000,00	24.106.000,00	44.106.000,00	10.011.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				70 Persen	70 Persen	1.731.930.000,00	1.641.457.000,00	1.794.177.500,00	62.247.500,00							1.470.060.223,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	19.024.000,00	19.024.000,00	16.524.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	8.799.000,00	5.978.000,00	10.018.500,00	1.219.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.720.631.000,00	1.616.455.000,00	1.765.135.000,00	44.504.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.450.060.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	443.970.000,00	448.368.000,00	472.728.000,00	28.758.000,00							100.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	36.990.000,00	38.840.000,00	61.550.000,00	24.560.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	6.820.000,00	9.680.000,00	11.330.000,00	4.510.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	400.160.000,00	399.848.000,00	399.848.000,00	-312.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
112.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA**				**10 Persen**	**10 Persen**	**36.277.000,00**	**37.777.000,00**	**38.127.000,00**	**1.850.000,00**							**122.250.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa				70 Desa	70 Desa	36.277.000,00	37.777.000,00	38.127.000,00	1.850.000,00							122.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	*Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa*				1 Desa	1 Desa	36.277.000,00	37.777.000,00	38.127.000,00	1.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			122.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
113.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DESA**				**57.14 Persen**	**57.14 Persen**	**13.867.900,00**	**15.223.000,00**	**14.873.000,00**	**1.005.100,00**							**343.790.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa				40 Desa	40 Desa	13.867.900,00	15.223.000,00	14.873.000,00	1.005.100,00							343.790.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	5 Dokumen	13.867.900,00	15.223.000,00	14.873.000,00	1.005.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			343.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
114.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**				**39,83 60 Persen Persen**	**39,83 60 Persen Persen**	**222.571.100,00**	**290.301.100,00**	**267.001.100,00**	**44.430.000,00**							**1.575.400.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa				70 Desa	70 Desa	222.571.100,00	290.301.100,00	267.001.100,00	44.430.000,00							1.575.400.000,00	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*				70 Dokumen	70 Dokumen	15.101.700,00	15.572.300,00	14.072.300,00	-1.029.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			107.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				70 Dokumen	70 Dokumen	77.700.800,00	84.700.800,00	74.200.800,00	-3.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			258.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				70 Orang	70 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			367.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*				54 Dokumen	82 Dokumen	19.997.500,00	20.000.000,00	33.950.000,00	13.952.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			191.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				1 Laporan	3 Laporan	2.400.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	57.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun*				77 Dokumen	77 Dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	11.850.000,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			110.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*				70 Dokumen	70 Dokumen	15.000.100,00	15.178.000,00	13.078.000,00	-1.922.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			102.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				70 Orang	70 Orang	17.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			167.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*				2 Desa	2 Desa	10.021.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-21.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*				77 Dokumen	77 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	14.850.000,00	-20.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				**43.41 Persen**	**43.41 Persen**	**653.709.100,00**	**1.105.567.560,00**	**1.105.567.560,00**	**451.858.460,00**							**1.204.400.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang di fasilitasi dalam peningkatan Kapasitas dan diberdayakan				5 Lembaga	5 Lembaga	653.709.100,00	1.105.567.560,00	1.105.567.560,00	451.858.460,00							1.204.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				1 Dokumen	1 Dokumen	571.530.600,00	774.599.560,00	774.599.560,00	203.068.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			112.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Lembaga	1 Lembaga	11.210.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	1.090.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			362.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*				10 Dokumen	10 Dokumen	8.889.500,00	9.203.000,00	9.203.000,00	313.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			139.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				94 Dokumen	12 Dokumen	49.904.000,00	290.900.000,00	290.900.000,00	240.996.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				5 Keluarga	5 Keluarga	6.675.000,00	8.565.000,00	8.565.000,00	1.890.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.15.0.00.0.00.15.0000	**Dinas Perhubungan**							**17.896.749.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**-2.327.984.210,00**							**56.709.531.534,00**	
	2	**NON URUSAN**							**2.630.064.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.630.064.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.266.685.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**302.079.790,00**							**56.709.531.534,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.064.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.630.064.000,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15.266.685.961,00**	**13.013.478.839,00**	**15.568.765.751,00**	**302.079.790,00**							**56.709.531.534,00**	
116.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**65 Nilai 80 Persen**	**80 Nilai 80 Persen**	**6.519.222.651,00**	**6.616.040.839,00**	**6.994.583.293,00**	**475.360.642,00**							**8.373.225.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	100 Persen	19.926.000,00	28.925.000,00	29.150.000,00	9.224.000,00							39.200.000,00	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	19.926.000,00	28.925.000,00	29.150.000,00	9.224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.478.003.551,00	3.569.731.239,00	3.434.810.645,00	-43.192.906,00							4.956.025.000,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				36 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.478.003.551,00	3.569.731.239,00	3.434.810.645,00	-43.192.906,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.956.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				55 Persen	55 Persen	196.740.100,00	280.287.000,00	449.566.388,00	252.826.288,00							490.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.025.000,00	45.500.000,00	56.650.000,00	31.625.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11.993.100,00	2.000.000,00	6.000.000,00	-5.993.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	13.992.000,00	17.800.000,00	29.299.388,00	15.307.388,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	145.730.000,00	214.987.000,00	357.617.000,00	211.887.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			383.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				55 Persen	55 Persen	59.931.000,00	88.250.000,00	147.473.000,00	87.542.000,00							634.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	24.931.000,00	53.250.000,00	107.563.000,00	82.632.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			294.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	39.910.000,00	4.910.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				70 Persen	70 Persen	2.648.044.000,00	2.530.890.000,00	2.746.575.275,00	98.531.275,00							2.075.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				10 Laporan	10 Laporan	4.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				10 Laporan	10 Laporan	13.380.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-10.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2.630.064.000,00	0,00	0,00	-2.630.064.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.521.790.000,00	2.737.475.275,00	2.737.475.275,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	116.578.000,00	117.957.600,00	187.007.985,00	70.429.985,00							179.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				18 Unit	18 Unit	98.388.000,00	116.457.600,00	182.007.985,00	83.619.985,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			144.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	18.190.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-13.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
117.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan**				**68 Persen**	**80,01 Persen**	**4.901.047.700,00**	**5.749.724.000,00**	**5.281.874.000,00**	**380.826.300,00**							**7.359.981.900,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten				68 Persen	81,76 Persen	4.901.047.700,00	5.749.724.000,00	5.281.874.000,00	380.826.300,00							7.359.981.900,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				18 Unit	38 Unit	3.545.007.000,00	3.829.320.000,00	2.684.841.838,00	-860.165.162,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.267.721.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				449 Unit	40 Unit	1.356.040.700,00	1.920.404.000,00	2.597.032.162,00	1.240.991.462,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.092.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
118.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik**				**72 Persen**	**87,88 Persen**	**6.476.479.610,00**	**647.714.000,00**	**3.292.308.458,00**	**-3.184.171.152,00**							**40.976.324.634,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan yang dibangun dan beroperasi				88 Persen	85,71 Persen	506.479.610,00	647.714.000,00	3.290.842.458,00	2.784.362.848,00							35.006.324.634,00	
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun*				2 Unit	1 Unit	445.999.610,00	413.339.520,00	2.764.955.134,00	2.318.955.524,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			33.456.849.978,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara*				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	199.262.344,00	199.262.344,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.006.194.856,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*				14 Laporan	12 Laporan	60.480.000,00	234.374.480,00	326.624.980,00	266.144.980,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			543.279.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	5.970.000.000,00	0,00	1.466.000,00	-5.968.534.000,00							5.970.000.000,00	
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia*				1 Unit	1 Unit	5.970.000.000,00	0,00	1.466.000,00	-5.968.534.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.2.20.2.21.16.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							**7.823.579.970,00**	**8.896.370.861,00**	**12.261.038.848,00**	**4.437.458.878,00**							**6.196.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.823.579.970,00**	**8.896.370.861,00**	**12.261.038.848,00**	**4.437.458.878,00**							**6.196.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7.621.140.970,00**	**8.693.931.709,00**	**12.097.301.496,00**	**4.476.160.526,00**							**5.996.000.000,00**	
119.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP** **Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**				**80 Persen** **90 Persen**	**80 Persen** **90 Persen**	**3.694.476.570,00**	**3.727.940.609,00**	**3.803.502.468,00**	**109.025.898,00**							**3.571.000.000,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.067.686.009,00	3.159.180.171,00	3.215.964.544,00	148.278.535,00							2.697.600.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.067.686.009,00	3.159.180.171,00	3.215.964.544,00	148.278.535,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.697.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terselesaikan				7 Paket	7 Paket	122.051.800,00	119.040.805,00	119.676.250,00	-2.375.550,00							234.500.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	3 Paket	7.242.000,00	8.853.825,00	9.889.050,00	2.647.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	8.860.500,00	13.738.080,00	18.508.300,00	9.647.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	18.824.300,00	8.648.900,00	12.768.900,00	-6.055.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	15 Laporan	87.125.000,00	87.800.000,00	78.510.000,00	-8.615.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	456.595.011,00	358.656.883,00	362.064.577,00	-94.530.434,00							609.900.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	19.390.800,00	16.743.306,00	19.430.000,00	39.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	46.191.211,00	41.125.577,00	41.846.577,00	-4.344.634,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	11 Laporan	391.013.000,00	300.788.000,00	300.788.000,00	-90.225.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			567.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat barang milik perangkat daerah				90 Persen	90 Persen	48.143.750,00	91.062.750,00	105.797.097,00	57.653.347,00							29.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	42.173.750,00	85.092.750,00	99.827.097,00	57.653.347,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				3 Unit	3 Unit	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
120.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah**				**86,56 Persen**	**86,56 Persen**	**1.876.665.400,00**	**1.954.239.900,00**	**2.886.346.500,00**	**1.009.681.100,00**							**200.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah				49481 Orang	49481 Orang	1.876.665.400,00	1.954.239.900,00	2.886.346.500,00	1.009.681.100,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*				10 Media	10 Media	1.876.665.400,00	1.954.239.900,00	2.879.346.500,00	1.002.681.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				10 Konten	10 Konten	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.049.999.000,00**	**3.011.751.200,00**	**5.407.452.528,00**	**3.357.453.528,00**							**2.225.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi				72 Persen	72 Persen	2.049.999.000,00	3.011.751.200,00	5.407.452.528,00	3.357.453.528,00							2.225.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*				2 Dokumen	1 Dokumen	99.999.200,00	99.998.400,00	77.259.100,00	-22.740.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				10 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	1.949.999.800,00	2.911.752.800,00	5.330.193.428,00	3.380.193.628,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**87.339.700,00**	**-14.875.500,00**							**100.000.000,00**	
122.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral**				**84 Persen**	**84 Persen**	**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**87.339.700,00**	**-14.875.500,00**							**100.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD				315 Data	315 Data	102.215.200,00	102.215.000,00	87.339.700,00	-14.875.500,00							100.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*				5 Orang	5 Orang	102.215.200,00	102.215.000,00	87.339.700,00	-14.875.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**76.397.652,00**	**-23.826.148,00**							**100.000.000,00**	
123.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**76.397.652,00**	**-23.826.148,00**							**100.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengaman informasi dan persandian				46 OPD	46 OPD	100.223.800,00	100.224.152,00	76.397.652,00	-23.826.148,00							100.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100.223.800,00	100.224.152,00	76.397.652,00	-23.826.148,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.17.3.30.3.31.17.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**							**10.767.841.941,00**	**10.817.604.634,00**	**10.996.089.527,00**	**228.247.586,00**							**14.157.501.950,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.364.968.000,00**	**1.473.452.600,00**	**1.490.265.000,00**	**125.297.000,00**							**2.985.790.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1.364.968.000,00**	**1.473.452.600,00**	**1.490.265.000,00**	**125.297.000,00**							**2.985.790.000,00**	
124.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**45.135.600,00**	**167.235.600,00**	**161.072.000,00**	**115.936.400,00**					**-**		**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.135.600,00	167.235.600,00	161.072.000,00	115.936.400,00							200.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	45.135.600,00	167.235.600,00	161.072.000,00	115.936.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
125.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**1.060.902.000,00**	**1.000.402.000,00**	**1.000.402.000,00**	**-60.500.000,00**							**2.355.790.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	1.060.902.000,00	1.000.402.000,00	1.000.402.000,00	-60.500.000,00							2.355.790.000,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	910.880.000,00	850.380.000,00	850.380.000,00	-60.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.159.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	150.022.000,00	150.022.000,00	150.022.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			196.290.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
126.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**258.930.400,00**	**305.815.000,00**	**328.791.000,00**	**69.860.600,00**							**430.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	258.930.400,00	305.815.000,00	328.791.000,00	69.860.600,00							430.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	258.930.400,00	305.815.000,00	328.791.000,00	69.860.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.402.873.941,00**	**9.344.152.034,00**	**9.505.824.527,00**	**102.950.586,00**							**11.171.711.950,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.464.924.596,00**	**3.425.182.415,00**	**3.529.076.355,00**	**64.151.759,00**							**4.962.000.000,00**	
127.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**2.225.017.596,00**	**2.234.770.116,00**	**2.326.624.246,00**	**101.606.650,00**							**3.057.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	2.225.017.596,00	2.234.770.116,00	2.326.624.246,00	101.606.650,00							3.057.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				1 Unit	1 Unit	2.225.017.596,00	2.234.770.116,00	2.326.624.246,00	101.606.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			3.057.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
128.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**1.109.998.000,00**	**1.075.266.849,00**	**1.087.306.659,00**	**-22.691.341,00**							**855.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	50.000.000,00	40.400.000,00	49.889.810,00	-110.190,00							250.000.000,00	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.400.000,00	49.889.810,00	-110.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	1.059.998.000,00	1.034.866.849,00	1.037.416.849,00	-22.581.151,00							605.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	34.900.000,00	37.450.000,00	-22.550.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	999.998.000,00	999.966.849,00	999.966.849,00	-31.151,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			405.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
129.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**129.909.000,00**	**115.145.450,00**	**115.145.450,00**	**-14.763.550,00**							**1.050.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	129.909.000,00	115.145.450,00	115.145.450,00	-14.763.550,00							1.050.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	129.909.000,00	115.145.450,00	115.145.450,00	-14.763.550,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**5.937.949.345,00**	**5.918.969.619,00**	**5.976.748.172,00**	**38.798.827,00**							**6.209.711.950,00**	
130.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.714.704.145,00**	**5.682.312.359,00**	**5.722.041.912,00**	**7.337.767,00**					**-**		**5.014.711.950,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.002.000,00	16.147.854,00	17.997.854,00	15.995.854,00							20.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	2.002.000,00	16.147.854,00	17.997.854,00	15.995.854,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.731.374.745,00	4.952.039.880,00	4.935.518.933,00	204.144.188,00							4.210.111.950,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.731.374.745,00	4.952.039.880,00	4.935.518.933,00	204.144.188,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.210.111.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	176.816.900,00	146.233.000,00	157.740.500,00	-19.076.400,00							342.600.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30.632.600,00	25.500.000,00	31.000.000,00	367.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.047.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.952.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.005.000,00	10.000.000,00	16.007.500,00	6.002.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				25 Laporan	25 Laporan	135.132.000,00	105.733.000,00	105.733.000,00	-29.399.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	36.893.000,00	36.893.000,00							190.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	30.493.000,00	30.493.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	488.542.500,00	372.211.625,00	372.211.625,00	-116.330.875,00							12.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.003.000,00	27.430.125,00	27.430.125,00	24.427.125,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	55.001.500,00	55.001.500,00	55.001.500,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	430.538.000,00	289.780.000,00	289.780.000,00	-140.758.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	315.968.000,00	195.680.000,00	201.680.000,00	-114.288.000,00							240.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	88.400.000,00	56.888.000,00	56.888.000,00	-31.512.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	5.040.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	10.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	222.528.000,00	128.792.000,00	128.792.000,00	-93.736.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
131.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**182.933.000,00**	**195.311.650,00**	**200.041.650,00**	**17.108.650,00**							**545.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	182.933.000,00	195.311.650,00	200.041.650,00	17.108.650,00							545.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	182.933.000,00	195.311.650,00	200.041.650,00	17.108.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			545.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
132.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**20.215.200,00**	**20.125.760,00**	**33.444.760,00**	**13.229.560,00**							**600.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.215.200,00	20.125.760,00	33.444.760,00	13.229.560,00							600.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.444.000,00	5.444.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.215.200,00	20.125.760,00	28.000.760,00	7.785.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
133.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**20.097.000,00**	**21.219.850,00**	**21.219.850,00**	**1.122.850,00**							**50.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.097.000,00	21.219.850,00	21.219.850,00	1.122.850,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.097.000,00	21.219.850,00	21.219.850,00	1.122.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.3.30.3.31.17.0001	**UPTD Metrologi Legal**							**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**							**250.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**							**250.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**							**250.000.000,00**	
134.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**102.499.800,00**	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**200,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	102.499.800,00	102.500.000,00	102.500.000,00	200,00							250.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				350 Unit	350 Unit	102.499.800,00	102.500.000,00	102.500.000,00	200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.18.0.00.0.00.18.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**							**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**							**9.226.980.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**							**9.226.980.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.311.401.102,00**	**6.422.265.040,00**	**6.468.215.997,00**	**156.814.895,00**							**9.226.980.000,00**	
135.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.671.355.602,00**	**5.765.227.570,00**	**5.968.988.577,00**	**297.632.975,00**					**-**		**7.671.980.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.862.400,00	2.862.400,00	2.719.400,00	-143.000,00							20.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	2 Laporan	2.862.400,00	2.862.400,00	2.719.400,00	-143.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.871.297.602,00	4.997.289.340,00	5.053.084.772,00	181.787.170,00							5.348.780.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				36 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.871.297.602,00	4.997.289.340,00	5.053.084.772,00	181.787.170,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.348.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	81.684.700,00	76.317.280,00	88.840.880,00	7.156.180,00							318.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.799.000,00	8.429.000,00	10.715.000,00	-4.084.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.207.700,00	22.335.100,00	32.122.700,00	11.915.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	10.429.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	12 Laporan	36.249.000,00	35.553.180,00	36.003.180,00	-245.820,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	53.846.000,00	53.846.000,00							477.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	53.846.000,00	53.846.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			477.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	585.160.900,00	418.033.900,00	397.700.625,00	-187.460.275,00							668.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	10.010.000,00	28.034.000,00	21.004.225,00	10.994.225,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	12 Laporan	85.041.900,00	85.041.900,00	71.738.400,00	-13.303.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	490.109.000,00	304.958.000,00	304.958.000,00	-185.151.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			593.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.350.000,00	270.724.650,00	372.796.900,00	242.446.900,00							840.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	3 Unit	50.970.000,00	57.465.450,00	75.137.900,00	24.167.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	19.320.000,00	19.320.000,00	17.910.000,00	-1.410.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	60.060.000,00	193.939.200,00	279.749.000,00	219.689.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
136.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi**				**5,42 Persen**	**5,42 Persen**	**187.808.400,00**	**237.388.810,00**	**74.432.760,00**	**-113.375.640,00**							**805.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Kawasan Investasi yang dipetakan				50 Persen	50 Persen	187.808.400,00	237.388.810,00	74.432.760,00	-113.375.640,00							805.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	155.654.800,00	205.296.410,00	29.976.100,00	-125.678.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	32.153.600,00	32.092.400,00	44.456.660,00	12.303.060,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
137.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Calon investor Baru**				**20 Persen**	**20 Persen**	**291.691.300,00**	**242.118.000,00**	**242.118.000,00**	**-49.573.300,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	291.691.300,00	242.118.000,00	242.118.000,00	-49.573.300,00							200.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	291.691.300,00	242.118.000,00	242.118.000,00	-49.573.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
138.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**3,533 Indeks**	**3,533 Indeks**	**100.000.000,00**	**69.953.600,00**	**67.953.600,00**	**-32.046.400,00**							**250.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu Proses Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan				1,9 Hari	1,9 Hari	100.000.000,00	69.953.600,00	67.953.600,00	-32.046.400,00							250.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				310 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	100.000.000,00	69.953.600,00	67.953.600,00	-32.046.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
139.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha Yang dilakukan Pengendalian**				**18,18 Persen**	**18,18 Persen**	**50.019.700,00**	**99.071.000,00**	**99.117.000,00**	**49.097.300,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				12 Laporan	12 Laporan	50.019.700,00	99.071.000,00	99.117.000,00	49.097.300,00							200.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				50 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	50.019.700,00	99.071.000,00	99.117.000,00	49.097.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
140.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Sektor Perizinan yang Dikelola**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.526.100,00**	**8.506.060,00**	**15.606.060,00**	**5.079.960,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.526.100,00	8.506.060,00	15.606.060,00	5.079.960,00							100.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				12 Dokumen	12 Dokumen	10.526.100,00	8.506.060,00	15.606.060,00	5.079.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.19.0.00.0.00.19.0000	**Dinas Pemuda dan Olahraga**							**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**							**9.542.540.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**							**9.542.540.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.847.999.124,00**	**7.906.444.261,00**	**8.738.288.233,00**	**890.289.109,00**							**9.542.540.000,00**	
141.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**2.15 Indeks 3.45 Indeks 60.50 Persen**	**5.766.668.024,00**	**5.384.543.950,00**	**5.401.397.922,00**	**-365.270.102,00**							**6.479.340.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	70 Persen	24.286.300,00	16.283.300,00	16.283.300,00	-8.003.000,00							155.200.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	24.286.300,00	16.283.300,00	16.283.300,00	-8.003.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	4.158.214.224,00	3.967.104.850,00	3.983.212.022,00	-175.002.202,00							4.719.540.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.158.214.224,00	3.967.104.850,00	3.983.212.022,00	-175.002.202,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.719.540.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	62 Persen	418.515.900,00	368.698.200,00	356.573.000,00	-61.942.900,00							475.600.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	19.058.000,00	94.414.000,00	94.414.000,00	75.356.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	21.696.900,00	4.693.200,00	7.000.000,00	-14.696.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.620.000,00	12.623.000,00	12.623.000,00	3.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.800.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	365.141.000,00	256.968.000,00	242.536.000,00	-122.605.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			408.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	80 Persen	755.167.000,00	657.698.000,00	652.820.000,00	-102.347.000,00							975.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				525 Laporan	525 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	-960.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	35.367.000,00	15.350.000,00	15.582.500,00	-19.784.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				33 Laporan	33 Laporan	717.800.000,00	641.348.000,00	636.197.500,00	-81.602.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			894.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	75 Persen	410.484.600,00	374.759.600,00	392.509.600,00	-17.975.000,00							154.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	35.404.600,00	45.759.600,00	56.009.600,00	20.605.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	8.000.000,00	7.000.000,00	14.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	367.080.000,00	322.000.000,00	322.000.000,00	-45.080.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
142.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				**-**	**15.00 persen 15 persen**	**105.911.100,00**	**130.283.250,00**	**111.111.850,00**	**5.200.750,00**							**261.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat				-	10 Persen	47.500.000,00	0,00	2.700.000,00	-44.800.000,00							181.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*				0 0	0 0	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			131.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*				10 Kegiatan	10 Kegiatan	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan				-	55.77 Persen	58.411.100,00	130.283.250,00	108.411.850,00	50.000.750,00							80.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				0 Organisasi	0 Organisasi	58.392.100,00	130.283.250,00	108.411.850,00	50.019.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*				3 Orang	3 Orang	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
143.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Provinsi**				**-**	**10 Persen**	**1.765.420.000,00**	**1.881.617.061,00**	**2.696.607.061,00**	**931.187.061,00**							**2.802.200.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan				-	70 Persen	871.644.300,00	557.314.661,00	571.275.161,00	-300.369.139,00							0,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				10 Unit	10 Unit	730.773.900,00	0,00	0,00	-730.773.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				-	0 Unit	0,00	557.314.661,00	571.275.161,00	571.275.161,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*				0 Dokumen	0 Dokumen	140.870.400,00	0,00	0,00	-140.870.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga				-	10 Event	591.754.800,00	1.324.302.400,00	2.092.881.150,00	1.501.126.350,00							2.802.200.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	38.000.000,00	187.799.000,00	210.626.800,00	172.626.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			218.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				130 Orang	130 Orang	553.754.800,00	1.136.503.400,00	1.882.254.350,00	1.328.499.550,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Ekonomi Daerah			2.583.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga				-	4 Cabor	283.338.200,00	0,00	0,00	-283.338.200,00							0,00	
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*				0 Orang	0 Orang	189.238.200,00	0,00	0,00	-189.238.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*				0 Pelatda	0 Pelatda	94.100.000,00	0,00	0,00	-94.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				-	75 Persen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00							0,00	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*				-	0 Dokumen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				-	75 Prsen	18.682.700,00	0,00	31.850.750,00	13.168.050,00							0,00	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*				0 Laporan	0 Laporan	18.682.700,00	0,00	0,00	-18.682.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				0 0	0 0	0,00	0,00	31.850.750,00	31.850.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
144.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**				**-**	**75 Persen**	**210.000.000,00**	**510.000.000,00**	**529.171.400,00**	**319.171.400,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah				-	18 Organisasi	210.000.000,00	510.000.000,00	529.171.400,00	319.171.400,00							0,00	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*				-	1 Laporan	0,00	0,00	19.171.400,00	19.171.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*				-	-	210.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.23.2.24.0.00.20.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**							**4.679.180.622,00**	**5.160.127.300,00**	**5.301.544.233,00**	**622.363.611,00**							**101.804.000,00**	
	2	**NON URUSAN**							**79.546.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.546.600,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.599.634.022,00**	**5.160.127.300,00**	**5.301.544.233,00**	**701.910.211,00**							**101.804.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.465.795.122,00**	**5.081.535.300,00**	**5.217.952.233,00**	**752.157.111,00**							**101.804.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**79.546.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.546.600,00**							**0,00**	
145.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.345.341.722,00**	**4.550.155.600,00**	**4.671.481.533,00**	**326.139.811,00**					**-**		**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	26.629.500,00	26.370.000,00	7.793.105,00	-18.836.395,00							0,00	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	26.629.500,00	26.370.000,00	7.793.105,00	-18.836.395,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.405.913.722,00	3.386.783.300,00	3.419.733.983,00	13.820.261,00							0,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.405.913.722,00	3.386.783.300,00	3.419.733.983,00	13.820.261,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	93.219.900,00	110.849.110,00	140.849.110,00	47.629.210,00							0,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	50.058.900,00	53.549.110,00	53.549.110,00	3.490.210,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	29.161.000,00	21.000.000,00	40.500.000,00	11.339.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				33 Laporan	33 Laporan	14.000.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.717.000,00	109.831.250,00	164.323.145,00	126.606.145,00							0,00	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	109.831.250,00	124.323.145,00	124.323.145,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	37.717.000,00	0,00	0,00	-37.717.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	670.742.000,00	699.158.000,00	704.158.000,00	33.416.000,00							0,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				3 Laporan	3 Laporan	12.000.000,00	64.554.000,00	62.481.572,00	50.481.572,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	98.400.000,00	108.105.000,00	108.105.000,00	9.705.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	560.342.000,00	526.499.000,00	533.571.428,00	-26.770.572,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	111.119.600,00	217.163.940,00	234.624.190,00	123.504.590,00							0,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	0,00	59.163.940,00	44.814.190,00	44.814.190,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	41.829.600,00	0,00	0,00	-41.829.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				135 Unit	135 Unit	54.220.000,00	35.000.000,00	59.810.000,00	5.590.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				9 Unit	9 Unit	15.070.000,00	123.000.000,00	130.000.000,00	114.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
146.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**531.379.700,00**	**546.470.700,00**	**346.470.700,00**							**101.804.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	234.638.700,00	249.729.700,00	49.729.700,00							101.804.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	0,00	101.804.000,00	101.804.000,00	101.804.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		101.804.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	200.000.000,00	132.834.700,00	147.925.700,00	-52.074.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	296.741.000,00	296.741.000,00	296.741.000,00							0,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00	67.050.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*				2 Lokus	2 Lokus	0,00	229.691.000,00	229.691.000,00	229.691.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**133.838.900,00**	**78.592.000,00**	**83.592.000,00**	**-50.246.900,00**							**0,00**	
147.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**133.838.900,00**	**78.592.000,00**	**83.592.000,00**	**-50.246.900,00**							**0,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	133.838.900,00	78.592.000,00	83.592.000,00	-50.246.900,00							0,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				2 Berkas	2 Berkas	133.838.900,00	78.592.000,00	83.592.000,00	-50.246.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.25.0.00.0.00.21.0000	**Dinas Perikanan**							**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**							**11.711.939.617,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**							**11.711.939.617,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.088.031.360,00**	**7.794.609.100,00**	**7.541.253.916,00**	**-1.546.777.444,00**							**11.711.939.617,00**	
148.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyakat (IKM)**				**-**	**3,75 Indeks 3,75 Persen**	**6.712.976.660,00**	**6.762.487.900,00**	**7.030.433.716,00**	**317.457.056,00**							**7.480.189.617,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan				-	100 Persen	5.608.460.560,00	5.735.008.000,00	5.788.012.478,00	179.551.918,00							5.544.924.317,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				60 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.608.460.560,00	5.735.008.000,00	5.788.012.478,00	179.551.918,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Indeks Profesionalitas (IP) ASN				-	69.00 Indeks	0,00	0,00	4.482.000,00	4.482.000,00							100.000.000,00	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	4.482.000,00	4.482.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				-	100 Persen	227.668.900,00	221.529.000,00	388.718.338,00	161.049.438,00							662.893.100,00	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	5 Paket	43.491.900,00	41.797.000,00	52.505.348,00	9.013.448,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			119.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6.094.000,00	6.000.000,00	12.018.800,00	5.924.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.893.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				80 Laporan	80 Laporan	178.083.000,00	173.732.000,00	324.194.190,00	146.111.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			480.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah				-	76 Persen	16.428.000,00	0,00	0,00	-16.428.000,00							181.500.000,00	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				15 Unit	2 Unit	16.428.000,00	0,00	0,00	-16.428.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			181.500.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				-	100 Persen	740.603.300,00	672.210.900,00	673.220.900,00	-67.382.400,00							737.872.200,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	3.010.000,00	1.010.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	8.811.700,00	8.018.900,00	8.018.900,00	-792.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				40 Laporan	12 Laporan	729.791.600,00	662.192.000,00	662.192.000,00	-67.599.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			695.872.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kondisi Barang Milik Perangkat Daerah				-	76 Persen	119.815.900,00	133.740.000,00	176.000.000,00	56.184.100,00							253.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				48 Unit	17 Unit	95.565.900,00	109.540.000,00	170.000.000,00	74.434.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				98 Unit	10 Unit	12.050.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	0 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
149.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Produksi Perikanan Tangkap**				**58.811,00 Ton**	**96,10 Persen**	**1.210.992.700,00**	**318.550.000,00**	**318.550.000,00**	**-892.442.700,00**							**3.077.950.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina				2 kegitan	16.61 Persen	1.210.992.700,00	318.550.000,00	318.550.000,00	-892.442.700,00							3.077.950.000,00	
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil*				2 Unit	50 Unit	1.210.992.700,00	318.550.000,00	318.550.000,00	-892.442.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.077.950.000,00	DINAS PERIKANAN
150.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Produksi Perikanan Budidaya**				**-**	**96,10 Persen**	**1.063.838.000,00**	**613.571.200,00**	**92.270.200,00**	**-971.567.800,00**					**Pembudidaya Ikan**		**845.800.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang telah dibina				-	75,18 Persen	113.824.500,00	113.571.200,00	83.770.200,00	-30.054.300,00							197.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*				10 Kelompok	8 Kelompok	113.824.500,00	113.571.200,00	83.770.200,00	-30.054.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			197.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan				-	96,12 Persen	950.013.500,00	500.000.000,00	8.500.000,00	-941.513.500,00							648.800.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				3 Unit	0 Unit	950.013.500,00	500.000.000,00	8.500.000,00	-941.513.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			648.800.000,00	DINAS PERIKANAN
151.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan**				**-**	**96,10 Persen**	**100.224.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-224.000,00**							**308.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Bahan Baku Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota				-	96,10 Persen	100.224.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-224.000,00							308.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				5935.89 Ton	7.52 Ton	100.224.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			308.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.0.00.0.00.21.0001	**UPTD Balai Benih Ikan**							**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**							**178.770.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**							**178.770.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**							**178.770.000,00**	
152.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**				**-**	**96,10 Persen**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**128.761.600,00**	**0,00**							**178.770.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih ikan air tawar				-	69,23 Persen	128.761.600,00	128.761.600,00	128.761.600,00	0,00							178.770.000,00	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				3 Unit	1 Unit	128.761.600,00	128.761.600,00	128.761.600,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			178.770.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.26.0.00.0.00.22.0000	**Dinas Pariwisata**							**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**							**21.503.631.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**							**21.503.631.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**7.416.356.653,00**	**7.880.845.464,00**	**6.794.910.169,00**	**-621.446.484,00**							**21.503.631.000,00**	
153.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**74,55 Persen 90 Persen**	**74,55 Persen 90 Persen**	**5.300.473.415,00**	**5.185.528.804,00**	**5.273.255.019,00**	**-27.218.396,00**					**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**		**9.278.231.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				81 Persen	81 Persen	49.782.800,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-45.482.800,00							56.700.000,00	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	49.782.800,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-45.482.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	4.181.278.115,00	4.471.480.304,00	4.493.559.019,00	312.280.904,00							6.858.531.000,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.181.278.115,00	4.471.480.304,00	4.493.559.019,00	312.280.904,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.858.531.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	447.989.500,00	165.708.500,00	184.692.000,00	-263.297.500,00							1.269.000.000,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.005.000,00	0,00	10.500.000,00	7.495.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	36.308.600,00	10.000.000,00	21.650.000,00	-14.658.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	55.936.900,00	48.000.000,00	10.500.000,00	-45.436.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	26.410.000,00	9.806.500,00	19.389.000,00	-7.021.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	322.140.000,00	97.003.000,00	121.754.000,00	-200.386.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			970.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				5 Dokumen	5 Dokumen	4.189.000,00	899.000,00	899.000,00	-3.290.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				75 Persen	75 Persen	64.514.000,00	0,00	49.676.000,00	-14.838.000,00							240.000.000,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	64.514.000,00	0,00	49.676.000,00	-14.838.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	429.493.000,00	494.014.000,00	446.472.000,00	16.979.000,00							645.000.000,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				10 Laporan	10 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	79.693.000,00	79.693.000,00	25.201.000,00	-54.492.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	345.600.000,00	410.121.000,00	417.071.000,00	71.471.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			568.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	127.416.000,00	50.026.000,00	94.556.000,00	-32.860.000,00							209.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				12 Unit	12 Unit	111.410.000,00	38.690.000,00	73.550.000,00	-37.860.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			119.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	10.150.000,00	5.480.000,00	15.150.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
154.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN**				**-37,03 Persen**	**-37,03 Persen**	**1.593.814.188,00**	**1.830.984.930,00**	**886.940.300,00**	**-706.873.888,00**					**Meningkatnya Daya Tarik WIsata yang dikembangkan Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang dikelola**		**10.634.400.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan				5 Daya Tarik	5 Daya Tarik	883.366.080,00	870.108.700,00	590.889.300,00	-292.476.780,00							2.876.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				5 Lokasi	5 Lokasi	506.877.980,00	476.164.600,00	227.429.200,00	-279.448.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.678.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan*				10 Orang	10 Orang	376.488.100,00	393.944.100,00	363.460.100,00	-13.028.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			198.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola				2 Destinasi	2 Destinasi	710.448.108,00	960.876.230,00	296.051.000,00	-414.397.108,00							7.758.400.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				1 Lokasi	1 Lokasi	710.448.108,00	960.876.230,00	296.051.000,00	-414.397.108,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			7.758.400.000,00	DINAS PARIWISATA
155.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA**				**20 Persen**	**20 Persen**	**419.618.400,00**	**528.678.900,00**	**520.714.900,00**	**101.096.500,00**					**Meningkatnya Promosi Pariwisata**		**1.491.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata				1 Event	1 Event	419.618.400,00	528.678.900,00	520.714.900,00	101.096.500,00							1.491.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*				2 Dokumen	2 Dokumen	97.277.000,00	99.655.900,00	99.655.900,00	2.378.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			698.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	322.341.400,00	429.023.000,00	421.059.000,00	98.717.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			793.000.000,00	DINAS PARIWISATA
156.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI**				**15,63 Persen**	**15,63 Persen**	**102.450.650,00**	**335.652.830,00**	**113.999.950,00**	**11.549.300,00**							**100.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	102.450.650,00	335.652.830,00	113.999.950,00	11.549.300,00							100.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*				2 Laporan	1 Laporan	102.450.650,00	335.652.830,00	113.999.950,00	11.549.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	4.01.0.00.0.00.23.0001	**Bagian Administrasi Pembangunan**							**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**							**770.383.065,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**							**770.383.065,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**457.815.500,00**	**457.815.579,00**	**457.814.639,00**	**-861,00**							**770.383.065,00**	
157.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perangkat daerah dengan nilai predikat BB**				**90 Persen**	**90 Persen**	**122.854.100,00**	**122.854.000,00**	**136.340.610,00**	**13.486.510,00**							**196.383.065,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Darah (LKJIP)				Nilai 70	Nilai 70	122.854.100,00	122.854.000,00	136.340.610,00	13.486.510,00							196.383.065,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	122.854.100,00	122.854.000,00	122.853.610,00	-490,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			175.883.065,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	13.487.000,00	13.487.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
158.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase kepatuhan OPD melaporkan pelaksanaan pembangunan**				**90 persen**	**90 persen**	**334.961.400,00**	**334.961.579,00**	**321.474.029,00**	**-13.487.371,00**							**574.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase capaian kinerja pelaksanaan pembangunan				90 Persen	90 Persen	334.961.400,00	334.961.579,00	321.474.029,00	-13.487.371,00							574.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				1 Laporan	1 Laporan	184.961.800,00	184.961.579,00	171.474.329,00	-13.487.471,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			319.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				12 Laporan	12 Laporan	149.999.600,00	150.000.000,00	149.999.700,00	100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0002	**Bagian Tata Pemerintahan**							**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**							**512.120.773,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**							**512.120.773,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**							**512.120.773,00**	
159.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**599.999.600,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**400,00**							**512.120.773,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	599.999.600,00	600.000.000,00	600.000.000,00	400,00							512.120.773,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			181.815.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			134.605.193,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			195.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0003	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**							**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**							**6.136.169.560,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**							**6.136.169.560,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**							**6.136.169.560,00**	
160.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**11.083.070.000,00**	**10.700.930.000,00**	**10.700.930.000,00**	**-382.140.000,00**							**6.136.169.560,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	11.083.070.000,00	10.700.930.000,00	10.700.930.000,00	-382.140.000,00							6.136.169.560,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				9 Dokumen	9 Dokumen	6.640.750.000,00	6.713.869.720,00	6.623.869.720,00	-16.880.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.312.907.672,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.442.320.000,00	3.987.060.280,00	4.077.060.280,00	-365.259.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.823.261.888,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0004	**Bagian Hukum**							**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**							**500.377.527,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**							**500.377.527,00**	
161.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG TELAH TERDIGITALISASI DAN DAPAT DIAKSES PUBLIK MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH**				**-**	**50 Persen**	**450.000.000,00**	**500.000.000,00**	**567.000.000,00**	**117.000.000,00**							**500.377.527,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				-	690 Dokumen	450.000.000,00	500.000.000,00	567.000.000,00	117.000.000,00							500.377.527,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				690 Dokumen	690 Dokumen	296.081.100,00	255.089.000,00	255.089.000,00	-40.992.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			176.136.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				3 Kasus	3 Kasus	139.146.400,00	229.173.000,00	230.980.000,00	91.833.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.240.967,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				100 Dokumen	100 Dokumen	14.772.500,00	15.738.000,00	80.931.000,00	66.158.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			114.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0005	**Bagian Kerja Sama**							**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**							**0,00**	
162.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektifitas Kerjasama Daerah (%)**				**-**	**83 PERSEN**	**149.999.800,00**	**150.000.000,00**	**149.999.990,00**	**190,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian resmi (MoU/PKS)				-	83 PERSEN	149.999.800,00	150.000.000,00	149.999.990,00	190,00							0,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				20 Dokumen	20 Dokumen	99.998.400,00	76.739.000,00	123.597.990,00	23.599.590,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*				1 Laporan	1 Laporan	50.001.400,00	73.261.000,00	26.402.000,00	-23.599.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0006	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**							**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**							**487.096.586,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**							**487.096.586,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**							**487.096.586,00**	
163.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan pereknomian yang di implementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh semua pihak terkait Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh semua pihak terkait.**				**100 Persen**	**100 Persen**	**351.991.700,00**	**451.500.000,00**	**451.500.000,00**	**99.508.300,00**							**487.096.586,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD Jumlah rapat koordinasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan				3 Notulen rapat	3 Notulen rapat 4 Dokumen	237.234.200,00	296.059.100,00	378.514.548,00	141.280.348,00							381.500.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				1 Dokumen	1 Dokumen	27.583.000,00	129.257.200,00	253.957.200,00	226.374.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				10 Laporan	10 Laporan	144.752.000,00	91.916.000,00	91.916.000,00	-52.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			81.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD*				4 Dokumen	4 Dokumen	64.899.200,00	74.885.900,00	32.641.348,00	-32.257.852,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pemantauan SDA yang disusun				3 Laporan	3 Laporan	114.757.500,00	155.440.900,00	72.985.452,00	-41.772.048,00							105.596.586,00	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	114.757.500,00	155.440.900,00	72.985.452,00	-41.772.048,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah			105.596.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0007	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**							**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**							**900.125.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**							**900.125.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**							**900.125.800,00**	
164.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Nilai Pemanfataan Sistem Pengadaan**				**-**	**25,92 Nilai**	**819.997.900,00**	**820.000.000,00**	**820.000.000,00**	**2.100,00**							**900.125.800,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase nilai pengadaan melalui e-purchasing terhadap total nilai pengadaan				-	50 Persen	819.997.900,00	820.000.000,00	820.000.000,00	2.100,00							900.125.800,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				4 Dokumen	4 Dokumen	319.999.400,00	320.000.000,00	320.000.000,00	600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			346.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				12 Dokumen	12 Dokumen	449.999.800,00	450.000.000,00	450.000.000,00	200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			492.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				30 Orang	30 Orang	49.998.700,00	50.000.000,00	50.000.000,00	1.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Ekonomi Daerah			62.125.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0008	**Bagian Organisasi**							**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**							**0,00**	
165.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**505.740.400,00**	**505.740.467,00**	**525.740.467,00**	**20.000.067,00**							**0,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	505.740.400,00	505.740.467,00	525.740.467,00	20.000.067,00							0,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				2 Dokumen	2 Dokumen	93.000.000,00	93.000.067,00	113.000.067,00	20.000.067,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	62.740.400,00	62.740.400,00	62.740.400,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0009	**Bagian Umum**							**48.367.446.186,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**-2.351.441.872,00**							**41.075.378.673,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**30.734.743.071,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**15.281.261.243,00**							**41.075.378.673,00**	
	4	**NON URUSAN**							**17.632.703.115,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.632.703.115,00**							**0,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.632.703.115,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.632.703.115,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**30.734.743.071,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**15.281.261.243,00**							**41.075.378.673,00**	
166.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**48.367.446.186,00**	**44.931.043.755,00**	**46.016.004.314,00**	**-2.351.441.872,00**					**-**		**41.075.378.673,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.604.179.915,00	19.684.009.133,00	19.806.461.692,00	4.202.281.777,00							14.823.174.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				150 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	0,00	19.684.009.133,00	19.806.461.692,00	19.806.461.692,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.823.174.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				150 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	15.604.179.915,00	0,00	0,00	-15.604.179.915,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	251.449.872,00	41.449.872,00	41.449.872,00	-210.000.000,00							19.014.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				6 Paket	6 Paket	41.449.872,00	41.449.872,00	41.449.872,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.014.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	7.276.877.400,00	6.044.095.050,00	6.702.710.590,00	-574.166.810,00							4.375.992.400,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	499.864.000,00	220.000.000,00	415.828.600,00	-84.035.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			576.324.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	0,00	200.144.300,00	231.582.300,00	231.582.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			166.609.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	166.509.200,00	0,00	0,00	-166.509.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	1.968.400.000,00	2.070.900.000,00	2.070.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			685.187.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	1.652.014.000,00	0,00	0,00	-1.652.014.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				14 Paket	14 Paket	299.980.200,00	354.000.000,00	544.000.000,00	244.019.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			446.578.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	495.900.000,00	128.250.000,00	277.875.000,00	-218.025.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 Laporan	100 Laporan	4.162.610.000,00	3.173.300.750,00	3.162.524.690,00	-1.000.085.310,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.001.293.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.393.999.299,00	1.616.813.000,00	1.690.407.000,00	-4.703.592.299,00							3.123.532.750,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	990.913.000,00	288.528.000,00	288.528.000,00	-702.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	1.757.826.000,00	0,00	0,00	-1.757.826.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	789.488.000,00	206.282.000,00	280.613.000,00	-508.875.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			789.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	1.021.499.000,00	304.253.000,00	626.386.000,00	-395.113.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			803.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	1.396.281.000,00	543.750.000,00	200.000.000,00	-1.196.281.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			492.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	437.992.299,00	274.000.000,00	294.880.000,00	-143.112.299,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			438.532.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.041.684.100,00	4.506.513.600,00	4.467.513.600,00	1.425.829.500,00							3.059.050.286,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	49.992.800,00	49.992.800,00	49.992.800,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.165.791.300,00	2.109.374.800,00	2.109.374.800,00	943.583.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.182.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.825.900.000,00	2.347.146.000,00	2.308.146.000,00	482.246.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.826.270.286,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.230.886.600,00	5.502.125.550,00	6.217.077.624,00	-1.013.808.976,00							6.216.604.287,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				42 Unit	42 Unit	4.717.530.600,00	3.244.669.800,00	3.689.745.324,00	-1.027.785.276,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			3.702.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	1.551.350.000,00	1.041.777.750,00	902.067.750,00	-649.282.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.551.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	962.006.000,00	1.215.678.000,00	1.625.264.550,00	663.258.550,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			962.124.287,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	7.619.009.000,00	6.952.877.550,00	6.402.302.884,00	-1.216.706.116,00							8.508.010.950,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.132.154.000,00	1.478.886.000,00	1.478.887.044,00	346.733.044,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK REKLAME PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.132.154.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	6.486.855.000,00	5.473.991.550,00	4.923.415.840,00	-1.563.439.160,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			7.375.856.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	949.360.000,00	583.160.000,00	688.081.052,00	-261.278.948,00							950.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	500.250.000,00	300.000.000,00	404.921.052,00	-95.328.948,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	449.110.000,00	283.160.000,00	283.160.000,00	-165.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.23.0010	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**							**904.576.530,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**							**904.576.530,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**							**904.576.530,00**	
167.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**472.999.900,00**	**532.999.805,00**	**735.592.422,00**	**262.592.522,00**							**904.576.530,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	472.999.900,00	532.999.805,00	735.592.422,00	262.592.522,00							904.576.530,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	199.999.800,00	200.487.715,00	375.777.485,00	175.777.685,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			443.009.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	152.999.600,00	152.999.400,00	179.351.090,00	26.351.490,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			143.932.990,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	120.000.500,00	179.512.690,00	180.463.847,00	60.463.347,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			317.634.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.24.0000	**Sekretariat DPRD**							**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**							**40.700.454.796,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**							**40.700.454.796,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**28.513.294.234,00**	**36.806.736.217,00**	**36.849.068.879,00**	**8.335.774.645,00**							**40.700.454.796,00**	
168.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**80 Nilai 85 Persen**	**3.45 Indeks 85 Persen**	**21.275.984.234,00**	**23.356.506.824,00**	**24.746.604.046,00**	**3.470.619.812,00**							**21.877.095.368,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				88 Persen	88 Persen	182.822.200,00	147.478.200,00	147.478.200,00	-35.344.000,00							206.880.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	126.992.200,00	101.320.000,00	101.320.000,00	-25.672.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			166.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	55.830.000,00	46.158.200,00	46.158.200,00	-9.671.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.903.430.642,00	6.547.600.175,00	6.586.480.667,00	-1.316.949.975,00							7.854.823.136,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.835.430.642,00	6.406.266.734,00	6.445.147.226,00	-1.390.283.416,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.816.583.136,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00	141.333.441,00	141.333.441,00	73.333.441,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				95 Persen	95 Persen	34.360.000,00	200.512.388,00	200.512.388,00	166.152.388,00							131.568.000,00	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	34.360.000,00	200.512.388,00	200.512.388,00	166.152.388,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			131.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				65 Persen	60 Persen	1.085.227.800,00	1.456.098.289,00	1.648.123.326,00	562.895.526,00							1.970.040.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	75.610.000,00	175.378.869,00	233.214.809,00	157.604.809,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	40.999.800,00	90.000.000,00	110.862.285,00	69.862.485,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	74.000.000,00	103.652.420,00	214.951.232,00	140.951.232,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	449.388.000,00	594.045.000,00	594.045.000,00	144.657.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			624.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				120 Laporan	120 Laporan	445.230.000,00	493.022.000,00	495.050.000,00	49.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			865.440.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				70 Persen	70 Persen	411.530.000,00	438.401.125,00	1.399.592.125,00	988.062.125,00							616.500.000,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				3 Unit	4 Unit	40.175.000,00	27.066.000,00	221.921.000,00	181.746.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				15 Unit	15 Unit	237.684.000,00	252.805.125,00	622.393.125,00	384.709.125,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	28.671.000,00	58.530.000,00	355.278.000,00	326.607.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			186.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	2 Unit	105.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	2.188.638.600,00	2.696.700.775,00	2.677.405.725,00	488.767.125,00							3.032.140.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	397.238.600,00	362.240.000,00	375.844.950,00	-21.393.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			387.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.776.400.000,00	2.319.460.775,00	2.286.560.775,00	510.160.775,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			2.629.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	802.108.000,00	1.486.301.518,00	1.634.360.376,00	832.252.376,00							1.082.500.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				43 Unit	43 Unit	265.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	157.488.000,00	195.107.768,00	248.589.218,00	91.101.218,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	49.600.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	120.020.000,00	288.193.750,00	369.237.706,00	249.217.706,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	520.000.000,00	533.533.452,00	503.533.452,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.687.602.992,00	9.030.004.854,00	8.953.457.489,00	1.265.854.497,00							5.782.644.232,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	7.559.012.992,00	8.528.108.623,00	8.528.108.623,00	969.095.631,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.453.644.232,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	39.016.500,00	39.016.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			229.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*				20 Orang	20 Orang	128.590.000,00	501.896.231,00	386.332.366,00	257.742.366,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD				100 Persen	100 Persen	980.264.000,00	1.353.409.500,00	1.499.193.750,00	518.929.750,00							1.200.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	980.264.000,00	1.353.409.500,00	1.499.193.750,00	518.929.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
169.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam RKPD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**80 Persen**	**60 75 Persen Persen 60 Persen 80 Persen**	**7.237.310.000,00**	**13.450.229.393,00**	**12.102.464.833,00**	**4.865.154.833,00**							**18.823.359.428,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				80 Persen	80 Persen	1.479.699.000,00	2.503.349.106,00	2.503.349.106,00	1.023.650.106,00							2.742.759.900,00	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.479.699.000,00	2.503.349.106,00	2.503.349.106,00	1.023.650.106,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.742.759.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD				85 Persen	85 Persen	1.073.385.000,00	2.088.713.150,00	2.386.674.814,00	1.313.289.814,00							1.580.920.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				40 Dokumen	40 Dokumen	624.920.000,00	1.539.000.000,00	1.551.363.064,00	926.443.064,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			985.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*				3 Orang	3 Orang	46.795.000,00	116.575.000,00	116.575.000,00	69.780.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*				5 Orang	5 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				12 Dokumen	12 Dokumen	114.030.000,00	133.550.000,00	163.550.000,00	49.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			185.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	77.640.000,00	89.588.150,00	345.186.750,00	267.546.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kabupaten				40 Persen	80 Persen	1.872.970.000,00	4.301.346.375,00	4.256.852.375,00	2.383.882.375,00							4.507.940.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				48 Laporan	48 Laporan	606.300.000,00	801.090.000,00	756.596.000,00	150.296.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				60 Dokumen	60 Dokumen	1.266.670.000,00	3.500.256.375,00	3.500.256.375,00	2.233.586.375,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.167.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD				85 Persen	85 Persen	2.811.256.000,00	4.556.820.762,00	2.955.588.538,00	144.332.538,00							9.991.739.528,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				72 Dokumen	72 Dokumen	1.579.160.000,00	3.123.898.032,00	1.832.432.993,00	253.272.993,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.461.899.030,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				72 Dokumen	72 Dokumen	1.232.096.000,00	1.432.922.730,00	1.123.155.545,00	-108.940.455,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.529.840.498,00	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.25.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**							**8.968.366.251,00**	**9.477.774.804,00**	**9.474.611.535,00**	**506.245.284,00**							**10.584.108.283,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.968.366.251,00**	**9.477.774.804,00**	**9.474.611.535,00**	**506.245.284,00**							**10.584.108.283,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.733.310.251,00**	**9.141.496.624,00**	**9.035.136.355,00**	**301.826.104,00**							**9.840.372.889,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
170.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**3.47 Indeks 3.50 88.50 INDEKS % 3.50 INDEKS 3.50 INDEKS 90 Persen**	**3.46 Indeks 88.30 % 90 Persen**	**6.686.576.251,00**	**6.757.865.840,00**	**7.127.377.201,00**	**440.800.950,00**							**6.645.992.051,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				85 %	80 %	13.956.000,00	11.300.000,00	2.300.000,00	-11.656.000,00							16.609.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	4.347.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-2.647.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	9.609.000,00	9.600.000,00	600.000,00	-9.009.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.609.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.614.687.451,00	5.656.653.780,00	5.743.608.111,00	128.920.660,00							5.614.687.451,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5.614.687.451,00	5.656.653.780,00	5.743.608.111,00	128.920.660,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.614.687.451,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran				85 %	81 %	289.449.600,00	332.253.420,00	338.972.790,00	49.523.190,00							347.795.600,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	22.900.500,00	27.826.200,00	34.069.240,00	11.168.740,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.005.400,00	10.005.400,00	16.961.730,00	6.956.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	48.748.100,00	29.720.000,00	32.720.000,00	-16.028.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				130 Laporan	130 Laporan	207.795.600,00	264.701.820,00	255.221.820,00	47.426.220,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			207.795.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				85 Persen	85 Persen	0,00	0,00	212.143.000,00	212.143.000,00							0,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	23 Unit	0,00	0,00	179.643.000,00	179.643.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				-	8 Unit	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran				100 %	100 %	302.750.100,00	276.454.300,00	279.954.300,00	-22.795.800,00							373.900.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	7.092.800,00	7.092.800,00	7.092.800,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	21.626.500,00	21.626.500,00	25.126.500,00	3.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	274.030.800,00	247.735.000,00	247.735.000,00	-26.295.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				85 %	81 %	465.733.100,00	481.204.340,00	550.399.000,00	84.665.900,00							293.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	5 Unit	64.013.100,00	75.406.840,00	129.281.500,00	65.268.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	3.050.000,00	6.050.000,00	21.370.000,00	18.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	398.670.000,00	399.747.500,00	399.747.500,00	1.077.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
171.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase program prioritas nasional yang didukung program prioritas daerah Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir**				**68 % 68 92 % %**	**64 % 87,5 %**	**1.131.812.500,00**	**1.208.111.460,00**	**1.084.139.540,00**	**-47.672.960,00**							**1.590.848.568,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD				74 %	88 %	1.023.687.500,00	891.386.460,00	696.744.540,00	-326.942.960,00							1.192.768.460,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	16.500.000,00	18.951.100,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			21.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	31.310.000,00	31.310.000,00	25.810.000,00	-5.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			48.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	428.468.000,00	428.315.860,00	258.025.040,00	-170.442.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			545.378.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	547.409.500,00	412.809.500,00	412.909.500,00	-134.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			577.409.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah				95 %	90 %	59.547.000,00	59.547.000,00	45.547.000,00	-14.000.000,00							125.814.308,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*				3 Dokumen	3 Dokumen	59.547.000,00	59.547.000,00	45.547.000,00	-14.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.814.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah				75 %	55 %	48.578.000,00	257.178.000,00	341.848.000,00	293.270.000,00							272.265.800,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	48.578.000,00	257.178.000,00	341.848.000,00	293.270.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			272.265.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
172.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**94 %**	**93 %**	**914.921.500,00**	**1.175.519.324,00**	**823.619.614,00**	**-91.301.886,00**							**1.603.532.270,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD				93 %	92 %	210.499.000,00	308.676.784,00	226.247.784,00	15.748.784,00							395.807.610,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				8 Dokumen	6 Dokumen	85.070.000,00	137.469.000,00	115.469.000,00	30.399.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			152.596.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	125.429.000,00	171.207.784,00	110.778.784,00	-14.650.216,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			243.211.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD				93 %	92 %	488.892.500,00	583.972.540,00	407.901.830,00	-80.990.670,00							894.876.660,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				5 Dokumen	4 Dokumen	142.435.500,00	160.564.680,00	110.982.590,00	-31.452.910,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			179.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				5 Laporan	4 Laporan	100.511.000,00	102.510.000,00	54.510.000,00	-46.001.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			173.373.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				5 Dokumen	4 Dokumen	141.364.000,00	216.315.860,00	170.827.240,00	29.463.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			295.482.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				5 Laporan	4 Laporan	104.582.000,00	104.582.000,00	71.582.000,00	-33.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			246.720.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD				93 %	92 %	215.530.000,00	282.870.000,00	189.470.000,00	-26.060.000,00							312.848.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				3 Dokumen	8 Dokumen	122.408.000,00	178.190.000,00	84.790.000,00	-37.618.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.408.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				3 Laporan	8 Laporan	93.122.000,00	104.680.000,00	104.680.000,00	11.558.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			190.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**235.056.000,00**	**336.278.180,00**	**439.475.180,00**	**204.419.180,00**							**743.735.394,00**	
173.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah**				**40 % 40 80 % % 80 %**	**0,71 Rasio 55 %**	**235.056.000,00**	**336.278.180,00**	**439.475.180,00**	**204.419.180,00**							**743.735.394,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan				100 %	100 %	77.852.000,00	77.630.000,00	77.630.000,00	-222.000,00							156.058.994,00	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*				1 Laporan	1 Laporan	77.852.000,00	77.630.000,00	77.630.000,00	-222.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			156.058.994,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan				100 %	100 %	78.850.000,00	150.728.180,00	253.925.180,00	175.075.180,00							293.468.270,00	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*				1 Dokumen	1 Dokumen	78.850.000,00	150.728.180,00	253.925.180,00	175.075.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			293.468.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah				100 %	100 %	78.354.000,00	107.920.000,00	107.920.000,00	29.566.000,00							294.208.130,00	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*				1 Laporan	1 Laporan	78.354.000,00	107.920.000,00	107.920.000,00	29.566.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			294.208.130,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.02.0.00.0.00.26.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**							**141.082.776.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.417.217.386,00**							**196.775.295.500,00**	
	5	**NON URUSAN**							**7.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.205.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**141.075.571.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.410.012.386,00**							**196.775.295.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**141.075.571.644,00**	**139.003.022.940,00**	**105.665.559.258,00**	**-35.410.012.386,00**							**196.775.295.500,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.205.000,00**							**0,00**	
174.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**3,46 Indeks 3,46 Indeks 73,95 Persen**	**11.560.315.243,00**	**12.298.681.074,00**	**11.888.777.883,00**	**328.462.640,00**							**17.669.500.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	60 Persen	46.374.200,00	42.280.000,00	42.280.000,00	-4.094.200,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	46.374.200,00	42.280.000,00	42.280.000,00	-4.094.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75 Orang	100 Persen	8.664.033.843,00	9.417.572.899,00	8.824.151.337,00	160.117.494,00							14.196.700.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	8.664.033.843,00	9.417.572.899,00	8.824.151.337,00	160.117.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.196.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	93 Persen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00							45.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				77 Paket	0 Paket	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	55 Persen	472.713.700,00	503.853.000,00	507.331.906,00	34.618.206,00							966.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	34.999.700,00	35.000.000,00	37.097.406,00	2.097.706,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	5 Paket	50.000.000,00	49.980.000,00	51.310.000,00	1.310.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	80.390.000,00	75.000.000,00	75.051.500,00	-5.338.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				12 Paket	3 Paket	64.536.000,00	93.993.000,00	93.993.000,00	29.457.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				36 Laporan	35 Laporan	242.788.000,00	249.880.000,00	249.880.000,00	7.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			535.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	60 Persen	117.531.000,00	105.974.150,00	250.801.866,00	133.270.866,00							998.500.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	267.716,00	267.716,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			626.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				0 Unit	6 Unit	117.531.000,00	105.974.150,00	140.157.150,00	22.626.150,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			215.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	7 Unit	0,00	0,00	110.377.000,00	110.377.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				12 Bulan	80 Persen	2.152.100.000,00	1.992.145.000,00	1.994.045.000,00	-158.055.000,00							1.169.800.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				0 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				0 Laporan	12 Laporan	585.100.000,00	732.232.000,00	734.132.000,00	149.032.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				0 Laporan	12 Laporan	1.560.000.000,00	1.252.913.000,00	1.252.913.000,00	-307.087.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			945.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				1 Tahun	75 Persen	107.562.500,00	236.856.025,00	249.167.774,00	141.605.274,00							223.500.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				0 Unit	18 Unit	100.357.500,00	100.476.025,00	112.787.774,00	12.430.274,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			172.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	5 Unit	0,00	136.380.000,00	136.380.000,00	136.380.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	5 Unit	7.205.000,00	0,00	0,00	-7.205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
175.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui TKD (% Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**undefined undefined**	**100 Persen 33,50 Persen 90.05 Persen 90,15 Persen**	**128.783.524.101,00**	**124.614.427.794,00**	**91.686.882.104,00**	**-37.096.641.997,00**						**177.554.885.500,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen RKA dan Rancangan APBD kepada DPRD sesuai jadwal Permendagri				2 Dokumen	100 Persen	1.225.000.000,00	1.478.582.000,00	1.646.082.000,00	421.082.000,00							1.337.950.000,00	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*				1 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	579.070.000,00	579.070.000,00	-70.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			709.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*				1 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	580.337.000,00	580.337.000,00	130.337.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			244.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	125.000.000,00	319.175.000,00	486.675.000,00	361.675.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			384.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan				12 ddDokumen	100 Persen	309.978.800,00	787.962.500,00	793.962.500,00	483.983.700,00							732.001.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				1 Dokumen	12 Dokumen	109.997.500,00	218.360.000,00	218.360.000,00	108.362.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			225.945.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*				12 Dokumen	12 Dokumen	99.986.700,00	244.672.500,00	244.672.500,00	144.685.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			306.155.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*				12 Laporan	12 Laporan	99.994.600,00	324.930.000,00	330.930.000,00	230.935.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			199.901.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP				1 Dokumen	90 Persen	380.422.100,00	762.653.394,00	762.653.394,00	382.231.294,00							589.700.000,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	105.008.900,00	237.845.552,00	237.845.552,00	132.836.652,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			218.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*				0 Laporan	1 Laporan	113.855.000,00	259.141.586,00	259.141.586,00	145.286.586,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			101.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	131.138.200,00	113.005.500,00	113.005.500,00	-18.132.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	21.702.800,00	71.801.856,00	71.801.856,00	50.099.056,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*				0 Dokumen	1 Dokumen	8.717.200,00	80.858.900,00	72.858.900,00	64.141.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurnya Belanja transfer, BKK dan BTT				-	100 Persen	126.868.123.201,00	121.585.229.900,00	88.484.184.210,00	-38.383.938.991,00							174.895.234.500,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				4 Laporan	4 Laporan	110.579.887.501,00	107.846.407.800,00	78.123.182.000,00	-32.456.705.501,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			161.888.234.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.622.180.110,00	-3.377.819.890,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	11.288.235.700,00	8.738.822.100,00	8.738.822.100,00	-2.549.413.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.507.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
176.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**-**	**2,63 Persen**	**310.010.700,00**	**1.111.419.952,00**	**1.111.419.952,00**	**801.409.252,00**							**777.910.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tertatausahakan dan teradministrasi dengan baik				2 Dokumen	80 Persen	310.010.700,00	1.111.419.952,00	1.111.419.952,00	801.409.252,00							777.910.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.019.000,00	80.518.500,00	80.518.500,00	50.499.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			298.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	49.991.400,00	476.308.400,00	476.308.400,00	426.317.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			175.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*				0 Dokumen	4 Dokumen	79.994.700,00	269.647.552,00	269.647.552,00	189.652.852,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	150.005.600,00	284.945.500,00	284.945.500,00	134.939.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
177.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**				**-**	**6,98 Persen**	**428.926.600,00**	**978.494.120,00**	**978.479.319,00**	**549.552.719,00**							**773.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB				12 Laporan	0,26 Persen	428.926.600,00	978.494.120,00	978.479.319,00	549.552.719,00							773.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	41.830.000,00	41.830.000,00	-8.170.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				0 Laporan	4 Laporan	109.940.000,00	241.494.000,00	241.479.199,00	131.539.199,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*				45000 Dokumen	49696 Dokumen	100.002.000,00	249.924.380,00	249.924.380,00	149.922.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				1365 Dokumen	1752 Dokumen	129.957.600,00	408.868.500,00	408.868.500,00	278.910.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	39.027.000,00	36.377.240,00	36.377.240,00	-2.649.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.5.04.0.00.27.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**							**7.579.436.625,00**	**7.843.514.159,00**	**7.945.983.884,00**	**366.547.259,00**							**9.520.071.000,00**	
	5	**NON URUSAN**							**168.980.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.980.900,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.410.455.725,00**	**7.843.514.159,00**	**7.945.983.884,00**	**535.528.159,00**							**9.520.071.000,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**168.980.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.980.900,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.232.571.125,00**	**7.662.085.159,00**	**7.764.554.884,00**	**531.983.759,00**							**8.560.000.000,00**	
178.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**3.45 indek 3,45 Indeks**	**5.528.562.325,00**	**6.086.305.159,00**	**6.129.038.084,00**	**600.475.759,00**							**6.718.000.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	75.00 persen	38.976.900,00	50.500.000,00	55.900.000,00	16.923.100,00							82.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	38.976.900,00	0,00	0,00	-38.976.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	0,00	50.500.000,00	55.900.000,00	55.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 pesen	5.176.078.425,00	5.529.283.334,00	5.571.797.659,00	395.719.234,00							5.930.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.176.078.425,00	5.529.283.334,00	5.571.797.659,00	395.719.234,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.930.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	75 persen	167.267.000,00	280.530.600,00	268.349.200,00	101.082.200,00							361.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				9 Paket	9 Paket	20.000.000,00	42.016.200,00	42.016.200,00	22.016.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	8.138.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	4.862.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	33.074.000,00	0,00	0,00	-33.074.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	39.961.400,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	106.055.000,00	185.553.000,00	181.333.000,00	75.278.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	80 persen	106.930.000,00	158.228.225,00	158.228.225,00	51.298.225,00							265.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	23.749.225,00	23.749.225,00	13.749.225,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	5.640.000,00	0,00	0,00	-5.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	91.290.000,00	0,00	0,00	-91.290.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	128.839.000,00	128.839.000,00	128.839.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	9 unit	39.310.000,00	67.763.000,00	74.763.000,00	35.453.000,00							80.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				9 Unit	9 Unit	31.990.000,00	61.663.000,00	68.663.000,00	36.673.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	7.320.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-1.220.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
179.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**				**-**	**25,06 rasio 25,06 Rasio**	**1.872.989.700,00**	**1.575.780.000,00**	**1.635.516.800,00**	**-237.472.900,00**							**1.842.000.000,00**	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN				-	100 persen	394.870.200,00	400.802.000,00	400.802.000,00	5.931.800,00							1.120.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	149.970.400,00	147.367.000,00	147.367.000,00	-2.603.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	244.899.800,00	253.435.000,00	253.435.000,00	8.535.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan				-	67 persen	1.092.233.500,00	1.089.285.500,00	1.089.285.500,00	-2.948.000,00							292.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*				87 Orang	87 Orang	80.239.500,00	83.940.000,00	83.940.000,00	3.700.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*				72 Orang	72 Orang	789.999.000,00	804.143.000,00	804.143.000,00	14.144.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat*				6 Dokumen	3 Dokumen	221.995.000,00	201.202.500,00	201.202.500,00	-20.792.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja				-	100 Persen	385.886.000,00	85.692.500,00	145.429.300,00	-240.456.700,00							430.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.902.000,00	71.290.000,00	131.026.800,00	90.124.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*				3 Orang	3 Orang	344.984.000,00	14.402.500,00	14.402.500,00	-330.581.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**177.884.600,00**	**181.429.000,00**	**181.429.000,00**	**3.544.400,00**							**960.071.000,00**	
180.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**				**-**	**3,12 rasio**	**177.884.600,00**	**181.429.000,00**	**181.429.000,00**	**3.544.400,00**							**960.071.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				-	100 peraen	177.884.600,00	181.429.000,00	181.429.000,00	3.544.400,00							960.071.000,00	
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	177.884.600,00	0,00	0,00	-177.884.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	181.429.000,00	181.429.000,00	181.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			510.071.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.06.0.00.0.00.28.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**							**5.813.407.000,00**	**4.720.993.881,00**	**4.759.737.215,00**	**-1.053.669.785,00**							**7.065.984.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.813.407.000,00**	**4.720.993.881,00**	**4.759.737.215,00**	**-1.053.669.785,00**							**7.065.984.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**5.813.407.000,00**	**4.720.993.881,00**	**4.759.737.215,00**	**-1.053.669.785,00**							**7.065.984.000,00**	
181.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**85 Persen**	**3,45 Nilai 77,20 Persen**	**5.089.665.000,00**	**4.420.993.881,00**	**4.459.737.215,00**	**-629.927.785,00**							**6.164.684.000,00**	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				80 Persen	75 Persen	34.770.000,00	26.679.000,00	5.512.977,00	-29.257.023,00							35.692.000,00	
	5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	34.770.000,00	26.679.000,00	5.512.977,00	-29.257.023,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.692.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	100 Persen	3.330.850.960,00	3.432.612.441,00	3.510.325.842,00	179.474.882,00							4.725.312.000,00	
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.330.850.960,00	3.432.612.441,00	3.510.325.842,00	179.474.882,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Ekonomi Daerah			4.725.312.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				90 Persen	-	49.098.000,00	0,00	0,00	-49.098.000,00							103.000.000,00	
	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	0 Paket	35.190.000,00	0,00	0,00	-35.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				3 Orang	0 Orang	13.908.000,00	0,00	0,00	-13.908.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	169.521.500,00	152.896.840,00	127.417.488,00	-42.104.012,00							438.500.000,00	
	5.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				6 Paket	5 Paket	25.200.000,00	15.525.000,00	13.905.000,00	-11.295.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.512.500,00	21.974.600,00	9.818.800,00	-2.693.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				6 Paket	4 Paket	22.152.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-17.152.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				71 Laporan	71 Laporan	109.657.000,00	105.397.240,00	98.693.688,00	-10.963.312,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			361.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				35 Persen	30 Persen	863.297.540,00	19.972.000,00	19.972.000,00	-843.325.540,00							199.000.000,00	
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	0 Unit	585.486.000,00	0,00	0,00	-585.486.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				4 Unit	0 Unit	36.030.000,00	0,00	0,00	-36.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	2 Unit	232.429.000,00	19.972.000,00	19.972.000,00	-212.457.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	0 Unit	9.352.540,00	0,00	0,00	-9.352.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	548.369.000,00	328.937.600,00	327.618.100,00	-220.750.900,00							559.300.000,00	
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	14.000.000,00	18.046.900,00	-10.953.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	52.988.000,00	52.813.600,00	47.447.200,00	-5.540.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.600.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	466.381.000,00	262.124.000,00	262.124.000,00	-204.257.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			473.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	93.758.000,00	459.896.000,00	468.890.808,00	375.132.808,00							103.880.000,00	
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	39.000.000,00	37.980.000,00	43.974.808,00	4.974.808,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	5 Unit	6.710.000,00	7.320.000,00	10.320.000,00	3.610.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.880.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	45.318.000,00	414.596.000,00	414.596.000,00	369.278.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	0 Unit	2.730.000,00	0,00	0,00	-2.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
182.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan**				**75 Persen undefined undefined**	**75 Persen**	**723.742.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-423.742.000,00**							**901.300.000,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama				30 Persen	30 Persen	190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-90.000.000,00							154.900.000,00	
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	*Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			154.900.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				75 Persen	75 Persen	391.742.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-291.742.000,00							558.400.000,00	
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan*				1 Dokumen	1 Dokumen	197.030.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-97.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			313.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	*Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara*				2 Dokumen	0 Dokumen	194.712.000,00	0,00	0,00	-194.712.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			244.700.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi				80 Persen	80 Persen	142.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-42.000.000,00							188.000.000,00	
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan*				1 Dokumen	1 Dokumen	142.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			188.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	6.01.0.00.0.00.29.0000	**Inspektorat Daerah**							**17.390.643.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.684.136.832,00**							**12.216.154.304,00**	
	6	**NON URUSAN**							**40.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.277.000,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.350.366.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.643.859.832,00**							**12.216.154.304,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**17.350.366.816,00**	**17.436.386.584,00**	**15.706.506.984,00**	**-1.643.859.832,00**							**12.216.154.304,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**40.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.277.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
183.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**89,07 NILAI NILAI 89,07**	**87,78 NILAI NILAI 87,78**	**15.107.833.216,00**	**15.048.713.804,00**	**13.314.279.004,00**	**-1.793.554.212,00**					**Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah Meningkatnya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Nilai LKIJ Pemerintah Daerah Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Di kantor Inspektorat Daerah Meningkatnya Sarana Administrasi Umum di Inspektorat Daerah Meningkatnya Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kantor Inspektorat Daerah**		**9.666.723.136,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	118.017.700,00	164.338.190,00	159.651.590,00	41.633.890,00							100.111.052,00	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	118.017.700,00	164.338.190,00	159.651.590,00	41.633.890,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.111.052,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	9.377.933.088,00	9.596.831.079,00	9.704.723.284,00	326.790.196,00							6.939.598.874,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	9.377.933.088,00	9.596.831.079,00	9.704.723.284,00	326.790.196,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.939.598.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun				100 Persen	4,00 Persen	2.511.533.800,00	1.737.507.540,00	1.511.098.350,00	-1.000.435.450,00							860.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	118.003.800,00	123.165.000,00	123.165.000,00	5.161.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				22 Orang	22 Orang	2.393.530.000,00	1.614.342.540,00	1.387.933.350,00	-1.005.596.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	641.125.500,00	667.869.830,00	737.435.930,00	96.310.430,00							521.285.210,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.361.000,00	31.719.000,00	31.719.000,00	11.358.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	84.404.400,00	24.820.000,00	37.135.900,00	-47.268.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	66.504.000,00	17.588.000,00	11.841.200,00	-54.662.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	29.761.100,00	26.269.600,00	26.426.600,00	-3.334.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 Laporan	60 Laporan	440.095.000,00	567.473.230,00	630.313.230,00	190.218.230,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			436.285.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	1.765.126.528,00	2.225.400.165,00	470.924.500,00	-1.294.202.028,00							669.500.000,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	83.722.000,00	0,00	28.000.000,00	-55.722.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	0,00	62.786.000,00	62.786.000,00	62.786.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	40.277.000,00	0,00	0,00	-40.277.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				82 Unit	39 Unit	905.361.500,00	1.490.322.500,00	350.322.500,00	-555.039.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			146.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				64 Unit	64 Unit	35.904.800,00	34.520.000,00	29.816.000,00	-6.088.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	699.861.228,00	637.771.665,00	0,00	-699.861.228,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	251.953.900,00	232.366.200,00	254.983.150,00	3.029.250,00							218.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	4.990.700,00	4.990.700,00	7.979.400,00	2.988.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	11.900.000,00	8.998.500,00	8.998.500,00	-2.901.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	235.063.200,00	218.377.000,00	238.005.250,00	2.942.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			201.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	442.142.700,00	424.400.800,00	475.462.200,00	33.319.500,00							357.728.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	106.944.000,00	117.503.100,00	117.503.100,00	10.559.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	2 Unit	70.050.700,00	33.375.700,00	69.437.100,00	-613.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			128.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	64.580.000,00	59.350.000,00	74.350.000,00	9.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			174.728.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.040.000,00	114.040.000,00	114.040.000,00	14.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.528.000,00	100.132.000,00	100.132.000,00	-396.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
184.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Penanganan Kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP**				**66,50 PERSEN 84,30 PERSEN**	**66,50 Persen 90,450 Persen**	**1.346.776.600,00**	**1.377.482.180,00**	**1.382.037.680,00**	**35.261.080,00**					**Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal**		**1.346.169.570,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Kabupaten				100 Persen	100 Persen	931.745.500,00	960.082.000,00	964.637.500,00	32.892.000,00							910.137.070,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				49 Laporan	49 Laporan	173.688.000,00	173.682.900,00	173.682.900,00	-5.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.927.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	199.172.500,00	223.053.100,00	238.453.100,00	39.280.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				4 Laporan	4 Laporan	69.943.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00	-143.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				47 Laporan	47 Laporan	79.350.000,00	64.350.000,00	64.350.000,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				10 Laporan	10 Laporan	185.852.000,00	185.730.000,00	185.730.000,00	-122.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			158.407.570,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				9 Kesepakatan	9 Kesepakatan	44.500.000,00	48.916.000,00	5.550.000,00	-38.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				4 Dokumen	4 Dokumen	179.240.000,00	194.550.000,00	227.071.500,00	47.831.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			216.452.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat				100 Persen	100 Persen	415.031.100,00	417.400.180,00	417.400.180,00	2.369.080,00							436.032.500,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				2 Laporan	2 Laporan	75.047.600,00	72.885.560,00	72.885.560,00	-2.162.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				8 Laporan	10 Laporan	339.983.500,00	344.514.620,00	344.514.620,00	4.531.120,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			236.032.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
185.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Kapabilitas APIP PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DIUSULKAN DAN LOLOS SELEKSI TPN Nilai Manajemen Risiko (MR)**				**8,51 PERSEN**	**3000 8,51 Nilai PERSEN 3018 Nilai**	**936.034.000,00**	**1.010.190.600,00**	**1.010.190.300,00**	**74.156.300,00**					**Meningkatnya OPD yang didampingi**		**1.203.261.598,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100 Persen	100 Persen	15.595.000,00	0,00	2.750.000,00	-12.845.000,00							100.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	15.595.000,00	0,00	2.750.000,00	-12.845.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas				100 Persen	100 Persen	920.439.000,00	1.010.190.600,00	1.007.440.300,00	87.001.300,00							1.103.261.598,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	359.955.000,00	450.818.200,00	448.067.900,00	88.112.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			503.261.598,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	99.984.000,00	99.925.000,00	99.925.000,00	-59.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000,00	298.987.600,00	298.987.600,00	-1.012.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	160.500.000,00	160.459.800,00	160.459.800,00	-40.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7.01.4.01.0.00.31.0000	**Kecamatan Bunguran Timur**							**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**							**8.663.534.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**							**8.663.534.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.164.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**35.382.768,00**							**8.663.534.900,00**	
186.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**85 Persen 85 PERSEN**	**85 Persen 85 PERSEN**	**7.142.635.570,00**	**6.936.220.632,00**	**7.200.018.338,00**	**57.382.768,00**							**8.603.534.900,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	5.833.065.970,00	5.949.777.032,00	6.057.336.118,00	224.270.148,00							6.346.020.012,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5.833.065.970,00	5.949.777.032,00	6.057.336.118,00	224.270.148,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	433.008.600,00	208.377.180,00	174.115.800,00	-258.892.800,00							614.364.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	47.982.500,00	0,00	0,00	-47.982.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	5.376.000,00	5.376.000,00	-5.624.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	6.481.300,00	6.481.300,00	-43.518.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	55.961.100,00	33.773.200,00	33.773.200,00	-22.187.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	261.065.000,00	162.746.680,00	128.485.300,00	-132.579.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			314.364.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				75 Persen	75 Persen	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00							400.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	758.126.000,00	726.419.600,00	726.419.600,00	-31.706.400,00							944.715.888,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	-2.790.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	39.209.600,00	39.209.600,00	-20.790.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	690.126.000,00	682.000.000,00	682.000.000,00	-8.126.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			876.715.888,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				75 Persen	75 Persen	118.435.000,00	51.646.820,00	184.146.820,00	65.711.820,00							298.435.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	68.435.000,00	41.496.820,00	37.996.820,00	-30.438.180,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	-39.850.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
187.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				55 Laporan	55 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.31.0001	**Kelurahan Ranai Kota**							**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**840.045.000,00**	**926.045.000,00**	**975.045.000,00**	**135.000.000,00**							**465.889.500,00**	
188.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**390.000.000,00**	**476.000.000,00**	**525.000.000,00**	**135.000.000,00**							**265.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				55 Koordinasi	55 Koordinasi	390.000.000,00	476.000.000,00	525.000.000,00	135.000.000,00							265.889.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	390.000.000,00	476.000.000,00	525.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			265.889.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
189.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**450.045.000,00**	**450.045.000,00**	**450.045.000,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan				4 Koordinasi	4 Koordinasi	450.045.000,00	450.045.000,00	450.045.000,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	450.045.000,00	450.045.000,00	450.045.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.31.0002	**Kelurahan Bandarsyah**							**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**498.750.000,00**	**582.750.000,00**	**728.668.000,00**	**229.918.000,00**							**465.889.500,00**	
190.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**396.000.000,00**	**480.000.000,00**	**625.918.000,00**	**229.918.000,00**							**265.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				55 Koordinasi	55 Koordinasi	396.000.000,00	480.000.000,00	625.918.000,00	229.918.000,00							265.889.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	396.000.000,00	480.000.000,00	625.918.000,00	229.918.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			265.889.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
191.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan				4 Koordinasi	4 Koordinasi	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.31.0003	**Kelurahan Ranai Darat**							**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**							**465.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**							**465.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**367.950.000,00**	**438.950.000,00**	**477.370.000,00**	**109.420.000,00**							**465.889.500,00**	
192.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**265.200.000,00**	**336.200.000,00**	**374.620.000,00**	**109.420.000,00**							**265.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				55 Koordinasi	55 Koordinasi	265.200.000,00	336.200.000,00	374.620.000,00	109.420.000,00							265.889.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	336.200.000,00	374.620.000,00	109.420.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			265.889.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
193.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**102.750.000,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan				4 Koordinasi	4 Koordinasi	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	102.750.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Darat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.31.0004	**Kelurahan Batu Hitam**							**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**							**268.889.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**							**268.889.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**							**268.889.500,00**	
194.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**282.000.000,00**	**413.000.000,00**	**454.000.000,00**	**172.000.000,00**							**268.889.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				55 Koordinasi	55 Koordinasi	282.000.000,00	413.000.000,00	454.000.000,00	172.000.000,00							268.889.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	282.000.000,00	413.000.000,00	454.000.000,00	172.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Batu Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			268.889.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.32.0000	**Kecamatan Bunguran Barat**							**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**							**50.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**							**50.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.127.622.823,00**	**4.196.375.600,00**	**4.285.518.957,00**	**157.896.134,00**							**50.000.000,00**	
195.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.057.936.723,00**	**4.149.897.600,00**	**4.239.194.957,00**	**181.258.234,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.342.714.723,00	3.458.409.000,00	3.512.161.636,00	169.446.913,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.342.714.723,00	3.458.409.000,00	3.512.161.636,00	169.446.913,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	218.386.500,00	128.909.400,00	155.557.490,00	-62.829.010,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	17.447.500,00	18.839.400,00	19.919.400,00	2.471.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	16.304.000,00	26.000.000,00	28.545.000,00	12.241.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.865.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-6.365.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				8 Laporan	8 Laporan	171.770.000,00	77.570.000,00	100.593.090,00	-71.176.910,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	401.540.000,00	473.014.000,00	481.910.631,00	80.370.631,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	21.445.000,00	21.445.000,00	20.845.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	36.200.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-5.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	364.740.000,00	420.969.000,00	429.865.631,00	65.125.631,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.295.500,00	89.565.200,00	89.565.200,00	-5.730.300,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	41.655.500,00	71.305.200,00	71.305.200,00	29.649.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	14.600.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	19.520.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-14.640.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	19.520.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-14.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
196.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**21.356.100,00**	**20.950.000,00**	**20.950.000,00**	**-406.100,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	21.356.100,00	20.950.000,00	20.950.000,00	-406.100,00							0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	21.356.100,00	20.950.000,00	20.950.000,00	-406.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
197.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**8.220.000,00**	**8.220.000,00**	**2.220.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	6.000.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	2.220.000,00							0,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	2.220.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
198.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**42.330.000,00**	**17.308.000,00**	**17.154.000,00**	**-25.176.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	42.330.000,00	17.308.000,00	17.154.000,00	-25.176.000,00							50.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	36.000.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00	-21.472.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	6.330.000,00	2.780.000,00	2.626.000,00	-3.704.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.4.01.0.00.32.0001	**Kelurahan Sedanau**							**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**							**0,00**	
199.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**533.600.000,00**	**533.600.000,00**	**594.600.369,00**	**61.000.369,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	533.600.000,00	533.600.000,00	594.600.369,00	61.000.369,00							0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	533.600.000,00	533.600.000,00	594.600.369,00	61.000.369,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Sedanau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.4.01.0.00.33.0000	**Kecamatan Bunguran Utara**							**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**							**3.894.080.346,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**							**3.894.080.346,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.693.714.429,00**	**2.762.606.400,00**	**2.831.516.670,00**	**137.802.241,00**							**3.894.080.346,00**	
200.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**80 Persen**	**80 Persen**	**2.673.038.029,00**	**2.737.540.300,00**	**2.806.450.570,00**	**133.412.541,00**							**3.602.310.346,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.139.044.029,00	2.222.698.000,00	2.243.613.070,00	104.569.041,00							2.645.500.346,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.139.044.029,00	2.222.698.000,00	2.243.613.070,00	104.569.041,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				60 Persen	60 Persen	87.096.500,00	108.729.000,00	149.674.200,00	62.577.700,00							416.310.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	20.032.700,00	19.261.000,00	25.759.200,00	5.726.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.968.000,00	11.968.000,00	11.968.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.018.800,00	25.000.000,00	27.000.000,00	16.981.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	45.077.000,00	52.500.000,00	84.947.000,00	39.870.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			235.310.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	355.237.500,00	371.613.300,00	371.613.300,00	16.375.800,00							440.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	14.987.500,00	27.625.300,00	27.625.300,00	12.637.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	334.250.000,00	340.988.000,00	340.988.000,00	6.738.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			419.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	91.660.000,00	34.500.000,00	41.550.000,00	-50.110.000,00							100.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	82.000.000,00	28.240.000,00	34.600.000,00	-47.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	9.660.000,00	6.260.000,00	6.950.000,00	-2.710.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
201.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.676.400,00**	**25.066.100,00**	**25.066.100,00**	**4.389.700,00**							**291.770.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				50 Koordinasi	50 Koordinasi	20.676.400,00	25.066.100,00	25.066.100,00	4.389.700,00							291.770.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	20.676.400,00	25.066.100,00	25.066.100,00	4.389.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			291.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.4.01.0.00.34.0000	**Kecamatan Pulau Laut**							**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**							**3.894.601.899,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**							**3.894.601.899,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.690.895.310,00**	**2.610.164.875,00**	**2.669.086.372,00**	**-21.808.938,00**							**3.894.601.899,00**	
202.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.640.687.310,00**	**2.559.956.875,00**	**2.610.260.372,00**	**-30.426.938,00**							**3.327.431.899,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.002.399.510,00	2.057.748.075,00	2.098.471.982,00	96.072.472,00							2.142.140.899,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.002.399.510,00	2.057.748.075,00	2.098.471.982,00	96.072.472,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	140.910.400,00	153.553.400,00	172.632.990,00	31.722.590,00							443.291.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00	-10.095.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	70.004.000,00	69.990.000,00	63.360.000,00	-6.644.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.343.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	12.657.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.014.400,00	14.014.400,00	14.568.990,00	554.590,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				52 Laporan	52 Laporan	34.454.000,00	34.454.000,00	69.704.000,00	35.250.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			362.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	454.926.200,00	318.847.200,00	309.347.200,00	-145.579.000,00							352.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	10.400.200,00	10.400.200,00	10.400.200,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	438.526.000,00	302.447.000,00	292.947.000,00	-145.579.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.451.200,00	29.808.200,00	29.808.200,00	-12.643.000,00							390.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	20.003.200,00	29.808.200,00	29.808.200,00	9.805.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			310.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	22.448.000,00	0,00	0,00	-22.448.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
203.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 persen**	**100 persen**	**50.208.000,00**	**50.208.000,00**	**58.826.000,00**	**8.618.000,00**							**567.170.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				70 Koordinasi	70 Koordinasi	50.208.000,00	50.208.000,00	58.826.000,00	8.618.000,00							567.170.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				100 Laporan	100 Laporan	50.208.000,00	50.208.000,00	58.826.000,00	8.618.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			567.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.4.01.0.00.35.0000	**Kecamatan Midai**							**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**							**4.092.235.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**							**4.092.235.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**							**4.092.235.000,00**	
204.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**85 %**	**85 %**	**3.478.353.404,00**	**3.554.209.620,00**	**3.576.281.643,00**	**97.928.239,00**							**4.092.235.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.724.043.504,00	2.826.646.720,00	2.848.718.743,00	124.675.239,00							3.132.924.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	2.724.043.504,00	2.826.646.720,00	2.848.718.743,00	124.675.239,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.132.924.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				55 %	55 %	185.628.400,00	215.446.200,00	215.446.200,00	29.817.800,00							281.311.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.993.400,00	13.893.400,00	13.893.400,00	1.900.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	9.965.000,00	20.003.800,00	20.003.800,00	10.038.800,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	38.286.000,00	19.143.000,00	19.143.000,00	-19.143.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	12.910.000,00	12.910.000,00	7.910.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				52 Laporan	52 Laporan	120.384.000,00	149.496.000,00	149.496.000,00	29.112.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			214.311.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 %	100 %	483.341.500,00	442.776.700,00	442.776.700,00	-40.564.800,00							543.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	19.391.700,00	19.391.700,00	11.391.700,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	59.949.500,00	56.900.000,00	56.900.000,00	-3.049.500,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	415.392.000,00	366.485.000,00	366.485.000,00	-48.907.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			475.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.340.000,00	69.340.000,00	69.340.000,00	-16.000.000,00							135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	65.340.000,00	49.340.000,00	49.340.000,00	-16.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.4.01.0.00.35.0001	**Kelurahan Sabang Barat**							**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**							**533.630.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**							**533.630.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**							**533.630.000,00**	
205.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**316.700.000,00**	**316.700.000,00**	**354.700.000,00**	**38.000.000,00**							**533.630.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	316.700.000,00	316.700.000,00	354.700.000,00	38.000.000,00							533.630.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	316.700.000,00	316.700.000,00	354.700.000,00	38.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			533.630.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.4.01.0.00.36.0000	**Kecamatan Serasan**							**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.441.923,00**	**-136.576.804,00**							**5.337.130.714,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**							**175.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**							**175.000.000,00**	
206.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN**				**20 Persen**	**20 Persen**	**0,00**	**0,00**	**33.729,00**	**33.729,00**							**175.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	33.729,00	33.729,00							175.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	33.729,00	33.729,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.408.194,00**	**-136.610.533,00**							**5.162.130.714,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.095.018.727,00**	**3.888.278.000,00**	**3.958.408.194,00**	**-136.610.533,00**							**5.162.130.714,00**	
207.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**77.30 Nilai 90 Persen**	**77.30 Nilai 90 Persen**	**3.971.868.727,00**	**3.783.868.000,00**	**3.853.653.359,00**	**-118.215.368,00**							**4.350.780.714,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				64.00 Persen	64.00 Persen	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00							20.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.021.705.038,00	3.113.250.000,00	3.137.082.279,00	115.377.241,00							3.233.420.714,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.021.705.038,00	3.113.250.000,00	3.137.082.279,00	115.377.241,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				95 Persen	95 Persen	0,00	0,00	17.064.090,00	17.064.090,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	17.064.090,00	17.064.090,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				80 Persen	80 Persen	91.360.000,00	81.700.000,00	109.625.000,00	18.265.000,00							351.360.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				0 0	0 0	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	12.350.000,00	25.365.000,00	15.365.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	24.360.000,00	24.850.000,00	39.760.000,00	15.400.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.360.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							40.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	593.803.689,00	525.918.000,00	525.531.596,00	-68.272.093,00							526.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	8.000.000,00	7.613.596,00	5.613.596,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	565.803.689,00	493.918.000,00	493.918.000,00	-71.885.689,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			480.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	65.000.000,00	63.000.000,00	64.342.554,00	-657.446,00							165.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	55.000.000,00	51.000.000,00	52.342.554,00	-2.657.446,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			145.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
208.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**123.150.000,00**	**104.410.000,00**	**104.410.000,00**	**-18.740.000,00**							**583.150.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				12 Koordinasi	12 Koordinasi	123.150.000,00	104.410.000,00	104.410.000,00	-18.740.000,00							583.150.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	123.150.000,00	104.410.000,00	104.410.000,00	-18.740.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			583.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
209.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**41.412,00**	**41.412,00**							**103.200.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	41.412,00	41.412,00							103.200.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	41.412,00	41.412,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
210.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**10 Persen**	**10 Persen**	**0,00**	**0,00**	**53.497,00**	**53.497,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	53.497,00	53.497,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	53.497,00	53.497,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
211.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**249.926,00**	**249.926,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	249.926,00	249.926,00							75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	249.926,00	249.926,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.4.01.0.00.36.0001	**Kelurahan Serasan**							**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**							**1.256.213.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**							**1.256.213.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**426.640.270,00**	**427.213.000,00**	**477.213.000,00**	**50.572.730,00**							**1.256.213.000,00**	
212.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**				**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**425.858.270,00**	**425.858.270,00**	**475.858.270,00**	**50.000.000,00**					**-**		**426.213.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				undefined undefined	undefined undefined	425.858.270,00	425.858.270,00	475.858.270,00	50.000.000,00							426.213.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	425.858.270,00	425.858.270,00	475.858.270,00	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			426.213.000,00	KECAMATAN SERASAN
213.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**782.000,00**	**1.354.730,00**	**1.354.730,00**	**572.730,00**					**-**		**830.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				undefined undefined	undefined undefined	782.000,00	1.354.730,00	1.354.730,00	572.730,00							830.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	782.000,00	1.354.730,00	1.354.730,00	572.730,00	Kab. Natuna, Serasan, Serasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			830.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.4.01.0.00.37.0000	**Kecamatan Subi**							**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**							**3.724.586.947,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**							**3.724.586.947,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.443.658.259,00**	**3.369.907.400,00**	**3.434.138.742,00**	**-9.519.517,00**							**3.724.586.947,00**	
214.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP** **PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.411.666.259,00**	**3.327.907.400,00**	**3.392.138.742,00**	**-19.527.517,00**							**3.383.586.947,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.486.224.859,00	2.549.163.000,00	2.563.395.742,00	77.170.883,00							1.815.387.314,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.486.224.859,00	2.549.163.000,00	2.563.395.742,00	77.170.883,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.815.387.314,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	127.970.500,00	149.028.200,00	183.012.200,00	55.041.700,00							564.213.633,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	40.008.500,00	30.008.200,00	30.008.200,00	-10.000.300,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	11.968.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-4.968.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	KECAMATAN SUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	26.026.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-4.026.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	49.968.000,00	90.020.000,00	124.004.000,00	74.036.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			401.213.633,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	643.300.900,00	524.331.000,00	530.345.600,00	-112.955.300,00							501.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	-3.730.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	37.800.900,00	39.250.000,00	45.264.600,00	7.463.700,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	598.500.000,00	481.811.000,00	481.811.000,00	-116.689.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			470.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				80 Persen	80 Persen	154.170.000,00	105.385.200,00	115.385.200,00	-38.784.800,00							502.986.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	139.970.000,00	98.435.200,00	108.435.200,00	-31.534.800,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			482.986.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	14.200.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	-7.250.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN SUBI
215.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**31.992.000,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**10.008.000,00**							**341.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				70 Koordinasi	70 Koordinasi	31.992.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	10.008.000,00							341.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	31.992.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	10.008.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			341.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.4.01.0.00.38.0000	**Kecamatan Pulau Tiga**							**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**							**2.733.009.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**							**2.733.009.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.091.433.352,00**	**2.063.786.034,00**	**2.094.521.393,00**	**3.088.041,00**							**2.733.009.000,00**	
216.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**MENINGKATNYA KINERJAPEGAWAI Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**				**90 Persen**	**1 laporan 1 90 Persen**	**2.041.609.352,00**	**2.014.274.034,00**	**2.045.009.393,00**	**3.400.041,00**					**PEGAWAI KECAMATAN**		**2.614.377.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	1.598.119.252,00	1.657.968.234,00	1.689.474.993,00	91.355.741,00							1.993.137.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.598.119.252,00	1.657.968.234,00	1.689.474.993,00	91.355.741,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.993.137.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT				-	1 laporan 1	0,00	0,00	16.954.000,00	16.954.000,00							0,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				-	1 Orang	0,00	0,00	16.954.000,00	16.954.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana administrasi umum kantor yang disediakan dibagi jumlah sarana administrasi umum kantor yang dibutuhkan dikali seratus				70 Persen	70 Persen	117.246.300,00	117.224.400,00	105.224.400,00	-12.021.900,00							181.140.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	32.913.900,00	32.851.200,00	32.851.200,00	-62.700,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.990.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	7.979.900,00	7.436.200,00	7.436.200,00	-543.700,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	23.952.500,00	20.500.000,00	8.500.000,00	-15.452.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	52.400.000,00	56.437.000,00	56.437.000,00	4.037.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.150.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa sarana penunjang urusan kantor yang tersedia dibagi jumlah sarana penunjang urusan kantor yang dibutuhkan dikali seratus				100 Persen	100 Persen	281.048.000,00	204.981.400,00	204.981.400,00	-76.066.600,00							375.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.187.900,00	2.187.900,00	2.187.900,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	35.400.100,00	29.950.500,00	29.950.500,00	-5.449.600,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.400.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	243.460.000,00	172.843.000,00	172.843.000,00	-70.617.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			337.500.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana kantor dikali seratus				70 Persen	70 Persen	45.195.800,00	34.100.000,00	28.374.600,00	-16.821.200,00							65.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				0 Unit	0 Unit	32.995.800,00	28.000.000,00	24.274.600,00	-8.721.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	12.200.000,00	6.100.000,00	4.100.000,00	-8.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
217.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**49.824.000,00**	**49.512.000,00**	**49.512.000,00**	**-312.000,00**							**118.632.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				70 Koordinasi	70 Koordinasi	49.824.000,00	49.512.000,00	49.512.000,00	-312.000,00							118.632.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	49.824.000,00	49.512.000,00	49.512.000,00	-312.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.632.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.4.01.0.00.39.0000	**Kecamatan Bunguran Tengah**							**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**							**3.178.565.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**							**3.178.565.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.509.223.440,00**	**2.537.722.460,00**	**2.362.413.068,00**	**-146.810.372,00**							**3.178.565.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
218.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**				**100 Persen 70 Persen 80 Persen**	**100 Persen 70 Persen 80 Persen**	**2.468.234.680,00**	**2.499.039.480,00**	**2.323.730.088,00**	**-144.504.592,00**						**3.128.565.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.931.146.680,00	1.971.537.698,00	1.997.730.448,00	66.583.768,00							2.429.965.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Bulan Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	1.931.146.680,00	1.971.537.698,00	1.997.730.448,00	66.583.768,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.429.965.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	91.634.000,00	105.471.300,00	96.548.300,00	4.914.300,00							185.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	34.000.500,00	13.720.300,00	13.720.300,00	-20.280.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.946.500,00	904.000,00	904.000,00	-5.042.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				60 Paket	60 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.997.000,00	5.472.000,00	7.049.000,00	2.052.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				32 Laporan	32 Laporan	36.690.000,00	75.375.000,00	64.875.000,00	28.185.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	193.590.000,00	192.579.142,00	0,00	-193.590.000,00							200.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Paket Unit	1 Paket Unit	193.590.000,00	192.579.142,00	0,00	-193.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	219.458.600,00	207.345.940,00	207.345.940,00	-12.112.660,00							280.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	17.194.600,00	10.595.640,00	10.595.640,00	-6.598.960,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	13.097.000,00	7.435.300,00	7.435.300,00	-5.661.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	189.167.000,00	189.315.000,00	189.315.000,00	148.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	32.405.400,00	22.105.400,00	22.105.400,00	-10.300.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	22.995.400,00	19.955.400,00	19.955.400,00	-3.040.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	2 Unit	9.410.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-7.260.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
219.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan**				**70 Laporan**	**70 Laporan**	**40.988.760,00**	**38.682.980,00**	**38.682.980,00**	**-2.305.780,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.988.760,00	38.682.980,00	38.682.980,00	-2.305.780,00							50.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	40.988.760,00	38.682.980,00	38.682.980,00	-2.305.780,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.4.01.0.00.40.0000	**Kecamatan Bunguran Timur Laut**							**2.708.512.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**18.162.478,00**							**2.196.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**							**2.196.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**							**2.196.000.000,00**	
220.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.676.820.530,00**	**2.702.533.210,00**	**2.726.675.008,00**	**49.854.478,00**							**2.196.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.856.823.330,00	1.896.361.330,00	1.920.503.128,00	63.679.798,00							1.438.588.956,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				19 0	19 0	1.856.823.330,00	1.896.361.330,00	1.920.503.128,00	63.679.798,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.438.588.956,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	84.870.800,00	132.483.280,00	132.483.280,00	47.612.480,00							83.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	26.413.800,00	41.900.000,00	41.900.000,00	15.486.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	57.457.000,00	87.583.280,00	87.583.280,00	30.126.280,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	143.340.000,00	153.861.000,00	153.861.000,00	10.521.000,00							83.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	143.340.000,00	153.861.000,00	153.861.000,00	10.521.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	539.426.000,00	474.360.000,00	474.360.000,00	-65.066.000,00							539.311.044,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	520.000,00	520.000,00	20.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	37.126.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	-526.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	501.800.000,00	437.240.000,00	437.240.000,00	-64.560.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			501.811.044,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.360.400,00	45.467.600,00	45.467.600,00	-6.892.800,00							52.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	42.010.400,00	39.302.600,00	39.302.600,00	-2.707.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	10.350.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	-4.185.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**							**0,00**	
	7	**NON URUSAN**							**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**							**0,00**	
221.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
222.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**21.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.692.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	21.692.000,00	0,00	0,00	-21.692.000,00							0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	21.692.000,00	0,00	0,00	-21.692.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.4.01.0.00.41.0000	**Kecamatan Bunguran Selatan**							**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**							**3.314.093.606,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**							**3.314.093.606,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.209.801.064,00**	**2.186.317.558,00**	**2.253.305.230,00**	**43.504.166,00**							**3.314.093.606,00**	
223.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah .Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**76,40 persen 76,40 Persen 77,20 Persen**	**2.184.093.064,00**	**2.160.417.558,00**	**2.227.405.230,00**	**43.312.166,00**							**3.174.623.606,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.672.630.220,00-893.098.810,00 J				-	10 orang/bulan	1.632.762.064,00	1.685.000.598,00	1.722.083.028,00	89.320.964,00							1.949.033.416,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.632.762.064,00	1.685.000.598,00	1.722.083.028,00	89.320.964,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.949.033.416,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00							45.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	100 persen	102.280.500,00	85.698.960,00	87.915.800,00	-14.364.700,00							351.720.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	21.644.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	-19.644.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.720.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.986.400,00	4.654.200,00	3.381.800,00	-2.604.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	19.011.500,00	11.000.000,00	6.000.000,00	-13.011.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	24.931.600,00	27.690.760,00	26.680.000,00	1.748.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	20 Laporan	30.707.000,00	37.854.000,00	49.854.000,00	19.147.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			280.000.190,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00							104.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	100 persen	397.611.000,00	328.541.000,00	325.541.000,00	-72.070.000,00							475.302.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	15.530.000,00	14.582.000,00	14.582.000,00	-948.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	377.081.000,00	308.959.000,00	308.959.000,00	-68.122.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			425.302.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	3 unit	51.439.500,00	61.177.000,00	63.365.402,00	11.925.902,00							249.568.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	46.479.500,00	50.207.000,00	45.695.402,00	-784.098,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			179.568.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	4.960.000,00	10.970.000,00	7.670.000,00	2.710.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
224.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerint**				**-**	**100 Persen**	**25.708.000,00**	**25.900.000,00**	**25.900.000,00**	**192.000,00**							**139.470.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	12 Laporan	25.708.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	192.000,00							139.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				70 Laporan	70 Laporan	25.708.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	192.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			139.470.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.4.01.0.00.42.0000	**Kecamatan Serasan Timur**							**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**							**3.702.255.688,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**							**3.702.255.688,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.211.153.616,00**	**2.089.597.901,00**	**2.117.035.074,00**	**-94.118.542,00**							**3.702.255.688,00**	
225.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**90 PERSEN**	**90 PERSEN**	**2.148.657.616,00**	**2.040.899.957,00**	**2.068.337.130,00**	**-80.320.486,00**							**3.438.455.688,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	1.590.372.416,00	1.643.359.157,00	1.670.796.330,00	80.423.914,00							2.353.815.688,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.590.372.416,00	1.643.359.157,00	1.670.796.330,00	80.423.914,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.353.815.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				84 Persen	84 Persen	72.585.200,00	107.290.000,00	107.290.000,00	34.704.800,00							488.040.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	22.991.400,00	25.530.000,00	25.530.000,00	2.538.600,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	13.800,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.386.200,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				36 Laporan	36 Laporan	23.580.000,00	67.360.000,00	67.360.000,00	43.780.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			345.040.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	449.800.000,00	264.866.800,00	264.866.800,00	-184.933.200,00							489.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	23.800.000,00	23.078.800,00	23.078.800,00	-721.200,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	239.388.000,00	239.388.000,00	-180.612.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			441.600.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				84 Persen	84 Persen	35.900.000,00	25.384.000,00	25.384.000,00	-10.516.000,00							107.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	31.100.000,00	20.584.000,00	20.584.000,00	-10.516.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
226.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**62.496.000,00**	**48.697.944,00**	**48.697.944,00**	**-13.798.056,00**							**263.800.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				70 Koordinasi	70 Koordinasi	62.496.000,00	48.697.944,00	48.697.944,00	-13.798.056,00							263.800.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	62.496.000,00	48.697.944,00	48.697.944,00	-13.798.056,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			263.800.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.4.01.0.00.43.0000	**Kecamatan Suak Midai**							**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**							**2.981.703.576,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**							**2.981.703.576,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.066.039.097,00**	**2.113.702.700,00**	**2.148.480.754,00**	**82.441.657,00**							**2.981.703.576,00**	
227.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**15 Orang/bulan**	**2.015.589.997,00**	**2.110.652.700,00**	**2.145.430.754,00**	**129.840.757,00**					**Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah**		**2.590.151.576,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	Orang/bulan 15	1.630.634.397,00	1.664.994.000,00	1.679.772.054,00	49.137.657,00							1.539.200.576,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.630.634.397,00	1.664.994.000,00	1.679.772.054,00	49.137.657,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	102.196.600,00	162.946.576,00	184.663.776,00	82.467.176,00							579.951.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	15.018.800,00	5.381.800,00	5.381.800,00	-9.637.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.200.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	17.517.000,00	71.027.000,00	82.440.000,00	64.923.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	8.049.500,00	8.000.000,00	6.840.000,00	-1.209.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	18.647.300,00	16.401.300,00	16.625.500,00	-2.021.800,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				55 Laporan	55 Laporan	42.964.000,00	62.136.476,00	73.376.476,00	30.412.476,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			257.751.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	254.579.000,00	263.459.724,00	260.652.324,00	6.073.324,00							421.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.170.000,00	3.520.000,00	0,00	-1.170.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	21.303.000,00	14.529.724,00	15.242.324,00	-6.060.676,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	232.106.000,00	245.410.000,00	245.410.000,00	13.304.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			389.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	28.180.000,00	19.252.400,00	20.342.600,00	-7.837.400,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	20.180.000,00	14.742.400,00	15.832.600,00	-4.347.400,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	8.000.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	-3.490.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
228.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**50.449.100,00**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**-47.399.100,00**							**391.552.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	50.449.100,00	3.050.000,00	3.050.000,00	-47.399.100,00							391.552.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	50.449.100,00	3.050.000,00	3.050.000,00	-47.399.100,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			391.552.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.4.01.0.00.44.0000	**Kecamatan Bunguran Batubi**							**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.208.002.895,00**	**-13.923.028,00**							**3.210.979.124,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**							**411.922.424,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**							**411.922.424,00**	
229.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan Keagamaan yang dibina**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**					**Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**		**411.922.424,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				-	100 Persen	0,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00							411.922.424,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	3.822.000,00	3.822.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			411.922.424,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.204.180.895,00**	**-17.745.028,00**							**2.799.056.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.221.925.923,00**	**2.182.433.427,00**	**2.204.180.895,00**	**-17.745.028,00**							**2.799.056.700,00**	
230.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**3,53 Indeks**	**3,53 Indeks 71.10 Persen**	**2.189.083.623,00**	**2.142.610.917,00**	**2.151.221.953,00**	**-37.861.670,00**					**Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**2.260.088.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja PerangkatDaerah				-	74.50 Persen	0,00	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00							27.100.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	1.372.600,00	1.372.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.728.594.623,00	1.749.598.777,00	1.769.307.813,00	40.713.190,00							1.521.588.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.728.594.623,00	1.749.598.777,00	1.769.307.813,00	40.713.190,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.521.588.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				75 Persen	75 Persen	96.133.500,00	126.057.140,00	103.877.140,00	7.743.640,00							290.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	9.620.400,00	7.530.400,00	7.530.400,00	-2.090.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	4.961.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1.639.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	35.632.000,00	37.750.000,00	22.250.000,00	-13.382.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	9.006.000,00	10.001.100,00	10.001.100,00	995.100,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	9.014.500,00	0,00	0,00	-9.014.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	8.999.600,00	27.275.640,00	20.595.640,00	11.596.040,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			46.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	18.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	18.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				100 Persen	100 Persen	298.499.900,00	239.455.000,00	237.755.000,00	-60.744.900,00							340.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	20.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	15.999.900,00	15.890.000,00	14.190.000,00	-1.809.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	279.520.000,00	220.565.000,00	220.565.000,00	-58.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			310.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	65.855.600,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-38.355.600,00							71.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	58.665.600,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-31.965.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	7.190.000,00	800.000,00	800.000,00	-6.390.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
231.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**32.842.300,00**	**39.822.510,00**	**42.936.010,00**	**10.093.710,00**					**Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**		**323.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan				70 Kali	70 Kali	32.842.300,00	39.822.510,00	42.936.010,00	10.093.710,00							323.100.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	32.842.300,00	39.822.510,00	42.936.010,00	10.093.710,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			323.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
232.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**					**Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**		**121.800.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatanyang aktif				-	100 Persen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00							121.800.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			121.800.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
233.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**				**-**	**80 Persen**	**0,00**	**0,00**	**2.423.600,00**	**2.423.600,00**					**Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**		**26.568.700,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaanpenerapan dan penegakan perda danperkada				-	80 Persen	0,00	0,00	2.423.600,00	2.423.600,00							26.568.700,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	2.423.600,00	2.423.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.568.700,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
234.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum**				**-**	**80 Persen**	**0,00**	**0,00**	**5.499.332,00**	**5.499.332,00**					**Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**67.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi pelaksanaanpenerapan dan penegakan perda danperkada				-	80 Persen	0,00	0,00	5.499.332,00	5.499.332,00							67.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	2.720.732,00	2.720.732,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			57.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	2.778.600,00	2.778.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.4.01.0.00.45.0000	**Kecamatan Pulau Tiga Barat**							**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**							**2.733.707.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**							**2.733.707.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.235.378.880,00**	**2.270.840.610,00**	**2.291.084.721,00**	**55.705.841,00**							**2.733.707.600,00**	
235.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.206.203.680,00**	**2.223.159.300,00**	**2.243.403.411,00**	**37.199.731,00**							**2.714.707.600,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.774.018.180,00	1.789.838.600,00	1.790.098.361,00	16.080.181,00							2.055.131.280,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.774.018.180,00	1.789.838.600,00	1.790.098.361,00	16.080.181,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.055.131.280,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	102.965.200,00	105.155.400,00	132.944.750,00	29.979.550,00							129.602.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.963.200,00	16.109.400,00	20.126.750,00	14.163.550,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	13.210.000,00	13.096.000,00	5.596.000,00	-7.614.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.602.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	7.190.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	10.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.152.000,00	0,00	0,00	-4.152.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	72.450.000,00	68.750.000,00	100.022.000,00	27.572.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			89.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	301.959.900,00	315.634.900,00	312.659.900,00	10.700.000,00							490.974.320,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	300.300,00	300.300,00	300.300,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	23.078.600,00	23.078.600,00	20.103.600,00	-2.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	278.581.000,00	292.256.000,00	292.256.000,00	13.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			462.674.320,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.260.400,00	12.530.400,00	7.700.400,00	-19.560.000,00							39.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	4.050.400,00	4.050.400,00	4.050.400,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	23.210.000,00	8.480.000,00	3.650.000,00	-19.560.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
236.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**29.175.200,00**	**47.681.310,00**	**47.681.310,00**	**18.506.110,00**							**19.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	29.175.200,00	47.681.310,00	47.681.310,00	18.506.110,00							19.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	29.175.200,00	47.681.310,00	47.681.310,00	18.506.110,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.4.01.0.00.46.0000	**Kecamatan Pulau Seluan**							**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**							**2.191.555.503,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**							**2.191.555.503,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.700.825.664,00**	**1.799.201.700,00**	**1.813.220.733,00**	**112.395.069,00**							**2.191.555.503,00**	
237.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**				**-**	**69.70 Nilai 85 persen 85 Persen**	**1.650.831.664,00**	**1.775.701.700,00**	**1.789.720.733,00**	**138.889.069,00**							**1.988.031.503,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.380.463.964,00	1.474.354.200,00	1.488.373.233,00	107.909.269,00							1.562.031.503,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.380.463.964,00	1.474.354.200,00	1.488.373.233,00	107.909.269,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.562.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	55 Persen	110.427.000,00	117.190.500,00	117.190.500,00	6.763.500,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	34.090.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-23.690.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	7.512.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-2.112.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.530.000,00	26.710.500,00	26.710.500,00	22.180.500,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	20 Laporan	54.295.000,00	64.180.000,00	64.180.000,00	9.885.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	100 persen	114.516.700,00	136.513.000,00	136.513.000,00	21.996.300,00							140.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	24.988.700,00	16.278.000,00	16.278.000,00	-8.710.700,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	81.528.000,00	111.235.000,00	111.235.000,00	29.707.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	65 persen	45.424.000,00	46.944.000,00	46.944.000,00	1.520.000,00							56.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	35.444.000,00	35.444.000,00	35.444.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	9.980.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	1.520.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	2 Laporan	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00							20.000.000,00	
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
238.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**49.994.000,00**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**-26.494.000,00**							**203.524.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				-	100 PERSEN	49.994.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-26.494.000,00							203.524.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	49.994.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-26.494.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			203.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.4.01.0.00.47.0000	**Kecamatan Pulau Panjang**							**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.737.703.804,00**	**1.800.334.740,00**	**1.814.083.138,00**	**76.379.334,00**							**0,00**	
239.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1 tempat waktu 1 Tepat waktu 1 Tepat Waktu**				**undefined undefined**	**undefined undefined undefinrd undefinrd**	**1.655.521.064,00**	**1.718.152.000,00**	**1.731.900.398,00**	**76.379.334,00**					**Kecamatan Pulau Panjang**		**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu				undefined undefined	undefined undefined	1.455.358.064,00	1.495.014.000,00	1.508.762.398,00	53.404.334,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.455.358.064,00	1.495.014.000,00	1.508.762.398,00	53.404.334,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					undefined undefined	undefined undefined	143.223.000,00	143.223.000,00	143.223.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	21.540.000,00	21.540.000,00	21.540.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				18 Laporan	18 Laporan	111.690.000,00	111.690.000,00	111.690.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tepat waktu				-	undefined undefined	50.140.000,00	73.115.000,00	73.115.000,00	22.975.000,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	32.640.000,00	55.615.000,00	55.615.000,00	22.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tepat waktu				-	undefinrd undefinrd	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
240.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**70 Koordinasi**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**82.182.740,00**	**82.182.740,00**	**82.182.740,00**	**0,00**					**Kecamatan Pulau Panjang**		**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	70 Koordinasi				undefined undefined	undefined undefined	82.182.740,00	82.182.740,00	82.182.740,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	82.182.740,00	82.182.740,00	82.182.740,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	8.01.0.00.0.00.30.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**							**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**							**8.697.408.099,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**							**8.697.408.099,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**10.630.616.919,00**	**9.687.900.981,00**	**10.768.356.179,00**	**137.739.260,00**							**8.697.408.099,00**	
241.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**				**100 Persen 83,55 85 Nilai Persen 83,55 Nilai 85 83,55 Persen Nilai**	**100 Persen 83,55 Nilai**	**4.358.429.638,00**	**4.442.525.751,00**	**4.588.087.997,00**	**229.658.359,00**							**2.876.116.718,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				91,25 Persen	91,25 Persen	6.225.600,00	6.349.600,00	6.349.600,00	124.000,00							42.235.000,00	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	6.225.600,00	6.349.600,00	6.349.600,00	124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			42.235.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	3.436.097.807,00	3.476.859.001,00	3.497.614.199,00	61.516.392,00							2.165.956.118,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.436.097.807,00	3.476.859.001,00	3.497.614.199,00	61.516.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.165.956.118,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				94 Persen	100 Persen	129.840.000,00	172.383.900,00	140.153.400,00	10.313.400,00							141.025.600,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	24.000.000,00	27.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.125.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	8.175.000,00	58.175.000,00	8.175.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	840.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	10.825.000,00	11.283.900,00	11.431.400,00	606.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	77.805.000,00	91.777.000,00	1.777.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			96.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang milik Perangkat Daerah				70 Persen	100 Persen	43.771.619,00	39.501.250,00	128.221.250,00	84.449.631,00							50.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	4 Unit	43.771.619,00	39.501.250,00	128.221.250,00	84.449.631,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa dan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				100 Persen	100 Persen	297.494.612,00	288.452.000,00	302.933.548,00	5.438.936,00							345.900.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	14.800.000,00	19.487.500,00	13.487.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	290.994.612,00	272.252.000,00	282.046.048,00	-8.948.564,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			329.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran				-	72 Persen	445.000.000,00	458.980.000,00	512.816.000,00	67.816.000,00							131.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				9 Unit	9 Unit	38.000.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			43.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	10 Unit	7.000.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	-170.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	417.050.000,00	420.886.000,00	20.886.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			58.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
242.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**-**	**100 Persen**	**1.556.000.000,00**	**1.806.765.000,00**	**2.768.424.000,00**	**1.212.424.000,00**							**3.513.825.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	100 Persen	1.556.000.000,00	1.806.765.000,00	2.768.424.000,00	1.212.424.000,00							3.513.825.000,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				300 Orang	327 Orang	600.000.000,00	645.755.000,00	1.671.855.000,00	1.071.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.940.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				33 Orang	33 Orang	956.000.000,00	1.161.010.000,00	1.096.569.000,00	140.569.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.573.325.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
243.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK**				**75,06 Persen**	**75,06 Persen**	**794.337.881,00**	**794.337.881,00**	**782.554.881,00**	**-11.783.000,00**							**745.711.381,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik				100 Persen	100 Persen	794.337.881,00	794.337.881,00	782.554.881,00	-11.783.000,00							745.711.381,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				9 Orang	69 Orang	695.711.381,00	695.711.381,00	695.711.381,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			695.711.381,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				-	0 Orang	0,00	0,00	5.709.000,00	5.709.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	98.626.500,00	98.626.500,00	81.134.500,00	-17.492.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
244.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF**				**48,72 Persen**	**49,35 Persen**	**191.640.400,00**	**191.640.400,00**	**191.640.400,00**	**0,00**							**165.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan				100 Persen	100 Persen	191.640.400,00	191.640.400,00	191.640.400,00	0,00							165.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				114 Orang	114 Orang	92.172.000,00	92.172.000,00	92.172.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	99.468.400,00	99.468.400,00	99.468.400,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
245.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**697.880.000,00**	**628.338.369,00**	**634.558.369,00**	**-63.321.631,00**							**284.710.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 Persen	100 Persen	697.880.000,00	628.338.369,00	634.558.369,00	-63.321.631,00							284.710.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				50 Orang	80 Orang	0,00	459.763.369,00	459.763.369,00	459.763.369,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			109.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				30 Orang	30 Orang	697.880.000,00	168.575.000,00	174.795.000,00	-523.085.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
246.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.032.329.000,00**	**1.824.293.580,00**	**1.803.090.532,00**	**-1.229.238.468,00**							**1.112.045.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				12 Laporan	12 Laporan	3.032.329.000,00	1.824.293.580,00	1.803.090.532,00	-1.229.238.468,00							1.112.045.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				40 Orang	40 Orang	2.005.040.000,00	853.319.900,00	853.319.900,00	-1.151.720.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.045.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				35 Orang	35 Orang	700.000.000,00	797.413.680,00	765.520.632,00	65.520.632,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				12 Dokumen	12 Dokumen	327.289.000,00	173.560.000,00	184.250.000,00	-143.039.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**							**0,00**	
247.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**							**0,00**	
	-	**-**							**1.000.755.054,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.755.054,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat kepuasan OPD terhadap layanan failitasi dan koordinasi hukum				85.5 Persen	85.5 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				100 Dokumen	100 Dokumen	114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				3 Kasus	3 Kasus	210.240.967,00	0,00	0,00	-210.240.967,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				100 Dokumen	100 Dokumen	114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				690 Dokumen	690 Dokumen	176.136.560,00	0,00	0,00	-176.136.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				3 Kasus	3 Kasus	210.240.967,00	0,00	0,00	-210.240.967,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				690 Dokumen	690 Dokumen	176.136.560,00	0,00	0,00	-176.136.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**1.116.466.375.795,00**	**1.048.202.600.000,00**	**1.056.571.600.000,00**	**-59.894.775.795,00**							**1.770.893.720.493,00**	

BAB 6
PENUTUP



BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KAB. NATUNA

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, dengan tetap berfokus pada tema pembangunan daerah yaitu **"Akselerasi Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah, Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas Antarpulau, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjunjung Nilai-Nilai Budaya".** Perubahan RKPD ini disusun sebagai instrumen penyesuaian kebijakan pembangunan daerah guna memastikan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kondisi aktual serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.

Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih adaptif, efektif, dan terukur. Penyusunannya tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak yang optimal.

Perubahan RKPD disusun untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan, pendanaan daerah, serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan yang sah.

Dalam konteks Perubahan RKPD, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya, capaian kinerja pembangunan, serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut mencakup penajaman target kinerja, pergeseran alokasi anggaran, serta penambahan atau pengurangan program dan kegiatan, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 juga berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam

menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja pembangunan secara optimal, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

6.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan, dan subkegiatan, baik dalam lingkup satu perangkat daerah maupun antarperangkat daerah. Keterpaduan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program serta dapat mendorong optimalisasi pencapaian kinerja pembangunan.

Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kondisi daerah.

Penyusunan dan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Natuna telah memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama guna meningkatkan kualitas perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Perubahan RKPD tidak hanya memuat rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, tetapi juga mencakup kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta rencana pendanaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan program pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal, maka beberapa kaidah pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) **Sebagai acuan perencanaan dan penganggaran**, Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pemanfaatan anggaran daerah secara efektif dan efisien. Seluruh perangkat daerah wajib menindaklanjuti Perubahan RKPD melalui Perubahan Renja Perangkat Daerah.
2) **Sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran**, Perubahan RKPD secara normatif menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya dibahas bersama DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD (R-APBD). Seluruh perangkat daerah agar memastikan konsistensi dengan KUPA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2026.
3) **Sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif**, Perubahan RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
4) **Sebagai pedoman operasional pembangunan**, Perubahan RKPD menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap perangkat daerah.
5) **Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi**, Perubahan RKPD menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan daerah, baik dari aspek pelaksanaan program maupun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6) **Penguatan peran pemangku kepentingan**, seluruh perangkat daerah bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD guna mencapai sasaran pembangunan secara optimal.
7) **Sinkronisasi pendanaan pembangunan**, perlu dilakukan harmonisasi dan sinergi antara program dan kegiatan yang didanai melalui APBD

Kabupaten Natuna, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan APBN, yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

8) **Penguatan monitoring dan evaluasi**, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, Bapperida Kabupaten Natuna berperan dalam melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, maupun Prioritas dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan dengan realisasi yang rendah dilakukan dengan memastikan faktor penghambat di Semester I dapat dimitigasi dan diatasi untuk mencapai target di Semester II.
9) **Penyesuaian melalui Perubahan APBD**, Perubahan APBD Tahun 2026 harus diawali dengan Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi hingga pertengahan tahun anggaran terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi daerah, antara lain:
    a) ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah, pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan;
    b) adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang perlu dimanfaatkan;
    c) terjadinya keadaan darurat atau kondisi luar biasa yang memerlukan penyesuaian kebijakan anggaran;
    d) adanya kebutuhan pergeseran anggaran, perubahan target kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, maupun penambahan program dan kegiatan baru.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal, terarah, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2. KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pendanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga didukung oleh berbagai sumber pembiayaan lainnya, termasuk APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha, antara lain melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bentuk kemitraan lainnya. Diversifikasi sumber pendanaan ini menjadi penting

dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa kaidah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pendanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

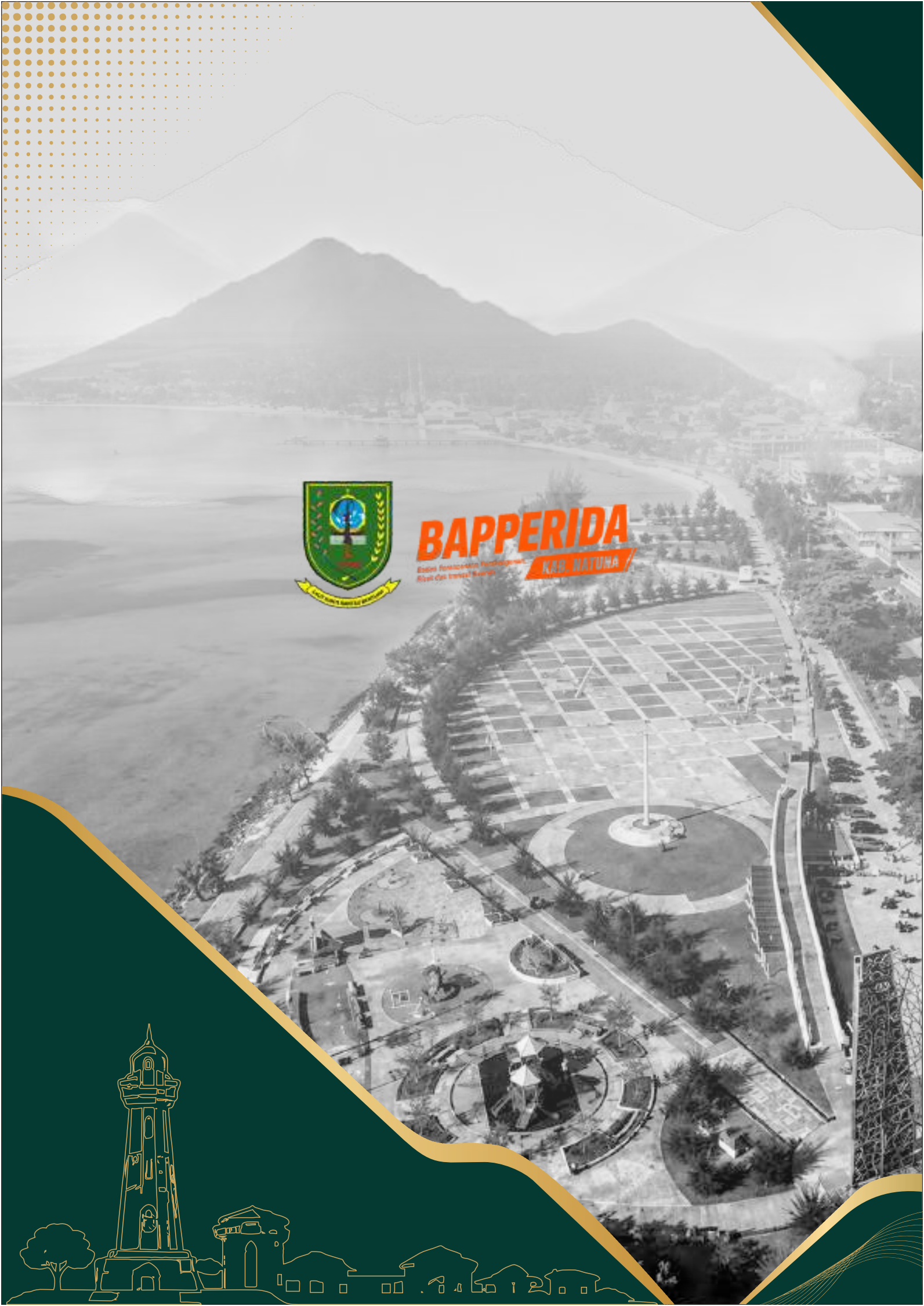
1) **Kesesuaian dengan kapasitas fiskal daerah**, dimana setiap usulan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta mengoptimalkan potensi pendanaan dari APBD Kabupaten Natuna, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan APBN, termasuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
2) **Peningkatan pendapatan daerah**, yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.
3) **Pengelolaan keuangan daerah yang optimal**, dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, serta mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta dan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pembiayaan pembangunan.
4) **Peningkatan iklim investasi daerah**, melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah, serta memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

Dengan penerapan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pendanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat dikelola secara optimal, terarah, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif.

Pada akhirnya, dokumen Perubahan RKPD ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan peran seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah agar tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Natuna menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian data dan informasi, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN


BAPPERIDA
KAB. NATUNA